

PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS DAN LAYANAN
UNTUK MENINGKATKAN KEPUASAN PELANGGAN

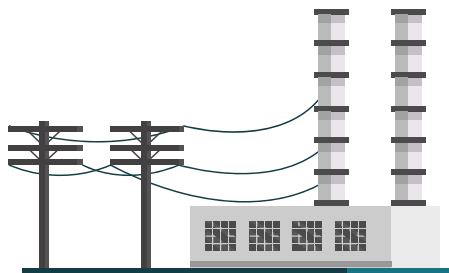
2020 ANNUAL REPORT



KESINAMBUNGAN TEMA

Theme & Continuity





2020



PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN LAYANAN UNTUK MENINGKATKAN KEPUASAN PELANGGAN

"INCREASING THE PRODUCTIVITY AND SERVICE TO IMPROVE CUSTOMER SATISFACTION"

Bagi hampir semua perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan pastinya merupakan sebuah misi. Semakin tercapainya kepuasan pelanggan, maka artinya akan semakin bagus pula pelayanan dan produk atau jasa yang ditawarkan.

Kepuasan pelanggan juga mencerminkan tolok ukur keberhasilan atau kesuksesan dari suatu bisnis. Dengan terus meningkatkan kepuasan pelanggan, sebuah perusahaan atau bisnis pastinya berkesempatan untuk meraih lebih banyak pelanggan dan mencapai target yang telah di tentukan.

Untuk itu pada Tahun 2020 ini tantangan dari PT PLN Enjiniring adalah bagaimana PLNE bisa membangun kepercayaan yang lebih baik lagi kepada para pelanggan yang menjadi mitra bisnis PLNE selama ini dan kepada para pelanggan baru yang menjadi target potensial bagi plne.

PLNE harus meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan diri yang kuat di dalam bidang keilmuan yang dimiliki sebagai landasan di dalam menjalankan bisnis perusahaan. PLNE harus membangun komitmen yang baik dari sisi internal dan eksternal dan konsisten didalam menjaga relasi yang ada serta membangun reputasi perusahaan dan insan PLNE sendiri, agar tercipta relationship trust yang secara otomatis akan membentuk market trust kepada PT PLN Enjiniring.

Pelayanan yang prima dari insan-insan PLNE adalah kunci utama di dalam membentuk kepercayaan kepada mitra yang berefek kepada meningkatnya kepercayaan dan kepuasan para mitra/pelanggan terhadap service dan komitmen yang dijalankan oleh PLNE.

For almost all companies, increasing customer satisfaction is certainly a mission. The more customer satisfaction is achieved; it means that the better the services and products offered.

Customer satisfaction also reflects a measure of the success or success of a business. By continuously improving customer satisfaction, a company or business certainly has the opportunity to reach more customers and achieve the targets that have been set.

For this reason, in 2020 the challenge for PT PLN Enjiniring is how PLNE can build better customers trust who have been PLNE's business partners so far and to new customers who are potential targets for PLNE.

PLNE must increase credibility and strong self-confidence in science field owned as a foundation in running the company's business. PLNE must build a good internal and external commitment as well as consistent in maintaining existing relationships and build the reputation of the company and PLNE's individual, in order to create a relationship that will automatically form market trust to PT PLN Enjiniring.

Excellent service from PLNE personnel is the main key in creating trust in partners which has an effect on increasing partners/customers trust and satisfaction on the services and commitments carried out by PLNE.



Pendahuluan
Introduction



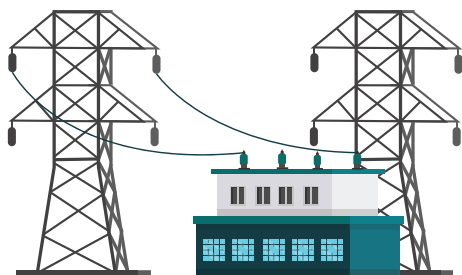
PLN ENJINIRING
WWW.PLNE.CO.ID

PENINGKATAN
KOMITMEN KOMUNIKASI
DAN PERUBAHAN BUDAYA
MENUJU PLNE JUARA

ANNUAL REPORT 2019

УВЕДЕНИЕ

ПОВЫШЕНИЕ
УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ
И КОММУНИКАЦИОННОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ
К НАПРАВЛЕНИЮ
К ЛУЧШЕЙ
ПЛАТФОРМЕ



2019



PENINGKATAN KOMITMEN KOMUNIKASI, DAN PERUBAHAN BUDAYA MENUJU PLNE JUARA

IMPROVEMENT ON COMMUNICATION COMMITMENT, AND CULTURAL CHANGES TOWARDS PLNE JUARA

Peran PLN Enjiniring bertambah besar dengan adanya arahan Pemegang Saham dimana Perseroan diminta untuk memperkuat atau fokus pada core bisnis Perseroan meliputi Basic Design dan Detailed Design. PLN Enjiniring dalam memenuhi arahan tersebut harus melakukan pengayaan dengan membangun kompetensi dan pengalaman Enjinir-Enjinir di PLN Enjiniring pada proyek-proyek Basic Design dan Detailed Design.

Kesiapan PLN Enjiniring dalam proyek-proyek Basic Design dan Detailed Design merupakan kontribusi yang cukup besar bagi proyek-proyek PLN (Persero) dan diharapkan menjadi awal yang baik selaras dengan implementasi Program SOLID PLN (Persero) dimana PLN Enjiniring berperan sebagai enabler dan bersinergi dengan Anak dan Cucu Perusahaan PLN Group.

Peran ini didukung dengan 3C (Commitment, Communication dan Change) oleh seluruh insan organisasi sehingga sinergi dan budaya perusahaan dapat terwujud dengan baik. Diharapkan melalui 3C seluruh Pegawai dapat memberikan kontribusi terbaiknya dalam memberikan produk layanan yang akurat dan berkualitas serta layanan prima untuk memenuhi persyaratan dan harapan Pemberi Kerja sehingga pencapaian target kinerja perusahaan dapat tercapai secara optimal.

The role of PLN Enjiniring is getting bigger with the direction of the Shareholders where the company asked to strengthen or focus on to the company's business core which includes Basic Design and Detailed Design. In order to fulfill that direction PLN Enjiniring must enriched its engineers with competence and experienced in a Basic Design and Detailed Design projects.

PLN Enjiniring readiness in Basic Design and Detailed Design projects is a significant contribution to PLN (Persero) projects and is expected to be a good start in line with the implementation of the PLN (Persero) SOLID Program where PLN Enjiniring acts as an enabler and synergizes with the children and grandchildren of PLN Group companies.

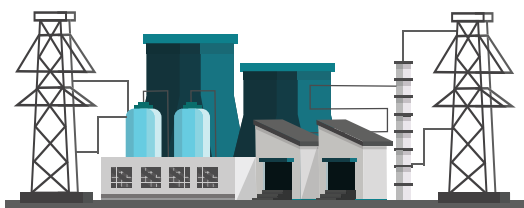
This role is supported by 3C (Commitment, Communication and Change) by all people in the organization so that the synergy and corporate culture can be realized properly. It is hoped that through 3C all employees can contribute their best in providing accurate and good quality service products as well as excellent service to meet the requirements and expectations of the Employer so that the achievement of company performance targets can be optimal.

- Pendahuluan
Introduction
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...



PLN ENJINIRING
Laporan Tahunan
Annual Report **2018**

TAHUN PENINGKATAN KUALITAS
PRODUK DAN SUMBER
DAYA MANUSIA



2018



TAHUN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK DAN SUMBER DAYA MANUSIA

YEAR ENHANCEMENT OF PRODUCT QUALITY AND HUMAN RESOURCES

Seiring dengan bertambahnya tantangan dan target pendapatan pengembangan enjiniring PT PLN Enjiniring 2018 diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan untuk pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan.

Kemajuan yang dicapai oleh perusahaan tidak terlepas dari 3 (tiga) faktor utama, yaitu sumber daya manusia, proses bisnis dan nilai-nilai atau budaya perusahaan. Sumber daya manusia memberikan kontribusi yang penting dalam perkembangan perusahaan. Melalui proses rekrutmen yang selektif dengan berlandaskan pada talenta, kemauan dan karakter serta ditunjang dengan pelatihan yang berkesinambungan, membuat perusahaan memiliki sumber daya yang berkompeten dan berkualitas.

Hal kedua yang tak kalah penting adalah proses bisnis yang berjalan di perusahaan. Dengan pemetaan yang akurat terhadap alur proses bisnis serta konsisten dalam penerapannya menunjukkan perusahaan ingin menciptakan suatu prosedur yang baik dan sistematis dalam menjalankan operasional perusahaan. Dalam rangka mengembangkan bisnis ke depan, PLN Enjiniring selalu berusaha untuk selalu meningkatkan standar dan kualitas produk yang ada.

Faktor ketiga yang sangat penting dalam kemajuan bisnis perusahaan adalah penerapan nilai-nilai atau budaya perusahaan di seluruh unit kerja atau departemen. Nilai-nilai "IPTEC" yang dirumuskan oleh Manajemen & Direksi bukan hanya jargon semata tetapi lebih dari itu, perlu upaya bersama agar mampu dimanifestasikan di kehidupan pekerjaan sehari-hari dan menjadi dasar bagi setiap karyawan di PLN Enjiniring.

Along with the increasing challenges and revenue targets for the development of PT PLN Enjiniring 2018, strategic steps are needed in facing challenges to achieving the set revenue targets.

The progress achieved by the company is inseparable from 3 (three) main factors, namely human resources, business processes and corporate values or culture. Human resources make an important contribution in the development of the company. Through a selective recruitment process based on talent, willingness and character and supported by ongoing training, makes the company have competent and quality resources.

The second thing that is no less important is the business processes that run in the company. With an accurate mapping of the business process flow and consistent in its application shows the company wants to create a good and systematic procedure in carrying out the company's operations. In order to develop the business going forward, PLN Enjiniring always strives to always improve the standards and quality of existing products.

The third factor that is very important in the progress of a company's business is the application of corporate values or culture in all work units or departments. The values of "IPTEC" formulated by Management & Directors are not just jargon but more than that, it requires joint efforts to be able to be manifested in daily work life and become the basis for every employee in PLN Enjiniring.



- 63 **Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Tahunan 2020**
Management Responsibility On Annual Report 2020
- 64 **Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Tahunan 2020**
Management Responsibility On Annual Report 2020
- 65 **Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Tahunan 2020**
Management Responsibility On Annual Report 2020



- 67 **Profil Perusahaan**
The Company Profile
- 68 **Identitas Perusahaan**
Company Identity

- 70 **Riwayat Singkat**
A Brief History
- 70 **Bidang Usaha**
Business Fields
- 73 **Kegiatan Usaha Yang Dijalankan**
Business Activities Undertaken
- 73 **Produk/Jasa Yang Dihasilkan**
Products / Services Produced
- 74 **Jasa Non Enjiniring**
Non-Engineering Services
- 74 **Jasa Lainnya**
Other Services
- 76 **Peta Lokasi Proyek**
Project Location Map
- 78 **Struktur Organisasi**
Organization Structure
- 80 **Visi, Misi dan Budaya Perusahaan**
Vision, Mission and Company Culture
- 82 **Strategi Perusahaan**
Company Strategy
- 89 **Profil Dewan Komisaris**
Profile of The Board of Commissioners
- 98 **Profil Direksi**
Profile of The Board of Directors
- 102 **Profil Karyawan**
Employee Profile
- 102 **Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian**
Employee Composition Based On Employment Status
- 104 **Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan Organisasi**
Employee Composition Based On Organizational Level
- 106 **Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Pendidikan**
Employee Composition Based On Education Level
- 108 **Pengembangan Kompetensi Karyawan**
Employee Competency Development
- 115 **Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan**
Employee Competency Development Costs



Pendahuluan
Introduction

- | | |
|---|--|
| <p>116 Profil Pejabat Eksekutif
<i>Profile of Executive Officers</i></p> <p>117 Struktur Korporasi
<i>Corporate Structure</i></p> <p>117 Kronologi Pencatatan Saham
<i>Chronology of Registered Shares</i></p> <p>117 Kronologi Pencatatan Efek Lainnya
<i>Chronology of Other Securities Registers</i></p> <p>118 Daftar Entitas Anak dan/Entitas Asosiasi
<i>List of Subsidiary Companies and/or Associated Entities</i></p> <p>119 Profil Anak Perusahaan
<i>Subsidiary Profile</i></p> <p>121 Profil Perusahaan Asosiasi
<i>Associated Company Profile</i></p> <p>130 Lembaga Profesi Penunjang
<i>Supporting Professional Agencies</i></p> <p>131 Penghargaan dan Sertifikasi
<i>Award and Certification</i></p> <p>135 Nama dan Alamat Kantor Induk, Perwakilan dan Proyek
<i>Name and Address of Head Office, Representative Office and Project Office</i></p> | <p>141 Strategi Perusahaan
<i>Corporate Strategy</i></p> <p>148 Proyek Unggulan
<i>Leading Projects</i></p> <p>149 Kinerja Operasi Per Segmen Usaha
<i>Operating Performance Per Business Segment</i></p> <p>149 Jasa Enjiniring
<i>Engineering Services</i></p> <p>149 Bidang Pembangkit
<i>Power Plants Sector</i></p> <p>151 Bidang Transmisi dan Distribusi
<i>Transmission and Distribution Sector</i></p> <p>153 Bidang Konstruksi
<i>Construction Sector</i></p> <p>155 Jasa Lainnya
<i>Other Services</i></p> <p>156 Aspek Pemasaran
<i>Marketing Aspects</i></p> <p>156 Strategi Pemasaran
<i>Marketing Strategy</i></p> <p>159 Pangsa Pasar
<i>Market Share</i></p> <p>160 Prospek Usaha 2020
<i>Business Prospect 2020</i></p> <p>163 Strategi Pengembangan Usaha
<i>Business Development Strategy</i></p> <p>166 Rencana Investasi Bisnis Baru
<i>The New Business Investment Plan</i></p> <p>167 Tinjauan Keuangan
<i>Financial Review</i></p> <p>168 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
<i>Consolidated Financial Position Statements</i></p> <p>169 Aset
<i>Assets</i></p> <p>171 Liabilitas
<i>Liabilities</i></p> <p>172 Ekuitas
<i>Equity</i></p> <p>174 Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
<i>Consolidated Statements of Income (Loss) and Other Comprehensive Income</i></p> |
|---|--|

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



- 137** **Analisis dan Pembahasan Manajemen**
Management Discussion and Analysis
- 138** **Posisi PLN Enjiniring di Industri Kelistrikan**
PLN Engineering Position in The Electrical Industry
- 139** **Tinjauan Operasional**
Operational Review

<p>175 Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian <i>Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income</i></p> <p>178 Pos Keuangan dan Lain-Lain Bersih <i>Net Financial Position and Other</i></p> <p>180 Laporan Arus Kas Konsolidasian <i>Consolidated Cash Flows Statements</i></p> <p>180 Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian <i>Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income</i></p> <p>182 Tingkat Kesehatan Perusahaan <i>Company Health Level</i></p> <p>183 Rasio Keuangan <i>Financial Ratios</i></p> <p>185 Struktur Modal <i>Capital Structure</i></p> <p>187 Perbandingan Target dan Realisasi <i>Comparison of Targets And Realization</i></p> <p>190 Proyeksi Tahun 2020 <i>Projection of 2020</i></p> <p>190 Informasi Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan <i>Material Information That Occurs After The Date of The Accountant's Report</i></p> <p>190 Kebijakan Deviden <i>Dividend Policy</i></p> <p>190 Program Kepemilikan Saham Oleh Manajemen dan/Atau Karyawan <i>Share Ownership Program by Management and /or Employees</i></p> <p>191 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum <i>Realization of The Use Of Funds From Public Offering</i></p> <p>192 Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi Atau Restrukturisasi Utang/Modal <i>Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Combinations, Acquisitions Or Debt / Capital Restructuring</i></p>	<p>194 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ Atau Transaksi Dengan Pihak Berelasi <i>Material Transaction Information Containing Conflicts of Interest and / Or Transactions With Related Parties</i></p> <p>195 Transaksi Pihak Berelasi <i>Related Party Transactions</i></p> <p>198 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan <i>Amendments To The Law and Regulations Which Have A Significant Effect On The Company</i></p>
---	--



Sumber Daya Manusia

Human Resources



<p>203 Sumber Daya Manusia <i>Human Resources</i></p> <p>205 Organisasi Pengelola Sumber Daya Manusia <i>Human Resource Management Organization</i></p> <p>206 Profil Manajer Senior SDM dan Umum <i>Senior Manager of HR and General Profile</i></p> <p>206 Fungsi dan Ruang Lingkup Tugas Bidang SDM & Umum <i>Functions and Scope of Duty In The Sector of Human Resources & General Affairs</i></p> <p>207 Kebijakan Rekrutmen Sumber Daya Manusia <i>Human Resources Recruitment Policy</i></p> <p>208 Pengembangan Sumber Daya Manusia <i>Development of Human Resources</i></p> <p>214 Rencana Pelatihan dan Sertifikasi Tahun 2021 <i>Training and Certification Planning 2021</i></p>
--



217 Employee Engagement
Employee Engagement

217 Manajemen Kinerja
Performance Management

219 Kebijakan Penghargaan Kepada Karyawan
Employee Policy To Employees

220 Fasilitas Kesehatan
Health Facilities

221 Program Pensiun
Retirement Program

222 Pengelolaan Hubungan Industrial
Management of Industrial Relations

223 Survei Budaya
Cultural Survey

223 Kesimpulan Hasil Survei
Conclusion of Survey Results

225 Pembinaan Kompetensi dan Karir
Development of Competency and Career

226 Profil Karyawan
Employee Composition Based on Civil Service Status

226 Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian
Employee Profile

229 Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan Organisasi
Employee Composition Based On Organization Position Levels

231 Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Pendidikan
Employee Composition Based On Education Level

233 Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia
Employee Composition by Age

234 Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender
Employee Composition by Gender

236 Biaya Tenaga Kerja
Labor Costs

236 Tingkat Turnover Pegawai
Turnover of Employees



Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Good Corporate Governance



239 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Good Corporate Governance

240 Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information

241 Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Implementation of Corporate Governance

241 Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Commitment to Implementing Corporate Governance

242 Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan
The Purpose of Implementing Good Corporate Governance

243 Landasan Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Platform for Implementing Corporate Governance

249 Penanggung Jawab Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Liability for The Implementation of Corporate Governance

250 Tahapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Stages of Corporate Governance Implementation

251 Road Map Tata Kelola Perusahaan
Road Map Corporate Governance

253 Penilaian (Assessment) Tahun Buku 2020
Assessment for Fiscal Year 2020

254 Penilaian (Assessment) Tahun Buku 2019
Assessment for 2019 Financial Year

- | | |
|--|--|
| <p>255 Sinergi Dengan Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan Dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan
<i>Synergy With The Parent Company and Subsidiaries In The Implementation Of Corporate Governance</i></p> <p>257 Rapat Umum Pemegang Saham
<i>General Meeting of Shareholders</i></p> <p>258 Hak-Hak Pemegang Saham
<i>Shareholder Rights</i></p> <p>259 Kewajiban Pemegang Saham
<i>Shareholder Obligations</i></p> <p>259 Akses Informasi Bagi Pemegang Saham
<i>Access To Information for Shareholders</i></p> <p>260 Wewenang RUPS
<i>Authority of The General Meeting of Shareholders</i></p> <p>260 Tata Cara Pelaksanaan RUPS
<i>Procedure for GMS Implementation</i></p> <p>261 Pelaksanaan RUPS Tahun 2020
<i>Implementation of The 2020 General Meeting of Shareholders</i></p> <p>261 Keputusan RUPS
<i>Resolutions of The General Meeting Of Shareholders</i></p> <p>263 RUPS LPT Tahun Buku 2019
<i>Annual GMS Approval Report For Fiscal Year 2019</i></p> <p>264 Keputusan RUPS LPT Tahun Buku 2019
<i>Resolution of The GMS:</i></p> <p>266 Dewan Komisaris
<i>Board of Commissioners</i></p> <p>266 Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
<i>The Board of Commissioners Duties And Responsibilities</i></p> <p>268 Tabel Pembagian Bidang Tugas Dewan Komisaris
<i>Table of The Board of Commissioners Division of Duties</i></p> <p>279 Kriteria Anggota Dewan Komisaris
<i>The Board of Commissioners Criteria</i></p> <p>281 Board Manual Dewan Komisaris
<i>Board Manual of The Board of Commissioners</i></p> | <p>288 Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris
<i>Policy on Diversity In The Composition of The Board of Commissioners</i></p> <p>291 Komisaris Independen
<i>Independent Commissioner</i></p> <p>291 Kriteria Penentuan Komisaris Independen
<i>Appointment Criteria of Independent Commissioner</i></p> <p>292 Pernyataan Komisaris Independen
<i>Statement of The Independent Commissioner</i></p> <p>294 Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
<i>Concurrent Positions on The Board of Commissioners</i></p> <p>297 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
<i>Share Ownership of The Board of Commissioners</i></p> <p>298 Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris
<i>The Board of Commissioners Conflict Of Interest Management</i></p> <p>300 Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2020
<i>The Implementation of The Board of Commissioners Duties In 2020</i></p> <p>301 Rapat Internal Dewan Komisaris
<i>The Board of Commissioners Internal Meetings</i></p> <p>305 Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi
<i>The Board of Commissioners and The Board Of Directors Joint Meetings</i></p> <p>310 Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris
<i>Board of Commissioners Competency Development</i></p> <p>311 Program Pengenalan Perseroan Bagi Komisaris Baru
<i>Company Introduction Program for New Commissioners</i></p> <p>312 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
<i>The Board of Commissioners Performance Evaluation</i></p> <p>312 Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
<i>Criteria For The Board of Commissioners Performance Evaluation</i></p> |
|--|--|





Pendahuluan
Introduction

- 312** **Prosedur Pelaksanaan Kinerja Dewan Komisaris**
The Board of Commissioners Performance Implementation Procedure
- 312** **Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan KPI**
The Board of Commissioners Performance Assessment Based on KPI
- 313** **Pihak Yang Melakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris**
Parties Who Conducted The Board of Commissioners Performance Assessment
- 313** **Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris**
The Board of Commissioners Performance Assessment Results
- 314** **Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan Assessment Good Corporate Governance (GCG)**
The Board of Commissioners Performance Assessment Based on Good Corporate Governance (GCG)
- 315** **Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris**
Board of Commissioners Performance Assessment Criteria
- 316** **Prosedur Pelaksanaan Assessment Kinerja Dewan Komisaris**
Procedure For Implementing Performance Assessment of The Board of Commissioners
- 316** **Pihak Yang Melakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris**
Parties That Conduct The Board of Commissioners Performance Assessment
- 317** **Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris**
The Board of Commissioners Remuneration Policy
- 317** **Prosedur Penetapan Remunerasi**
Remuneration Determination Procedure
- 317** **Fasilitas Anggota Dewan Komisaris**
The Facilities Given to The Board of Commissioner Members
- 322** **Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Komisaris**
The Board of Commissioners Resignation/ Respection and Dismissal Mechanism
- 325** **Direksi**
Directors
- 325** **Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Direksi**
Duties, Authorities And Obligations Of The Board of Directors
- 328** **Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi**
Scope Of Work and Responsibilities Of Each Board Of Directors Member And The Board Of Directors Duties Distribution
- 328** **Pembagian Tugas Direksi**
Division of The Board Of Directors
- 330** **Kriteria Direksi**
Board of Directors Requirement
- 331** **Penilaian Kemampuan dan Kepatutan**
Fit and Proper Test
- 332** **Board Manual Direksi**
Board Manual Directors
- 332** **Wewenang Direksi**
The Board of Directors Authority
- 334** **Kewajiban Direksi**
The Board of Directors Responsibility
- 335** **Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi**
The Board of Directors Diversity Policy
- 337** **Jumlah dan Komposisi Direksi**
The Board of Directors Composition and Number
- 337** **Dasar Pengangkatan Anggota Direksi**
Primary Point On Appointing Board Of Director Member
- 339** **Hubungan Afiliasi Direksi**
The Board of Directors Affiliate Relationship
- 340** **Kepemilikan Saham Direksi**
The Board of Directors Share Ownership
- 341** **Rangkap Jabatan Direksi**
Directors Double Job
- 342** **Pengelolaan Benturan Kepentingan**
Conflict of Interest Management
- 343** **Benturan Kepentingan**
Conflict of Interst
- 343** **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 2020**
The Board of Directors Duties and Responsibilities Implementation In 2020

- | | |
|---|---|
| <p>344 Rapat Direksi
<i>The Board Of Directors Meetings</i></p> <p>344 Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi
<i>The Board of Directors Meeting Frequency And Attendance</i></p> <p>344 Agenda, Tanggal dan Persiapan Rapat Internal Direksi
<i>The Board of Directors Internal Meeting Preparation Agenda And Date</i></p> <p>352 Program Orientasi Bagi Direksi Baru
<i>Orientation Program for New Board of Directors</i></p> <p>353 Pengembangan Kompetensi Direksi
<i>The Board of Directors Competencies Development</i></p> <p>354 Penilaian Kinerja Direksi
<i>The Board of Directors Performance Assessment</i></p> <p>357 Kebijakan Remunerasi Direksi
<i>Board of Directors Remuneration Policy</i></p> <p>358 Masa Jabatan, Pemberhentian Dan Pengunduran Diri Direksi
<i>The Board of Directors Term of Office, Dismission And Resignation)</i></p> <p>358 Masa Jabatan
<i>Term of Office</i></p> <p>359 Pemberhentian Sewaktu-Waktu Anggota Direksi
<i>Termination of The Member of The Board Of Directors</i></p> <p>361 Pemberhentian Sementara Anggota Direksi
<i>Temporary Discontinuation of Members of The Board of Directors</i></p> <p>363 Pengunduran Diri
<i>Resignation</i></p> <p>364 Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris
<i>Organisation and Committees Under The Board of Commissioners</i></p> <p>364 Sekretaris Dewan Komisaris
<i>The Board of Commisioners Secretary</i></p> <p>365 Tugas Sekretariat Dewan Komisaris
<i>The Duties of The Board of Commissioners Secretariat</i></p> | <p>366 Masa Jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris
<i>The Board of Commissioners Secretary and Its Staff Term of Office</i></p> <p>366 Evaluasi Kinerja Sekretariat Dewan Komisaris
<i>The Board of Commissioners Secretariat Performance Evaluation</i></p> <p>366 Profil Sekretaris Dewan Komisaris
<i>Board of Commissioners' Secretary Profile</i></p> <p>367 Komite Dewan Komisaris
<i>Committee of The Board of Commissioners</i></p> <p>367 Komite Audit
<i>Audit Committee</i></p> <p>373 Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit
<i>Appointment and Dismissal of The Audit Committee</i></p> <p>374 Tugas Komite Audit
<i>Audit Committee Duties</i></p> <p>375 Masa Jabatan Anggota Komite Audit
<i>Audit Committee Members Term of Office</i></p> <p>375 Persyaratan Keanggotaan Komite Audit
<i>Requirements for Audit Committee Membership</i></p> <p>375 Independensi Komite Audit
<i>Independence of The Audit Committee</i></p> <p>378 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko & GCG
<i>Duties and Responsibilities of The Risk Management & GCG Committee</i></p> <p>379 Tata Kerja Komite
<i>Committee Work Procedures</i></p> <p>379 Piagam Komite
<i>Committee Charter</i></p> <p>379 Rencana Kerja dan Penganggaran
<i>Work Plans and Budgeting</i></p> <p>379 Rapat Komite
<i>Committee Meetings</i></p> <p>380 Pelaporan
<i>Reporting</i></p> <p>380 Akses dan Kerahasiaan Informasi
<i>Access and Confidentiality of Information</i></p> <p>380 Evaluasi Kinerja Komite
<i>Committee Performance Evaluation</i></p> |
|---|---|



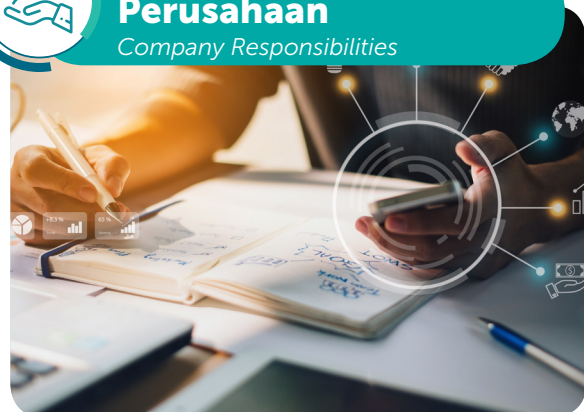


- 381 Organ dan Komite Di Bawah Direksi**
Organs and Committees Below The Board of Directors
- 388 Organ dan Komite Di Bawah Direksi**
Organs and Committees Under The Board of Directors
- 401 Organ dan Komite Di Bawah Direksi**
Organs and Committees Under The Board of Directors
- 401 Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu Dan Risiko**
Procurement Unit, Quality and Risk Management
- 405 Tugas dan Tanggung Jawab**
Duties and Responsibilities
- 416 Sistem Manajemen Terintegrasi**
Integrated Management System Sistem Manajemen Terintegrasi
- 416 Sistem Manajemen Mutu**
Quality Management System
- 423 Peningkatan Kualitas Produk Enjiniring**
Engineering Product Quality Improvement
- 425 Akuntan Publik**
Public Accountance
- 425 Kantor Akuntan Publik**
Public Accounting Firm
- 426 Jasa Lain yang Diberikan Akuntan**
Another Services Given by Accountant
- 427 Sistem Pengendalian Intern**
Internal Control System
- 428 Evaluasi Sistem Pengendalian Intern**
Internal Control System Evaluation
- 429 Kesesuaian Pengendalian Intern Dengan Kerangka COSO**
Compatibility of Internal Control With The COSO Framework
- 430 Sistem Manajemen K3**
Health And Safety System Management
- 432 Sistem Teknologi Informasi**
Information Technology System
- 432 Kebijakan Teknologi Informasi**
Information Technology Policy
- 433 Roadmap Teknologi Informasi**
Information And Technology Roadmap
- 434 Pelaksanaan Teknologi Informasi**
Implementation of Information Technology
- 439 Perkara Hukum yang Dihadapi PLN Enjiniring**
Legal Cases Faced by PLN Enjiniring
- 440 Pedoman Perilaku**
Code of Conduct
- 444 Kebijakan Pengendalian Gratifikasi**
Gratuity Control Policy
- 447 Whistleblowing System**
Whistleblowing System
- 453 Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali**
Information on Major and Controlling Shareholders
- 453 Akses Informasi dan Data Perusahaan**
Access to Companies Information and Data
- 454 Media Informasi Perusahaan**
Information Media to Company
- 454 Website**
Website
- 455 Media Elektronik Interaktif**
Interactive Electronic Media
- 455 Media Sosial**
Social Media
- 455 Media Internal**
Internal Media



Tanggung Jawab Perusahaan

Company Responsibilities



- 457 **Tanggung Jawab Perusahaan**
Company Responsibilities
- 458 **Tanggung Jawab Perusahaan**
Corporate Responsibility
- 458 **Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan**
Social & Environmental Responsibility
- 465 **Corporate Social Responsibility (CSR) Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja**
Corporate Social Responsibility (CSR) Related To Labor, Health and Safety Work
- 465 **Ketenagakerjaan**
Employment
- 470 **Kesehatan**
Health
- 472 **Keselamatan Kerja**
Work Safety
- 474 **Corporate Social Responsibility Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan**
Corporate Social Responsibility Related to Social and Community Development
- 476 **Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Konsumen**
Corporate Social Responsibility Related to Consumer Responsibility
- 478 **Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Negara**
Corporate Social Responsibility Related to Responsibility To The State
- 480 **Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Kreditur**
Corporate Social Responsibility With Responsibility to Creditors
- 481 **Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Pemasok**
Corporate Social Responsibility with Responsibilities To Suppliers



- 483 **Laporan Keuangan**
Financial Report



JEJAK LANGKAH

Milestone



- Pendirian PT PLN Enjiniring.
- *Establishment of PT PLN Enjiniring.*



- Pelaksanaan Proyek Supervisi Konstruksi PLTU Tanjung Tambalong, Kalimantan Barat.
- *Project Supervision Implementation of PLTU(Steam Plant) Construction at Tanjung Tambalong, West Kalimantan.*
- Pelaksanaan Proyek Supervisi Konstruksi I PLTGB Muara Tawar, Jawa Barat
- *Implementation of Supervision Project for PLTGB MuaraTawar Construction I, West Java*



- Pembangunan Independent Power Producer (IPP) PLTMG Prabumulih Kapasitas 2x6 MW.
- *Construction of Independent Power Producer (IPP) Prabumulih PLTMG with a capacity of 2x6 MW 2005*





Pendahuluan
Introduction

- Pembangunan IPP PLTGU Musi, Palembang Kapasitas 3x4,7 MW dan 1x6 MW.
- *Construction of IPP Musi PLTGU, Palembang with a capacity of 3x4.7 MW and 1x6 MW.*
- Pembangunan IPP PLTMG Sako, Palembang Kapasitas 2x6 MW.
- *Construction of IPP Sako PLTMG, Palembang with a capacity of 2x6 MW.*

- Pembangunan IPP PLTU Sarolangun, Jambi Kapasitas 2x7 MW.
- *Construction of IPP Sarolangun PLTU, Jambi with a capacity of 2x7 MW.*

- Penambahan Modal Disetor dari PT PLN (Persero).
- *Paid-in capital addition from PT PLN (Persero).*

2005

2006

2007

2008

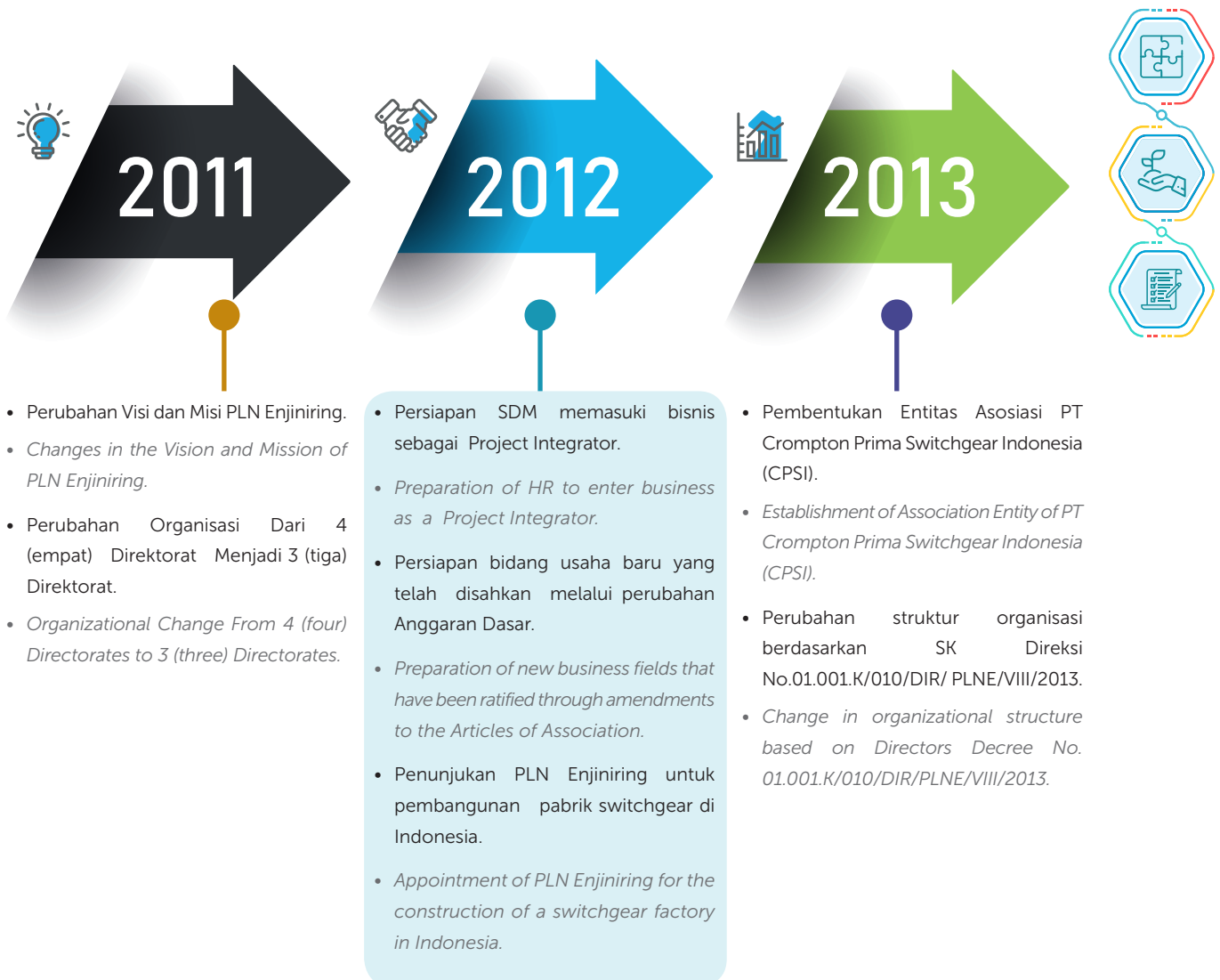
2009

2010

- Perubahan struktur organisasi berdasarkan SK Direksi No.28.001.K/010/DIR/PLNE/XI/2008.
- *Change in organizational structure based on Directors Decree No.28.001.K/010/DIR/PLNE/XI/2008.*
- Pelaksanaan Proyek Desain Enjiniring dan Supervisi Konstruksi High Voltage Direct Current (HVDC) Interkoneksi Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.
- *Implementation of Engineering Design Project and Supervision of High Voltage Direct Current (HVDC) Construction from the Interconnection of Sumatra and Java Islands.*

- Pengangkatan Pegawai Organik I PLN Enjiniring.
- *Appointment of Organic Staff I of PLN Enjiniring.*
- Pelaksanaan Proyek Desain Enjiniring untuk Pembangunan Pembangkit Skala Kecil dan Tersebar di Seluruh Indonesia.
- *Implementation of Engineering Design Projects for the Construction of Scattered-Small Scale Generators throughout Indonesia.*

- Pembayaran Dividen I ke Pemegang Saham.
- *Payment of Dividend I to Shareholders.*





- Penandatanganan Anggaran Dasar PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (Entitas Asosiasi).
- *Signing of the Articles of Association of PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (Association Entity).*
- Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan PT Prima Power Nusantara.
- *Approval of the Establishment of a Subsidiary of PT Prima Power Nusantara.*
- Perubahan struktur organisasi berdasarkan SK Direksi No.10.001.K/010/DIR/PLNE/IX/2014
- *Changes in organizational structure based on the Directors Decree No.10.001.K/010/DIR/PLNE/IX/2014.*
- Penandatanganan kontrak pembangunan CNG Plant Bangkanai, Kalimantan Tengah.
- *Signing of the Bangkanai CNG Plant construction contract, Central Borneo.*
- Jasa Konsultansi untuk Supervisi Design dan Konstruksi PLTU Parit Baru (2x50 MW) Kalimantan Barat dan PLTA Jati Gede (2x55 MW) di Sumedang Jawa Barat.
- *Consultancy Services for Supervision of Design and Construction of Parit Baru PLTU (2x50 MW) West Borneo and Jati Gede (2x55 MW) PLTA in Sumedang, West Java.*
- Jasa Konsultansi untuk Supervisi Konstruksi dan QA/QC PLTU Pangkalan Susu 3 dan 4 (2x200 MW) di Sumatera Utara dan PLTU Takalar 2x100 MW di Sulawesi Selatan.
- *Consultancy Services for Construction Supervision and QA/QC of Pangkalan Susu PLTU 3 and 4 (2x200 MW) in North Sumatra and Takalar PLTU (2x100 MW) in South Sulawesi.*



- Perjanjian Kerjasama PLN Pusat dan PLNE Penyediaan Jasa Pre-Treatment Gas dan CNG untuk keperluan Pembangkit Peaker di Bangkanai, Kalimantan Tengah.
- *Central PLN Cooperation Agreement and PLNE Provision of Gas and CNG Pre-Treatment Services for the requisite of Peaker Generators in Bangkanai, Central Borneo.*
- Ground Breaking Pabrik Air-Insulated Switchgear Tegangan Tinggi dan Tegangan Ekstra Tinggi Pertama di Indonesia yang dimiliki oleh PT CromptonPrima Switchgear Indonesia di Cikande, Banten.
- *Ground Breaking Water Plant - Insulated High Voltage Switchgear and the First Extra High Voltage in Indonesia owned by PT Crompton Prima Switchgear Indonesia at Cikande, Banten.*
- Jasa Konsultan Supporting Konstruksi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Peaker Grati Extension 450 MW, Grati Pasuruan, Jawa Timur.
- *Consultant Services for Supporting Construction of Peaker Grati Extension 450 MW Steam Power Plant (PLTGU) Project, Grati Pasuruan, East Jawa.*



- Pendirian anak perusahaan PT Prima Power Nusantara yang bergerak di bidang usaha dalam bidang investasi, operasi dan pemeliharaan pada sektor ketenagalistrikan dan non ketenagalistrikan, minyak dan gas serta penyediaan peralatan pendukung dalam bidang ketenagalistrikan.
- *Establishment of a subsidiary company of PT Prima Power Nusantara engaged in business in the fields of investment, operations and maintenance in the electricity and non-electricity, oil and gas sectors and the provision of supporting equipment in the electricity sector.*
- Perjanjian kerjasama jasa operasi dan pemeliharaan PLTMG Bangkanai 16x9,7MW tahap supporting antara PLNE dengan PT PLN (Persero) wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
- *Agreement on cooperation in the operation and maintenance service of Bangkanai PLTMG 16x9.7MW in the supporting stage between PLNE and PT PLN (Persero) in South Borneo and Central Borneo.*



- Pengoperasian Proyek CNG Plant Bangkanai, Kalimantan Tengah pada Bulan Maret 2017.
- *Operation of the Bangkanai CNG Plant Project, Central Borneo in March 2017.*
- Penyelesaian pembangunan Pabrik Switchgear PT CPSI dengan realisasi progress mencapai 72% pada Bulan Desember 2017.
- *Completion of the construction of PT CPSI Switchgear Factory with progress realization reaching 72% in December 2017.*
- Pelaksanaan pekerjaan EPC bidang Transmisi dan Gardu Induk oleh PT Prima Power Nusantara (PT PPN) sebagai pengembangan usaha bisnis inti Perseroan.
- *The implementation of EPC work in the field of Transmission and Substation by PT Prima Power Nusantara (PT PPN) as the development of the Company's core business.*

- Peresmian dan Pengoperasian Pabrik Switchgear Tegangan Tinggi (TT) dan Tegangan Ekstra Tinggi (TET) pertama di Indonesia milik PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (PT CPSI) pada Senin, 20 Agustus 2018 di Kawasan Industri Modern Cikande, Banten.
- *Inauguration and Operation of the first High Voltage (TT) and Extra High Voltage (TET) Factory in Indonesia owned by PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (PT CPSI) on Monday, August 20, 2018 in the Cikande Modern Industrial Estate, Banten.*

- Kerjasama PT PLN Enjiniring dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur (UIW NTT) untuk Jasa Konsultasi Studi Interkoneksi dari Sistem Labuan Bajo ke Pulau Bajo
- *Agreement between PT PLN Enjiniring and PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur (UIW NTT) for Interconnection Study Consultation Services from the Labuan Bajo System to Bajo Island*
- Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT PLN Enjiniring dengan GIZ (Deutsche Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit), Fichtner dan Steag dengan bentuk kerjasama terkait Power System and Grid Impact Studies of Renewable Energy Based Power Plant dengan Fichtner, Promoting The Use of Renewable Energy Through Technical Capacity Development dengan GIZ serta Basic and Advance Design of Renewable Energy Based Power Plant dengan Steag.
- *Signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between PT PLN Enjiniring and GIZ (Deutsche Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit), Fichtner and Steag in a form of collaboration related to Power System and Grid Impact Studies of Renewable Energy Based Power Plant with Fichtner, Promoting The Use of Renewable Energy Through Technical Capacity Development with GIZ and Basic and Advance Design of Renewable Energy Based Power Plant with Steag.*



Pendahuluan
Introduction



2020

- Pembangunan PLTS 400 kWp Pulau Sebira – Kepulauan Seribu
- *Construction of 400 kWp PLTS Sebira Island – Seribu Islands*
- Pembangunan pipa gas jalur PK-52 ke PLTGU Tanjung Batu
- *Construction of the PK-52 gas pipeline to PLTGU Tanjung Batu*
- Golden Flag (Bendera Emas) untuk K3 Sektor Industri Treatment Gas dan Peaker CNG Plant Bangkanai dengan hasil capaian 87,34%
- *Golden Flag for health and safety (K3) in Industry Sector for Gas Treatment and CNG Peaker Plant Bangkanai with an achievement of 87.34%*
- BUMN Branding & Marketing Award 2020, Service Development Terbaik
- *BUMN Branding & Marketing Award 2020, Best Service Development*
- Pasokan gas CNG Plant Bangkanai berkontribusi meningkatkan keandalan system kelistrikan Kalimantan Tengah (PLN KITLURKAL)
- *CNG gas from the Bangkanai Plant supply contributes to improving the reliability of the Central Kalimantan electricity system (PLN KITLURKAL)*



KEKUATAN KAMI

OUR STRENGTH

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan satu-satunya Anak Perusahaan yang bergerak di bisnis enjiniring di PLN Group 2. Merupakan perusahaan enjiniring dengan jumlah enjinir terbanyak di Indonesia yaitu 510 orang enjinir dengan pengalaman di bisnis enjiniring lebih dari 15 tahun dan sudah mengerjakan lebih dari 700 kontrak proyek enjiniring dan supervisi konstruksi di bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi 3. Memiliki fasilitas ruang rapat dengan klien sebanyak 22 ruang rapat, engineering software berlisensi, design guideline, dan code and standard yang lengkap untuk pekerjaan basic design 4. Memiliki network pendukung kegiatan enjiniring (SI, AMDAL, UKL/UPL, desain, dan manufaktur) baik di seluruh Indonesia maupun di lingkup internasional 5. Memiliki sertifikat ISO 9001:2018 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 6. Memiliki produk dan layanan terintegrasi (one stop engineering services untuk tahap inisiasi, development, dan operation) 7. Margin yang diperoleh dari bisnis mid stream gas mampu meningkatkan kemampuan finansial sehingga dapat digunakan untuk melakukan pengembangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Is the only PLN Group Subsidiary whose engaged in the engineering business.</i> 2. <i>Is an engineering company with the largest engineers number in Indonesia, namely 510 engineers with more than 15 years of experience in the engineering business and has worked on more than 700 engineering project contracts and construction supervision in the fields of generation, transmission and distribution.</i> 3. <i>Has clients meeting room facilities as many as 22 meeting rooms, licensed engineering software, design guidelines, and complete code and standards for basic design work</i> 4. <i>Have a network to support engineering activities (SI, AMDAL, UKL/UPL, design, and manufacturing) both throughout Indonesia and internationally</i> 5. <i>Certified with ISO 9001:2018 certificate and Occupational Health and Safety Management System (SMK3)</i> 6. <i>Have integrated products and services (one stop engineering services for the initiation, development, and operation stages)</i> 7. <i>The margin obtained from the midstream gas business is able to increase financial capacity so that it can be used for development.</i> |
|--|---|



PROYEK UNGGULAN

LEADING PROJECT



Pendahuluan
Introduction

Nama Proyek <i>Project Name</i>	Nilai Proyek <i>Project Value</i>		Durasi <i>Duration</i>	Lokasi <i>Location</i>
	IDR	USD		
Pengadaan Jasa Konsultansi Untuk Supervisi Konstruksi dan QA/QC Pembangunan PLTU Parit Baru (2x50 MW) <i>Consulting Service Providing for Construction Supervision and QA/QC of PLTU Development of Parit Baru (2x50 MW)</i>	47.027.615.909	5.369.606,51	3 Desember 2013 – 30 Juni 2021	Bengkayang, Kalimantan Barat
Jasa Konsultansi Untuk Supervisi Konstruksi dan QA/QC Pembangunan PLTU Pangkalan Susu 3 dan 4 (2x200 MW). <i>Consulting Service for Construction Supervision and QA/QC of PLTU Development of Pangkalan Susu 3 and 4 (2x200 MW)</i>	40.405.643.504,6	6.278.309,741	16 Desember 2014 – 31 Desember 2020	Pangkalan Susu, Sumatera Utara
Jasa Konsultansi Untuk Supervisi Konstruksi dan QA/QC Pembangunan PLTU Takalar (2x100 MW). <i>Consulting Service for Construction Supervision and QA/QC of PLTU Development of Takalar (2x100 MW)</i>	39.217.323.871	6.184.341,46	Desember 2014 – 30 Juni 2019	Takalar, Sulawesi Selatan
Jasa Konsultansi Untuk Supervisi Desain dan Konstruksi PLTA Jatigede (2x55 MW). <i>Consulting Service for Design and Construction Supervision of PLTA of Jatigede (2x55 MW)</i>	53.024.221.637,761	6.827.576	September 2014 – 31 Desember 2021	Jatigede, Jawa Barat
Jasa Konsultansi Supervisi Desain, Supervisi Konstruksi dan Quality Assurance & Quality Control (QA/QC) Pembangunan Muara Tawar Combined Cycle Power Plant Block 2,3, & 4 Add-On Project	69.620.826.533,5		06 Maret 2017 – 30 Maret 2021	Bekasi, Jawa Barat
Pekerjaan Jasa Konsultansi Project Management Team PLTA Upper Cisokan	123,377,562,124.00		17 Nov 2017 – 17 Nov 2024	Cisokan, Jawa barat
Jasa Konsultansi Update Desain, Supervisi Desain dan Supervisi Konstruksi PLTA Upper Cisokan Pumped Storage (4x260 MW)	334,985,483,326.00		16 Nov 2018 – 16 Dec 2023	Cisokan, Jawa barat

KILAS KINERJA 2020

2020 PERFORMANCE KALEIDOSCOPE

IKHTISAR KEUANGAN
FINANCIAL OVERVIEW
(DALAM JUTA RUPIAH)
(IN MILLION RUPIAH)



Uraian / Description	2020	2019	2018	2017	2016
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian (dalam juta rupiah) <i>Consolidated of Comprehensive Income Statements (in million Rupiah)</i>					
Pendapatan Bersih <i>Net Income</i>	625,344	978,680	1,117,269	848,682	453,932
Beban Langsung <i>Direct Expenses</i>	436,166	717,048	812,914	605,463	297,859
Laba Kotor <i>Gross Profit</i>	189,178	261,632	304,355	243,219	156,073
Beban Usaha <i>Operating Expenses</i>	190,713	136,740	129,098	112,665	107,818
Laba Sebelum Pos Keuangan dan Lain - lain <i>Profit Before Financial Post and Other</i>	-1,535	124,892	175,257	130,554	48,255
Pos Keuangan dan Lain-Lain Bersih <i>Financial Post dan Others Net</i>	21,979	514	6,117	15,614	4,608
Laba Sebelum Pajak <i>Profit before tax</i>	20,444	125,406	169,140	114,940	52,863
Beban Pajak <i>Tax Expense</i>	4,947	7,392	5,056	10,021	1,102
Laba Tahun Berjalan dan Jumlah Laba Komprehensif <i>Profit of the Current Year and Comprehensive Total Profit</i>	15,497	118,014	164,084	104,919	51,761
Pendapatan Komprehensif lain tahun berjalan <i>Other Comprehensive Income of the current year</i>	1,267	679	1,509	3,227	6,655
Jumlah Penghasilan Komprehensif tahun berjalan <i>Comprehensive Income of the current year</i>	32,261	235,349	162,575	108,146	45,106
Jumlah Aset <i>Total Assets</i>	1,163,213	1,165,957	1,245,494	1,031,103	871,601



Jumlah Liabilitas <i>Amount of Liabilities</i>	463,761	496,947	599,838	495,568	444,212
Jumlah Ekuitas <i>Total Equity</i>	699,452	669,010	645,656	535,535	427,389
Investasi pada Entitas Asosiasi <i>Investment in Association Entities</i>	9,851	13,726	26,98	32,053	38,337
Modal Kerja Bersih <i>Net Working Capital</i>	466,221	465,004	421,661	323,838	303,371
EBITDA	74,006	198,944	240,670	167,772	69,940
Rasio <i>Ratio</i>					
Marjin Laba Kotor (%) <i>Gross Profit Margin (%)</i>	0,03	0,13	0,27	0,29	0,34
Rasio Kas (X) <i>Cash Ratio (X)</i>	0,89	0,58	0,69	1,03	0,36
Rasio Lancar (X) <i>Current Ratio (X)</i>	2,22	2,19	1,91	1,97	1,96
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas (X) <i>Ratio of Liabilities to Equity (X)</i>	0,66	0,74	0,93	0,93	1,04
Rasio Liabilitas Terhadap Aset (X) <i>Ratio of Liabilities to Assets (X)</i>	0,4	0,43	0,48	0,48	0,51
Rasio Imbal Hasil Atas Aset (X) <i>Return on Assets Ratio (X)</i>	0,01	0,1	0,13	0,08	0,06
Rasio Imbal Hasil Atas Ekuitas (X) <i>Return on Equity Ratio (X)</i>	0,02	0,18	0,25	0,20	0,12
Rasio Imbal Hasil Atas Pendapatan (X) <i>Revenue Ratio on Revenue (X)</i>	0,02	0,12	0,15	0,12	0,11

TABEL JUMLAH KONTRAK TAHUN 2016 - 2020 (DALAM UNIT KONTRAK)
TABLE NUMBER OF CONTRACTS YEAR 2016 - 2020 (IN CONTRACT UNIT)

Keterangan Explanation	Jumlah kontrak (Internal Eksternal) Number of Contract (Internal & Eksternal)														
	2020			2019			2018			2017			2016		
	Int	Eks	Total	Int	Eks	Total	Int	Eks	Total	Int	Eks	Total	Int	Eks	Total
Kontak Baru New Contracts	75	10	85	87	11	98	118	9	127	91	9	100	116	12	128
Jumlah Total	75	10	85	87	11	98	118	9	127	91	9	100	116	12	128

TABEL PEROLEHAN KONTRAK JASA ENJINIRING (DALAM RUPIAH)
ENGINEERING SERVICES CONTRACT GAINS TABLE (IN INDOONESIAN RUPIAH)

Uraian Description	2020	2019	2018	2017	2016
Internal Internal	115,100.65	164,160.87	910,719.71	513,431.93	490,769.50
Eksternal External	6,136.70	8,321.84	11,061.77	9,825.05	17,460.03
Jumlah Total	121,237.35	172,482.71	921,781.49	523,256.98	508,229.53

IKHTISAR SAHAM

Sampai dengan akhir tahun 2020, PLN Enjiniring tidak memiliki catatan mengenai Ikhtisar pencatatan saham maupun pencatatan efek lainnya, hal ini dikarenakan PLN Enjiniring belum menjadi perusahaan publik.

STOCK OVERVIEW

Until the end of 2020, PLN Engineering does not have a record regarding the Summary of share listings or other securities listings, this is because PLN Engineering has not yet become a public company.

IKHTISAR OBLIGASI

Sampai dengan akhir tahun 2020, PLN Enjiniring tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

DEBENTURE OVERVIEW

Until the end of 2020, PLN Enjiniring did not issue bonds, sukuk and convertible bonds, so there is no information regarding the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest rates, maturity dates and ratings of bonds/sukuk.

Pendahuluan
Introduction

PERISTIWA PT PLN ENJINIRING TAHUN 2020

Important Events in 2020



PLNE Peduli Banjir JABODETABEK
03 Januari 2020

Gambar 1. PLN Enjiniring Peduli Banjir JABODETABEK
Picture 1. PLN Enjiniring Cares for JABODETABEK Floods



PLNE Salurkan Bantuan untuk Banjir Banten
10 Januari 2020

Gambar 2. PLN Enjiniring salurkan Bantuan untuk Banjir Banten
Picture 2. PLN Engineering Distributes an Aid for Banten Flood



Gambar 3. PLN Enjiniring Turut Sukseskan PLN Vendor Meeting 2020
Picture 3. PLN Engineering Participates in the Success of the 2020 PLN Vendor Meeting



Gambar 4. RUPS RKAP PT PLN Enjiniring Tahun 2020
Picture 4. RUPS RKAP PT PLN Enjiniring year 2020



Gambar 5. Rapat Kerja PT PLN Enjiniring Tahun 2020
Picture 5. 2020 PT PLN Enjiniring Meeting



Gambar 6. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Program Magang IKPT
Picture 6. The Cooperation Agreement Signing on the IKPT Internship Program



Dukung Penanggulangan COVID-19, PLNE Lakukan Kegiatan CSR
13 April 2020

Gambar 7. Program CSR Bantuan Penanggulangan COVID-19 di Desa Segarajaya (sekitar PLTGU Muara Tawar)
Picture 7. CSR Program for COVID-19 Response Assistance in Segarajaya Village (around Muara Tawar PLTGU)



CSR Pembangunan PAUD Tahap III
13 April 2020

Gambar 8. Program CSR Bantuan Pembangunan PAUD Tahap III (sekitar CNG Plant Bangkanai)
Picture 8. Phase III PAUD Development Assistance CSR Program (around CNG Plant Bangkanai)





Gambar 9. CEO Message Motivasi Kerja saat COVID-19 Melanda
Picture 9. CEO Message of Work Motivation when COVID-19 Structg



Gambar 10. Ucapan Selamat Ramadhan 1441H
Picture 10. Congratulating on Ramadan 1441 H



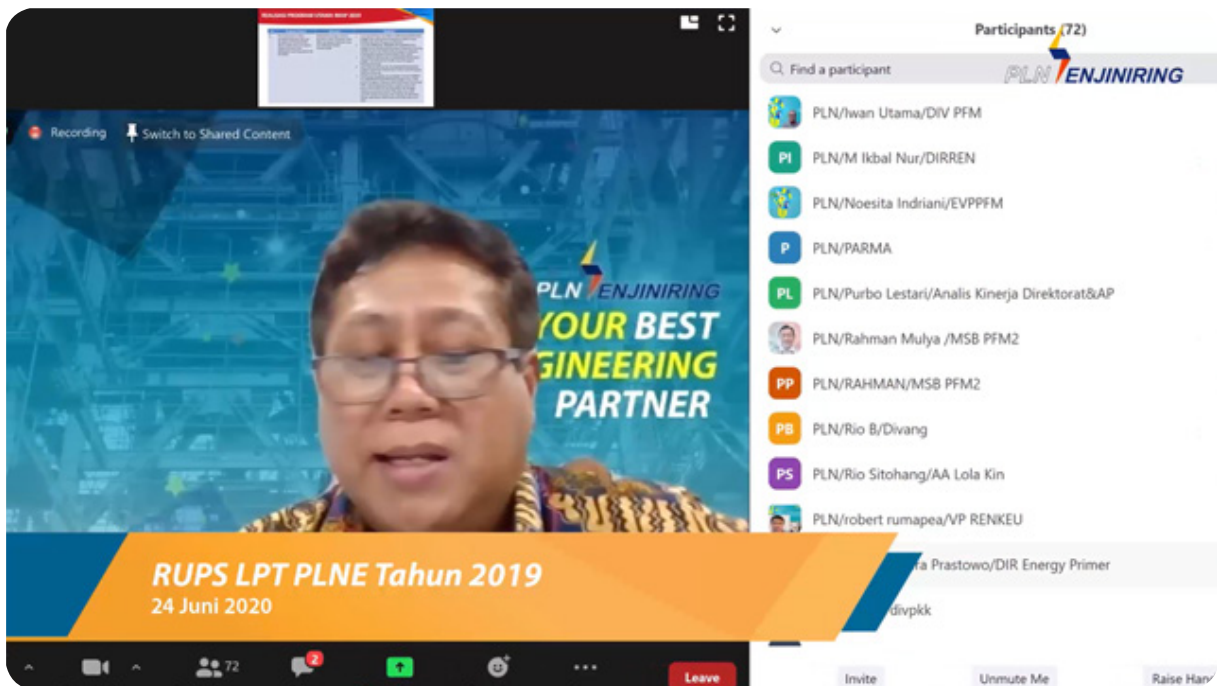
PLNE Dukung Pemerintah dalam Penanggulangan COVID-19
23 April 2020

Gambar 11. Program CSR Bantuan Penanggulangan COVID-19 ke Pusat Krisis Kementerian Kesehatan RI
Picture 11. CSR Program for COVID-19 Response Assistance to the Indonesian Ministry of Health Crisis Center



Halal Bi Halal PLNE Tahun 2020
26 Mei 2020

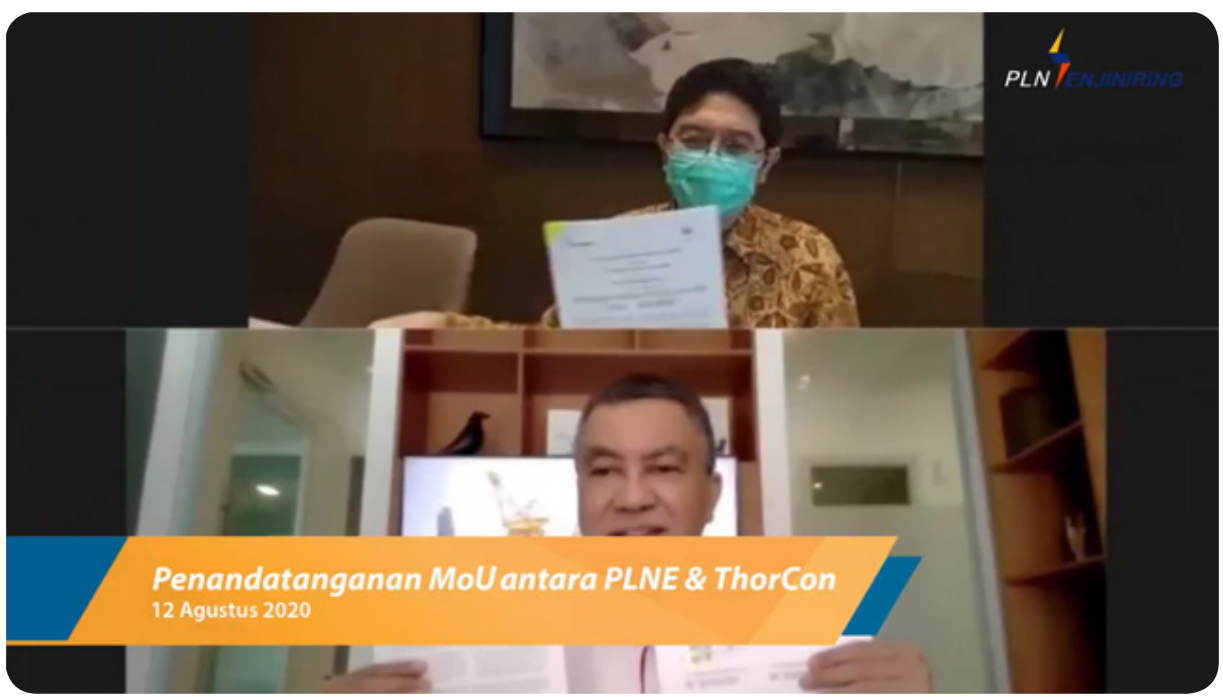
Gambar 12. Halal bihalal PT PLN Enjiniring 2020
Picture 12. Meet and Greet (Halal bihalal) PT PLN Enjiniring 2020



Gambar 13. RUPS LPT PT PLN Enjiniring tahun 2019
Picture 13. RUPS LPT PT PLN Enjiniring year 2019



Gambar 14. Gathering BOC BOD PLN Group
Picture 14. Gathering BOC BOD PLN Group



Gambar 15. Penandatanganan MoU antara PLNE dan ThorCon
Picture 15. MoU Signing between PLNE and ThorCon



Gambar 16. PLN Enjiniring Rampungkan Proyek PLTS Sebira
Picture 16. PLN Enjiniring finished PLTS Sebira Project



Gambar 17. PLNE Gelar Webinar "Terangi Nusantara: Interkoneksi Antar Pulau"

Picture 17. Webinar PLNE on "Terangi Nusantara: Interkoneksi Antar Pulau"



Gambar 18. Coffee Morning Triwulan III

Picture 18. 3rd Quarter Coffee Morning



PLNE Memperoleh Sertifikat Penghargaan Golden Flag SMK3 di CNG Plant Bangkanai
17 September 2020

Gambar 19. PLN Enjiniring Memperoleh Sertifikat Penghargaan Golden Flag SMK3 di CNG Plant Bangkanai
Picture 19. PLN Enjiniring Receives Certificate of Golden Flag on Occupational Health and Safety (SMK3) Award at CNG Plant Bangkanai



PLNE Memperoleh Sertifikat Penghargaan Jasa Konsultan Terbaik ke-5 oleh PLN UIP Pembangkit Sumatera
September 2020

Gambar 20. PLN Enjiniring Memperoleh Sertifikat Penghargaan Jasa Konsultan Terbaik ke-5 oleh PLN UIP Pembangkit Sumatera
Picture 20. PLN Engineering Receives the Best Consultant Service Award Certificate in 5th place for PLN UIP Sumatra Power Plant



Gambar 21. Ulang Tahun PLN Enjiniring ke - 18
Picture 21. PLN Enjiniring 18th Anniversary

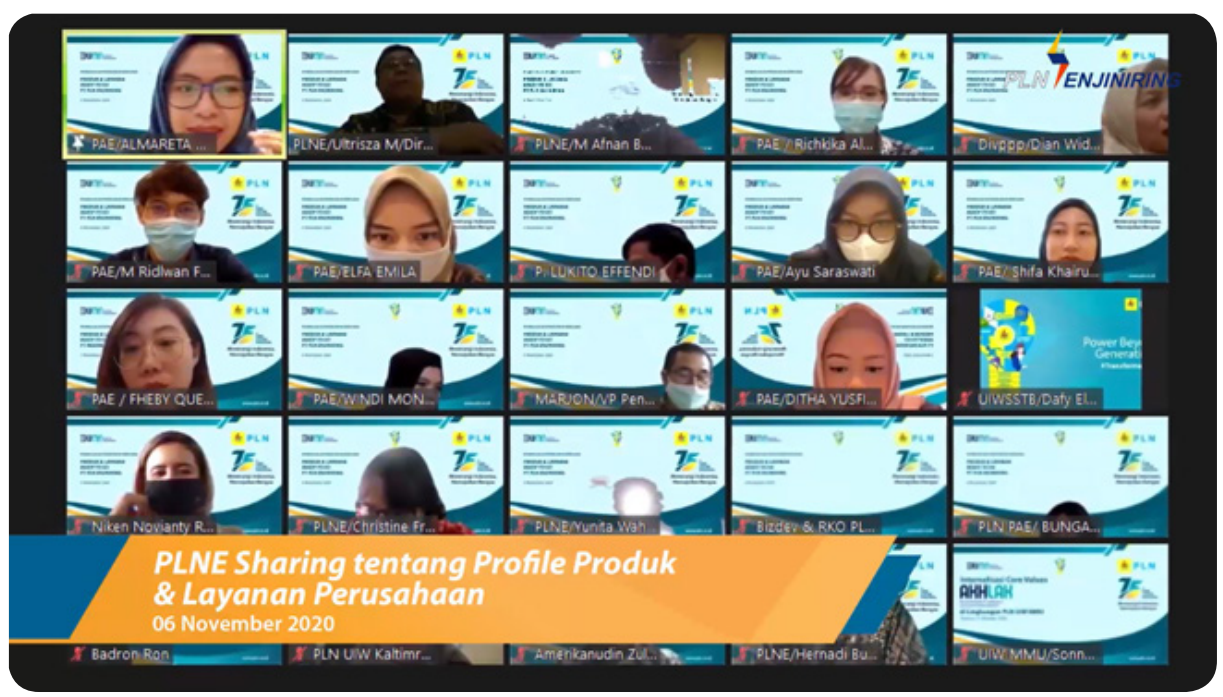


Gambar 22. PLN Enjiniring mendapatkan Penghargaan Service Development pada Ajang
BUMN Branding and Marketing Award 2020

Picture 22. PLN Enjiniring gets an Award on Service Development category at
the 2020 BUMN Branding and Marketing Award



Gambar 23. PLN Enjiniring berpartisipasi dalam Pameran PJB Connect 2020
Picture 23. PLN Enjiniring participates in the 2020 PJB Connect Exhibition



Gambar 24. Knowledge Sharing PLN Enjiniring dengan PAE PLN
Picture 24. Knowledge Sharing between PLN Enjiniring and PAE PLN



Gambar 25. Do'a Bersama Penghujung tahun 2021

Picture 25. United Prayers at the end of 2021

LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

THE BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT

Laporan Manajemen Management Report

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi atas kebijakan, pengurusan, dan usaha Perseroan.

Dalam rangka memenuhi amanah ketentuan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dengan ini Dewan Komisaris PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (Perseroan) menyampaikan Laporan pengawasan atas pelaksanaan Revisi RKAP Tahun 2020.

Pengawasan Dekom pada tahun 2020 difokuskan pada: (i) Pencapaian Kinerja Keuangan, (ii) Kinerja Bidang Pemasaran, (iii) Kinerja Bidang Enjiniring, (iv) KPI Tahun 2020, (v) Pengawasan atas Pengembangan Usaha, (vi) Pengawasan Aspek SDM, (vii) Pelaksanaan Manajemen Mutu, (viii) Pengawasan atas pelaksanaan Manajemen Risiko, (ix) Pengawasan Atas Tata Kelola Perseroan yang Baik (GCG), dan (x) Pengawasan Penyusunan RKAP tahun 2021.

RKAP Tahun 2020 disusun dengan sasaran usaha yang optimistis, namun dalam realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan, disebabkan oleh beberapa kendala dan rintangan, antara lain kondisi perekonomian nasional melemah bahkan tumbuh negatif sebagai akibat dari pandemi COVID-19 sejak bulan Maret tahun 2020, selain itu adanya penurunan belanja capex atau investasi PT PLN (Persero) (PLN) memberikan tantangan yang sangat berat dalam pelaksanaan RKAP tahun 2020, yaitu penurunan perolehan kontrak dari unit-unit usaha PLN. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, akhirnya dilakukan revisi terhadap RKAP tahun 2020.

Based on the provisions of the applicable laws and regulations and and Company's Articles of Association, The Board of Commissioners duties and obligations are to supervise and provide advice for the Board of Directors on policies, management and Company business.

In order to fulfill the laws and regulations mandate as well as the Company's Articles of Association, hereby the Board of Commissioners of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (the Company) submits its supervisory report on the 2020 RKAP Revision implementation.

Board of Commissioners supervision in 2020 is focused on: (i) Financial Performance Achievement, (ii) Marketing Performance, (iii) Engineering Performance, (iv) 2020 Key Performance Index, (v) Business Development Supervision, (vi) Human Resources Aspect Supervision, (vii) Implementation of Quality Management, (viii) Supervision of the implementation of Risk Management, (ix) Good Corporate Governance Supervision (GCG), and (x) 2021 RKAP Preparation Supervision.

The 2020 RKAP is prepared with optimistic business goals, but in it reality the target still cannot be achieved cause by several obstacles such as The overall national economy condition has weakened and even grew negatively as a result of the COVID-19 pandemic since March 2020, In addition, PT PLN (Persero) (PLN) capex spending or investment has been decrease which poses a very formidable challenge in the implementation of the 2020 RKAP, causing a decrease in contract acquisition from PLN's business units. Taking into account these conditions, a revision was finally made to the 2020 RKAP.

Laporan Pengawasan Dekom Tahun 2020 disusun berdasarkan Revisi RKAP tahun 2020, Laporan Manajemen dan Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko tahun 2020, hasil rapat-rapat koordinasi antara Dekom dan Direksi, serta melihat perkembangan usaha Perseroan sampai akhir tahun 2020.

Laporan Pengawasan Dekom Tahun 2020 disusun dengan membandingkan Revisi RKAP Tahun 2020 terhadap laporan-laporan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dh PWC yang terdiri dari :

1. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan 31 Desember 2020, No. 01160/2.10.25/AU.1/03/1130-1/I/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021.
2. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perseroan 31 Desember 2020, No. 20210625022/DC2/DKO/2021, tanggal 25 Juni 2021.
3. Laporan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020, No. 20210625023/DC2/DKO/2021, tanggal 25 Juni 2021.

PENGAWASAN TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Pendapatan

Dalam RKAP tahun 2020 pendapatan Bidang Enjiniring ditargetkan sebesar Rp 648,4 miliar, dengan biaya operasi Bidang Enjiniring sebesar Rp 391,8 miliar, dan Laba Operasi Rp 164,3 miliar.

Pada Revisi RKAP tahun 2020, sasaran ini diturunkan menjadi pendapatan Bidang Enjiniring ditargetkan Rp 298,1 miliar, atau turun 54%. Realisasi pendapatan Bidang Enjiniring tahun 2020 mencapai Rp 271 miliar atau 91% dari target revisi RKAP tahun 2020.

Atas ketidaktercapaian target Pendapatan pada tahun 2020, Dekom telah menyampaikan agar menjadi perhatian serius Direksi, mengingat target tersebut

The 2020 Board of Commissioners Supervision Report is prepared based on the 2020 RKAP Revision, Management Report and Risk Management Implementation Report 2020, the coordination meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors results, as well as seeing the development of the Company's business until the end of 2020.

The 2020 Board of Commissioners Supervision Report was prepared by comparing the 2020 Revised RKAP to audit results reports by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners from PWC consisting of:

1. *Company and Subsidiaries Consolidated Financial Statements December 31st, 2020, No. 01160/2.10.25/AU.1/03/1130-1/I/VI/2021, June 25th 2021.*
2. *Company Performance Evaluation Report December 31st, 2020, No. 20210625022/DC2/DKO/2021, June 25th, 2021.*
3. *Compliance Report on Legislation and Internal Control for the Year Ended December 31st, 2020, No. 20210625023/DC2/DKO/2021, June 25th, 2021.*

SUPERVISION OF FINANCIAL PERFORMANCE ACHIEVEMENT

1. Revenue

In t2020 RKAP, the revenue for the Engineering Sector is targeted at Rp. 648.4 billion, with operating costs for the Engineering Sector of Rp. 391.8 billion, and Operating Profit of Rp. 164.3 billion.

In the 2020 Revised RKAP, this target was reduced to Rp. 298.1 billion (54%) from the previous target for Engineering Sector. IN the realization, a total p 271 billion or 91% of the revised 2020 RKAP target was achieved by the Engineering Sector.

For the non-achievement of the Revenue target in 2020, the Board of Commissioners has conveyed that it should be taken seriously by the Board of Directors, considering that the target is the result of a revised





adalah hasil dari revisi rencana kerja yang seharusnya sudah direncanakan dan disusun secara cermat, realistis dan berdasarkan fakta- fakta kontrak yang sudah ada. Selain itu tidak tercapainya target pendapatan tersebut tidak diimbangi dengan penurunan realisasi Biaya Operasi yang justru mengalami kenaikan cukup signifikan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam berbagai kesempatan Dekom telah meminta kepada Direksi untuk segera melakukan evaluasi atas penurunan pendapatan dan mengambil langkah-langkah strategis secara cepat dan tepat untuk mengendalikan kondisi Perseroan, antara lain dengan mempercepat proses surat penugasan menjadi kontrak dan melaksanakan kontrak-kontrak tepat waktu.

2. Beban Operasi

Realisasi atas beban operasi tidak proporsional dengan realisasi pendapatan yang tidak mencapai target. Realisasi Beban Operasi Bidang Enjiniring sebesar Rp175 miliar, artinya 45,92% diatas target Revisi RKAP tahun 2020 sebesar Rp 119,9 miliar.

Dekom berpendapat bahwa peningkatan Beban Operasi yang tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan mengindikasikan adanya keterlambatan penyelesaian produk enjiniring, dan/atau realisasi biaya proyek melebihi RAB. Untuk itu, Dekom tidak pernah berhenti dan terus mengingatkan agar Direksi melakukan pengendalian biaya, dengan menekan dan mengontrol biaya- biaya, dan dalam menjalankan bisnis Perseroan senantiasa perpegang pada amanah RUPS, yaitu untuk menekan cost sebesar 10%.

Dekom juga berpendapat bahwa pada saat menetapkan sasaran usaha pada Revisi RKAP tahun 2020, seharusnya antar Bidang di Perseroan telah melakukan rekonsiliasi dan koordinasi atas kontrak- kontrak yang sedang atau akan berjalan pada tahun 2020 untuk dimasukkan sebagai program kerja yang nyata dan jelas dalam Revisi RKAP tahun 2020.

work plan that should have been carefully planned and prepared, realistic and based on the existing contracts. In addition, the non-achievement of the revenue target was not followed by a decrease in Operating Costs, which in reality quite the opposite.

In this regard, the Board of Commissioners has asked the Board of Directors, on various occasions, to immediately evaluate the decline in revenue and quickly take strategic and precise steps to control the Company condition, among others, by accelerating the process of assignment letters into contracts and implementing appropriate contracts on time.

2. Operating Expenses

The realization of operating expenses is unproportioned to the revenues realization which do not achieved the target. Realization of Engineering Sector Operating Expenses amounted to Rp175 billion, meaning 45.92% above the 2020 RKAP Revision target of Rp119.9 billion.

The Board of Commissioners think that an increase in Operating Expenses that is not accompanied by an increase in revenue indicates there is a delay in the completion of engineering products, and/or the realization of project costs exceeds the RAB. To that end, the Board of Commissioners never stops and continues to remind the Board of Directors to control the costs, by reducing and controlling costs, as well as running the Company's business always adhere to the mandate of the GMS, which is to reduce costs by 10%.

The Board of Commissioners is think that when business targets in the 2020 RKAP Revision was set, the Company inter-Sectors should have reconciled and coordinated contracts that are currently or will be running in 2020 to be included as a real and clear work program in the Revised RKAP year. 2020.

3. Rasio Operasi

Realisasi Rasio Operasi pada akhir tahun 2020 adalah 100,25%, sehingga tidak berhasil mencapai target Rasio Operasi Revisi RKAP tahun 2020 sebesar 89,65%.

Dekom melihat bahwa Pendapatan pada tahun 2020 tidak berhasil mencapai target, sedangkan beban biaya (biaya tetap dan biaya variabel) tetap keluar meskipun tidak sejalan dengan pendapatan yang diperoleh. Untuk itu terhadap realisasi Rasio Operasi, Dekom memberi pandangan sebagai berikut:

1. Pendapatan dari pekerjaan supervisi konstruksi hendaknya dioptimalkan dengan memperkerjakan tenaga ahli yang diperlukan secara tepat waktu dan tepat kualifikasi/kompetensi, dan mengupayakan penggunaan enjinir junior;
2. Agar diupayakan penggantian biaya untuk pekerjaan yang sudah dikerjakan tetapi kontraknya dibatalkan secara sepihak oleh pemberi kerja;
3. Mandays dari engineer junior diupayakan untuk dapat dibayar oleh pemberi kerja, karena mereka memberikan nilai tambah pada proyek sehingga selayaknya dibayar sesuai kontribusinya.

KINERJA BIDANG PEMASARAN

Bidang Pemasaran merupakan ujung tombak bisnis Perseroan dalam memperoleh kontrak pekerjaan, namun pada tahun 2020 realisasi pekerjaan terkontrak hanya mencapai Rp121.2 miliar, atau baru tercapai 11,03% dari target sebesar Rp1.098 miliar.

Dekom juga melihat bahwa jumlah penugasan yang telah diterima Perseroan dari unit-unit PLN (164 surat penugasan) tidak diimbangi dengan kecepatan untuk merealisasikannya menjadi kontrak. Dekom mencatat hanya 85 penugasan yang sudah terkontrak, dan 25 penugasan dalam proses pembuatan kontrak, sedangkan 54 penugasan dibatalkan oleh pemberi tugas.

3. Operating Ratio

The Operational Ratio realization at the end of 2020 was 100.25%, so it failed to achieve the 2020 RKAP Revision Operation Ratio target of 89.65%.

The Board of Commissioners sees that the 2020 revenue did not reach the target, while the costs (fixed costs and variable costs) still came out even though they were not in line with the income earned. Therefore, regarding the realization of the Operating Ratio, the Board of Commissioners gives the following views:

1. Construction supervision work Revenue should be optimized by hiring the necessary experts needed in time and with the right qualifications/competencies, and seeking to employ junior engineers;
2. In order to seek reimbursement of work costs that has been done but the contract was canceled unilaterally by the employer;
3. Mandays from junior engineers are sought to be paid by the employer, because they add value to the project so they should be paid according to their contribution.

MARKETING PERFORMANCE

Marketing is the Company's business spearhead in obtaining work contracts, but in 2020 the contract work achieved only reached Rp121.2 billion, or only 11.03% of the target of Rp1,098 billion.

The Board of Commissioners also sees that the number of assignments that the Company has received from PLN units (164 assignments) is took more time to become into contracts. The Dekom noted that only 85 assignments had been contracted, and 25 assignments were in the process of making contracts, while 54 assignments were canceled by the assignors.





Terhadap hal ini Dekom telah berulang kali mengingatkan agar dibuat pengendalian terhadap setiap proyek penugasan, dengan melihat status yang sudah kontrak maupun luncuran/*carry over*. Selain itu, mengingat bisnis Perseroan terus mengalami pelemahan karena target penugasan maupun kontrak yang didapat masih jauh di bawah target RKAP tahun 2020, Dekom juga meminta Bidang Pemasaran untuk melakukan perubahan strategi pemasaran, mengevaluasi bidang pemasaran dan melakukan *extraordinary work*.

KINERJA BIDANG ENJINIRING

Produktivitas Bidang Enjiniring (Sudi Kelayakan, Dokumen Lelang, Harga Perkiraan Enjinir) yang diukur dengan ketepatan waktu (*On Time Delivery, OTD*) dan kualitas enjiniring (*Engineering First Pass Yield, EFPY*) belum memenuhi sasaran usaha Perseroan sesuai Revisi KPI tahun 2020.

Dekom melihat produktivitas supervisi konstruksi belum maksimal, karena tidak tersedianya enjinir secara tepat waktu, baik kualifikasi maupun jumlahnya. Rasio *subletting* (penggunaan enjinir non organik) sudah cukup baik, namun demikian Dekom berpendapat bahwa untuk mendukung pencapaian Kepuasan Pelanggan, maka rasio *subletting* masih dapat diperbesar untuk proyek- proyek tertentu yang memerlukan *enjinir* ahli berpengalaman.

KPI TAHUN 2020

Hasil pencapaian realisasi KPI Perseroan Tahun 2020 diperoleh skor proporsional sebesar 91,95% dari total bobot indikator sebesar 95%.

Berdasarkan penilaian tersebut, tingkat kesehatan Perusahaan tahun 2020 digolongkan dalam kondisi "SEHAT" kategori "AA". Untuk kinerja tahun 2020 terdapat 5 indikator kinerja yang tidak tercapai (merah), yaitu:

In this regard, the Board of Commissioners has repeatedly reminded that controls should be made for each assignment project, by looking at the status of the contract or carry-over. In addition, considering that the Company's business continues to experience weakness because the assignment targets and contracts obtained are still far below the 2020 RKAP target, the Dekom also asked the Marketing Division to make changes to the marketing strategy, evaluate the marketing sector and perform extraordinary work.

ENGINEERING PERFORMANCE

Productivity in the Engineering Sector (Feasibility Study, Bidding Documents, Engineer's Estimated Price) as measured On Time Delivery (OTD) and engineering quality (Engineering First Pass Yield, EFPY) has not met the Company's business targets according to the 2020 KPI Revision.

The Dekom sees that the productivity of construction supervision has not been maximized, due to the engineers unavailability in the meantime, both in terms of qualifications and numbers. The subletting ratio (the use of non-organic engineers) is quite good, however, Dekom is of the opinion that to support the achievement of Customer Satisfaction, the subletting ratio can still be increased for certain projects that require experienced engineers.

2020 KEY PERFORMANCE INDEX

The results of achieving the Company's KPI in 2020 obtained a proportional score of 91.95% of the total indicator weight of 95%.

Based on this assessment, the Company's 2020 health level is classified as "HEALTH" in the "AA" category. For 2020 performance there are 5 performance indicators that are not achieved (red), namely:

- a. Pendapatan Proyek Internal: 93,22%;
- b. Engineering First Pass Yield (EFPY): 75%;
- c. Engineering On Time Delivery (OTD): 67,5%;
- d. Efisiensi Biaya Enjinir Non Organik: 87,43%;
- e. Rasio Operasi: 88,17%.

Dekom menyarankan Direksi untuk lebih fokus pada KPI yang merefleksikan bisnis inti Perseroan yang belum tercapai, yaitu Ketepatan Waktu (OTD), Engineering First Pass Yield (EFPY), Pendapatan Proyek Internal PLN, Efisiensi Biaya Enjinir Non Organik, dan Rasio Operasi.

Dekom telah meminta Direksi agar berupaya secara maksimal untuk mengejar target KPI, walaupun diperkirakan indikator kinerja OTD dan EFPY tidak dapat lagi dicapai sepenuhnya pada tahun 2020. Selain itu Direksi diminta mempersiapkan evidence yang diperlukan untuk mendukung penilaian pencapaian kinerja.

PENGAWASAN TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA

1. PT Prima Power Nusantara (PPN)

Untuk mendukung keberlangsungan usaha PPN, pada Triwulan I tahun 2020, Perseroan telah memberikan pinjaman pemegang saham (*shareholder loan* atau SHL) sebesar Rp34 miliar sebagai bentuk *bridging loan* (pinjaman talangan) kepada PPN selama 6 bulan (SHL Tahap 1).

PPN telah melakukan pengembalian SHL sebesar Rp 34 miliar secara bertahap, yaitu Rp 30 miliar pada 15 Desember 2020 dan Rp 4 miliar pada 18 Desember 2020.

- a. Internal Prohct Revenue: 93,22%;
- b. Engineering First Pass Yield (EFPY): 75%;
- c. Engineering On Time Delivery (OTD): 67,5%;
- d. Non Organic Engineer Cost Efficiency: 87,43%;
- e. Operation Ratio: 88,17%.

The Board of Commissioners recommends the Board of Directors to focus more on KPIs that reflect the Company's core business that has not been achieved, namely Punctuality (OTD), Engineering First Pass Yield (EFPY), PLN Internal Project Revenue, Non-Organic Engineer Cost Efficiency, and Operating Ratios.

The Board of Commissioners has asked the Board of Directors to make maximum efforts to pursue the KPI target, although it is estimated that the OTD and EFPY performance indicators can no longer be fully achieved in 2020. In addition, the Board of Directors is asked to prepare the necessary evidence to support the assessment of performance achievement.

BUSINESS DEVELOPMENT SUPERVISION

1. PT Prima Power Nusantara (PPN)

To support the sustainability of the PPN business, in the 2020 first quarter, the Company has provided a shareholder loan (SHL) of Rp. 34 billion as a form of bridging loan to PPN for 6 months (SHL Phase 1)..

PPN has returned SHL of IDR 34 billion in several stages, namely IDR 30 billion on December 15th, 2020 and IDR 4 billion on December 18th, 2020.



2. PT Crompton Power Switchgear Indonesia (CPSI)

Sehubungan dengan rencana aksi korporasi Perusahaan terhadap CPSI, Dekom telah memberikan pendapat/tanggapan melalui surat Dekom kepada Direksi No 084/KOM/PLNE/tahun 2020-R tanggal 23 September tahun 2020 perihal tanggapan terhadap perbaikan atas usulan penyelesaian masalah CPSI, dimana Dekom menyatakan bahwa opsi yang ditempuh Direksi dalam penyelesaian masalah CPSI harus didukung dengan kajian risiko yang komprehensif.

Pembahasan lengkap tentang rencana aksi korporasi Perseroan dalam menyelesaikan masalah CPSI telah disampaikan Dekom kepada Pemegang Saham melalui Laporan Pengawasan Dekom Triwulan III tahun 2020.

3. IPP yang sahamnya dimiliki Perseroan

Perseroan mempunyai saham minoritas pada 3 pembangkit gas dan 1 pembangkit batubara di Sumatera Selatan yang menjual listrik ke PLN Wilayah dalam skema 'kuasi IPP' sejak tahun 2005 dengan kontrak/perjanjian induk jangka panjang, namun pelaksanaan jual-beli listriknya harus diperpanjang setiap tahun.

Terhadap ke-4 pembangkit IPP tersebut, Dekom mengingatkan perlunya dilakukan evaluasi untuk memastikan kelanjutan kepemilikan saham Perseroan di 4 pembangkit IPP tersebut.

Karena kontrak induk 4 pembangkit IPP dengan PLN Wilayah akan berakhir dalam waktu beberapa tahun lagi, Dekom melihat ini merupakan momentum untuk menentukan sikap terhadap kepemilikan saham Perseroan di 4 pembangkit IPP tersebut, apakah akan diperpanjang atau dilepas. Sekiranya Perseroan akan melepas IPP tersebut, hal itu bisa dilihat sebagai tindakan Perseroan dalam mematuhi strategi SOLID PLN Group. Dekom mengingatkan bahwa hal ini juga perlu dilaporkan kepada pemegang saham serta perlu dibuat Kajian Risiko secara komprehensif.

2. PT Crompton Power Switchgear Indonesia (CPSI)

In relation to the Company's corporate action plan against CPSI, the Board of Commissioners has provided an opinion/response through the Board of Commissioners' letter to the Board of Directors No 084/KOM/PLNE/year 2020-R dated September 23, 2020 regarding the response to the improvement of the proposed resolution of the CPSI problem, in which the Board of Commissioners stated that The options taken by the Board of Directors in resolving the CPSI problem must be supported by a comprehensive risk assessment.

A complete discussion on the Company's corporate action plan in resolving the CPSI issue has been submitted by the Board of Commissioners to the Shareholders through the Board of Commissioners' Supervisory Report Quarter III 2020.

3. IPP whose shares are owned by the Company

The Company has a minority stock in 3 gas plants and 1 coal plant in South Sumatra which sells electricity to Regional PLN under a 'quasi IPP' scheme since 2005 with a long-term master contract/agreement, but the implementation of the sale and purchase of electricity must be extended every year.

Regarding the 4 IPP plants, the Dekom reminded the need for an evaluation to ensure the continuation of the Company's share ownership in the 4 IPP plants.

Since the master contract of the 4 IPP power plants with Regional PLN will expire in a few years, the Dekom sees this as a momentum to determine the attitude towards the Company's share ownership in the 4 IPP plants, whether to be extended or released. If the Company were to release the IPP, it could be seen as the Company's action in complying with PLN Group's SOLID strategy. The Board of Commissioners reminded that this also needs to be reported to shareholders and a comprehensive risk assessment needs to be made.

PENGAWASAN TERHADAP ASPEK SDM

Program Perseroan terhadap SDM Perseroan adalah melaksanakan program akselerasi penyesuaian SDM untuk menempati posisi struktural melalui percepatan penyesuaian *grade*, dan dengan memberikan penilaian talenta sangat potensial dan optimal. Pegawai juga diikutsertakan/didaftarkan dalam pendidikan dan latihan penjenjangan *Specialist Education* ("SE") dan *Executive Education* ("EE").

Perseroan melakukan program *mapping* kompetensi seluruh pegawai dan program peningkatan kompetensi melalui sertifikasi kompetensi dan menugaskan para enjinir junior dalam proyek-proyek. Perseroan melakukan penilaian untuk menentukan pegawai *talent* untuk masuk *talent pool*, dan melakukan monitoring *talent* melalui mentor agar para *talent* dapat menghasilkan kinerja maksimal.

Dekom meminta agar program akselerasi penyesuaian SDM dan Program *Mapping* kompetensi ini dilaksanakan dengan target waktu dan dikelola dengan baik, sehingga memberikan hasil yang optimal. Selain itu, peningkatan kompetensi enjinir melalui pengalaman bekerja langsung di proyek, melalui program magang adalah sangat penting.

Selain itu Dekom meminta Direksi terus berupaya bersama PLN Group, untuk membuat Sistem Karir Pegawai Fungsional Berbasis Kepakaran, yang memungkinkan seorang pegawai fungsional menempuh jalur kepakaran namun mempunyai kesempatan pengembangan karir yang setara dengan yang jalur struktural.

PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN MANAJEMEN MUTU

Dalam pelaksanaan manajemen mutu terdapat kendala-kendala antara lain (i) kurangnya tingkat pemahaman terkait proses implementasi SMM ISO 9001:2015 yang tepat dan manfaat implementasi SMM ISO 9001:2015, (ii) diberlakukannya kebijakan Work From Home (WFH)

HUMAN RESOURCES SUPERVISION

The Company's program for the Human Resources is to implement an Human Resources acceleration adjustment program to held structural positions by accelerating grade adjustments, and by assessing potential and optimal talents. Employees are also enrolled in educational and training program at the Specialist Education ("SE") and Executive Education ("EE") levels.

The Company conducts employees competency mapping programs and competency improvement programs through competency certification and assigns junior engineers to projects. The Company conducts an assessment to determine talent within the employees to enter the talent pool, and monitors talent through mentors so that talents can produce maximum performance.

The Dekom requested that the HR adjustment acceleration program and competency mapping program be carried out with a target time and be managed properly, so as to provide optimal results. In addition, improving the engineers competencies through hands-on experience working on projects, through internship programs is very important.

In addition, the Board of Commissioners asked the Board of Directors to continue to work together with the PLN Group, to create an Expertise-Based Functional Employee Career System, which allows a functional employee to take the path of expertise but has career development opportunities at the same time that are on the same level with the structural path.

THE IMPLEMENTATION OF QUALITY MANAGEMENT SUPERVISION

There are obstacles in the implementation of quality management, including (i) the lack of understanding level related to the proper implementation process and the benefits ISO 9001:2015 QMS, (ii) with the Work From Home (WFH) enactment policy as of March 18, 2020, several





per tanggal 18 Maret tahun 2020, beberapa Bidang/ Sub Bidang yang menurunkan tingkatan prioritas pekerjaannya terkait manajemen mutu, (iii) Audit Mutu Internal (AMI) Tahap I Tahun 2020 semula direncanakan pada bulan Maret tertunda karena adanya pandemic COVID-19 dan baru bisa dilaksanakan secara (daring/ online) pada tanggal 30 April 2020 - 15 Mei 2020 dan (iv) Pelaksanaan Audit Mutu Internal masih terbatas pada Prosedur Enjiniring (PE) yang telah disahkan belum menyeluruh sehingga belum optimal.

Terhadap pelaksanaan Manajemen Mutu, Dekom menyarankan agar (i) pelaksanaan Audit Mutu Internal dilaksanakan secara konsisten dan mencakup seluruh proses bisnis Perseroan, (ii) dilakukan updating sesuai perkembangan bisnis Perseroan dan disusun Prosedur Enjinir baru untuk melengkapi bagian proses bisnis yang belum ada Prosedur Enjinir dan (iii) tindakan perbaikan sebagai hasil Audit Mutu Internal dimonitor pelaksanaannya.

PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Dari pelaksanaan Manajemen Risiko tahun 2020 dari sebelas (11) Risiko Korporat terdapat (i) 1 risiko yang masih pada tingkat risiko ekstrem (risiko 9), (ii) 4 risiko pada tingkat risiko tinggi (risiko 1, 2, 3 dan 10), (iii) 5 risiko berada pada tingkat risiko moderat (risiko 4, 5, 6, 7 dan 11), dan 1 risiko berada pada posisi rendah (risiko 8).

Terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko Dekom memberi catatan antara lain: (i) bahwa Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko Triwulan IV tahun 2020 yang telah disampaikan Direksi kepada Dekom pada tanggal 8 Januari tahun 2020 masih mengandung kesalahan dalam menghitung pencapaian kinerja (khususnya untuk risiko no. 2 Target Perolehan Kontrak), (ii) untuk risiko ekstrim dan risiko tinggi, perlu dipastikan dapat diturunkan dari controlled risk menjadi residual risk dan dibuat Action Plan untuk setiap mitigasi risiko., (iii) Risk Owner harus membuat program rinci apa yang akan dikerjakan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan RKAP. Hasil monitoring dilaporkan KSPMR

fields/sub-sectors that lower the priority level of their work related to quality management, (iii) 2020 Internal Quality Audit (AMI) Phase 1 was originally planned in March has to be delayed due to the COVID-19 pandemic and can only be carried out online on April 30, 2020 - May 15, 2020 and (iv) Implementation of Internal Quality Audit is still limited to Engineering Procedures (PE) which has been validated is not comprehensive so it is not optimal.

Regarding the implementation of Quality Management, the Board of Commissioners recommends that: (i) Internal Quality Audit is carried out consistently and covers all of the Company's business processes, (ii) updated according to the Company's business developments and a new Engineering Procedure is prepared to complete the part of the business process that does not have an Engineer Procedure yet and (iii) corrective actions as a result of the Internal Quality Audit are monitored for their implementation.

SUPERVISION OF RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

From the implementation of Risk Management in 2020 out of eleven (11) Corporate Risks namely (i) 1 risk that is still at an extreme risk level (level 9), (ii) 4 risks at high risk level (risiko 1, 2, 3 dan 10), (iii) 5 risks are at a moderate risk level (risiko 4, 5, 6, 7 dan 11), and 1 risk is in a low risk level (risiko 8).

Regarding the implementation of Risk Management, the Board of Commissioners provides notes, among others: (i) Risk Management Implementation Report for the Fourth Quarter 2020 which has been submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners on January 8th, 2020 still contains errors in calculating performance achievements (especially for risk no. 2 Contract Acquisition Target), (ii) for extreme risk and high risk, it is necessary to ensure that it can be reduced by controlling risk to residual risk and an Action Plan is made for each risk mitigation, (iii) The Risk Owner must make a detailed program of what will be done to support the successful implementation of the RKAP. The

kepada Direksi untuk mengetahui efektivitas mitigasi risiko yang dilakukan, (iv) bahwa Manajemen Risiko adalah *early warning* untuk mengenali problem yang akan dihadapi sejak awal, dan mengingatkan agar SDM Perseroan jangan hanya sekedar memperoleh sertifikat ISO 31000:2018, tetapi yang lebih penting memahami dan melaksanakan proses Manajemen Risiko sesuai ISO 31000:2018.

PENGAWASAN TERHADAP PENYUSUNAN RKAP TAHUN 2021

Salah satu tugas Dekom adalah melakukan pengawasan atas penyusunan RKAP 2021 dan pada Tahun 2020 Dekom telah membahas konsep RKAP tahun 2021 bersama Direksi.

Terhadap penyusunan konsep RKAP tahun 2021, Dekom memberikan pendapat dan pandangan bahwa sebelum memasuki tahun 2021, kiranya Direksi memperhatikan secara sungguh-sungguh antara lain:

- a. Bidang Pemasaran harus melakukan perubahan strategi pemasaran, melakukan evaluasi, mencari dan mendapatkan pangsa pasar sebanyak-banyaknya dengan tetap mempertimbangkan nilai dan kualitas proyek, waktu dan kemampuan SDM Perseroan. Perseroan juga harus dapat belajar dari pengalaman pada 2 tahun terakhir, dimana target Bidang Pemasaran selalu tidak mencapai target.
- b. Mengingat penyelesaian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) merupakan salah satu masalah utama dalam pencapaian target pendapatan, dan selalu berulang setiap tahun maka Direksi perlu mengambil kebijakan yang tepat dan langkah-langkah cepat dalam menyelesaikan BAPP.
- c. Program Detailed Design Engineering ("DDE") penting untuk meningkatkan kompetensi Perseroan dalam jangka panjang sesuai RJP Perseroan, namun selama tahun 2020 belum berhasil dilaksanakan dengan baik. Ini merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus Direksi agar RKAP sejalan dengan RJP.

monitoring results are reported by KSPMR to the Board of Directors to determine the effectiveness of the risk mitigation carried out, (iv) Risk Management is an early warning to identify problems that will be faced from the start, and as reminder for to all Company's HR that the ISO 31000:2018 certificate was not just a certificate but more importantly understand and implement the Risk Management process according to ISO 31000:2018.

SUPERVISION OF THE PREPARATION OF THE 2021 RKAP

One of the Board of Commissioners tasks is to supervise the preparation of the 2021 RKAP, and in 2020 the Board of Commissioners has discussed the concept of the 2021 RKAP with the Board of Directors.

Regarding the 2021 RKAP drafting concept, the Board of Commissioners provides opinions and views that before entering 2021, the Board of Directors would seriously pay attention to, among others:

- a. *The Marketing Sector must make changes to the marketing strategy, evaluate, seek and gain as much market share as possible while taking into account the value and quality of the project, the time and capability of the Company's human resources. The Company must also be able to learn from the last 2 years experience, where the Marketing Sector not able to reach the targets.*
- b. *Considering that the completion of the Minutes of Work Completion (BAPP) is one of the main problems in achieving the income target, which always repeated in every year, the Board of Directors needs to take the right policies and take quick steps in completing the BAPP.*
- c. *The Engineering Detailed Design ("DDE") program is important in the improvement of the Company's competence in the long term according to the Company's RJP, but during 2020 it has not been successfully implemented. This is a serious problem that requires special attention from the Board of Directors so that the RKAP is in line with the RJP.*



d. Realisasi Biaya Operasi tahun 2020 tidak sebanding dengan pencapaian target Pendapatannya. Untuk itu Dekom berpendapat perlu ada evaluasi menyeluruh untuk melihat kembali biaya-biaya dan pengeluaran selama tahun 2020, termasuk dalam pemberian SHL kepada anak perusahaan/afiliasi yang harus dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan mempertimbangkan kajian Risiko bagi Perseroan.

d. *The 2020 Operating Costs Realization is not align with the Revenue achievement from the target. For this reason, the Board of Commissioners think that there will be needs to make a thorough evaluation in reviewing costs and expenses during 2020, including in the provision of SHL to subsidiaries/affiliates which must be carried out carefully and considering the risk assessment for the Company.*

PENGAWASAN ATAS TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)

Implementasi *Good Corporate Governance* ("GCG") merupakan suatu syarat kunci dalam mencapai kinerja Perseroan yang berkelanjutan, sehingga implementasi GCG menjadi perhatian utama bagi Dekom.

Berdasarkan hasil *assesment* penerapan GCG yang dilakukan oleh BPKP dengan mengacu pada indikator yang berlaku di lingkungan BUMN, skor pencapaian Perseroan adalah **90,015** dengan predikat **SANGAT BAIK**. Demikian Ringkasan Eksekutif Laporan Tugas Pengawasan Dekom tahun 2020, dapat disampaikan bahwa *performance* Perseroan saat ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak, karena terdapat kecenderungan penurunan kinerja Perseroan dari aspek pendapatan, biaya operasi, perolehan jumlah dan nilai kontrak, *cashflow*, dan dan pencapaian KPI. Kondisi penurunan kinerja ini memerlukan perbaikan secepatnya.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE SUPERVISION

Implements Good Corporate Governance ("GCG") is a key requirement in achieving the Company's sustainable performance, so that the implementation of GCG is a major concern for the Board of Commissioners.

Based on the assessment results of the GCG implementation conducted by BPKP with reference to the applicable indicators in the BUMN environment, the Company's achievement score is 90.015 with the predicate VERY GOOD. Thus the 2020 Board of Commissioners Supervisory Duty Executive Summary Report, it can be conveyed that the current performance of the Company needs attention from all parties, because there is a tendency the Company's performance decrease in terms of revenue, operating costs, the acquisition of the number and value of contracts, cash flow, and the achievement of KPIs. This performance degradation condition requires immediate repair.

Jakarta,
Atas nama Dewan Komisaris
PT PLN Enjiniring



Ahmad Rofik
Komisaris Utama

Jakarta,
On behalf of Dewan Komisaris
PT PLN Enjiniring



Ahmad Rofik
President Commissioner

LAPORAN DIREKSI

THE BOARD OF DIRECTORS REPORT

LAPORAN DIREKSI

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat, Kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas semua usaha yang telah dilakukan dalam pencapaian prestasi yang telah diraih PLN Enjiniring pada tahun 2020. Perusahaan telah membukukan kinerja yang baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020.

Pada tahun 2020 ini PLN Enjiniring mencapai tingkat kesehatan Perusahaan digolongkan dalam kondisi "SEHAT" kategori "AA" dengan nilai 91.95. Di masa yang akan datang, Perusahaan tetap akan berusaha untuk mencapai kinerja terbaiknya.

Perusahaan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah disepakati oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk memenuhi harapan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sustainable business. Sehubungan dengan hal tersebut, kami atas nama Direksi PT PLN Enjiniring melaporkan kinerja Perusahaan tahun 2020, semoga penyajian laporan ini memberikan nilai tambahan yang signifikan baik bagi PLN Enjiniring dan Pemegang Saham.

Pada tahun 2020 ini, mari kita melakukan perubahan yang besar untuk PLN Enjiniring. Dengan strategi bisnis ke depan yang lebih matang, dan tahapan-tahapan yang konkrit dengan tetap memperhatikan kepentingan *sustainability* perusahaan di masa mendatang sehingga menghasilkan eksekusi yang lebih jitu.

THE BOARD OF DIRECTORS REPORT

The honorable Stakeholders and Shareholders, We give thanks to the Almighty God for all the efforts put for the achievements that have been accomplished by PLN Enjiniring in 2020. The company has recorded good performance according to the targets set in the Work Plan and the 2020 Corporate Budget (RKAP)

PLN Enjiniring reached the level of health in 2020. The company was classified in the "HEALTHY" category "AA" with a score of 91.95. The Company will continue to strive to achieve its best performance in the future.

The company is always guided by the vision and mission agreed upon all levels of management and employees to meet the expectations of shareholders and stakeholders in an effort to achieve a sustainable business. We on behalf of the Board of Directors of PT PLN Enjiniring report the Company's performance in 2020. We Hope that the presentation of this report will provide significant additional value for both PLN Enjiniring and Shareholders.

In 2020, let's make a big change for PLN Enjiniring. With a more mature future business strategy, and tangible steps with regard into the company's sustainability interests in in the future to produce a more precise execution.



STRATEGI BISNIS PERUSAHAAN

Di tahun 2020 ini, program kerja seluruh Bidang akan terintegrasi. Dimulai dari Bidang Pemasaran yang akan menjadi *lead*. Dengan program **"Everybody is a Marketer"**, yang mana seluruh insan PLN Enjiniring akan turut serta berkontribusi untuk memasarkan, mengenalkan, dan meningkatkan produk-produk Enjiniring tidak hanya di pasar internal PLN Group tetapi juga di pasar eksternal.

Selanjutnya didukung oleh Bidang Enjiniring dengan pelayanan yang andal, serta SDM yang berkompeten. Dan seluruh Bidang lain yang akan *mensupport* tercapainya sebuah sistem pelayanan PLNE yang profesional dan memuaskan pelanggan, sehingga kepercayaan pelanggan akan meningkat.

Selain itu, dengan adanya pegawai-pegawai baru, maka kami berharap akan ada inovasi-inovasi yang lahir dari pemikiran-pemikiran milenial, Inovasi yang mendukung tercapainya target PLNE dan PLN Group, khususnya pada bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) dan *Electric Vehicle* atau Kendaraan Listrik.

Inovasi-inovasi ini juga tentunya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasi PLNE yang ditargetkan sebesar 10%. Tentunya dengan mempertimbangkan implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM) dalam pengelolaan risiko perseroan.

KINERJA KEUANGAN TAHUN 2020

Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, kinerja PLN Enjiniring tahun 2020 telah menunjukkan hasil yang baik. Perusahaan berusaha memenuhi harapan Pemegang Saham (shareholders) dengan pencapaian kinerja sesuai target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Kinerja Keuangan pt PLN Enjiniring di 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut ;

- 1. Pendapatan Usaha** pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 625,34 Milyar atau mencapai 90,42% dari target RKAP Triwulan IV tahun 2020. Hal ini disebabkan mayoritas oleh beberapa dokumen penyerahan dan progres pekerjaan yang masih

COMPANY BUSINESS STRATEGY

In 2020, work programs for all fields will be integrated. Starting from the Marketing Field who will be the lead. With "Everybody is a Marketer" as the program, which all PLN Enjiniring personnel participating and contributing to marketing, introducing, and improve Engineering products not only in the PLN Group internal market but also in the external market.

Furthermore, it is supported by the Engineering Sector with reliable services, and competence. And all other fields that will support the achievement of a professional and satisfying PLNE service system, so that customer trust will increase.

In addition, with the new employees, we hope that there will be innovations born from millennial thoughts, Innovations that support the achievement of PLNE and PLN Group's targets, especially in New Renewable Energy (EBT) fields and Electric Vehicles.

These innovations are also, of course, expected to increase PLNE's operational efficiency, by 10%. by considering the implementation of Enterprise Risk Management (ERM) in managing company risk.

2020 FINANCIAL PERFORMANCE

PLN Enjiniring's performance in 2019 has shown good results even with all those various challenges and opportunities. The company is able to meet the expectations of shareholders by performing achievements according to the target of the Company's Work Plan and Budget (RKAP). The 2020 Financial Performance of PT PLN Enjiniring can be described as follows;

- 1. Business Revenue in 2020 is IDR 625.34 Billion** or reaching 90.42% of the 2020 Quarter IV RKAP target. This is due to the majority of several documents submission and work progress that are still in the administrative process on

dalam proses administrasi di pihak pemberi kerja, beberapa pekerjaan yang sudah selesai namun tidak bisa ditagihkan karena kontrak perjanjian pekerjaan belum terelease, selain itu juga ada beberapa penugasan yang ditargetkan menjadi kontrak pada Tahun 2020 namun proses terkontrak tidak berlanjut.

2. **Beban Usaha atau Beban Operasi** dalam kegiatan jasa enjiniring terdiri atas biaya produksi, biaya pemeliharaan, biaya kepegawaian, biaya administrasi & umum dan biaya penyusutan. Pada Pada tahun 2020, Perusahaan membukukan Beban Usaha sebesar Rp 190,71 miliar, meningkat 39,47% dibandingkan tahun 2019. Peningkatan beban usaha ini khususnya yang signifikan adalah pada beban gaji dan kesejahteraan karyawan hal ini disebabkan oleh adanya pengangkatan pegawai yang sudah dilakukan secara penuh pada akhir tahun 2019.
3. Selain itu pada tahun 2020 perusahaan juga menerapkan PSAK 71 tentang instrumen keuangan yang berdampak pada kerugian penurunan piutang usaha.
4. **Realisasi Laba (Rugi) Periode Berjalan**, target RKAP laba pada tahun 2020 sebesar Rp 56,07 milyar, namun realisasi pada tahun 2020 perusahaan mendapatkan laba pada periode tahun berjalan sebesar Rp 15,49 milyar, atau sekitar 27,64% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena pendapatan belum memenuhi target yang ditetapkan sedangkan mutasi biaya tidak bisa dihindari, baik biaya operasional tetap maupun tidak tetap.

the employer's side, some work that has been completed but cannot be billed because the work agreement contract has not been released, besides that there are also several assignments that are targeted to become working contracts in 2020 but the contracting process does not continue.

2. **Business Expenses or Operating Expenses in engineering service activities consist of production costs, maintenance costs, employee costs, general & administrative costs and depreciation costs.** In 2020, the Company recorded Operating Expenses of IDR 190.71 billion, an increase of 39.47% compared to 2019. This increase in operating expenses, especially significant is in the salary and welfare expenses of employees, this is due to the full employment at the end of 2019.
3. In addition, in 2020 the company also implemented PSAK 71 regarding financial instruments that have an impairment impact loss on trade receivables.
4. **Profit (Loss)Realization for the Period, RKAP** profit target in 2020 is IDR 56.07 billion, but the 2020 realization, the company earned a profit in the current year period of IDR 15.49 billion, or around 27.64% of the target set. This is because the income has not met the target set while the cost mutation is unavoidable, both fixed and variable operational costs.



KINERJA NON KEUANGAN 2020

Direksi berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Hal ini tercermin dari upaya Perusahaan melakukan pengelolaan hubungan pelanggan dan pengelolaan komplain pelanggan.

Dalam menjalankan operasional usaha, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020, jumlah sumber daya manusia PT PLN Enjiniring secara keseluruhan adalah sebanyak 743 orang terdiri dari 10 pegawai Tugas Karya PT PLN (Persero)

2020 NON FINANCIAL PERFORMANCE

The Board of Directors is committed to improving services to the customers. This is reflected in the Company's efforts to manage customer relationships and to manage customer complaints.

PLN Enjiniring is supported by human resources in carrying out its business operations, who are equipped with skills and competencies according to their duties and responsibilities. In carrying out its business operations, as



terdiri dari 1 orang Sekretaris Perusahaan (SETPER), 1 orang Kepala Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu, & Risiko (KSPMR), 1 orang Kepala Satuan Pengawasan Intern (KSPI), 2 orang Manajer Senior (MS KONS dan MS TND), 1 orang Manajer (MAN BUS), 1 orang Asman (ASMAN SAR), 1 orang Fungsional II (TND) dan 2 orang fungsional V (SPMR dan SPI). Kemudian 306 pegawai Organik PT PLN Enjiniring, 59 orang tenaga kerja pendukung (*outsourcing*) dari PT Haleyora Powerindo, 368 orang berstatus sebagai tenaga kerja dengan kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Perusahaan terus meningkatkan engagement pegawai melalui berbagai kegiatan, termasuk mengadakan acara coffee morning yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Berbagai program pelatihan dan pengembangan telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja pegawai. Sedangkan pada aspek pengakuan masyarakat/*stakeholder* atas pengelolaan Perusahaan, PLN Enjiniring telah mendapatkan berbagai penghargaan. Penghargaan yang diperoleh Perusahaan antara lain Top 5 Electrical Service Company, Indonesia Best Electricity Award. SNI Award 2018 – Peringkat Perunggu, Sertifikat dan Bendera Emas SMK 3 pada Site CNG Plant Bangkanai dan Penghargaan BUMN Branding dan Marketing Award 2020 kategori Service Development Terbaik.

ASPEK PRODUKSI TAHUN 2020

Hingga Triwulan IV tahun 2020 bidang pembangkit melaksanakan 114 pekerjaan, bidang Konstruksi melaksanakan 50 pekerjaan, dan bidang Transmisi dan Distribusi melaksanakan 84 pekerjaan. Total pekerjaan yang dilaksanakan Direktorat Enjiniring Triwulan IV ini adalah 248 pekerjaan, serta terdapat 110 pekerjaan berstatus penutupan kontrak.

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)

Dalam kesempatan ini kami laporkan terkait KPI PT PLN Enjiniring. KPI terdiri dari 5 (lima) perspektif sesuai Kontrak Manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Perusahaan adalah sebagai berikut :

of 2020 4th Quarter, the total number of human resources of PT PLN Enjiniring is 743 people, consists of 10 PT PLN (Persero) Work Tasks employees with 1 Corporate Secretary (SETPER) person, 1 Head of Procurement, Quality & Risk Management Unit (KSPMR), 1 Head of Internal Control Unit (KSPI), 2 Senior Managers (MS KONS and MS TND), 1 Manager (MAN BUS), 1 Assistant Manager (ASMAN SAR), 1 Functional II (TND) person and 2 people of functional V (SPMR and SPI). Then 306 PT PLN Enjiniring organic employees, 59 outsourced workers from PT Haleyora Powerindo, 368 people with with a Specific Time Work Agreement contract status.

*The company continues to improve employee engagement through various activities, including holding a coffee morning which is routinely held every month. Various training and development programs have been carried out in order to improve employee competency and work quality. Meanwhile, in the aspect of public/*stakeholder* recognition for the management of the Company, PLN Enjiniring has received various awards. The awards received by the Company include the Top 5 Electrical Service Company, Indonesia Best Electricity Award. SNI Award 2018 - Bronze Rating, SMK 3 Certificate and Gold Flag at the Bangkanai CNG Plant Site and the 2020 BUMN Branding and Marketing Award for the Best Service Development category.*

2020 PRODUCTION ASPECTS

Until the fourth quarter of 2020, the power plant sector carried out 114 jobs, the Construction sector carried out 50 jobs, and the Transmission and Distribution sector carried out 84 jobs. The total work carried out by the Directorate of Engineering in the fourth Quarter is 248 jobs, and there are 110 jobs with contract closing status.

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)

We will be reporting the KPI of PT PLN Enjiniring in this occasion. KPI consists of 5 (five) perspectives according to the Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Company's Shareholders, that follows :

1. Perspektif Fokus Pelanggan
2. Perspektif Efektivitas Produk dan Proses
3. Perspektif Fokus Tenaga Kerja
4. Perspektif Keuangan dan Pasar
5. Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan

KPI Manajemen PT PLN Enjiniring pada tahun 2020 mendapatkan skor 91,95 dari total bobot indikator sebesar 100 (masuk pada golongan perusahaan yang SEHAT, kategori AA) dengan pencapaian masing-masing indikator adalah Fokus Pelanggan sebesar 25,83, Efektivitas Produk dan Proses sebesar 29,19, SDM sebesar 3,99, Keuangan dan Pasar sebesar 28,05, Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan sebesar 4,89. Skor KPI ini merupakan hasil perhitungan yang telah diverifikasi (*audited*) untuk tahun 2020.

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI

Direksi menyadari bahwa pencapaian kinerja dan prestasi yang telah diraih oleh PLN Enjiniring tidak terlepas dari berbagai kendala. Namun demikian, Perusahaan telah berhasil melakukan upaya kebijakan terhadap kendala yang ada sehingga tidak mempengaruhi kinerja Perusahaan secara signifikan.

Kendala-kendala yang dihadapi Perseroan di 2020 berasal dari pihak eksternal dan internal. Kendala eksternal antara lain adalah Pandemi Covid-19 yang berimbas kepada bisnis perusahaan, munculnya perusahaan konsultan baru sebagai pesaing dengan *billing rate* rendah yang tidak mencerminkan kualitas sehingga menyebabkan penurunan harga pasar dan perubahan nilai kurs yang mempengaruhi siklus kas bisnis enjiniring. Sedangkan, kendala internal utama terkait dengan kurangnya enjinir yang berpengalaman untuk mendukung perkembangan bisnis. Di samping itu, Perusahaan merupakan pemain baru dalam bisnis EPC dan IPP sehingga belum memiliki pengalaman yang cukup.

Untuk mengatasi kendala-kendala eksternal, Perusahaan telah melakukan strategi strategi antara lain dengan memitigasi risiko, melakukan efisiensi

1. *Customer Focus Perspective*
2. *Product and Process Effectiveness Perspective*
3. *Manpower Focus Perspective*
4. *Market and Financial Perspectives*
5. *Leadership, Governance and Social Responsibility Perspectives*

PT PLN Enjiniring Management Key Performance Index in 2020 got a score of 91.95 of the total 100 indicator weight (included in the HEALTHY company group, category AA) with the achievement of each indicator is Customer Focus of 25.83, Product and Process Effectiveness of 29.19, HR of 3.99, Finance and Markets of 28.05, Leadership, Governance and Social Responsibility of 4.89. This KPI score is the result of a verified (audited) calculation for 2020.

OBSTACLES FACED BY PLN ENJINIRING

The Board of Directors realizes that the achievements and the performances that have been achieved by PLN Enjiniring are inseparable from various obstacles. However, the Company has succeeded in making policy measures against these existing obstacles so that it does not significantly affect the Company's performance.

The obstacles faced by the Company in 2020 came from external and internal parties. External obstacles include adalah Covid-19 pandemic which affects the company's business, the the easily emerge of consulting firms with low billing rates that do not reflect quality as competitors causing a decline in market prices. Another major external obstacle is changes in exchange rates which affect the cash cycle of the engineering business. Meanwhile, the main internal obstacle relates to the lack of experienced engineers to support business development. In addition, the Company is a new player in the EPC and IPP business and thus does not have sufficient experience yet.

The Company has implemented some strategies to overcome these external obstacles, by mitigating risks, carrying out efficiency and simplification of business



dan penyederhanaan proses bisnis, dan melakukan *currency hedging* yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan, untuk mengatasi kendala-kendala internal, telah dilakukan strategi pengembangan system manajemen SDM yang berbasis kompetensi dan melaksanakan program sertifikasi enjinir.

processes, and implementing currency hedging as needed. Meanwhile, to overcome the internal obstacles, a competency-based HR management system development strategy and an engineer certification program has been implemented.

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan proses jangka panjang yang memberikan hasil berupa sustainable values. Aktualisasi GCG sebagai sebuah sistem dilakukan melalui proses internal yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai.

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is a long-term process that results in sustainable values. GCG actualization as a system is carried out through an internal process involving the Board of Commissioners, Directors and all employees.

Untuk meninjau praktek GCG Tahun Buku 2019 PT PLN Enjiniring yang dilaksanakan pada Tahun 2020, PT PLN selaku induk perusahaan telah menunjuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melaksanakan assessment GCG di PT PLN Enjiniring. Hasil assessment GCG yang dilakukan oleh BPKP, perusahaan mendapatkan skor 90.015. Dengan demikian, Perusahaan masuk dalam kategori "Sangat Baik" atas pelaksanaan GCG di tahun buku 2019. Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG, PLN Enjiniring telah menyempurnakan berbagai GCG *Soft Structure* diantaranya dengan melakukan *review* terhadap kebijakan/prosedur pengadaan barang/jasa dan Pedoman GCG yang disempurnakan.

To review GCG practices of PT PLN Enjiniring 2019 Fiscal Year which was carried out in 2020, PT PLN as the holding company has appointed the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) to carry out a GCG assessment at PT PLN Engineering. The company received a score of 90,015 as a results of the GCG assessment conducted by BPKP. Therefore, thus, the Company was included in the "Very Good" category for the implementation of GCG in 2019. In order to improve the quality of GCG implementation, PLN Enjiniring has perfected various GCG Soft Structures by reviewing its policies/procedures for procurement of goods/services and enhancing the GCG Guidelines.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Sampai dengan bulan Desember tahun 2020, struktur Direksi PLN Enjiniring tidak mengalami perubahan dengan komposisi seorang sebagai Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur. Secara keseluruhan Kepengurusan Direksi sampai dengan tahun 2020, adalah sebagai berikut: Hernadi Buhron sebagai Direktur Utama, Ultrisza Mednawarman sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha, Alfi Zamzami sebagai Direktur Keuangan dan SDM, dan Yanuar Hakim sebagai Direktur Enjiniring.

CHANGE IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

As of December 2020, the structure of the PLN Enjiniring Board of Directors has not been changed with the composition of one President Director and 3 (three) Directors. The overall Board of Directors management until 2019 is as follows: Hernadi Buhron as President Director, Ultrisza Mednawarman as Director of Marketing and Business Development, Alfi Zamzami as Director of Finance and Human Resources, and Yanuar Hakim as Director of Engineering.

PENUTUP

Akhir kata, kami atas nama Direksi menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pemerintah, regulator, masyarakat, pemegang saham, pelanggan, mitra usaha serta seluruh pegawai dan keluarga besar PLN Enjiniring atas seluruh dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan. Semoga dengan dukungan tersebut, PLN Enjiniring akan semakin maju mewujudkan kinerja terbaik dan terus berperan dalam mensejahterakan masyarakat.

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring



DIDIK SUDARMADI

Direktur Utama

CLOSING

Finally, on behalf of the Board of Directors, we would like to express our appreciation and gratitude to the government, regulators, society, shareholders, customers, business partners and all employees and the extended family of PLN Enjiniring for all the support and trust that have been given. We deliver this report in the hope that PLN Enjiniring will progressively achieve the best performance and continue to play a role in the welfare of the community

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring



DIDIK SUDARMADI

President Director





Laboran Manajemen
Manajemen



Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Tahunan 2020

Management Responsibility On Annual Report 2020



Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Tahunan 2020

Management Responsibility On Annual Report 2020

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris

Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2020 PT Prima Layanan Nasional Enjiniring

Letter Of Statement Of Members Of The Board Of Commissioners

Responsibility For Annual Report And Consolidated Financial Statements Year 2020

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Prima Layanan Nasional Enjiniring tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Prima Layanan Nasional Enjiniring.

We, the undersigned hereby declare that all information in the Annual Report of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring of 2020 has been fully recorded and fully responsible for the accuracy of the contents of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring's Annual Report and Consolidated Financial Statements.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement was made with actual.

Jakarta, 28 Juli 2021

Jakarta, 28 July 2021

Dewan Komisaris

Boards of Commissioners



Ahmad Rofik

Komisaris Utama

President Commissioner



M.R. Karlansyah

Komisaris

Commissioner



Hardiv Harris Situmeang

Komisaris

Commissioner



Edward Siagian

Komisaris

Commissioner



Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Tahunan 2020

Management Responsibility On Annual Report 2020



**Surat Pernyataan Anggota Dewan Direksi
Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2020
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring**

*Letter Of Statement Of Members Of The Board Of Commissioners
Responsibility For Annual Report And Consolidated Financial Statements Year 2020
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring*

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Prima Layanan Nasional Enjiniring tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Prima Layanan Nasional Enjiniring.

We, the undersigned hereby declare that all information in the Annual Report of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring of 2020 has been fully recorded and fully responsible for the accuracy of the contents of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring's Annual Report and Consolidated Financial Statements.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
This statement was made with actual.

Jakarta, 28 Juli 2021
Jakarta, 28 July 2021

Dewan Direksi
Boards of Director



Didik Sudarmadi
Direktur Utama
President Director



Didik Sudarmadi
Direktur Enjiniring
Engineering Director



Bernadus Sudarmanta
Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha
Director of Marketing and Business Development



Martono
Direktur Keuangan dan SDM
Director of Finance and Human Resources



Laporan Manajemen
Manajemen Report



PROFIL PERUSAHAAN

The Company Profile



Profil Perusahaan

The Company Profile

IDENTITAS PERUSAHAAN

COMPANY IDENTITY

Nama Perusahaan <i>Name of the Company</i>	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring <i>PT Prima Layanan Nasional Enjiniring</i>
Kantor Pusat <i>Head Office</i>	Jalan Ciputat Raya No. 123, Kebayoran Lama – Jakarta 12310 Telephone. (62-21) 275 10363, Fax. (62-21) 2751062 <i>Ciputat Raya Street, No. 123, Kebayoran Lama – Jakarta 12310</i> <i>Phone. (62-21) 275 10363, Fax. (62-21) 2751062</i>
Bidang Usaha <i>Business Fields</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Enjiniring dan/atau manajemen proyek, termasuk integrator ketenagalistrikan • <i>Engineering consulting and/or project management services, including the electricity project integrator;</i> • Studi Sistem Kelistrikan; • <i>Electrical system studies;</i> • Studi AMDAL; • <i>Environmental impact analysis (AMDAL);</i> • Teknologi Informasi ; • <i>Information Technology (IT);</i> • Pemeliharaan dan/atau pengoperasian nidang pembangkit, transmisi dan/atau distribusi ; • <i>Maintenance and/or generator operating, transmission and/or distribution;</i> • Pengolahan, penimbunan, transportasi, niaga, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi minyak dan/atau gas bumi. • <i>Processing, stockpiling, transporting, trading, operating and oil and/or natural gas installation's maintaining;</i>
Status Perusahaan <i>Status of the Company</i>	Entitas anak PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) <i>Subsidiary entities of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)</i>
Kepemilikan <i>Ownership</i>	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 99.90% <i>PT Perusahaan Listrik Negara 99.90%</i> Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN (Persero) 0.10% <i>Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN 0.10%</i>
Tanggal Pendirian <i>Date of Establishment</i>	3 Oktober 2002 <i>October 3, 2002</i>

Dasar Hukum Pendirian <i>Legas Basis Establishment</i>	Akta Nomor 9 oleh Notaris Haryanto, SH <i>The Deed of Incorporation Number 9 by Haryanto, SH., as a notary in Jakarta</i>
Modal Dasar <i>Authorized Capital</i>	Rp25.000.000.000; <i>Rp25.000.000.000;</i>
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh <i>Fully Deposited And Issued Capital</i>	Rp25.000.000.000; <i>Rp25.000.000.000;</i>
Jumlah Karyawan <i>Number of Employees</i>	740 Orang <i>740 employees</i>
Website <i>Website</i>	www.plne.co.id <i>www.plne.co.id</i>
Layanan Informasi <i>Information Services</i>	Sekretaris Perusahaan Jalan Ciputat Raya No. 123, Kebayoran Lama - Jakarta 12310 Telp. (62-21) 275 10363 Fax. (62-21) 2751062 Email : contact@plne.co.id <i>Company's Secretary</i> <i>Jalan Ciputat Raya No. 123, Kebayoran Lama – Jakarta 12310</i> <i>Phone. (62-21) 275 10363,</i> <i>Fax. (62-21) 2751062</i> <i>Email : contact@plne.co.id</i>



RIWAYAT SINGKAT

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (untuk selanjutnya disebut dengan PLN Enjiniring atau Perusahaan) merupakan perusahaan terkemuka di bidang konsultasi dan enjiniring. PLN Enjiniring yang merupakan Entitas Anak PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) didirikan berdasarkan akta No.9 tanggal 3 Oktober 2002 oleh Haryanto, SH., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-00184.HT.01.01TH.2003 tanggal 6 Januari 2003 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 19, Tambahan No. 1891 tanggal 7 Maret 2003.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dengan akta No. 55 tanggal 23 Desember 2019 oleh Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Perubahan tersebut telah didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No.AHU-0012595.AH.01.11 tanggal 21 Januari 2020. Sampai dengan tahun 2020 Perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama.

BIDANG USAHA

■ Kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi usaha enjiniring, pengadaan dan konstruksi, operasi, serta pemeliharaan pada bidang ketenagalistrikan dan non-ketenagalistrikan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan usaha enjiniring , pengadaan dan konstruksi, operasi, pemeliharaan pada sektor ketenagalistrikan dan non ketenagalistrikan;
2. Aktivitas Kantor Pusat;
3. Aktivitas Konsultan Manajemen Lainnya;
4. Aktivitas Arsitektur;
5. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis;

A BRIEF HISTORY

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (herein after referred as PLN Enjiniring or the Company) is a leading company in the field of consulting and of engineering. PLN Enjiniring which is a subsidiary of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) was established based on the Deed of Incorporation Number 9 dated on October 3, 2002 by Haryanto, SH., as a notary in Jakarta. The deed of incorporation was approved by the Minister of Justice and Human Rights in The Decree Number C-00184.HT.01.01TH.2003 dated on January 6, 2003 and announced in the State Gazette Number 19, and in the Appendix of the State Gazzete Number 1891 dated on March 7, 2003.

The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment was by the Deed of Incorporation Number 55 dated on December 23rd, 2019 by Lenny Janis Ishak, SH., as a notary in Jakarta regarding the Company's Articles of Association Changes. These changes have been registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with The Decree Number AHU-0012595.AH.01.11 dated on January 21st, 2020. The Company has never made a change on its name.

BUSINESS FIELDS

■ Business activities according to the articles of association

In accordance to the article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the company activities includes engineering, procurement and construction, operation and maintenance in the electricity and non-electricity sectors as follows:

1. *Organizing Engineering Bussiness, procurement and construction, operation and maintenance in the electricity and non-electricity sectors*
2. *Head Office Activities;*
3. *Other Management Consultant Activities;*
4. *Architecture Activities*
5. *Engineering Activities and Technical Consulting*

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 6. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis; 7. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya; 8. Aktivitas Pemograman Komputer Lainnya; 9. Aktivitas Konsultasi dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya; 10. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya; 11. Aktivitas Pengolahan Data; 12. Aktivitas Hosting; 13. Penerbitan Peranti Lunak (software); 14. Pendidikan Teknik Swasta; 15. Kegiatan Penunjang Pendidikan; 16. Jasa Inspeksi Teknis Instalansi; 17. Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa; 18. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Tekayasa Lainnya; 19. Pembangkitan Tenaga Listrik; 20. Konstruksi Gedung Lainnya; 21. Konstruksi Jalan Raya; 22. Konstruksi Bangunan Elektrikal; 23. Konstruksi Bangunan Pengolahan dan Penampungan Barang Minyak dan Gas; 24. Pembongkaran; 25. Penyiapan Lahan; 26. Pembangkitan Tenaga Listrik; 27. Transmisi Tenaga Listrik; 28. Distribusi Tenaga Listrik; 29. Aktivitas Penunjang Kelistrikan; 30. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya; 31. Pengolahan, penimbunan, transportasi, niaga, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi minyak dan/atau gas bumi; 32. Pertambangan Gas Alam; 33. Pengusahaan Tenaga Panas Bumi; 34. Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam; 35. Distribusi Gas Alam dan Buatan; 36. Aktivitas Penunjang Pengelolaan Air; | <ol style="list-style-type: none"> 6. <i>Engineering Activities and Technical Consulting</i> 7. <i>Other Professionals, Scientific and Technical Activities;</i> 8. <i>Other Computer Programming Activities;</i> 9. <i>Other Consulting and Computer Management Facilities;</i> 10. <i>Others Information Technology and Computer Services Activities;</i> 11. <i>Data Processing Activities;</i> 12. <i>Hosting Activities;</i> 13. <i>Software Publishing;</i> 14. <i>Privat Engineering Education;</i> 15. <i>Education Support Ativities;</i> 16. <i>Installation Technical Inspection Services;</i> 17. <i>Technology and Engineering Reasearch and Development;</i> 18. <i>Research and Development of Sciences and Other Engineering Technologies;</i> 19. <i>Power Plants Electricity ;</i> 20. <i>Other Building Constructions;</i> 21. <i>Highway Constructions;</i> 22. <i>Electrical Building Construction;</i> 23. <i>Oil and Gas Goods Processing and Storage Buildings Construction;</i> 24. <i>Demolition;</i> 25. <i>Field Preparation</i> 26. <i>Power Plants Electricity;</i> 27. <i>Electric Power Transmission;</i> 28. <i>Electricity Power Distribution;</i> 29. <i>Electrical Supporting Activities;</i> 30. <i>Warehouse and Other Storage;</i> 31. <i>Processing, stockpiling, transporting, trading, operating and oil and/or natural gas installation's maintaining;</i> 32. <i>Natural Gas Mining;</i> 33. <i>Undertaken Geothermal Energy</i> 34. <i>Oil and Natural Gas Mining Supporting Activities;</i> 35. <i>Natural and Artificial Gas Distribution;</i> 36. <i>Water Management Support Activities;</i> |
|---|--|





37. Pengelolaan dan Pambuangan Air Limbah Berbahaya;

37. Hazardous Wastewater and Disposal Management;



38. Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa;

38. Pipelines and inland Transport;



39. Industri Mesin Pembangkit Listrik;

39. Power Plants Machinery Industry;

40. Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer);

40. Transformator, Rectifier and Voltage Stabilizer;

41. Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik;

41. Electricity Stabilizer and Equipment Distribution Industry;

42. Industri Peralatan Listrik Lainnya;

42. Others Electrical Equipment Industry;

43. Reparasi Motor Listrik Generator dan Transformator;

43. Electric Motor Generator Repair and Transformator

44. Reparasi Peralatan Listrik Lainnya;

44. Other Electricities Reparations Utilities

45. Penelitian Pasar.

45. Market Research

Profil Perusahaan
Company Profile



KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN

Kegiatan usaha yang berjalan saat ini dikelompokkan ke dalam tiga bidang usaha, yaitu :

■ Jasa Enjiniring

Jasa Enjiniring berupa jasa konsultansi enjiniring di industri ketenagalistrikan meliputi bidang Pembangkit, Transmisi dan Distribusi, serta jasa supervisi Konstruksi.

■ Jasa Non Enjiniring

Jasa Non Enjiniring berupa penyediaan jasa kompresi gas, bisnis Engineering, Procurement, Construction (EPC), bisnis manufaktur Material Transmisi Utama (MTU), serta bisnis Independent Power Producer (IPP).

BUSINESS ACTIVITIES UNDERTAKEN

The business activities currently running are grouped into three business major, namely:

■ Engineering Services

Engineering services in the form of engineering consultant services in electricity industry covering the fields of Power Plant, Transmission and Distribution, as well as construction supervision services.

■ Non Engineering Service

Non-engineering services include the provision of gas compression services, the Business Engineering, Procurement, Construction (EPC), manufacture business, the Main Transmission Material (MTU) manufacture, and the Independent Power Producer (IPP).



PRODUK/JASA YANG DIHASILKAN

PRODUCTS / SERVICES PRODUCED

TABEL PRODUK DAN JASA YANG DIHASILKAN
TABLE OF PRODUCTS AND SERVICE PRODUCED

Pembangkitan <i>Generation</i>	Transmisi dan Distribusi <i>Transmission and Distribution</i>	Konstruksi <i>Construction</i>
Studi Kelayakan <i>Feasibility Study</i>	Survey	Supervisi Konstruksi <i>Construction Supervision</i>
Penyelidikan Tanah <i>Soil Investigation</i>	Penyelidikan Tanah <i>Soil Investigation</i>	Pengawasan QA/QC <i>QA/QC Supervision</i>
Penyusunan Request for Proposal <i>Preparation of Request for Proposal</i>	Penyusunan Basic Design <i>Bid Document Arrangement</i>	
Pembuatan Harga Perkiraan Enjinir <i>Manufacture Estimate Enjinir</i>	Pembuatan Harga Perkiraan Enjinir <i>Manufactuwre Estimate Enjinir</i>	
Pendampingan dalam Proses Tender <i>Assistance in Tendering Process</i>	Pendampingan dalam Proses Tender <i>Assistance in Tendering Process</i>	
Pendampingan dalam proses Contract Discussion Agreement <i>Assistance in the Contract Discussion Agreement process</i>	Pendampingan dalam proses Contract Discussion Agreement <i>Assistance in the Contract Discussion Agreement process</i>	



Review Desain

Design Review

Review Desain

Design Review

Pengawasan QA/QC

QA/QC Supervision

Pengawasan QA/QC

QA/QC Supervision

Studi AMDAL dan UKL/UPL

Study of AMDAL and UKL/UPL

Pendampingan dalam Due Diligent Visit

Assistance in Due Diligent Visit
Profil Perusahaan
Company Profile

Studi Sistem Ketenagalistrikan

Study of Electricity System

Studi AMDAL dan UKL/UPL

Study of AMDAL and UKL/UPL

Studi Lainnya

Other Studies

JASA NON ENJINIRING

Jasa non enjiniring meliputi pembangunan Transmisi dan Gardu Induk melalui Anak Perusahaan EPC, penyediaan Material Transmisi Utama (MTU) yang terdiri dari *Circuit Breaker, Current Transformer, Capacitor Voltage Transformer, Lightning Arrester* melalui perusahaan *joint venture*, dan bisnis *Independent Power Producer (IPP)* melalui perusahaan afiliasi/kepemilikan saham.

JASA LAINNYA

Jasa lainnya meliputi Bidang Informasi dan Teknologi

NON-ENGINEERING SERVICES

Non-engineering services include the Transmission and Substation construction through EPC Subsidiaries, provision of Main Transmission Material (MTU) consisting of Circuit Breakers, Current Transformers, Capacitor Voltage Transformers, Lightning Arrester through joint venture companies, and Independent Power Producer (IPP) business through company through affiliate/share owned.

OTHER SERVICES

Other services include the Information and Technology Sector.

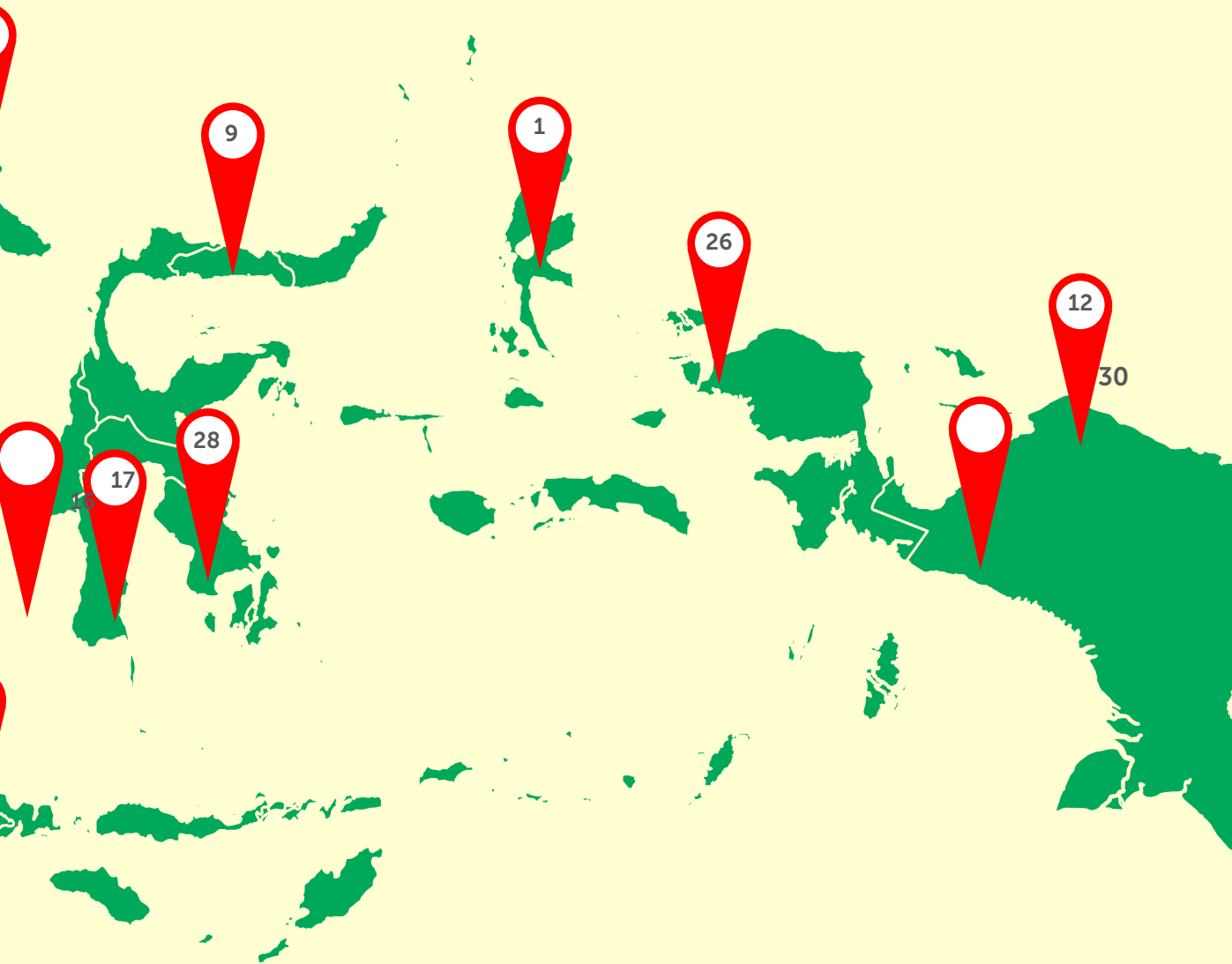


Peta Lokasi Proyek

Project Location Map



- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Ambon, Maluku | 9. Gorontalo, Sulawesi |
| 2. Arun, NAD | 10. Grati, Jawa Timur |
| 3. Balikpapan, Kalimantan Timur | 11. Jakarta |
| 4. Bandung, Jawa Barat | 12. Jayapura, Papua |
| 5. Bangka Belitung | 13. Kalimantan Barat |
| 6. Bangkanai, Kalimantan Tengah | 14. Kotabaru, Kalimantan |
| 7. Batam | 15. Lampung |
| 8. Cilegon, Banten | 16. Makassar |

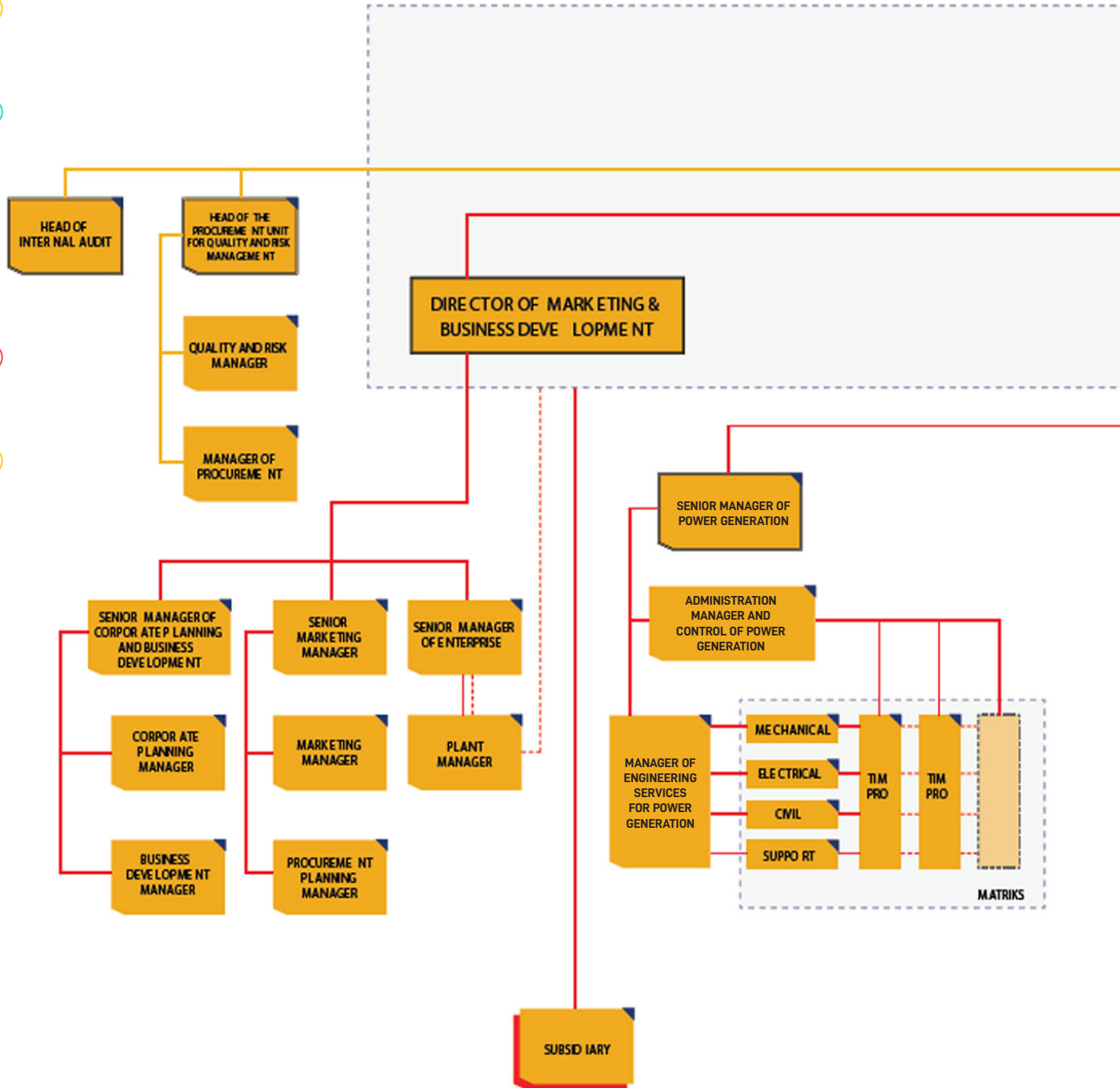


- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 17. Maros, Sulawesi Selatan | 25. Siberida, Kepulauan Riau |
| 18. Medan, Sumatera Utara | 26. Sorong, Papua |
| 19. Nagan Raya, NAD | 27. Sumedang, Jawa Barat |
| 20. Nias, Sumatera Utara | 28. Takalar, Sulawesi |
| 21. Padang Sidempuan, Sumatera Utara | 29. Tarakan |
| 22. Pangkalan Susu, Sumatera Utara | 30. Timika, Papua |
| 23. Pamaran, Bali | 31. Yogyakarta |
| 24. Peranap, Riau | 32. NTT |

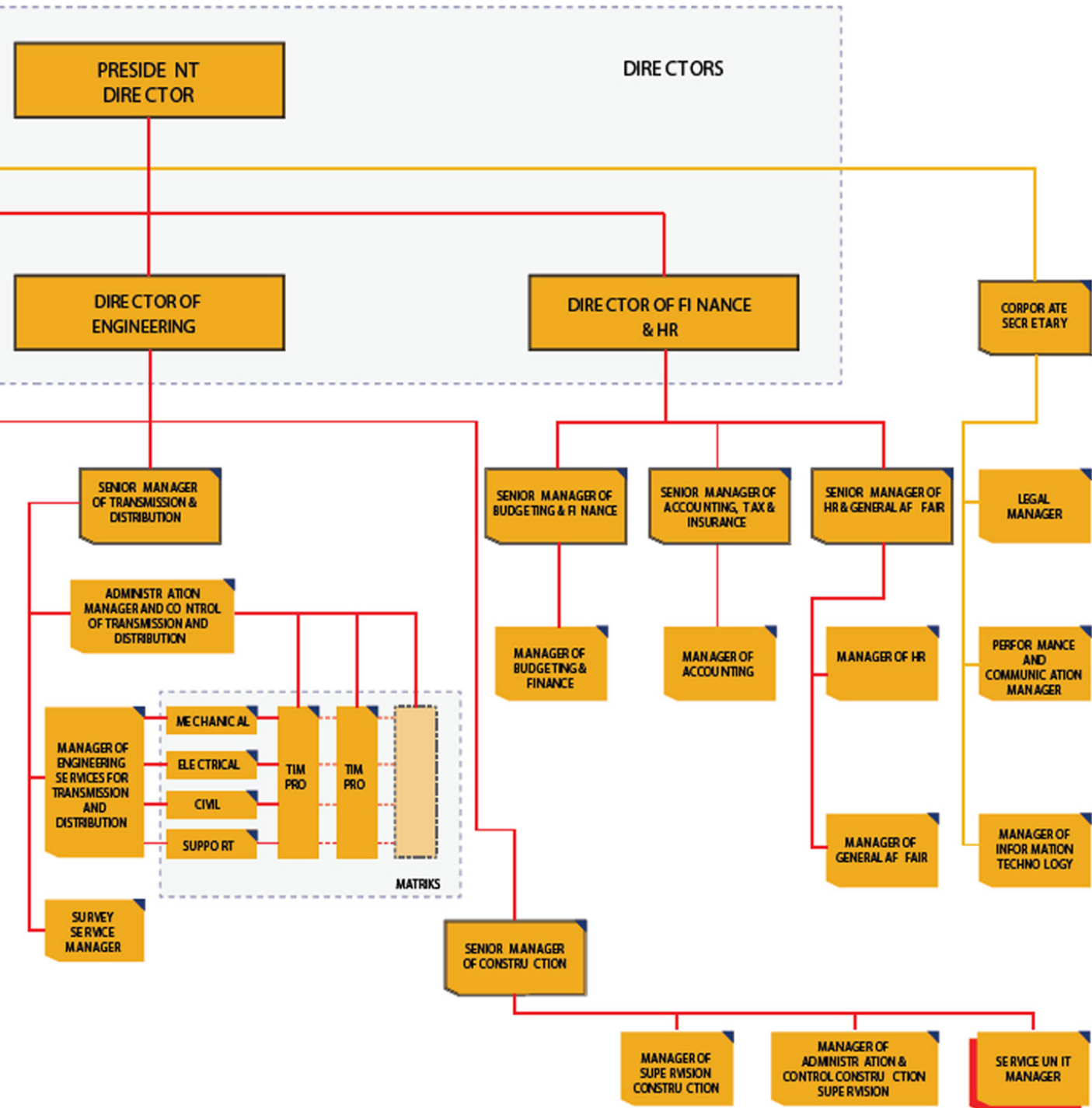
Struktur Organisasi



Profil Perusahaan
Company Profile



Organization Structure



VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

VISION, MISSION AND COMPANY CULTURE

VISI

Menjadi Perusahaan Jasa Enjiniring Terintegrasi di Ketenagalistrikan yang Terkemuka

VISION

To become a Leading Integrated Engineering Service Company in Electricity

MISI

- Memberikan pelayanan prima
- Menyediakan solusi enjiniring terintegrasi dibidang ketenagalistrikan dengan melakukan optimasi efisiensi biaya secara keseluruhan bagi Pemberi Kerja
- Menyediakan jasa enjiniring, jasa enjiniring untuk pengadaan serta jasa enjiniring untuk konstruksi yang terkemuka dan memiliki keunggulan daya saing
- Meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan

MISSION

- *Provide excellent service*
- *Provide integrated solutions in electrical engineering by optimizing overall cost efficiency for Employers*
- *Provide leading and competitive advantages in engineering services, engineering services for procurement and engineering services for construction.*
- *Increase customer satisfaction and*

TATA NILAI PERUSAHAAN

PLN Enjiniring menanamkan nilai-nilai budaya yang kuat dalam menjalin hubungan yang berkesinambungan dengan para pemangku kepentingan. Hal ini tidak lepas dari tata nilai budaya Perusahaan yang disebut AKHLAK.

■ Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

■ Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

■ Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan

■ Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

TATA NILAI PERUSAHAAN

PLN Enjiniring instills strong cultural values in establishing sustainable relationships with stakeholders. This cannot be separated from the Company's cultural values called AKHLAK.

■ Amanah (Trust)

Hold the trust that has been given.

■ Kompeten (Competent)

Continue to learn and developing capabilities.

■ Harmonis (Harmonious)

Caring for each other and respecting differences

■ Loyal (Loyal)

Dedicated and prioritizing the interests of the Country and Nation.

■ **Adaptif**

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

■ **Kolaboratif**

Membangun kerja sama yang sinergis

■ **Adaptif (Adaptive)**

Continual innovating and enthusiastic in moving or facing change

■ **Kolaboratif (Collaborative)**

Building a synergistic collaboration.



STRATEGI PERUSAHAAN

Company Strategy

Strategi Perusahaan

Perumusan sasaran strategis perusahaan dilakukan dengan menggunakan framework Malcolm Baldrige yang didasarkan atas lima perspektif yakni Perspektif Fokus Pelanggan, Perspektif Kualitas Produk dan Layanan, Perspektif Fokus SDM, Perspektif Keuangan dan Pasar, serta Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab sesuai dengan hasil perumusan menghasilkan 15 dimensi sasaran strategis yang harus dijadikan sebagai acuan oleh PLNE dalam mencapai sasaran perusahaan tahun 2020 sebagai berikut:

1. Perspektif Fokus Pelanggan
 - a. Indeks Kepuasan Pelanggan
 - b. Pertumbuhan Nilai Proyek (PLN)
2. Perspektif Kualitas Produk dan Layanan
 - a. *Engineering First Pass Yield (FPY)*
 - b. *Engineering On Time Delivery (OTD)*
 - c. Produktivitas Supervisi Konstruksi
 - d. Komposisi Enjinirs *Subletting* untuk Produk Enjiniring (FS, Biddoc dan *Engineering Design*)
3. Perspektif Fokus SDM
 - a. *Human Capital Readiness (HCR)*
 - b. *Organization Capital Readiness (OCR)*
4. Perspektif Keuangan dan Pasar
 - a. Pencapaian Investasi
 - b. Sinergi dengan Anak Perusahaan Lain
 - c. Efisiensi Biaya Enjiniring oleh *Sub Consultant* dan *Outsourcing*
 - d. Rasio Operasi
5. Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab
 - a. Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*
 - b. Penyelesaian Temuan Auditor
 - c. Kepatuhan pada K3LH (Kesehatan, Keselamatan Kerja & Lingkungan Hidup)

Company Strategy

he drafting of the company's strategic goals is carried out using the Malcolm Baldrige framework which is based on five perspectives namely Customer Focus Perspective, Product and Services Quality Perspective, HR Focus Perspective, Financial and Market Perspective, and Leadership, Governance and Responsibility Perspective in accordance with the results of the formulation resulted in 15 dimensions of strategic targets that must be used as a reference by PLNE in achieving the 2020 company's goals as follows:

1. *Customer Focus Perspective*
 - a. *Costumer Satisfactory Index*
 - b. *Project Value Growth (PLN)*
2. *Product and Services Quality Perspective*
 - a. *Engineering First Pass Yield (FPY)*
 - b. *Engineering On Time Delivery (OTD)*
 - c. *Construction Supervision Productivity*
 - d. *Subletting Engineering Composition for Engineering Products (FS, Biddoc dan Engineering Design)*
3. *HR Focus Perspective*
 - a. *Human Capital Readiness (HCR)*
 - b. *Organization Capital Readiness (OCR)*
4. *Financial and Market Perspective*
 - a. *Investment Achievement*
 - b. *Synergy with Other Subsidiaries*
 - c. *Engineering Cost Efficiency by Sub Consultant and Outsourcing*
 - d. *Operating Ratio*
5. *Leadership, Governance and Responsibility Perspective*
 - a. *The implementation of Good Corporate Governance (GCG)*
 - b. *Compliting Auditor Findings*
 - c. *Compliance in Health, Occupational Safety & Environment (K3LH)*

Sasaran-sasaran strategis tersebut di atas dijabarkan dalam program-program kegiatan yang diuraikan sebagai berikut.

1. Pemasaran dan Penjualan

PT PLN Enjiniring sebagai bagian dalam grup PT PLN (Persero) ikut serta dalam menyukseskan program 35.000 MW. Strategi pemasaran untuk akselerasi program tersebut adalah menyelesaikan pekerjaan – pekerjaan terkait enjiniring program 35.000 MW sesuai dengan RUPTL 2019 - 2028 baik berupa kontrak penugasan atau tender dari PLN maupun pihak swasta.

Perolehan kontrak enjiniring pada tahun 2020 menjadi tantangan yang cukup besar dengan adanya pandemi COVID-19. Deviasi cukup besar antara potensi pekerjaan yang berbasis pada RUPTL 2019-2028 dengan realisasi investasi PLNE di tahun 2020. Penyesuaian ini merupakan turunan atas kebijakan pemerintah pada kondisi pandemi.

Pekerjaan jasa utama (*core business*) di bidang enjiniring ketenagalistrikan terdiri atas pendapatan enjiniring bidang pembangkitan, bidang transmisi & distribusi, bidang supervisi konstruksi, detail enjiniring desain dan pengembangan jasa enjiniring.

Pada pengembangan pasar jasa enjiniring lebih lanjut, berbasis pada mengoptimalkan kontrak pekerjaan jasa enjiniring yang didapatkan dari sinergi antar Anak Perusahaan. Disamping pekerjaan jasa tersebut diatas, terdapat pendapatan lainnya dari pengembangan usaha berbasis keenjiringan diantaranya:

- a. Perolehan hasil Investasi dengan mengoptimalkan pengoperasian & pemeliharaan CNG Bangkanai, dengan realisasi pendapatan tahun 2020 sebesar Rp 84,5 M
- b. Perolehan Jasa Konstruksi maupun EPC Ketenagalistrikan di bidang transmisi, dan distribusi dari PT Prima Power Nusantara dengan realisasi pendapatan tahun 2020 sebesar Rp 269,5 M.

The strategic targets mentioned above are described in the activity programs which are described as follow;

1. Sales and Marketing

As part of the PT PLN (Persero) group PT PLN Enjiniring have been participated in the success of the 35,000 MW program. The marketing strategy for the program acceleration is to complete works related to the 35,000 MW engineering program in accordance with the 2019-2028 RUPTL, either in the form of assignment contracts or tenders from PLN or private parties.

An engineering contract obtained in 2020 is a big challenge with the COVID-19 pandemic. The deviation is quite large between the potential work based on the 2019-2028 RUPTL and the realization of PLNE investment in 2020. This adjustment is a derivative of the government's policy in pandemic conditions.

The core business services in electricity engineering field consists of engineering in generation field revenue, transmission & distribution sector, construction supervision, design engineering details and engineering service development.

In the further engineering services market development, based on optimizing engineering work service contracts obtained from synergies between Subsidiaries. In addition to the services mentioned above, There are other income from engineering-based business development including:

- a. *Return on Investment by optimizing the operation & maintenance of CNG Bangkanai, with revenue realization of IDR 84.5 Billions in 2020*
- b. *Obtaining Electricity Construction and EPC Services in transmission and distribution sector from PT Prima Power Nusantara with revenue realization IDR 269,5 Billions in 2020.*





Untuk menjamin keberhasilan pengembangan usaha, pada setiap program pengembangan usaha yang bersifat investasi, didukung dengan Kajian Enjiniring/Kajian Kelayakan Operasi dan Kajian Kelayakan Finansial serta Kajian Resiko.

2. Produksi

Capaian kinerja perusahaan tahun 2020 aspek produksi dilakukan dengan penyelesaian kontrak carry over maupun kontrak baru yang diperoleh pada tahun 2020. Sebagai dukungan atas kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian produk & jasa enjiniring dan pengembangan usaha berbasis keenjiniringan (investasi, operation & maintenance CNG Bangkanai, dan Jasa Konstruksi Ketenagalistrikan dari PT Prima Power Nusantara), dilakukan program – program penguatan produksi, dengan sasaran khusus antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas produksi dan produktifitas
- b. Mengendalikan biaya pokok produksi
- c. Program Investasi yang prima
- d. Program Prasarana Proyek berbasis Information Technology.

3. Keuangan dan Akuntansi

Program kerja Keuangan dan Akuntansi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan Pengendalian Anggaran Operasi dan Anggaran Investasi
- b. Peningkatan Kinerja Operasional
- c. Pemberian SHL ke Anak Perusahaan
- d. Penyediaan dana untuk pembayaran SHL
- e. Meningkatkan Internal Control atas Laporan Keuangan
- f. Penerapan PSAK terbaru yaitu 71,72 dan 73 pada Laporan Keuangan Perusahaan
- g. Pelaksanaan perhitungan PSAK 24 mengenai imbal kerja

To ensure the business development success, in every investment business development program, supported by an Engineering Study/ Operational Feasibility Study and a Financial Feasibility Study as well as a Risk Assessment.

2. Production

The company's performance achievement in 2020 in production aspect is carried out by completing the carry over contracts and new contracts obtained in 2020. As a support for the quality and timeline accuracy on completing the engineering products & services and engineering-based business development (investment, operation & maintenance of CNG Bangkanai, and Electricity Construction Services from PT Prima Power Nusantara), the production strengthening programs are carried out, with specific targets including:

- a. Increasing production capacity and productivity*
- b. Controlling the cost of production*
- c. Excellent Investment Program*
- d. Project Infrastructure Program based on Information Technology.*

3. Finance and Accounting

Finance and Accounting can be described as follows:

- a. Operating and Investment Budget Provision and Control*
- b. Operational Performance Improvement*
- c. Giving Shareholder Loans to Subsidiaries*
- d. Provision of funds for payment of Shareholder Loan*
- e. Improving Financial Reports Internal Controls*
- f. The implementation of the latest Integrated Financial Accounting System (PSAK), namely 71.72 and 73 in the Company's Financial Statements*
- g. Implementation of Integrated Financial Accounting System (PSAK 24) calculations regarding employee benefits*

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> h. Mengusulkan penyempurnaan integrasi sistem IT antara SAP, Virtual Cubicle dan Sunfish serta mendukung konsolidasi Laporan Keuangan Korporat dan Anak Perusahaan i. Penambahan User SAP pada Sub Bidang Akuntansi j. Meningkatkan tertib administrasi pajak k. Mendukung pelaksanaan asuransi aset material yang dimiliki oleh Perusahaan l. Mendukung pelaksanaan inventarisasi aset bersama tim yang ditunjuk oleh Manajemen m. Membantu pencapaian target KPI Perusahaan
 n. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM pada bidang Akuntansi, Pajak dan Asuransi dengan mengusulkan pengadaan training, workshop dan program profesi Akuntansi o. Membantu pemenuhan kebutuhan bidang lain terkait Rating Perusahaan. <p>4. SDM dan Umum</p> <p>Pengembangan Program SDM melalui <i>Human Capital Readiness</i> (HCR) dan <i>Organizational Capital Readiness</i> (OCR) melalui implementasi strategi perusahaan dan kegiatan proses bisnis PT PLN Enjiniring baik bidang Enjiniring maupun non Enjiniring maka dilakukan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapabilitas SDM melalui program sertifikasi, pembelajaran/pelatihan, dan penugasan pegawai bisnis inti dan penunjang b. Peningkatan keselarasan strategi perusahaan dengan setiap individu pegawai melalui program internalisasi strategi dan penyesuaian kontrak manajemen hingga level fungsional c. Penyesuaian peraturan atau ketentuan yang berlaku di holding dalam program ratifikasi keputusan direksi untuk mendukung program PLN SOLID d. Konsep CoC dengan penentuan tema isu strategis setiap bulan e. Assessment dan peningkatan Budaya Perusahaan (corporate value) pada setiap individu pegawai PLN Enjiniring | <ul style="list-style-type: none"> h. <i>Improvement proposal for integrated IT system between SAP, Virtual Cubicle and Sunfish, and supporting the consolidation of Corporate and Subsidiary Financial Statements</i> i. <i>Adding SAP Users to the Accounting Sub-Sector</i> j. <i>Improve tax administration order</i> k. <i>Support the implementation of material asset insurance owned by the Company</i> l. <i>Support the implementation of asset inventory along with appointed team by Management</i> m. <i>Help to achieve the Company's Key Performance Indicator targets</i> n. <i>Increase the capacity and capability of HR in Accounting, Taxes and Insurance fields by proposing the provision of training, workshops and the Accounting profession programs</i> o. <i>Assisting in fulfillment of the needs for other fields related to Corporate Ratings.</i> <p>4. <i>Human Resources and General Affairs</i></p> <p><i>Human Resources Program Development through Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capital Readiness (OCR) through the implementation of PT PLN Enjiniring company's strategy and business process both in the engineering and non-engineering fields, the following are carried out:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Improvement of HR capabilities through certification programs, learning/training, and assignment of core and supporting business employees</i> b. <i>Increasing the alignment of the company's strategy with each individual employee through the internalization program strategy and conformity of management contracts to functional level</i> c. <i>Alignment of applicable regulations or provisions holding in directors' decisions ratification program to support the PLN SOLID program</i> d. <i>Determining the theme of strategic issues every month with CoC concept</i> e. <i>Corporate Culture Assessment and improvement for PLN Engineering each individual employee</i> |
|--|--|





- f. Kaderisasi jabatan struktural yang berkualifikasi di dalam semua tingkatan dalam rangka memobilisasi penyelenggaraan strategi Perusahaan
- g. Meningkatkan employee engagement dengan kegiatan Story Telling yang dilaksanakan oleh Leader di bidang masing – masing
- h. Meningkatkan implementasi Knowledge Management sebagai sarana dokumentasi Knowledge Asset dan materi pembelajaran untuk setiap pegawai PLN Enjiniring
- i. Menciptakan hubungan Industrial yang harmonis dengan pembinaan hubungan industrial dengan pegawai PLN Enjiniring
- j. Implementasi inovasi tidak terbatas pada lomba karya inovasi dalam setiap improvement yang dilakukan untuk mendukung kinerja PLN Enjiniring
- k. Penyelarasan sistem SDM dan organisasi melalui program review dan asesmen sistem SDM dan organisasi untuk mendukung program enjiniring detail desain
- l. Benchmarking dengan perusahaan ternama di dalam dan luar negeri
- m. Memotivasi pegawai dengan cara memberikan insentif dalam kegiatan-kegiatan tertentu dan mengikutkan pegawai dalam kegiatan lomba tertentu

Dalam mendukung misi PLN Group "SOLID" dimana PLNE mendapat arahan dua misi yaitu *Leading Industry Capabilities* dan *Optimizing Cost Efficiency*, hal ini telah diselaraskan pada strategi Sumber Daya Manusia dan Umum melalui :

- a. Penyusunan jalur kompetensi mendukung proses bisnis perusahaan yang diturunkan melalui pohon karir kepakaran
- b. Melakukan pemetaan komposisi SDM terutama enjinir berdasarkan usia pengalaman pada kepakaran (junior, middle, dan expert) dan berdasarkan kompetensi kepakaran (generalist dan specific)
- c. Melaksanakan pemetaan kompetensi melalui assessment

- f. *Regeneration in qualified structural positions at all levels in order to mobilize the implementation of the Company's strategy*
- g. *Increase employee engagement with Story Telling activities carried out by Leaders in their respective fields*
- h. *Implementation of Knowledge Management Improvement as a means of documenting Knowledge Assets and learning materials for every PLN Enjiniring employee*
- i. *Creating harmonious industrial relations by developing industrial relations with PLN Engineering employees*
- j. *The implementation of innovation not limited to the innovation work competition in every improvement made to support PLN Enjiniring performance*
- k. *HR and organizational systems alignment through review and assessment of HR and organizational systems programs to support detailed design engineering programs*
- l. *Benchmarking to well-known domestic companies and abroad*
- m. *Motivating employees by providing incentives in certain activities and involving employees in certain competitions*

In support of the PLN Group "SOLID" mission where PLNE received two mission directions which are Leading Industry Capabilities and Optimizing Cost Efficiency, this has been aligned with the Human Resources and General Affairs strategy through:

- a. *The competency pathways preparation supports the company's business processes that are passed down through the expertise career tree*
- b. *HR composition mapping, especially for engineers based on age of experience in expertise (junior, middle, and expert) and based on expert competence (generalist and specific)*
- c. *Carry out competency mapping through assessment*

- d. Melaksanakan program pemenuhan gap atas pemetaan kompetensi yang dapat dilakukan melalui *knowledge management, training, Coaching Mentoring Counseling (CMC)* serta *joint operation* melalui *partnership* perusahaan internasional atau institusi penelitian.
 - e. Melakukan monitoring pekerjaan terhadap workload SDM berdasarkan *project schedule, detailed work schedule*, serta *disbursement* dan *manning schedule*
5. Pengembangan Usaha dan Inovasi
- a. Pengembangan Proyek Energi Baru Terbarukan (EBT)
PT PLN Enjiniring mengembangkan kompetensi produk enjiniring pada Energi Baru Terbarukan yang meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas, Pembangkit Listrik Tenaga Biomass, Pembangkit Listrik Tenaga Solar PV, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu. Pengembangan kompetensi ini untuk memenuhi peluang Energi Baru Terbarukan yang belum tereksplorasi maksimal di Indonesia. Produk Enjiniring yang terkait dengan Energi Baru Terbarukan menjadi salah satu program Kegiatan Pengembangan Usaha PLNE di tahun 2020.
 - b. Detail Engineering Design
Kompetensi Detail Engineering Design telah menjadi program Rencana Jangka Panjang PLNE sesuai yang tercantum dalam Dokumen RJP PLNE 2020-2024. Dimana sampai dengan tahun 2019 PLNE telah melakukan inisiasi melalui pembentukan tim, pengembangan Kualitas dan Kuantitas SDM, serta pengadaan perangkat kerja enjiniring sejak tahun 2017. Diharapkan pada tahun 2020 PLNE berkesempatan untuk berkoordinasi dengan Divisi PLN dan Unit PLN dalam pengembangan kompetensi *detail design* pada proyek pembangkit dan transmisi.

- d. *Implement gap fulfillment programs on competency mapping that can be done through knowledge management, training, Coaching Mentoring Counseling (CMC) and joint operations through partnerships with international companies or research institutions.*
- e. *Monitoring work on HR workload based on project schedule, detailed work schedule, as well as disbursement and manning schedule*

5. *Business Development and Innovation*

- a. *New Renewable Energy Project Development (EBT)*
PT PLN Enjiniring developing engineering product competencies in New Renewable Energy which includes Biogas Power Plant, Biomass Power Plant, PV Solar Power Plant, Mini Hydro Power Plant, Piko Hydro Power Plant and Wind Power Plant. The development of this competency is to meet the New Renewable Energy opportunities which has not been fully exploited in Indonesia. Engineering products related to New and Renewable Energy are one of the PLNE 2020 Business Development Activities programs.
- b. *Detail Engineering Design*
The competencies of Detailed Engineering Design have become a PLNE Long-Term Plan program as stated in the 2020-2024 PLNE RJP Document. Where until 2019 PLNE has initiated through the team building, HR Quality and Quantity development, and engineering work tools procurement since 2017. It is hoped that in 2020 PLNE will have the opportunity to coordinate with the PLN Division and PLN unit in the development of power generation and transmission projects detailed design and competencies.





- c. Perangkat Kualitas Produk *Detail Design*
- Sejalan dengan program pengembangan usaha dan inovasi PLNE tahun 2017 hingga tahun 2019 dimana perusahaan telah melakukan investasi kelengkapan sarana dan prasarana perangkat enjiniring dalam pengembangan kompetensi *Detail Engineering Design*. Program ini merupakan lanjutan program lanjutan atas pengembangan perangkat enjiniring yang mana bertujuan untuk pemenuhan Roadmap kompetensi khususnya *Detail Engineering Design*.

- c. *Device of Product Detail Design Quality.*
- In line with PLNE's business development and innovation program from 2017 to 2019 where the company has invested to completed the engineering equipment facilities and infrastructure in the development of Detail Engineering Design Competencies. This program is a follow-up program for engineering tools development aiming to fulfill the competency Roadmap, especially in Detail Engineering Design.*

Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners

PERIODE PENGANGKATAN 22 MARET 2016 - 08 DESEMBER 2020

APPOINTMENT EMPLOYEE PERIOD MARCH 22, 2016 - DECEMBER 08, 2020



Tumpal M. Simarmata

KOMISARIS UTAMA
PRESIDENT COMMISSIONER

Warga Negara Indonesia, lahir pada Desember 1959. Berdomisili di Bandung. Menjabat sebagai Komisaris Utama PT PLN Enjiniring sejak 19 Desember 2016. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Kepala Divisi Konstruksi pada Pembangkit dan Jaringan Kalimantan pada tahun 2015-2016, Kepala Divisi Konstruksi Jaringan di PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2014-2015, General Manajer PT PLN (Persero) UIP VII Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali pada tahun 2013-2014, General Manajer PT PLN (Persero) UIP IV Interkoneksi Sumatera – Jawa pada tahun 2011-2013. Menyelesaikan Pendidikan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1987.

Indonesian citizen, born in December 1959. Domiciled in Bandung. Served as President Commissioner of PT PLN Enjiniring since December 19, 2016. Previously he had experience as Head of the Construction Division of the Kalimantan Plant and Network in 2015-2016, Head of the Network Construction Division at PT PLN (Persero) Head Office in 2014-2015, General Manager of PT PLN (Persero) UIP VII Central Java, East Java and Bali in 2013-2014, General Manager of PT PLN (Persero) UIP IV Sumatra-Java Interconnection in 2011-2013. Completed Electrical Engineering Education at the Bandung Institute of Technology (ITB) in 1987.

Penugasan Khusus : -

Riwayat Dasar Pengangkatan :

- RUPS Pengangkatan tanggal 2 Desember 2016
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 28 tanggal 19 Desember 2016.

Special assignment: -

Basic History of Appointment:

- Appointment by General Meeting of Shareholders on December 2, 2016
- Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 28 dated December 19, 2016.





Julius Bobo

KOMISARIS COMMISSIONER

Warga Negara Indonesia, lahir pada Juli 1959. Berdomisili di Bekasi. Menjabat sebagai Komisaris PT PLN Enjiniring sejak 29 September 2010. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum Koperasi Pengembang Briket Bara Nusantara. Ketua Bidang MIGAS YPEI (Yayasan Peduli Energi Indonesia), PLT Komisaris Utama pada Juni – Desember tahun 2016, Ketua Umum POROS DAERAH (2009-sekarang), Sekjen MEHI (Masyarakat Energi Hijau Indonesia) pada tahun 2009 hingga saat ini, dan Tenaga Ahli SPS-RI (Dewan Perwakilan Daerah) sejak tahun 2009 hingga saat ini. Menyelesaikan Sarjana Muda AKuntansi (AAI Jakarta) pada tahun 1983, yang kemudian dilanjutkan dengan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di STIE YAI pada tahun 1992 sebelum akhirnya mendapatkan gelar Magister Manajemen Jurusan Sumber Daya Manusia pada Universitas Satyagama, Jakarta pada TAHUN 2002.

Indonesian citizen, born in July 1959. Domiciled in Bekasi. H Served as Commissioner of PT PLN Enjiniring since September 29, 2010. Currently serves as Chairman of the Koperasi Pengembang Briket Bara Nusantara. Head of the MIGAS YPEI (Yayasan Peduli Energi Indonesia), Acting as President Commissioner in June - December 2016, Chairman of POROS DAERAH (2009-present), Secretary General of MEHI (Masyarakat Energi Hijau Indonesia) in 2009 until now, and Expert of SPS-RI (Dewan Perwakilan Daerah) since 2009 until now. He completed his Bachelor of Accounting in Jakarta (AAI Jakarta) in 1983, then continued with a Bachelor of Economics majoring in Accounting at STIE YAI in 1992 before finally earning a Master of Management majoring in Human Resources at Satyagama University, Jakarta in 2002.

Profil Perusahaan
Company Profile



Penugasan Khusus : Ketua Komite Audit

Riwayat Dasar Pengangkatan :

- RUPS Pengangkatan tanggal 31 Agustus 2010
- RUPS Perpanjangan Sementara tanggal 31 Agustus 2014
- RUPS Pergantian Komisaris Utama tanggal 22 Juni 2016
- RUPS Pengangkatan tanggal 2 Desember 2016
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 43 tanggal 29 September 2010
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 89 tanggal 22 September 2014
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 01 tanggal 14 Juli 2016
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 28 tanggal 19 Desember 2016

Special assignment: Chairman of the Audit Committee

Basic History of Appointment:

- *Appointment by General Meeting of Shareholders on August 31, 2010*
- *Temporary Extension by General Meeting of Shareholders on August 31, 2014*
- *Replacement of President Commissioner by General Meeting of Shareholders on June 22, 2016*
- *Appointment by General Meeting of Shareholders on December 2, 2016*
- *Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 43 dated September 29, 2010*
- *Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 89 dated September 22, 2014*
- *Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 01 dated July 14, 2016*
- *Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 28 dated December 19, 2016*





Djoko Prasetyo

KOMISARIS COMMISSIONER

Warga Negara Indonesia, lahir pada Mei 1957. Berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Komisaris PT PLN Enjiniring sejak 19 Desember 2016. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Konsultan Independen di Bank Dunia Jakarta pada tahun 2013-2015, Konsultan Independen di Asian Development Bank pada tahun 2014-2015, Advisor PT PLN (Persero) untuk Lintas Batas Daya Interkoneksi Proyek antara Sumatera dan Semenanjung Malaysia pada tahun 2013-2014, Kepala Divisi Sistem Perencanaan PT PLN (Persero) pada tahun 2008, General Manajer PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2004-2008, General Manajer PT PLN (Persero) Transmisi Wilayah Sumatera Bagian Utara pada tahun 2004-2008. Menyelesaikan Pendidikan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1981, kemudian melanjutkan pendidikan di University of New South Wales, Australia dan mendapatkan gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) of Electrical Engineering pada tahun 1997.

Indonesian citizen, born in May 1957. Domiciled in Jakarta. Served as Commissioner of PT PLN Enjiniring since December 19, 2016. Previously, he had experience as an Independent Consultant at the World Bank Jakarta in 2013-2015, Independent Consultant at the Asian Development Bank in 2014-2015, Advisor of PT PLN (Persero) for Project Interconnection Power Transboundary between Sumatra and Peninsular Malaysia in 2013-2014, Head of the Planning System Division of PT PLN (Persero) in 2008, General Manager of PT PLN (Persero) for Research and Development Center in 2004-2008, General Manager of PT PLN (Persero) for Transmission in the Northern Sumatra Region in 2004-2008. He completed his Electrical Engineering Education at the Bandung Institute of Technology (ITB) in 1981, then continued his education at the University of New South Wales, Australia and obtained the Doctor of Philosophy (Ph.D) of Electrical Engineering in 1997.

Penugasan Khusus : Ketua Komite Manajemen Risiko dan Ketua Komite *Good Corporate Governance*.

Riwayat Dasar Pengangkatan :

- RUPS Pengangkatan tanggal 2 Desember 2016
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 28 tanggal 19 Desember 2016

Special assignment: Chairman of the Risk Management Committee and Chairman of the Good Corporate Governance Committee.

Basic History of Appointment:

- *Appointment by General Meeting of Shareholders on December 2, 2016*
- *Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 28 dated December 19, 2016*



Marzuqi

KOMISARIS COMMISSIONER

Warga Negara Indonesia, lahir pada Maret 1971. Berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Komisaris PT PLN Enjiniring sejak 17 Juli 2017. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Tenaga Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2010 – 2016, Tenaga Ahli DPR- RI pada tahun 1997 – 2009. Menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Tarbiyah di IAIN Sunan Ampel Malang pada tahun 1991, kemudian melanjutkan Pendidikan Magister Manajemen di STIE IPWI Jakarta pada tahun 1997.

Indonesian citizen, born in March 1971. Domiciled in Jakarta. Served as Commissioner of PT PLN Enjiniring since July 17, 2017. Previously he had experience as an Expert in the Audit Board of the Republic of Indonesia in 2010-2016, Expert in the DPR-RI (People's Representative Council of the Republic of Indonesia) in 1997 - 2009. Completed Education at the Tarbiyah Faculty at IAIN Sunan Ampel Malang in 1991, then continued Education in the Masters in Management at STIE IPWI Jakarta in 1997.

Penugasan Khusus : -

Riwayat Dasar Pengangkatan :

- RUPS Pengangkatan tanggal 17 Juli 2017
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 1 tanggal 4 September 2017

Special assignment: -

Basic History of Appointment:

- *Appointment by General Meeting of Shareholders on July 17, 2017*
- *Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 1 dated September 4, 2017*



PERIODE PENGANGKATAN 8 DESEMBER 2020 – 31 DESEMBER 2020

APPOINTMENT EMPLOYEE PERIOD DECEMBER 8, 2020 – DECEMBER 31, 2020



Ahmad Rofik

KOMISARIS UTAMA PRESIDENT COMMISSIONER

Warga Negara Indonesia, lahir pada Desember 1967. Berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Komisaris Utama PT PLN Enjiniring sejak 08 Desember 2020. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara pada PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada Desember 2019 – Mei 2020, Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua pada PT PLN (Persero) PT PLN (Persero) pada Agustus 2017 – Desember 2019. Menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Teknik Mesin di Universitas Indonesia pada tahun 1986, dan saat ini sedang kuliah tahun ke-2, S3 Manajemen Pemasaran Usakti.

Indonesian citizen, born in December 1967. Domiciled in Jakarta. Served as President Commissioner of PT PLN Enjiniring since December 08, 2020. Currently served as an Regional Business Director of Maluku, Papua and Nusa Tenggara at PT PLN (Persero) Head Office in December 2019 – May 2020, Regional Business Director of Maluku and Papua at PT PLN (Persero) PT PLN (Persero) in August 2017 – December 2019. He Completed his Education at the Faculty of Mechanical Engineering at the University of Indonesia in 1986, and is currently studying in his 2nd year, Doctoral Degree in Marketing Management from Usakti.

Penugasan Khusus : -

Riwayat Dasar Pengangkatan :

- RUPS Sirkuler Pengangkatan tanggal 08 Desember 2020

Special assignment: -

Basic History of Appointment:

- Appointment by General Meeting of Shareholders on December 08, 2020



Djoko Prasetyo

KOMISARIS COMMISSIONER

Warga Negara Indonesia, lahir pada Mei 1957. Berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Komisaris PT PLN Enjiniring sejak 19 Desember 2016. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Konsultan Independen di Bank Dunia Jakarta pada tahun 2013-2015, Konsultan Independen di Asian Development Bank pada tahun 2014-2015, Advisor PT PLN (Persero) untuk Lintas Batas Daya Interkoneksi Proyek antara Sumatera dan Semenanjung Malaysia pada tahun 2013-2014, Kepala Divisi Sistem Perencanaan PT PLN (Persero) pada tahun 2008, General Manajer PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2004-2008, General Manajer PT PLN (Persero) Transmisi Wilayah Sumatera Bagian Utara pada tahun 2004-2008. Menyelesaikan Pendidikan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1981, kemudian melanjutkan pendidikan di University of New South Wales, Australia dan mendapatkan gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) of Electrical Engineering pada tahun 1997.

Indonesian citizen, born in May 1957. Domiciled in Jakarta. Served as Commissioner of PT PLN Enjiniring since December 19, 2016. Previously, he had experience as an Independent Consultant at the World Bank Jakarta in 2013-2015, Independent Consultant at the Asian Development Bank in 2014-2015, Advisor of PT PLN (Persero) for Project Interconnection Power Transboundary between Sumatra and Peninsular Malaysia in 2013-2014, Head of the Planning System Division of PT PLN (Persero) in 2008, General Manager of PT PLN (Persero) for Research and Development Center in 2004-2008, General Manager of PT PLN (Persero) for Transmission in the Northern Sumatra Region in 2004-2008. He completed his Electrical Engineering Education at the Bandung Institute of Technology (ITB) in 1981, then continued his education at the University of New South Wales, Australia and obtained the Doctor of Philosophy (Ph.D) of Electrical Engineering in 1997.

Penugasan Khusus : Ketua Komite Manajemen Risiko dan Ketua Komite *Good Corporate Governance*.

Riwayat Dasar Pengangkatan :

- RUPS Pengangkatan tanggal 2 Desember 2016
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 28 tanggal 19 Desember 2016

Special assignment: Chairman of the Risk Management Committee and Chairman of the Good Corporate Governance Committee.

Basic History of Appointment:

- *Appointment by General Meeting of Shareholders on December 2, 2016*
- *Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 28 dated December 19, 2016*





Marzuqi

KOMISARIS COMMISSIONER

Warga Negara Indonesia, lahir pada Maret 1971. Berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Komisaris PT PLN Enjiniring sejak 17 Juli 2017. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Tenaga Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2010 – 2016, Tenaga Ahli DPR- RI pada tahun 1997 – 2009. Menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Tarbiyah di IAIN Sunan Ampel Malang pada tahun 1991, kemudian melanjutkan Pendidikan Magister Manajemen di STIE IPWI Jakarta pada tahun 1997.

Indonesian citizen, born in March 1971. Domiciled in Jakarta. Served as Commissioner of PT PLN Enjiniring since July 17, 2017. Previously he had experience as an Expert in the Audit Board of the Republic of Indonesia in 2010-2016, Expert in the DPR-RI (People's Representative Council of the Republic of Indonesia) in 1997 - 2009. Completed Education at the Tarbiyah Faculty at IAIN Sunan Ampel Malang in 1991, then continued Education in the Masters in Management at STIE IPWI Jakarta in 1997.

Penugasan Khusus : -

Riwayat Dasar Pengangkatan :

- RUPS Pengangkatan tanggal 17 Juli 2017
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 1 tanggal 4 September 2017

Special assignment: -

Basic History of Appointment:

- *Appointment by General Meeting of Shareholders on July 17, 2017*
- *Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 1 dated September 4, 2017*



Edward Siagian

KOMISARIS COMMISSIONER

Warga Negara Indonesia, lahir pada Januari 1960. Berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Komisaris PT PLN Enjiniring sejak 08 Desember 2020. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Expert Pengendalian Proyek (TK) pada (Tugas Karya ke PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2014 – 2016, Senior Specialist I Pengendalian Proyek (TK) pada (Tugas Karya PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2010 – 2014. Menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Teknik Tenaga Listrik di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1982, kemudian melanjutkan Pendidikan S2 Bidang Manajemen di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1997.

Indonesian citizen, born in January 1960. Domiciled in Jakarta. Served as Commissioner of PT PLN Enjiniring since December 08, 2020. Previously he had experience as an Project Control Expert (TK) at (work assignment at PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Head Office in 2014 – 2016, Senior Specialist I Project Control (TK) at (work assignment at PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Head Office in 2010 – 2014. Graduated from the Faculty of Electrical Engineering at the Bandung Institute of Technology (IRB) in 1982, then continued his Masters in Management at the Bandung Institute of Technology (ITB) in 1997.

Penugasan Khusus : -

Riwayat Dasar Pengangkatan :

- RUPS Sirkuler Pengangkatan tanggal 08 Desember 2020

Special assignment: -

Basic History of Appointment:

- Appointment by General Meeting of Shareholders on 08 December 2020



Profil Direksi

Profile of the Board of Directors



HERNANDI BUHRON

DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR

Warga Negara Indonesia, lahir pada November 1961. Berdomisili di Bandung. Menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN Enjiniring sejak 27 Desember 2016. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Kepala Divisi Pengadaan *Independent Power Producer* (IPP) di PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Senior Manajer Pengadaan Divisi Gas dan BBM, Manajer Divisi Perencanaan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, Tenaga Ahli Sistem Perencanaan Distribusi di Sub Direktorat Pemberdayaan Distribusi Direktorat Transmisi dan Distribusi PT PLN (Persero) Kantor Pusat. Menyelesaikan pendidikan Teknik Elektro di Institut Teknologi Surabaya (ITS) tahun 1985.

Indonesian citizen, born in November 1961. Domiciled in Bandung. Served as President Director of PT PLN Enjiniring since December 27, 2016. Previously he had experience as Head of the Procurement Division of Independent Power Producer (IPP) at PT PLN (Persero) for Head Office, Senior Procurement Manager in the Gas and Fuel Division, Planning Division Manager at PT PLN (Persero) for Distribution in West Java and Banten, Distribution Planning System Expert in the Distribution Empowerment Sub Directorate of the Transmission and Distribution Directorate of PT PLN (Persero) for Head Office. Completed his Electrical Engineering Education at the Surabaya Institute of Technology (ITS) in 1985.

Riwayat Dasar Pengangkatan :

- RUPS Pengangkatan tanggal 8 Desember 2016
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 47 tanggal 27 Desember 2016
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 76 tanggal 19 November 2019

Basic History of Appointment:

- Appointment by General Meeting of Shareholders on December 8, 2016
- Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 47 dated December 27, 2016
- Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 76 dated November 19, 2019



YANUAR HAKIM

DIREKTUR ENJINIRING DIRECTOR OF ENGINEERING

Warga Negara Indonesia, lahir pada Januari 1960. Berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Direktur Enjiniring PT PLN Enjiniring sejak 27 Desember 2016. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai General Manajer PT PLN (Persero) Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan pada tahun 2014-2016, Komite Pejabat Pengadaan pada Jaringan HVDC Sumatera-Jawa pada tahun 2013-2014, General Manajer Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali pada tahun 2012-2013, Kepala Divisi Direktorat Transmisi Indonesia Bagian Barat. Menyelesaikan pendidikan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1986, sebelum akhirnya mendapat gelar Master of Electrical Engineering (Power) di Universitas Wollongong, NSW, Australia pada tahun 2004.

Indonesian citizen, Born in November 1960. Domiciled in Jakarta. Served as Engineering Director of PT PLN Enjiniring since December 27, 2016. Previously he had experience as General Manager of PT PLN (Persero) for Electricity Engineering Center in 2014-2016, Procurement Officer Committee on the Sumatra-Java HVDC Network in 2013-2014, General Manager of Distribution and Load Control Center Java-Bali in 2012-2013, Head of the Western Indonesia Transmission Directorate Division. He completed his Electrical Engineering Education at the Bandung Institute of Technology (ITB) in 1986, before finally obtaining a Master of Electrical Engineering (Power) at Wollongong University, NSW, Australia in 2004.

Riwayat Dasar Pengangkatan :

- RUPS Pengangkatan tanggal 8 Desember 2016
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 47 tanggal 27 Desember 2016
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 76 tanggal 19 November 2019

Basic History of Appointment:

- Appointment by General Meeting of Shareholders on dated December 8, 2016
- Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 47 dated December 27, 2017
- Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 76 dated November 19, 2019





ULTRISZA MEDNAWARMAN

DIREKTUR PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN USAHA DIRECTOR OF MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT

Warga Negara Indonesia, lahir pada September 1961. Berdomisili di Tangerang. Menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT PLN Enjiniring sejak 27 Desember 2016. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Manajer Senior Manajemen IPP di PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2015-2016, Manajer Senior Pengadaan IPP Jawa – Bali di PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2010-2015, Manajer Niaga PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya & Tangerang pada tahun 2009-2010, Asisten Deputi Direktur Sistem Informasi Manajemen Program di Sub Direktorat Perencanaan dan Teknologi PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2008-2009, Manajer Komersial dan Pelayanan Pelanggan di PT PLN (Persero) Wilayah Lampung pada tahun 2007-2008. Menyelesaikan Pendidikan Teknik Elektro di Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1986 sebelum akhirnya menyelesaikan Pendidikan di PPM Sekolah Tinggi Manajemen.

Indonesian citizen, born in September 1961. Domiciled in Tangerang. Served as Director of Marketing and Business Development of PT PLN Enjiniring since December 27, 2016. Previously he had experience as Senior Manager of IPP Management at PT PLN (Persero) for Head Office in 2015-2016, Senior Manager of IPP Procurement Java-Bali at PT PLN (Persero) for Head Office in 2010-2015, Commercial Manager of PT PLN (Persero) for Jakarta Raya & Tangerang Distribution in 2009-2010, Assistant Deputy Director of Program Management Information Systems at the Sub-Directorate of Planning and Technology of PT PLN (Persero) for Head Office in 2008-2009, Manager of Commercial and Violation Services at PT PLN (Persero) for Lampung Region in 2007-2008. Completed Electrical Engineering Education at the University of Indonesia, Jakarta in 1986 before finally completing Education at PPM School of Management.

Riwayat Dasar Pengangkatan :

- RUPS Pengangkatan tanggal 8 Desember 2016
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 47 tanggal 27 Desember 2016
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 76 tanggal 19 November 2019

Basic History of Appointment:

- Appointment by General Meeting of Shareholders on December 8, 2016
- Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 47 dated December 27, 2016
- Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 76 dated November 19, 2019



ALFI ZAMZAMI

DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM

DIRECTOR OF FINANCE AND HUMAN RESOURCES

Warga Negara Indonesia, lahir pada Desember 1966. Berdomisili di Bekasi. Menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM PT PLN Enjiniring sejak 27 Desember 2016. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Manajer Senior Manajemen Pembelanjaan Divisi Treasury di PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Manajer Senior Administrasi dan Keuangan di PT PLN Enjiniring, Deputy Manajer General Affair pada Divisi SDM dan General Affair di PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Selatan. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Andalas, Padang pada tahun 1991 sebelum akhirnya mendapatkan gelar Master of Business di University of Tenaga Nasional, Kuala Lumpur – Malaysia pada tahun 2006.

Indonesian citizen, born in December 1966. Domiciled in Bekasi. Served as Director of Finance and Human Resources of PT PLN Enjiniring since December 27, 2016. Previously he had experience as a Senior Manager of Spending Management at the Treasury Division at PT PLN (Persero) for Head Office, Senior Administration and Finance Manager at PT PLN Enjiniring, Deputy Manager of General Affair at the HR and General Affairs Division at PT PLN (Persero) for Generation of South Sumatra. He completed his Bachelor of Accounting education at Andalas University, Padang in 1991 before finally obtaining Master of Business degree at the University of Tenaga Nasional, Kuala Lumpur - Malaysia in 2006.

Riwayat Dasar Pengangkatan :

- RUPS Pengangkatan tanggal 8 Desember 2016
- Akta Notaris Lenny Jannis Ishak, SH Nomor 47 tanggal 27 Desember 2016
- Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 76 tanggal 19 November 2019

Basic History of Appointment:

- Appointment by General Meeting of Shareholders on December 8, 2016
- Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 47 dated December 27, 2016
- Notarial Deed by Lenny Janis Ishak, SH Number 76 dated November 19, 2019



PROFIL KARYAWAN

EMPLOYEE PROFILE

KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON EMPLOYMENT STATUS

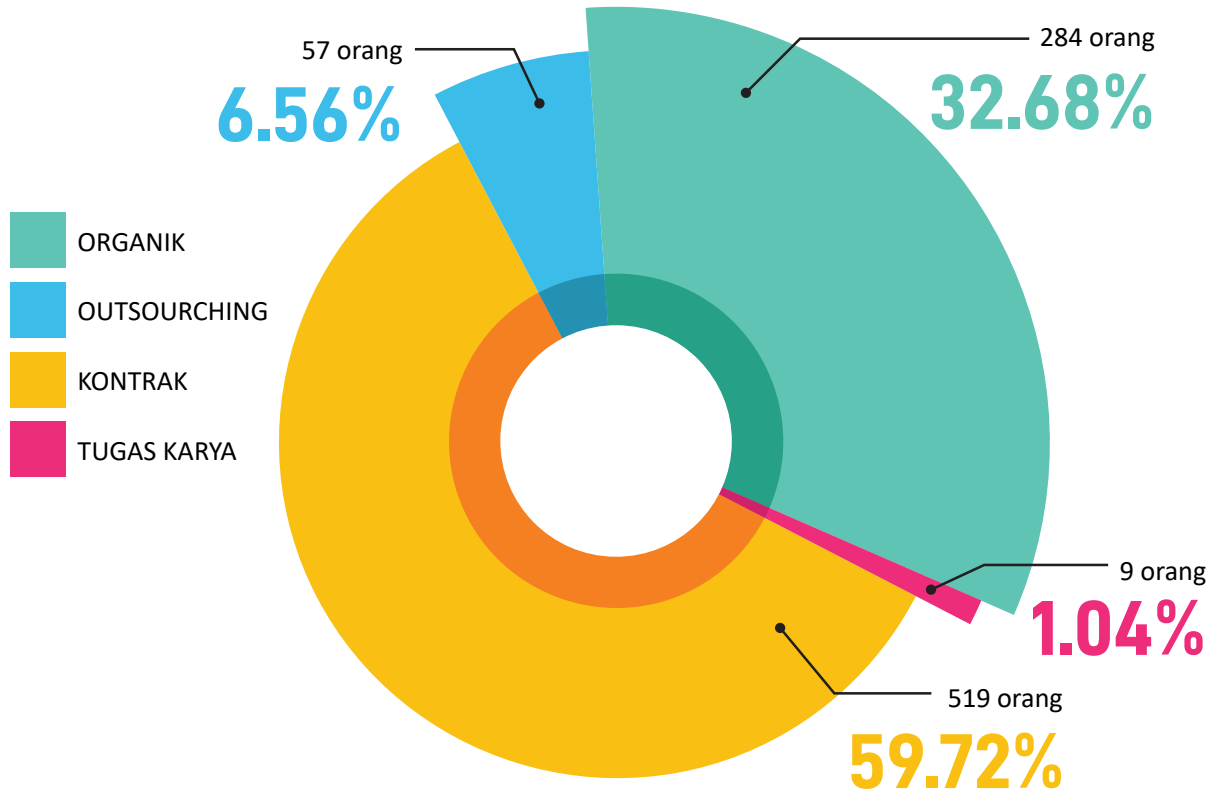


TABEL KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

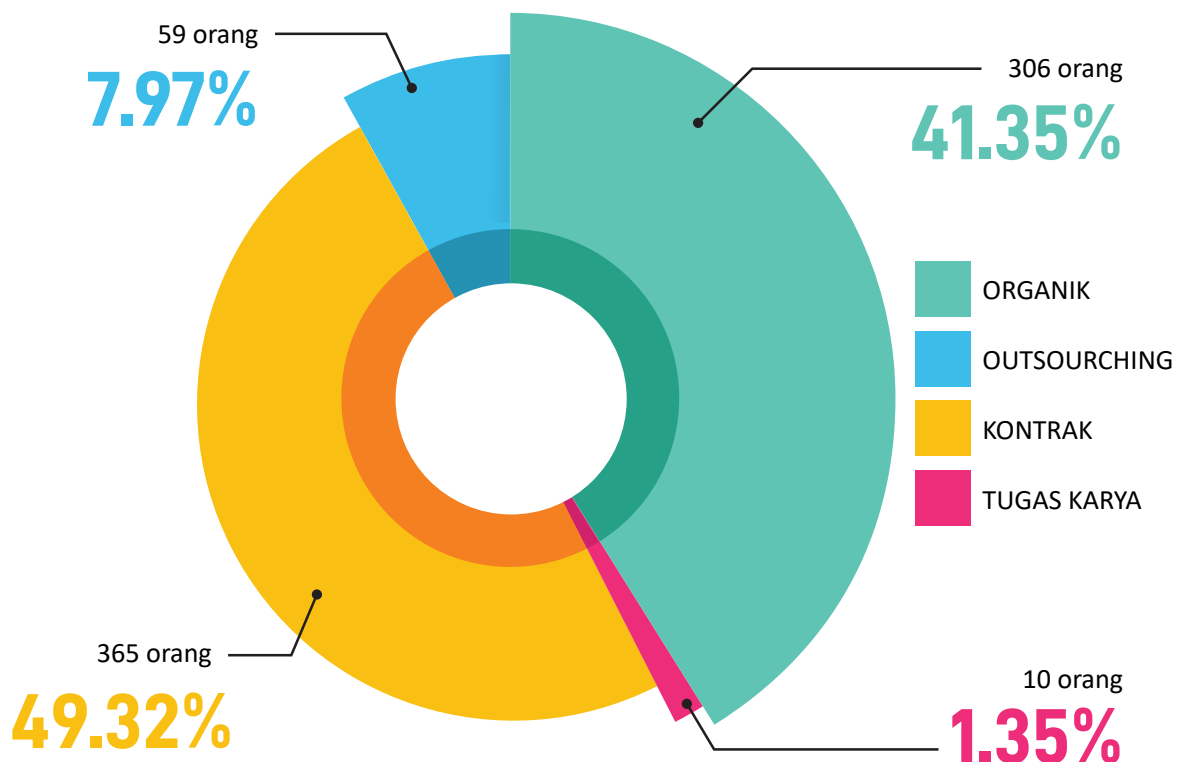
TABLE OF EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON CIVIL SERVICE STATUS

No	Status Kepegawaian <i>Employment Status</i>	Jumlah Pegawai <i>Number of Employees</i>		Perubahan (orang) <i>Change (Person)</i>	Perubahan (%) <i>Change (%)</i>
		Tahun 2020 (orang) (%)	Tahun 2019 (orang) (%)		
		<i>Year 2020 (Person) (%)</i>	<i>Year 2019 (Person) (%)</i>		
	Karyawan Tetap terdiri atas : <i>Permanent employees consist of :</i>				
	<i>Permanent employees consist of :</i>				
1	a. Organik <i>a. Organic</i>	306 41.35%	284 32.68%	22	7.75
	b. Tugas Karya <i>b. Work Assignments</i>	10 1.35%	9 1.04%	1	11.11
2	Karyawan Tidak Tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak) <i>Certain Period Employment Contract/Contract</i>	365 49.32%	519 59.72%	-154	-29.67
3	Tenaga Alih Daya <i>Outsourcing</i>	59 7.97%	57 6.56%	2	3.51
	TOTAL	740 100%	869 100%	223	25.03

GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN TAHUN 2019
 GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON CIVIL SERVICE STATUS IN 2019



GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN TAHUN 2020
 GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON CIVIL SERVICE STATUS IN 2020



KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL JABATAN ORGANISASI

EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON ORGANIZATIONAL LEVEL

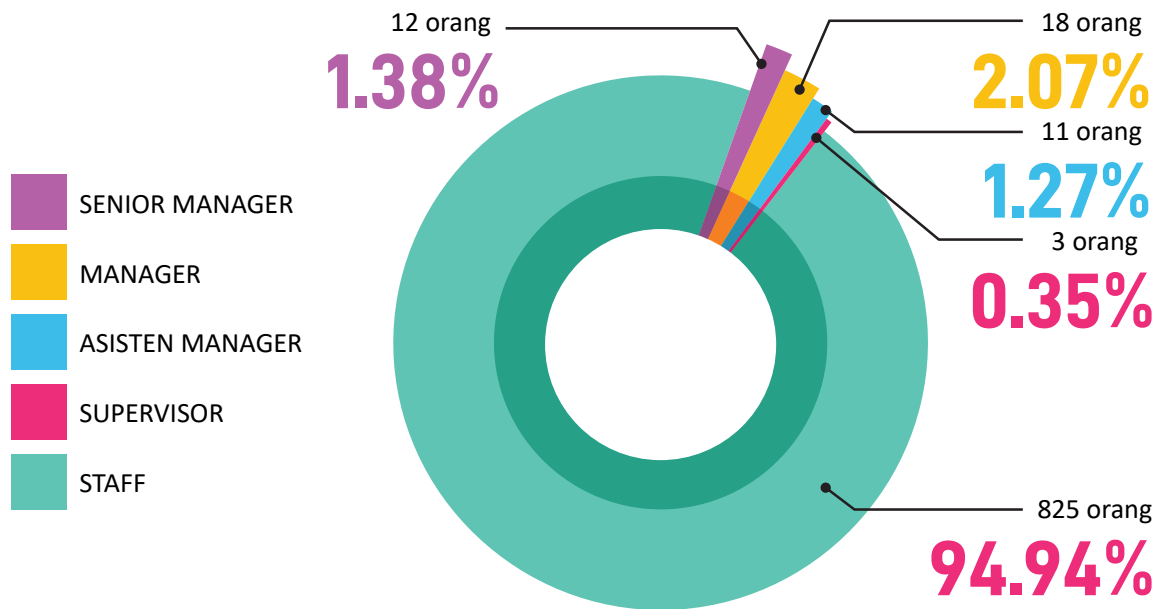


TABEL KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI

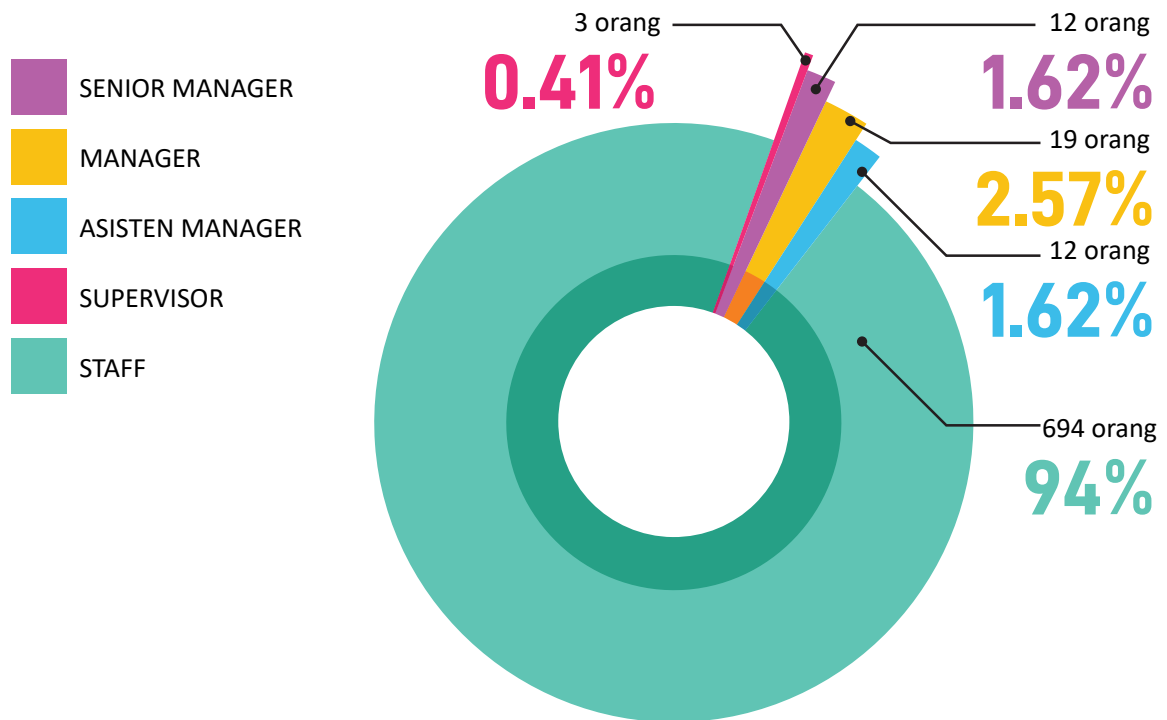
TABLE OF EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON ORGANIZATION POSITION LEVELS

Level Jabatan Organisasi <i>Organizational Position Level</i>	Jumlah Pegawai Number of Employees				Perubahan (orang) <i>Change (Person)</i>	Perubahan (%) <i>Change (%)</i>
	Tahun 2020 (orang) (%) <i>Year 2020 (Person) (%)</i>	Tahun 2019 (orang) (%) <i>Year 2019 (Person) (%)</i>				
	Senior Manager	12	1.62	12	1.38	0
Manager	19	2.57	18	2.07	1	5.56
Asst. Manager	12	1.62	11	1.27	1	9.09
Supervisor	3	0.41	3	0.35	0	0.00
Staff	694	93.78	825	94.94	-131	-15.88
TOTAL	740	100	869	100	-129	-1.23

GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL JABATAN ORGANISASI TAHUN 2019
 GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON ORGANIZATIONAL POSITION LEVEL IN 2019



GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL JABATAN ORGANISASI TAHUN 2020
 GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON ORGANIZATIONAL POSITION LEVEL IN 2020



KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL PENDIDIKAN

Employee Composition Based on Education Level



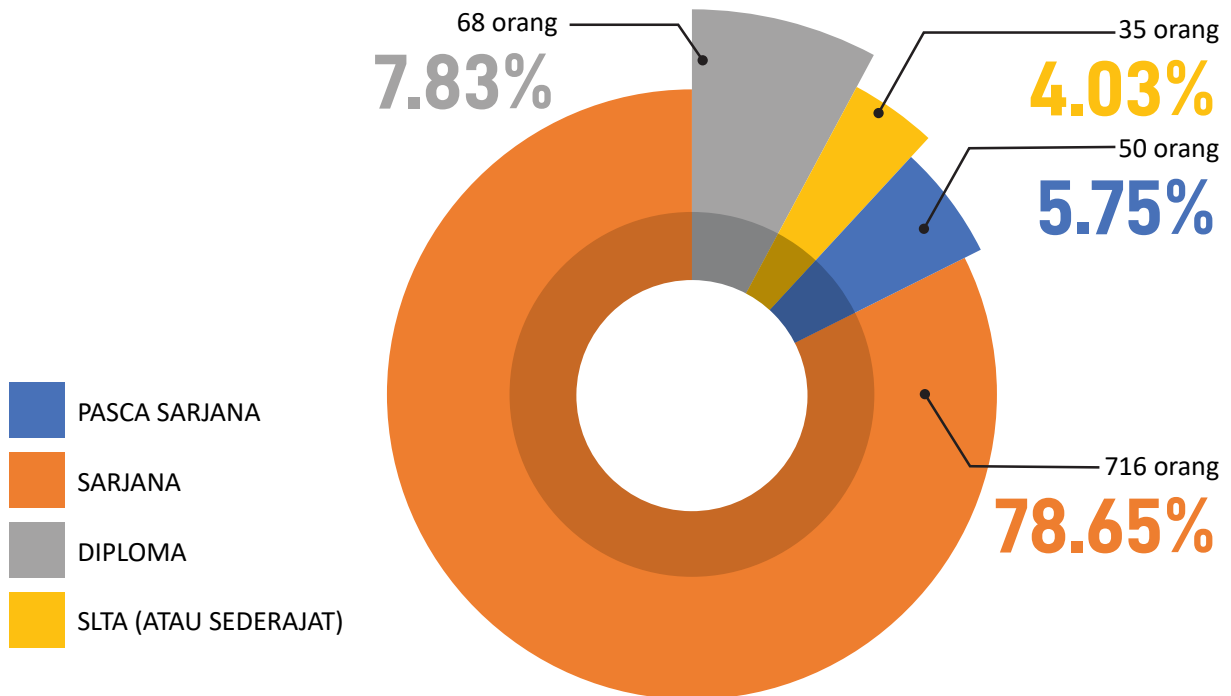
TABEL KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL PENDIDIKAN

TABLE OF EMPLOYEE COMPOSITION BY EDUCATION LEVEL

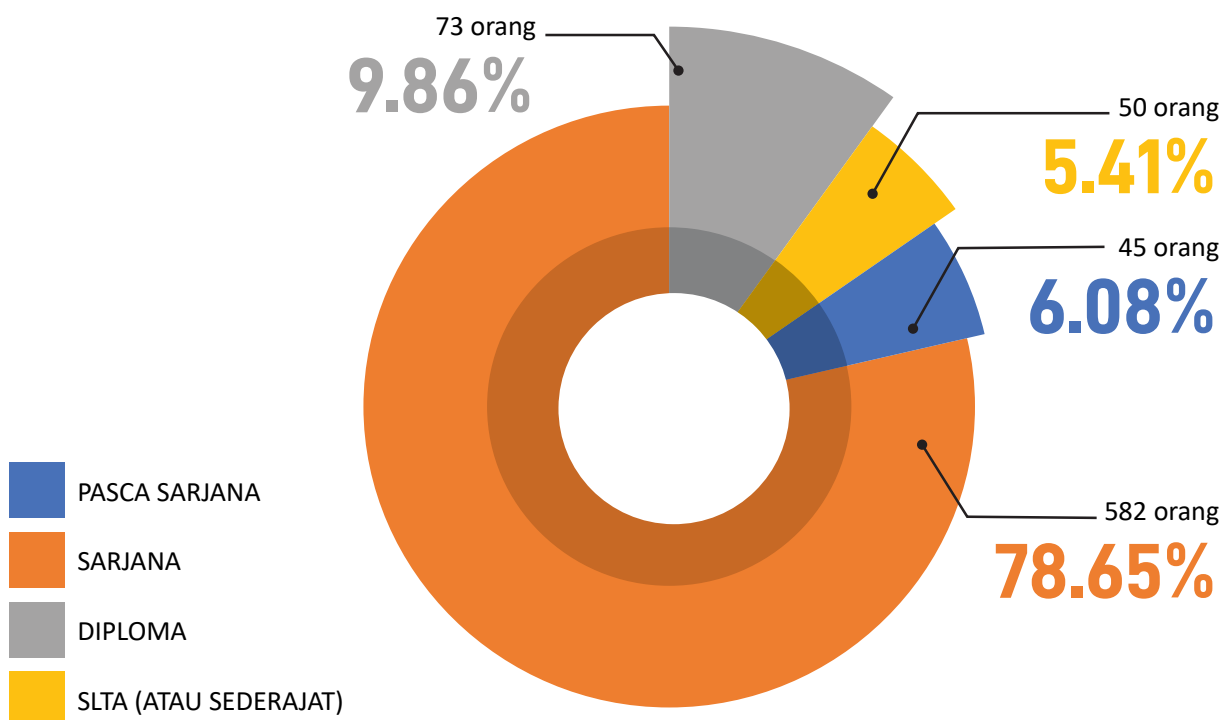
Level Pendidikan Education Level	Jumlah Pegawai Number of Employees				Perubahan (orang) Change (Person)	Perubahan (%) Change (%)
	Tahun 2020 (orang) (%)		Tahun 2019 (orang) (%)			
	Year 2020 (Person) (%)	Year 2019 (Person) (%)	Year 2019 (Person) (%)	Year 2019 (Person) (%)		
Pasca Sarjana Postgraduate	45	6.08	50	5.75	-5	-10.00
Sarjana Bachelor	582	78.65	716	82.39	-134	-18.72
Diploma Diploma	73	9.86	68	7.83	5	7.35
SLTA (atau sederajat) High School (or equivalent)	40	5.41	35	4.03	5	14.29
TOTAL	740	100	869	100	-129	-7.08



GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL PENDIDIKAN TAHUN 2019
 GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BY EDUCATION LEVEL IN 2019



GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL PENDIDIKAN TAHUN 2020
 GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BY EDUCATION LEVEL IN 2020



PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

Selama tahun 2020, Perusahaan melaksanakan pengembangan kompetensi karyawan yang terdiri dari 81 Program Pelatihan dengan diikuti oleh 453 orang, serta 25 Program Sertifikasi dengan diikuti oleh 177 orang terdiri dari Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai, dan Karyawan Kontrak/*Outsourcing*. Pengembangan kompetensi dilakukan dengan menerapkan menerapkan prinsip persamaan kesempatan bagi semua karyawan.

During 2020, the Company carried out employee competency development which consisted of 81 Training Programs with 453 participants and 25 Certification Programs attended by 177 participants, consisting of Members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Employees, and Contract Employees / Outsourcing. Competency development is carried out by applying the principle of equality of opportunity for all employees.

TABEL PELAKSANAAN PELATIHAN TAHUN 2020
TABLE OF TRAINING IMPLEMENTATION FOR 2020

No.	Waktu Pelaksanaan <i>Execution Time</i>	Jenis/Judul Pelatihan <i>Type / Title of Training</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Jumlah Peserta* <i>Number of Participants*</i>
1	FEBRUARI <i>FEBRUARY</i>	Dasar - dasar AMDAL <i>Basics of Environmental Impact Analysis</i>	HANOSEN PRATAMA HANOSEN PRATAMA	9
2	FEBRUARI <i>FEBRUARY</i>	International Finance Corporation Performance Standards (IFC PS) 7 and 8 in Hydropower Projects <i>International Finance Corporation Performance Standards (IFC PS) 7 and 8 in Hydropower Projects</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	2
3	FEBRUARI <i>FEBRUARY</i>	Workshop CIO <i>CIO Workshop</i>	CIO ACADEMY CIO ACADEMY	1
5	MARET <i>MARCH</i>	Geolistrik <i>Geoelectric</i>	Wahana Guna Mandiri Wahana Guna Mandiri	6
6	MARET <i>MARCH</i>	Qualified Risk Management Analyst (QRMA) <i>Qualified Risk Management Analyst (QRMA)</i>	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS) Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)	15
7	APRIL <i>APRIL</i>	Awareness dan Audit Internal ISO 9001:2015 <i>Awareness and Internal Audit of ISO 9001:2015</i>	SUCOFINDO SUCOFINDO	10
8	JUNI <i>JUNE</i>	Diklat Executive Education III <i>Executive Education III</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	10
9	JUNI <i>JUNE</i>	Anti-Bribery Management System Based on ISO 37001:2016 <i>Anti-Bribery Management System Based on ISO 37001:2016</i>	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS) Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)	42
10	JUNI <i>JUNE</i>	Awareness ISO 27001:2013 <i>Awareness ISO 27001:2013</i>	ITGID - PROXIS GROUP ITGID - PROXIS GROUP	11
11	JUNI <i>JUNE</i>	Internal Auditor ISO 27001:2013 <i>Internal Auditor ISO 27001:2013</i>	ITGID - PROXIS GROUP ITGID - PROXIS GROUP	2
12	JUNI <i>JUNE</i>	Lead Implementer ISO 27001:2013 <i>Lead Implementer ISO 27001:2013</i>	ITGID - PROXIS GROUP ITGID - PROXIS GROUP	4

13	JUNI JUNE	Public Speaking - The New Normal <i>Public Speaking - The New Normal</i>	Lutan Edukasi Lutan Edukasi	20
14	JUNI JUNE	Review Guideline Feasibility Study Solar Power Plant (PLTS) <i>Review Guideline Feasibility Study Solar Power Plant (PLTS)</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	13
15	JUNI JUNE	Review Guideline Feasibility Study Wind Power Plant (PLTB) <i>Review Guideline Feasibility Study Wind Power Plant (PLTB)</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	10
16	JUNI JUNE	Web Talk – Test Laboratories of the Future <i>Web Talk – Test Laboratories of the Future</i>	High Volt High Volt	11
17	JUNI JUNE	Webinar – Generator Protection <i>Webinar – Generator Protection</i>	Smartgate Smartgate	15
18	JUNI JUNE	Webinar KNIBB - Konstruksi RCC untuk Bendungan di Indonesia <i>KNIBB Webinar - RCC Construction for Dams in Indonesia</i>	Komite Nasional Indonesia Unruk Bendungan Besar (KNIBB) Komite Nasional Indonesia Unruk Bendungan Besar (KNIBB)	7
19	JUNI JUNE	Webinar Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Nasional Pasca Pandemi Covid-19 <i>Webinar Projection of National Electric Energy Needs Post Covid-19 Pandemic</i>	Institut Teknologi PLN Institut Teknologi PLN	7
20	JULI JULY	Pra SE/SPE I <i>Pra Supervisory Education/Specialist Education I</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	3
21	JULI JULY	Analisa Dokumen Kontrak EPC Berbasis FIDIC <i>FIDIC-Based EPC Contract Document Analysis</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1
22	JULI JULY	Analisis Aliran dan Hubung Singkat <i>Flow and Short Circuit Analysis</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	2
23	JULI JULY	Basic Design Enjiniring Mekanikal PLTU <i>Basic Design Mechanical Engineering Steam Power Plant</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1
24	JULI JULY	HIRARC, JSA dan Working Permit <i>HIRARC, JSA dan Working Permit</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1
25	JULI JULY	Hubungan Industrial Terapan <i>Applied Industrial Relations</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1
26	JULI JULY	IEEMA Cable Webinar on Power Cables - Online Inspection and Cable Accessories <i>IEEMA Cable Webinar on Power Cables - Online Inspection and Cable Accessories</i>	IEEMA IEEMA	2
27	JULI JULY	ITIL (Information Technology Infrastructure Library) <i>ITIL (Information Technology Infrastructure Library)</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1
28	JULI JULY	KEPABEANAN & MANAJEMEN LOGISTIK PROYEK KETENAGALISTRIKAN <i>CUSTOMS & ELECTRICITY PROJECT LOGISTICS MANAGEMENT</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1





Profil Perusahaan
Company Profile

29	JULI JULY	Mikroitik dan Topologi Jaringan <i>Mikroitik and Network Topology</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	5
30	JULI JULY	Online Focus Group Discussion - Implementation of AMI : A Route to Losses Reduction to Shoot Up Revenue <i>Online Focus Group Discussion - Implementation of AMI : A Route to Losses Reduction to Shoot Up Revenue</i>	PLN, BPPT, ICON+, PJCI, STT PLN PLN, BPPT, ICON+, PJCI, STT PLN	4
31	JULI JULY	Supply Chain Management (SCM) <i>Supply Chain Management (SCM)</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1
32	JULI JULY	Penyusunan Spesifikasi Teknik & RAB Sipil <i>Preparation of Technical Specifications & Civil Expenditure Budget Plan</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	4
33	JULI JULY	Perhitungan Setting dan Koordinasi Proteksi Sistem Distribusi <i>Calculation of Setting and Coordination of Distribution System Protection</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	2
34	JULI JULY	Program Management Office (PMO) Project Management Methodology (PMM) <i>Program Management Office (PMO) Project Management Methodology (PMM)</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1
35	JULI JULY	Teknik Design & Review Menggunakan Aplikasi MS Tower <i>Design & Review Techniques Using the MS Tower Application</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	2
36	JULI JULY	Workshop Public Speaking <i>Workshop Public Speaking</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1
37	AGUSTUS AUGUST	Supervisory Education (SE) I <i>Supervisory Education (SE) I</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	3
38	AGUSTUS AUGUST	Desain PLTS PV <i>PV Solar Power Plant Design Desain</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1
39	AGUSTUS AUGUST	KONTRAK BERBASIS FIDIC <i>FIDIC BASED CONTRACTS</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	5
40	AGUSTUS AUGUST	Manajemen Proyek Berbasis ARCGIS <i>ARCGIS Based Project Management</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	3
41	AGUSTUS AUGUST	Marketing Management <i>Marketing Management</i>	PPM Manajemen PPM Manajemen	3
42	AGUSTUS AUGUST	Master Plan Sistem Distribusi <i>Distribution System Master Plan</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1
43	AGUSTUS AUGUST	Negotiation Skills Komunikasi <i>Negotiation Skills Communication</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	2
44	AGUSTUS AUGUST	Social Media Marketing <i>Social Media Marketing</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1
45	AGUSTUS AUGUST	Supervisi Konstruksi Elektrikal Jaringan <i>Network Electrical Construction Supervision</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1

46	AGUSTUS AUGUST	Teknik Design & Review Menggunakan Aplikasi STAAD PRO <i>Design & Review Techniques Using the STAAD PRO Application</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	3
47	AGUSTUS AUGUST	TEKNIK PENGUKURAN TOPOGRAFI (BATHYMETRI) <i>TOPOGRAPHIC MEASUREMENT TECHNIQUES (BATIMETRY)</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	2
48	AGUSTUS AUGUST	Webinar – Ghana Nuclear Energy Market Update <i>Webinar – Ghana Nuclear Energy Market Update</i>	NBP CONVERSATIONS NBP CONVERSATIONS	4
49	AGUSTUS AUGUST	Webinar – Pengembangan Tampung Waduk dengan PLTS <i>Webinar – Development of Reservoir Storage with Solar Power Plant</i>	Komite Nasional Indonesia Unruk Bendungan Besar (KNIBB) Komite Nasional Indonesia Unruk Bendungan Besar (KNIBB)	30
50	AGUSTUS AUGUST	Workshop Digital Procurement Modul Cost Estimator dan Spend Analytics (Inisiatif Strategik) <i>Workshop Digital Procurement Modul Cost Estimator dan Spend Analytics (Inisiatif Strategik)</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	10
51	SEPTEMBER SEPTEMBER	EXECUTIVE EDUCATION (EE) III <i>EXECUTIVE EDUCATION (EE) III</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	2
52	SEPTEMBER SEPTEMBER	Analisa HPE Pembangkit dan Transmisi <i>Price Analysis Estimated Generation and Transmission Engineering</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	3
53	SEPTEMBER SEPTEMBER	Analisa Laporan Keuangan <i>Analysis of Financial Statements</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1
54	SEPTEMBER SEPTEMBER	Contractor Safety Management System (CSMS) <i>Contractor Safety Management System (CSMS)</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1
55	SEPTEMBER SEPTEMBER	Hubungan Industrial Dasar <i>Basic Industrial Relations</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1
56	SEPTEMBER SEPTEMBER	Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan TKDN <i>Terms and Procedures for Calculation of TKDN</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	54
57	SEPTEMBER SEPTEMBER	Manajemen Konstruksi Manajer Dasar <i>Construction Management Basic Manager</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1
58	SEPTEMBER SEPTEMBER	Pengadaan Barang dan Jasa PT PLN (Persero) <i>Procurement of Goods and Services PT PLN (Persero)</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	14
59	SEPTEMBER SEPTEMBER	Survey Jalur Transmisi (SUTT & SUTET) <i>Transmission Line Survey (SUTT & SUTET)</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	2
60	OKTOBER OCTOBER	Analisa Arus Kas <i>Cash Flow Analysis</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1
61	OKTOBER OCTOBER	Capital Budgeting Risk <i>Capital Budgeting Risk</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1
62	OKTOBER OCTOBER	Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup <i>Environmental Management Policy</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1
63	OKTOBER OCTOBER	Pengelolaan Keuangan Imprest Terpusat <i>Centralized Imprest Financial Management</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1
64	OKTOBER OCTOBER	Perencanaan PLTS <i>Solar Power Plant Planning</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	8




Profil Perusahaan
 Company Profile

65	OKTOBER OCTOBER	Sosialisasi Pembekalan Masa Purna Bakti <i>Dissemination of Retirement Debriefing</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	2
66	OKTOBER OCTOBER	Supervisi Konstruksi Sipil Jaringan <i>Network Civil Construction Supervision</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1
67	OKTOBER OCTOBER	Teknik Desain Instalasi Relai Proteksi, Kontrol dan Meter <i>Protection, Control and Meter Relay Installation Design Engineering</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	2
68	OKTOBER OCTOBER	Teknik Perhitungan Struktur Bawah (Pondasi), Stabilitas & Metode Proteksi Lereng <i>Calculation Technique for Substructure (Foundation), Stability & Slope Protection Method</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	3
69	OKTOBER OCTOBER	Workshop Transfer Pricing <i>Transfer Pricing Workshop</i>	Ortax Ortax	2
70	NOVEMBER NOVEMBER	EXECUTIVE EDUCATION (EE) II <i>EXECUTIVE EDUCATION (EE) II</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1
71	NOVEMBER NOVEMBER	Analisa Beban Kerja Berbasis Produktivitas <i>Productivity-Based Workload Analysis</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	5
72	NOVEMBER NOVEMBER	Auditor Internal ISO 37001 <i>ISO 37001 Internal Auditor</i>	Wimconsult Wimconsult	5
73	NOVEMBER NOVEMBER	Awareness ISO 9001:2015 <i>ISO 9001:2015 Awareness</i>	Synergy Solusi Synergy Solusi	3
74	NOVEMBER NOVEMBER	Basic Knowledge of LNG Online Training <i>Basic Knowledge of LNG Online Training</i>	Badak LNG Badak LNG	2
75	NOVEMBER NOVEMBER	Creating Organization Effectiveness Trough People Development <i>Creating Organization Effectiveness Trough People Development</i>	PPM Manajemen PPM Manajemen	3
76	NOVEMBER NOVEMBER	Obligasi <i>Bond</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1
77	NOVEMBER NOVEMBER	Pengantar Perpajakan <i>Introduction to Taxation</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1
78	NOVEMBER NOVEMBER	Supervisi Konstruksi Transmisi <i>Transmission Construction Supervision</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1
79	NOVEMBER NOVEMBER	Total Quality Management <i>Total Quality Management</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	1
80	NOVEMBER NOVEMBER	W5 - Geological Risk Assessment for Hydropower Projects <i>W5 - Geological Risk Assessment for Hydropower Projects</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	2
81	DESEMBER DECEMBER	EFFECTIVE COMMUNICATION NAD NEGOTIATION <i>EFFECTIVE COMMUNICATION NAD NEGOTIATION</i>	Ir. Yani Soegito Ir. Yani Soegito	30
Total Jumlah Peserta Pelatihan <i>Total Number of Training Participants</i>				453

(Catatan: jumlah peserta* sebanyak 453 orang karena terdapat beberapa orang Pegawai yang mendapatkan pelatihan lebih dari satu kali)

(Note: the number of participants* is 453 people because there are some employees who received training more than once)

TABEL PELAKSANAAN SERTIFIKASI TAHUN 2020
TABLE OF CERTIFICATION IMPLEMENTATION FOR 2020

No.	Waktu Pelaksanaan <i>Execution Time</i>	Jenis/Judul Sertifikasi <i>Type / Title of Certification</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants*</i>
1	JANUARI <i>JANUARY</i>	Sertifikasi Level 5 GI <i>Substation Level 5 Certification</i>	ELESKA IATKI <i>ELESKA IATKI</i>	1
2	FEBRUARI <i>FEBRUARY</i>	Ahli Teknik Lingkungan - Madya <i>Environmental Engineer - Intermediate</i>	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) <i>Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)</i>	1
3	MARET <i>MARCH</i>	Ahli K3 Umum <i>Occupational Safety and Health Specialist</i>	Phytagoras <i>Phytagoras</i>	11
4	MARET <i>MARCH</i>	Ahli Teknik Bangunan Gedung - Utama <i>Building Engineer - Expert</i>	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) <i>Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)</i>	1
5	MARET <i>MARCH</i>	Brevet A & B <i>Brevet A & B</i>	Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) <i>Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)</i>	5
6	MARET <i>MARCH</i>	Qualified Risk Management Analyst (QRMA) <i>Qualified Risk Management Analyst (QRMA)</i>	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS) <i>Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)</i>	16
7	APRIL <i>APRIL</i>	Ahli Project Management - Madya <i>Project Management - Intermediate</i>	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) <i>Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)</i>	33
8	APRIL <i>APRIL</i>	Ahli Project Management - Utama <i>Project Management - Expert</i>	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) <i>Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)</i>	12
9	APRIL <i>APRIL</i>	Ahli Teknik Jembatan - MADYA <i>Bridge Engineer - Intermediate</i>	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) <i>Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)</i>	2
10	APRIL <i>APRIL</i>	Ahli Teknik Mekanikal - Madya <i>Mechanical Engineer - Intermediate</i>	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) <i>Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)</i>	9
11	APRIL <i>APRIL</i>	Ahli Teknik Tenaga Listrik - Madya <i>Electrical Engineer - Intermediate</i>	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) <i>Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)</i>	4





12	JUNI JUNE	Ahli Teknik Bangunan Gedung - Madya <i>Building Engineer - Intermediate</i>	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	2
13	JULI JULY	Ahli Teknik Jalan - Madya <i>Road Engineer - Intermediate</i>	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	3
14	JULI JULY	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah <i>Government Procurement of Goods and Services</i>	PPM Manajemen PPM Manajemen	1
15	SEPTEMBER SEPTEMBER	Ahli Geoteknik - MADYA <i>Geotechnical - Intermediate</i>	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	3
16	SEPTEMBER SEPTEMBER	Ahli Manajemen Konstruksi - MADYA <i>Construction Management - Intermediate</i>	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	1
17	SEPTEMBER SEPTEMBER	Ahli Teknik Bangunan Lepas Pantai - MADYA <i>Offshore Building Engineer - Intermediate</i>	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	2
18	SEPTEMBER SEPTEMBER	Ahli Teknik Bendungan Besar - MADYA <i>Large Dam Engineer - Intermediate</i>	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	2
19	SEPTEMBER SEPTEMBER	Ahli Teknik Terowongan - MADYA <i>Tunnel Engineer - Intermediate</i>	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	1
20	OKTOBER OCTOBER	Ahli Teknik Tenaga Listrik Utama <i>Electrical Engineer - Expert</i>	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	7
21	OKTOBER OCTOBER	Auditor SMK3 <i>SMK3 Auditor</i>	Mitra Dinamis Yang Utama (Midiatama) Mitra Dinamis Yang Utama (Midiatama)	1
22	OKTOBER OCTOBER	Qualified Risk Professional (QRMP) <i>Qualified Risk Professional (QRMP)</i>	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS) Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)	3
23	OKTOBER OCTOBER	Verifikator TKDN <i>TKDN Verifier</i>	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT PLN (PERSERO) PUSDIKLAT	54
24	NOVEMBER NOVEMBER	Ahli Teknik Sumber Daya Air - Madya <i>Water Resources Engineer - Intermediate</i>	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	1
25	NOVEMBER NOVEMBER	Gada Utama <i>Gada Utama</i>	Sigap Academy Sigap Academy	1
Total Jumlah Peserta Pelatihan <i>Total Number of Training Participants</i>				177

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Total biaya pengembangan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan sertifikasi pada tahun 2020 sebesar Rp 1.155.878.330, atau rata-rata sebesar Rp 1.834.728 per orang. Biaya pengembangan kompetensi karyawan untuk tahun 2020 menurun sebesar 70,71% dibandingkan dengan 2019 sebesar Rp 3.986.726.936. Hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2020 terdapat program *training* yang tidak dapat dilaksanakan karena pandemi Covid-19.

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT COSTS

The total cost of employee competency development through training and certification in 2020 amounted to Rp 1.155.878.330, or an average amounted to Rp 1.834.728 per person. The cost of employee competency development for 2020 decreased by 70.71% compared to 2019 which amounted to Rp 3.986.726.936. This happened because in 2020 there was a training program that could not be carried out due to the Covid-19 pandemic.



Profil Pejabat Eksekutif

Profile of Executive Officers

■ TOTOT FREGATTANTO

Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, umur 53 tahun. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak Mei 2018. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Senior Engineer I Perencanaan Sistem pada Divisi Perencanaan Sistem Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015-2016). Menyelesaikan Pendidikan S1 Listrik dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan S2 Bidang Manajemen dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

■ TOTOT FREGATTANTO

Corporate Secretary

Indonesian citizen, 53 years old. Served as Corporate Secretary since May 2018. Previously, he served as Senior Engineer I of System Planning in the System Planning Division of the Corporate Planning Directorate of PT PLN (Persero) for Head Office (2015-2016). Completed his Bachelor's Education in Electrical Power Engineering at Sepuluh Nopember Institute of Technology and Master's Education in Management at Institute for Research and Community Service.

■ RUNGGUN FREDO AMARTA

Kepala Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko sejak April 2020, sebelumnya menjabat sebagai Manajer Unit Pelaksana Produksi & Workshop III pada PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan (2016 – 2020). Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Mesin dari Universitas Indonesia dan S2 Administrasi Bisnis dari Universiti Tenaga Nasional, Malaysia.

■ RUNGGUN FREDO AMARTA

Head of Procurement, Quality and Risk Management Unit

Indonesian citizens. Served as Head of Procurement Unit, Quality and Risk Management since April 2020, Previously served as Production & Workshop III Implementation Unit Manager at PT PLN (Persero) Electricity Maintenance Center (2016 – 2020). Obtained his Bachelor degree in Mechanical Engineering from University of Indonesia and Master of Business Administration from Universiti Tenaga Nasional, Malaysia.

■ IZHAR SYAFRIL

Kepala Satuan Pengawasan Internal

Warga Negara Indonesia, umur 52 tahun. Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern sejak Juli 2019, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satuan Audit Internal PT PLN (Persero) Kantor Pusat Tahun 2019 dan menjabat sebagai Group Head Audit Maluku Papua pada tahun 2018. Menamatkan pendidikan D3 Mesin Universitas Sriwijaya dan S1 Teknik Mesin di Universitas Taman Siswa Palembang.

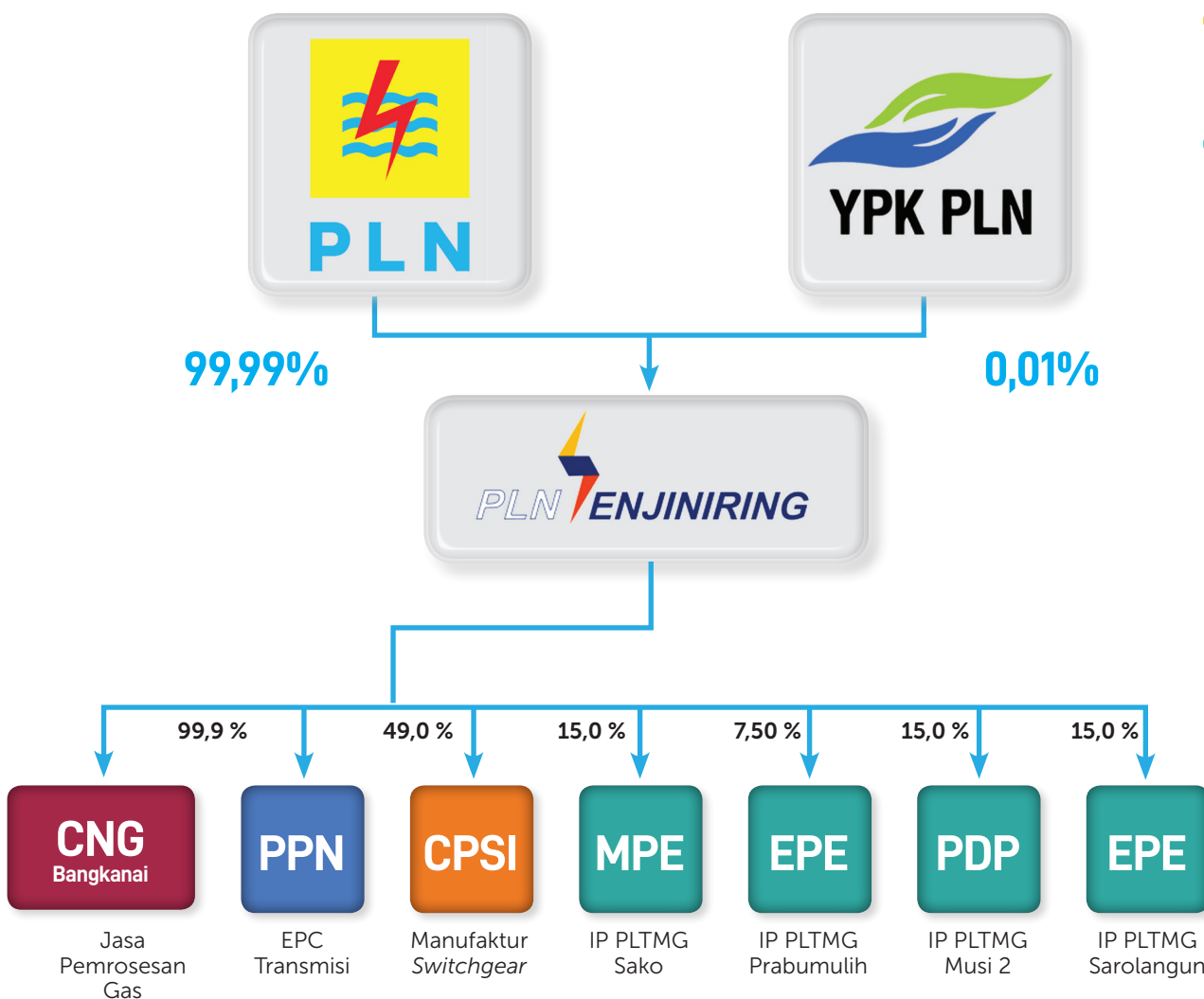
■ IZHAR SYAFRIL

Head of Internal Supervision Unit

Indonesian citizen, 52 years old. Served as Head of the Internal Supervision Unit since July 2019. Previously he served as Head of Internal Audit Unit of PT PLN (Persero) at Head Office 2019 and serves as Group Head Audit for Maluku Papua on March 2018. Graduated from associate degree in Mechanical Engineering at Sriwijaya University and Bachelor's Education in Mechanical Engineering at Taman Siswa University Palembang.

Struktur Korporasi

Corporate Structure



- Unit Usaha**
- Anak Perusahaan**
- Joint Venture Company**
- Afiliasi/Penyertaan Saham**

- CNG Bangkanai : Compressed Natural Gas Bangkanai
- PPN : PT Prima Power Nusantara
- CPSI : PT Crompton Power Switchgear Indonesia
- MPE : PT Multidaya Prima Elektrindo
- EPE : PT Energi Prima ElektriKa
- PDP : PT Putra Daya Prima
- PPE : PT Permata Prima Elektrindo

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM CHRONOLOGY OF REGISTERED SHARES

PLN Enjiniring merupakan badan usaha *non listed* yang belum melakukan pencatatan saham.
PLN Enjiniring is a non-listed business entity that has not yet registered the shares.

KRONOLOGI PENCATATAN EFEK LAINNYA CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES

REGISTERS

PLN Enjiniring belum melakukan pencatatan efek lainnya.
PLN Enjiniring has not yet registered the other securities.

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN/ENTITAS ASOSIASI

LIST OF SUBSIDIARY COMPANIES AND/OR ASSOCIATED ENTITIES

TABEL ENTITAS ANAK DAN ASOSIASI

TABLE OF SUBSIDIARIES AND ASSOCIATIONS

Nama Perusahaan	Kepemilikan Saham	Bidang Usaha	Status Operasi	Kedudukan
<i>Name of Company</i>	<i>Stock Ownership</i>	<i>Business Fields</i>	<i>Operational Status</i>	<i>Position</i>
Entitas Anak				
<i>Subsidiary Entity</i>				
PT Prima Power Nusantara	99,9%	Investasi, operasi dan pemeliharaan pembangkit, Engineering Procurement and Construction (EPC) Transmisi dan Gardu Induk Tenaga Listrik, oil dan gas serta penyediaan peralatan pendukung dalam bidang ketenagalistrikan <i>Investment, Operation and Generation Maintenance, Engineering Procurement and Construction (EPC) of Electric Power Transmission and Substation, Oil and Gas and the provision of supporting equipment in the electricity sector</i>	Beroperasi Operating	Jakarta
Entitas Asosiasi				
<i>Associated Entities</i>				
PT Energi Prima Elekrika	7,5%	Pembangkit <i>Generator</i>	Beroperasi <i>Operating</i>	Jakarta Selatan
PT Pura Daya Prima	15,0%	Pembangkit <i>Generator</i>	Beroperasi <i>Operating</i>	Jakarta
PT Multidaya Prima Elektrindo	15,0%	Pembangkit <i>Generator</i>	Beroperasi <i>Operating</i>	Jakarta Selatan
PT Permata Prima Elektrindo	15,0%	Pembangkit <i>Generator</i>	Beroperasi <i>Operating</i>	Jakarta
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia	49,0%	Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik <i>Industrial electric control and distribution equipment</i>	Beroperasi Operating	Jakarta Selatan

Profil Anak Perusahaan

Subsidiary Profile

PT PRIMA POWER NUSANTARA

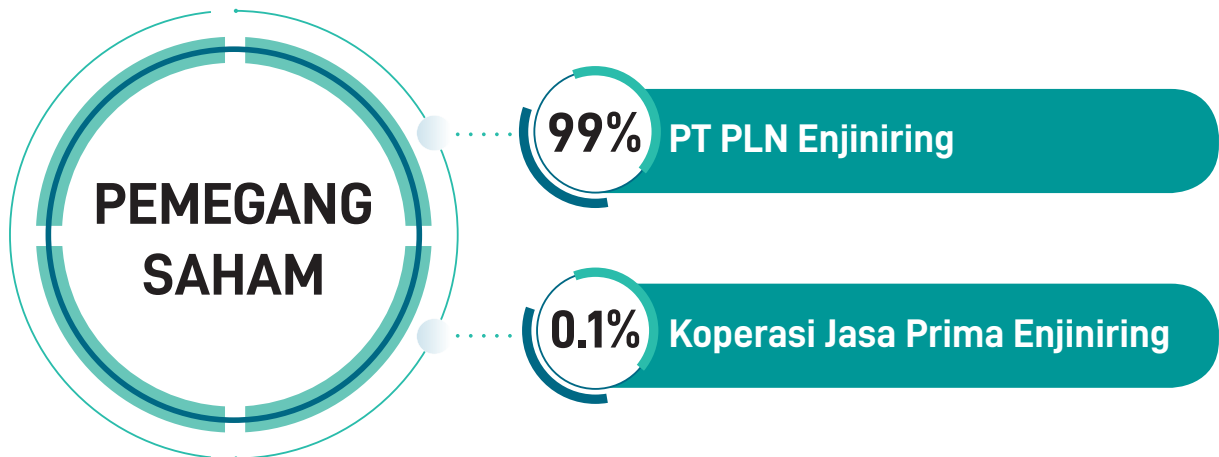
Didirikan berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 16 Juni 2016 oleh Notaris Lenny Janis Ishak. Telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0029883.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 21 Juni 2016. PLN Enjiniring memiliki saham sebesar 99,9%.

PT PRIMA POWER NUSANTARA

Established based on Deed No. 21 dated June 16, 2016 by Notary Lenny Janis Ishak. Has obtained the Ratification under the Decree of the Minister of Law and Human Rights number AHU-0029883.AH.01.01.Year2016 dated June 21, 2016. PLN Enjiniring owns 99.9% of shares.

Daftar Pemegang Saham PT Prima Power Nusantara

Shareholders List of PT Prima Power Nusantara



Kegiatan Usaha Perseroan meliputi :

1. Pengembangan usaha di bidang investasi
2. Operasi dan pemeliharaan pembangkit, transmisi dan distribusi di sektor ketenagalistrikan dan non ketenagalistrikan
3. Pengembangan usaha di bidang EPC transmisi dan gardu induk tenaga listrik
4. Pemeliharaan instalasi minyak dan gas
5. Menjalankan usaha-usaha di bidang peralatan pendukung dan atau manufaktur dalam bidang ketenagalistrikan

The Company's business activities include:

1. Business development in the investment sector
2. Operation and maintenance of power plant, transmission and distribution in the electricity and non-electricity sectors
3. Business development in EPC transmission and electric power substations
4. Oil and gas installations Maintenance
5. Running businesses of supporting equipment and or manufacturing field in the electricity sector



6. Usaha lainnya yang berkaitan dengan usaha Perseroan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki perusahaan.

6. Other businesses related to the Company's business in order to maximize the potential of the company.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Prima Power Nusantara sebagai berikut.

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Prima Power Nusantara is as follows.

SUSUNAN BOD & BOC PERIODE TAHUN 2020

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PT PRIMA POWER NUSANTARA

No	Nama Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan	KPTS RUPS
1	Ir. Septa Hamid, MSc	Komisaris Utama	3 Tahun	No: Akta No 21 tanggal 16 Juni 2016
2	Mochamad Sofyan	Komisaris	3 Tahun	No: Akta No 21 tanggal 16 Juni 2016

SUSUNAN DIREKSI PT PRIMA POWER NUSANTARA

No	Nama Direktur	Jabatan	Masa Jabatan	KPTS RUPS
1	Sarono	Direktur Utama	3 Tahun	No: Akta No 21 tanggal 16 Juni 2016
2	Abdul Fadhill	Direktur Keuangan	3 Tahun	No: Akta No 21 tanggal 16 Juni 2016
3	Setyo Heru Purwoko	Direktur Teknik	3 Tahun	No: Akta No 21 tanggal 16 Juni 2016



Profil Perusahaan Asosiasi

Associated Company Profile

PT ENERGI PRIMA ELEKTRIKA

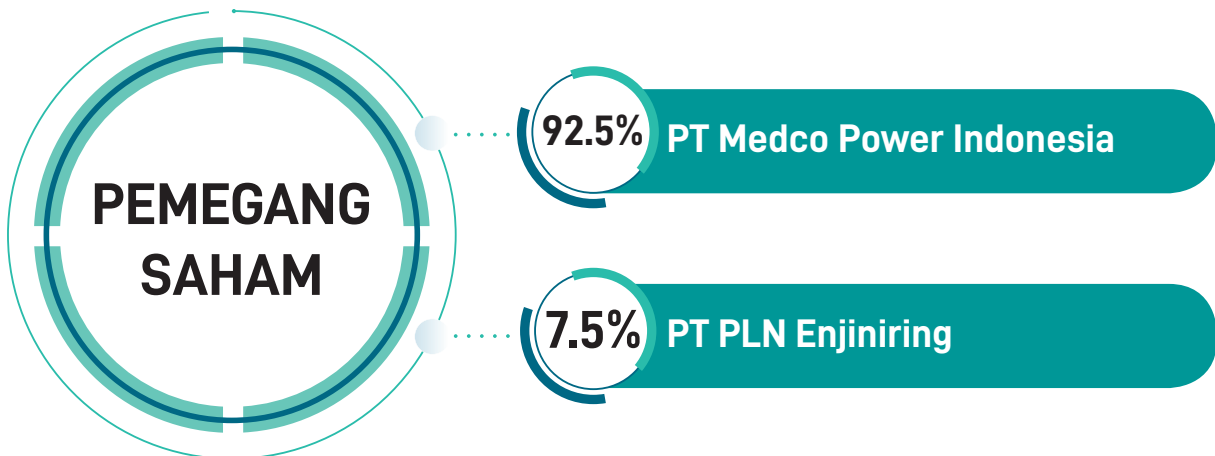
Didirikan sesuai Akta Pendirian No. 1 tanggal 24 Mei 2004 oleh Notaris Jafrizoli, SH dengan bidang usaha pembangkit (IPP Prabumulih). Telah mendapatkan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-18964 HT.01.01.TH.2004 tanggal 29 Juli 2004. PLN Enjiniring memiliki penyertaan usaha sebesar 7,5% atas modal disetor.

Daftar Pemegang Saham PT Prima Power Nusantara

PT ENERGI PRIMA ELEKTRIKA

Established under the Deed of Incorporation No. 1 dated May 24, 2004 by Notary Jafrizoli, SH in the business field of power generation (IPP Prabumulih). Has obtained the Ratification under the Decree of the Minister of Justice and Human Rights Number: C-18964 HT.01.01.TH.2004 dated July 29, 2004. PLN Enjiniring has a business participation by 7.5% of paid-up capital.

Shareholders List of PT Prima Power Nusantara



Kegiatan Usaha Perseroan meliputi :

1. Melakukan usaha di bidang industri pembangkit tenaga listrik berikut transmisi dan distribusi tenaga listrik, fabrikasi, peralatan listrik dan elektronika;
2. Menjalankan usaha di bidang perdagangan pada umumnya, termasuk ekspor impor, interinsuler dan lokal terutama memperdagangkan alat-alat listrik dan elektronika, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi aatau amanat.
3. Memberikan jasa konsultasi di bidang listrik (elektrikal), listrik elektronika serta jasa penunjang kelistrikan; melakukan pemasangan instalasi dan jaringan listrik.

The Company's business activities include:

1. *Performed business in the power plant industry including electric power transmission and distribution, fabrication, electrical equipment and electronics;*
2. *Running a general trading business, including export, import, interinsular and local, especially in electrical and electronic equipment trading, either for own calculations or on a commission or mandate basis.*
3. *Provide consulting services in electricity (electrical) field, electrical electronics and electrical support services; perform electrical installations and networks.*



Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Energi Prima ElektriKA sebagai berikut.

PT Energi Prima ElektriKA Board of Commissioners and Directors arrangement is as follows.

SUSUNAN BOD & BOC PERIODE TAHUN 2020 SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PT ENERGI PRIMA ELEKTRIKA

No	Nama Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan	KPTS RUPS
1	Budi Nugroho	Komisaris Utama	3 Tahun	Akta No. 10 tanggal 28 April 2020
2	Sutiyo	Komisaris	3 Tahun	Akta No. 10 tanggal 28 April 2020

SUSUNAN DIREKSI PT ENERGI PRIMA ELEKTRIKA

No	Nama Direktur	Jabatan	Masa Jabatan	KPTS RUPS
1	Danny Praditya	Direktur Utama	3 Tahun	Akta No. 10 tanggal 28 April 2020
2	Susilawati	Direktur	3 Tahun	Akta No. 10 tanggal 28 April 2020

Saat ini PT Energi Prima ElektriKA memiliki 1 lini bisnis yang bergerak dibidang pembangkit yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Currently PT Energi Prima ElektriKA has 1 business line which is engaged in the power plant, which is detailed as follows:

Lokasi : Prabumulih

Location : Prabumulih

Kapasitas : 2 x 6 MW

Capacity : 2 x 6 MW

Jenis : Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)

Type : Gas Engine Power Plant (PLTMG)

Jumlah : 7,5% penyertaan

Jumlah : 7,5% penyertaan

Status : Pembangunan selesai, mulai operasi 2006

Amount : Construction complete, start operation 2006

Investor lainnya : PT Medco Power Indonesia (92,5%)

Other investors : PT Medco Power Indonesia (92,5%)

PT PURA DAYA PRIMA

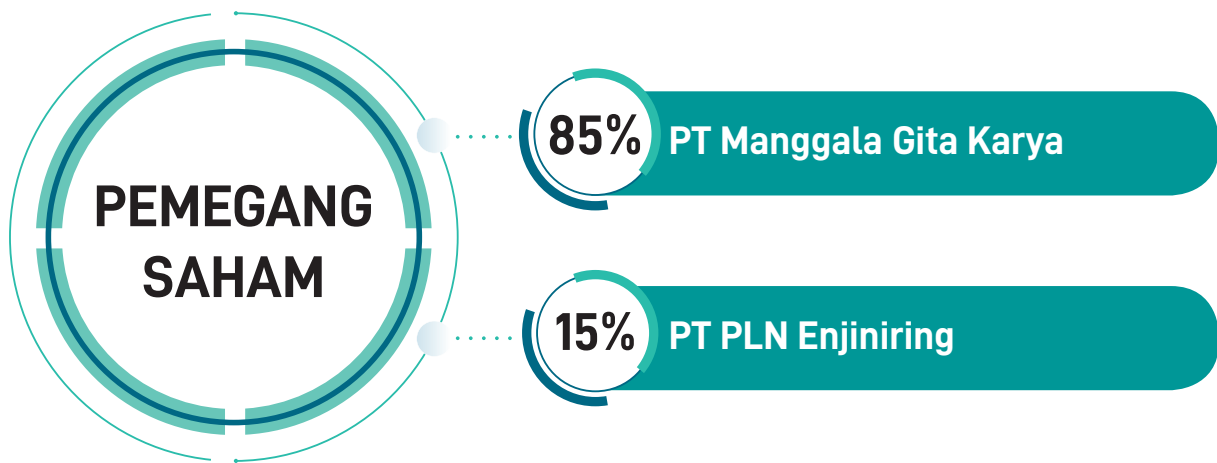
Didirikan sesuai Akta Pendirian No.34 tanggal 30 Maret 2005 oleh Notaris Eddi Setiadi, SH dengan bidang usaha pembangkit (IPP Musi II). Telah mendapatkan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-28440 HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Oktober 2005. PLN Enjiniring memiliki penyertaan usaha sebesar 15% atas modal disetor.

Daftar Pemegang Saham PT Prima Power Nusantara

PT PURA DAYA PRIMA

Established under the Deed of Incorporation No.34 dated March 30th, 2005 by Notary Eddi Setiadi, SH in the business field of power generation (IPP Musi II). Has obtained the Ratification under the Decree of the Minister of Justice and Human Rights Number: C-28440 HT.01.01.TH.2005 dated October 17th, 2005. ENG Engineering has a business participation by 15% of paid-up capital.

Shareholders List of PT Prima Power Nusantara



Kegiatan Usaha Perseroan meliputi :

1. Kegiatan usaha perseroan meliputi:
2. Menjalankan usaha membangkitkan tenaga listrik yang berasal dari berbagai sumber energi, termasuk tetapi tidak terbatas dari gas, bahan bakar minyak, air, batubara, tenaga surya, panas bumi dan lain-lain;
3. Pengadaan dan/atau pembangunan instalasi kelistrikan Gedung dan pabrik;
4. Pengadaan dan/atau pembangunan instalasi control dan instrumentasi;
5. Menyelenggarakan kegiatan operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik dan instalasi listrik;
6. Membuat jaringan transmisi dan melakukan kegiatan usaha distribusi atau penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik

The Company's business activities include:

1. The company's business activities include:
2. Running a electricity plant business from various energy sources, including but not limited to gas, fuel oil, water, coal, solar power, geothermal and others;
3. Procurement and/or construction of electrical installations for buildings and factories;
4. Procurement and/or construction of control and instrumentation installations;
5. Carrying out operation and maintenance activities for power plants and electrical installations;
6. Creating a transmission network and conducting business activities of electricity distribution through the electric power network.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pura Daya Prima sebagai berikut.

PT Pura Daya Prima Board of Commissioners and Directors arrangement is as follows.

SUSUNAN BOD & BOC PERIODE TAHUN 2020

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PT PURA DAYA PRIMA

No	Nama Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan	KPTS RUPS
1	Ir. Setiadi Wiogo MBA	Komisaris Utama	3 Tahun	
2	Aris Setiawan	Komisaris	3 Tahun	Akta No. 1 tanggal 2 Januari 2019
3	Slamet Sugiyono	Komisaris	3 Tahun	
4	Budi Setyawan	Komisaris	3 Tahun	

SUSUNAN DIREKSI PT PURA DAYA PRIMA

No	Nama Direktur	Jabatan	Masa Jabatan	KPTS RUPS
1	Robertus Dimas Prakasa	Direktur Utama	3 Tahun	
2	Alexander Tjandra	Direktur	3 Tahun	
3	Bob Surahno	Direktur	3 Tahun	
4	Wahyu	Direktur	3 Tahun	

Saat ini PT Pura Daya Prima memiliki 1 lini bisnis yang bergerak dibidang pembangkit yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Currently PT Pura Daya Prima has 1 business line which is engaged in the power plant, with the following details:

Lokasi : Musi II Palembang

Location: Musi II Palembang

Kapasitas : 3 x 4,7 MW dan 6 MW

Capacity: 3 x 4.7 MW and 6 MW

Jenis : Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)

Type: Gas Engine Power Plant (PLTMG)

Jumlah : 15% Penyertaan

Amount: Participation by 15%

Status : Pembangunan selesai, mulai operasi – Juni 2006 dan combine cycle mulai awal tahun 2009.

Status: Construction completed, commencing operations in June 2006 and combining cycles starting in early 2009.

Investor lainnya: PT Manggala Gita Karya (85%)

Other investors: PT Manggala Gita Karya (85%)

PT MULTIDAYA PRIMA ELEKTRINDO

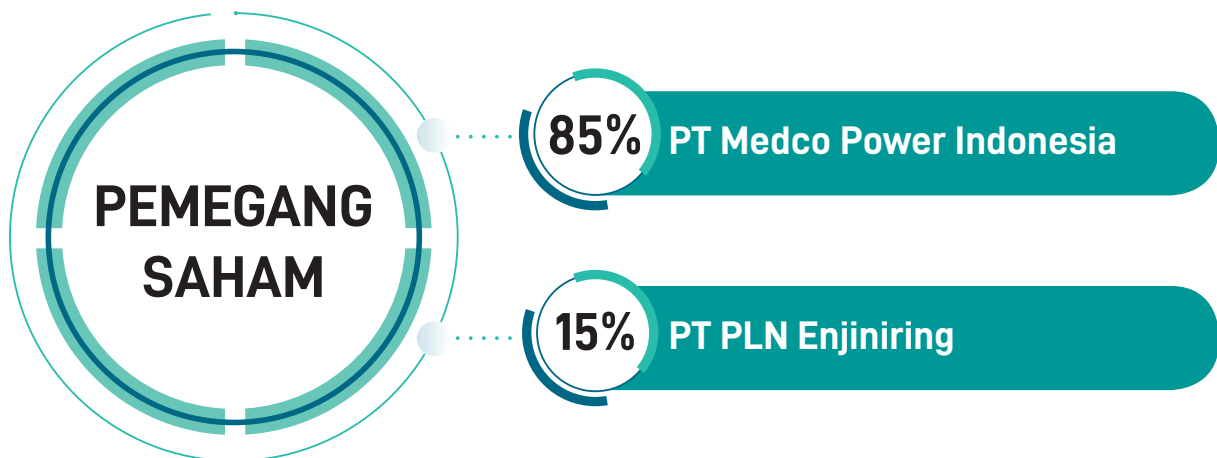
Didirikan sesuai Akta Pendirian No. 50 tanggal 15 Juli 2005 oleh Notaris Kun Hidayat, SH dengan bidang usaha pembangkit (IPP Sako). Telah mendapatkan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-23107 HT.01.01.TH.2006 tanggal 7 Agustus 2006. PLN Enjiniring memiliki penyertaan usaha sebesar 15% atas modal disetor.

Daftar Pemegang Saham PT Multidaya Prima Elektrindo

PT MULTIDAYA PRIMA ELEKTRINDO

Established under the Deed of Incorporation No. 50 dated July 15th, 2005 by Notary Kun Hidayat, SH in the business field of power generation (IPP Sako). Has obtained the Ratification under the Decree of the Minister of Justice and Human Rights Number: C-23107 HT.01.01.TH.2006 dated 7 August 2006. PLN Enjiniring has a business participation by 15% of paid-up capital.

Shareholders List of PT Multidaya Prima Elektrindo



Kegiatan Usaha Perseroan meliputi :

1. Dalam bidang industri: menjalankan industri pembangkit tenaga listrik berikut transmisi dan distribusi tenaga listrik, fabrikasi, peralatan listrik dan elektronika;
2. Dalam bidang perdagangan: menjalankan perdagangan pada umumnya, termasuk ekspor impor, interinsuler dan lokal terutama memperdagangkan alat-alat listrik dan elektronika, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atau amanat.
3. Dalam bidang jasa: menjalankan usaha-usaha jasa meliputi, jasa konsultasi di bidang listrik (elektrikal), listrik elektronika serta jasa penunjang kelistrikan; melakukan pemasangan instalasi dan jaringan listrik.

The Company's business activities include:

1. In the industrial sector: operating the power generation industry as well as electric power transmission and distribution, fabrication, electrical equipment and electronics;
2. In trading field: carry out general trading, including export, import, interinsular and local, especially trading in electrical and electronic equipment, both for self-calculation or on a commission or mandate basis.
3. Provide consulting services in electricity (electrical) field, electrical electronics and electrical support services; perform electrical installations and networks.



Saat ini PT Multidaya Prima Elektrindo memiliki 1 lini bisnis yang bergerak dibidang pembangkit yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Currently PT Multidaya Prima Elektrindo has 1 business line which is engaged in the power plant, with the following details:



Lokasi : Sako, Palembang

Location: Sako, Palembang



Kapasitas : 2 x 6 MW

Capacity: 2 x 6 MW



Jenis : Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)

Type: Gas Engine Power Plant (PLTMG)



Jumlah : 15 % penyertaan

Amount: Participation by 15%



Status : Pembangunan selesai, mulai operasi Juni 2008

Status: Construction completed, commencing operations in June 2008



Investor lainnya : PT Medco Power Indonesia (85%).

Other investors: PT Medco Power Indonesia (85%).

Profil Perusahaan
Company Profile

PT PERMATA PRIMA ELEKTRINDO

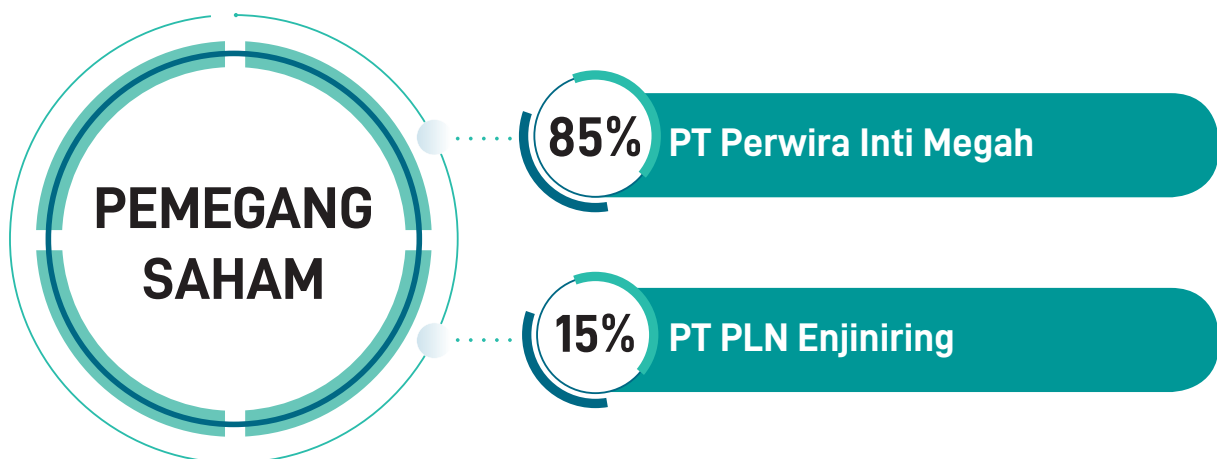
PT PERMATA PRIMA ELEKTRINDO

Didirikan sesuai Akta Pendirian No. 6 tanggal 22 September 2006 oleh Notaris Edi Priyono, SH dengan bidang usaha pembangkit (IPP Sarolangun). Telah mendapatkan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: W7-02476 HT.01.01.TH.2006 tanggal 14 November 2006. PLN Enjiniring memiliki penyertaan usaha sebesar 15% atas modal disetor.

Established under the Deed of Incorporation No. 43 dated September 22nd, 2006 by Notary Edi Priyono, SH in the business field of power generation (IPP Sarolangun). Has obtained the Ratification under the Decree of the Minister of Justice and Human Rights Number: W7-02476 HT.01.01.TH.2006 dated November 14th, 2006. PLN Enjiniring has a business participation by 15% of paid up capital.

Daftar Pemegang Saham PT Permata Prima Elektrindo

Shareholders List of PT Permata Prima Elektrindo



Kegiatan Usaha Perseroan meliputi :

1. Menjalankan usaha-usaha dibidang industri meliputi berbagai macam industri antara lain industry pembangkit tenaga listrik, yang berasal dari sumber energi, termasuk tetapi tidak terbatas dari gas, bahan bakar minyak, air, batubara, tenaga surya dan panas bumi. Menjalankan usaha dalam bidang pembuatan jaringan transmisi dan melakukan kegiatan usaha distribusi atau penyaluran tenaga listrik;
2. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa yang meliputi: penyelenggaraan kegiatan operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik dan instalasi listrik.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Permata Prima Elektrindo sebagai berikut.

The Company's business activities include:

1. Running businesses in the industrial sector covering a variety of industries including the power generation industry, which comes from energy sources, including but not limited to gas, fuel oil, water, coal, solar and geothermal power. Running a business in manufacturing transmission networks field and conducting business activities in electricity distribution;
2. Running businesses in services field which include: power plants operation and maintenance and electrical installations.



The composition of the Board of Commissioners and Directors of PT Permata Prima Elektrindo is as follows.

SUSUNAN BOD & BOC PERIODE TAHUN 2020

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PT PERMATA PRIMA ELEKTRINDO

No	Nama Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan	KPTS RUPS
1	Herwan	Komisaris	3 Tahun	Akta No. 9 Tanggal 25 Agustus 2010

SUSUNAN DIREKSI PT PERMATA PRIMA ELEKTRINDO

No	Nama Direktur	Jabatan	Masa Jabatan	KPTS RUPS
1	Avit Alfaserian	Direktur	3 Tahun	Akta No. 9 Tanggal 25 Agustus 2010

Saat ini PT Permata Prima Elektrindo memiliki 1 lini bisnis yang bergerak dibidang pembangkit yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Lokasi : Sarolangun, Jambi

Kapasitas : 2 x 7 MW

Jenis : Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Jumlah : 15 % penyertaan

Status : Pembangunan selesai, Mei 2010

Investor Lainnya : PT Perwira Inti Megah (85%).

Currently PT Permata Prima Elektrindo has 1 business line which is engaged in the power plant, with the following details:

Location: Sarolangun, Jambi

Capacity: 2 x 7 MW

Type: Steam Power Plant (PLTU)

Amount: Participation by 15%

Status: Construction completed, commencing operations in May 2010

Other Investors: PT Perwira Inti Megah (85%).

PT CROMPTON PRIMA SWITCHGEAR INDONESIA

PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (CPSI) merupakan perusahaan yang didirikan atas dasar kerja sama antara PT PLN Persero dengan Crompton Greaves Limited perusahaan asal India yang bergerak di bidang Industri peralatan pengontrol (switchgear component) dan pendistribusian listrik, dengan melakukan sinergi antar anak perusahaan yaitu PT PLN Enjiniring dan PT CG International Holdings Singapore PTE.,LTD. PLN Enjiniring memiliki penyertaan usaha sebesar 49% atas modal disetor.

Didirikan sesuai Akta Pendirian No.3 tanggal 7 Mei 2014 oleh Notaris Lenny Janis Ishak, SH. dengan bidang usaha industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik. Telah mendapatkan Pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-08265.40.10.2014 tanggal 12 Mei 2014.

Tujuan pendirian CPSI adalah untuk alih teknologi switchgear dan sebagai bagian dari upaya meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam setiap peralatan untuk infrastruktur ketenagalistrikan. CPSI diharapkan mampu memproduksi komponen switchgear yang dibutuhkan dalam menunjang pembangunan infrastruktur kelistrikan di Indonesia.

PT Crompton Prima Switchgear Indonesia telah melaksanakan RUPS Pertama pada tanggal 10 Juli 2014 dan peningkatan modal disetor pada tanggal 24 Juli 2014 sebesar USD3.900.000. CPSI telah membeli lahan sebagai lokasi pabrik di daerah Cikande pada triwulan IV/2014 dan telah dilaksanakan Ground breaking pada bulan November 2015 dan diresmikan pada Senin, 20 Agustus 2018.

PT CROMPTON PRIMA SWITCHGEAR INDONESIA

PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (CPSI) is a company established on the basis of cooperation between PT PLN Persero and Crompton Greaves Limited an Indian company engaged in the field of switchgear component production industry and electricity distribution, by synergizing between its Subsidiary Companies namely PT PLN Enjiniring and PT CG International Holdings Singapore PTE., LTD. PLN Enjiniring has a business participation by 49% of paid up capital.

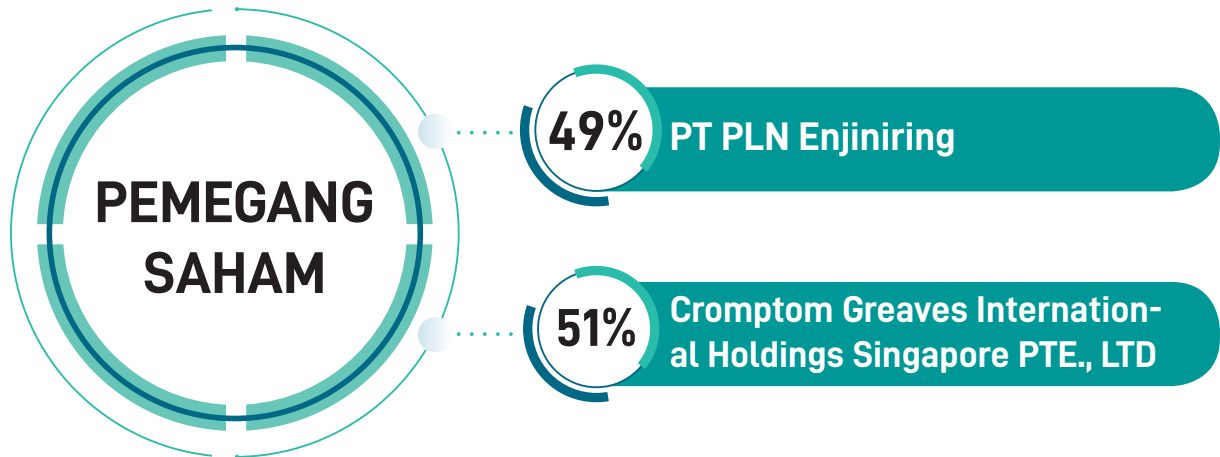
Established under the Deed of Incorporation No.3 dated May 7th, 2014 by Notary Lenny Janis Ishak, SH. in the business field of electricity control and distribution equipment industry. Has obtained the Ratification under the Decree of the Minister of Justice and Human Rights No. AHU-08265.40.10.2014 dated May 12th, 2014.

The purpose of establishing the CPSI is to transfer switchgear technology and as part of efforts to increase the use of local components in each equipment for electricity infrastructure. CPSI is expected to be able to produce switchgear components needed to support electricity infrastructure development in Indonesia.

PT Crompton Prima Switchgear Indonesia held the First General Meeting of Shareholders on July 10th, 2014 and increased paid-up capital on July 24th, 2014 amounted to USD3,900,000. CPSI purchased land as a factory location in the Cikande area in the fourth quarter of 2014 and a ground breaking was held in November 2015 and was inaugurated on Monday, August 20th, 2018.

Daftar Pemegang Saham PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (CPSI)

Shareholders List of PT Crompton Prima Switchgear Indonesia (CPSI)



Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Crompton Prima Switchgear Indonesia sebagai berikut.

The composition of the Board of Commissioners and Directors of PT Crompton Prima Switchgear Indonesia is as follows.

SUSUNAN BOD & BOC PERIODE TAHUN 2020

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PT CROMPTON POWER SWITCHGEAR INDONESIA

No	Nama Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan	KPTS RUPS
1	Lloyd Pinto	Komisaris Utama	3 Tahun	Akta No. 3 tanggal 7 Mei 2014
2	Tonny Sarief	Komisaris	3 Tahun	Akta No. 3 tanggal 7 Mei 2014

SUSUNAN DIREKSIPT CROMPTON POWER SWITCHGEAR INDONESIA

No	Nama Direktur	Jabatan	Masa Jabatan	KPTS RUPS
1	Manoj Gajanan Naphade	Direktur Utama	3 Tahun	Akta No. 3 tanggal 7 Februari 2019
2	Bektiwacono	Direktur Keuangan	3 Tahun	Akta No. 12 tanggal 11 Desember 2019
3	Rajesh Motiram Jadhav	Direktur Operasi	3 Tahun	Akta No. 3 tanggal 7 Februari 2019

Lembaga Profesi Penunjang

Supporting Professional Agencies



Profil Perusahaan
Company Profile

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

PwC Indonesia

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

Gedung WTC 3

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31

Jakarta Selatan 12920

NOTARIS

Kantor Notaris & PPAT Lenny Janis, SH

Jl. Hang Lekir 9 No. 1

Jakarta, 12120

KONSULTAN HUKUM

NAH'R Murdono Law Office

Gedung Mitra Lantai 9, Suite 902

Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 21

Jakarta 12930

PUBLIC ACCOUNTING FIRM

PwC Indonesia

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

Gedung WTC 3

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31

Jakarta Selatan 12920

NOTARY

Kantor Notaris & PPAT Lenny Janis, SH

Jl. Hang Lekir 9 No. 1

Jakarta, 12120

LAW CONSULTANT

NAH'R Murdono Law Office

Gedung Mitra Lantai 9, Suite 902

Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 21

Jakarta 12930

Penghargaan dan Sertifikasi

Award and Certification



JENIS PENGHARGAAN/ JENIS SERTIFIKASI ISO 9001 : 2015

Bidang Usaha yang di Sertifikasi :

- Desain Enjiniring (Feasibility Study, Design Review , Bidding Document)
- Supervisi Konstruksi Instalasi Ketenagalistrikan
- Pemberi Penghargaan/ Sertifikasi
- LMK - Certification
- Komite Akreditasi Nasional

Tahun Perolehan : 2020

Periode : 2020 – 2023

AWARD AND CERTIFICATION AWARD TYPE/CERTIFICATION TYPE : ISO 9001 : 2015

Scope of Business :

- Engineering Design (Feasibility Study, Design Review , Bidding Document)
- Supervision of Electricity Installation Construction
- Award /Certification issued by :
- LMK – Certification
- National Accreditation Committee (KAN)

Year to Date : 2020

Periode : 2020 – 2023



PENGHARGAAN TAHUN 2020

1. Sertifikat dan Bendera Emas SMK 3 pada Site CNG Plant Bangkanai

AWARD OBTAINED IN 2020

1. Certificate and Gold Flag in SMK3 for Bangkanai CNG Plant Site



PT PLN Enjiniring mendapatkan Sertifikat Emas SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) untuk CNG Plant Bangkanai. Didalam pelaksanaan audit sertifikasi SMK3 pada site CNG Plant Bangkanai PT PLN Enjiniring mendapatkan hasil pencapaian 87,34% untuk kategori tingkat Lanjutan (166 Kriteria)

(Occupational Health and Safety Management System) for the Bangkanai CNG Plant. In the implementation of the (Occupational Health and Safety Management System (SMK3) certification audit at the Bangkanai CNG Plant site, PT PLN Enjiniring obtained 87.34% achievement results for the Advanced level category (166 Criteria)

Pelaksanaan Sertifikasi SMK3 dilakukan karena PT PLNE Enjiniring sadar bahwa SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya kerja yang aman, efisien, dan produktif.

The implementation of Occupational Health and Safety Management System (SMK3) Certification is carried out because PT PLNE Enjiniring is aware that Occupational Health and Safety Management System (SMK3) is part of the company's overall management system in order to control risks related to work activities in order to create safe, efficient and productive work.



2. Sertifikat Penghargaan PT PLN (Persero) UIP Pembangkit Sumatera

2. PT PLN (Persero) UIP Sumatera Power Plant Appraisal Certificate



PT PLN Enjiniring mendapatkan penghargaan sebagai Jasa Konsultansi Terbaik ke-5 di Wilayah Kerja PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera. Sertifikat Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh pengguna jasa di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera.

PT PLN Enjiniring received an award as the 5th Best Consulting Service in the Working Area of PT PLN (Persero) Sumatra Power Plant Development Main Unit. This award certificate is given based on the results of an assessment conducted by service users at PT PLN (Persero) Sumatra Power Plant Development Main Unit.

3. Penghargaan BUMN Branding and Marketing Award 2020

3. BUMN Branding and Marketing Award 2020



PT PLN Enjiniring menorehkan prestasi gemilang di ajang penghargaan BUMN Branding and Marketing Award 2020, Dalam penganugerahan yang diselenggarakan di The Ritz-Carlton Hotel Jakarta, PLN Enjiniring mendapatkan apresiasi tertinggi sebagai perusahaan dengan Service Development Terbaik diantara beberapa Anak Perusahaan BUMN yang ikut serta dalam ajang penghargaan tersebut.

PT PLN Enjiniring made a brilliant achievement at the 2020 BUMN Branding and Marketing Award. In the awarding ceremony held at The Ritz-Carlton Hotel Jakarta, PLN Enjiniring received the highest appreciation as a company with the Best Service Development among several BUMN Subsidiaries participating in the event.

Nama dan Alamat Kantor Induk, Perwakilan dan Proyek

Name and Address of Head Office, Representative Office and Project Office



KANTOR INDUK

Menara Enjiniring

Jl. Ciputat Raya No. 123
 Kebayoran Lama - Jakarta 12310
 Telp.(62-21) 560 8432, 560 8918, 560 9044
 Fax.(62-21) 564 0132
 Website : www.plne.co.id
 Email : contact@plne.co.id
 Instagram : @pln_enjiniring

HEAD OFFICE

Menara Enjiniring

Jl. Ciputat Raya No. 123
 Kebayoran Lama - Jakarta 12310
 Telp.(62-21) 560 8432, 560 8918, 560 9044
 Fax.(62-21) 564 0132
 Website : www.plne.co.id
 Email : contact@plne.co.id
 Instagram : @pln_enjiniring

KANTOR REPRESENTATIF

CNG Plant Bangkanai

Desa Karendan, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara,
 Kalimantan Tengah

REPRESENTATIVE OFFICE

CNG Plant Bangkanai

Desa Karendan, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara,
 Kalimantan Tengah

ANAK PERUSAHAAN

PT PRIMA POWER NUSANTARA

Menara Enjiniring Lt. 7
 Jl. Ciputat Raya No. 123
 Kebayoran Lama - Jakarta 12310
 Telp.(62-21) 227 68719, 278 28556
 Fax.(62-21) 227 69986
 Email : info@primponus.co.id

SUBSIDIARY

PT PRIMA POWER NUSANTARA

Menara Enjiniring Lt. 7
 Jl. Ciputat Raya No. 123
 Kebayoran Lama - Jakarta 12310
 Telp.(62-21) 227 68719, 278 28556
 Fax.(62-21) 227 69986
 Email : info@primponus.co.id



PERUSAHAAN AFILIASI

■ PT PURA DAYA PRIMA

Jl. Raya Kelapa Hibrida Blok PF 23 No. 11-12
Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14250

■ PT PERMATA PRIMA ELEKTRINDO

Senayan City Lot 19
Panin Tower Lantai 11
Jl. Asia Afrika, Jakarta Selatan

■ PT ENERGI PRIMA ELEKTRIKA

The Energy Building, 50th floor, Lot 11A SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

■ PT MULTIDAYA PRIMA ELEKTRINDO

The Energy Building, 50th floor, Lot 11A SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

■ CROMPTON PRIMA SWITCHGEAR INDONESIA

Menara Enjiniring
Jl. Ciputat Raya No. 123 Pondok Pinang
Kebayoran Lama - Jakarta 12310
Indonesia
Telp.(62-21) 2751-0363

ALAMAT PABRIK :

Kawasan Industri Modern Cikande
Jl. Modern Industri VI Blok A No. 4
Desa Nambo Ilir Kec. Kibin
Serang – Banten 42185
Telp. (62-254) 840 8448
Fax. (62-254) 840 8848

PERUSAHAAN AFILIASI

■ PT PURA DAYA PRIMA

Jl. Raya Kelapa Hibrida Blok PF 23 No. 11-12
Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14250

■ PT PERMATA PRIMA ELEKTRINDO

Senayan City Lot 19
Panin Tower Lantai 11
Jl. Asia Afrika, Jakarta Selatan

■ PT ENERGI PRIMA ELEKTRIKA

The Energy Building, 50th floor, Lot 11A SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

■ PT MULTIDAYA PRIMA ELEKTRINDO

The Energy Building, 50th floor, Lot 11A SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

■ CROMPTON PRIMA SWITCHGEAR INDONESIA

Menara Enjiniring
Jl. Ciputat Raya No. 123 Pondok Pinang
Kebayoran Lama - Jakarta 12310
Indonesia
Telp.(62-21) 2751-0363

FACTORY ADDRESS :

Kawasan Industri Modern Cikande
Jl. Modern Industri VI Blok A No. 4
Desa Nambo Ilir Kec. Kibin
Serang – Banten 42185
Telp. (62-254) 840 8448
Fax. (62-254) 840 8848

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



Posisi PLN Enjiniring di Industri Kelistrikan

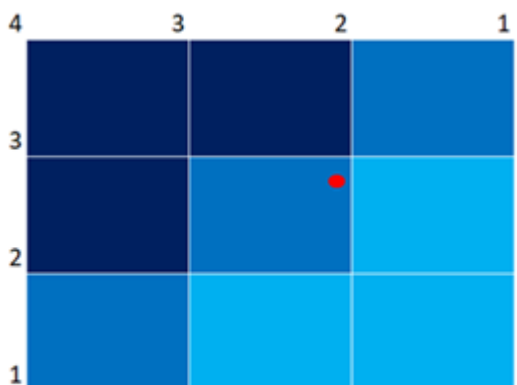
PLN Engineering Position in the Electrical Industry

Menggunakan Internal-External-Matrix, dapat digambarkan posisi PLNE saat ini, untuk menentukan strategi selanjutnya yang tepat dapat di tempatkan dalam suatu Matriks Internal-Eksternal (Matriks IE). Matriks IE membagi posisi perusahaan atas tiga kelompok strategi yang akan diterapkan (terdapat pada gambar matrix dibawah), yakni:

1. Grow and Build
2. Hold and Maintain
3. Harvest or Divest

Dengan menggunakan hasil analisis SWOT yang dilengkapi dengan pembobotan dan rating, maka didapat pemetaan untuk PT PLN sebagai berikut:

- Untuk faktor internal (IFE) dalam kondisi baik atau favorable (skor 2.75)
- Untuk faktor eksternal (EFE) dalam kondisi baik atau favorable (skor 2.97)



IFE TOTAL WEIGHTED SCORES

It can be described, using the Internal-External-Matrix, that the current position of the PLNE, to determine the next appropriate strategy that can be implemented in an Internal-External Matrix (IE Matrix). The IE matrix divides the company's position into three groups of strategies to be implemented (shown in the matrix images below), namely:

1. Grow and Build
2. Hold and Maintain
3. Harvest or Divest

By using the results of the SWOT analysis equipped with weighting and rating, the mapping for PT PLN is as follows :

- *Internal factors (IFE) in good or favorable conditions (score 2.75)*
- *For external factors (EFE) in good or favorable conditions (score 2.97)*

EFE TOTAL WEIGHTED SCORES



Dengan demikian dapat disimpulkan secara umum bahwa saat ini PT PLN Enjiniring mengembangkan strategi **Hold and Maintain**, dimana strategi ini masih sama dengan strategi PT PLN Enjiniring pada RJP periode sebelumnya. Strategi yang diterapkan adalah **Market Penetration** dan **Product Development**.

*Thus, it can be generally concluded that currently PT PLN Enjiniring is develops a **Hold and Maintain** strategy, where this strategy is still the same as PT PLN Enjiniring strategy in the previous period. The strategies implemented are **Market Penetration** and **Product Development**.*

1. *Market Penetration* (Penetrasi Pasar): Fokus pada peningkatan pendapatan dengan meningkatkan nilai kontrak untuk tiap proyek pekerjaan. Nilai kontrak penjualan produk atau layanan yang sudah ada (*existing*) adalah sebesar 1-2% dari capex proyek menuju ke kontrak yang memiliki nilai 10-15% dari capex proyek.
2. *Product Development* (Pengembangan Produk): Fokus pada pengembangan produk dan jasa *existing* (FS, BD, ED, SPV) dan jasa *Engineering Integrator* (*Detail Engineering Design*).

1. *Market Penetration* : Focus on increasing revenue by increasing the contract value for each work project. The value of the existing product or service sales contract is 1-2% of the project capex leading to the contract which has a value of 10-15% of the project capex.
2. *Product Development* : Focus on developing existing products and services (FS, BD, ED, SPV) and *Engineering Integrator* services (*Detail Engineering Design*).



TINJAUAN OPERASIONAL

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi usaha enjiniring, pengadaan dan konstruksi, operasi, pemeliharaan pada bidang ketenagalistrikan dan non ketenagalistrikan sebagai berikut :

- a. Jasa konsultasi enjiniring dan atau manajemen proyek termasuk integrator proyek ketenagalistrikan;
- b. Studi sistem kelistrikan;
- c. Studi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
- d. Pendidikan dan pelatihan;
- e. Kajian dan pengembangan;
- f. Perencanaan, pengadaan, pembangunan dan atau pemasangan (jasa konstruksi) bidang bidang pembangkitan, transmisi dan/atau distribusi;
- g. Pemeliharaan dan atau pengoperasian bidang pembangkitan, transmisi dan atau distribusi;
- h. Penyediaan/manufaktur berbagai peralatan elektrikal untuk transmisi dan elektrikal untuk transmisi dan distribusi listrik.

Kegiatan usaha yang berjalan saat ini dikelompokkan ke dalam tiga bidang usaha yaitu Jasa Enjiniring, Jasa Non Enjiniring, dan Jasa Lainnya. Jasa Enjiniring meliputi Pembangkitan (jasa mendisain), Transmisi dan Distribusi (jasa mendisain) dan Konstruksi (jasa supervisi). Sedangkan untuk Jasa Non Enjiniring berupa jasa dalam bidang *Operation and Maintenance*, dan Jasa Lainnya berupa jasa di bidang Informasi dan Teknologi.

OPERATIONAL REVIEW

Based on the Article 3 of the Company's articles of association, the Company's scope of activities includes engineering, procurement and construction, operation, maintenance in the electricity and non-electricity sectors as follows:

- a. *Engineering consulting and/or project management services including electricity project integrators;*
- b. *Electrical system study;*
- c. *Environmental impact analysis study (AMDAL);*
- d. *Education and training;*
- e. *Research and development;*
- f. *Planning, procurement, construction and or installation (construction services) in the field of power plants, transmission and/or distribution;*
- g. *Maintenance and or operation of power plant sector, transmission and or distribution;*
- h. *Supply/manufacture of various electrical equipment for transmission and distribution of electricity.*

The current business activities are grouped into three business sectors, namely *Engineering Services*, *Non-Engineering Services*, and *Other Services*. *Engineering services* include power plants (*design services*), transmission and distribution (*design services*) and construction (*supervision services*). Meanwhile, *non-engineering services* are in the form of operating and maintaining services, and other services in the form of information and technology services sector.

Rincian dari bidang usaha Jasa Enjiniring dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Details of the Engineering Services business sectors are described in the table below:

TABEL JENIS JASA ENJINIRING PLN ENJINIRING
TABLE OF TYPES OF ENGINEERING SERVICES FOR PLN ENGINEERING

Pembangkitan	Transmisi dan Distribusi	Konstruksi
<i>Generation</i>	<i>Transmission and Distribution</i>	<i>Construction</i>
Studi Kelayakan <i>Feasibility Study</i>	Survei <i>Survey</i>	Supervisi Konstruksi <i>Construction Supervision</i>
Penyelidikan Tanah <i>Soil Investigation</i>	Penyelidikan Tanah <i>Soil Investigation</i>	Pengawasan QA QC <i>QA/QC Supervision</i>
Penyusunan Bid Dokumen <i>Bidding Document Preparation</i>	Penyusunan Basic Design <i>Basic Design Preparation</i>	
Penyusunan Request for Proposal <i>Request for Proposal Preparation</i>	Penyusunan Bid Dokumen <i>Bidding Document Preparation</i>	
Pembuatan Harga Perkiraan Enjinir <i>Establish Estimated Engineer Price</i>	Pembuatan Harga Perkiraan Enjinir <i>Establish Estimated Engineer Price</i>	
Pendampingan dalam Proses Tender <i>Assistance in Tendering Process</i>	Pendampingan dalam Proses Tender <i>Assistance in Tendering Process</i>	
Pendampingan dalam proses Contract Discussion Agreement <i>Assistance in Contract Discussion Agreement</i>	Pendampingan dalam proses Contract Discussion Agreement <i>Assistance in Contract Discussion Agreement</i>	
Review Desain <i>Design Review</i>	Review Desain <i>Design Review</i>	
Pengawasan QA QC <i>QA/QC Supervision</i>	Pengawasan QA QC <i>QA/QC Supervision</i>	
Studi AMDAL dan UKL/UPL <i>Study on Environment Impact and UKL/UPL</i>	Pendampingan dalam Due Diligent Visit <i>Assistance in Due Diligent Visit</i>	
Studi Lainnya <i>Other Studies</i>	Studi Sistem Ketenagalistrikan <i>Electrical Power System Study</i>	
	Studi AMDAL dan UKL/UPL <i>Study on Environment Impact and UKL/UPL</i>	
	Studi Lainnya <i>Other Studies</i>	

Strategi Perusahaan

Corporate Strategy

Perumusan sasaran strategis perusahaan dilakukan dengan menggunakan framework Malcolm Baldrige yang didasarkan atas lima perspektif yakni Perspektif Fokus Pelanggan, Perspektif Kualitas Produk dan Layanan, Perspektif Fokus SDM, Perspektif Keuangan dan Pasar, serta Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab sesuai dengan hasil perumusan menghasilkan 15 dimensi sasaran strategis yang harus dijadikan sebagai acuan oleh PLNE dalam mencapai sasaran perusahaan tahun 2020 sebagai berikut:

1. Perspektif Fokus Pelanggan
 - a. Indeks Kepuasan Pelanggan
 - b. Pertumbuhan Nilai Proyek (PLN)
2. Perspektif Kualitas Produk dan Layanan
 - a. *Engineering First Pass Yield (FPY)*
 - b. *Engineering On Time Delivery (OTD)*
 - c. Produktivitas Supervisi Konstruksi
 - d. Komposisi Enjinirs *Subletting* untuk Produk Enjiniring (FS, Biddoc dan *Engineering Design*)
3. Perspektif Fokus SDM
 - a. *Human Capital Readiness (HCR)*
 - b. *Organization Capital Readiness (OCR)*
4. Perspektif Keuangan dan Pasar
 - a. Pencapaian Investasi
 - b. Sinergi dengan Anak Perusahaan Lain
 - c. Efisiensi Biaya Enjiniring oleh *Sub Consultant* dan *Outsourcing*
 - d. Rasio Operasi
5. Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab
 - a. Penerapan Good Corporate Governance (GCG)
 - b. Penyelesaian Temuan Auditor
 - c. Kepatuhan pada K3LH (Kesehatan, Keselamatan Kerja & Lingkungan Hidup)

The drafting of the company's strategic goals is carried out using the Malcolm Baldrige framework which is based on five perspectives Customer Focus Perspectives, Product Quality and Services Perspectives, HR Focus Perspectives, Finance and Market Perspectives, and Leadership, Governance and Responsible Perspectives in accordance with the results of the formulation, it produces 15 dimensions of strategic targets that must be used as a reference by PLNE in achieving 2020 company's goals as follows:

1. *Customer Focus Perspectives*
 - a. *Customer Satisfaction Index*
 - b. *Project Value Growth (PLN)*
2. *Product Quality and Services Perspectives*
 - a. *Engineering First Pass Yield (FPY)*
 - b. *Engineering On Time Delivery (OTD)*
 - c. *Construction Productivities Supervision*
 - d. *Subletting Engineer Composition for Engineering Products (FS, Biddoc and Engineering Design)*
3. *HR Focus Perspectives*
 - a. *Human Capital Readiness (HCR)*
 - b. *Organization Capital Readiness (OCR)*
4. *Finance and Market Perspectives*
 - a. *Investment Achievement*
 - b. *Synergy with other Subsidiaries*
 - c. *Sub Consultant and Outsourcing Engineering Cost Efficiency*
 - d. *Operational Ratio*
5. *Leadership, Governance and Responsible Perspectives*
 - a. *Good Corporate Governance Implementation (GCG)*
 - b. *Completion of Auditor Findings*
 - c. *Compliance to Health, Occupational Safety & Environment (K3LH)*



Sasaran-sasaran strategis tersebut di atas dijabarkan dalam program-program kegiatan yang diuraikan sebagai berikut.

1. Pemasaran dan Penjualan

PT PLN Enjiniring sebagai bagian dalam grup PT PLN (Persero) ikut serta dalam menyukseskan program 35.000 MW. Strategi pemasaran untuk akselerasi program tersebut adalah menyelesaikan pekerjaan – pekerjaan terkait enjiniring program 35.000 MW sesuai dengan RUPTL 2019 - 2028 baik berupa kontrak penugasan atau tender dari PLN maupun pihak swasta.

Perolehan kontrak enjiniring pada tahun 2020 menjadi tantangan yang cukup besar dengan adanya pandemi COVID-19. Deviasi cukup besar antara potensi pekerjaan yang berbasis pada RUPTL 2019-2028 dengan realisasi investasi PLNE di tahun 2020. Penyesuaian ini merupakan turunan atas kebijakan pemerintah pada kondisi pandemi.

Pekerjaan jasa utama (*core business*) di bidang enjiniring ketenagalistrikan terdiri atas pendapatan enjiniring bidang pembangkitan, bidang transmisi & distribusi, bidang supervisi konstruksi, detail enjiniring desain dan pengembangan jasa enjiniring.

Pada pengembangan pasar jasa enjiniring lebih lanjut, berbasis pada mengoptimalkan kontrak pekerjaan jasa enjiniring yang didapatkan dari sinergi antar Anak Perusahaan. Disamping pekerjaan jasa tersebut diatas, terdapat pendapatan lainnya dari pengembangan usaha berbasis keenjiniringan diantaranya:

- a. Perolehan hasil Investasi dengan mengoptimalkan pengoperasian & pemeliharaan CNG Bangkanai, dengan realisasi pendapatan tahun 2020 sebesar Rp 84,5 M
- b. Perolehan Jasa Konstruksi maupun EPC Ketenagalistrikan di bidang transmisi, dan distribusi dari PT Prima Power Nusantara dengan realisasi pendapatan tahun 2020 sebesar Rp 269,5 M.

Untuk menjamin keberhasilan pengembangan usaha, pada setiap program pengembangan usaha yang bersifat investasi, didukung dengan Kajian Enjiniring/Kajian Kelayakan Operasi dan Kajian Kelayakan Finansial serta Kajian Resiko.

The strategic targets mentioned above are described in the activity programs which are described as follow;

1. Sales and Marketing

As part of the PT PLN (Persero) group PT PLN Enjiniring have been participated in the success of the 35,000 MW program. The marketing strategy for the program acceleration is to complete works related to the 35,000 MW engineering program in accordance with the 2019-2028 RUPTL, either in the form of assignment contracts or tenders from PLN or private parties.

An engineering contract obtained in 2020 is a big challenge with the COVID-19 pandemic. The deviation is quite large between the potential work based on the 2019-2028 RUPTL and the realization of PLNE investment in 2020. This adjustment is a derivative of the government's policy in pandemic conditions.

The core business services in electricity engineering field consists of engineering in generation field revenue, transmission & distribution sector, construction supervision, design engineering details and engineering service development.

In the further engineering services market development, based on optimizing engineering work service contracts obtained from synergies between Subsidiaries. In addition to the services mentioned above, There are other income from engineering-based business development including:

- a. *Return on Investment by optimizing the operation & maintenance of CNG Bangkanai, with revenue realization of IDR 84.5 Billions in 2020*
- b. *Obtaining Electricity Construction and EPC Services in transmission and distribution sector from PT Prima Power Nusantara with revenue realization IDR 269,5 Billions in 2020.*

To ensure the business development success, in every investment business development program, supported by an Engineering Study/Operational Feasibility Study and a Financial Feasibility Study as well as a Risk Assessment.

2. Produksi

Capaian kinerja perusahaan tahun 2020 aspek produksi dilakukan dengan penyelesaian kontrak carry over maupun kontrak baru yang diperoleh pada tahun 2020. Sebagai dukungan atas kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian produk & jasa enjiniring dan pengembangan usaha berbasis keenjiniringan (investasi, operation & maintenance CNG Bangkanai, dan Jasa Konstruksi Ketenagalistrikan dari PT Prima Power Nusantara), dilakukan program – program penguatan produksi, dengan sasaran khusus antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas produksi dan produktifitas
- b. Mengendalikan biaya pokok produksi
- c. Program Investasi yang prima
- d. Program Prasarana Proyek berbasis Information Technology.

3. Keuangan dan Akuntansi

Program kerja Keuangan dan Akuntansi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan Pengendalian Anggaran Operasi dan Anggaran Investasi
- b. Peningkatan Kinerja Operasional
- c. Pemberian SHL ke Anak Perusahaan
- d. Penyediaan dana untuk pembayaran SHL
- e. Meningkatkan Internal Control atas Laporan Keuangan
- f. Penerapan PSAK terbaru yaitu 71,72 dan 73 pada Laporan Keuangan Perusahaan
- g. Pelaksanaan perhitungan PSAK 24 mengenai imbal kerja
- h. Mengusulkan penyempurnaan integrasi sistem IT antara SAP, Virtual Cubicle dan Sunfish serta mendukung konsolidasi Laporan Keuangan Korporat dan Anak Perusahaan
- i. Penambahan User SAP pada Sub Bidang Akuntansi
- j. Meningkatkan tertib administrasi pajak
- k. Mendukung pelaksanaan asuransi aset material yang dimiliki oleh Perusahaan

2. Production

The company's performance achievement in 2020 in production aspect is carried out by completing the carry over contracts and new contracts obtained in 2020. As a support for the quality and timeline accuracy on completing the engineering products & services and engineering-based business development (investment, operation & maintenance of CNG Bangkanai, and Electricity Construction Services from PT Prima Power Nusantara), the production strengthening programs are carried out, with specific targets including:

- a. Increasing production capacity and productivity*
- b. Controlling the cost of production*
- c. Excellent Investment Program*
- d. Project Infrastructure Program based on Information Technology.*

3. Finance and Accounting

Finance and Accounting can be described as follows:

- a. Operating and Investment Budget Provision and Control*
- b. Operational Performance Improvement*
- c. Giving Shareholder Loans to Subsidiaries*
- d. Provision of funds for payment of Shareholder Loan*
- e. Improving Financial Reports Internal Controls*
- f. The implementation of the latest Integrated Financial Accounting System (PSAK), namely 71.72 and 73 in the Company's Financial Statements*
- g. Implementation of Integrated Financial Accounting System (PSAK 24) calculations regarding employee benefits*
- h. Improvement proposal for integrated IT system between SAP, Virtual Cubicle and Sunfish, and supporting the consolidation of Corporate and Subsidiary Financial Statements*
- i. Penambahan User SAP pada Sub Bidang Akuntansi*
- j. Improve tax administration order*
- k. Support the implementation of material asset insurance owned by the Company*





- l. Mendukung pelaksanaan inventarisasi aset bersama tim yang ditunjuk oleh Manajemen
 - m. Membantu pencapaian target KPI Perusahaan
 - n. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM pada bidang Akuntansi, Pajak dan Asuransi dengan mengusulkan pengadaan training, workshop dan program profesi Akuntansi
 - o. Membantu pemenuhan kebutuhan bidang lain terkait Rating Perusahaan.
4. SDM dan Umum
- Pengembangan Program SDM melalui *Human Capital Readiness* (HCR) dan *Organizational Capital Readiness* (OCR) melalui implementasi strategi perusahaan dan kegiatan proses bisnis PT PLN Enjiniring baik bidang Enjiniring maupun non Enjiniring maka dilakukan sebagai berikut :
- a. Peningkatan kapabilitas SDM melalui program sertifikasi, pembelajaran/pelatihan, dan penugasan pegawai bisnis inti dan penunjang
 - b. Peningkatan keselarasan strategi perusahaan dengan setiap individu pegawai melalui program internalisasi strategi dan penyesuaian kontrak manajemen hingga level fungsional
 - c. Penyesuaian peraturan atau ketentuan yang berlaku di holding dalam program ratifikasi keputusan direksi untuk mendukung program PLN SOLID
 - d. Konsep CoC dengan penentuan tema isu strategis setiap bulan
 - e. Assessment dan peningkatan Budaya Perusahaan (corporate value) pada setiap individu pegawai PLN Enjiniring
 - f. Kaderisasi jabatan struktural yang berkualifikasi di dalam semua tingkatan dalam rangka memobilisasi penyelenggaraan strategi Perusahaan
 - g. Meningkatkan employee engagement dengan kegiatan Story Telling yang dilaksanakan oleh Leader di bidang masing – masing

- l. Support the implementation of asset inventory along with appointed team by Management
 - m. Help to achieve the Company's Key Performance Indicator targets
 - n. Increase the capacity and capability of HR in Accounting, Taxes and Insurance fields by proposing the provision of training, workshops and the Accounting profession programs
 - o. Assisting in fulfillment of the needs for other fields related to Corporate Ratings.
4. Human Resources and General Affairs
- Human Resources Program Development through Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capital Readiness (OCR) through the implementation of PT PLN Enjiniring company's strategy and business process both in the engineering and non-engineering fields, the following are carried out:
- a. Improvement of HR capabilities through certification programs, learning/training, and assignment of core and supporting business employees
 - b. Increasing the alignment of the company's strategy with each individual employee through the internalization program strategy and conformity of management contracts to functional level
 - c. Alignment of applicable regulations or provisions holding in directors' decisions ratification program to support the PLN SOLID program
 - d. Determining the theme of strategic issues every month with CoC concept
 - e. Corporate Culture Assessment and improvement for PLN Engineering each individual employee
 - f. Regeneration in qualified structural positions at all levels in order to mobilize the implementation of the Company's strategy
 - g. Increase employee engagement with Story Telling activities carried out by Leaders in their respective fields

- h. Meningkatkan implementasi Knowledge Management sebagai sarana dokumentasi Knowledge Asset dan materi pembelajaran untuk setiap pegawai PLN Enjiniring
- i. Menciptakan hubungan Industrial yang harmonis dengan pembinaan hubungan industrial dengan pegawai PLN Enjiniring
- j. Implementasi inovasi tidak terbatas pada lomba karya inovasi dalam setiap improvement yang dilakukan untuk mendukung kinerja PLN Enjiniring
- k. Penyelarasan sistem SDM dan organisasi melalui program review dan asesmen sistem SDM dan organisasi untuk mendukung program enjiniring detail desain
- l. Benchmarking dengan perusahaan ternama di dalam dan luar negeri
- m. Memotivasi pegawai dengan cara memberikan insentif dalam kegiatan-kegiatan tertentu dan mengikutkan pegawai dalam kegiatan lomba tertentu

Dalam mendukung misi PLN Group "SOLID" dimana PLNE mendapat arahan dua misi yaitu *Leading Industry Capabilities* dan *Optimizing Cost Efficiency*, hal ini telah diselaraskan pada strategi Sumber Daya Manusia dan Umum melalui :

- a. Penyusunan jalur kompetensi mendukung proses bisnis perusahaan yang diturunkan melalui pohon karir kepakaran
- b. Melakukan pemetaan komposisi SDM terutama enjinir berdasarkan usia pengalaman pada kepakaran (junior, middle, dan expert) dan berdasarkan kompetensi kepakaran (generalist dan specific)
- c. Melaksanakan pemetaan kompetensi melalui assessment
- d. Melaksanakan program pemenuhan gap atas pemetaan kompetensi yang dapat dilakukan melalui *knowledge management, training, Coaching Mentoring Counseling (CMC)* serta *joint operation* melalui *partnership* perusahaan internasional atau institusi penelitian.

- h. *Implementation of Knowledge Management Improvement as a means of documenting Knowledge Assets and learning materials for every PLN Enjiniring employee*
- i. *Creating harmonious industrial relations by developing industrial relations with PLN Engineering employees*
- j. *The implementation of innovation not limited to the innovation work competition in every improvement made to support PLN Enjiniring performance*
- k. *HR and organizational systems alignment through review and assessment of HR and organizational systems programs to support detailed design engineering programs*
- l. *Benchmarking to well-known domestic companies and abroad*
- m. *Motivating employees by providing incentives in certain activities and involving employees in certain competitions*

In support of the PLN Group "SOLID" mission where PLNE received two mission directions which are Leading Industry Capabilities and Optimizing Cost Efficiency, this has been aligned with the Human Resources and General Affairs strategy through:

- a. *The competency pathways preparation supports the company's business processes that are passed down through the expertise career tree*
- b. *Mapping the composition of human resources, especially engineers based on age of experience in expertise (junior, middle, and expert) and based on expert competence (generalist and specific)*
- c. *Carry out competency mapping through assessment*
- d. *Implement gap fulfillment programs on competency mapping that can be done through knowledge management, training, Coaching Mentoring Counseling (CMC) and joint operations through partnerships with international companies or research institutions.*





- e. Melakukan monitoring pekerjaan terhadap workload SDM berdasarkan *project schedule*, *detailed work schedule*, serta *disbursement* dan *manning schedule*
5. Pengembangan Usaha dan Inovasi
- a. Pengembangan Proyek Energi Baru Terbarukan (EBT)
- PT PLN Enjiniring mengembangkan kompetensi produk enjiniring pada Energi Baru Terbarukan yang meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas, Pembangkit Listrik Tenaga Biomass, Pembangkit Listrik Tenaga Solar PV, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu. Pengembangan kompetensi ini untuk memenuhi peluang Energi Baru Terbarukan yang belum tereksplorasi maksimal di Indonesia. Produk Enjiniring yang terkait dengan Energi Baru Terbarukan menjadi salah satu program Kegiatan Pengembangan Usaha PLNE di tahun 2020.
- b. Detail Engineering Design
- Kompetensi Detail Engineering Design telah menjadi program Rencana Jangka Panjang PLNE sesuai yang tercantum dalam Dokumen RJP PLNE 2020-2024. Dimana sampai dengan tahun 2019 PLNE telah melakukan inisiasi melalui pembentukan tim, pengembangan Kualitas dan Kuantitas SDM, serta pengadaan perangkat kerja enjiniring sejak tahun 2017. Diharapkan pada tahun 2020 PLNE berkesempatan untuk berkoordinasi dengan Divisi PLN dan Unit PLN dalam pengembangan kompetensi *detail design* pada proyek pembangkit dan transmisi.

- e. *Monitor work on HR workload based on project schedule, detailed work schedule, as well as disbursement and manning schedule*

5. *Business Development and Innovation*
- a. *New Renewable Energy Project Development (EBT)*
- PT PLN Enjiniring developing engineering product competencies in New Renewable Energy which includes Biogas Power Plant, Biomass Power Plant, PV Solar Power Plant, Mini Hydro Power Plant, Piko Hydro Power Plant and Wind Power Plant. The development of this competency is to meet the New Renewable Energy opportunities which has not been fully exploited in Indonesia. Engineering products related to New and Renewable Energy are one of the PLNE 2020 Business Development Activities programs.*
- b. *Detail Engineering Design*
- The competencies of Detailed Engineering Design have become a PLNE Long-Term Plan program as stated in the 2020-2024 PLNE RJP Document. Where until 2019 PLNE has initiated through the team building, HR Quality and Quantity development, and engineering work tools procurement since 2017. It is hoped that in 2020 PLNE will have the opportunity to coordinate with the PLN Division and PLN unit in the development of power generation and transmission projects detailed design and competencies.*

c. Perangkat Kualitas Produk *Detail Design*
 Sejalan dengan program pengembangan usaha dan inovasi PLNE tahun 2017 hingga tahun 2019 dimana perusahaan telah melakukan investasi kelengkapan sarana dan prasarana perangkat enjiniring dalam pengembangan kompetensi Detail Engineering Design. Program ini merupakan lanjutan program lanjutan atas pengembangan perangkat enjiniring yang mana bertujuan untuk pemenuhan Roadmap kompetensi khususnya Detail Engineering Design.

c. *Device of Product Detail Design Quality.*
In line with PLNE's business development and innovation program from 2017 to 2019 where the company has invested to completed the engineering equipment facilities and infrastructure in the development of Detail Engineering Design Competencies. This program is a follow-up program for engineering tools development aiming to fulfill the competency Roadmap, especially in Detail Engineering Design.



PROYEK UNGGULAN

LEADING PROJECTS

Nama Proyek <i>Project Name</i>	Nilai Proyek <i>Project Value</i>		Durasi <i>Duration</i>	Lokasi <i>Location</i>
	IDR	USD		
Pengadaan Jasa Konsultansi Untuk Supervisi Konstruksi dan QA/QC Pembangunan PLTU Parit Baru (2x50 MW) <i>Consulting Service Providing for Construction Supervision and QA/QC of PLTU Development of Parit Baru (2x50 MW)</i>	47.027.615.909	5.369.606,51	3 Desember 2013 – 30 Juni 2021	Bengkayang, Kalimantan Barat
Jasa Konsultansi Untuk Supervisi Konstruksi dan QA/QC Pembangunan PLTU Pangkalan Susu 3 dan 4 (2x200 MW). <i>Consulting Service for Construction Supervision and QA/QC of PLTU Development of Pangkalan Susu 3 and 4 (2x200 MW)</i>	40.405.643.504,6	6.278.309,741	16 Desember 2014 – 31 Desember 2020	Pangkalan Susu, Sumatera Utara
Jasa Konsultansi Untuk Supervisi Konstruksi dan QA/QC Pembangunan PLTU Takalar (2x100 MW). <i>Consulting Service for Construction Supervision and QA/QC of PLTU Development of Takalar (2x100 MW)</i>	39.217.323.871	6.184.341,46	Desember 2014 – 30 Juni 2019	Takalar, Sulawesi Selatan
Jasa Konsultansi Untuk Supervisi Desain dan Konstruksi PLTA Jatigede (2x55 MW). <i>Consulting Service for Design and Construction Supervision of PLTA of Jatigede (2x55 MW)</i>	53.024.221.637,761	6.827.576	September 2014 – 31 Desember 2021	Jatigede, Jawa Barat
Jasa Konsultansi Supervisi Desain, Supervisi Konstruksi dan Quality Assurance & Quality Control (QA/QC) Pembangunan Muara Tawar Combined Cycle Power Plant Block 2,3, & 4 Add-On Project	69.620.826.533,5		06 Maret 2017 – 30 Maret 2021	Bekasi, Jawa Barat
Pekerjaan Jasa Konsultansi Project Management Team PLTA Upper Cisokan	123,377,562,124.00		17 Nov 2017 – 17 Nov 2024	Cisokan, Jawa barat
Jasa Konsultansi Update Desain, Supervisi Desain dan Supervisi Konstruksi PLTA Upper Cisokan Pumped Storage (4x260 MW)	334,985,483,326.00		16 Nov 2018 – 16 Dec 2023	Cisokan, Jawa barat

Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

Kinerja Operasi Per Segmen Usaha

Operating Performance Per Business Segment



JASA ENJINIRING

Realisasi perolehan kontrak jasa Enjiniring internal adalah sebesar Rp. 102,437.21 juta, lebih rendah 73.66% dibandingkan realisasi perolehan kontrak internal di tahun 2019 yaitu sebesar Rp 388,946.82 juta. Sedangkan perolehan kontrak jasa Enjiniring eksternal adalah sebesar Rp. 6,620.51 juta turun 20.44% dibandingkan realisasi penjualan di tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 8,321.84 juta. Secara total keseluruhan perolehan kontrak jasa enjiniring, pertumbuhannya turun sebesar 72.55%

ENGINEERING SERVICES

The realization sales of internal engineering services were Rp. 102,437.21 Million 73.66% lower than the sales in 2019 which amounted to Rp. 388,946.82 million. Meanwhile, sales of external engineering services amounted to Rp. 9,825.05 million, decreased 20.44% compared to the sales in 2015 which was Rp. Rp. 6,620.51 million. The overall total acquisition growth of engineering service contracts' is decreased by 72.55%

TABEL PEROLEHAN KONTRAK JASA ENJINIRING (DALAM JUTA RUPIAH)
ENGINEERING SERVICES CONTRACT GAINS TABLE (IN MILLION IDR)

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Internal Internal	102,437.21	388,946.82	-73.66%
Eksternal External	6,620.51	8,321.84	-20.44%
Jumlah Total	109,057.72	397,268.65	-72.55%

BIDANG PEMBANGKIT

Pada tahun 2020 Bidang Pembangkit masih melanjutkan tiga pekerjaan yang termasuk proyek strategis, yaitu Pekerjaan Jasa Konsultansi untuk Supervisi Desain dan Konstruksi PLTA Jatigede, Pekerjaan Jasa Konsultansi Project Management Team PLTA Upper Cisokan dan Pekerjaan Jasa Konsultansi Update Desain, Supervisi Desain dan Supervisi Konstruksi PLTA Upper Cisokan Pumped Storage (4x260 MW).

Di tahun 2020 ini, Bidang Pembangkit menerima penugasan baru yang masih didominasi oleh penugasan yang terkait dengan pembangkit listrik berbahan bakar batubara dan gas, serta pembuatan kajian infrastruktur gas dan pembangkit EBT.

POWER PLANTS SECTOR

The Power Plant sector still continued three jobs that had been included on strategic projects in 2020, namely: Design and Construction Supervision Consultant Services of HEPP Jatigede, Project Management Consultant Services for the Upper Cisokan Hydropower Team and Design Updates Consultant Services, Design Supervision and Construction Supervision for the Upper Cisokan Hydropower Plants Pumped Storage (4x260 MW).

In 2020, the Power Plants Sector received new assignments, which still been dominated with coal and gas-fired power plants assignments related, as well as gas infrastructure and NRE power plants studies.

Total nilai perolehan kontrak baru Bidang Pembangkit pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 51,171.08 Juta, turun 28.58% dibandingkan perolehan nilai kontrak di tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 71,644.86 Juta. Bidang Pembangkit sepanjang tahun ini total pekerjaan yang dilaksanakan adalah 121 pekerjaan yang terdiri dari : 51 kontrak 2020 dan 70 kontrak lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya yang pelaksanaannya dilanjutkan ke tahun 2020. Dari 121 pekerjaan tersebut terdapat 68 kontrak pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan tahun ini yaitu 33 kontrak dari kontrak baru dan 35 dari kontrak lanjutan.

The total value of Power Plants Sector's new contracts in 2020 amounted to Rp. 51,171.08 million, decrease by 28.58% compared to the acquisition of the contract value in 2019 which amounted to Rp. 71,644.86 Million. The Power Plant sector has carried out 121 jobs during this year, of which 51 contracts in 2020 and 70 follow-up from previous year contracts which the implementation carried out to 2020. Of the 121 jobs, there are 68 work contracts that have been completed this year, namely 33 contracts from new contracts and 35 from the ongoing contracts.

TABEL NILAI KONTRAK BARU BIDANG PEMBANGKIT (DALAM JUTA RUPIAH)

POWER GENERATION NEW CONTRACT VALUE TABLE (IN MILLION IDR)

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Internal <i>Internal</i>	49,872.47	65,456.82	-23.81%
Eksternal <i>External</i>	1,298.61	6,188.03	-79.01%
Jumlah <i>Total</i>	51,171.08	71,644.86	-28.58%

TABEL PEROLEHAN KONTRAK BIDANG PEMBANGKIT

POWER GENERATION CONTRACT GAINS TABLE

Uraian Description	Jumlah Kontrak 2020 (Unit)		Jumlah Kontrak 2019 (Unit)		Perubahan (%)	
	Total Contract of 2020 (Unit)		Total Contract of 2019 (Unit)		Change (%)	
	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kontrak 2020* <i>Contract 2020*</i>	49	2	44	4	11%	-50%
Pekerjaan Lanjutan ** <i>Carry Over**</i>	66	4	77	0	-14%	400%
Kontrak selesai di tahun 2020 <i>Contracts Completed in 2020</i>	62	6	55	0	-44%	600%

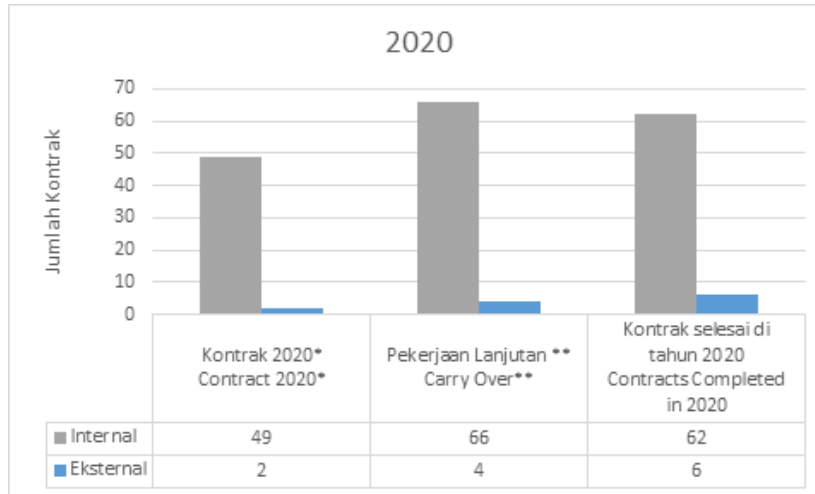
* Total kontrak yang diperoleh di tahun 2020

* Total contracts obtained in 2020

** Total kontrak lanjutan dari tahun 2018 kebawah

** Total Carry Over Contracts from 2018 and below

PEROLEHAN KONTRAK BIDANG PEMBANGKITAN
POWER GENERATION CONTRACT ACQUISITION



BIDANG TRANSMISI DAN DISTRIBUSI

Total nilai perolehan kontrak baru Bidang Transmisi dan Distribusi pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 46,702.24 Juta, turun 46,43% dari tahun 2019 dengan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp. 87,174.03 Juta. Bidang Transmisi dan Distribusi pada tahun 2020 melaksanakan 66 pekerjaan, dimana 27 kontrak 2020 dan 39 kontrak lanjutan yang masih dilanjutkan pelaksanaan pekerjaannya ke tahun 2020. Dari 66 kontrak tersebut terdapat 45 kontrak pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan tahun ini yaitu 19 kontrak dari kontrak baru dan 26 dari kontrak lanjutan.

Mayoritas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Bidang Transmisi dan Distribusi pada tahun 2020, masih didominasi oleh pelaksanaan Survey, Soil Investigation, pembuatan Bid Dokumen dan HPE, serta Pendampingan Lelang untuk Gardu Induk maupun Transmisi. Selain pekerjaan tersebut, Bidang Transmisi dan Distribusi juga pada tahun ini melaksanakan beberapa pekerjaan Desain Review, Study dan juga pekerjaan Supervisi QA/QC Transformer.

TRANSMISSION AND DISTRIBUTION SECTOR

The total acquisition value of new contracts in the Transmission and Distribution Sector in 2020 amounted to Rp. 46,702.24 million, decreasing by 46,43% from year 2019 with the new contract acquisition value of Rp. 87,174.03 million. The Transmission and Distribution Sector carried out 66 jobs, of which 27 contracts in 2020 and 39 further contracts are still continued to be implementing in 2020. Out of the 66 contracts, 45 work contracts have been completed this year, namely 19 new contracts and 26 from follow-up contracts.

The majority of work carried out by the Transmission and Distribution Sector in 2017, was still dominated by the implementation of surveys, Soil Investigation, Bid Documents and HPE making, as well as Tender Assistance for substations and transmission. Apart from those works, the Transmission and Distribution Sector has also carried out several Design Review, Studies and as well as the Transformer QA/QC Supervision work in this year alone.

TABEL NILAI KONTRAK BARU BIDANG TRANSMISI DAN DISTRIBUSI (DALAM JUTA RUPIAH)
TRANSMISSION AND DISTRIBUTION NEW CONTRACT VALUE TABLE (IN MILLION IDR)

Uraian <i>Description</i>	2020	2019	Pertumbuhan (%) <i>Growth (%)</i>
Internal <i>Internal</i>	41,380.34	85,040.22	-51.34%
Eksternal <i>External</i>	5,321.90	2,133.80	149.41%
Jumlah <i>Total</i>	46,702.24	87,174.03	-46.43%

TABEL PEROLEHAN KONTRAK BIDANG TRANSMISI DAN DISTRIBUSI
TRANSMISSION AND DISTRIBUTION CONTRACT GAINS TABLE

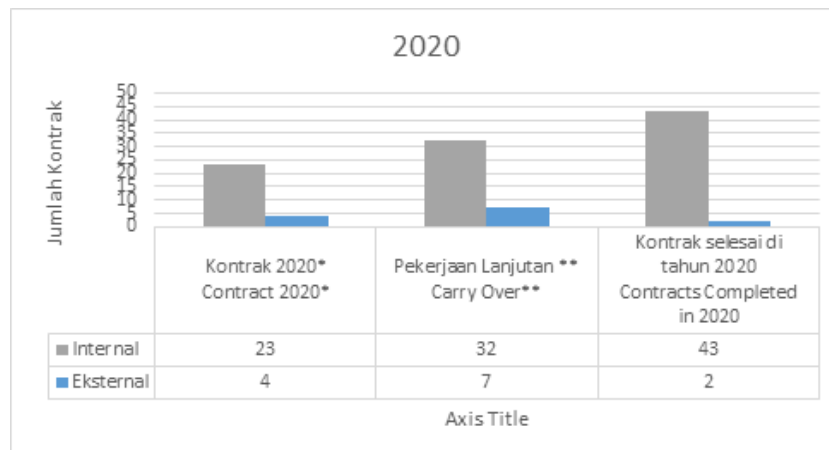
Uraian <i>Description</i>	Jumlah Kontrak 2020 (Unit)		Jumlah Kontrak 2019 (Unit)		Perubahan (%)	
	<i>Total Contract of 2020</i>		<i>Total Contract of 2019</i>		<i>Change</i>	
	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kontrak 2020* <i>Contract 2020*</i>	23	4	37	5	-38%	-20%
Pekerjaan Lanjutan ** <i>Carry Over**</i>	32	7	42	9	-24%	-22%
Kontrak selesai di tahun 2020 <i>Contracts Completed in</i> 2020	43	2	46	8	-7%	-75%

* Total kontrak yang diperoleh di tahun 2020

* *Total contracts obtained in 2020*

** Total kontrak lanjutan dari tahun 2018 kebawah

** *Total Carry Over Contracts from 2018 and below*

PEROLEHAN KONTRAK BIDANG TRANSMISI DAN DISTRIBUSI
TRANSMISSION AND DISTRIBUTION CONTRACT ACQUISITION


BIDANG KONSTRUKSI

Pada tahun 2020, Bidang konstruksi masih melaksanakan 5 proyek strategis, yaitu: pekerjaan Supervisi Konstruksi dan QA/QC QA/QC PLTU Parit Baru, pekerjaan Supervisi Konstruksi dan QA/QC PLTU Pangkalan Susu, pekerjaan Supervisi Konstruksi dan QA/QC PLTU Takalar, pekerjaan Supervisi Konstruksi dan QA/QC PLTA Jatigede, serta pekerjaan Supervisi Konstruksi dan QA/QC Muara Tawar Combined Cycle Power Plant Block 2,3, & 4 Add-On Project. Sehingga pada tahun 2020 ini, total pekerjaan yang dilaksanakan oleh Bidang Konstruksi adalah 54 pekerjaan yang terdiri dari : 4 kontrak 2020 dan 50 kontrak lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya yang pelaksanaannya dilanjutkan ke tahun 2020. Dari 54 pekerjaan tersebut terdapat 4 kontrak pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan tahun ini yaitu 1 kontrak dari kontrak baru dan 3 dari kontrak lanjutan. Sementara untuk perolehan nilai kontrak baru, di tahun 2020 Bidang Konstruksi mendapat Rp. 9.067.990.360 Miliar, naik 8,97 % dari tahun 2019 dimana pada tahun 2019 perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp. 8.209.278.063 Miliar.

CONSTRUCTION SECTOR

In 2020, the construction sector is still carrying out 5 strategic projects, namely: Construction Supervision and QA/QC Parit Baru Electric Steam Power Plants, Construction Supervision and QA / QC Pangkalan Susu Electric Steam Power Plants, Construction Supervision and QA / QC Takalar Electric Steam Power Plants, Construction Supervision and QA / QC Jatigede Hydroelectric Power Plants, as well as Construction Supervision and QA/QC work in Muara Tawar Combined Cycle Power Plant Block 2,3, & 4 Add-On Project. Hence the total work carried out by the Construction Sector in 2020 is 54 jobs consisting of : 4 contracts in 2020 and 50 follow-up contracts in which the implementation will be continued in 2020. Out of the 54 jobs, there are 4 work contracts that have been completed this year, namely 1 contract from a new contract and 3 from a follow-up contract. Meanwhile, for new contract acquisition values, in 2020 the Construction Sector received Rp. 9,067,990,360 billion, up to 8.97% from 2019 where in 2019 new contract acquisition value of Rp. 8,209,278,063 Billion.



TABEL NILAI KONTRAK BARU BIDANG KONSTRUKSI (DALAM JUTA RUPIAH)

CONSTRUCTION NEW CONTRACT VALUE TABLE (IN MILLION IDR)

Uraian <i>Description</i>	2020	2019	Pertumbuhan (%) <i>Growth (%)</i>
Internal <i>Internal</i>	9.067.990,360	8.209.278,063	8,97
Eksternal <i>External</i>	-	-	-
Jumlah <i>Total</i>	9.067.990,360	8.209.278,063	8,97

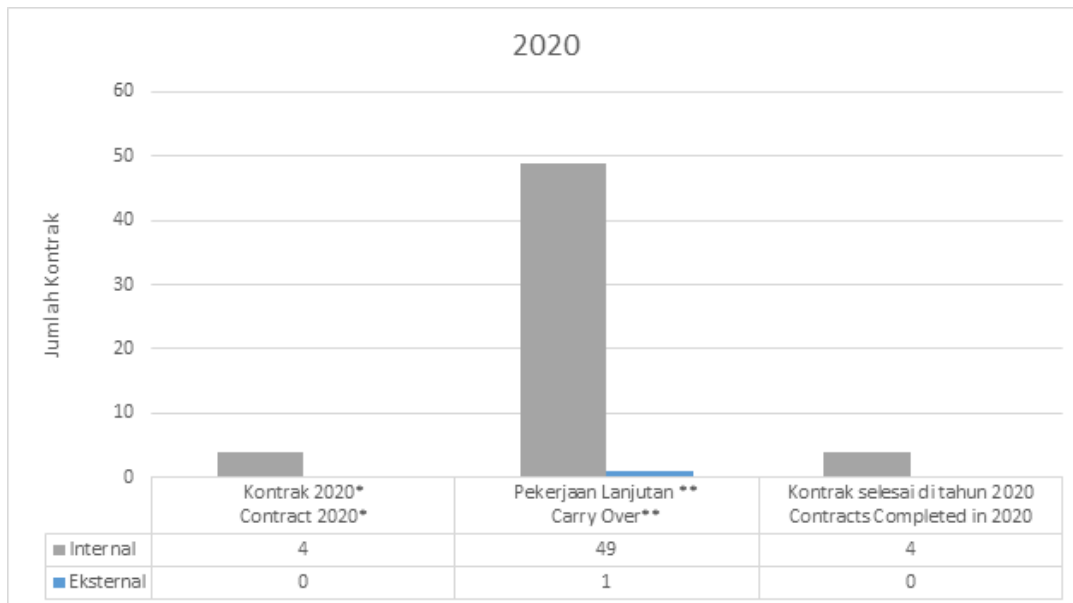
TABEL PEROLEHAN KONTRAK BIDANG KONSTRUKSI
CONSTRUCTION CONTRACT GAINS TABLE

Uraian <i>Description</i>	Jumlah Kontrak 2020 (Unit)		Jumlah Kontrak 2019 (Unit)		Perubahan (%)	
	<i>Total Contract of 2020 (Unit)</i>		<i>Total Contract of 2019 (Unit)</i>		<i>Change (%)</i>	
	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
Kontrak 2020* <i>Contract 2020*</i>	4	0	5	0	-20,00%	0%
Pekerjaan Lanjutan ** <i>Carry Over**</i>	49	1	55	1	-10,91%	0%
Kontrak selesai di tahun 2020 <i>Contracts Completed in 2020</i>	4	0	11	0	-63,64%	0%

* Total kontrak yang diperoleh di tahun 2020

* *Total contracts obtained in 2020*

** Total kontrak lanjutan dari tahun 2018 kebawah

** *Total Carry Over Contracts from 2018 and below*
PEROLEHAN KONTRAK BIDANG KONSTRUKSI
CONSTRUCTION CONTRACT ACQUISITION


JASA LAINNYA

OTHER SERVICES

Bidang Informasi dan Teknologi

Information and Technology

Tidak ada

None



Aspek Pemasaran

Marketing Aspects

Sesuai dengan visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan layanan enjiniring terintegrasi di ketenagalistrikan yang terkemuka dan salah satu misi perusahaan, yaitu menyediakan jasa enjiniring serta jasa pengembangan dan konstruksi yang terkemuka, memiliki keunggulan daya saing strategis bagi PLN Group dan sesuai dengan standar desain yang berlaku secara internasional, maka pelanggan utama PLN Enjiniring adalah PLN Group. Dengan kata lain, produksi dan jasa yang dilakukan oleh PLN Enjiniring sebagian besar merupakan pekerjaan yang diterima dari PT PLN (Persero) sebagai induk perusahaan.

Selain mendapatkan pekerjaan dari PLN Group, PLN Enjiniring juga memiliki kebijakan untuk menyediakan jasa bagi pihak eksternal (pelanggan di luar PLN Group).

Based on the company's vision, which is to become a leading integrated engineering services company in electricity and one of the company's missions, which is to provide a leading engineering, construction, and developing services, as well as to have advantages on competitive strategy for the PLN Group and in accordance to the internationally accepted design standards, therefore the main customer of PLN Enjiniring is PLN Group. In the other words, the production and services performed by PLN Enjiniring are mostly jobs that have been received from PT PLN (Persero) as the holding company.

PLN Enjiniring has also a policy to provide services to external parties (customers outside the PLN Group) apart from getting a job from the PLN Group.

STRATEGI PEMASARAN

■ Strategi Pemasaran Pelanggan Internal dan Eksternal

Pangsa pasar PLN Enjiniring sampai dengan saat ini masih didominasi oleh pelanggan internal (PLN Group) dan sebagian lagi pelanggan eksternal (pelanggan di luar PLN Group), sehingga strategi pemasarannya lebih difokuskan kepada pemenuhan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Pemenuhan kepuasan pelanggan ini dilakukan dengan cara mendengarkan suara pelanggan, baik pelanggan saat ini maupun pelanggan potensial. Sedangkan untuk membangun hubungan dengan pelanggan dilakukan dengan pengelolaan hubungan pelanggan dan pengelolaan keluhan/aspirasi pelanggan.

1. Pemenuhan Kepuasan Pelanggan
PLN Enjiniring mendengarkan, berinteraksi dan mengamati perilaku pelanggan untuk

MARKETING STRATEGY

■ Internal and External Customer Marketing Strategy

PLN Enjiniring's market share is still dominated by internal customers (PLN Group) and some external customers (customers outside the PLN Group) up until now, so that its marketing strategy is more focused on fulfilling customer satisfaction and building relationships with customers. Fulfilling customer satisfaction is done by listening to the customers' aspirations, either current customers or potential customers. Meanwhile, building relationships with customers is carried out by managing customer relationships and managing customer complaints/aspirations.

1. Customer Satisfaction Compliance
PLN Enjiniring listens, interacts and observes customer behavior to obtain some informations

memperoleh informasi atas produk dan layanan yang diberikan Perseroan kepada pelanggan internal dan eksternal melalui rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pelanggan maupun yang pengenalan produk dan layanan yang diinisiasikan sendiri oleh PLN Enjiniring. Perusahaan mendengarkan suara pelanggan saat ini untuk memperoleh informasi dan umpan balik (feedback) dengan melakukan pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

- Rapat koordinasi mingguan dan bulanan untuk mendapatkan informasi/masukan dan umpan balik pada setiap tahapan pekerjaan;
- Media komunikasi (telepon, SMS, email, website) untuk menampung masukan dan keluhan;
- Survei kinerja proyek yang dilakukan pada setiap proyek pekerjaan yang dilakukan oleh PLN Enjiniring;
- Survei kepuasan pelanggan korporat yang dilakukan pada semester 1 dan 2 untuk memperoleh informasi terkait nilai indeks kepuasan pelanggan berdasarkan penilaian dari persepsi pelanggan serta menampung kritik dan saran pelanggan;
- Pendekatan personal yang dilakukan oleh manajemen PLN Enjiniring dan;
- Roadshow secara tatap muka maupun virtual kepada pelanggan.

PLN Enjiniring menindaklanjuti informasi dan umpan balik yang diperoleh dari pelanggan untuk memperbaiki mutu produk dan layanan dengan cara:

- Mengoptimalkan fungsi tim proyek untuk berkoordinasi dengan pelanggan dan menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan bulanan;
- Kunjungan lapangan yang dilakukan oleh manajemen PLN Enjiniring untuk mendengarkan suara pelanggan, sehingga petugas dapat merespon langsung keluhan pelanggan

Terkait dengan pelanggan potensial, suara pelanggan diperoleh melalui media rapat formal, diskusi informal, survei kepuasan pelanggan, pameran, serta media elektronik. Media elektronik yang digunakan yaitu *website, email, telepon, dan aplikasi pengiriman pesan.*

on products and services provided by the Company to internal and external customers through coordination meetings organized either by the customer and the introduction of products and services initiated by PLN Enjiniring or those initiated by PLN Enjiniring.

The company listens to the current customers' aspirations to obtain information and feedback by taking the following approaches:

- *Perform some coordination meetings to obtain information/input and feedback at each stage of work weekly and monthly;*
- *Communication media (telephone, SMS, email, website) to accommodate input and complaints;*
- *Project performance survey conducted on each project work carried out by PLN Enjiniring;*
- *Corporate customer satisfaction surveys conducted in semester 1 and in semester 2 to obtain information related to the customer satisfaction index scores based on assessments of customer perceptions and to accommodate customer criticism and suggestions;*
- *The personal approach taken by the management of PLN Enjiniring and;*
- *Face-to-face and virtual roadshows to customers*

PLN Enjiniring follows up on feedback and information obtained from the customers to improve products and services quality by taking the following approaches:

- *Optimize the function of the project team to coordinate with customers and deliver monthly work progress reports;*
- *Field visits conducted by PLN Enjiniring management to listen to the customers' aspirations so that the officers can respond directly to the customers' complaints*

Regarding the potential customers, their aspirations are obtained through the media of formal meetings, informal discussions, customer satisfaction surveys, exhibitions and electronic media. The electronic media used are the website, email, telephone, and messaging app.





PLN Enjiniring juga membandingkan kepuasan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan pesaing berdasarkan hasil survei. Berdasarkan data tersebut, PLN Enjiniring membuat analisis untuk menentukan target kepuasan pelanggan terhadap kepuasan pelanggan pesaing di tahun berikutnya. Aktifitas ini dilakukan oleh Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha bekerja sama dengan Direktorat Enjiniring

2. Membangun Hubungan dengan Pelanggan

PLN Enjiniring memasarkan, membangun dan mengelola hubungan dengan pelanggan melalui kegiatan *Roadshow* kepada pelanggan yang dilakukan secara tatap muka sebelum pandemi Covid-19 dan secara virtual pada masa pandemi, yang bertujuan untuk menyediakan dukungan pelanggan agar mendapatkan *feedback* dari pelanggan serta agar keluhan pelanggan dapat diselesaikan dengan tuntas.

Dalam membangun hubungan dengan pelanggan, PLN Enjiniring juga mengelola keluhan dan aspirasi pelanggan. PLN Enjiniring menetapkan Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha sebagai pihak yang mengelola keluhan dan aspirasi pelanggan.

Data dan informasi keluhan dan aspirasi pelanggan dikumpulkan dan diidentifikasi melalui:

- a. Surat keluhan yang dikirimkan oleh pelanggan;
- b. Keluhan yang disampaikan secara langsung dan dicatat dalam formulir keluhan dan aspirasi pelanggan;
- c. Survei kepuasan pelanggan kinerja proyek dan survei kepuasan pelanggan korporat;

d. Laporan *Roadshow*

Setelah diidentifikasi berdasarkan jenis keluhan, keluhan segera disampaikan kepada Direktorat terkait agar keluhan dapat ditangani secara efektif dan tuntas. Selain itu, Perseroan juga mengelola keluhan berdasarkan data rekaman (*record*) keluhan pelanggan selama pekerjaan berjalan. Untuk memastikan agar keluhan dapat ditangani dengan tuntas, PLN Enjiniring telah membuat Prosedur Enjiniring Penanganan Keluhan dan Aspirasi Pelanggan.

PLN Engineering also compares customer satisfaction against competitor customer satisfaction based on survey results. Based on this data, PLN Engineering makes an analysis to determine customer satisfaction targets against competitor customer satisfaction in the following year. This activity is carried out by the Directorate of Marketing and Business Development in collaboration with the Directorate of Engineering

2. Customers Relationships Building

PLN Enjiniring markets, builds and manages relationships with customers through roadshows to customers conducted face-to-face before the Covid-19 pandemic and virtually during the pandemic, which aim to provide customer support in order to get feedback from customers so that customer complaints can be resolved completely.

PLN Enjiniring also manages customer complaints and aspirations in building relationships with customers. PLN Enjiniring establishes the Directorate of Marketing and Business Development as the party that manages customer complaints and aspirations.

Data and information on customer complaints and aspirations are collected and identified through:

- a. Letter of complaint sent by the customer;*
- b. Complaints that are being submitted directly and are being recorded in the complaint form and customer aspirations;*
- c. Project performance customer satisfaction surveys and corporate customer satisfaction surveys;*

d. Roadshow report

Customer complaints are immediately submitted to the relevant Directorate after being identified by the type of complaint, so that those complaints can be handled effectively and thoroughly. In addition, the Company also manages complaints based on customer complaint records during work. To ensure that complaints can be handled thoroughly, PLN Enjiniring has developed an Engineering Procedure for Handling Customer Complaints and Aspirations.

PANGSA PASAR

Pada periode tahun 2019 - 2028 kebutuhan listrik diperkirakan akan meningkat dari 245 TWh pada tahun 2019 menjadi 433 TWh pada tahun 2028. Realisasi pada tahun 2019 yaitu, kapasitas terpasang pembangkit pada tahun sebesar 62.833 MW, penambahan kapasitas transmisi 6.222,33 kms, penambahan kapasitas gardu induk 17.674 MVA. Untuk memenuhi kebutuhan listrik pada tahun tahun 2028, masih diperlukan penambahan infrastruktur ketenagalistrikan.

PT PLN Enjiniring sebagai bagian dalam grup PT PLN (Persero) ikut serta dalam menyelesaikan program 35.000 MW termasuk pada program listrik perdesaan untuk menerangi desa - desa di daerah terdepan, terluar, tertinggal. PT PLN Enjiniring juga ikut serta mendukung keberhasilan program PT PLN (Persero) pengembangan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), di mana Pemerintah telah menetapkan target pemanfaatan EBT dalam bauran energi pada tahun 2025 minimal 23%, dan ditingkatkan menjadi minimal 28% pada tahun 2038. Target tersebut tertuang di dalam RUKN 2019-2038.

Dukungan PT PLN Enjiniring tersebut yaitu melalui penyediaan jasa konsultansi enjiniring di bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi.

MARKET SHARE

Electricity's demand is expected to be increasing from 245 TWh in 2019 to 433 TWh in 2028 In the 2019 – 2028 period. The using of Installed Power Plant Capacity in 2019 amounting to 62,833 MW, additional transmission capacity of 6,222.33 kms, additional substation capacity of 17,674 MVA. In order to meet electricity's demand in 2028, it is still necessary to add electricity infrastructure.

PT PLN Enjiniring as part of the group of PT PLN (Persero) participated in the success of the 35,000 MW program including the rural electricity program to illuminate villages in the leading, outermost, lagging areas. PT PLN Enjiniring also participated in supporting the success of PT PLN (Persero) program for the development of New and Renewable Energy (EBT) utilization, where the Government has set a target of utilization of EBT in the energy mix by 2025 at least 23%, and increased to at least 28% by 2038. The target is stated in RUKN 2019-2038.

The support of PT PLN Enjiniring is through the provision of engineering consultancy services in the field of power plant, transmission and distribution.



Prospek Usaha 2020

Business Prospect 2020

Prospek Perusahaan di masa depan tidak terlepas dari perencanaan investasi Pemegang Saham yang secara umum tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) sebagai perusahaan induk. Merujuk pada Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PLN selaku Pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum wajib menyediakan tenaga listrik secara terus-menerus, dalam jumlah yang cukup dan dengan mutu dan keandalan yang baik. Dengan demikian PLN harus mampu melayani kebutuhan tenaga listrik saat ini maupun di masa yang akan datang agar PLN dapat memenuhi kewajiban yang diminta oleh Undang- Undang tersebut. Sebagai langkah awal PLN harus dapat memperkirakan kebutuhan tenaga listrik paling tidak hingga 10 tahun ke depan.

Kebutuhan tenaga listrik pada suatu daerah didorong oleh tiga faktor utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, program elektrifikasi dan pengalihan *captive power* ke jaringan PLN. Pertumbuhan ekonomi dalam pengertian yang sederhana adalah proses meningkatkan *output* barang dan jasa. Proses tersebut memerlukan tenaga listrik sebagai salah satu input untuk menunjangnya, disamping input-input barang dan jasa lainnya. Di samping itu hasil dari pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pendapatan masyarakat yang mendorong peningkatan permintaan barang-barang/peralatan listrik seperti televisi, pendingin ruangan, lemari es dan lainnya. Akibatnya permintaan tenaga listrik akan meningkat.

Faktor kedua adalah program elektrifikasi. Sebagai upaya PLN untuk mendukung program Pemerintah. Dalam meningkatkan rasio elektrifikasi maka PLN perlu melistriki semua masyarakat yang ada dalam wilayah usahanya. Hal ini secara langsung akan menjaga eksistensi wilayah usaha PLN dan sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia khususnya pada daerah-daerah yang telah menjadi wilayah usaha PLN.

The Company's prospect cannot be separated from the Shareholders' investment planning in the near future which is generally stated in the General Plan of Electricity Supply (RUPTL) of PT PLN (Persero) as the holding company. Referring to Article 28 and Article 29 of Law Number 30 of 2009 concerning Electricity, PLN as the Holder of a Business Permit to Supply Electricity for the public interest is obliged to provide electricity continuously, in sufficient quantities and with good quality and reliability. Thus, PLN must be able to serve the current and the future electricity needs so that PLN can fulfill its obligations required by the Law. First off, PLN must be able to estimate the electricity needs for at least the next 10 years.

The electricity's needs in an area are driven by three main factors, namely the economic growth, the electrification program and the transfer of captive power to PLN's network. Economic growth in a more simple term is the process of increasing the output of goods and services. This process, in addition to other inputs for goods and services, requires electricity power to support it. In addition, the result of economic growth is an increase in people's income which will be encouraging increases in electrical goods' demands/equipments such as televisions, air conditioners, refrigerators and others. As a result, the demand for electricity will increase.

The second factor is the electrification program. It is one of PLN's efforts to support Government programs. PLN needs to establish electricity for all the people inside its business area to increase the electrification ratio. This will directly maintain the existence of PLN's business areas and at the same time will increase the electrification ratio in Indonesia, especially in areas that have become PLN's business areas.

Faktor ketiga yang menjadi pendorong pertumbuhan permintaan tenaga listrik PLN adalah pengalihan dari *captive power* (penggunaan pembangkit sendiri berbahan bakar minyak) menjadi pelanggan PLN. *Captive power* ini timbul sebagai akibat dari ketidakmampuan PLN memenuhi permintaan pelanggan di suatu daerah, terutama pelanggan industri dan bisnis. Bilamana kemampuan PLN untuk melayani di daerah tersebut telah meningkat, maka *captive power* ini dengan berbagai pertimbangannya akan beralih menjadi pelanggan PLN. Pengalihan *captive power* ke PLN juga didorong oleh tingginya harga BBM untuk membangkitkan tenaga listrik milik konsumen industri/bisnis, sementara harga jual listrik PLN relatif lebih murah. Faktor ketiga ini sangat bergantung kepada kemampuan pasokan PLN di suatu daerah/sistem kelistrikan dan skema bisnis jual beli listrik PLN dengan *captive power*, jadi tidak berlaku umum.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kebutuhan listrik adalah kemampuan finansial perusahaan untuk melakukan investasi dalam rangka melayani pertumbuhan kebutuhan pelanggan dan masyarakat untuk mendapatkan pasokan listrik yang cukup dan andal.

Sesuai dengan prakiraan kebutuhan tenaga listrik yang telah dikemukakan oleh PLN tersebut serta kebutuhan investasi dalam rangka melayani pertumbuhan permintaan pelanggan, maka terlihat bahwa prospek PLN Enjiniring ke depan sangatlah terbuka lebar.

Selain itu, terdapat beberapa peluang yang dimiliki oleh PLN Enjiniring yang dapat dijadikan sebagai prospek usaha ke depan antara lain, yaitu:

1. Rencana investasi PT PLN (Persero) setiap tahun masih relatif besar untuk mengejar rasio elektrifikasi nasional yang masih rendah.
2. Jumlah pesaing terbatas, terutama dalam pekerjaan enjiniring hulu;
3. UU No.30 tahun 2009 membuka peluang untuk pengembangan listrik tidak hanya oleh PT PLN (Persero) sehingga terbuka peluang pasar di PEMDA dan IPP;

The third factor that drives the demand growth for PLN electricity is the transfer from the captive power (the use of self-propelled oil-fired power plants) to become PLN customers. This captive power arises as a result of PLN's inability to meet customer demand in an area, especially industrial and business customers. If PLN's ability to serve in the area has increased, then this captive power with various considerations will turn to become PLN customers. The transfer of captive power to PLN is also driven by the high price of fuel to generate electricity belonging to industrial/business consumers, while the selling price of PLN's electricity is relatively cheaper. This third factor really depends on the ability of PLN's supply in an area/electricity system and the PLN electricity buying and selling business scheme with captive power, so it does not apply in general.

Another factor that can affect the growth of electricity demand is the company's financial ability to invest in serving the growing of customers' and the public's needs to get an adequate and reliable electricity supply.

In accordance to the electricity estimated demand that has been put forward by PLN as well as the investment needs in order to serve customer demand's growth, it seems that the prospects for PLN Enjiniring are very wide open in the near future.

There are several opportunities owned by PLN Enjiniring that can be used as the future business prospects :

1. *PT PLN's (Persero) investment plan is still relatively large every year to catch up with the low national electrification ratio.*
2. *Limited number of competitors, particularly in upstream engineering work;*
3. *Laws of Republic of Indonesia Number 30 of 2009 opens up opportunities for electricity development not only by PT PLN (Persero) therefore there are market opportunities in Regional Government (PEMDA) and in IPP;*





4. Dapat menjadi pendorong atau pemrakarsa untuk implementasi teknologi baru;
5. Kecenderungan dunia untuk mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan khususnya di bidang energi baru dan terbarukan;
6. Mitra kerja yang cukup banyak;
7. Akses pendanaan dari pasar modal akan diperoleh setelah *Initial Public Offering* (IPO);
8. Masih terbuka pasar di negara-negara Asia Tenggara yang perkembangan ketenagalistrikannya belum maju dalam rangka kerja sama negara-negara ASEAN;
9. PERMEN BUMN No:PER-15/MBU/2012 yang membuka peluang penunjukkan langsung dari BUMN, Anak Perusahaan BUMN dan Perusahaan terafiliasi BUMN, maupun sebaliknya;
10. PERMEN BUMN No:PER-15/MBU/2012 juga membuka peluang penunjukkan langsung walaupun sudah Perusahaan Terbuka dengan syarat tertentu;
11. Rencana pemerintah untuk membangun infrastruktur pembangkit dengan total 35.000 MW dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, yang terdiri atas 10.000 MW oleh PLN dan 25.000 MW oleh swasta/IPP.

PLN Enjiniring juga tengah berupaya untuk masuk ke dalam bisnis jasa layanan yang memberikan *income* berkelanjutan, antara lain dengan mengembangkan produk – produk seperti model *engineering integrated total solution* dengan membentuk paket pekerjaan *engineering* dimana setiap proyek investasi PT PLN (Persero), PLN Enjiniring diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan enjiniring secara menyeluruh dari mulai enjiniring tahap inisiasi, enjiniring tahap *procurement*, sampai dengan enjiniring tahap *construction*.

4. *To be a driving force or initiator for the implementation of new technologies;*
5. *The world's trends to implement environmentally friendly technologies, especially in the field of new and renewable energy;*
6. *A considerable number of partners;*
7. *Access to funding from the capital market will be obtained after the Initial Public Offering (IPO);*
8. *There is still an open market in Southeast Asian countries where the electricity development is not yet advanced in the framework of cooperation between ASEAN countries;*
9. *State Owned Enterprises Ministerial Regulations (PERMEN BUMN) No: PER-15 / MBU / 2012 which opens opportunities for direct appointment of State Owned Enterprises (BUMN), State Owned Enterprises (BUMN) Subsidiaries and State Owned Enterprises (BUMN) affiliated companies, or vice versa;*
10. *State Owned Enterprises Ministerial Regulations (PERMEN BUMN) No: PER-15 / MBU / 2012 also opens opportunities for direct appointment even though it is already a Public Company with certain conditions;*
11. *The government's plan to build a power plants infrastructure with a total of 35,000 MW in the next 5 years, consisting of 10,000 MW by PLN and 25,000 MW by the private sectors/IPP.*

PLN Enjiniring is also making a serious effort to get into the service business that provides a sustainable income by developing some products such as an engineering integrated total solution model by forming an engineering work packages of which PLN Enjiniring is given the opportunity to undertake comprehensive engineering work starting from the initiation stage of engineering, the procurement stage of engineering, and at the construction stage of engineering at each investment project of PT PLN (Persero).

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA

Pada tahun 2018, PT PLN (Persero) melakukan redefinisi dan konsolidasi seluruh kegiatan usahanya. Dalam kegiatan ini, PLN (Persero) mengarahkan portofolio bisnisnya kedepan agar menjadi lebih optimal ke dalam sebuah pernyataan yang bernama "**SOLID**" (**S**ecuring Business Sustainability, **O**ptimizing Cost Efficiency, **L**eading Industry Capabilities, **I**ncreasing Profit Contribution, and **D**eveloping New Edge).

Sesuai dengan Core Business PLN Enjiniring sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa enjiniring, PLN Enjiniring mengemban misi strategis *Optimizing Cost Efficiency* dan *Leading Industry Capabilities*. Dengan 2 misi strategis tersebut, PLN Enjiniring mengaplikasikan pengembangan kegiatan bisnis yang selaras dengan misi strategis "PLN SOLID" sebagai berikut:

1. **Optimizing Cost Efficiency**, "mengoptimalkan struktur biaya PLN Group di sepanjang rantai nilai, sehingga PT PLN (Persero) dapat menjadi "price setter" dan memaksimalkan penciptaan nilai PLN Group melalui efisiensi biaya secara keseluruhan."
2. **Leading Industry Capabilities**, "mengembangkan kemampuan dalam bentuk pengetahuan, keahlian dan ketrampilan yang memberikan daya saing, dan atau keunggulan strategis ("capability setter") bagi PLN Group dengan standar terbaik dalam industri ketenagalistrikan nasional dan sesuai dengan standar yang berlaku secara internasional atau global.

Sehubungan dengan kedua misi di atas, beberapa hal yang menjadi fokus PLN Enjiniring, yaitu:

1. Pemantapan PLN Enjiniring sebagai Enjiniring terintegrasi

Sebagai suatu entitas bisnis, PT PLNE diharapkan tumbuh dan berkembang dengan efisien dan kompetitif sehingga unggul dan dapat mendukung proses bisnis di PT PLN (Persero) sesuai misi "PLN SOLID". Pada kenyataannya, dalam menjalankan roda bisnis PLN Enjiniring terkadang mengalami benturan kepentingan dengan Anak Perusahaan dan Unit PT PLN

BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY

PT PLN (Persero) redefined and consolidated all of its business activities in 2018. PT PLN (Persero) directs its future business portfolio to be more optimal in a statement called "**SOLID**" (**S**ecuring Business Sustainability, **O**ptimizing Cost Efficiency, **L**eading Industry Capabilities, **I**ncreasing Profit Contribution, and **D**eveloping New Edge).

Based on the PLN Enjiniring's Core Business as an engaged company in engineering services, PLN Enjiniring has a strategic mission of *Optimizing Cost Efficiency* and *Leading Industry Capabilities*. With these 2 strategic missions, PLN Enjiniring applies the development of business activities which is in line with the strategic mission of "PLN SOLID" as follows:

1. **Optimizing Cost Efficiency**, "optimizing the PLN Group's cost structure along the value chain, so that PT PLN (Persero) can become a "price setter" and maximizing the PLN Group value creation through the entire cost efficiency."
2. **Leading Industry Capabilities**, "developing capabilities in the form of knowledge, expertise and skills that provide competitiveness and /or strategic advantages ("capability setters") for the PLN Group with the best standards in the national electricity industry and in accordance to the internationally or globally accepted standards."

In connections to the two missions above, PLN Enjiniring has several things to focus on, namely:

1. Consolidating PLN Enjiniring as an integrated Engineering

As a business entity, PT PLNE is expected to growing and developing competitively and efficiently so that it is to be excellent and is able to support PT PLN (Persero) business processes in accordance to the "PLN SOLID" mission. In fact, there are several conflicts of interest in running the PLN Enjiniring business with the Subsidiaries and PT PLN (Persero) Units,





(Persero), terutama dalam pengerjaan proyek – proyek PT PLN (Persero), karena misi “PLN SOLID” belum sepenuhnya mendapat dukungan. Oleh karena berkaitan dengan masalah di atas, perlu kiranya ditegaskan kembali dukungan penuh dari PT PLN (Persero) sesuai dengan misi “PLN SOLID”, agar PLN Enjiniring dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat sesuai harapan Pemegang Saham. Sisi lain yang perlu pula mendapat perhatian dari seluruh jajaran PLN Enjiniring, adalah mayoritas pekerjaan PT PLNE adalah berasal dari PT PLN (Persero), sehingga diperlukan program – program untuk meningkatkan keterikatan PT PLN (Persero) yang akan berdampak positif bagi kelangsungan dan pertumbuhan usaha PLN Enjiniring, salah satunya adalah dengan memperkuat hubungan antara PT PLN (Persero) dengan PLN Enjiniring melalui sistem *Key Account Management*, yang dimonitor dan dimitigasi langsung oleh Top Management PLN Enjiniring melalui aplikasi “PLN Enjiniring Commit” yang telah diluncurkan sejak bulan Oktober 2018.

2. Lingkup Usaha Enjiniring

Pada kenyataannya, bisnis jasa konsultasi enjiniring bersifat fluktuatif, tergantung dari potensi pasar dan kondisi persaingan di industri jasa enjiniring ketenagalistrikan itu sendiri. Tentunya hal ini juga akan mengakibatkan berfluktuasinya “*income*” bagi PLN Enjiniring, terutama pada Jasa *Conceptual Design*. Untuk dapat mengatasi hal ini, PT PLNE tengah berupaya untuk masuk ke dalam bisnis jasa layanan yang memberikan *income* berkelanjutan, antara lain dengan mengembangkan produk – produk seperti model *engineering integrated total solution* dengan membentuk paket pekerjaan engineering. Dimana untuk setiap proyek investasi PT PLN (Persero), PLN Enjiniring diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan enjiniring secara menyeluruh dari mulai enjiniring tahap inisiasi, enjiniring tahap *procurement*, sampai dengan enjiniring tahap *construction*. Hingga saat ini bisnis atau lingkup usaha PLN Enjiniring sebagian besar bersifat *Partial Solution*.

because the mission of “PLN SOLID” has not been fully supported especially when working on PT PLN (Persero) projects. Therefore, relating to those mentioned problems, it is necessary of PT PLN (Persero) to reaffirm the full support in accordance to the mission of “PLN SOLID”, so that PLN Enjiniring can grow and develop as rapidly as expected by the Shareholders. The other part that needs to receive some attentions from all levels of PLN Engineering, is that the most important work for PT PLNE is from PT PLN (Persero), therefore, some programs which will have a positive impact on the growth and the sustainability of PT PLN (Persero) will be needed, to increase its engagement. One of PLN Enjiniring efforts is to improve the relationship between PT PLN (Persero) and PLN Enjiniring through the Key Account Management system, which is directly monitored and mitigated by PLN Enjiniring Top Management through an app called “PLN Enjiniring Commit” which has been launched since October 2018.

2. Scope of Engineering Business

In fact, the engineering consulting services business is fluctuating, it depends on the market potential and the competitive conditions in the electricity engineering services industry itself. Of course this will also result in fluctuating “income” for PLN Engineering, especially in Conceptual Design Services. To be able to overcome this matter, PT PLNE is also making a serious effort to get into the service business that provides a sustainable income by developing some products such as an engineering integrated total solution model by forming an engineering work packages of which PLN Enjiniring is given the opportunity to undertake comprehensive engineering work starting from the initiation stage of engineering, the procurement stage of engineering, and at the construction stage of engineering at each investment project of PT PLN (Persero).

Up to date, most of the PLN Enjiniring business or business scope have quality of Partial Solution. This means that some works relating to Power

Artinya, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan Pembangkit, Transmisi dan Gardu Induk dalam bidang ketenagalistrikan khususnya, dikemas dan dilaksanakan sebagai bagian yang terpisah. Akan tetapi ke depannya, PLN Enjiniring akan menjadikan kemasan atau pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan ini sebagai *Engineering Integrated Total Solution*, dimana PLN Enjiniring memulai pelaksanaan pekerjaan dengan menyusun *Feasibility Study, Engineering Cost Estimate, Bid Document, Design Review, Construction Supervision, Performance Test Evaluation, Plant Diagnostic, Plant Assessment dan Demolish Plant*.

One Package Engineering Integrated Total Solution ini akan memberikan nilai lebih, baik untuk PLN Enjiniring maupun PLN Group. Dengan paket pekerjaan ini, PLN Enjiniring dimungkinkan merencanakan *Man Month (MM)* dengan lebih baik dan mengkoordinasikan serta melakukan inventarisasi dokumen enjiniring dalam satu siklus pembangunan secara menyeluruh dan terstruktur. Selain itu juga membuat evaluasi dan koreksi atas penyempurnaan desain sesuai tahapannya, menyederhanakan proses pengadaan di PT PLN (Persero) yang memudahkan PT PLN (Persero) dalam melakukan koordinasi dan monitoring suatu proyek.

3. Lingkup Usaha Mendukung Pengembangan dan Konstruksi PLN Group

Bisnis atau lingkup usaha yang selama ini dilakukan oleh PLN Enjiniring masih berada dalam lingkup konsultasi di bidang Jasa Enjiniring berkaitan dengan sarana ketenagalistrikan. Untuk mencapai target yang dicita-citakan dalam mendukung *optimizing cost dan leading capability*, PLN Enjiniring tidak dapat hanya semata – mata mengandalkan *business as usual*, tetapi harus tumbuh dan berkembang sesuai harapan Pemegang Saham. Oleh karenanya, perusahaan secara bertahap akan berangsur – angsur masuk dalam bisnis yang mendukung *Development and Construction* PLN Group yang terdiri atas enjiniring terintegrasi (enjiniring untuk *design*, enjiniring untuk *procurement* dan enjiniring untuk konstruksi). Persiapan yang harus dilakukan untuk

plants, Transmission and Substation particularly in the electricity sector are packaged and carried out as a separated part. However, PLN Enjiniring will make the packaging or the implementing of these works as an Engineering Integrated Total Solution in the near future, of which PLN Enjiniring starts the implementation of the works by compiling Feasibility Study, Engineering Cost Estimate, Bid Document, Design Review, Construction Supervision, Performance Test Evaluation, Plant Diagnostic, Plant Assessment and Demolish Plant.

This One Package Engineering Integrated Total Solution will provide extended values, both for PLN Enjiniring and the PLN Group. It is possible for PLN Enjiniring to plan a better Man Month (MM) and to coordinate and to carry out an engineering documents inventory in a more comprehensive and structured development cycle, with this work package. In addition, it also makes evaluations and corrections for design improvements according to the stages, simplifies the process of procurement at PT PLN (Persero) which makes it easier for PT PLN (Persero) to coordinate and monitor a project.

3. Business Scope to Support the Development and Construction of the PLN Group

The business or the business scope that has so far been carried out by PLN Enjiniring is still within the scope of consultation in the field of Engineering Services related to electricity facilities. In order to achieve the desired targets in support of optimizing cost and leading capability, PLN Engineering can not rely, solely on business as usual, but it must grow and develop according to the expectations of shareholders. Therefore, the company will gradually get into the business that supports the Construction and the Development of the PLN Group which consists of integrated engineering (engineering for design, engineering for procurement and engineering for construction). The preparations that must be made to get into the business



masuk dalam bisnis tersebut juga tidak sedikit (Keuangan, kepakaran, SDM, teknologi, budaya, dan seterusnya), sehingga PLN Enjiniring perlu menyusun rencana dan tahapan transformasi bisnis tersebut dengan baik. Pemupukan modal, pengalaman, reputasi, jaringan, sertifikasi internasional, dan seterusnya merupakan contoh – contoh aspek yang memerlukan penanganan serius. Berkaitan dengan masalah keuangan, PLN Enjiniring memerlukan dukungan dana yang cukup besar untuk mempersiapkan tercapainya cita – cita bisnis di lingkup *Development and Construction* tersebut. Pemupukan kapabilitas dan kapasitas perlu dilakukan sejak dini, dengan berusaha meningkatkan kepercayaan kepada PT PLN (Persero) terkait kemampuan PLN Enjiniring dalam hal tersebut. Pada titik ini PLN Enjiniring memerlukan dukungan dari berbagai pihak, khususnya PT PLN (Persero).

are also not insignificant (finance, expertise, human resources, technology, culture, and so on), thus PLN Enjiniring needs to prepare plans and stages of business transformation properly. Capital accumulations, experiences, reputations, networks, international certifications, and so on are examples of aspects that require serious handling. Regarding the financial problems, PLN Enjiniring requires substantial financial support to prepare the achievement of business goals in the scope of Construction and Development. Capability and capacity building needs to be done earlier by trying to increase trust in PT PLN (Persero) regarding the ability of PLN Enjiniring. At this point PLN Enjiniring needs some supports from various parties, especially PT PLN (Persero).

RENCANA INVESTASI BISNIS BARU

THE NEW BUSINESS INVESTMENT PLAN

Agar rencana strategis perusahaan yang searah dengan dinamika proses bisnis korporat dapat berjalan, maka PLN Enjiniring ke depan akan melakukan investasi pada bidang IT guna menunjang bisnis enjiniring, baik bisnis enjiniring eksisting maupun bisnis enjiniring *detail design* yang fokus pada:

In order for the company's strategic plans that are in line with the dynamics of corporate business processes to run, PLN Engineering in the future will invest in the IT sector to support the engineering business, both the existing engineering business and the detailed design of engineering business that will be focusing on:

1. *alignment* strategi teknologi informasi dengan proses bisnis perusahaan untuk membangun *enterprise system*.
2. optimalisasi penggunaan aplikasi melalui rasionalisasi, standarisasi, konsolidasi, dan integrasi antara aplikasi yang ada.
3. integrasi informasi dengan menggunakan arsitektur informasi dengan model tata kelola sesuai kebutuhan bisnis perusahaan.
4. pengelolaan infrastruktur dan teknologi yang mendukung *agility*, kehandalan, ketersediaan, dan keamanan layanan TI.

1. *alignment of information and technology strategies with the company's business processes to build an enterprise system.*
2. *optimize the use of applications through rationalization, standardization, consolidation, and integration among existing applications.*
3. *integration of information using the information architecture with a governance model according to the company's business needs.*
4. *infrastructure and technology management that supports the agility, reliability, availability and security of IT services.*

TINJAUAN KEUANGAN

Tinjauan keuangan yang akan diuraikan dalam bagian ini mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2020. Laporan Keuangan Konsolidasian telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik RSM Indonesia dan mendapat opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Prima Layanan Nasional Enjiniring tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

FINANCIAL REVIEW

The financial review that will be described in this section refers to the Consolidated Financial Reports for the years which were ended on December 31, 2019 and on December 31, 2020. The Consolidated Financial Reports have been audited by RSM Indonesia Public Accounting Firm and received a fair opinion in all material matters, PT Prima Jasa Nasional Enjiniring's financial position on the December 31, 2020 as well as the financial performance and cash flows for the year ended on that date have been in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.



Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Position Statements



Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

TABEL LAPORAN POSISI KEUANGAN (DALAM JUTAAN RUPIAH)
TABLE OF FINANCIAL POSITION STATEMENT (IN MILLION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2020	2019	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
ASET <i>ASSET</i>				
Aset Lancar <i>Current Assets</i>	848,361	856,646	(8,285)	-0.97%
Aset Tidak Lancar <i>Non Current Assets</i>	314,852	309,311	5,541	1.79%
TOTAL ASET <i>TOTAL ASSETS</i>	1,163,213	1,165,957	(2,744)	-0.24%
LIABILITAS <i>LIABILITY</i>				
Liabilitas Jangka Pendek <i>Short - Term Liability</i>	382,140	391,642	(9,502)	-2.43%
Liabilitas Jangka Panjang <i>Long Term Liability</i>	81,621	105,305	(23,684)	-22.49%
TOTAL LIABILITAS <i>TOTAL LIABILITY</i>	463,761	496,947	(33,186)	-6.68%
TOTAL EKUITAS <i>TOTAL EQUITY</i>	699,452	669,010	30,442	4.55%

ASET

Jumlah Aset Perusahaan pada tahun 2020 sebesar Rp 1.163,21 miliar, mengalami penurunan sebesar 0.24% atau Rp 2,74 miliar dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar Rp 1,165,95 miliar. Penurunan ini berasal dari penurunan aset lancar dengan penurunan signifikan pada piutang usaha karena adanya pelunasan dari pemberi kerja.

Perlu untuk diketahui bersama bahwa Aset pada tahun 2020 terdapat penyajian kembali sehingga tercatat Piutang Sewa baik pada Aset Lancar maupun pada Aset Tidak Lancar. Hal ini juga mengevaluasi nilai Aset Tetap atas Aset CNG Plant Bangkanai.

Penyajian kembali tersebut merupakan dampak dari penerapan PSAK 73 tentang Sewa dimana Perusahaan menjadi Pesewa atas asset CNG Plant Bangkanai.

ASSETS

Total Assets of the Company in 2020 amounted to Rp 1.163.49 billion, an decrease of 0.24% or in amount of Rp 2.74 billion compared to 2019, which amounted to Rp 1.165.95 billion. This increase came from an increase in current assets. This decrease came from a decrease in current assets with a significant decrease in trade receivables due to repayment from the employer.

It is necessary to be aware that in 2020 there is a restatement of Assets so that Rent Receivables are recorded in both Current Assets and Non-Current Assets. It also evaluates the value of Fixed Assets on the Bangkanai CNG Plant Assets.

The restatement is the impact of the application of PSAK 73 concerning Leases where the Company becomes the lessee of the Bangkanai CNG Plant assets.



TABEL ASET LANCAR (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF CURRENT ASSETS (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2020	2019	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Kas dan Setara Kas <i>cash and cash equipment</i>	338,591	226,822	111,769	49.28%
Rekening bank yang dibatasi <i>Restricted bank account</i>	2,858	6,379	(3,521)	0.00%
Piutang usaha <i>Accounts receivable</i>	159,060	204,548	(45,488)	-22.24%
Piutang Lain lain <i>Other receivable</i>	12,435	27,632	(15,197)	-55.00%
Piutang sewa pembiayaan <i>Finance lease receivables</i>	27,665	24,563	3,102	12.63%
Tagihan bruto kepada pelanggan <i>Gross bill to customers</i>	215,174	232,066	(16,892)	-7.28%
Pajak dibayar dimuka <i>Prepaid taxes</i>	74,829	91,354	(16,525)	-18.09%
Biaya dibayar dimuka dan uang muka <i>Prepaid expenses and down payment</i>	17,749	43,282	(25,533)	-58.99%
Jumlah aset lancar <i>Total Current Assets</i>	848,361	856,646	(8,285)	-0.97%

• Aset Lancar

Jumlah Aset lancar perusahaan pada tahun 2020 sebesar Rp 848,36 miliar, mengalami penurunan sebesar 0,97% atau Rp 8,29 miliar dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar Rp 856,67 miliar. Penurunan ini berasal dari piutang usaha, biaya dibayar dimuka dan perhitungan ulang atas asset kontrak.

• Current assets

The company current assets in 2020 amounted to Rp 848.36 billion, an decrease of 0.97% or Rp 8.29 billion compared to 2019, which amounted to Rp 856.67 billion. This decrease came from accounts receivable, prepaid taxes and recalculation of contract assets.

TABEL ASET TIDAK LANCAR (DALAM JUTAAN RUPIAH)
TABLE OF NON - CURRENT ASSETS (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2020	2019	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Rekening yang dibatasi penggunaannya <i>Restricted cash in bank</i>	23,128	16,749	6,379	38.09%
Piutang sewa pembiayaan <i>Finance lease receivables</i>	213,913	241,578	(27,665)	-11.45%
Investasi pada asosiasi dan ventura bersama <i>Investment in association and joint venture</i>	9,851	13,726	(3,875)	-28.23%
Aset Tetap <i>Fixed Asset</i>	31,131	11,806	19,325	163.69%
Aset Lain - lain <i>Other Assets</i>	36,829	25,452	11,377	44.70%
Jumlah Aset Tidak Lancar <i>Total - Non Current Assets</i>	314,852	309,311	5,541	1.79%

• Aset Tidak Lancar

Perusahaan membukukan jumlah Aset Tidak Lancar sebesar Rp 314,85 miliar pada tahun 2020, mengalami peningkatan sebesar 1,79% atau Rp 5,54 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp 309,31 miliar. Peningkatan pada asset lancar didominasi oleh kenaikan pada Aset Tetap atas Aset Hak Guna, hal ini disebabkan adanya penerapan PSAK 73 tentang Sewa.

• Non-current Assets

The company posted total Non-current Assets amounted to Rp 314.85 billion in 2020, a increase of 1.79% or in amount of Rp 5.54 billion when compared to 2020 which recorded in amount of Rp 309.31 billion. The increase of current assets was dominated by increase in fixed asset over usable asset, this is due to the implementation of PSAK 73 on Leases.

TABEL LIABILITAS JANGKA PENDEK (DALAM JUTAAN RUPIAH)
TABLE OF SHORT - TERM LIABILITIES (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2020	2019	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Utang Usaha <i>Account Payable</i>	103,490	134,096	(30,606)	-22.82%
Uang Muka dari Pelanggan <i>Advances From Costumer</i>	21,006	35,393	(14,387)	-40.65%
Utang Lain - lain <i>Other Payable</i>	8,977	5,472	3,505	64.05%
Utang bruto kepada pelanggan <i>Gross debt to customers</i>	144,441	114,143	30,298	26.54%
Utang pajak <i>Tax payable</i>	7,491	14,242	(6,751)	-47.40%
Biaya masih harus dibayar <i>Accured expenses</i>	53,779	54,645	(866)	-1.58%
Liabilitas Sewa <i>Lease Liabilities</i>	7,979	-	7,979	0.00%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja <i>Employee benefits liabilities</i>	1999	673	1,326	197.03%
Pinjaman japan jatuh tempo dalam 1 tahun <i>Japan loan that matures in 1 year</i>	32,978	32,978	-	0.00%
Jumlah liabilitas jangka pendek <i>Total Short Term Liabilities</i>	382,140	391,642	(9,502)	-2.43%



LIABILITAS

- Liabilitas Jangka Pendek**

Perusahaan membukukan liabilitas jangka pendek pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 382,14 miliar, menurun sebesar Rp 9,50 miliar atau 2,43% dari Rp 391,64 miliar tahun 2019. Penurunan yang signifikan adalah pada utang usaha hal ini disebabkan adanya pelunasan kewajiban pada pihak ketiga. Selain itu penurunan yang lain disebabkan oleh penurunan atas uang muka dari pelanggan, utang pajak dan biaya yang masih harus dibayar.

- Liabilitas Jangka Panjang**

Pada tahun 2020, Liabilitas Jangka Panjang Perusahaan tercatat sebesar Rp 81,62 miliar, mengalami penurunan sebesar 22,49% dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar Rp 23,68 miliar. Penurunan tersebut didominasi oleh pelunasan atas pinjaman jangka Panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan.

LIABILITIES

- Short-term liabilities**

The company recorded a short-term liability in 2020 amounted to Rp 382.14 billion, an decrease in amount of Rp 9.50 billion or 2.43% from in amount of Rp 391.64 billion in 2019. A significant decrease was in account payable, this is due the settlement of obligations to third party. In addition, another decrease was caused by decrease in advances from customer, tax payable and accures expenses.

- Long Term Liabilities**

In 2020, the company long-term liabilities recorded in amount of Rp 81.62 billion, a decrease of 22.49% compared to 2019 which amounted to Rp 23.68 billion. The decrease was dominated by repayments of long-term loans that are due in the current year.

TABEL LIABILITAS JANGKA PANJANG (DALAM JUTAAN RUPIAH)
TABLE OF LONG - TERM LIABILITIES (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2020	2019	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Utang Lain - lain <i>Other payable</i>	142	156	(14)	-8.97%
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun <i>Long term loan after deducting by part of maturity due within one year</i>	55,050	87,062	(32,012)	-36.77%
Liabilitas imbalan kerja <i>Employee benefits liabilities</i>	25,554	18,087	7,467	41.28%
Liabilitas Sewa <i>Lease Liabilities</i>	875	-	875	0.00%
Jumlah liabilitas Jangka Panjang <i>Total Long Term Liabilities</i>	81,621	105,305	(23,684)	-22.49%

EKUITAS

Pada tahun 2020, Ekuitas Perusahaan meningkat sebesar Rp 30,44 miliar atau 4,55% dari Rp 669,01 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 699,45 miliar di 2020. Peningkatan Ekuitas ini sejalan dengan kenaikan Saldo Laba yaitu sebesar Rp 15,496 miliar atau 2.40%. Perlu diketahui bersama bahwa untuk tahun 2019 terdapat penyajian kembali yang mengevaluasi nilai atas saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya. Hal ini dalam kaitan dengan penerapan PSAK 73 tentang Sewa, dimana Perusahaan menjadi pesewa atas asset CNG Plant Bangkanai.

EQUITY

In 2020, the Company's Equity increased by Rp 30.44 billion or 4.55% from Rp 669.01 billion in 2019 to Rp 699.45 billion in 2020. This increase in Equity in line with the increase in retain earning in amount of Rp 15.496 billion or 2.40%. Please note that for 2019 there is a restatement that evaluates the value of retained earnings that is not determined for use. This is in relation to the application of PSAK 73 on Leases, where the Company becomes the lessee of the Bangkanai CNG Plant assets

TABEL EKUITAS (DALAM JUTAAN RUPIAH)
TABLE OF EQUITY (IN MILLION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2020	2019	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Modal Saham <i>Capital Stock</i>	25,000	25,000	-	0.00%
Saldo Laba <i>Retain earning</i>				
Ditentukan penggunaannya <i>Determined to use</i>	5,169	5,169	-	0.00%
Tidak ditentukan penggunaannya <i>Unappropriated</i>	659,940	644,444	15,496	2.40%
Penghasilan Komprehensif Lainnya <i>Other Comprehensive Income</i>	9,329	(5,616)	14,945	-266.11%
Kepentingan Non Pengendali <i>Non-Controlling Interests</i>	14	13	1	7.69%
Jumlah Ekuitas <i>Total Equity</i>	699,452	669,010	30,442	4.55%



Laporan Laba (Rugi) Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statements of Income (Loss) and Other Comprehensive Income

TABEL LAPORAN LABA RUGI PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF OTHER COMPREHENSIVE INCOME STATEMENT (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2020	2019	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Pendapatan <i>Income</i>	625,344	978,680	(353,336)	-36.10%
Beban Pokok Pendapatan <i>Cost Of Revenue</i>	(436,166)	(717,048)	280,882	-39.17%
Laba Bruto <i>Gross Profit</i>	189,178	261,632	(72,454)	-27.69%
Beban Usaha <i>Operating Expenses</i>	(190,713)	(136,740)	(53,973)	39.47%
Laba Sebelum Pos Keuangan dan Lain-lain <i>Gain Before Financial Post and Other</i>	(1,535)	124,892	(126,427)	-101.23%
Pos Keuangan dan Lain-lain Netto <i>Financial and Other Posts - Net</i>	21,979	514	21,465	4176.07%
Laba Sebelum Pajak <i>Profit Before Taxes</i>	20,444	125,406	(104,962)	-83.70%
Beban Pajak Penghasilan <i>Income Taxes Expense</i>	(4,947)	(7,392)	2,445	-33.08%
Laba Tahun Berjalan <i>Current Year Profit</i>	15,497	118,014	(102,517)	-86.87%
Pendapatan Komprehensif Lain Tahun Berjalan <i>Other Comprehensive Income Of The Current Year</i>	1,267	(679)	1,946	-286.60%
Jumlah Pendapatan Komprehensif <i>Total Comprehensive Income</i>	1,267	(679)	1,946	-286.60%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan <i>Total Comprehensive Income In Current Year</i>	16,764	117,335	(100,571)	-85.71%
Laba Per Saham (nilai penuh) <i>Earning per share (full amount)</i>	620	4,721	(4,101)	-86.87%

- **Laba Bruto**

Laba Bruto Perusahaan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 189,18 miliar, menurun 27,69% disbanding tahun 2019 yaitu tercatat sebesar Rp 261,63 miliar. Penurunan laba bruto tersebut sejalan dengan penurunan Pendapatan pada tahun 2020.

- **Laba Sebelum Pajak**

Perusahaan mencatat Laba Sebelum Pajak pada tahun 2020 sebesar Rp 20,44 miliar mengalami penurunan 83,70% dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar Rp 125,40 miliar.

- **Beban Pajak Penghasilan**

Beban Pajak Penghasilan Perusahaan tercatat mengalami penurunan 33,08% dari tahun 2019 sebesar Rp 7,39 miliar menjadi Rp 4,94 miliar pada tahun 2020. Hal ini seiring dengan menurunnya persentase pendapatan non final perusahaan dari tahun 2020.

- **Laba Tahun Berjalan Dan Laba Komprehensif Tahun Berjalan**

Pada tahun 2020, Perusahaan membukukan Laba Tahun Berjalan dan Jumlah Laba Komprehensif sebesar Rp 117,33 miliar dan Rp 16,76 miliar menurun 85,71% dari tahun 2019.

- **Laba Bersih Per Saham**

Laba per saham di tahun 2020 tercatat sebesar Rp 620,00 menurun sebesar 86,87% atau Rp 4,10 dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp 4,72.

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

- **Pendapatan**

Pendapatan PLN Enjiniring di 2020 tercatat sebesar Rp 625,34 miliar, menurun 36,10% atau Rp 353,34 miliar jika dibandingkan dengan 2019 yaitu sebesar Rp 978,68 miliar. Penurunan pendapatan yang signifikan adalah pada Jasa Enjiniring, Prokuremen dan Konstruksi (EPC) sebesar Rp 170,46 miliar atau 38,74% dan Bidang Konstruksi sebesar Rp 110,39 miliar atau 46,48%,

- **Gross Profit**

The Company Gross Profit in 2020 recorded amounted to Rp 189.18 billion, an decrease of 27.69% compared to 2019 which recorded in amount of Rp 261.63 billion. The decrease in gross profit is in line with the decrease in Net Revenue in 2020.

- **Profit Before Taxes**

The Company Profit Before Taxes in 2020 recorded amounted to Rp 20.44 billion, an decrease of 83.70% compared to 2019 which recorded in amount of Rp 125.40 billion.

- **Income Taxes Expense**

The Company Income Taxes Expense recorded an decrease of 33.08% from Rp 7.39 billion in 2019 to Rp 4.94 billion in 2020. This was in line with the decrease in the percentage of the company's non-final income from 2020.

- **Current Year Profit and Comprehensive Income in Current Year**

In 2020, the Company recorded Current Year Profit and Comprehensive Income in Current Year recorded in amount of Rp 117.33 billion and Rp 16.76 billion decrease 85.71% from 2019.

- **Earning per Share**

Earning per Share in 2020 recorded in amount of Rp 620.00 decrease of 86.87% or Rp 4.10 billion compared to 2019 in amount of Rp 4.72 billion.

CONSOLIDATED PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

- **Revenue**

PLN Enjiniring revenue in 2020 recorded amounted to Rp 626.34 billion, an decrease of 36.10% or in amount of Rp 353.34 billion compared to 2019, which in amount of Rp 978.68 billion. Significant decrease in revenue was in Engineering, Procurement and Construction Services (EPC) in amount of Rp 170.46 billion or 38.74% and an decrease in operational and Construction Area of Rp 110.39 billion or 46.48%,



TABEL KONTRIBUSI PENDAPATAN JASA PERBIDANG (SEGMENT) (DALAM JUTAAN RUPIAH)
TABLE OF SERVICE REVENUE CONTRIBUTION PER SECTOR(SEGMENT) (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2020	2019	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Pembangkitan <i>Power Plant</i>	72,312	93,444	(21,132)	-22.61%
Konstruksi <i>Construction</i>	127,123	237,516	(110,393)	-46.48%
Transmisi & Distribusi <i>Transmission and Distribution</i>	71,847	121,004	(49,157)	-40.62%
Operasional dan Perawatan <i>Operation and Maintenance</i>	-	4,872	(4,872)	-100.00%
Kompresi GAS <i>Compression Nature Gas</i>	54,042	48,601	5,441	11.20%
Pendapatan Bunga Dari Sewa Pembiayaan <i>Interest income from finance lease receivables</i>	30,487	33,241	(2,754)	-8.28%
Enjiniring, Prokuremen dan Konstruksi <i>Engineering, Procurement and Construction</i>	269,533	440,002	(170,469)	-38.74%
Jumlah Pendapatan <i>Total Revenue</i>	625,344	978,680	(353,336)	-36.10%

• Beban Pokok Pendapatan

Pada tahun 2020, Perusahaan mengalami penurunan beban pokok pendapatan sebesar 39,17%. Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 436,17 miliar sedangkan untuk tahun 2019 sebesar Rp 717,05 miliar. Penurunan Beban pokok pendapatan ini yang signifikan adalah pada beban Sub Kontraktor sebesar Rp 197,99 miliar atau menurun sebesar 47,19% dibandingkan tahun lalu. Adapun rincian terkait Beban pokok pendapatan disajikan dalam tabel berikut ini.

TABEL BEBAN JASA (DALAM JUTAAN RUPIAH)
TABLE OF COMPANY SERVICE EXPENSE (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2020	2019	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Sub - Kontraktor <i>Sub - Contractor</i>	221,575	419,566	(197,991)	-47.19%
Remunerasi Enjiniring <i>Engineering Remuneration</i>	117,627	151,570	(33,943)	-22.39%

• Cost of Revenue

In 2020, the Company experienced a decrease in cost of revenue amounted to 39.17%. Cost of Revenue in 2020 recorded in amount of Rp 436.17 billion, while for 2019 amounted to Rp 717.05 billion. The decrease in cost of revenue partly due to the decrease in expenses of the Sub-Contractor in amount of Rp 197.99 billion or decrease of 47.19% compared to last year. The details related to cost of revenue presented in the following table

Peralanan Dinas dan Tansportasi <i>Travel Service and Transportation</i>	16,728	48,566	(31,838)	-65.56%
Beban Pajak Final <i>Final Tax Expense</i>	19,259	28,563	(9,304)	-32.57%
Sewa <i>Rent</i>	16,314	29,928	(13,614)	-45.49%
Penyusutan <i>Depreciation</i>	7,097	-	7,097	0.00%
Lain-lain <i>Other</i>	37,566	38,855	(1,289)	-3.32%
Jumlah Beban Jasa <i>Total Service Load</i>	436,166	717,048	(280,882)	-39.17%



• **Beban Usaha**

Pada tahun 2020, Perusahaan membukukan Beban Usaha sebesar Rp 190,71 miliar, meningkat 39,47% dibandingkan tahun 2019. Peningkatan beban usaha ini khususnya yang signifikan adalah pada beban gaji dan kesejahteraan karyawan hal ini disebabkan oleh adanya pengangkatan pegawai yang sudah dilakukan secara penuh pada akhir tahun 2019.

Selain itu pada tahun 2020 perusahaan juga menerapkan PSAK 71 tentang instrumen keuangan yang berdampak pada kerugian penurunan piutang usaha.

• **Operating expenses**

In 2020, the Company recorded Operating Expenses of Rp 190.71 billion, an increase of 39.47% compared to 2019. The increase in operating expenses mainly came from on salaries and employee welfare this is due to the full appointment of employees at the end of 2019.

In addition, in 2020 the company also implemented PSAK 71 regarding financial instruments that have an impact on the decline in trade receivables decrease.

TABEL BEBAN USAHA (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF OPERATING EXPENSE (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2020	2019	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Gaji dan kesejahteraan karyawan <i>Salary and employe benefit</i>	106,689	81,853	24,836	30.34%
Jasa tenaga kerja <i>Emloye services</i>		4,525	(4,525)	-100.00%
Tunjangan pajak penghasilan karyawan <i>Employee income tax benefits</i>	7,861	8,385	(524)	-6.25%
Alat keperluan kantor <i>Office suplies</i>	1,674	3,436	(1,762)	-51.28%
Sewa <i>Rent</i>	2,039	6,895	(4,856)	-70.43%
Peralanan Dinas dan Tansportasi	2,542	5,965	(3,423)	-57.38%



Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

Travel Service and Transportation

Beban Imbal Kerja	7,637	3,250	4,387	134.98%
-------------------	-------	-------	-------	---------

Employee Benefit Expense

Telekomunikasi	2,000	2,036	(36)	-1.77%
----------------	-------	-------	------	--------

Telecommunication

Konsultan	1,664	1,227	437	35.62%
-----------	-------	-------	-----	--------

Consultant

Alat Tulis Kantor	1,302	1,784	(482)	-27.02%
-------------------	-------	-------	-------	---------

Office stationary

Asuransi	-	2,164	(2,164)	-100.00%
----------	---	-------	---------	----------

Insurance

Konsumsi	799	2,580	(1,781)	-69.03%
----------	-----	-------	---------	---------

Consumption

Pemeliharaan	8,689	581	8,108	1395.52%
--------------	-------	-----	-------	----------

Maintenance

Srtifikasi dan Perijinan	10	7	3	42.86%
--------------------------	----	---	---	--------

Certification and licensing

Iklan dan promosi	294	191	103	53.93%
-------------------	-----	-----	-----	--------

Ads and promotion

Penyusutan	1,655	1,390	265	19.08%
------------	-------	-------	-----	--------

Depreciation

Beban Kerugian Penurunan Piutang Usaha	16,478	523	15,955	3050.67%
--	--------	-----	--------	----------

Impairment Losses on Trade Receivables

Lain-lain	29,380	9,948	19,432	195.33%
-----------	--------	-------	--------	---------

Other

Jumlah beban usaha	190,713	136,740	53,973	39.47%
--------------------	---------	---------	--------	--------

Total oprating expense

POS KEUANGAN DAN LAIN-LAIN BERSIH

• Pos Keuangan Dan Lain-Lain Bersih

Pada tahun 2020, Perusahaan mencatat Pos Keuangan dan Lain-lain sebesar Rp 21,98 miliar, naik sebesar 4.176,07% dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp 0,51 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya penyerapan laba perusahaan Asosiasi dan koreksi atas pencatatan tahun lalu.

NET FINANCIAL POSITION AND OTHER

• Financial Posts and Others

In 2020, the Company recorded Financial Post and Others amounted to Rp 21.98 billion, increased by 4.176,07% compared to 2019 which amounted to Rp 0.51 billion. The incline mainly due to net other income. The increase was mainly due to the absorption of the Association's corporate profits and corrections to last year's record

• **Laba Sebelum Pos Keuangan Dan Lain-Lain**

Laba Sebelum Pos Keuangan dan lain-lain di 2020, tercatat sebesar Rp 1,53 miliar, mengalami penurunan sebesar 101,2% atau Rp 126,42 miliar dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar Rp 1,5 miliar.

• **Profit Before Financial Posts and Others**

Profit Before Financial Posts and Others in 2020, recorded amount of Rp 1.53 billion, decrease amount of 101.2% or Rp. 126.42 billion compared to 2019 in amount of Rp 1.5 billion.

POS KEUANGAN DAN LAIN-LAIN BERSIH (DALAM JUTAAN RUPIAH)

NET FINANCIAL POSITION AND OTHER (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2020	2019	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Penghasilan bunga <i>Interest Income</i>	9,637	13,955	(4,318)	-30.94%
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - neto <i>Gain (losses) on foreign excangerates - net</i>	(166)	394	(560)	-142.13%
Rugi atas investasi saham yang tidak tercatat <i>loss on stock investment not listed on the excange</i>	(3,684)	(13,482)	9,798	-72.67%
Beban bunga <i>Interest expense</i>	(14,732)	(15,644)	912	-5.83%
Lain-lain - neto <i>Other - net</i>	30,924	15,291	15,633	102.24%
Jumlah pos keuangan dan lain-lain - neto <i>Number of financial post and other - net</i>	21,979	514	21,465	4176.07%



Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Cash Flows Statements

Peningkatan Bersih Kas dan Setara Kas pada tahun 2020 sebesar Rp 111,76 miliar atau sebesar Rp.28,97% disebabkan adanya peningkatan Arus Kas untuk Operasi sebesar Rp 126,22 miliar atau 307,96% dibanding tahun 2019.

The net decrease in cash and cash equivalents in 2020 amounted to Rp 111.76 billion, or 28.97% caused by the use of Cash Flows for Operations amount of Rp 126.22 billion or 307.96% compared to 2019.

TABEL ARUS KAS (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF CASH FLOW (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2020	2019	Pertumbuhan <i>Growth</i>	
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Arus Kas dari Aktivitas Oprasi <i>Cash Flows from Operating Activities</i>	167,203	40,985	126,218	307.96%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi <i>Cash Flows from Investing Activities</i>	1,804	(3,781)	5,585	-147.71%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan <i>Cash Flows from Financing Activities</i>	(57,238)	(129,696)	72,458	-55.87%
Penurunan Neto Kas dan Setara Kas <i>Decrease in Net Cash and Cash Equipalents</i>	111,769	(92,492)	204,261	-220.84%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun <i>Cash and Cash Equipalents Early Years</i>	226,822	319,314	(92,492)	-28.97%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun <i>Cash and Year and Cash Equipalents</i>	338,591	226,822	111,769	49.28%

LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

• Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 126,22 miliar atau 307,96% hal ini disebabkan adanya penerimaan kas dari penjualan tunai dan pelunasan piutang tahun lalu.

• Arus Kas Untuk Aktivitas Investasi

Kas Bersih Yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 1,80 miliar, meningkat sebesar Rp 5,58 miliar atau -147,71% dibanding tahun 2019, hal ini disebabkan adanya pembelian software.

CONSOLIDATED PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

• Cash Flow From Operating Activities

Net Cash Provided from Operating Activities in 2020 increase amount of Rp 126.22 billion or 307.96%, this is due to cash receipts from cash sales and settlement of receivables last year.

• Cash Flows for Investment Activities

Net Cash Used in Investment Activities in 2020 recorded amounted to Rp 1.80 billion, an increase in amount of Rp 5.58 billion or -147.71% compared to 2019, this is due to software purchases.

- **Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan**

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2020 tercatat sebesar -Rp 57,23 miliar. Arus kas dari aktivitas pendanaan mengalami kenaikan sebesar 55,87% dikarenakan adanya pelunasan piutang sewa CNG Bangkanai dan pelunasan pinjaman SHL.

- **Peningkatan/Penurunan Neto Kas Dan Setara Kas**

Secara keseluruhan pada tahun 2020, terjadi peningkatan bersih Kas dan Setara Kas jika dibandingkan dengan tahun 2019. Peningkatan bersih Kas dan Setara Kas pada tahun 2020 sebesar Rp 204,26 miliar atau sebesar 220,84%.

- **Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun**

Besarnya Kas dan Setara Kas Akhir Tahun pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 338,59 miliar, meningkat Rp 111,76 miliar atau 49,28% dibanding tahun 2019.

- **Cash Flow From Funding Activities**

Net cash used for funding activities in 2020 recorded amounted to -Rp57.23 billion. Cash flow from funding activities increased by 55.87%, due to the settlement of the Bangkanai CNG lease receivables and the repayment of SHL loans.

- **Increase / decrease in net cash and cash equivalents**

Overall in 2020, there a net increase in Cash and Cash Equivalents compared to 2019. The net increase in Cash and Cash Equivalents in 2020 amounted to Rp 204.26 billion or amount to 220.84%.

- **End of Year Cash and Cash Equivalents**

The amount of Cash and Cash Equivalents at the end of the year in 2020 recorded amounted to Rp 338.59 billion or 220.84%.



Tingkat Kesehatan Perusahaan

Company Health Level

Hasil pencapaian selama tahun berjalan tersebut kemudian dinilai berdasarkan Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0001.E/DIR/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Direktorat, Departemen, Satuan Pengawas Intern, Sekretariat Perusahaan, Divisi, Unit Induk, Pusat-Pusat dan Anak Perusahaan serta penggolongan penilaian tingkat kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN serta Nota Dinas Divisi Penilaian Kinerja Korporat ("DIV PKK") ke Divisi Portofolio Manajemen ("DIV PFM") Nomor 12406/ORG.01.04/EVPPKK/2020 tanggal 26 Mei 2020 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 Anak Perusahaan dan Petunjuk Teknis KPI Anak Perusahaan PT PLN (Persero) Tahun 2020 adalah sebesar 91.95 dengan nilai rincian sebagai berikut :

The results of the achievement during the current year are then assessed based on based on the Circular of the Directors of PT PLN (Persero) No.0001.E/DIR/2019 dated May 22, 2019 concerning the Implementation Guidelines for Calculating Organizational Performance Value of Directorates, Departement, Internal Control Unit, Corporate Secretary, Division, Unit; Centers and Subsidiaries by classifying the level of health assessment in accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) of the Republic of Indonesia No. KEP-100 / MBU / 2002 dated June 4, 2002 concerning Assessment of the Health Level of BUMN Office and Memorandum of the Corporate Performance Assessment Division ("DIV PKK") to the Portfolio Management Division ("DIV PFM") Number 12406/ORG.01.04/EVPPKK/2020 dated May 26, 2020 Regarding Implementation Guidelines for Calculation of Organizational Performance Values for 2020 Subsidiaries and Technical Guidelines PT PLN (Persero) Subsidiary KPI for 2020 amounted in amount of 89.64 with the following breakdown values:

TABEL TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF COMPANY HEALTH LEVEL (IN MILION RUPIAH)

No	Indikator Kinerja Kunci Key Performance Indicators	Bobot Weight	Nilai Value
1	Pelanggan Customer	27.00	25.83
2	Produk dan Layanan Products and Services	34.00	29.19
3	SDM HR	4.00	3.99
4	Keuangan dan Pasar Finace and Markets	30.00	28.05
5	Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasayarakatan Leadership, Governance and Community Responsibility	5.00	4.89
	TOTAL BOBOT TOTAL WEIGHT	100.00	91.95

Rasio Keuangan

Financial Ratios

- **Kolektibilitas Piutang**

Umur Piutang (*Collection Period*) merupakan indikator dengan polaritas negatif yang pencapaiannya semakin baik jika realisasinya semakin kecil. Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan rata-rata saldo piutang usaha dengan jumlah pendapatan dikalikan dengan jumlah hari dalam setahun (365 hari). Pada tahun 2020 tingkat kolektibilitas piutang perusahaan tercatat sebesar 106 hari lebih lama dari target yang ditetapkan sebesar 83 hari.

Sedangkan pada tahun 2019, tingkat kolektibilitas piutang perusahaan tercatat sebesar 70 hari, lebih lama dari target yang ditetapkan sebesar 30 hari.

- **Kemampuan Membayar Utang**

Kemampuan membayar utang dapat dilihat melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas yang menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek antara lain dapat diukur melalui rasio kas dan rasio lancar.

- Rasio Kas menjelaskan kemampuan perusahaan untuk melunasi liabilitas jangka pendeknya melalui kas dan setara kas (asset yang paling likuid) yang dimiliki.
- Rasio Lancar merupakan rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan untuk membayar hutang dengan menggunakan aktiva.

- **Rasio Likuiditas**

TABEL LIKUIDITAS (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF LIQUIDITY (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2020	2019
1	2	3
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	0.89	0.58
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	2.22	2.19

- **Receivable Collectibility**

The age of accounts receivable (*Collection Period*) is an indicator with negative polarity, the better the achievement if the realization is smaller. The measurement carried out by comparing the average trade receivable balance with the amount of income multiplied by the number of days in a year (365 days). In 2020, the company receivables collectibility level recorded at 106 days, longer than the target set at 83 days.

While in 2019, the company receivables collectibility level recorded at 70 days, longer than the target set at 30 days.

- **Ability to Pay Debt**

The ability to pay debts can be seen through liquidity ratios and solvency ratios. Liquidity ratios that show the ability of the Company to meet short-term liabilities can be measured among others through cash ratios and current ratios.

- The Cash Ratio describes the company's ability to pay off short-term liabilities through cash and cash equivalents (the most liquid assets) owned.
- Current Ratio is a ratio used to see the company ability to pay debts using assets.

- **Liquidity Ratio**



Rasio likuiditas 2020 mengalami penurunan dibandingkan 2019, diukur dengan menggunakan Rasio Lancar. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar utang PLN Enjiniring di 2020 meningkat. Rasio likuiditas masih menunjukkan kondisi yang bagus yaitu dengan nilai 2,22.

- **Rasio Solvabilitas**

Rasio solvabilitas yang menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam membayar kewajiban- kewajibannya antara lain dapat diukur melalui rasio liabilitas terhadap ekuitas, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, dan rasio liabilitas terhadap aset, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset.

TABEL SOLVABILITAS (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF SOLVENCY (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2020	2019
1	2	3
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas Ratio of Liabilities to Equity	0.66	0.74
Rasio Liabilitas Terhadap Aset Ratio of Liabilities to Assets	0.40	0.43

Rasio solvabilitas Perusahaan mengalami penurunan, baik untuk rasio liabilitas terhadap ekuitas maupun rasio liabilitas terhadap aset. Hal ini menunjukkan kemampuan PLN Enjiniring dalam membayar kewajiban-kewajiban meningkat di tahun 2020.

The liquidity ratio 2020 has decreased compared to 2019, both measured using Current Ratios. This shows that the ability to pay PLN Enjiniring debt in 2020 is increased. Liquidity ratio still shows good conditions, which is 2.22 poin.

- **Solvency Ratio**

The solvency ratio which shows the Company's ability to pay its obligations, among others, can be measured through the ratio of liabilities to equity, which is by comparing total liabilities to total equity, and liabilities to assets ratio, which is calculated by comparing total liabilities to total assets.

The Company solvency ratio has decreased, both for the ratio of liabilities to equity and the ratio of liabilities to assets. This shows the ability of PLN Enjiniring to pay obligations increases in 2020.

Struktur Modal

Capital Structure

- Rincian Struktur Modal**

Komposisi struktur modal pada tahun 2020 yang dimiliki oleh Perusahaan terdiri dari ekuitas dan liabilitas. Berasal dari Liabilitas sebesar 39,87% dan ekuitas sebesar 60,13%, komposisi ini mengalami perubahan jika dibandingkan dengan 2019, dengan komposisi struktur modal yang berasal dari Liabilitas mengalami penurunan 6,68% sedangkan Ekuitas meningkat 4,55%. Perlu diketahui perubahan struktur modal terdapat penyajian kembali pada tahun 2019.

TABEL STRUKTUR MODAL (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF CAPITAL STRUCTURE (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	2020	Kontribusi (%) <i>Contribution (%)</i>	2019	Kontribusi (%) <i>Contribution (%)</i>	Perubahan (%) <i>Change (%)</i>
1	2	3	4	5	6=(2-4)/4
Liabilitas <i>Liabilities</i>	463,761	39.87%	496,947	42.62%	-6.68%
- Jangka Pendek <i>Short - Term</i>	382,140	32.85%	391,642	33.59%	-2.43%
- Jangka Panjang <i>Long - Term</i>	81,621	7.02%	105,305	9.03%	-22.49%
Ekuitas <i>Equity</i>	699,452	60.13%	669,010	57.38%	4.55%
Total Modal yang Diinvestasikan <i>Total Capital Invested</i>	1,163,213	100.00%	1,165,957	100.00%	-0.24%

- Kebijakan Struktur Modal**

Perusahaan memiliki kebijakan menggunakan ekuitas sebagai sumber modalnya. Pada tahun 2020, rasio ekuitas terhadap liabilitas sebesar 66,30%.

- Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal**

Selama tahun 2020, Perusahaan tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal.

- Investasi Barang Modal**

Selama tahun 2020, Perusahaan melakukan penambahan barang modal untuk Aset Tetap dan Properti Investasi sebagai berikut.

- Details of Capital Structure**

The composition of the capital structure in 2020 owned by the Company consist of equity and liabilities. Derived from Liabilities by 39.87% and equity by 60.13%, this composition has changed when compared to 2019, with the composition of capital structure derived from Liabilities decreased by 6.68% while Equity increased by 4.55%. It should be noted that the change in capital structure has a restatement in 2019.

- Capital Structure Policy**

The company has a policy of using equity as its capital source. In 2020, the ratio of equity to liabilities will be 66,30%.

- Material Commitments for Capital Goods Investment**

During 2020, the Company has no material commitments for capital investment.

- Capital Investment**

During 2020, the Company will add capital goods to Fixed Assets and Investment Properties as follows.




TABEL INVESTASI BARANG MODAL (DALAM JUTAAN RUPIAH)
TABLE OF CAPITAL GOODS INVESTMENT (IN MILION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	Nilai Investasi <i>Investment Value</i>	Tujuan Investasi <i>Investment Objective</i>
1	2	3
Tanah <i>Soil</i>	-	Ekspansi/Pengembangan usaha <i>Expansion/Business Development</i>
Perabotan dan Peralatan <i>Furniture and equipment</i>	0.17	Kegiatan operasional <i>Operational Activities</i>
Perlengkapan Kantor <i>Office supplies</i>	-	Kegiatan operasional <i>Operational Activities</i>
Jumlah Amount	0.17	



Perbandingan Target Dan Realisasi

COMPARISON OF TARGETS AND REALIZATION

Pencapaian target PLN Enjiniring pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang bervariasi. Dari sisi posisi keuangan, jumlah asset, jumlah liabilitas, dan jumlah ekuitas perusahaan melampaui target yang telah dianggarkan pada RKAP tahun 2020. Dari sisi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain, realisasi pendapatan mencapai 90.42% atau sebesar Rp 625,34 miliar dari RKAP tahun 2020 yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 691,59 miliar. Beban Operasi pada triwulan IV tahun 2020 mencapai Rp 626,88 miliar atau sebesar 101,11% dibandingkan anggaran tahun 2020 yaitu sebesar Rp 619,98 miliar. Realisasi laba rugi operasi pada triwulan IV tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 1,53 miliar atau mencapai 2,14% dari RKAP tahun 2020 yang di targetkan yaitu sebesar Rp 71,60 miliar. Realisasi laba tahun berjalan pada triwulan IV tahun 2020 sebesar Rp 15,49 miliar atau mencapai 27,64% dari RKAP tahun 2020 yaitu sebesar Rp 56,07 miliar. Sedangkan untuk realisasi kas dan setara kas akhir tahun pada Laporan Arus Kas tercatat sebesar Rp 338,59 miliar atau mencapai 296,08% dari RKAP yang telah dianggarkan yaitu sebesar Rp 114,35 miliar.

Achievement of the PLN Enjiniring target in 2020 shows mixed results. In terms of financial position, total assets, total liabilities and total equity of the company exceeded the target budgeted for in the 2020 RKAP. From the side of the Income Statement and Other Comprehensive Income, revenue realization reached 90.42% or Rp 625.34 billion from the 2020 RKAP which targeted at Rp 691.59 billion. Operating Expenses in 2020 in fourth quarter of 2020 reached Rp 626.88 billion or 101.11% compared to the 2020 budget of Rp 619.98 billion. Realization of operating profit and loss in the fourth quarter of 2020 decrease amounted to Rp 1.53 billion or reached 2.14% of the 2020 RKAP which targeted at Rp 71.60 billion. The realization of profit for the current year in the fourth quarter of 2020 amounted to Rp 15.49 billion or reached 27.64% of the 2020 RKAP target budget in amount of Rp 56.07 billion. As for the realization of cash and cash equivalents at the end of the year on the Cash Flow Report recorded amounted to Rp 338.59 billion or reached 296.08% of the budgeted RKAP in amount of Rp 114.35 billion.



TABEL REALISASI DAN TARGET 2020 (DALAM JUTAAN RUPIAH)

TABLE OF 2020 REALIZATION AND TARGET (IN MILLION RUPIAH)

Uraian <i>Description</i>	Realisasi 2020 <i>Realization 2020</i>	RKAP 2020	Pencapaian (%) <i>Achievement (%)</i>
1	2	3	4=(2/3)
<i>LAPORAN POSISI KEUANGAN</i>			
<i>FINANCIAL POSITION REPORT</i>			
ASET			
ASSET			
Aset Lancar <i>Current Assets</i>	848,361	764,846	110.92%
Aset Tidak Lancar <i>Non Current Assets</i>	314,852	329,697	95.50%
TOTAL ASET <i>TOTAL ASSETS</i>	1,163,213	1,094,543	106.27%



LIABILITAS				
LIABILITY				
	Liabilitas Jangka Pendek <i>Short - Term Liability</i>	382,140	245,007	155.97%
	Liabilitas Jangka Panjang <i>Long Term Liability</i>	81,621	99,994	81.63%
	TOTAL LIABILITAS	463,761	345,001	134.42%
	TOTAL LIABILITY			
	TOTAL EKUITAS	699,452	749,542	93.32%
	TOTAL EQUITY			
	Laba Rugi dan Penghasilan Lainnya <i>Income Statement and Other Comprehensive Income</i>			
	Pendapatan <i>Income</i>	625,344	691,589	90.42%
	Beban Pokok Pendapatan <i>Cost Of Revenue</i>	(436,166)	(422,665)	103.19%
	Laba Bruto <i>Gross Profit</i>	189,178	268,924	70.35%
	Beban Usaha <i>Operating Expenses</i>	(190,713)	(197,321)	96.65%
	Laba Sebelum Pos Keuangan dan Lain-lain <i>Gain Before Financial Post and Other</i>	(1,535)	71,603	-2.14%
	Pos Keuangan dan Lain-lain Netto <i>Financial and Other Posts - Net</i>	21,979	(11,771)	-186.73%
	Laba Sebelum Pajak <i>Profit Before Taxes</i>	20,444	59,833	34.17%
	Beban Pajak Penghasilan <i>Income Taxes Expense</i>	(4,947)	(3,762)	131.50%
	Laba Tahun Berjalan <i>Current Year Profit</i>	15,497	56,071	27.64%
	Pendapatan Komprehensif Lain Tahun Berjalan <i>Other Comprehensive Income Of The Current Year</i>	2,336	(31)	
	Jumlah Pendapatan Komprehensif <i>Total Comprehensive Income</i>	2,336	(31)	-7628.68%
	Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	17,833	56,040	31.82%

Total Comprehensive
Income In Current Year

Laporan Arus Kas

Cash Flow Statement

Arus Kas dari Aktivitas Operasi <i>Cash Flows from Operating Activities</i>	167,203	(78,742)	-212.34%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi <i>Cash Flows from Investing Activities</i>	1,804	(1,710)	-105.50%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan <i>Cash Flows from Financing Activities</i>	(57,238)	(32,011)	178.81%
Penurunan Neto Kas dan Setara Kas <i>Decrease in Net Cash and Cash Equipalents</i>	111,769	(112,463)	-99.38%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun <i>Cash and Cash Equipalents Early Years</i>	226,822	226,822	100.00%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun <i>Cash and Year and Cash Equipalents</i>	338,591	114,359	296.08%



Proyeksi Tahun 2020

Projection Of 2020

Proyeksi keuangan pada tahun 2020 didasarkan pada asumsi nilai Kurs 1 US \$ sama dengan Rp15.000,- berdasarkan asumsi tersebut, Perusahaan memproyeksikan jumlah aset pada tahun 2020 sebesar Rp 1.094,54 miliar, jumlah liabilitas sebesar Rp 345,00 miliar, dan jumlah ekuitas diproyeksikan sebesar Rp 749,54 miliar. Dari sisi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Pada tahun 2020 Perusahaan memproyeksikan pendapatan operasi sebesar Rp 691,59 miliar dan Biaya Operasi sebesar Rp 619,98 miliar. Terkait Laba Rugi Operasi, Perusahaan memproyeksikan pendapatan laba operasi sebesar Rp 71,61 miliar. Laba Bersih tahun berjalan dan laba komprehensif tahun berjalan diproyeksikan mencapai Rp 56,07 miliar. Dari sisi Laporan Arus Kas, Perusahaan memproyeksikan kas dan setara kas pada akhir tahun 2020 sebesar Rp 338,59 miliar.

The financial projection of 2020 based on an assumption of a US \$ 1 exchange rate equal to Rp 15.000. Based on this assumption, the Company projects total assets in 2020 in amount of Rp 1.094,54 billion, total liabilities in amount of Rp 345.00 billion, and total projected equity in amount of Rp 749.54 billion. In terms of the Income Statement and Other Comprehensive Income, the Company projects operating income in 2020 in amount of Rp 691.59 billion and operating cost in amount Rp 619.98 billion. Net income for the current year and comprehensive income for the current year are projected to reach Rp 56.07 billion. In terms of the Cash Flow Report, the Company projects cash and cash equivalents at the end of 2020 in amount of Rp 338.59 billion.

Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

INFORMASI MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Selama tahun 2020, Perseroan tidak menerima informasi material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

MATERIAL INFORMATION THAT OCCURS AFTER THE DATE OF THE ACCOUNTANT'S REPORT

During 2020, the Company did not receive material information that occurred after the date of the accountant's report.

KEBIJAKAN DEVIDEN

Atas saldo laba tahun 2020, Perseroan tidak menerima informasi terkait pembagian Dividen.

DIVIDEND POLICY

On the balance of profit in 2020, the Company does not receive information related to the distribution of dividends.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN/ATAU KARYAWAN

Perusahaan tidak melaksanakan program kepemilikan saham oleh manajemen dan/atau karyawan (ESOP/MSOP), hal ini dikarenakan PLN Enjiniring belum menjadi perusahaan publik.

SHARE OWNERSHIP PROGRAM BY MANAGEMENT AND / OR EMPLOYEES

The company does not implement a share ownership program by management and / or employees (ESOP / MSOP), this is because PLN Enjiniring has not yet become a public company.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Perusahaan tidak memiliki catatan mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, hal ini dikarenakan PLN Enjiniring belum menjadi perusahaan publik.

REALIZATION OF THE USE OF FUNDS FROM PUBLIC OFFERING

The company does not have a record of the realization of the use of funds resulting from a public offering, this is because PLN Enjiniring has not become a public company.



Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi Atau Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Combinations, Acquisitions or Debt / Capital Restructuring

■ Investasi

Pada tahun 2020, Perseroan telah menjelaskan investasi sebagai berikut:

1. PT Crompton Prima Switchgear Indonesia, dimana merupakan perusahaan afiliasi PLN Enjiniring dengan kepemilikan saham sebesar 49% telah menyelesaikan pembangunan pabrik switchgear di kawasan industri modern Cikande, Banten pada tanggal 20 Agustus 2018.
2. CNG Plant Bangkanai, dimana merupakan unit bisnis PLN Enjiniring dengan ruang lingkup sebagai aset owner dan aset operator.

■ Investment

In 2020, the Company has explained the investment as follows:

1. *PT Crompton Prima Switchgear Indonesia, which is an PLN Enjiniring affiliated company with 49% ownership, has completed the construction of the switchgear plant in the modern industrial area of Cikande, Banten on August 20, 2018.*
2. *CNG Plant Bangkanai, which is the PLN Enjiniring business unit with scope as the owner's assets and operator assets.*

■ Ekspansi

Selama 2020, Perseroan tidak memiliki informasi atau tidak terdapat kegiatan terkait dengan Ekspansi.

■ Expansion

During 2020, the Company has no information or activities related to the Expansion.

■ Divestasi

Selama tahun 2020, Perseroan tidak memiliki informasi atau tidak terdapat kegiatan terkait dengan Divestasi.

■ Divestment

During 2020, the Company have no information or there were no activities related to Divestment.

■ Penggabungan/Peleburan Usaha

Sepanjang tahun 2020, Perseroan tidak memiliki informasi atau tidak terdapat kegiatan terkait dengan penggabungan/ peleburan usaha.

■ Business Merger / Consolidation

During 2020, the Company has no information or there were no activities related to business mergers / consolidations.

■ Akuisisi

Selama tahun 2020, Perseroan tidak memiliki informasi atau tidak terdapat kegiatan terkait dengan akuisisi perusahaan.

■ Acquisition

During 2020, the Company has no information or activities related to the company's acquisition.

■ Restrukturisasi Utang Dan/Atau Restrukturisasi Modal

Selama tahun 2020, Perseroan tidak memiliki informasi atau tidak terdapat kegiatan terkait dengan Restrukturisasi utang atau/Modal.

■ Debt Restructuring And / Or Capital Restructuring

During 2020, the Company has no information or there were no activities related to debt or / capital restructuring.



Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan Dan/Atau Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Material Transaction Information Containing Conflicts of Interest and / or Transactions with Related Parties

Perusahaan menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan yang berlaku bagi pihak ketiga.

Perusahaan tidak memiliki alasan khusus terkait pemberian transaksi dengan pihak berelasi. Pemberian transaksi kepada pihak berelasi dilakukan secara wajar sesuai ketentuan yang berlaku dengan tujuan yang sama terhadap transaksi dengan pihak ketiga lainnya.

Transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan sebagai berikut.

Sifat hubungan dengan pihak berelasi

- a) Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PLN dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b) PLN dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham Perusahaan.
- c) PT Indonesia Power (IP), PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam), PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), PT PLN Gas dan Geothermal (PLN Gas dan Geothermal), PT Haleyora Power (HP), dan PT Indonesia Comnets Plus (ICON) merupakan perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham utama Perusahaan dan atau sebagian pengurusnya sama dengan Perusahaan.

The company applies PSAK No. 7 (Revised 2010), "Disclosure of Related Parties". This PSAK requires disclosure of relationships, transactions and related party balances, including commitments, in the financial statements.

The Company carries out certain transactions with related parties with the same terms and conditions as those applicable to third parties.

The company has no specific reason related to the provision of transactions with related parties. The giving of transactions to related parties is carried out appropriately according to the provisions in force with the same purpose to transactions with other third parties.

Significant transactions with related parties are disclosed as follows.

The Nature of Relationships with related parties

- a) *The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of PLN and a State-Owned Enterprise (BUMN).*
- b) *PLN and the Education and Welfare Foundation of PT PLN (Persero) are the Company's shareholders.*
- c) *PT Indonesia Power (IP), PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam), PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), PT PLN Gas dan Geothermal (PLN Gas dan Geothermal), PT Haleyora Power (HP), and PT Indonesia Comnets Plus (ICON) are companies whose shareholders are the same as the major shareholders The company and / or some of its management are the same as the Company.*

d) Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan.

d) *The Board of Commissioners and Board of Directors are key management personnel of the Company.*

TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Group :

RELATED PARTY TRANSACTIONS

The following is a list of related parties that have transactions with the Company:

Pihak berelasi <i>Related parties</i>	Sifat hubungan <i>Nature of relationship</i>	Sifat transaksi <i>Nature of transaction</i>
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia	Pengendalian bersama CG International Holdings Singapore Pte. Ltd dan Perusahaan/ <i>Joint venture between CG International Holdings Singapore PTE. LTD and the Company</i>	Piutang usaha pihak berelasi, piutang lain-lain/ <i>Trade receivable related parties, other receivables</i> Pendapatan jasa supervisi enjiniring, procurement dan konstruksi/ <i>Revenue from engineering, procurement and construction</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Penempatan kas dan setara kas/ <i>Placement of cash and cash equivalents</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Rakyat Indonesia")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Penempatan kas dan setara kas/ <i>Placement of cash and cash equivalents</i>
PT Bank BNI Syariah ("BNI Syariah")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Penempatan kas dan setara kas/ <i>Placement of cash and cash equivalents</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Negara Indonesia")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Rekening bank dibatasi penggunaannya dan Penempatan kas dan setara kas/ <i>Restricted cash in banks and placement of cash and cash equivalents</i>
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ("PT Pelabuhan Indonesia II")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Pendapatan jasa supervisi enjiniring dan konstruksi/ <i>Revenue from engineering supervision and construction</i>
PT Angkasa Pura II (Persero) ("PT Angkasa Pura II")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Pendapatan jasa supervisi enjiniring dan konstruksi/ <i>Revenue from engineering supervision and construction</i>
PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("PT Waskita Karya")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Pendapatan jasa supervisi enjiniring dan konstruksi/ <i>Revenue from engineering supervision and construction</i>



TABEL TRANSAKSI PIHAK BERELASI
RELATED PARTIES TABLE

Uraian <i>Description</i>	2020		2019	
	Rp	%	Rp	%
Kas dan Setara Kas <i>Cash and Cash equivalents</i>				dalam Rp. Juta <i>In Rp Million</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	175,982	15.13%	87,622	7.51%
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk	31,129	2.68%	13,935	1.19%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	108,902	9.36%	111,959	9.60%
PT BNI Syariah	10,000	0.86%	10,000	0.86%
Sub - Jumlah	326,013		223,516	
<i>Sub - Total</i>				
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya <i>Restricted account</i>				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9,047	0.52%	6,189	0.53%
Piutang usaha neto <i>Account receivable - net</i>				
PT PLN (Persero)	143,602	12.35%	189,762	16.02%
PT Crompton Prima Switchgear	16,219	1.39%	9,168	0.70%
PT PLN Gas Geothermal	2,699	0.23%	2,884	0.24%
PT PLN Batam	958	0.08%	1,118	0.09%
PT Indonesia Power	238	0.02%	1,007	0.08%
PT Waskita Tbk (Persero)	240	0.02%	240	0.02%
Sub - Jumlah	163,956		204,179	
<i>Sub - Total</i>				
Piutang Lain-lain <i>Other Receivables</i>				
PT Crompton Prima Switchgear	-	0.93%	11,000	0.93%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	0.02%	-	0.01%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	0.00%	-	0.01%
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk	-	0.00%	-	0.00%
PT PLN (Persero)	7,657	0.64%	-	0.01%
Sub - Jumlah	7,657		11,000	
<i>Sub - Total</i>				
Aset Kontrak <i>Gross bill to customers</i>				
PT PLN (Persero)	199,198	17.12%	216,478	18.56%
PT Indonesia Power	10,340	0.88%	338	0.02%
PT PLN Batam	-	0.02%	111	0.00%
PT Wijaya Karya (Persero)	-	0.01%	48	0.00%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	-	0.00%	5	0.00%
PT Angkasa Pura II (Persero)	174	0.01%	-	0.00%
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	347	0.03%	-	0.00%
Sub - Jumlah	210,059		216,980	
<i>Sub - Total</i>				

Uang muka dari pelanggan				
<i>Advances from Customer</i>				
PT PLN (Persero)	21,006	4.52%	35,393	7.12%
Utang Lain-lain				
<i>Other Liabilities</i>				
PT PLN (Persero)	-	0.00%	2,370	6.55%
PT Haleyora Power	-	0.00%	2,630	0.08%
PT Indonesia Comnet Plus	-	0.00%	390	0.12%
Sub - Jumlah	-		5,390	
Sub - Total				
Liabilitas Kontrak				
<i>Gross liabilities to customers</i>				
PT PLN (Persero)	133,211	28.72%	100,180	20.16%
PT Indonesia Power	3,302	0.71%	8,555	1.72%
PT PLN Gas Geothermal	120	0.03%	1,415	0.28%
PT Crompton Prima Switchgear	-	0.27%	1,356	0.27%
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	-	0.07%	347	0.07%
PT Angkasa Pura II (Persero)	-	0.04%	174	0.04%
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	-	0.03%	130	0.03%
Sub - Jumlah	136,633		112,157	
Sub - Total				
Pinjaman jangka panjang				
<i>Long term loan</i>				
PT PLN (Persero)	88,028	18.98%	120,040	24.16%
Pendapatan jasa konsultasi pihak berelasi				
<i>Revenue from consulting service to related parties</i>				
Piutang Sewa Pembiayaan				
PT PLN (Persero)	241,578	20.77%	266,141	22.83%
Pendapatan				
PT PLN (Persero)	587,827	94.00%	943,900	96.44%
PT Indonesia Power	7,521	1.20%	11,750	1.20%
PT Crompton Prima Switchgear	7,051	1.12%	10,093	1.03%
PT PLN Gas Geothermal	3,555	0.55%	4,057	0.41%
PT Pembangkitan Jawa Bali	12,780	2.04%	2,167	0.22%
PT PLN Batam	4,656	0.74%	2,086	0.21%
PT PLN Batubara	-	0.00%	-	0.00%
Sub - Jumlah	623,390		974,053	
Sub - Total				

Pada 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan memberikan kompensasi kepada Komisaris dan Direksi perusahaan berupa gaji, fasilitas, tunjangan dan tantiem masing-masing sebesar Rp 16.16 miliar dan Rp. 14.04 miliar. Perusahaan memiliki kebijakan untuk mereview setiap transaksi dengan pihak berelasi agar tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang terkait.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company provided compensation to the company's Commissioners and Directors in the form of salaries, facilities, benefits and tantiem amounting to Rp 16.16 billion and Rp.14.04 billion, respectively. The company has a policy to review each transaction with related parties so that it does not violate the relevant rules and regulations.



Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan

Amendments to the Law and Regulations which have a Significant Effect on the Company

Selama Tahun 2020, Perseroan tidak memiliki informasi atau tidak terdapat kegiatan terkait perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.

During 2020, the Company has no information or there were no activities related to changes in laws and regulations that have a significant effect on the financial statements.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020

Penerapan dari standar baru, interpretasi, amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan:

- Penyesuaian tahunan 2020: "Kerangka Konseptual 2019"
- PSAK No. 101: "Penyajian Laporan Keuangan Syariah"
- PSAK No. 102: "Akuntansi Murabahah"
- ISAK No. 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba"
- ISAK No. 36: "Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK No. 16: Aset Tetap dan PSAK No 73, Sewa"
- ISAK No. 101: "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan"
- ISAK No. 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah"

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

1. *New and Revised PSAK, as well as ISAK effective for the financial year beginning on or after January 1, 2020*

The application of the new standards, interpretations, amendments and annual adjustments to accounting standards, effective as of January 1, 2020, has not caused significant changes to the Group's accounting policies and has not had a material impact on the amounts reported in the consolidated financial statements in the current year

- *2020 annual adjustment: "2019 Conceptual Framework"*
- *PSAK No. 101: "Presentation of Islamic Financial Statements"*
- *PSAK No. 102: "Murabaha Accounting"*
- *ISAK No. 35: "Presentation of Financial Statements of Non-Profit Oriented Entities"*
- *ISAK No. 36: "Interpretation of the Interaction between Provisions on Land Rights in PSAK No. 16: Fixed Assets and PSAK No. 73, Leases"*
- *ISAK No. 101: "Recognition of Tangguh Murabahah Revenue Without Significant Risks related to Inventory Ownership"*
- *ISAK No. 102: "Impairment of Murabahah Receivables"*

- Amandemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan"
 - Amandemen PSAK No. 15: "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
 - Amandemen PSAK No. 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
 - Amandemen PSAK No. 62: "Kontrak Asuransi"
 - Amandemen PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan - Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"
 - Amandemen PSAK No. 73: "Konsesi Sewa terkait COVID-19"
 - Amandemen PSAK No. 71, PSAK No. 55, dan PSAK No. 60 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga
 - Penyesuaian tahunan PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan"
 - Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan ("PPSAK") No. 13 mengenai pencabutan PSAK No. 45: "Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba"
2. Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:
- PSAK No. 74: "Kontrak Asuransi"
 - PSAK No. 112: "Akuntansi Wakaf"
 - Amandemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan"
 - Amandemen PSAK No. 22: "Kombinasi Bisnis - Definisi Bisnis"
 - Amandemen PSAK No. 22: "Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual"
 - Amandemen PSAK No. 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi Kontrak Memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak"
 - Amandemen PSAK No. 71, PSAK No. 55, PSAK No. 60, PSAK No. 62 dan PSAK No. 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga 2
- *Amendment to PSAK No. 1: "Presentation of Financial Statements concerning the Title of Financial Statements"*
 - *Amendment to PSAK No. 15: "Investments in Associates and Joint Ventures"*
 - *Amendment to PSAK No. 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"*
 - *Amendment to PSAK No. 62: "Insurance Contract"*
 - *Amendment to PSAK No. 71: "Financial Instruments - Accelerated Repayment Features with Negative Compensation"*
 - *Amendment to PSAK No. 73: "Covid-19-related Lease Concessions"*
 - *Amendment to PSAK No. 71, PSAK No. 55, and PSAK No. 60 on Interest Rate Benchmark Reform*
 - *Annual adjustment of PSAK No. 1: "Presentation of Financial Statements"*
 - *Statement of PPSAK No. 13 regarding the revocation of PSAK No. 45: "Non-profit Organization Financial Reporting"*
2. *The new standards, amendments and annual adjustments that have been issued, but not yet effective for the financial year starting on January 1, 2020 are as follows :*
- *PSAK No. 74: "Insurance Contract"*
 - *PSAK No. 112: "Accounting for Waqf"*
 - *Amendment to PSAK No. 1: "Presentation of Financial Statements"*
 - *Amendment to PSAK No. 22: "Business Combination - Business Definition"*
 - *Amendment to PSAK No. 22: "Business Combinations - Reference to Conceptual Frameworks"*
 - *Amendment to PSAK No. 57: "Aggravating Contract Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets – Cost of Fulfilling Contracts"*
 - *Amendment to PSAK No. 71, PSAK No. 55, PSAK No. 60, PSAK No. 62 and PSAK No. 73 concerning Interest Rate Benchmark Reform 2*





- Penyesuaian tahunan PSAK No. 69: "Agrikultur"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73: "Sewa"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 110: "Akuntansi Sukuk"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 111: "Akuntansi Wa'd"

Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2021, kecuali Amandemen PSAK No. 22: "Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual", Amandemen PSAK No. 57, Penyesuaian tahunan PSAK No. 69, Penyesuaian tahunan PSAK No. 71 dan Penyesuaian tahunan PSAK No. 73 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, Amandemen PSAK No. 1 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 dan PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen standar, dan interpretasi atas standar serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak.

Penerapan awal PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan"

PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan" diterbitkan di bulan Juli 2017 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. Grup menerapkan PSAK No. 71 mulai 1 Januari 2020.

Grup menerapkan PSAK No. 71 secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparasi.

Sesuai ketentuan transisi PSAK No. 71 terkait dengan klasifikasi, pengukuran dan penurunan nilai aset keuangan, Grup telah memilih untuk tidak menyajikan kembali periode komparatif. Dampak kumulatif atas penyesuaian nilai tercatat pada awal penerapan diakui pada saldo laba pada 1 Januari 2020 sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi dalam standar.

- Annual adjustment of PSAK No. 69: "Agriculture"
- Annual adjustment of PSAK No. 71: "Financial Instruments"
- Annual adjustment of PSAK No. 73: "Lease"
- Annual adjustment of PSAK No. 110: "Sukuk Accounting"
- Annual adjustment of PSAK No. 111: "Wa'd Accounting"

The new standards, amendments and annual adjustments above are effective starting January 1, 2021, except for Amendments to PSAK No. 22: "Business Combinations - Reference to Conceptual Frameworks", Amendment to PSAK No. 57, Annual adjustment of PSAK No. 69, Annual adjustment of PSAK No. 73 which is effective from January 1, 2022, Amendment to PSAK No. 1 which is effective from January 1, 2023 and PSAK No. 74 which is effective from 1 January 2025, but early application is permitted.

At the time of issuance of the consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are still studying the impacts that may arise from the adoption of new standards, amendments to standards, and interpretations of the standards and their effects on the consolidated financial statements of the Company and subsidiaries.

Initial application of PSAK No. 71: "Financial Instruments"

PSAK No. 71: "Financial Instruments" issued in July 2017 and effective January 1, 2020 with early application permitted. The Group applies PSAK No. 71 starting January 1, 2020.

The Group applies PSAK No. 71 retrospectively with cumulative impact at the start of application and not restatement for comparative information.

In accordance with the transitional provisions of PSAK No. 71 related to the classification, measurement and impairment of financial assets, the Group has chosen not to restate the comparative period. The cumulative effect of the initial carrying amount adjustment is recognized in retained earnings on January 1, 2020 as permitted under the transitional provisions of the standard.

- **Penerapan awal PSAK No. 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"**

PSAK No. 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", diterbitkan di bulan Juli 2017 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Grup menerapkan PSAK No. 72 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2020, yang berdampak pada perubahan atas kebijakan akuntansi dan adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap jumlah yang telah diakui pada laporan keuangan.

Standar baru menentukan pengakuan pendapatan yaitu terjadi ketika pengendalian barang atau jasa yang dijanjikan telah dialihkan kepada pelanggan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Grup terhadap kontrak pendapatan dengan mengacu 5 (lima) tahapan yang ada di dalam PSAK No. 72, terdapat perbedaan yang signifikan dengan kebijakan akuntansi sebelumnya terhadap laporan keuangan konsolidasian terkait transaksi pendapatan biaya penyambungan. Manajemen memilih metode transisi retrospektif dengan dampak kumulatif atas penerapan awal standar diakui pada penerapan awal (*modified retrospective*). Manajemen juga memilih untuk menerapkan PSAK No. 72 secara retrospektif hanya terhadap kontrak yang bukan merupakan kontrak selesai pada tanggal penerapan awal.

- **Penerapan awal PSAK No. 73: "Sewa"**

Grup menerapkan PSAK No. 73: "Sewa" secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparasi sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi dalam standar. Grup mengakui utang sewa dan aset hak-guna pada tanggal penerapan awal. Grup sebagai penyewa akan mengukur utang sewa pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan tingkat bunga implisit sewa (jika tersedia) atau pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Tingkat pinjaman inkremental penyewa yang diterapkan adalah 11,95%. Kemudian Grup

- **Initial application of PSAK No. 72: "Revenue from Contracts with Customers"**

PSAK No. 72: "Revenue from Contracts with Customers", issued in July 2017 and effective January 1, 2020. The Group applies PSAK No. 72 effectively for the financial year starting January 1, 2020, which has an impact on changes to accounting policies and adjustments to amounts recognized in the financial statements. The new standard specifies that revenue recognition occurs when control of the promised goods or services has been transferred to the customer.

Based on the study conducted by the Group on revenue contracts with reference to the 5 (five) stages contained in PSAK No. 72, there is a significant difference with the previous accounting policies on the consolidated financial statements related to connection fee income transactions. Management chose the retrospective transition method with the cumulative effect on initial application of the standard recognized on initial application (*modified retrospective*). Management also chose to apply PSAK No. 72 retrospectively only on contracts that were not contracts completed at the date of initial application.

- **Initial application of PSAK No. 73: "Lease"**

The Group applies PSAK No. 73: "Lease" retrospectively with cumulative effect on initial application and not restatement for comparative information as permitted under the transitional provisions in the standard. The Group recognizes lease payables and right-of-use assets on the date of initial application. The Group as lessee will measure the lease payable at the present value of the remaining lease payments, discounted using the lease's implicit interest rate (if available) or incremental borrowing at the initial application date. The applied tenant incremental lending rate is 11.95%. The Group then measures the right-of-use asset at an amount equal to the lease





mengukur aset hak-guna pada jumlah yang sama dengan utang sewa, yang disesuaikan dengan jumlah sewa dibayar dimuka atau terutang terkait dengan sewa tersebut, yang diakui segera dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal penerapan awal.

Dampak penerapan awal PSAK No. 73: "Sewa" terhadap saldo awal 1 Januari 2020 untuk aset hak-guna sebesar Rp34.080 dan utang sewa sebesar Rp34.080.

Dalam menerapkan PSAK No. 73 untuk pertama kalinya, Grup menerapkan cara praktis berikut yang diperkenankan oleh standar

- menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
- akuntansi sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek;
- pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal;
- menggunakan tinjauan ke belakang (*hindsight*) dalam menentukan masa alternatif kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa;
- untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa berdasarkan kelas aset pendasar; dan mengandalkan penilaian apakah sewa bersifat memberatkan sesuai PSAK No. 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" segera sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk melakukan tinjauan penurunan nilai.

payable, adjusted for the amount of any prepaid rent or payable relating to the lease, which is recognized immediately in the consolidated statement of financial position on the date of initial application.

The impact of the initial application of PSAK No. 73: "Lease" to the beginning balance of January 1, 2020 for right-of-use assets of Rp 34,080 and rental payables of Rp 34,080.

In applying PSAK No. 73 for the first time, the Group applies the following practical methods permitted by the standard

- *apply a single discount rate to a portfolio of leases with fairly similar characteristics;*
- *accounting for operating leases whose leases expire within 12 months from January 1, 2020, are treated as short-term leases;*
- *the exclusion of initial direct costs from the measurement of right-of-use assets at the initial application date;*
- *use hindsight in determining alternative contract terms containing options to extend or terminate the lease;*
- *not to separate the non-lease component from the lease component by underlying asset class; and rely on an assessment of whether the lease is onerous under PSAK No. 57: "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" immediately prior to the initial application date as an alternative to conducting an impairment review.*

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources



Sumber Daya Manusia

Human Resources

Bagian SDM pada PLN Enjiniring terdiri dari sub bagian Pengembangan Organisasi dan Kinerja SDM, Administrasi dan Kesejahteraan SDM, dan Pengembangan SDM, sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 20.001.K/DIR/PLNE/VIII/2018 tentang Formasi Jabatan dan Formasi Tenaga Kerja Tahun 2018 PT PLN Enjiniring. Keputusan Direksi tersebut menunjukkan bahwa dimana secara tidak langsung fungsi dari bagian SDM PLN Enjiniring tidak sekedar sebagai fungsi administratif ataupun supporting, melainkan mempunyai fungsi yang lebih besar yaitu peningkatan produktifitas, kapabilitas serta meningkatkan nilai dan keunggulan organisasi untuk menghadapi dinamika tantangan bisnis global.

Aktivitas Bagian SDM yang menunjang kinerja perusahaan dalam setiap tahun tertuang dalam Kontrak Manajemen, dimana *Key Performance Indicator* (KPI) untuk perspektif tenaga kerja adalah kesiapan sumber daya manusia (*Human Capital Readiness – HCR*) dan kesiapan organisasi (*Organizational Capital Readiness – OCR*). Pada tahun 2020, KPI Rasio Enjinir *Subletting*, yang sebelumnya masuk dalam Perspektif Tenaga Kerja, dipindahkan menjadi masuk dalam Perspektif Efektifitas Produk dan Proses. Selain dua aktivitas penunjang KPI Perusahaan tersebut, Bagian SDM PLN Enjiniring tetap melaksanakan fungsi SDM sebagaimana mestinya, yang juga dikenal dengan sebutan "Tujuh Pilar SDM", yaitu :

1. pengembangan organisasi dan perencanaan tenaga kerja,
2. rekrutmen dan seleksi,
3. pembinaan kompetensi dan karir,
4. pengelolaan pembelajaran,
5. pengelolaan manajemen kinerja (*performance appraisal*),
6. pengelolaan kompensasi dan manfaat, dan
7. pengelolaan hubungan industrial.

The HR section of PLN Enjiniring consists of sub-sections of Organizational and HR Performance Development, HR Administration and Welfare, and HR Development, in accordance with Decree of the Board of Directors No. 20.001.K / DIR / PLNE / VIII / 2018 regarding Position Formation and Workforce Formation. The Board of Directors decision shows that indirectly the function of the PLN Enjiniring Section is not just as personnel, but also has a function as for the development of human resources and organizations.

The HR Department activities that support the company's performance every year are contained in the Management Contract, where the Key Performance Indicator (KPI) for the workforce perspective is the Human Capital Readiness 'HCR' and Organizational Capital Readiness 'OCR'. In 2020, the Subletting Engineering Ratio KPI, which was previously included in the Labor Perspective, was transferred to the Product and Process Effectiveness Perspective. In addition to the two supporting activities of the Company's KPI, the Human Resources Department PLN Enjiniring continues to carry out the HR function as it should, also known as the "Seven Pillars of HR", namely:

1. *organizational development and workforce planning,*
2. *recruitment and selection,*
3. *competency and career development,*
4. *learning management,*
5. *performance management (performance appraisal),*
6. *compensation and benefit management, and*
7. *industrial relations management.*

ORGANISASI PENGELOLA SUMBER DAYA MANUSIA

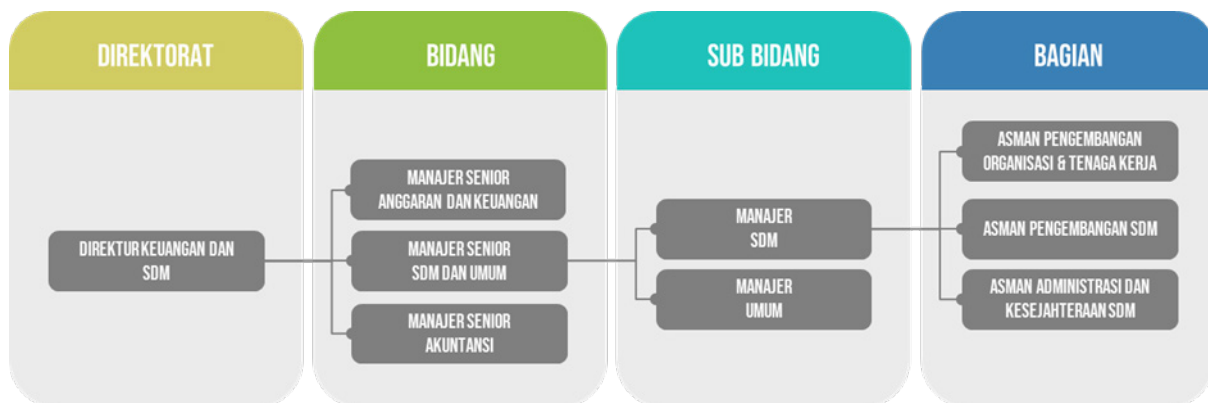
PLN Enjiniring menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan elemen penting yang akan menunjang produktivitas kinerja PLN Enjiniring. Persaingan dunia bisnis yang semakin ketat menuntut manusia untuk selalu berkembang menjadi lebih baik dan kompetitif. Untuk menjawab tantangan zaman yang semakin global saat ini, PLN Enjiniring berkomitmen untuk terus melakukan program pengembangan karyawan secara intensif guna mencetak insan PLN Enjiniring yang handal dan kompeten dalam dunia bisnis. Komitmen ini ditunjukkan dengan mengikutsertakan karyawan dalam berbagai pelatihan dan sertifikasi serta program pengembangan lainnya. Pengelolaan SDM PLN Enjiniring berada di bawah tanggung jawab Direktorat Keuangan dan SDM dan dijalankan oleh Bidang SDM dan Umum yang dipimpin oleh Manajer Senior SDM dan Umum. Struktur organisasi pengelola SDM adalah sebagai berikut.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ORGANIZATION

PLN Enjiniring is aware that human resources are an important element that supporting PLN Enjiniring's productivity performance. The increasingly fierce competition in the business world requires humans to always develop for the better and competitive. To answer the challenges of the increasingly global era today, PLN Enjiniring committed to continuing to conduct intensive employee development programs in order to produce PLN Enjiniring people who are reliable and competent in the business world. This commitment demonstrated by involving employees in various training and certifications and other development programs. The management of human resources PLN Enjiniring is under the responsibility of the Directorate of Finance and HR and is carried out by the HR and General Affairs Division which is led by the Senior HR and General Managers. The organizational structure of the HR manager is as follows.



Struktur Organisasi Pengelola SDM HR Management Organizational Structure



Profil Manajer Senior SDM dan Umum

Senior Manager Of Hr And General Profile

■ Fransiska Widyastuti

PH Manajer Senior SDM dan Umum

Warga Negara Indonesia, usia 42 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi dari Universitas Indonesia Depok pada tahun 2003. Menjabat sebagai PH Manajer Senior SDM dan Umum sejak tahun 2019, sebelumnya menjabat sebagai Manajer Senior Anggaran dan Keuangan pada PT PLN Enjiniring (2017-2019).

■ Fransiska Widyastuti

PH Senior Manager of HR and General

Indonesian citizen, 42 years old. He completed his Bachelor's degree in accounting from the University of Indonesia in 2003. Serves as PH Senior Manager of HR and General since 2019, previously served as Senior Manager of Budget and Finance at PT PLN Enjiniring (2017-2019)

FUNGSI DAN RUANG LINGKUP TUGAS BIDANG SDM & UMUM

Pada Bidang SDM & Umum terdapat dua bagian yaitu:

1. Bagian SDM, memiliki fungsi dan ruang lingkup sebagai berikut
 - Pengembangan organisasi dan perencanaan tenaga kerja,
 - Rekrutmen dan seleksi,
 - Pembinaan kompetensi dan karir,
 - Pengelolaan pembelajaran (pendidikan dan pelatihan),
 - Pengelolaan manajemen kinerja,
 - Pengelolaan kompensasi dan manfaat,
 - Pengelolaan hubungan industrial,
2. Bagian Umum, memiliki fungsi dan ruang lingkup sebagai berikut
 - Rumah tangga kantor
 - Manajemen gedung dan aset
 - Pengelolaan keamanan dan kebersihan kantor
 - Pengelolaan kendaraan dan fasilitas dinas
 - Pengelolaan perjalanan dinas

FUNCTIONS AND SCOPE OF DUTY IN THE SECTOR OF HUMAN RESOURCES & GENERAL AFFAIRS

In the field of HR & General there are two parts, namely:

1. HR, has the following functions and scope
 - Organizational development and workforce planning,
 - Recruitment and selection,
 - Competency and career development,
 - Management of learning (education and training),
 - Management of performance management,
 - Management of compensation and benefits,
 - Management of Industrial Relations,
2. General Section, has the following functions and scope
 - Office household
 - Management of building and asset
 - Management of office security and cleanliness
 - Management of vehicles and service facilities
 - Management of official travel

KEBIJAKAN REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Seiring dengan perkembangan bisnis perusahaan, PLN Enjiniring membutuhkan peningkatan SDM dalam hal kualitas maupun kuantitas. Rekrutmen yang dilakukan terutama untuk mengisi formasi jabatan dan formasi tenaga kerja berdasarkan keputusan Direksi Perusahaan. Rekrutmen dilakukan dengan pertimbangan hasil analisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan penguatan kompetensi bisnis Perusahaan serta peningkatan target kinerja dan pendapatan. Keberagaman latar belakang pendidikan, pengalaman, dan keahlian menjadi kriteria dalam melakukan seleksi calon pegawai PLN Enjiniring.

Terhitung mulai tahun 2020, rekrutmen calon pegawai PLN Enjiniring dilakukan melalui rekrutmen terpusat dalam lingkup PLN Grup. Rekrutmen tersebut dilakukan oleh PT PLN (Persero) melalui rekrutmen terbuka untuk umum, dengan membuka seluas-luasnya kesempatan rekrutmen dengan tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. PLN Enjiniring menghitung jumlah kebutuhan tambahan tenaga kerja sekaligus klasifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengisi formasi tenaga kerja, kemudian diserahkan kepada Bagian Rekrutmen PT PLN (Persero) Kantor Pusat yang bertindak sebagai pelaksana rekrutmen. Sedangkan untuk proses rekrutmen karyawan *outsourcing* dan karyawan PKWT dilakukan berdasarkan kebutuhan proyek.

Dalam proses rekrutmen calon pegawai PLN Enjiniring, terdapat sejumlah tahap yang harus dilalui oleh para pelamar, yaitu (1) Seleksi administrasi, (2) Tes Potensi Akademik (TPA) dan Bahasa Inggris, (3) *General Aptitude Test* (GAT), (4) Psikotes, (5) Wawancara, dan (6) Tes Kesehatan.

Calon pegawai yang telah lulus melewati seluruh tahapan seleksi tersebut wajib mengikuti program pra-jabatan yang terdiri dari pendidikan dan pelatihan bimbingan fisik dan mental, pendidikan dan pelatihan pengenalan perusahaan, dan *on-the-job training* (OJT) dalam bentuk terjun langsung ke dalam pekerjaan di lingkungan PLN Enjiniring. Setelah selesai mengikuti program pra-jabatan dan dinyatakan lulus Uji Akhir, calon pegawai diangkat

HUMAN RESOURCES RECRUITMENT POLICY

Along with the company's business development, PLN Enjiniring requires an increase in human resources in terms of quality and quantity. Recruitment carried out primarily to fill in the position formation and workforce formation based on the decision of the Company's Board of Directors. Recruitment carried out with consideration of the analysis results of workforce needs based on strengthening the Company business competencies and increasing performance and revenue targets. The diversity of educational backgrounds, experiences, and expertise become the criteria in selecting the candidates for PLN Enjiniring.

Starting from 2020, the recruitment of prospective PLN Enjiniring employees carried out through a centralized recruitment within the scope of the PLN Group. The recruitment carried out by PT PLN (Persero) through open recruitment to the public, by opening up the broadest recruitment opportunities by not distinguishing ethnicity, religion, race, and between groups. PLN Enjiniring calculates the number of additional workforce needs as well as the classification of workforce needed to fill workforce formation, then submitted to the Recruitment Section of PT PLN (Persero) Head Office which acts as a recruitment executor. Whereas the recruitment process for outsourced employees and PKWT employees carried out based on project needs.

In the recruitment process of prospective PLN Enjiniring employees, there are a number of stages that must be passed by the applicants, namely (1) Administration selection, (2) Academic Potential Test (TPA) and English Test, (3) General Aptitude Test (GAT), (4) Psychology test, (5) Interview, and (6) Health Test.

Prospective employees who have passed all stages of the selection are required to take a pre-service program consisting of education and training in physical and mental guidance, education and company introduction training, and *on-the-job training* (OJT) in the form of working directly into employment within the environment of PLN Enjiniring. After completing the pre-service program, prospective employees appointed



menjadi Pegawai terhitung sejak tanggal selesai masa OJT dan/atau terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai melalui Keputusan Direksi. Selama tahun 2020, secara akumulasi PLN Enjiniring telah mendapatkan rekrutan PLN Grup sejumlah 5 orang untuk calon Pegawai organik dan 69 orang karyawan PKWT. Selain itu, PLN Enjiniring mengalami pengurangan tenaga kerja sebanyak 220 orang karyawan PKWT dengan alasan masa kontrak kerja telah habis.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM

Pengembangan kompetensi SDM dilakukan untuk memastikan ketersediaan SDM yang handal dalam menjalankan aktivitas bisnis PLN Enjiniring. Salah satu media pengembangan kompetensi SDM adalah melalui pemberdayaan program pelatihan, sertifikasi, dan penugasan. PLN Enjiniring memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan dalam mendapatkan program pengembangan tersebut.

Program pengembangan didasarkan pada kebutuhan Perusahaan untuk mendukung pencapaian keberhasilan kinerja dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam Kontrak Manajemen. Selain itu, program pengembangan bagi tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan sikap dalam menghadapi setiap pekerjaan atau penugasan.

Dalam melaksanakan pengembangan SDM, PLN Enjiniring bekerja sama dengan PLN Corporate University dan lembaga pelatihan dalam maupun luar negeri. Selama tahun 2020, Perusahaan melaksanakan pengembangan kompetensi karyawan yang terdiri dari 81 Program Pelatihan dengan diikuti oleh 453 orang, serta 25 Program Sertifikasi dengan diikuti oleh 177 orang terdiri dari Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai, dan Karyawan Kontrak/*Outsourcing*. Pengembangan kompetensi dilakukan dengan menerapkan menerapkan prinsip persamaan kesempatan bagi semua karyawan.

as Employees from the date of completion of the OJT period and / or the issuance of a Decision Letter on Appointment of Employees through a Decree of the Board of Directors. During 2020, in accumulation PLN Enjiniring has received 5 PLN Group recruits for prospective organic employees and 69 PKWT employees. In addition, PLN Enjiniring experienced a workforce reduction of 220 PKWT employees on the grounds that the work contract period had expired and not extended.

DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES

HR DEVELOPMENT PROGRAM

HR competency development carried out to ensure the availability of reliable HR in carrying out PLN Enjiniring's business activities. One of the media for developing HR competencies is through empowering training programs, certifications, and assignments. PLN Enjiniring gives the same opportunity to all employees in getting the development program.

The development program is based on the Company's needs to support the successful achievement of the Company's performance and objectives stipulated in the Management Contract. In addition, the development program for the workforce aims to increase knowledge, competencies, and attitudes in the face of each job or assignment.

In implementing HR development, PLN Enjiniring works with PLN Corporate University and training institutions at home and abroad. During 2020, the Company implemented employee competency development consisting of 81 Training Programs with 453 participants, and 25 Certification Programs attended by 177 participants consisting of Members of the Board of Commissioners, Directors, Employees, and Contract / Outsourcing Employees. Competency development is carried out by applying the principle of equality of opportunity for all employees.

TABEL PELAKSANAAN PELATIHAN TAHUN 2020
TABLE OF TRAINING IMPLEMENTATION FOR 2020

No.	Waktu Pelaksanaan <i>Execution Time</i>	Jenis/Judul Pelatihan <i>Type / Title of Training</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Jumlah Peserta* <i>Number of Participants*</i>
1	Januari <i>January</i>	Manajemen Sumber Daya Manusia <i>Human Resource Management</i>	PPM Manajemen	1
2	Januari <i>January</i>	Effective Communication Skills <i>Effective Communication Skills</i>	LONDON SCHOOL PUBLIC RELATION	67
3	Januari <i>January</i>	Pelatihan Software TEKLA <i>TEKLA Software Training</i>	BIDANG TND	12
4	Maret <i>Mach</i>	Akuntansi Pendapatan Sesuai PSAK 72 <i>Revenue Accounting in accordance with PSAK 72</i>	IKATAN AKUNTANSI INDONESIA	1
5	Maret <i>Mach</i>	Awareness dan Audit Internal ISO 9001:2015 <i>ISO 9001: 2015 Internal Audit and Awareness</i>	PT SUCOFINDO	10
6	Maret <i>Mach</i>	Survei Proyek, Inspeksi dan Manajemen Risiko (HAZID / HAZOP / SIL) Peralatan Mekanikal dan Perpipaan pada Industri, Tanker (Kapal), dan Platform Lepas Pantai (ISO 17776, ISO 31000, IMO) <i>Project Survey, Inspection and Risk Management (HAZID/HAZOP/SIL) Mechanical Equipment and Piping on Industries, Tanker (Ship), and Offshore Platform (ISO 17776, ISO 31000, IMO)</i>	CIGRE	6
7	Maret <i>March</i>	Seminar Manajemen Proyek <i>Project Management Seminar</i>	SGS	2
8	April <i>April</i>	Loka Karya Manajemen SDM dengan Big Data <i>Workshop Human Capital Management With Big Data</i>	ASIA ANTI FRAUD	1
9	Mei <i>May</i>	Pengenalan KPKU <i>Introduction to KPKU</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	6
10	Mei <i>May</i>	Training Pendalaman HPE (Level Instruktur) <i>HPE Deepening Training (Instructor Level)</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	6
11	Juni <i>June</i>	Pelatihan Software ETAP <i>ETAP Software Training</i>	LMPI	11
12	Juni <i>June</i>	Integrated GRC <i>Integrated GRC</i>	ASIA ANTI FRAUD	1
13	Juli <i>July</i>	Pelatihan Software ETAP <i>ETAP Software Training</i>	LMPI	14
14	Juli <i>July</i>	Manajemen Kualitas Proyek Peralatan Mekanikal dan Perpipaan, Studi Kasus: Minyak dan Gas Bumi, Pembangkit Listrik, dan Pertambangan, (ISO / TS 29001, API Q 1) <i>Project Quality Management Mechanical Equipment and Piping, Case Study : Oil and Gas, Power Plant, and Mining, (ISO/TS 29001, API Q 1)</i>	BKM PII (Badan Kejuruan Mesin Persatuan Insinyur Indonesia)	7





15	Juli <i>July</i>	Kontrak Berbasis FIDIC <i>FIDIC Based Contracts</i>	Emli Training	23
16	Agustus <i>August</i>	Kontrak Berbasis FIDIC <i>FIDIC Based Contracts</i>	Emli Training	27
17	Agustus <i>August</i>	Legal For Non Legal <i>Legal For Non Legal</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	1
18	Agustus <i>August</i>	Manajemen Proyek Berbasis ARCGIS <i>Project Management Based on ARCGIS</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
19	Agustus <i>August</i>	Pembelajaran Karya Inovasi <i>Pembelajaran Karya Inovasi</i>	Ir. Yani Hadiani Soegito, MSIE	29
20	Agustus <i>August</i>	Pelatihan Penggunaan Software Engineering UNISIM Bagian I dan II <i>Training on the Use of UNISIM Software Engineering Parts I and II</i>	PT Advance Technology Solution (ATS)	15
21	September <i>September</i>	K2 dan K3 Instalasi TT/TET Untuk Pelaksana Pekerjaan <i>K2 dan K3 Instalasi TT/TET Untuk Pelaksana Pekerjaan</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
22	September <i>September</i>	ISO 27001 <i>ISO 27001</i>	ISACA Indonesia	2
23	September <i>September</i>	Pengembangan Diri <i>Self-development</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	7
24	September <i>September</i>	Pengelolaan Dokumen Perusahaan <i>Company Documents Management</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	1
25	September <i>September</i>	Pendalaman Materi Boardgames Power Marketer <i>Pendalaman Materi Boardgames Power Marketer</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	1
26	September <i>September</i>	Manajemen Risiko Hukum <i>Legal Risk Management</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	1
27	Oktober <i>October</i>	Proyeksi Harga Gas/LNG dan BBM Terhadap Perubahan Makro Ekonomi dan Pasar Dunia <i>Gas / LNG and BBM Price Projection on Macroeconomic and World Market Changes</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
28	Oktober <i>October</i>	Manajemen Alat Pengukur dan Pembatas <i>Measuring and Limiting Management</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	4
29	Oktober <i>October</i>	Bank Garansi dan Aplikasinya <i>Bank Guarantee and Application</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	3
30	Oktober <i>October</i>	Pemeliharaan Peralatan Gardu Induk <i>Maintaining Substation Equipment</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
31	Oktober <i>October</i>	Perhitungan Keekonomian Gas Hulu, Midstream dan Hilir <i>Calculation of Upstream, Midstream and Downstream Gas Economy</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	1
32	Oktober <i>October</i>	Gas Engine Electric Set Operation & Maintenance <i>Gas Engine Electric Set Operation & Maintenance</i>	PT Trakindo	4

33	Oktober <i>October</i>	Non Destructive Test (NDT) <i>Non Destructive Test (NDT)</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	3
34	Oktober <i>October</i>	Workshop and Training for Smart Energy Solution <i>Workshop and Training for Smart Energy Solution</i>	PT PLN (Persero) Kantor Pusat	2
35	Oktober <i>October</i>	GE Relay Training <i>GE Relay Training</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
36	Oktober <i>October</i>	Teknik Presentasi <i>Presentation Techniques</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
37	Oktober <i>October</i>	Storage Workshop <i>Storage Workshop</i>	USAID ASIA	1
38	Oktober <i>October</i>	W2 - FS <i>W2 - FS</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
39	Oktober	Seminar PJB Connect 2019	PT PJB	2
40	Oktober <i>October</i>	Analisa Proteksi Sistem Distribusi <i>Distribution System Protection Analysis</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	5
41	November <i>November</i>	Analisa Kondisi Trafo Distribusi <i>Distribution Transformer Condition Analysis</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
42	November <i>November</i>	Workshop Corporation, Merger & Akuisisi dan Mengelola Anak Perusahaan <i>Workshop Corporation, Merger & Acquisition and Managing Subsidiaries</i>	PT PLN (Persero) Kantor Pusat	2
43	November <i>November</i>	W3 - Environmental Ecological Flow <i>W3 - Environmental Ecological Flow</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
44	November <i>November</i>	W4 - Cumulative Impacts Assesment <i>W4 - Cumulative Impacts Assesment</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2
45	November <i>November</i>	Sistem Pemeliharaan Listrik <i>Electrical Maintenance System</i>	CV Berdiklat	2
46	November <i>November</i>	Workshop Pengelolaan PPh Pasal 21 yang Efektif dengan Ms Excel dan E-SPT <i>Workshop Pengelolaan PPh Pasal 21 yang Efektif dengan Ms Excel dan E-SPT</i>	ORTAX	2
47	Desember <i>December</i>	Bimbingan Teknis Pengurusan Perizinan OSS Versi 1.1 <i>Technical Guidance for OSS Licensing Management Version 1.1</i>	P2KP	2
48	Desember <i>December</i>	Workshop Organization Design 4.0 <i>Workshop Organization Design 4.0</i>	GML - Knowcap	2
49	Desember <i>December</i>	Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan <i>Problem Solving and Decision Making</i>	Ir. Yani Hadiani Soegito, MSIE	9
Total Jumlah Peserta Pelatihan				316
Total Number of Training Participants				316



(Catatan: jumlah peserta* sebanyak 453 orang karena terdapat beberapa orang Pegawai yang mendapatkan pelatihan lebih dari satu kali)

(Note: the number of participants* is 453 people because there are some employees who received training more than once)

TABEL PELAKSANAAN SERTIFIKASI TAHUN 2020
TABLE OF CERTIFICATION IMPLEMENTATION FOR 2020

No.	Waktu Pelaksanaan <i>Execution Time</i>	Jenis/Judul Sertifikasi <i>Type / Title of Certification</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants*</i>
1	Januari <i>January</i>	Ahli Bangunan Gedung - Muda <i>Building Expert - Junior</i>	LPJK	1
2	Januari <i>January</i>	Ahli Bangunan Gedung - Madya <i>Building Expert - Intermediate</i>	LPJK	3
3	Januari <i>January</i>	Ahli Geodesi - Madya <i>Geodetic Expert - Intermediate</i>	LPJK	1
4	Januari <i>January</i>	Ahli Geodesi - Madya <i>Geodetic Expert - Senior</i>	LPJK	1
5	Januari <i>January</i>	Ahli Geoteknik - Madya <i>Geotechnician - Intermediate</i>	LPJK	5
6	Januari <i>January</i>	Ahli Geoteknik - Muda <i>Geotechnician - Junior</i>	LPJK	1
7	Januari <i>January</i>	Ahli Teknik Jembatan - Madya <i>Bridge Engineer - Intermediate</i>	LPJK	1
8	Januari <i>January</i>	Ahli Teknik Tenaga Listrik - Muda <i>Electric Power Engineer Expert - Junior</i>	LPJK	3
9	Februari <i>February</i>	Ahli Bangunan Gedung - Utama <i>Building Expert - Senior</i>	LPJK	1
10	Februari <i>February</i>	Ahli Bendungan Besar - Utama <i>Large Dam Expert - Senior</i>	LPJK	1
11	Februari <i>February</i>	Ahli Teknik Mekanikal - Madya <i>Mechanical Engineering Expert - Intermediate</i>	LPJK	2
12	Februari <i>February</i>	Ahli Teknik Tenaga Listrik - Madya <i>Electric Power Engineer Expert - Intermediate</i>	LPJK	4
13	Februari <i>February</i>	Ahli Teknik Tenaga Listrik - Utama <i>Electric Power Engineer Expert - Senior</i>	LPJK	3
14	Februari <i>February</i>	Pengadaan Barang dan Jasa - PLN <i>Procurement of goods and services - PLN</i>	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	39
15	Mei <i>May</i>	Pelatihan Operasi Produksi <i>Production Operations Training</i>	PPSDM MIGAS CEPU	4
16	Juli <i>July</i>	Certified Risk Government Professional (CRGP) <i>Certified Risk Government Professional (CRGP)</i>	RAP/LSPMR	12
17	Juli <i>July</i>	Sertifikasi Profesi Manajer SDM <i>HR Manager Professional Certification</i>	PPM Manajemen	1
18	Juli <i>July</i>	Pelatihan Operasi Produksi <i>Production Operations Training</i>	PPSDM MIGAS CEPU	4



19	Agustus	Qualified Risk Management Professional (QRMP)			
	August	Qualified Risk Management Professional (QRMP)	CRMS	10	
20	September	Pengadaan Barang dan Jasa - PLN	PT PLN (Persero)		
	September	Procurement of goods and services - PLN	PUSDIKLAT	11	
21	Oktober	Qualified Risk Management Analyst (QRMA)			
	October	Qualified Risk Management Analyst (QRMA)	CRMS	16	
22	Oktober	Ahli K3 Listrik			
	October	Electrical Safety Expert	PT Mitra Dinamis Yang Utama	16	
23	Oktober	Qualified Internal Auditor (QIA) - Intermediate			
	October	Qualified Internal Auditor (QIA) - Intermediate	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	1	
24	Oktober	Qualified Internal Auditor (QIA) - Junior			
	October	Qualified Internal Auditor (QIA) - Junior	PT PLN (Persero) PUSDIKLAT	2	
25	November	Qualified Risk Management Analyst (QRMA)			
	November	Qualified Risk Management Analyst (QRMA)	CRMS	14	
26	Desember	Ahli K3 Umum			
	December	General Safety Expert	PT Phitagoras	1	
27	Desember	Qualified Internal Auditor (QIA) - Junior			
	December	Qualified Internal Auditor (QIA) - Junior	YPIA	1	
Total Jumlah Peserta Sertifikasi				159	
Total Number of Certification Participants				159	



Untuk mengukur efektivitas atas program pengembangan yang telah dilakukan, Perusahaan melakukan evaluasi dengan menghitung tingkat pengembalian investasi pada pelatihan/sertifikasi (*Return on Training Investment – ROTI*) dan evaluasi pencapaian kinerja Perusahaan serta Hari Orang Pelatihan (HOP).

Total biaya pengembangan kompetensi karyawan pada tahun 2020 melalui pelatihan/sertifikasi sebesar Rp 1.155.878.330, menurun sebesar 70,71% dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp 3.986.726.936. Di lain hal, pendapatan Perusahaan tahun 2020 (*stand alone*/bukan konsolidasi) adalah sebesar Rp 355.811.578.023, menurun sebesar 33,95% dibandingkan dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp 538.677.523.938. Maka, dengan asumsi *best practice* tingkat dampak pelatihan/sertifikasi sebesar 10%, didapatkan nilai ROTI 2020 sebesar 29,78, sedangkan nilai ROTI 2019 sebesar 13,06. Nilai pencapaian KPI/kinerja Perusahaan tahun 2020 adalah 91,95, sementara itu pencapaian Kinerja tahun 2019 adalah 89,64. Sedangkan untuk HOP tahun 2020 adalah 1,20, sementara HOP tahun 2019 adalah 2,49.

To measure the effectiveness of the development program that has been carried out, the Company conducts an evaluation by calculating the return on investment in training / certification (Return on Training Investment - ROTI) and evaluates the achievement of the Company performance and Hari Orang Pelatihan (HOP).

The total cost of developing employee competencies in 2020 through training / certification amounted to Rp 1.155.878.330 an decrease of 70.12% compared to 2019 which amounted to Rp 3.986.726.936. On the other hand, the Company's revenue in 2020 (stand alone / not consolidated) amounted to Rp 355.811.578.023, an decrease of 33.95% compared to 2019 which amounted to Rp 538.677.523.938. Then, assuming best practice the impact level of training / certification is 10%, the 2020 ROTI score is 29.78, while the 2019 ROTI value is 13.06. The achievement value of KPI / Company's performance in 2020 is 91.95, while the achievement of 2019 performance is 89.64. Whereas the HOP for 2020 is 1.20 while the HOP for 2019 is 2.49.

Berdasarkan nilai ROTI, nilai ROTI tahun 2020 lebih besar 16,72 poin dibandingkan tahun 2019. Selain itu, pencapaian skor KPI tahun 2020 juga lebih tinggi 2,31 poin dibandingkan tahun 2019. Maka didapatkan kesimpulan bahwa tingkat efektivitas program pengembangan tahun 2020 adalah efektif parsial karena nilai *Return Of Training Investment* (ROTI) meningkat sebesar 128,07% dan pencapaian KPI meningkat 2,58% dibandingkan tahun 2019, namun pendapatan yang diperoleh perusahaan tahun 2020 menurun 36,52% dibanding tahun 2019. Sementara tingkat efisiensi program pengembangan tahun 2020 adalah lebih efisien 71,01% dari segi biaya dan 51,84% dari segi jumlah HOP dibandingkan tahun 2019.

Based on the ROTI value, the 2020 ROTI value is bigger 16.72 points compared to 2019. Likewise, the achievement of the 2020 KPI score is bigger 2.31 points compared to 2019. Then it can be concluded that the effectiveness of the development program in 2020 is partial effective because ROTI Value increased by 128.07% and the achievement of KPI increased by 2.58% compared to 2019, but the revenue earned by the company in 2020 decreased by 36.52% compared to 2019. While the efficiency rate of the development program in 2020 is more efficient 71.01% in terms of cost and 51.84% in terms of HOP amount compared to 2019.

RENCANA PELATIHAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2021

Dalam menjaga kualitas SDM, kesinambungan program pengembangan kompetensi pegawai menjadi komitmen Perusahaan agar dapat mendukung kinerja perusahaan dan memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan. PLN Enjiniring telah merencanakan dan merumuskan kebutuhan pelatihan dan sertifikasi bagi Pegawai untuk periode tahun 2021 dalam kegiatan *Training Need Analysis* (TNA) secara mandiri mengikuti Prosedur Enjiniring (PE) 6.13, sebagai berikut.

TRAINING AND CERTIFICATION PLANNING 2021

In maintaining the quality of human resources, the sustainability of employee competency development programs is the Company's commitment to be able to support the company's performance and make a positive contribution to the sustainability of the company's business. PLN Enjiniring has planned and formulated the training and certification needs for Employees for the 2021 period in Training Need Analysis (TNA) activities independently following the 6.13 Engineering Procedure (PE), as follows.

TABEL RENCANA PELATIHAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2021

TABLE OF TRAINING AND CERTIFICATION PLANS FOR 2021

No.	Kebutuhan Pembelajaran <i>Learning Needs</i>	Peserta Pembelajaran <i>Learning Participants</i>	Tujuan Pembelajaran <i>Learning Objectives</i>
1	Teknologi Energi Baru Terbarukan (PLTMH, PLTS, PLTB, GEOTHERMAL, BIOMASS)	Staff KIT	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai teknologi EBT
	<i>Renewable Energy Technology (PLTMH, PLTS, PLTB, GEOTHERMAL, BIOMASS)</i>	<i>Staff KIT</i>	<i>After participating in this learning, the participants able to master renewable energy technology</i>

2	AHLI K3 LISTRIK & AHLI K3 UMUM	Staff TND	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menjadi Ahli K3 Listrik dan Ahli K3 Umum
	<i>Electrical Occupational Safety and Health Specialist & Occupational Safety and Health Specialist</i>	<i>Staff TND</i>	<i>After participating in this lesson, participants are able to become Electrical OHS Specialist and General OHS Specialist</i>
3	ANALISA BEBAN KERJA BERBASIS PRODUKTIVITAS	Staff KIT, TND, KONS, SDM	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menyusun analisis beban kerja berbasis produktivitas
	<i>PRODUCTIVITY-BASED WORKLOAD ANALYSIS</i>	<i>Staff KIT, TND, KONS, SDM</i>	<i>After participating in this lesson, participants are able to compile a productivity-based workload analysis</i>
4	CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT	Staff SAR	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu mengelola hubungan dengan pelanggan
	<i>CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT</i>	<i>Staff SAR</i>	<i>After participating in this lesson, participants are able to manage relationships with customers</i>
5	Evaluasi Jabatan	Staff SDM	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu melakukan evaluasi jabatan
	<i>Job Evaluation</i>	<i>Staff SDM</i>	<i>After participating in this lesson, participants are able to carry out job evaluations</i>
6	HIRARC, JSA & WORKING PERMIT	Staff UMUM & TND	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menyusun HIRARC, JSA & WORKING PERMIT
	<i>HIRARC, JSA & WORKING PERMIT</i>	<i>Staff UMUM & TND</i>	<i>After participating in this lesson, participants are able to arrange HIRARC, JSA & WORKING PERMIT</i>
7	Key Risk Indicators	TIM ERM	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menganalisa Key Risk Indicator
	<i>Key Risk Indicators</i>	<i>ERM Team</i>	<i>After participating in this lesson, participants are able to analyze Key Risk Indicators</i>
8	NEGOTIATION SKILL KOMUNIKASI	Staff USH, KONS	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai keterampilan dalam berkomunikasi dan bernegosiasi
	<i>NEGOTIATION COMMUNICATION SKILL</i>	<i>Staff USH, KONS</i>	<i>After participating in this lesson, participants are able to master the skills of communicating and negotiating</i>
9	Perawatan Mekanik I	Staff USH	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu melakukan perawatan mekanik
	<i>Mechanical Maintenance I</i>	<i>Staff USH</i>	<i>After participating in this lesson, participants are able to perform mechanical maintenance</i>
10	PRIMAVERA ADVANCE	Staff KIT, TND, KONS	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu mengoperasikan aplikasi primavera tingkat lanjut
	<i>PRIMAVERA ADVANCE</i>	<i>Staff KIT, TND, KONS</i>	<i>After participating in this lesson, participants are able to operate the advanced primavera application</i>





11	QA/QC Aspek Engineering dan Konstruksi	Staff KONS, KIT, TND	Setelah mengikuti sertifikasi ini peserta mampu melakukan analisa QA/QC pada Aspek Engineering dan Konstruksi
	<i>QA / QC Engineering and Construction Aspects</i>	<i>Staff KONS, KIT, TND</i>	<i>After participating in this certification, participants are able to perform QA/QC analysis on Engineering and Construction Aspects</i>
12	ANALISIS ALIRAN DAYA DAN HUBUNG SINGKAT	Staff TND	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu melakukan analisis aliran daya dan hubung singkat
	<i>POWER FLOW ANALYSIS AND SHORT CIRCUIT</i>	<i>Staff TND</i>	<i>After participating in this lesson, participants are able to perform power flow and short circuit analysis</i>
13	Strategy Development for Corporate and Entrepreneur	Staff PPK	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menyusun strategi pengembangan perusahaan
	<i>Strategy Development for Corporate and Entrepreneur</i>	<i>Staff PPK</i>	<i>After following this lesson, participants are able to develop a company development strategy</i>
14	QIA Dasar	Staff SPI	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menjadi auditor internal yang berkualifikasi
	<i>Basic Qualified Internal Auditor</i>	<i>Staff SPI</i>	<i>After participating in this lesson, participants are able to become qualified internal auditors</i>
15	TEKNIK DESIGN & REVIEW MENGGUNAKAN APLIKASI MS TOWER	Staff TND	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai teknik design & review menggunakan aplikasi MS Tower
	<i>DESIGN & REVIEW TECHNIQUES USING MS TOWER APPLICATION</i>	<i>Staff TND</i>	<i>After participating in this lesson, participants are able to master design & review techniques using the MS Tower application</i>
16	HUBUNGAN INDUSTRIAL TERAPAN	Staff SETPER	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menguasai ilmu hubungan industrial terapan
	<i>APPLIED INDUSTRIAL RELATIONS</i>	<i>Staff SETPER</i>	<i>After participating in this lesson, participants are able to know applied industrial relations</i>

Selain itu, PLN Enjiniring mengimplementasikan *Knowledge Management* dalam wadah *knowledge sharing* dalam lingkungan kerja PLN Enjiniring yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin dan Rabu. Setiap materi *knowledge sharing* tersebut di-upload dalam aplikasi *Document Management (DM)* sebagai media portal *Knowledge Management*.

Diharapkan media yang sekarang ini berguna sebagai *data storage* yang dapat berkembang menjadi media yang berfungsi menjembatani kebutuhan perusahaan akan *knowledge sharing* dari enjinir senior ke junior, pimpinan ke bawahan, dan juga sebagai sarana mempermudah proses *coaching* dan *mentoring*.

In addition, PLN Enjiniring implements Knowledge Management in a knowledge sharing platform within the PLN Enjiniring work environment which is routinely carried out every Monday and Wednesday. Each knowledge sharing material is uploaded in the Document Management (DM) application as a Knowledge Management portal media.

It is hoped that the current media is useful as data storage that can develop into a media that serves to bridge the needs of companies for knowledge sharing from senior to junior engineers, leaders to subordinates, and also as a means to facilitate the coaching and mentoring process.

Employee Engagement

Employee Engagement

Pada tahun 2020, tingkat kerekatan karyawan PLN Enjiniring diukur dalam *Employee Engagement Survey* (EES) dengan metode *online survey*. Persentase *Employee Engagement Index* (EEI) tahun 2020 sebesar 70,45%, dimana angka tersebut lebih rendah dari rata-rata EEI di Indonesia, yaitu 74%. Sementara hasil EEI tahun 2019 sebesar 84,00%. Maka dapat disimpulkan bahwa pada EEI tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 13,55%.

Penurunan EEI tahun 2020 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu penghargaan kerja, lingkungan kerja dan pengembangan karir sedangkan faktor yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan terkait relasi kerja, apresiasi pengalaman kerja dan tugas & tanggung jawab yang diberikan Atasan cukup sesuai. Tantangan terbesar di tahun 2021 dalam peningkatan *engagement* karyawan, manajemen PLN Enjiniring harus memastikan kontribusi dan pencapaian karyawan diakui, manajemen menunjukkan bukti kuat mengenai kepemimpinan yang efektif, memastikan bahwa karyawan adalah aset terpenting perusahaan dan kesempatan untuk promosi dianggap adil dan transparan bagi karyawan.

In 2020, the level of stickiness of PLN Enjiniring employees is measured in the Employee Engagement Survey (EES) using the online survey method. The percentage of Employee Engagement Index (EEI) in 2020 by 70.45%, where this figure is lower than the average EEI in Indonesia, which is 74%. While the EEI 2019 result was 84.00%. It can be concluded that in EEI in 2020 there was an decrease of 13.55%.

The decrease in EEI in 2020 was due to several factors, namely work rewards, work environment and career development, while the factors that need to be maintained and improved are related to work relations, appreciation of work experience and the duties & responsibilities given by superiors are quite appropriate. The biggest challenge in 2021 to improve employee engagement, PLN Enjiniring management must ensure employee contributions and achievements are recognized, management shows strong evidence of effective leadership, ensures that employees are the company's most important asset and opportunities for promotion are considered fair and transparent to employees.



MANAJEMEN KINERJA

PLN Enjiniring melaksanakan penilaian kinerja berdasarkan Sistem Manajemen Kinerja yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 03.001.K/DIR/PLNE/VI/2019 tanggal 3 Juni 2019 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai. Tujuan ditetapkannya Sistem Manajemen Kinerja Pegawai adalah (1) terwujudnya pengukuran kinerja yang berkeadilan guna membina budaya pembelajar dan berprestasi serta memotivasi Pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan kontribusi Pegawai bagi Perusahaan, dan (2) sebagai pedoman untuk mengevaluasi kinerja Pegawai secara transparan, terukur, dan obyektif. Siklus penilaian kinerja Pegawai dilaksanakan dalam setiap 1 (satu) semester yang terdiri atas kegiatan:

PERFORMANCE MANAGEMENT

PLN Enjiniring conducts a performance appraisal based on the Performance Management System stipulated in Decision Letter of the Board of Directors No. 03.001.K / DIR / PLNE / VI / 2019 dated June 3, 2019 concerning the Employee Performance Management System. The objectives of establishing the Employee Performance Management System are (1) the realization of fair performance measurements in order to foster a culture of learners and achievement and motivate Employees to improve Employee competencies and contributions to the Company, and (2) as a guideline for evaluating Employee performance in a transparent, measurable, and objective. The employee performance appraisal cycle is carried out in every 1 (one) semester consisting of activities:



1. Perencanaan

Merupakan tahap diskusi formal antara Atasan Langsung dengan Pegawai atau yang bersangkutan, tentang rencana pekerjaan utama yang akan dilakukan pada semester tersebut.



2. Pemantauan

Pemantauan yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung terhadap kinerja Pegawai pada semester berjalan dengan cara melakukan pembinaan, bimbingan, konsultasi dan konseling serta penugasan-penugasan yang mendorong pegawai dalam pencapaian KPI.



3. Penilaian

Pelaksanaan penilaian yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung setiap akhir semester. Hasil penilaian diketahui dan divalidasi oleh Karyawan dan Atasan Langsung.

Kriteria penilaian kinerja pegawai adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Individu, adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan pemenuhan terhadap target kinerja individu Pegawai yang ditetapkan pada periode penilaian berjalan.
2. Kompetensi individu, adalah daftar kompetensi yang dimiliki oleh individu pegawai yang merupakan pemetaan dari *assessment* individu dengan menggunakan alat ukur yang telah ditentukan dengan merujuk kepada Direktori Kompetensi dan Kebutuhan Kompetensi Jabatan.
3. Kontribusi Individu yang terdiri dari:
 - a. Inovasi, yaitu inovasi alat, metode atau konsep yang memenuhi kriteria pada keputusan direksi yang berlaku.
 - b. **Knowledge Management**, adalah serangkaian langkah-langkah pengelolaan aset pengetahuan (mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan/menyebarkan pengetahuan) dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan secara berkelanjutan seperti *knowledge sharing*, *knowledge capturing* dan *community of practice*.

1. Planning

This is the formal discussion stage between the Direct Supervisor and the Employee or concerned, about the main work plan that will be carried out in the following semester.

2. Monitoring

Monitoring conducted by the Direct Supervisor on the performance of Employees in the current semester by providing guidance, guidance, consultation and counseling.

3. Rating

The assessment is carried out by the Direct Supervisor at the end of the semester. The assessment results are known and validated by Employees and Direct Supervisors.

The criteria for evaluating employee performance are as follows:

1. *Individual Targets, are assessments based on the fulfillment of the Employee's individual performance targets that are set in the current assessment period.*
2. *Individual competencies, is a list of competencies possessed by individual employees which is a mapping of individual assessments by using predetermined measurement tools by referring to the Competency Directory and Position Competency Needs.*
3. *Individual contributions consisting of:*
 - a. *Innovation, namely the innovation of tools, methods or concepts that meet the Company's innovation criteria.*
 - b. *Knowledge Management, is a series of steps for managing knowledge assets (collecting, storing, and using / disseminating knowledge) in order to continuously improve the Company's performance on an ongoing basis such as knowledge sharing, knowledge capturing and community of practice.*

Penilaian Kinerja setiap individu berdasarkan pada *Key Performance Indicator* (KPI), yaitu ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja Pegawai dalam menunjang kinerja Perusahaan yang dijabarkan dalam inisiatif strategis, ukuran kinerja, dan target. Penetapan KPI masing-masing individu Pegawai didasarkan pada KPI Perusahaan yang diturunkan ke KPI Direktorat. Dari KPI Direktorat akan diturunkan ke KPI Bidang dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penetapan KPI individu.

The performance appraisal of each individual is based on the Key Performance Indicator (KPI), which is a quantitative or qualitative measure that is used to measure the achievement of employee performance in supporting Company performance that is outlined in strategic initiatives, performance measures, and targets. The determination of the KPI for each individual employee is based on the Company's KPI which is downgraded to the Directorate's KPI. From the KPI the Directorate will be demoted to the Field KPI and subsequently used as the basis for determining individual KPIs.



KEBIJAKAN PENGHARGAAN KEPADA KARYAWAN

Kebijakan sistem penghargaan kepada Pegawai mengacu pada Peraturan Perusahaan Nomor 21.002.K/DIR/PLNE/II/2020 Pasal 19 Ayat (2) huruf d yaitu Pemberian Penghargaan, dimana bertujuan untuk mendorong profesionalisme Pegawai, memelihara dan mengembangkan motivasi dan ketenagakerjaan, memelihara dan mengembangkan kemampuan dan produktivitas kerja, dan memberikan kepastian adanya pengembangan karir Pegawai, memberikan kesempatan pengembangan karir Pegawai.

EMPLOYEE POLICY TO EMPLOYEES

The reward system policy for Employees refers to Decision Letter of the Board of Directors No. 21.002.K / DIR / PLNE / II / 2020 Article 19 Paragraph (2) letter d, concerning awarding, which aims to encourage employee professionalism, maintain and develop motivation and employment, maintain and develop work ability and productivity, and provide certainty for employee career development, provide opportunities for employee career development.

Penghargaan yang diberikan oleh PLN Enjiniring terdiri dari dua jenis, yaitu penghargaan ekstrinsik dan intrinsik. Penghargaan ekstrinsik diberikan kepada Pegawai dalam bentuk kompensasi dan manfaat. Kompensasi terdiri dari (1) kompensasi tetap bulanan (*Pay for Person – P1*), (2) tunjangan posisi (*Pay for Position – P2*), tunjangan prestasi (*Pay for Performance – P3*), tunjangan hari raya, cuti tahunan, cuti besar, bantuan ganti rugi, dan jaminan sosial pegawai, (3) imbal jasa dalam bentuk bonus kinerja, (4) penghargaan kesetiaan kerja. Manfaat terdiri dari (1) manfaat umum, antara lain pemeliharaan kesehatan, hak cuti, pakaian dinas, bantuan penggantian fasilitas perumahan, bantuan pinjaman pemilikan rumah, dan program pensiun, serta (2) manfaat khusus, antara lain bantuan pemilikan kendaraan, alat komunikasi, laptop, dan fasilitas kerja.

*Awards given by PLN Enjiniring are of two types, namely extrinsic and intrinsic awards. Extrinsic awards are given to employees in the form of compensation and benefits. Compensation consists of (1) monthly fixed compensation (*Pay for Person - P1*), (2) position allowance (*Pay for Position - P2*), performance allowance (*Pay for Performance - P3*), holiday allowance, annual leave, large leave, compensation assistance, and employee social security, (3) remuneration in the form of performance bonuses, (4) work loyalty awards. Benefits consist of (1) general benefits, including health care, leave entitlements, official clothing, housing facility replacement assistance, housing loan assistance, and pension programs, and (2) special benefits, including vehicle ownership assistance, communication tools, laptops, and work facilities.*

Penghargaan intrinsik diberikan kepada Pegawai dalam bentuk

1. Program pendidikan formal dan sertifikasi profesi, yang diberikan bagi Pegawai yang memenuhi persyaratan kriteria talenta tertentu,
2. Fasilitas kerja khusus, yang diberikan atas dasar kontribusi dan/atau pencapaian inovasi yang memberikan keuntungan bagi Perusahaan dalam bentuk efisiensi biaya dan/atau peningkatan pendapatan,
3. Program keseimbangan khusus, yang diberikan atas dasar efisiensi biaya kesehatan pribadi dan keluarga dan/atau pencapaian loyalitas kerja Pegawai,
4. Bantuan hukum, yang diberikan dalam bentuk pembelaan atas tuntutan hukum terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan,
5. Pengakuan, yang diberikan atas dasar penghargaan Direksi.

Intrinsic awards are given to employees in the form of

1. *Formal education and professional certification programs, which are provided for employees who meet certain talent criteria requirements,*
2. *Special work facilities, which are provided on the basis of contributions and / or achievement of innovations that benefit the Company in the form of cost efficiency and / or increased revenue,*
3. *Special balance program, which is given on the basis of cost efficiency of personal and family health and / or achievement of employee work loyalty,*
4. *Legal assistance, which is given in the form of defense of lawsuits related to the implementation of duties and responsibilities of the position,*
5. *Recognition, which is given on the basis of the Directors' award.*

FASILITAS KESEHATAN

Fasilitas pemeliharaan kesehatan adalah bagian dari penghargaan ekstrinsik yang masuk dalam kategori manfaat umum. PLN Enjiniring memberikan bantuan pemeliharaan kesehatan kepada Pegawai dan keluarganya diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 01.001.K/DIR/PLNE/XI/2020 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pegawai dan Keluarga yang Ditanggung PT PLN Enjiniring. Bentuk pemeliharaan kesehatan yang ditanggung Perusahaan terdiri dari:

- a) Rawat jalan,
- b) Rawat inap,
- c) Pemeriksaan penunjang atas rekomendasi dokter untuk peneguhan diagnosa di laboratorium,
- d) Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan sampai dengan anak ketiga,
- e) Gugur kandung,
- f) Perawatan di Unit Gawat Darurat (UGD),
- g) Program Keluarga Berencana (KB), imunisasi dan vaksinasi, khitan, pengobatan infertilitasi dan program bayi tabung,

HEALTH FACILITIES

Health care facilities are part of extrinsic awards that fall into the general benefit category. PLN Enjiniring to provide health care assistance to employees and their families is regulated in Decision Letter of the Board of Directors No. 01.001.K / DIR / PLNE / XI / 2020 concerning the Implementation of Health Care for Employees and Families Covered by PT PLN Enjiniring. Forms of health care borne by the Company consist of:

- a) *Outpatient,*
- b) *Inpatient,*
- c) *Supporting examinations on the doctor's recommendation for confirmation of the diagnosis in the laboratory,*
- d) *Pregnancy examinations and assistance with childbirth up to the third child,*
- e) *Biological death,*
- f) *Care in the Emergency Unit (UGD),*
- g) *Family Planning Program (KB), immunization and vaccination, circumcision, infertilization treatment and IVF program,*

- h) Perawatan gigi,
- i) Alat-alat rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi alat tubuh,
- j) Alat-alat cangkok/transplantasi,
- k) Alat-alat kesehatan terkait jantung,
- l) Obat untuk penyembuhan sesuai dengan formularium obat dan Daftar Obat Perusahaan (DOP),
- m) Tindakan bedah plastik khusus akibat kecelakaan kerja,
- n) Terapi kejiwaan,

- h) Dental care,
- i) Rehabilitation tools to restore the function of organs,
- j) Graft / transplant tools,
- k) Heart related medical devices,
- l) Medicines for healing in accordance with the drug formulary and the Company Drug List (DOP),
- m) Special plastic surgery due to occupational accidents,
- n) Psychiatric therapy,



PROGRAM PENSIUN

PLN Enjiniring mengatur Program Pensiun Pegawai dalam Keputusan Direksi No. 01.001.K/DIR/PLNE/IX/2017. Usia pensiun untuk seluruh Pegawai PLN Enjiniring adalah 56 tahun. Bagi Pegawai yang telah berusia 55 tahun dapat mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP). Untuk mempersiapkan Pegawai yang memasuki masa MPP tersebut, PLN Enjiniring memberikan pelatihan purna bakti. Diharapkan dengan bekal pelatihan ini, Pegawai dapat mempersiapkan diri di masa pensiun. Sementara itu, bagi Pegawai yang telah memasuki usia purna bakti diberikan kompensasi. Pegawai diikutsertakan dalam Program Jaminan Hari Tua (JHT), yaitu Kompensasi Jaminan Hari Tua sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku dan PSAK 24. Kompensasi yang diberikan oleh Perusahaan mengacu pada Peraturan Perusahaan Nomor 21.002.K/DIR/PLNE/II/2020 Bab XI Pasal 50 tentang Penghargaan Pensiun.

Bagi Pegawai tugas karya dari PT PLN (Persero), ketentuan pensiun mengacu pada ketentuan yang berlaku pada PT PLN (Persero). PT PLN (Persero) menanggung liabilitas imbalan pasca kerja meliputi imbalan pensiun lain berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian, tunjangan tambahan penghasilan, dan penghargaan purna jabatan, dan pemeliharaan kesehatan, serta menyediakan program dana pensiun imbalan pasti bagi Pegawai yang diperbantukan. Program dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN (Persero). Selama Pegawai diperbantukan bekerja

RETIREMENT PROGRAM

PLN Enjiniring regulates the Employee Pension Program in Decision Letter of the Board of Directors No. 01.001.K / DIR / PLNE / IX / 2017. The retirement age for all PLN Enjiniring Employees is 56 years. Employees who are 55 years old can take the Retirement Preparation Period (MPP). To prepare for the Employees entering the MPP period, PLN Enjiniring provides after-service training. It is expected that with the provision of this training, employees can prepare themselves in retirement. Meanwhile, employees who have entered retirement age are compensated. Employees are included in the Old Age Insurance Program (JHT), which is Old Age Insurance Compensation in accordance with applicable Labor Law and PSAK 24. The compensation provided by the Company refers to Company Regulation Number 21.002.K/DIR/PLNE/II/2020 Chapter XI Article 50 concerning Pension Awards.

For employees of work assignments from PT PLN (Persero), the pension provision refers to the provisions that apply to PT PLN (Persero). PT PLN (Persero) bears post-employment benefits liabilities including other pension benefits in the form of severance pay, long service awards and compensation, additional income allowances, and post-service awards, and health care, as well as providing a defined benefit pension plan for seconded employees. This pension program is managed by the PLN (Persero) Pension Fund. As long as an employee is employed to work at PLN Enjiniring, the

di PLN Enjiniring, Perusahaan wajib membayar iuran program pensiun kepada PT PLN (Persero) berdasarkan keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 332.K/010/DIR/2003. Iuran yang dibayar Perusahaan diakui sebagai beban pada tahun berjalan, karena Perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut.

Company is obliged to pay pension plan contributions to PT PLN (Persero) based on the decision letter of the Board of Directors of PT PLN (Persero) No. 332.K / 010 / DIR / 2003. Contributions paid by the Company are recognized as expenses in the current year, because the Company has no legal or constructive obligation to pay further contributions.

PENGELOLAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PLN Enjiniring senantiasa berkomitmen untuk memelihara hubungan industrial yang baik antara karyawan dengan manajemen serta menghormati hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan organisasi diwujudkan dengan penyaluran aspirasi karyawan yang baik dan sesuai dengan etika. Media komunikasi yang dapat digunakan untuk menyalurkan aspirasi karyawan tersebut berupa forum komunikasi yang diadakan pada dalam peringatan acara-acara Perusahaan, hari besar kenegaraan dan keagamaan.

MANAGEMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS

PLN Enjiniring is always committed to maintaining good industrial relations between employees and management and respecting the rights and obligations of employees in accordance with applicable laws and regulations. Organizational freedom is realized by channeling the aspirations of good employees and in accordance with ethics. Communication media that can be used to channel employee aspirations are in the form of a communication forum held in commemoration of Company events, state and religious holidays.

PLN Enjiniring telah memiliki Serikat Pekerja yang terbentuk pada tanggal 29 Januari 2020, dimana beberapa Pegawai PLN Enjiniring membentuk sebuah Serikat Pekerja dengan nama Persatuan Pekerja Prima Enjiniring (P3E) dan telah dicatat dalam Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 3027/-1.838 tanggal 10 November 2020.

PLN Enjiniring already has a Workers Union which was formed on January 29, 2020, where several PLN Engineering employees formed a Workers Union with the name Persatuan Pekerja Prima Enjiniring (P3E) and has been recorded in the Decree of the Head of the Manpower and Transmigration Sub-Department of West Jakarta Administration Number 3027 /-1,838 on November 10, 2020.

PLN Enjiniring memiliki komitmen untuk menciptakan kondisi yang sehat dan serasi sekaligus terciptanya ketenangan kerja sesuai dengan azas hubungan industrial. Tidak pernah terjadi pemogokan kerja, demonstrasi atau gangguan lainnya, yang menghentikan kegiatan operasional PLN Enjiniring maupun gugatan terkait peradilan hubungan industrial. Hal ini dikarenakan adanya pemahaman dan saling pengertian yang baik antara manajemen PLN Enjiniring dengan karyawan sebagai mitra yang saling mendukung satu sama lain.

PLN Enjiniring has a commitment to create healthy and harmonious conditions while at the same time creating work peace in accordance with the principles of industrial relations. There were never any strikes, demonstrations or other disturbances, which stopped the PLN Enjiniring operational activities or lawsuits related to industrial relations justice. This is due to a good understanding and mutual understanding between PLN Enjiniring management and employees as partners who support each other.

SURVEI BUDAYA

Rancangan Program dan Sasaran Budaya Perusahaan dirumuskan dalam Roadmap Penguatan Budaya Perusahaan Tahun 2020-2024 yang telah disusun mengacu kepada Visi maupun Aspirasi PLN Group 2024. Implementasi Program Budaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 difokuskan pada Tata Nilai AKLAK, yaitu tata nilai yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN dan diselaraskan ke perusahaan BUMN. Untuk mendorong komunikasi dan internalisasi implementasi Budaya, ditetapkan Ranger Budaya Perusahaan yang merupakan gabungan pejabat struktural dan fungsional. Dalam mengevaluasi kegiatan budaya dilakukan metode survei lewat kuisioner serta survei tanya jawab/diskusi melalui site visit yang dilakukan secara online. PLN Pusat sebagai pengelola program budaya perusahaan akan mengevaluasi dan memantau progress dan menilai implementasi di PLN Enjiniring. Site Visit ke-3 yang terakhir kali dilakukan pada bulan Juni 2021, PLN Enjiniring mendapatkan hasil exceeding artinya passing grade penilaian budaya PLN Enjiniring pada kategori angka 66-80. Hasil tersebut menunjukkan masih terdapat beberapa faktor yang harus ditingkatkan dalam implementasi budaya tersebut.

KESIMPULAN HASIL SURVEI

Dari hasil analisis melalui *site visit* dan survei yang dilakukan PLN Pusat, terdapat kekuatan, perbaikan dan faktor program budaya PLN Enjiniring, sebagai berikut :

Hal-hal yang harus dipertahankan dan menjadi kekuatan Program Budaya PLN Enjiniring :

1. Implementasi program PLN 1, 2 dan 3 sudah berjalan dengan baik, karena telah melibatkan seluruh unsur Pegawai yang dilakukan secara rutin dan konsisten. Keterlibatan *Ranger Master*, *Ranger Leader* dan *Ranger* menjadi kunci dalam implementasi program *Stop Start Continue Behaviour*,

CULTURAL SURVEY

The Program Design and Corporate Culture Goals are formulated in the Roadmap for Strengthening Corporate Culture for the Year 2020-2024 which has been prepared referring to the Vision and Aspirations of the PLN Group 2024. The implementation of the Cultural Program that has been implemented in 2020 is focused on the AKLAK Values, namely the values that have been set by the Ministry of SOEs and aligned to state-owned companies. To encourage communication and internalization of the implementation of Culture, a Corporate Culture Ranger is appointed which is a combination of structural and functional officials. In evaluating cultural activities, a survey method was carried out through questionnaires and a question and answer survey/discussion through site visits conducted online. PLN Central as the manager of the corporate culture program will evaluate and monitor progress and assess implementation at PLN Engineering. The 3rd Site Visit which was last carried out in June 2021, PLN Engineering received exceeding results, meaning that the passing grade of PLN Engineering's cultural assessment was in category numbers 66-80. These results indicate that there are still several factors that must be improved in the implementation of the culture.

CONCLUSION OF SURVEY RESULTS

From the results of the analysis through site visits and surveys conducted by PLN, there are strengths, improvements and factors for the PLN Engineering cultural program, as follows:

Things that must be maintained and become strengths of the PLN Engineering Culture Program:

1. *The implementation of the PLN 1, 2 and 3 programs has been going well, because it has involved all elements of the employee which is carried out regularly and consistently. The involvement of the Ranger Master, Ranger Leader and Ranger is the key in implementing the Stop Start Continue Behavior program,*





2. Pemetaan *Fraud* dan mitigasi risiko sudah dilaksanakan dan telah dilakukan inisiatif-inisiatif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko *fraud* dan dampak risiko *fraud* diantaranya dengan mengimplementasikan *E-Procurement*,
3. Secara umum insan PLN Enjiniring telah mengetahui tata nilai AKHLAK serta menjadi pedoman dalam perilaku di aktivitas maupun pekerjaan sehari-hari.

Hal-hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki dalam Program Budaya PLN Enjiniring:

1. Diharapkan metode *enforcement/dukungan* yang sudah berjalan dengan baik agar tetap dapat secara konsisten dilaksanakan untuk mengawal dan menjaga jalannya program PLN 1,2 dan 3 serta peran *leader* menjadi prioritas utama untuk tetap dapat memastikan program tetap *sustain* dan berjalan dengan baik,
2. Tetap konsisten melakukan *refreshment program* yang diluar kebiasaan sehingga diharapkan dari kegiatan kegiatan tersebut bisa didapatkan perspektif baru,
3. Untuk menjaga keberlanjutan program penguatan, perlu dilakukan pembinaan yang terstruktur untuk mempersiapkan kandidat *ranger* yang akan menjadi *ranger* dan perlu ditentukan target penambahan jumlah *ranger* setiap tahun untuk memastikan estafet *ranger* berjalan dengan lancar,
4. Untuk meningkatkan evaluasi efektivitas program budaya, perlu dilaksanakan pengukuran dampak program khususnya terhadap perubahan perilaku yang sesuai dengan sasaran perilaku yang ditetapkan pada masing-masing program,
5. Birokrasi yang masih berbelit dan hirarki yang panjang mengakibatkan pengambilan keputusan yang lama,
6. Perlunya transparansi dalam aturan-aturan perusahaan.

2. *Fraud mapping* and risk mitigation have been implemented and initiatives have been taken to reduce the possibility of fraud risk and the impact of fraud risk, including by implementing *E-Procurement*,
3. In general, PLN Enjiniring employee already know the AKHLAK values and serve as guidelines for behavior in daily activities and work.

Things that need to be improved and improved in the PLN Engineering Culture Program:

1. It is hoped that the *enforcement/support* method that has been running well can continue to be consistently implemented to oversee and maintain the running of the PLN 1,2 and 3 programs and the role of the leader becomes a top priority to ensure that the program remains sustainable and runs well,
2. Continue to consistently carry out *refreshment* programs that are out of the ordinary so that it is hoped that from these activities new perspectives can be obtained,
3. To maintain the sustainability of the strengthening program, it is necessary to carry out structured coaching to prepare *ranger* candidates who will become *rangers* and it is necessary to determine a target for increasing the number of *rangers* every year to ensure the *ranger relay* runs smoothly,
4. To improve the evaluation of the effectiveness of cultural programs, it is necessary to measure the impact of the program, especially on behavior change in accordance with the behavioral targets set in each program,
5. The bureaucracy is still convoluted and the long hierarchy results in long decision making,
6. The need for transparency in company rules.

PEMBINAAN KOMPETENSI DAN KARIR

Pegawai diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk kinerja yang optimal. Sedangkan, Perusahaan wajib memberikan pembinaan dalam hal pengembangan kompetensi dan karir bagi Pegawai, dalam rangka memelihara dan memotivasi Pegawai untuk berkontribusi lebih dalam kinerja individu. Dalam hal ini, PLN Enjiniring telah memiliki ketentuan dalam Keputusan Direksi No. 05.001.K/DIR/PLNE/XII/2014 tentang Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir.

Pembinaan kompetensi terdiri dari pembinaan level kompetensi dan pembinaan *grade*. Level kompetensi didasarkan pada bidang keilmuan, pengalaman, dan/ atau kemampuan Pegawai dalam mengembangkan kompetensi sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Setiap level kompetensi terdiri dari beberapa *grade* yang menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi individu pada level kompetensi tertentu. Level kompetensi dan *grade* melekat pada Pegawai, bukan pada Jabatan.

Pembinaan karir terdiri dari pembinaan profesi dan pembinaan jabatan. Profesi adalah mengacu pada ketentuan tentang pohon profesi atau nama profesi, dimana belum diterapkan di PLN Enjiniring. Sedangkan jabatan terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional, dimana pembinaannya terdiri dari promosi, rotasi, dan demosi.

Promosi jabatan merupakan alih tugas dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang memiliki persyaratan Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) dan level kompetensi yang lebih tinggi. Rotasi jabatan merupakan alih tugas dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang memiliki persyaratan Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) dan level kompetensi yang sama. Demosi merupakan alih tugas dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang memiliki persyaratan Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) dan level kompetensi yang lebih rendah. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pegawai yang memenuhi persyaratan pembinaan jabatan.

DEVELOPMENT OF COMPETENCY AND CAREER

Employees are expected to contribute in the form of optimal performance. Meanwhile, the Company is required to provide guidance in terms of competency and career development for employees, in order to maintain and motivate employees to contribute more in individual performance. In this case, PLN Enjiniring has the provisions in Decision Letter of the Board of Directors No. 05.001.K / DIR / PLNE / XII / 2014 concerning Competency and Career Development Systems.

Competency development consists of competency level and grade development. The competency level is based on the field of science, experience, and / or the ability of employees to develop competencies in accordance with job requirements. Each competency level consists of several grades that indicate the level of mastery of individual competencies at a certain level of competency. The level of competency and grade is inherent in the Employee, not the Position.

Career development consists of professional development and position development. Profession is referring to the provisions regarding the professional tree or the profession name, which has not been applied in PLN Enjiniring. While the position consists of structural positions and functional positions, where the development consists of promotion, rotation, and demotion.

Job promotion is a transfer of duties from one position to another that has the requirements of the Position Competency Requirement (KKJ) and a higher level of competency. Position rotation is a transfer of duties from one position to another that has the requirements of the Position Competency Requirement (KKJ) and the same level of competency. Demotion is a shift of assignment from one position to another that has a requirement of Position Competency Requirement (KKJ) and a lower level of competency. The company provides equal opportunities for all employees who meet the requirements for coaching positions.



PROFIL KARYAWAN

EMPLOYEE PROFILE



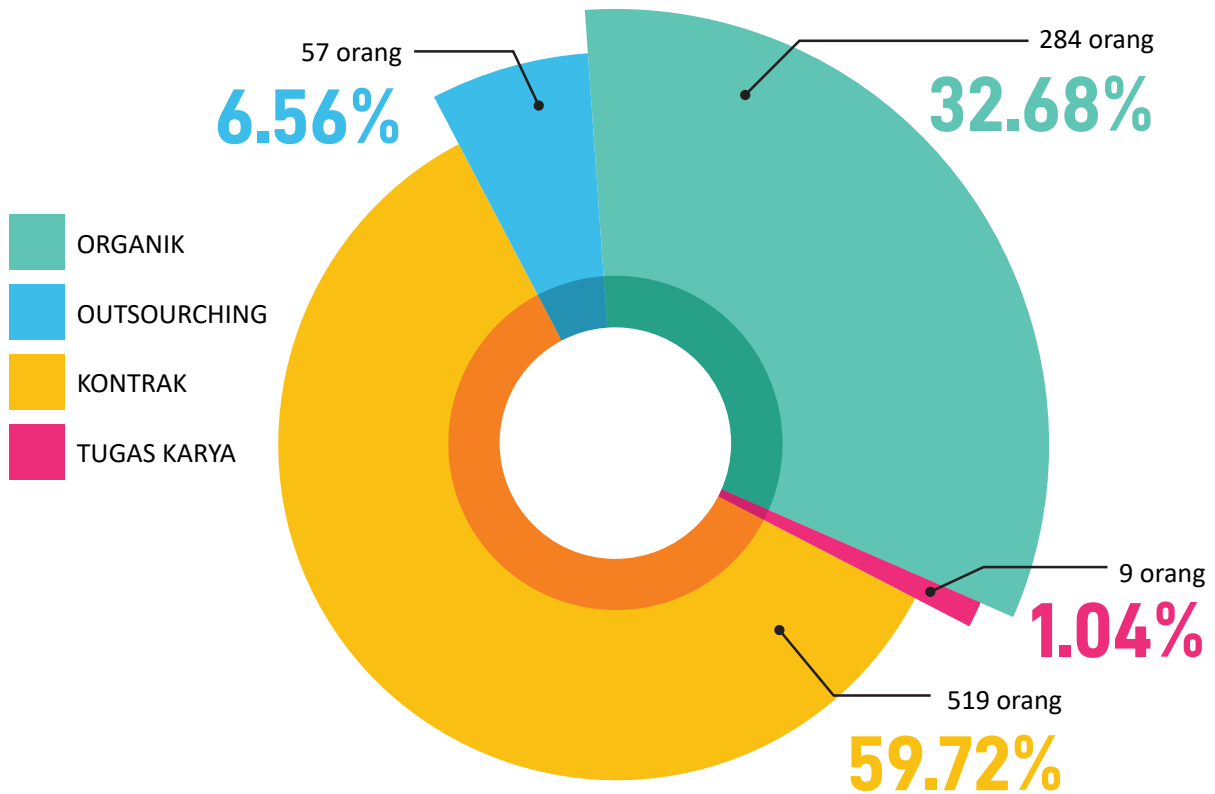
Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Employee Composition Based on Civil Service Status

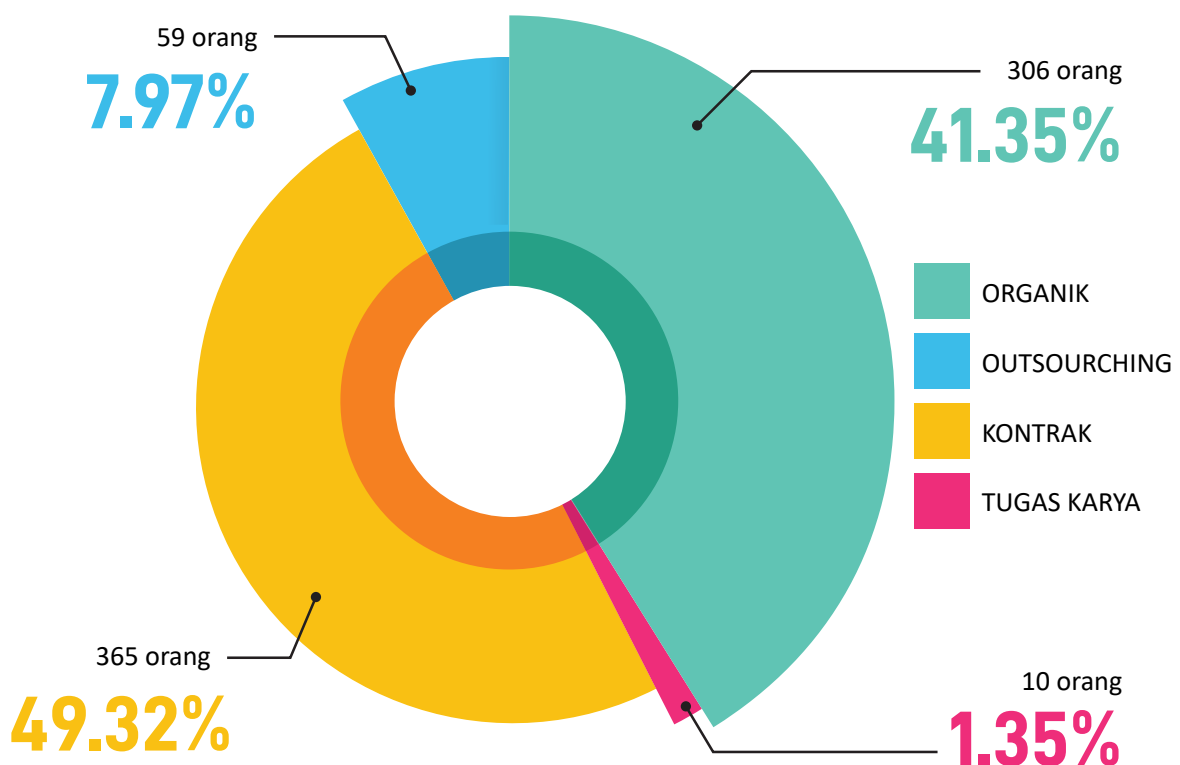
TABEL KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN
TABLE OF EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON CIVIL SERVICE STATUS

No	Status Kepegawaian <i>Employment Status</i>	Jumlah Pegawai <i>Number of Employees</i>		Perubahan (orang) <i>Change (Person)</i>	Perubahan (%) <i>Change (%)</i>
		Tahun 2020 (orang) (%)	Tahun 2019 (orang) (%)		
		<i>Year 2020 (Person) (%)</i>	<i>Year 2019 (Person) (%)</i>		
	Karyawan Tetap terdiri atas : <i>Permanent employees consist of :</i>				
1	a. Organik <i>a. Organic</i>	306 41.35%	284 32.68%	22	7.75
	b. Tugas Karya <i>b. Work Assignments</i>	10 1.35%	9 1.04%	1	11.11
2	Karyawan Tidak Tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/Kontrak) <i>Certain Period Employment Contract/Contract</i>	365 49.32%	519 59.72%	-154	-29.67
3	Tenaga Alih Daya <i>Outsourcing</i>	59 7.97%	57 6.56%	2	3.51
	TOTAL	740 100%	869 100%	223	25.03

GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN TAHUN 2019
 GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON CIVIL SERVICE STATUS IN 2019



GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN TAHUN 2020
 GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON CIVIL SERVICE STATUS IN 2020





Sumber Daya Manusia Human Resources

Komposisi karyawan PLN Enjiniring berdasarkan status kepegawaian didominasi oleh karyawan kontrak (PKWT), diikuti oleh pegawai organik, karyawan *outsourcing*, dan pegawai tugas karya. Pada 2020, komposisi karyawan kontrak (PKWT) sebesar 49,32%, pegawai organik sebesar 41,35%, karyawan *outsourcing* sebesar 7,97%, dan pegawai tugas karya sebesar 1,35%. Besarnya dominasi karyawan kontrak di PLN Enjiniring disebabkan oleh proses bisnis perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan enjiniring dan supervisi konstruksi, sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja ahli sangat tinggi, yang berbasis pada proyek, tetapi masa kerjanya tertentu. Hal ini dilakukan sebagai strategi perusahaan dalam mengefisienkan biaya kepegawaian dengan tidak memelihara tenaga kerja yang digunakan pada masa tertentu saja.

Pada tahun 2020, jumlah pegawai dengan status PKWT dan *outsourcing* mengalami penurunan karena mengundurkan diri dan habis masa kontrak proyeknya. Sementara Tugas Karya mengalami kenaikan karena adanya penambahan Tugas Karya untuk mengisi formasi tenaga kerja yang kosong. Sedangkan pegawai organik mengalami kenaikan dikarenakan adanya pengangkatan siswa OJT menjadi pegawai organik di awal tahun 2020 dengan tujuan menggantikan peran karyawan PKWT dan sesuai dalam batasan RKAP 2020.

The composition of PLN Enjiniring employees based on employment status is dominated by contract employees (PKWT), followed by organic employees, outsourcing employees, and work assignments. In 2020, the composition of contract employees (PKWT) by 49.32%, organic employees by 41.35%, outsourcing employees by 7.97% and work assignments by 1.35%. The large dominance of contract employees in PLN Enjiniring caused by the company's business processes that engaged in engineering consulting services and construction supervision, so that the need for skilled workers is very high, based on the project, but a certain working period. This is conducted as a corporate strategy in streamlining staffing costs by not maintaining the workforce that is used only at certain times.

In 2020, the number of employees with contract employees (PKWT) and outsourcing status has decreased due to resignation and end of contract. While PLN organic employee duties increased due to addition of PLN organic employee duties to fill vacant workforce formations. While organic employees have increased due to the appointment of OJT students to become organic employees in early 2020 with the aim of replacing the role of PKWT employees and in line with the 2020 RKAP limits.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan Organisasi

Employee Composition Based on Organization Position Levels

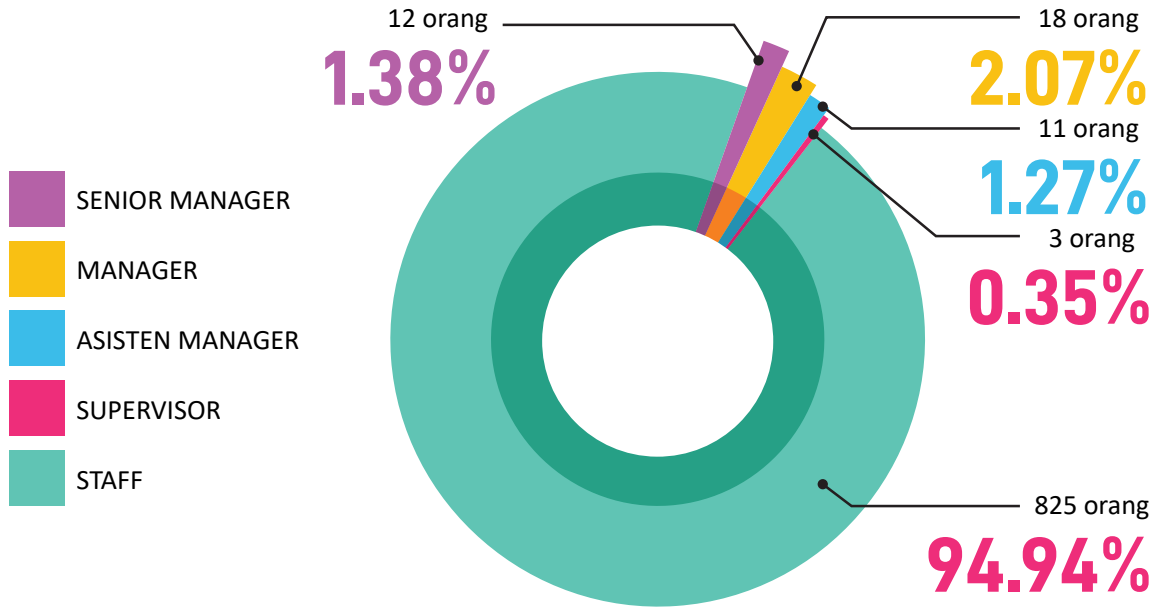


TABEL KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL JABATAN ORGANISASI
TABLE OF EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON ORGANIZATION POSITION LEVELS

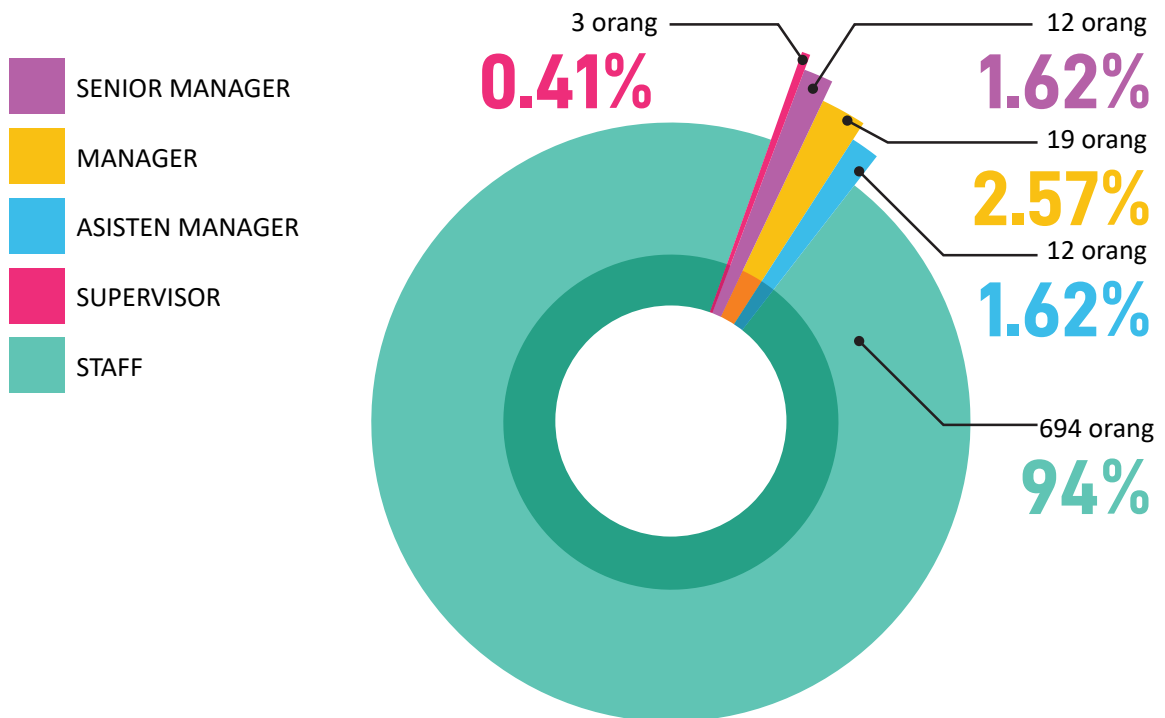
Level Jabatan Organisasi <i>Organizational Position Level</i>	Jumlah Pegawai Number of Employees				Perubahan (orang)	Perubahan (%)
	Tahun 2020 (orang) (%)		Tahun 2019 (orang) (%)		Change (Person)	Change (%)
	Year 2020 (Person) (%)	Year 2019 (Person) (%)	Year 2019 (Person) (%)	Year 2019 (Person) (%)		
Senior Manager	12	1.62	12	1.38	0	0.00
Manager	19	2.57	18	2.07	1	5.56
Asst. Manager	12	1.62	11	1.27	1	9.09
Supervisor	3	0.41	3	0.35	0	0.00
Staff	694	93.78	825	94.94	-131	-15.88
TOTAL	740	100	869	100	-129	-1.23



GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL JABATAN ORGANISASI TAHUN 2019
GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON ORGANIZATIONAL POSITION LEVEL IN 2019



GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL JABATAN ORGANISASI TAHUN 2020
GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON ORGANIZATIONAL POSITION LEVEL IN 2020



Komposisi karyawan PLN Enjiniring berdasarkan level organisasi didominasi oleh level staf yaitu sebesar 94%, selanjutnya diikuti level *manager* sebesar 2,57%, *senior manager* sebesar 1,62%, *assistant manager* sebesar 1,62%, dan *supervisor* 0,41%. Pada tahun 2020, terdapat penambahan masing-masing 1 orang pada jabatan *manager* dan *assistant manager*. Terdapat pengurangan jumlah karyawan pada level *staff* sebesar 131 orang, yaitu karyawan PKWT, karena selesainya masa kontrak proyek dan disubstitusi oleh pegawai organik untuk pekerjaan enjiniring dan supervisi konstruksi di sepanjang tahun 2020.

The composition of PLN Enjiniring employees based on organizational level is dominated by staff level which is 94%, followed by manager level of 2.57%, senior manager of 1.62%, assistant manager of 1.62%, and supervisor of 0.41%. In 2020, there are increases, one person each in the position of manager and assistant manager. Meanwhile, there was reduction in the number of employees at the staff level of 131 people, namely PKWT employees due to the completion of the project contract period and being substituted by organic employees for engineering work and construction supervision work throughout 2020.



Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Pendidikan

Employee Composition Based on Education Level



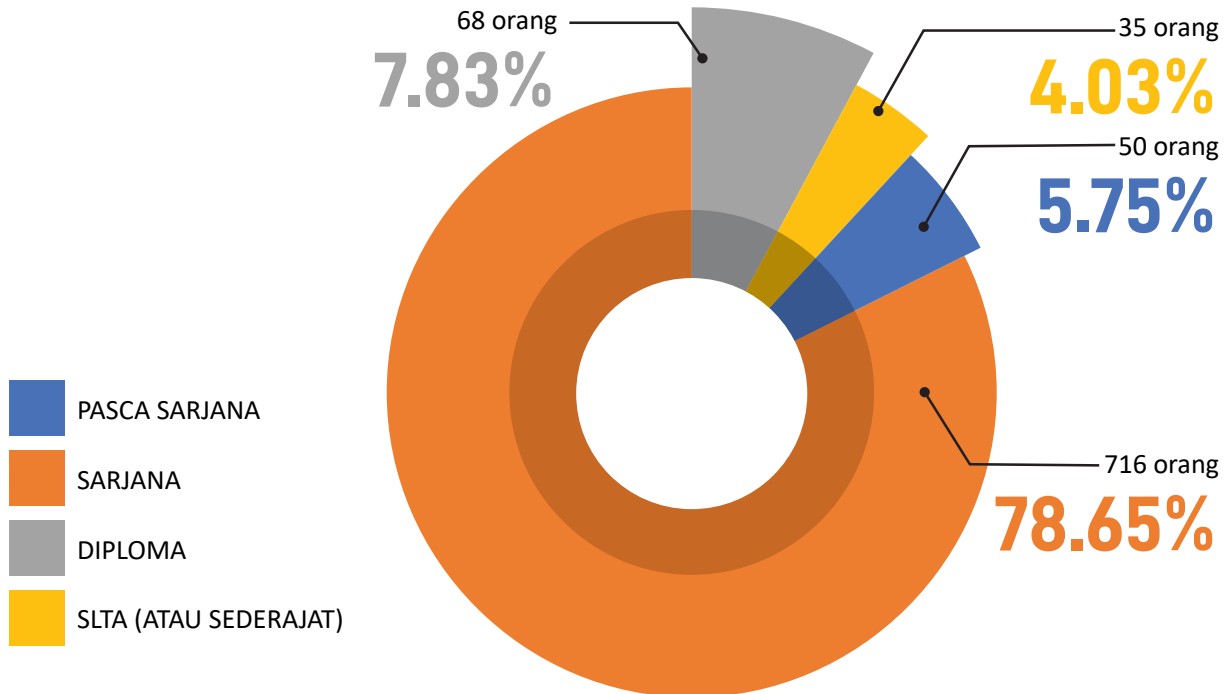
TABEL KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL PENDIDIKAN

TABLE OF EMPLOYEE COMPOSITION BY EDUCATION LEVEL

Level Pendidikan <i>Education Level</i>	Jumlah Pegawai <i>Number of Employees</i>				Perubahan (orang) <i>Change (Person)</i>	Perubahan (%) <i>Change (%)</i>
	Tahun 2020 (orang) (%)		Tahun 2019 (orang) (%)			
	<i>Year 2020 (Person) (%)</i>		<i>Year 2019 (Person) (%)</i>			
Pasca Sarjana <i>Postgraduate</i>	45	6.08	50	5.75	-5	-10.00
Sarjana <i>Bachelor</i>	582	78.65	716	82.39	-134	-18.72
Diploma <i>Diploma</i>	73	9.86	68	7.83	5	7.35
SLTA (atau sederajat) <i>High School (or equivalent)</i>	40	5.41	35	4.03	5	14.29
TOTAL	740	100	869	100	-129	-7.08

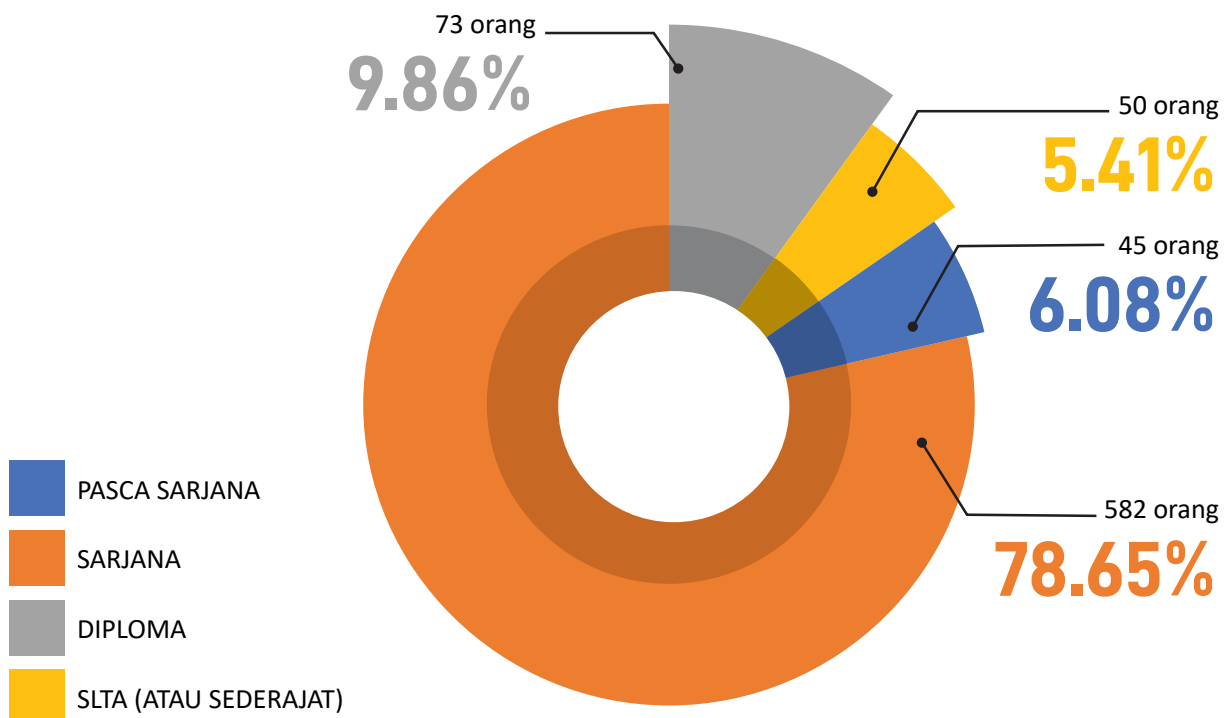
GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL PENDIDIKAN TAHUN 2019

GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BY EDUCATION LEVEL IN 2019



GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL PENDIDIKAN TAHUN 2020

GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BY EDUCATION LEVEL IN 2020



Komposisi karyawan PLN Enjiniring berdasarkan level pendidikan didominasi oleh karyawan dengan level pendidikan sarjana, yaitu berjumlah 78,65%, selanjutnya level diploma sebesar 9,86%, level pasca sarjana sebesar 6,08%, level pendidikan SLTA (seederajat) sebesar 5,41%. Jumlah tenaga kerja di seluruh level pendidikan mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2019 dikarenakan perubahan komposisi karyawan mulai dari Tugas Karya, karyawan kontrak (PKWT), sampai dengan outsourcing.

The composition of PLN Enjiniring employees based on the level of education is dominated by employees with an undergraduate level of education by 78.65%, followed by a diploma level of 9.86%, a postgraduate level of 6.08%, and a high school level (equivalent) of 5.41%. The number of workers in all levels of education has changed compared to 2020 due to changes in the composition of employees ranging from Work Assignment, contract employees (PKWT) to outsourcing.



Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Employee Composition by Age



TABEL KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN USIA

TABLE OF EMPLOYEE COMPOSITION BY AGE

Usia Age	Jumlah Pegawai Number of Employees		Perubahan (orang) Change (Person)	Perubahan (%) Change (%)
	Tahun 2020 (orang) (%) Year 2020 (Person) (%)	Tahun 2019 (orang) (%) Year 2019 (Person) (%)		
≤ 25 tahun ≤ 25 years	106	14.32	222	25.55
26 - 35 tahun 26 - 35 years	308	41.62	267	30.72
36 - 45 tahun 36 - 45 years	158	21.35	178	20.48
46 - 56 tahun 46 - 56 years	91	12.30	115	13.23
≥ 57 tahun ≥ 57 years	77	10.41	87	10.01
TOTAL	740	100	869	100
			-129	-80.50

Komposisi karyawan PLN Enjiniring berdasarkan usia, paling banyak berada pada usia produktif yaitu 26-35 tahun sebesar 41,62%, selanjutnya diikuti oleh kelompok usia 36-45 tahun sebesar 21,35%, kelompok usia di bawah 25 tahun sebesar 14,32%, kelompok usia 46-56 tahun sebesar 12,30%, dan terakhir kelompok usia di atas 56 tahun yaitu sebesar 10,41%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi sedikit peningkatan jumlah dan persentase pada kelompok usia produktif 26-35 tahun. Sementara yang lainnya terjadi penurunan jumlah pada seluruh kelompok usia, mulai di bawah 25 tahun sampai dengan di atas 56 tahun.

The composition of PLN Enjiniring employees based on age, most are in the productive age of 26-35 years by 32%, followed by the age group 36-45 years by 21.35%, followed by the age group under 25 years by 14.32%, the age group 46-56 years by 12.30%, and finally the age group above 56 years that is equal to 10.41%.

Compared to the previous year, there was a slight increase in the percentage of the productive age group, ranging from 26 to 35 years, by 0.94%. While on the other hand, there was a slight decrease in age group under 25 years until above 56 years.

Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender

Employee Composition by Gender

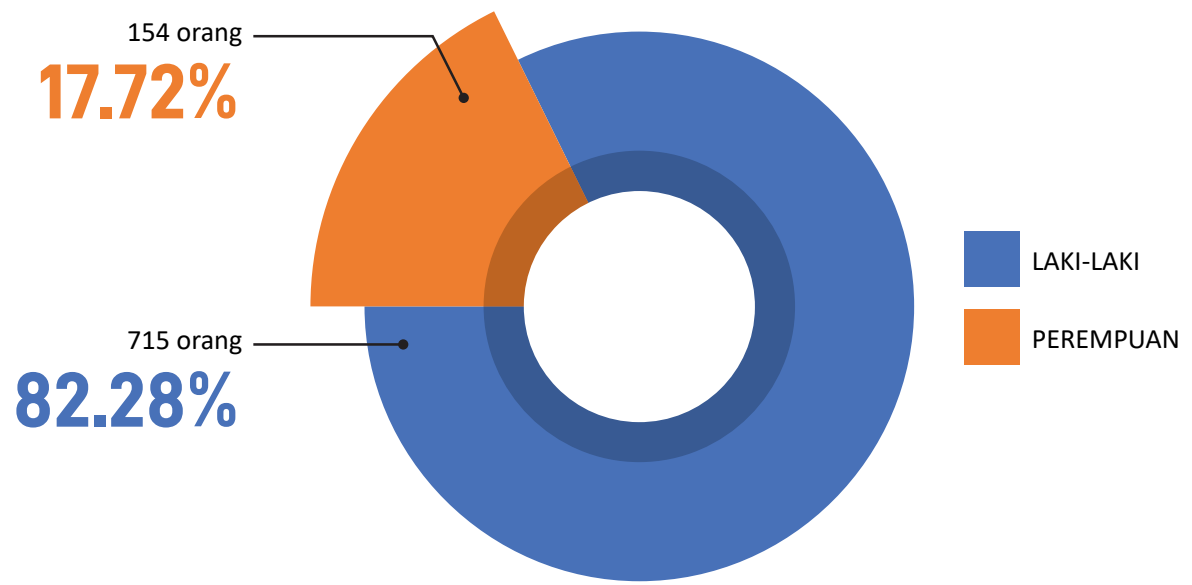


TABEL KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN GENDER

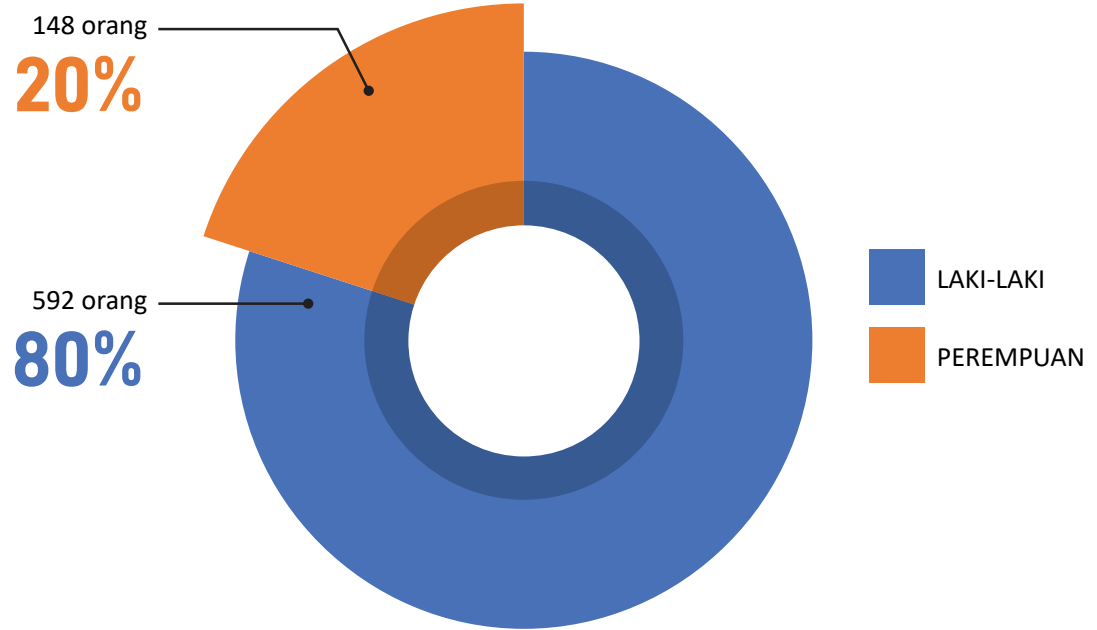
TABLE OF EMPLOYEE COMPOSITION BY GENDER

Jenis Kelamin Gender	Jumlah Pegawai Number of Employees				Perubahan (orang) Change (Person)	Perubahan (%) Change (%)
	Tahun 2020 (orang) (%)	Tahun 2019 (orang) (%)				
	Year 2019 (Person) (%)	Year 2019 (Person) (%)				
Laki-laki Male	592	80.00	715	82.28	-123	-17.20
Perempuan Female	148	20.00	154	17.72	-6	-3.90
TOTAL	740	100.00	869	100	223	-21.10

GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN GENDER TAHUN 2019
GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BY GENDER IN 2019



GRAFIK KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN GENDER TAHUN 2020
GRAPH OF EMPLOYEE COMPOSITION BY GENDER IN 2020





Sumber Daya Manusia
Human Resources

Komposisi karyawan PLN Enjiniring berdasarkan gender didominasi oleh pegawai laki-laki yaitu sebesar 80%, sedangkan pegawai perempuan sebesar 20%. Secara jumlah, terjadi penurunan jumlah baik karyawan laki-laki maupun perempuan. Penurunan terjadi karena penurunan jumlah karyawan PLN Enjiniring dibanding tahun 2019. Namun secara persentase, karyawan perempuan mengalami kenaikan sebesar 2,28% pada tahun 2020.

PLN Enjiniring memberikan kesempatan yang sama bagi calon karyawan laki-laki maupun perempuan pada saat pelaksanaan rekrutmen, namun berdasarkan bidang usaha dan jenis pekerjaan maka jumlah karyawan lebih banyak didominasi oleh karyawan laki-laki.

BIAYA TENAGA KERJA

Biaya Gaji dan Kesejahteraan Karyawan yang dikeluarkan oleh PLN Enjiniring pada 2020 mencapai Rp. 70.516.092.525. Besarnya biaya gaji dan kesejahteraan karyawan ini meningkat sebesar 15,28% atau sebesar Rp 9.344.133.960 jika dibanding biaya yang dikeluarkan pada tahun 2019, yaitu sebesar Rp 61.171.958.565. Hal ini dapat disebabkan oleh bertambahnya jumlah Pegawai Organik karena baru diangkat pada tahun 2020 sebesar 7,75% dari tahun 2019.

TINGKAT TURNOVER PEGAWAI

Tingkat turnover Pegawai menunjukkan *level of engagement* Pegawai dalam sebuah perusahaan, dimana semakin rendah tingkat *turnover* Pegawai menunjukkan bahwa Pegawai memiliki *level of engagement* yang tinggi terhadap perusahaan. Selama 5 (lima) tahun terakhir tingkat *turnover* karyawan pada PLN Enjiniring relatif fluktuatif. Pada tahun 2016-2017 tingkat *turnover* 0%. Tetapi pada 2 tahun berturut-turut yaitu 2018-2019 terjadi *turnover* Pegawai tertinggi yaitu sebesar 1,71% dan 1,06%. Sementara pada tahun 2020 tingkat *turnover* kembali ke persentase 0%, dimana tercatat hanya 1 orang Pegawai pensiun dan tidak ada Pegawai keluar/*resign*. Jumlah *turnover* didasarkan atas jumlah Pegawai dengan status kepegawaian Organik atau Pegawai tetap dan dapat dilihat pada tabel di bawah.

The composition of PLN Enjiniring employees based on gender is dominated by male employees of 80%, while female employees of 20%. An decrease in the number of employees occurred for both male and female employees. The decrease occurred due to a decrease in the number of PLN Enjiniring employees compared to 2019. However, in percentage terms, female employees experienced an increase of 2.28% in 2020.

PLN Enjiniring provides equal opportunities for male and female prospective employees at the time of recruitment, but based on line of business and type of work, the number of employees is more dominated by male employees.

LABOR COSTS

Employee Salary and Welfare Costs incurred by PLN Enjiniring in 2020 reach amounted to Rp. 70.516.092.525. The amount of salary and welfare costs of these employees increased by 15.28% or in amount of Rp. 9.344.133.960 when compared to costs incurred in 2019, which amounted to Rp.61.171.958.565. This can be caused by the increase in the number of organic employees because it was just appointed in 2020 by 7.75% from 2019.

TURNOVER OF EMPLOYEES

Employee turnover rate shows the level of employee engagement in a company, where the lower employee turnover rate shows that employees have a high level of engagement towards the company. During the last 5 (five) years the employee turnover rate at PLN Enjiniring relatively volatile. In 2016-2017 the employee turnover rate 0%. But in 2 consecutive years, 2018-2019, the highest employee turnover occurred at 1.71% and 1.06%. Meanwhile, in 2020 the turnover rate returned to a percentage of 0%, where only 1 employee retired and no employee resigned. Turnover is based on the number of Employees with Organic employment status can be seen in the table below.

Keterangan	Tahun				
	2020	2019	2018	2017	2016
Jumlah Pegawai di Awal Periode	284	175	158	133	104
Jumlah Pegawai Masuk	23	115	25	25	29
Jumlah Pegawai Keluar (<i>resign</i>)	0	3	3	0	0
Jumlah Pegawai Keluar (tugas karya/tugas belajar)	0	1	4	0	0
Jumlah Pegawai Keluar (pensiun)	1	2	1	0	0
Jumlah Pegawai di Akhir Periode	306	284	175	158	133
<i>Turnover</i>	0	3	3	0	0
% Turnover	0.00%	1.06%	1.71%	0.00%	0.00%





Sumber Daya Manusia
Human Resources



TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Good Corporate Governance



Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance





Informasi Kelangsungan Usaha

Business Continuity Information

- **Hal-hal yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha**

PLN Enjiniring tidak sedang menghadapi hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha.

- **Assessment Manajemen Atas Hal-hal Yang Berpengaruh Terhadap Kelangsungan Usaha**

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Perusahaan tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usahanya.

- **Asumsi Yang Digunakan Manajemen Dalam Melakukan Assessment**

Beberapa Faktor yang menjadi pertimbangan manajemen dalam melakukan assessment terhadap kelangsungan usaha adalah sebagai berikut.

- Kebijakan Pemegang Saham
- Kinerja Keuangan
- Likuiditas
- Solvabilitas
- Masalah Internal
- Perkara Hukum

- **Matters that have a Significant Effect on Business Continuity**

PLN Engineering is not facing things that have a significant effect on business continuity.

- **Management Assessment of Matters Affecting Business Continuity**

The Company manwagement has assessed the Company ability to continue the continuity of its business and believes that the Company has the resources to continue in the future. In addition, the Company's management does not see any material uncertainty that can raise significant doubts about the Company's ability to continue its business.

- **Assumptions Used by Management in Conducting Assessments**

Some factors that are considered by management in conducting an assessment of business continuity are as follows.

- *Shareholder Discretion*
- *Financial performance*
- *Liquidity*
- *Solvency*
- *Internal Problems*
- *Legal matters*

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Implementation of Corporate Governance

Dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat sehingga mampu mempertahankan keberadaan dan keberlanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan, PT PLN Enjiniring mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan melalui penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*.

Penerapan GCG dilaksanakan secara konsisten sebagai salah satu alat untuk menjaga kelangsungan usaha dan kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta menumbuhkan budaya PLNE berintegritas pada seluruh insan dalam organisasin

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PLN Enjiniring sangat menyadari arti penting dari GCG dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sehingga mampu mempertahankan keberlangsungan usaha secara berkelanjutan. Perusahaan secara konsisten terus melakukan tindakan perbaikan, memperkuat komitmen, menetapkan strategi, sumber daya serta berupaya memperoleh dukungan penuh dari Pemegang Saham (*Shareholder*) dan Pemangku Kepentingan Lainnya (*Stakeholders*) dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG sehingga sasaran kinerja, tujuan perusahaan dan keberlangsungan usaha dapat dicapai.

In order to maximize the value of the company in order to have strong competitiveness so as to maintain the existence and sustainability to achieve the goals and objectives of the company, PT PLN Enjiniring encourages the management of the company in a professional, transparent and efficient manner, as well as empowering functions and increasing the independence of the company's organs through the implementation of Good Corporate Governance (GCG).

The implementation of GCG is carried out consistently as one of the tools to maintain business continuity and the trust of stakeholders (stakeholders), and foster a culture of PLN with integrity to all people in the organization.

COMMITMENT TO IMPLEMENTING CORPORATE GOVERNANCE

PLN Enjiniring is well aware of the importance of GCG and is committed to implementing the principles of Good Corporate Governance so as to be able to sustain business continuity on an ongoing basis. The Company has consistently taken corrective actions, strengthened commitment, set strategies, resources and sought full support from Shareholders and Other Stakeholders in implementing GCG principles so that performance targets, company goals and business sustainability can be achieved.





Dalam penerapannya, komitmen seluruh insan perusahaan mulai dari level paling bawah sampai dengan *top manajemen*, untuk senantiasa menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat dengan menjunjung tinggi perilaku etis dengan penuh amanah dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran perusahaan. Perusahaan mewajibkan seluruh anggota perusahaan untuk menandatangani pernyataan komitmen untuk melaksanakan pedoman etika dan perilaku sesuai dengan Pedoman Perilaku yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Perusahaan melakukan evaluasi secara berkala terhadap *Infrastructure* dan *softstructure GCG* untuk mengantisipasi setiap perubahan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku agar selaras dengan perkembangan usaha. Dukungan *Infrastructure* dan *Softstructure GCG* memiliki peranan penting dalam memberikan kejelasan fungsi, tanggung jawab, hak dan kewajiban serta system yang digunakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan usaha dan upaya peningkatan nilai perusahaan (*corporate value*) dalam jangka Panjang.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan prinsip – prinsip GCG di PLN Enjiniring bertujuan untuk :

1. Menjaga kontinuitas usaha jangka Panjang;
2. Memaksimalkan nilai perusahaan (*corporate value*) agar Perseroan memiliki daya saing yang kuat sehingga mampu mempertahankan eksistensinya secara berkelanjutan sesuai visi dan misi Perseroan;
3. Meningkatkan daya saing perusahaan sehingga memberikan keyakinan kepada Pemegang Saham, bahkan Perseroan dikelola secara benar dan baik agar memberikan 'return' yang wajar dan bernilai tinggi;

In its application, the commitment of all employees of the company starting from the lowest level to the top management, to always carry out healthy business practices by upholding ethical behavior with the utmost trust in order to achieve the company's vision, mission and goals. The company requires all members of the company to sign a statement of commitment to carry out ethical and behavioral guidelines in accordance with the Code of Conduct established based on the Directors' Decree in a sustainable and continuous manner.

The Company conducts periodic evaluations of the GCG Infrastructure and Softstructure to anticipate any changes to the rules and regulations that apply to be in line with business development. GCG Infrastructure and Softstructure Support has an important role in providing clarity of functions, responsibilities, rights and obligations as well as the system used so that it is expected to increase business success and efforts to increase corporate value in the long term.

THE PURPOSE OF IMPLEMENTING GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The application of GCG principles at PLN Enjiniring aims to:

1. *Maintain long-term business continuity;*
2. *Maximize the value of the company (corporate value) so that the Company has a strong competitiveness so that it can maintain its existence in a sustainable manner in accordance with the vision and mission of the Company;*
3. *Increase the company's competitiveness so as to provide confidence to Shareholders, even the Company is managed properly and properly in order to provide a reasonable and high-value return;*

4. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara organ perusahaan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi), karyawan, pelanggan, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan berjalan dengan baik dan memenuhi harapan stakeholders;
5. Mendorong dan mendukung pengembangan SDM, organisasi dan bisnis PLN Enjiniring;
6. Melakukan analisis risiko dan mitigasi secara komprehensif dan lebih baik;
7. Meningkatkan etika dan budaya kerja yang bersih dan profesional;
8. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan benturan kepentingan dalam pengelolaan perusahaan dan oleh individu sebagai insan organisasi.

4. Control and direct the relationship between company organs (Shareholders, Board of Commissioners, Directors), employees, customers, business partners, as well as the community and the environment running well and meeting the expectations of stakeholders;
5. Encourage and supporting the development of HR, organization and business of PLN Enjiniring;
6. Conduct a comprehensive and better risk analysis and mitigation;
7. Enhancing clean and professional work ethics and culture;
8. Manage the procurement of goods and services to avoid the occurrence of deviations and conflicts of interest in the management of the company and by individuals as individuals of the organization.



LANDASAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam melaksanakan penerapan GCG, PLN Enjiniring menyadari bahwa Kebijakan GCG selain menjadi acuan yang wajib diterapkan oleh Perusahaan telah menjadi instrument yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Perusahaan menerapkan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan terkait dengan pelaksanaan GCG bagi Perusahaan. Dasar penerapan GCG di Perseroan mengacu kepada :

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian Pengurusan Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

PLATFORM FOR IMPLEMENTING CORPORATE GOVERNANCE

In implementing GCG implementation, PLN Enjiniring realizes that in addition to being a reference that must be applied by the Company, GCG Policy has become the instrument needed to ensure that the management of the company runs properly in accordance with applicable regulations. Therefore, the Company implements GCG at all levels and levels of the organization based on the provisions and regulations related to the implementation of GCG for the Company. The basis for implementing GCG in the Company refers to:

1. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information
4. Government Regulation Number 45 of 2005 concerning Establishment of Management of Supervision and Disbanding of State-Owned Enterprises;



5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Umum Milik Negara;
 6. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
 7. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
 8. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
 9. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 16/MBU/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
 10. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Umum Milik Negara;
 11. Anggaran Dasar Nomor 22 tahun 2012 yang telah disahkan melalui Akta Notaris Perusahaan yang telah disesuaikan dengan undang-undang Perseroan Terbatas;
 12. Pedoman Good Corporate Governance (GCG) Edisi ke-3 di Lingkungan PT Prima Layanan Nasional Enjiniring yang ditetapkan tanggal 7 November 2016;
5. *Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number PER-01 / MBU / 2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Public Bodies;*
 6. *Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-09 / MBU / 2012 dated July 6, 2012 concerning Amendment to SOE Minister of State Regulation No, PER-01 / MBU / 2011 dated August 1, 2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises;*
 7. *Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-10 / MBU / 2012 dated 24 July 2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners / Supervisory Board of State-Owned Enterprises;*
 8. *Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number PER-12 / MBU / 2012 dated 24 August 2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners / Supervisory Board of State-Owned Enterprises;*
 9. *Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number 16 / MBU / 2012 dated October 1, 2012 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises Number PER-01 / MBU / 2011 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners / Supervisory Board of State Owned Enterprises;*
 10. *Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises Number SK-16 / S.MBU / 2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators / Evaluation and Evaluation Indicators of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Public Bodies;*
 11. *Articles of Association No. 22 of 2012 which has been ratified through a Company Notary Deed that has been adjusted to the laws of a Limited Liability Company;*
 12. *Good Corporate Governance (GCG) 3rd Edition Guidelines in the PT Prima Jasa Nasional Enjiniring Environment, which was established on 7 November 2016;*

13. Surat Keputusan Direksi Nomor 03.001.K/010/DIR/III/2012 tanggal 3 Maret 2012 tentang Penunjukan Direksi Penanggung Jawab Monitoring Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) di Lingkungan PT Prima Layanan Nasional Enjiniring;
14. Board Manual PT Prima Layanan Nasional Enjiniring Tahun 2016;
15. Pedoman Ethical Code of Conduct PT PLN Enjiniring Tahun 2016;
16. Buku Saku Pedoman Perilaku PT PLN Enjiniring Tahun 2016.

13. Decree of the Board of Directors Number 03.001.K / 010 / DIR / III / 2012 dated March 3, 2012 concerning Appointment of Directors Responsible for Monitoring the Implementation of Good Corporate Governance in PT Prima Jasa Nasional Enjiniring;
14. PT Prima's National Engineering Service Board Manual 2016;
15. Guidelines for 2016 PT PLN Enjiniring Ethical Code of Conduct;
16. 2016 PT PLN Enjiniring Code of Conduct Pocket Book.

Selain itu, untuk lebih mengefektifkan implementasi GCG, PLN Enjiniring juga melakukan penelaahan terhadap praktik – praktik bisnis terbaik yang meliputi antara lain ;

In addition, to make the GCG implementation more effective, PLN Enjiniring also conducts a review of the best business practices which include;

1. Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai acuan dalam pengelolaan dan penerapan GCG;
2. Prinsip-prinsip Corporate Governance yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD);
3. ASEAN Corporate Governance Scorecard;

1. General Guidelines for Indonesian GCG developed by the National Committee on Governance Policy (KNKG) as a reference in the management and implementation of GCG;
2. Principles of Corporate Governance developed by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD);
3. ASEAN Corporate Governance Scorecard;

Memperhatikan kondisi pengalaman perusahaan di masa lalu, sudah menjadi keharusan bagi Perusahaan untuk menerapkan GCG sebagaimana yang tertuang dalam beberapap ketentuan yang berlaku yang meliputi undang-undang, Peraturan Menteri dan berbagai Pedoman Praktik Terbaik.

Considering the condition of the company's experience in the past, it has become imperative for the Company to implement GCG as stated in several applicable provisions which include laws, Ministerial Regulations and various Best Practices Guidelines.

Transparansi	Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Transparency	<i>Openness in carrying out the decision-making process and openness in disclosing material and relevant information about the company, which is easily accessible to stakeholders in accordance with the applicable laws and regulations.</i>
Akuntabilitas	Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan bertanggungjawab Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara transparan, wajar, efektif dan efisien. Setiap awal tahun, Perseroan memastikan ukuran kinerja setiap anggota perusahaan secara jelas terukur dan dievaluasi pada Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMKP) sehingga pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment) dapat dilaksanakan secara adil dan wajar.

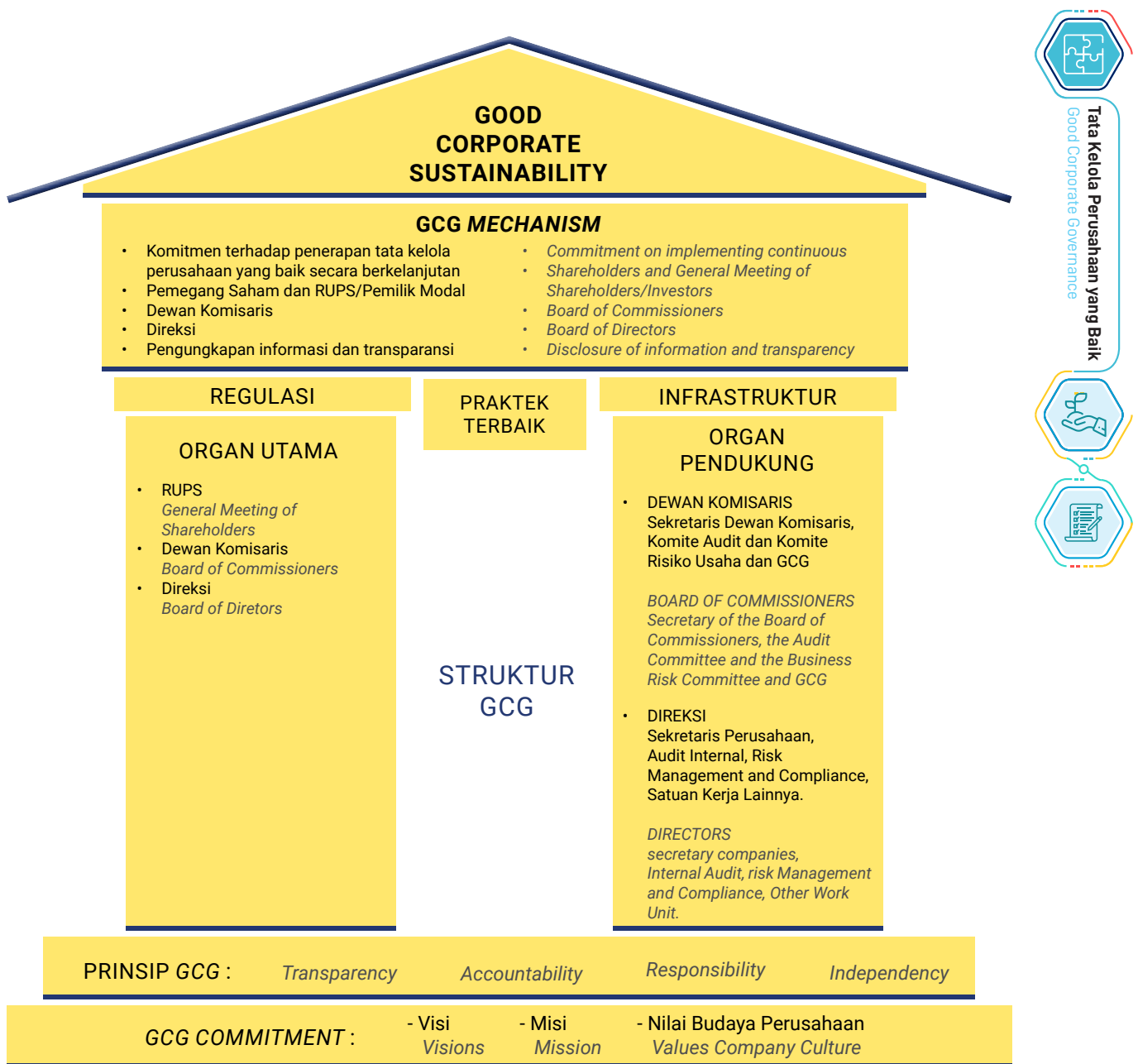




Accountability	<p>Clarity of functions, implementation and accountability of the Organ so that the company's management is carried out transparently, fairly, effectively and efficiently.</p> <p>At the beginning of each year, the Company ensures that the performance measures of each company member are clearly measured and evaluated in the Performance Management Information System (SIMKP) so that reward and punishment can be carried out fairly and fairly.</p>
Tanggung Jawab	<p>Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat sehingga kesinambungan usaha perusahaan dapat dipelihara dalam jangka panjang.</p>
Responsibility	<p>Conformity in the management of the company against applicable laws and regulations and healthy corporate principles so that the sustainability of the company's business can be maintained in the long term.</p>
Kemandirian	<p>Keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan (conflict of interest) dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.</p>
Independence	<p>The situation in which the company is managed professionally without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with the laws and regulations and the principles of a healthy corporation.</p>
Kewajaran	<p>Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Prinsip kewajaran dan kesetaraan mengharuskan adanya perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya, baik yang timbul karena perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
Fairness	<p>Justice and equality in fulfilling the rights of Stakeholders that arise based on agreement and legislation.</p> <p>The principle of fairness and equality requires fair and equal treatment in fulfilling the rights of Stockholders and other Stakeholders, both arising from agreements and applicable laws and regulations.</p>

Prinsip-prinsip GCG senantiasa disosialisasikan keseluruhan elemen Perusahaan sebagai salah satu cara menyadarkan seluruh elemen Perusahaan akan nilai-nilai yang harus dipenuhi untuk mencapai praktik GCG. Internalisasi dari berbagai peraturan perundang-undangan dan pedoman di atas ke dalam kebijakan internal Perusahaan merupakan komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi dan seluruh karyawan. Berdasarkan asas-asas GCG, PLN Enjiniring mengembangkan struktur GCG yang meliputi GCG Organ Utama dan Organ Pendukung guna menjalankan mekanisme GCG sesuai peraturan perundang-undangan serta best practices yang ada sehingga tercipta kesinambungan usaha dalam jangka Panjang. Komitmen Perusahaan terhadap penerapan GCG ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

The principles of GCG are always promoted to all elements of the Company as a way to make all elements of the Company aware of the values that must be met in order to achieve GCG practices. The internalization of various laws and regulations above into the Company's internal policies is a commitment of the Board of Commissioners and Directors and all employees. Based on the principles of GCG, PLN Enjiniring develops a GCG structure that includes GCG Main Organs and Supporting Organs in order to carry out the GCG mechanism in accordance with existing laws and best practices so as to create long-term business sustainability. The company's commitment to implementing GCG is shown in the figure below.

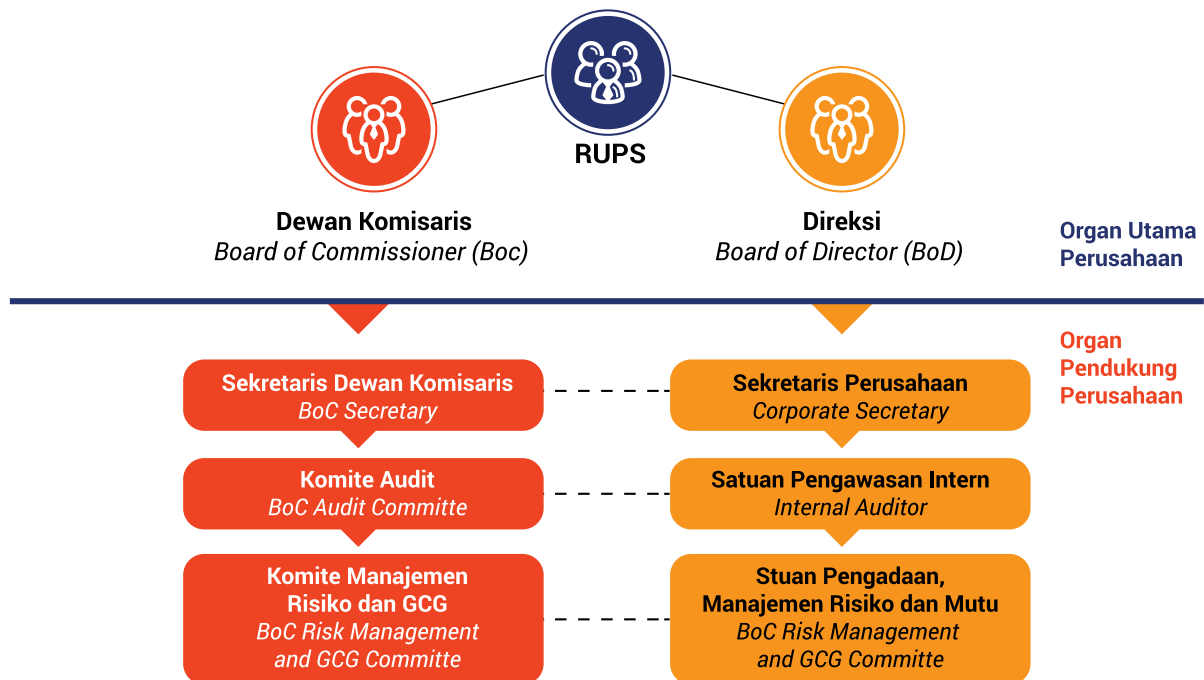


Sebagai infrastruktur pendukung dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, di bawah Dewan Komisaris telah dibentuk Komite Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris. Demikian juga dibawah Direksi dibentuk unit kerja yang bertanggung jawab dalam implementasi GCG serta menjadi mitra kerja dari Komite Dewan Komisaris.

As a supporting infrastructure in carrying out its duties and responsibilities, a Board of Commissioners and Secretary of the Board of Commissioners have been formed under the Board of Commissioners. Likewise, under the Board of Directors, a work unit responsible for implementing GCG was formed and a working partner of the Board of Commissioners' Committee was formed.

Struktur Tata Kelola Perusahaan di PLN Enjiniring dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Corporate Governance Structure at PLN Enjiniring can be seen in the following figure:



Setiap Organ Perusahaan memiliki peranan penting dalam penerapan GCG dengan menjalankan fungsi hak dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan meliputi fungsi pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan.

RUPS merupakan organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Para Pemegang Saham memiliki kewenangan utama untuk memperoleh informasi mengenai Perseroan baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menyusun kebijakan strategis Perseroan. Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menyusun kebijakan strategis Perseroan. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab penuh dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi baik atas kebijakan Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan sesuai amanah yang diberikan. Kewenangan yang dimiliki Direksi secara tak terbatas dan tak bersyarat selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar serta Keputusan RUPS

Each Company Organ has an important role in implementing GCG by carrying out its rights and responsibilities for the interests of the Company, including the functions of policy making, implementation and supervision.

The GMS is an organ of a Limited Liability Company that has exclusive authority not given to the Directors and Board of Commissioners. The authority of the GMS, its form and extent is determined in the Limited Liability Company Law and the Company's Articles of Association. The Shareholders have the main authority to obtain information about the Company from both the Board of Directors and the Board of Commissioners as the basis for making decisions in formulating the Company's strategic policies. The Board of Commissioners is the basis for making decisions in formulating the Company's strategic policies. The Board of Commissioners has full responsibility in supervising the management of the Company by the Board of Directors both at the discretion of the Board of Directors in managing the Company. Directors are fully responsible for managing the Company in accordance with the mandate given. The authority of the Board of Directors is unlimited and unconditional as long as it does not conflict with the Law and the Articles of Association and the Resolution of the GMS

PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan menetapkan Direktur Keuangan dan SDM sebagai Penanggung Jawab Penerapan GCG di lingkungan PLN Enjiniring dan untuk mengelola pelaksanaan program-program GCG yang telah direncanakan dikelola oleh Sekretaris Perusahaan.

Perseroan membentuk Tim Penerapan GCG guna memaksimalkan pemantauan dan mengukur sejauh mana efektivitas program-program GCG dijalankan oleh Perusahaan. Kunci keberhasilan penerapan GCG di Perseroan menitikberatkan kepada :

1. Penerapan Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku guna memastikan pengelolaan perusahaan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan tata kelola perusahaan agar dapat terselenggara dengan baik dan terdokumentasikan dengan baik di setiap Bidang;
3. Melakukan evaluasi, koordinasi dan memantau pelaksanaan kebijakan/proses bisnis perusahaan agar sesuai dengan ketentuan yang ada;
4. Memonitor melakukan evaluasi dan mendorong pelaksanaan kegiatan penerapan Kode Etik Perseroan telah dilakukan dengan baik diseluruh kegiatan Perseroan;
5. Memonitor melakukan evaluasi dan mendorong pelaksanaan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) telah dilakukan dengan baik dan sesuai.

LIABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The Company appoints the Director of Finance and HR as Responsible for GCG Implementation within the PLN Enjiniring and to manage the implementation of the GCG programs planned by the Corporate Secretary.

The Company formed a GCG Implementation Team to maximize monitoring and measure the extent to which the effectiveness of GCG programs is carried out by the Company. The key to the successful implementation of GCG in the Company emphasizes:

1. *Implementation of Compliance with applicable laws and regulations to ensure the management of the company is in accordance with applicable laws and regulations;*
2. *Directing and controlling corporate governance activities so that they can be carried out properly and are well documented in each Sector;*
3. *Evaluating, coordinating and monitoring the implementation of company policies / business processes in accordance with existing provisions;*
4. *Monitoring to evaluate and encourage the implementation of the activities of the implementation of the Company's Code of Ethics has been carried out properly throughout the Company's activities;*
5. *Monitor to evaluate and encourage the implementation of Good Corporate Governance practices that have been carried out properly and appropriately.*



Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance



TAHAPAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PLN Enjiniring menyusun strategi dan rencana kerja penerapan kebijakan GCG untuk mencapai tujuan yang akan dicapai perusahaan. Sebagai bentuk komitmen PLN Enjiniring terhadap penerapan GCG, perusahaan berusaha memenuhi ketentuan dari setiap tahapan penerapan GCG. Tahapan penerapan GCG ini memiliki fungsi sebagai acuan dalam menyempurnakan penerapan GCG PLN Enjiniring dan menjadi media antara rencana kerja dengan rencana strategi.

STAGES OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

PLN Enjiniring prepares strategies and work plans for implementing GCG policies to achieve the goals to be achieved by the company. As a form of PLN Enjiniring's commitment to the implementation of GCG, the company strives to meet the provisions of each stage of GCG implementation. This stage of GCG implementation has a function as a reference in perfecting PLN Enjiniring GCG implementation and as a medium between work plans and strategic plans.



ROAD MAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagai panduan dalam penerapan GCG, Perseroan menyusun Roadmap GCG sebagai bagian dari perencanaan strategis dalam implementasi GCG secara berkelanjutan. Roadmap CGC menggambarkan tahapan-tahapan yang akan dicapai terkait dengan penerapan GCG dalam jangka panjang secara konsisten dan berkesinambungan.

ROAD MAP CORPORATE GOVERNANCE

As a guide in implementing GCG, the Company prepares a GCG Roadmap as part of strategic planning in implementing GCG on an ongoing basis. The CGC roadmap illustrates the stages that will be achieved in relation to long-term consistent and continuous implementation of GCG.





Pada saat ini, PLN Enjiniring telah berada pada fase Good Governance Conformance yang secara berkelanjutan dan berkesinambungan terus melakukan internalisasi implementasi prinsip-prinsip GCG dan melengkapi soft structure dan memutakhirnya pedoman yang ada. Perusahaan berupaya menerapkan prinsip-prinsip GCG pada semua proses bisnis dengan didukung oleh tersedianya pedoman perusahaan dari tingkat manajemen puncak hingga tingkat operasional dan terintegrasi antara rencana kerja dengan rencana strategis guna mencapai tujuan akhir tahapan penerapan GCG pada face Good Corporate Citizen.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Perusahaan guna mendukung fase Good Corporate Governance antara lain adalah :

1. Implementasi program PLNE Bersih dan Berintegritas dengan kegiatan : Multistakeholder Forum (collective action), Pengendalian Gratifikasi Pelaporan LHKPN.
2. Melakukan review dan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik edisi 3 (Pedoman GCG) , dan Buku Panduan bagi Dekom dan Direksi (Board Manual) khusus untuk organ utama dalam struktur GCG.
3. Melakukan review dan menyempurnakan Piagam Komite Audit dan Piagam Komite Manajemen Risiko sebagai pedoman bagi organ pendukung Dewan Komisaris.
4. Melakukan review dan menyempurnakan Buku Pedoman Perilaku (code of conduct) yang berlaku bagi seluruh organ dalam struktur perusahaan.

At this time, PLN Enjiniring has been in the Good Governance Conformance phase which continuously and continuously continues to internalize the implementation of GCG principles and complete the soft structure and update the existing guidelines. The company seeks to apply GCG principles in all business processes supported by the availability of company guidelines from the top management level to the operational level and is integrated between work plans and strategic plans in order to achieve the ultimate goal of implementing GCG on the face of Good Corporate Citizen.

Activities undertaken by the Company to support the Good Corporate Governance phase include:

1. *Implementation of the Clean and Integrity PLNE program with activities: Multistakeholder Forum (collective action), LHKPN Report Gratification Control.*
2. *Reviewing and refining Good Corporate Governance Guidelines edition 3 (GCG Guidelines), and a Special Board Manual for Board and Directors (Board Manual) for the main organs in the GCG structure.*
3. *Reviewing and perfecting the Audit Committee Charter and the Risk Management Committee Charter as a guideline for the supporting organs of the Board of Commissioners.*
4. *Reviewing and perfecting the Code of Conduct that applies to all organs in the company's structure.*

PENILAIAN (ASSESSMENT) TAHUN BUKU 2020

Penerapan GCG merupakan salah satu Key Performance Indicator (KPI) dalam Kontrak Manajemen Perseroan dalam bentuk pencapaian skor Penerapan GCG sejak tahun 2009. Penilaian atas Penerapan GCG di Perseroan dilakukan oleh Assesor Independen dan pada tahun 2013 Perseroan pertama kali melaksanakan penilaian secara mandiri (self assessment). Untuk penilaian secara mandiri dibentuk Tim Verifikator yang diketuai dari Satuan Pengawasan Intern bersama-sama dengan Tim Penerapan GCG PLNE. Sesuai dengan arahan Pemegang Saham, penilaian GCG dilakukan secara berkala.

Untuk tahun 2020, Penilaian Penerapan GCG dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan menggunakan parameter Kementerian BUMN sebagai tercantum dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Aspek pengujian dalam assessment GCG meliputi :

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan,
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal,
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas,
4. Direksi,
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi, dan Transparansi
6. Aspek lainnya. Indikator pengujian berjumlah 43 indikator sedangkan parameter pengujian berjumlah 153 parameter.

Berdasarkan hasil assessment, penerapan GCG di Perseroan masuk dalam kategori Sangat Baik dengan total skor sebesar 90,015 dari total bobot sebesar 100,00 atau memperoleh capaian sebesar 90,015%.

ASSESSMENT FOR FISCAL YEAR 2020

The implementation of GCG is one of the Key Performance Indicators (KPI) in the Company's Management Contract in the form of achieving the GCG Implementation score since 2009. Assessment of the Implementation of GCG in the Company was carried out by an Independent Assessor and in 2013 the Company first conducted an independent assessment (self assessment) . For an independent assessment, a Verification Team is formed which is chaired by the Internal Audit Unit together with the PLNE GCG Implementation Team. In accordance with the directions of the Shareholders, the GCG assessment is conducted periodically.

For 2020, the GCG Implementation Assessment is carried out independently by using the parameters of the Ministry of SOEs as listed in the Decree of the Minister of SOE Number SK-16 / S.MBU / 2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators / Evaluation and Evaluation Indicators / Parameters of the Implementation of Good Corporate Governance (Good Corporate Governance) in State-Owned Enterprises.

Test aspects in the GCG assessment include:

1. *Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance*
2. *Shareholders and GMS / Capital Owners,*
3. *Board of Commissioners / Board of Trustees,*
4. *Directors,*
5. *Information Disclosure and Transparency, and*
6. *Other aspects. The testing indicators are 43 indicators while the testing parameters are 153 parameters.*

Based on the results of the assessment, the implementation of GCG in the Company is included in the category of Very Good with a total score of 90.015 out of a total weight of 100.00 or gained an achievement of 90.015%.





TABEL PENILAIAN (ASSESSMENT) TAHUN BUKU 2020

No.	Aspek Pengujian / Indikator	Capaian Tahun 2020		Tingkat Pemenuhan
		Bobot	Skor	(%)
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00	6,658	95,114
2	Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal	9,00	7,905	87,833
3	Dewan Komisaris	35,00	33,241	94,974
4	Direksi	35,00	31,736	90,674
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	7,350	81,667
6	Aspek Lainnya	5,00	3,125	72,500
Total Skor		100,00	90,015	90,015

PENILAIAN (ASSESSMENT) TAHUN BUKU 2019

Pelaksanaan Assessment GCG untuk periode tahun 2019 dilakukan secara Self Assessment dan Skor Penerapan GCG PT PLN Enjiniring mengalami penurunan dari semula 90,09% menjadi 90,015% dengan predikat "Sangat Baik".

Berikut ini disampaikan pencapaian skor untuk masing-masing aspek penilaian, sebagai berikut :

TABEL PENILAIAN (ASSESSMENT) TAHUN BUKU 2019

No.	Aspek Pengujian / Indikator	Capaian Tahun 2019		Tingkat Pemenuhan
		Bobot	Skor	(%)
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00	6,57	93,84
2	Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal	9,00	7,48	83,13
3	Dewan Komisaris	35,00	33,45	95,57
4	Direksi	35,00	30,77	87,92
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	6,82	75,80
6	Aspek Lainnya	5,00	5,00	100,00
Total Skor		100,00	90,09	90,09

ASSESSMENT FOR 2019 FINANCIAL YEAR

The implementation of the GCG Assessment for the 2019 period was carried out by the Financial and Development Supervisory Agency of the Jakarta SKI Province (BPKP) and PT PLN Enjiniring's GCG Implementation Score decreased from 90.27% to 90.09% with the title "Very Good".

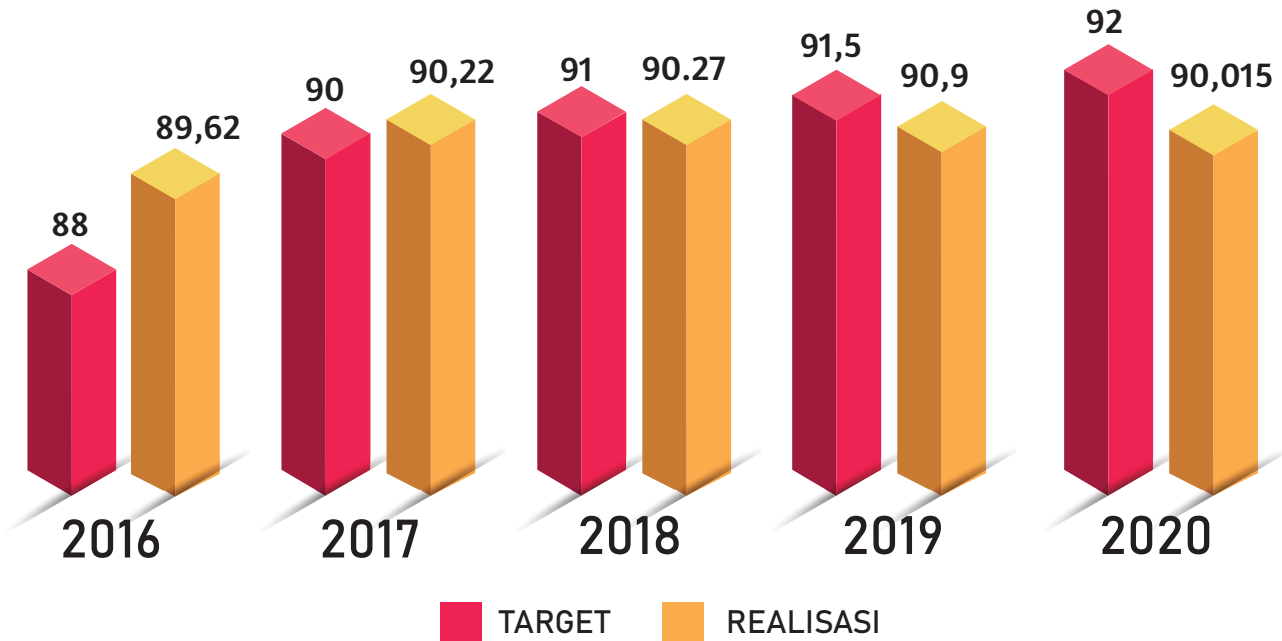
Following is the achievement of scores for each aspect of the assessment, as follows:

Sehingga pencapaian skor GCG pada Kontrak Manajemen PT PLN Enjiniring mengalami trend peningkatan setiap tahunnya, sebagai mana ditunjukkan pada grafik ini :

So that the achievement of GCG scores on PT PLN Enjiniring Management Contracts has an increasing trend every year, as shown in this graph:



Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance



SINERGI DENGAN INDUK PERUSAHAAN DAN ANAK PERUSAHAAN DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Untuk mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan Perseroan berintegrasi dengan PLN Holding guna memonitoring dan mengendalikan secara efektif penerapan GCG di PLN dan Anak Perusahaannya dengan menggunakan aplikasi.

Perseroan merupakan salah satu anak perusahaan PT PLN (Persero), bersama-sama dengan Anak Perusahaan lainnya memandang perlunya sinergi dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan implementasi GCG di Perseroan. Perseroan membentuk "Forum GCG" AP PLN sejak tahun 2016 yang bertujuan :

1. Berkomitmen untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dalam organisasi perusahaan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan terpercaya guna meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan.

SYNERGY WITH THE PARENT COMPANY AND SUBSIDIARIES IN THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

To support the implementation of Corporate Governance, the Company integrates with PLN Holding to effectively monitor and control the implementation of GCG in PLN and its Subsidiaries using the application.

The Company is a subsidiary of PT PLN (Persero), together with other Subsidiaries see the need for synergies in the Implementation of Corporate Governance which has an important role in supporting the successful implementation of GCG in the Company. The Company established the AP PLN "GCG Forum" since 2016 which aims:

1. *Commit to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) in a transparent, accountable and trustworthy company organization in order to increase added value for the company.*



2. Membentuk dan meningkatkan komunikasi antar anak perusahaan sebagai wadah komunitas yang efektif di lingkungan Anak Perusahaan PT PLN (Persero).
3. Membentuk persepsi yang sama terhadap penerapan dan pengukuran prinsip-prinsip GCG sehingga mendukung peningkatan penerapan GCG di lingkungan Anak Perusahaan PT PLN (Persero).
4. Saling mendukung penerapan dan peningkatan tata kelola perusahaan yang baik antar anak perusahaan PT PLN (Persero).

2. Form and improve communication between subsidiaries as an effective community forum within the Subsidiary of PT PLN (Persero).
3. Forming the same perception of the application and measurement of GCG principles so as to support the increase in the application of GCG within the Subsidiary of PT PLN (Persero).
4. Mutually support the application and improvement of good corporate governance among subsidiaries of PT PLN Persero).



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPS merupakan organ atau bagian Perseroan yang memiliki kewenangan tertinggi di dalam Perseroan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.

RUPS merupakan forum dimana para Pemegang Saham memiliki kewenangan untuk memperoleh informasi mengenai Perseroan baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris. Informasi tersebut merupakan landasan bagi RUPS untuk menentukan kebijakan dan langkah strategis Perseroan dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum dalam RUPS, Pemegang Saham dapat menggunakan hak yang dimilikinya untuk mengemukakan pendapat dan memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perusahaan dari Dewan Komisaris dan/atau Direksi sepanjang berhubungan dengan agenda rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan. RUPS dalam agenda lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali seluruh Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan agenda rapat. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah dan jenis saham yang dimilikinya.

RUPS Perseroan terdiri dari 2 yaitu RUPS Tahunan yang diadakan setiap tahun untuk pengesahan RKAP dan Laporan Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diadakan setiap saat bila dianggap perlu oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

GMS is an organ or part of the Company that has the highest authority in the Company that is not given to the Directors or Board of Commissioners within the limits determined by the Law and / or Articles of Association.

GMS is a forum where Shareholders have the authority to obtain information about the Company, both from the Board of Directors or the Board of Commissioners. The information is the basis for the GMS to determine the Company's policies and strategic steps in making decisions as a legal band in the GMS, Shareholders can use their rights to express opinions and obtain information relating to the company from the Board of Commissioners and / or Directors as long as they deal with meeting agenda and do not conflict with company interests. The GMS in other agendas is not entitled to make decisions, unless all Shareholders are present and / or represented at the GMS and approve the addition of the meeting agenda. Shareholders, both alone and represented based on power of attorney, are entitled to attend the GMS and use their voting rights in accordance with the number and type of shares they have.

The Company's General Meeting of Shareholders consists of 2, namely the Annual General Meeting of Shareholders held annually to ratify the RKAP and Annual Report and Extraordinary General Meeting of Shareholders held at any time if deemed necessary by 1 (one) or more Shareholders who together represent 1/10 (one tenth) part of the total number of shares with valid voting rights.



HAK-HAK PEMEGANG SAHAM

RUPS berperan sebagai mekanisme utama untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak Pemegang Saham. Namun demikian, RUPS tidak dapat melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi. Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun hak-hak Pemegang Saham dalam menjalankan fungsinya, yaitu :

- a. Menghadiri RUPS dan memberikan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki.
- b. Menerima pembagian dari keuntungan Perseroan dalam bentuk dividen dan bentuk pembagian keuntungan lainnya sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.
- c. Memperoleh informasi material mengenai Perseroan secara memadai, tepat waktu dan teratur.
- d. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.
- e. Melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
- f. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan (Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah)
- g. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

SHAREHOLDER RIGHTS

The GMS acts as the main mechanism to protect and implement the rights of shareholders. However, the GMS cannot intervene in the implementation of the duties, functions and authorities of the Board of Commissioners and Directors. Shareholders are not permitted to interfere with the Company's operational activities which are the responsibility of the Directors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations. The rights of the Shareholders in carrying out their functions, namely:

- a. *Attend GMS and vote according to the classification and number of shares held.*
- b. *Receive a share of the Company's profits in the form of dividends and other forms of profit sharing in proportion to the number of shares held.*
- c. *Obtain adequate, timely and regular material information about the Company.*
- d. *Grant power of attorney with the right of substitution to individuals or legal entities to represent them at the GMS.*
- e. *View the Register of Shareholders and Special Register during the Company's office hours.*
- f. *File a lawsuit with the District Court against members of the Board of Directors who due to their mistakes and negligence caused losses to the Company (Shareholders representing at least 1/10 (one tenth) share of the total shares with valid voting rights)*
- g. *Organize GMS in the event that the Board of Directors fails to hold an Annual GMS and Extraordinary GMS.*

KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM

Dalam menjalankan perannya, Pemegang Saham berkewajiban untuk:

- Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tidak melakukan kegiatan pengawasan dan kepengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
- Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, Perseroan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- Melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi melalui mekanisme RUPS.

AKSES INFORMASI BAGI PEMEGANG SAHAM

Perusahaan senantiasa memberikan informasi mengenai perusahaan secara memadai, tepat waktu, benar dan teratur sehingga memungkinkan pemegang saham membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat.

Perseroan menyediakan akses terhadap informasi untuk memungkinkan Pemegang Saham melaksanakan hak dan tanggung jawabnya antara lain melalui :

- RUPS dimana Pemegang Saham dapat berkomunikasi dengan Manajemen dalam hal informasi mengenai Perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan.
- Website PT PLN Enjiniring www.plne.co.id yang menyampaikan informasi terbaru dan relevan berbagai laporan dan publikasi mengenai PT PLN Enjiniring kepada Pemegang Saham.
- Media Internal PT PLN Enjiniring, Prima News, yang menyampaikan informasi tentang kegiatan-kegiatan PT PLN Enjiniring terbaru sebagai publikasi kepada Shareholder dan Stakeholders.
- Media Komunikasi lainnya, yaitu video conference, internal meeting, sosialisasi, kunjungan lapangan.

SHAREHOLDER OBLIGATIONS

In carrying out its role, the Shareholders are obliged to:

- Comply with the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations.*
- Does not conduct supervision and management activities of the Company carried out by the Board of Commissioners and Directors.*
- Not use the Company for personal, family, corporate or business group interests in a spirit and manner that is contrary to the laws and regulations*
- Evaluate the performance of the Board of Commissioners and Directors through the GMS mechanism.*

ACCESS TO INFORMATION FOR SHAREHOLDERS

The company always provides information about the company in an adequate, timely, correct and orderly manner so as to enable shareholders to make decisions based on accurate information.

The Company provides access to information to enable Shareholders to exercise their rights and responsibilities through:

- GMS where Shareholders can communicate with Management in terms of information about the Company as a basis for decision making.*
- PT PLN Enjiniring website www.plne.co.id which delivers the latest and relevant information on various reports and publications regarding PT PLN Enjiniring to Shareholders.*
- PT PLN Enjiniring Internal Media, Prima News, which convey information about the latest PT PLN Enjiniring activities as a publication to Shareholders and Stakeholders.*
- Other communication media, namely video conferences, internal meetings, outreach, field trips.*



WEWENANG RUPS

Dalam menjalankan perannya sebagai organ Perseroan tertinggi, RUPS memiliki kewenangan untuk :

- a. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Menetapkan tindakan dan perbuatan Direksi mengenai pengurusan perusahaan;
- c. Memberikan persetujuan dalam pengalihan kekayaan perusahaan dan menjadikan jaminan utang kekayaan perusahaan;
- d. Menetapkan jenis dan jumlah honorarium dan tunjangan termasuk santunan purna jabatan untuk Dewan Komisaris dan Direksi;
- e. Menyetujui rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- f. Menetapkan akuntan publik atas usulan Dewan Komisaris;
- g. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan;
- h. Menetapkan penggunaan laba bersih perusahaan;
- i. Melakukan perubahan Anggaran Dasar.

TATA CARA PELAKSANAAN RUPS

Perseroan menerapkan pelaksanaan tata cara RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

- a. RUPS diadakan di wilayah tempat kedudukan Perseroan
- b. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPSLB dengan didahului pemanggilan RUPS. Pelaksanaan Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat 14 hari sebelum tanggal rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal rapat dan tanggal pemanggilan
- c. Semua keputusan yang diambil di RUPS berdasarkan musyawarah dan mufakat
- d. Hasil Keputusan Pemegang Saham di dokumentasikan Sekretaris Perusahaan dan ditindaklanjuti dalam bentuk Akta Notaris apabila diperlukan sesuai peraturan yang berlaku

AUTHORITY OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In carrying out its role as the highest organ of the Company, the GMS has the authority to:

- a. *Appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and Directors;*
- b. *Determine the actions and actions of the Board of Directors regarding the management of the company;*
- c. *Give approval in the transfer of company property and make guarantees of corporate wealth debt;*
- d. *Determine the type and amount of honorarium and benefits including post-service compensation for the Board of Commissioners and Directors;*
- e. *Approve the company's work plan and budget;*
- f. *Establish a public accountant on the Board of Commissioners' proposal;*
- g. *Give approval for the annual report;*
- h. *Determine the use of the company's net profit;*
- i. *Amend the Articles of Association.*

PROCEDURE FOR GMS IMPLEMENTATION

The Company implements the implementation of the GMS procedures in accordance with the Articles of Association as follows:

- a. *The GMS is held in the area of the Company's domicile*
- b. *The Board of Directors holds an Annual GMS and EGMS preceded by a GMS summons. The GMS Summons are held by registered mail 14 days prior to the date of the meeting, excluding the date of the meeting and the date of the summons*
- c. *All decisions taken at the GMS are based on deliberation and consensus*
- d. *The Shareholders' Resolution results are documented by the Corporate Secretary and followed up in the form of a Notarial Deed if necessary in accordance with applicable regulations*

- e. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, yaitu melalui Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (RUPS Sirkuler)

- e. Shareholders can also make legal decisions without holding a GMS, namely through a Circular Shareholder Decision (Circular RUPS)

PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2020

Pada tahun 2020, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali terdiri dari RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 dan RUPS Pengesahan RKAP 2020 .

Seluruh kegiatan RUPS telah dilaksanakan Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku, baik terkait tempat, pemberitahuan, pemanggilan RUPS, pimpinan dan berita acara RUPS berikut ketentuan kuorum, hak suara dan keputusan RUPS. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Sekretaris Perusahaan, Manajer Senior dan Manajer terkait.

IMPLEMENTATION OF THE 2020 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In 2020, the Company held 2 (two) RUPS, consisting of the 2019 Annual Report Approval GMS and the 2020 RKAP Approval RUPS.

All of the GMS activities have been carried out by the Company in accordance with applicable provisions, both related to the place, notification, summons to the GMS, leadership and minutes of the GMS following the quorum provisions, voting rights and GMS decisions. The GMS was attended by Shareholders, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, the Corporate Secretary, Senior Managers and related Managers.

KEPUTUSAN RUPS

RUPS Pengesahan RKAP 2020

Sebelum pelaksanaan RUPS, Perseroan menyampaikan undangan RUPS melalui surat tercatat nomor : 27.003/M00/PLNE//2020 tanggal 27 Januari 2020 perihal Surat Undangan RUPS RKAP 2020 PT PLN Enjiniring dengan Agenda RUPS :

1. Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020
 - a. Isu Strategis
 - b. Sasaran Utama Perseroan
 - c. Program Prioritas Perseroan Tahun 2020
 - d. Asumsi RKAP 2020
 - e. Proyeksi Keuangan
 - f. Tindak Lanjut Arahan RUPS dan Rekomendasi Dekom
 - g. Tindak Lanjut Penugasan Pemegang Saham SHL

RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

RUPS for Ratification of the 2020 RKAP

Before the GMS, the Company submitted the invitation to the GMS through registered letter number: 27.003/M00/PLNE//2020 dated January 27, 2020 concerning the invitation letter for the GMS 2018 PT PLN Enjiniring with the AGMS Agenda:

1. Approval and Ratification of the Work Plan and Corporate Budget (RKAP) of 2020
 - a. Strategic Issues
 - b. Company's Main Targets
 - c. The Company's Priority Program in 2020
 - d. Assumption of the 2020 RKAP
 - e. Financial Projection
 - f. Follow-up to GMS Direction and Board of Commissioners Recommendations
 - g. Follow-up Assignment of SHL Shareholders



Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance





2. Persetujuan dan Pengesahan KPI
3. Pemaparan dan Penjelasan KPI 2020
4. Usulan Keputusan RUPS

Keputusan RUPS :

1. Agenda Pertama

Setelah menilai RKAP PT Prima Layanan Nasional Enjiniring Tahun Buku 2020 yang diajukan oleh Direksi dan dilakukan pembahasan serta memperhatikan pendapat dan saran Dewan Komisaris, maka RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 dengan pokok-pokok sasaran sebagai berikut :

- a) Perhitungan Laba (Rugi)
Laba (Rugi) Setelah Pajak Tahun Buku 2020 dianggarkan sebesar Rp. 156,77 Miliar.
- b) Perhitungan Neraca
Neraca per 31 Desember 2020 dianggarkan ditutup dengan jumlah Aktiva/Pasiva masing-masing sebesar Rp. 1.269,19 Milliar.
- c) Perhitungan Arus Kas
Saldo Kas per 31 Desember 2020 dianggarkan sebesar Rp. 337,58 Milliar
- d) Perhitungan Investasi
Investasi Tahun Buku 2020 dianggarkan sebesar Rp. 6,50 Milliar, dengan Disburse sebesar Rp. 6,50 Milliar.

2. Agenda Kedua

- a) RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen/Key Performance Indikator (KPI) 2020 antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT Prima Layanan Nasional Enjiniring.
- b) Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) 2020 PT Prima Layanan Nasional Enjiniring terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari risalah ini.

2. *KPI Approval and Ratification*
3. *Exposure and Explanation of KPI 2020*
4. *Proposed GMS Resolution*

Resolution of the GMS:

1. First Agenda

After assessing the RKAP of PT Prima Layanan Nasional Eniniring for the 2020 fiscal year submitted by the Board of Directors and conducting discussions and taking into account the opinions and suggestions of the Board of Commissioners, the GMS decided to approve and ratify the 2020 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) with the following main targets:

- a) *Calculation of Profit (Loss)
Profit (Loss) After Taxation for the 2020 Fiscal Year is budgeted at Rp. 156.77 billion.*
- b) *Balance Sheet Calculation
The balance sheet as of December 31, 2020 is budgeted to be closed with total assets / liabilities of Rp. 1,269.19 Billion.*
- c) *Cash Flow Calculation
Cash balances as of December 31, 2020 are budgeted at Rp. 337.58 billion*
- d) *Investment Calculations
Investment for the fiscal year 2020 is budgeted at Rp. 6.50 Billion, with Disburse of Rp. 6.50 billion.*

2. Second Agenda

- a) *The GMS approved and ratified the 2020 Management Contract / Key Performance Indicator (KPI) between the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Shareholders of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring.*
- b) *The Management Contract / Key Performance Indicator (KPI) 2020 of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring is an integral part of this Agreement.*

RUPS LPT TAHUN BUKU 2019

Dalam rangka menjalankan perannya, Pemegang Saham telah meminta penjelasan dan menyampaikan arahan secara langsung dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

1. RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019

Sebelum pelaksanaan RUPS, Perseroan menyampaikan undangan RUPS melalui surat tercatat Nomor : 19.003/M00/PLNE/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 dengan agenda RUPS :

- a) Persetujuan dari Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*Volledig Acquit Et De Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2019;
- b) Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019;
- c) Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2019 dan Remunerasi Tahun Buku 2020 Bagi Direksi dan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2019; dan
- d) Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.

ANNUAL GMS APPROVAL REPORT FOR FISCAL YEAR 2019

In order to carry out its role, the Shareholders have requested an explanation and submitted directives at the General Meeting of Shareholders.

1. Annual General Meeting of Shareholders Approval for Fiscal Year 2019

Prior to the GMS, the Company submitted the invitation to the GMS through registered letters Number: 19.003/M00/ PLNE/VI/2020 dated June 19, 2020 with the agenda of the GMS:

- a) *Approval of the Ratification of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2019 including the Report on the Implementation of Supervision of the Board of Commissioners during the 2019 Fiscal Year and the Granting of Volledig Acquit Et De Charge to the Directors and Board of Commissioners of the Company for Management and Supervision Actions That Have Been Done During the Year Book 2019.*
- b) *Determination of the Use of Net Profit for Fiscal Year 2019.*
- c) *Determination of Tantiem for Fiscal Year 2019 and Remuneration for Fiscal Year 2020 for Directors and Commissioners, and Employee Bonus for Fiscal Year 2019.*
- d) *Establishment of a Public Accountant Firm for Audit of the Company's Financial Statements for the 2020 Financial Year.*



Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance





KEPUTUSAN RUPS LPT TAHUN BUKU 2019

1. Agenda Pertama :

- 1) RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan.
- 2) RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019.
- 3) RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat **"Wajar Tanpa Pengecualian"** sebagaimana dimaksud dalam laporannya No. 00370/2.1030/AU.1/03/0645-1/1/III/2020, Tanggal 31 Maret 2020.
- 4) RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (*Volledig Acquit Et De Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.
- 5) Pengesahan dan Pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.

RESOLUTION OF THE GMS:

1. First Agenda:

- 1) *The GMS approves and receives an Annual Report on the Situation and Progress of the Company during the 2019 Financial Year consisting of Financial Statements, Performance Evaluation Reports and Compliance Reports.*
- 2) *The GMS approves and receives a Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the 2019 Financial Year.*
- 3) *The GMS validates the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2019 which contains the Consolidated Financial Position Report, the Consolidated Comprehensive Income Statement, the Consolidated Cash Flow Statement and the Consolidated Changes in the Equity Changes and their explanations audited by the Amir Abadi Jusuf Public Accountant Office, Aryanto, Mawar & Partners with the opinion "Fair without exceptions" as referred to in report No. 00370/2.1030 /AU.1/03/0645-1/1/III/2020, March 31, 2020.*
- 4) *The GMS gives full exemption (Volledig Acquit Et De Charge) to the Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervision in accordance with their responsibilities and actions in their respective fields that have been carried out during Fiscal Year 2019, as long as these actions do not conflict with applicable laws and regulations as well as contained in the Financial Statements that have been audited by Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan's Public Accountants.*
- 5) *The endorsement and release of responsibility does not relinquish legal liability to the Board of Directors and / or the Board of Commissioners if the disclosed Report is proven to violate the applicable legal provisions and procedures and / or in the future there is evidence of deviant actions and / or harm to the Company.*

2. Agenda Kedua :

RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019.

3. Agenda Ketiga :

RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2019 dan Remunerasi Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi karyawan untuk Tahun Buku 2019.

4. Agenda Keempat :

RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2020.

2. Second Agenda:

The GMS granted the Power of Attorney to the majority Shareholders to determine the Use of Net Profit for Fiscal Year 2019.

3. Third Agenda:

The GMS authorizes the majority shareholders to determine Tantiem for Fiscal Year 2019 and Remuneration for Fiscal Year 2020 for Directors and Board of Commissioners as well as Bonuses for employees for Fiscal Year 2019.

4. Fourth Agenda:

The GMS authorizes the majority Shareholders to determine the Appointment of a Public Accountant Office as an auditor who will audit the Company's Financial Statements, Performance Evaluation Reports and Compliance Reports for Fiscal Year 2020.





Dewan Komisaris

Board Of Commissioners

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan dan komitmen untuk menyediakan waktu dalam menjalankan tugasnya. dengan demikian, peran Dewan Komisaris sangat strategis. Oleh karena itu, komposisi Dewan Komisaris Perusahaan harus memungkinkan pengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat. selain itu, Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest) yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan anggaran dasar dan wewenang yang diberikan oleh RUPS, yang tertuang dalam Board Manual yang berisi Petunjuk dan Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perusahaan yang secara umum mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Commissioners have duty to supervise the management policies, the course of management in general both regarding the company and the company business undertaken by the Board of Directors, provide advice to the Board of Directors, including oversight of the implementation of the Company Long-Term Plan, Company Work Plan and Corporate Budget, provisions of the Articles of Association, Resolutions of the General Meeting of Shareholders, as well as applicable statutory regulations for the benefit of the company and in accordance with the aims and objectives of the company. Each member of the Board of Commissioners must have high integrity, knowledge, ability and commitment to provide time in carrying out their duties. Thus, the role of the Board of Commissioners is very strategic. Therefore, the composition of the Company Board of Commissioners must enable effective, precise and fast decision makers. In addition, the Board of Commissioners is also required to be able to act independently, within the meaning of not having a conflict of interest that can interfere with their ability to carry out their duties independently and critically, both in relation to one another and relations with the Board of Directors.

THE BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Board of Commissioners has clear functions, duties and responsibilities in accordance with the articles of association and authority granted by the GMS, which are stated in the Board Manual which contains the Work Guidelines and Work Procedures for the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Board of Commissioners is responsible to shareholders in terms of overseeing the policies of the Board of Directors regarding the Company's operations which generally refer to the approved business plan, as well as ensuring compliance with all applicable laws and regulations.

Secara rinci, tugas pokok Dewan Komisaris yang berhubungan dengan pengawasan adalah:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian dan akuntabilitas.
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Pengawasan oleh Komisaris dilakukan dengan cara:
 - a. Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan di Perusahaan.
 - b. Melakukan kunjungan ke unit kerja/pembangkit/proyek tertentu, baik dengan (atau tanpa) pemberitahuan kepada Direksi sebelumnya.
 - c. Memberikan tanggapan atas laporan berkala dari Direksi.

In details, the main duties of the Board of Commissioners relating to supervision are:

1. *The Board of Commissioners is in charge of supervising management policies, general management of both the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors as well as providing advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the Company's Long-Term Plan, the Company's Work Plan and Budget as well as the provisions of the Articles of Association and Decisions. General Meeting of Shareholders, as well as applicable laws and regulations to the Company interests and in accordance with the aims and objectives of the Company.*
2. *Each member of the Board of Commissioners in carrying out its duties must be:*
 - a. *Complying with the Articles of Association and the applicable laws and regulations as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence and accountability.*
 - b. *Having a good faith, a prudence and a full responsibility in carrying out supervisory duties and providing advices to the Board of Directors for the benefit of the Company and in accordance to the aims and objectives of the Company.*
3. *The Board of Commissioners/Supervisory Board is responsible and authorized to supervise management policies, the course of management in general, both regarding the Company and the Company's business and provide advices to the Board of Directors*
4. *Supervision by the Commissioners is carried out by:*
 - a. *Request a written information to the Board of Directors regarding a problem in the Company.*
 - b. *Visit certain work units / generators / projects, either with (or without) prior notification to the Board of Directors.*
 - c. *Provide responses on periodic reports from the Board of Directors.*





Berdasarkan Board Manual Perusahaan, pembagian kerja diantara anggota Dewan Komisaris diatur sendiri oleh Perusahaan dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris dibagi atas bidang tugas sebagai berikut.

TABEL PEMBAGIAN BIDANG TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris selalu mengawasi kebijakan yang diambil Direksi berdasarkan laporan yang diterima atau temuan langsung di lapangan. Untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan penerapan kebijakan GCG tersebut, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan dengan tugasnya adalah melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

TABEL PEMBAGIAN BIDANG TUGAS DEWAN KOMISARIS

Periode Pengangkatan 22 Maret 2016 - 8 Desember 2020		
<i>Appointment Employee Period March 22, 2016 - December 8, 2020</i>		
Nama	Jabatan	Bidang Tugas
<i>Name</i>	<i>Position</i>	<i>Task Field</i>
Tumpal M. Simarmata	Komisaris Utama <i>Main Commissioner</i>	1 Bertanggung jawab mengkoordinasikan pengawasan perusahaan dan tugas Dewan Komisaris
		2 Mengundang, memimpin rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, dan menandatangani dokumen Perseroan antara lain Risalah RUPS, Laporan Manajemen Tahunan dll.
		3 Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan perseroan; Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, serta perubahan dan tambahannya; laporan berkala, laporan-laporan lainnya dari Direksi, serta persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.
		4 Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta menyampaikan hasil penelitian dan pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham
		5 Mengikuti perkembangan Perseroan
		6 Melakukan tugas-tugas lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

Based on the Company's Manual Board, the division of works among members of the Board of Commissioners is regulated by the Company and for the smooth running of its duties, the Board of Commissioners can be assisted by a Secretary of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners divided into the following areas of duty.

TABLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS DIVISION OF DUTIES

The Board of Commissioners always supervises the policies taken by the Board of Directors based on the reports received or direct field findings. To assist the duties of the Board of Commissioners in implementing the GCG policy, the Board of Commissioners has formed an Audit Committee and a Risk Management Committee which are stipulated in a Decree with the task of monitoring, evaluating and providing recommendations to the Board of Commissioners.

		<ol style="list-style-type: none"> 7 Melakukan pengawasan secara keseluruhan terhadap KPI Manajemen 8 Meneliti dan menelaah laporan berkala dan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan <p>1 <i>Responsible for coordinating company supervision and the duties of the Board of Commisioners.</i></p> <p>2 <i>Inviting, chairing the Board of Commissioners' meetings with the Board of Directors, and signing the Company's documents including Minutes of the General Meeting of Shareholders, Annual Management Reports, etc.</i></p> <p>3 <i>Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the company's development plan; The Company's Annual Work Plan and Budget, as well as changes and additions; periodic reports, other reports from the Board of Directors, as well as other issues that are considered important for the management of the Company.</i></p> <p>4 <i>Overseeing the implementation of the Company's Work Plan and Budget as well as submit the result of research and opinions to the General Meeting of Shareholders.</i></p> <p>5 <i>Following the development of the Company.</i></p> <p>6 <i>Performing other tasks determined by the General Meeting of Shareholders.</i></p> <p>7 <i>Carrying out overall supervision of the Management KPI.</i></p> <p>8 <i>Researching and analyzing periodic and annual reports prepared by the Board of Directors and signing Annual Report.</i></p>
--	--	---

Julius Bobo	Komisaris <i>Commissioner</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Bertanggung jawab utamanya pada bidang keuangan, Pengawasan Internal, bidang pemasaran dan Komite Audit, meliputi kegiatan antara lain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> (a) Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perusahaan (b) Mengawasi pelaksanaan pengawasan internal, memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan eksternal (c) Mengawasi organisasi perusahaan dan strategi pengembangan SDM (d) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris 2 Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan perseroan; Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, serta perubahan dan tambahannya; laporan berkala; laporan-laporan lainnya dari Direksi, serta persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan.
-------------	----------------------------------	--





		<p>3 Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penelitian dan pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham</p> <p>4 Melakukan monitoring terhadap KPI bidang administrasi, keuangan dan SDM</p> <p>5 Mengikuti perkembangan perusahaan</p> <p>6 Melakukan tugas-tugas lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham</p>
		<p>1 <i>Mainly responsible for financial sector, Internal Control, Marketing and Audit Committee, including the following activities ;</i></p> <p>(a) <i>Supervising the implementation of the Annual Work Plan and Budget including Financial Statements and Company Performance Reports.</i></p> <p>(b) <i>Supervising the implementation of internal controls, ensure the effectiveness of internal and external control systems.</i></p> <p>(c) <i>Supervising the company organizations and HR development strategy.</i></p> <p>(d) <i>Identifying matters that require the attention for the Board of Commissioners.</i></p> <p>2 <i>Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the company's development plan; Work Plan and Annual Budget of the company, as well as changes and additions; periodic reports, other reports from the Board of Directors, as well as other issues deemed important for the management of the Company.</i></p> <p>3 <i>Overseeing the implementation of the Company Work Plan and Budget and submit the result of their research and opinions to the General Meeting of Shareholders.</i></p> <p>4 <i>Monitoring the KPI in administration, finance and HR.</i></p> <p>5 <i>Following the development of the company.</i></p> <p>6 <i>Perform other tasks determined by the General Meeting of Shareholders.</i></p>
Djoko Prasetyo	Komisaris Commissioner	<p>1 Bertanggung jawab utamanya pada Bidang Enjiniring, Pengembangan Usaha dan Investasi, Komite Manajemen Risiko dan GCG dan sasaran serta issue strategis lainnya, meliputi kegiatan antara lain:</p> <p>(a) Mengawasi pelaksanaan kegiatan Enjiniring, termasuk proses produksi dan pengendalian mutu</p> <p>(b) Mengawasi penyiapan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahunan</p>

(c) Mengawasi penyiapan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan secara berkala melaksanakan review dan mengusulkan updating jika diperlukan.

(d) Mengawasi pelaksanaan pengembangan usaha, rencana investasi termasuk sasaran strategis dan issue-issue strategis lainnya.

(e) Mengawasi organisasi perusahaan dan strategi pengembangan SDM

(f) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris

2 Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan perseroan; Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, serta perubahan dan tambahannya; laporan berkala; laporan-laporan lainnya dari Direksi, serta persoalan lainnya yang dianggap penting pengurusan perusahaan

3 Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penelitian dan pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham

4 Melakukan monitoring terhadap KPI Bidang Enjiniring, Pengembangan Usaha serta Organisasi dan Pengembangan SDM

5 Mengikuti perkembangan perusahaan

6 Melakukan tugas-tugas lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

1 *Mainly responsible for the Engineering Sector, Bussiness Development and Investment, Risk Management Committee and GCG and other strategic targets and issues, including activities including :*

(a) Supervising the implementation of engineering activities, including the production process and quality control.

(b) Supervising the preparation of the Annual Corporate Budget Work Plan.

(c) Supervising the preparation of the Company's Long Term Plan and periodically carry conduct reviews and propose updating if needed.

(d) Supervising the implementation of business development, investment plans including strategic targets and other strategic issues.

(e) Supervising the company organizations and HR development strategy.

(f) Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners.



Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance





		<ol style="list-style-type: none"> 2 <i>Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the company's development plan; Work Plan and Annual Budget of the Company, as well as changes and additions; periodic report, other reports from the Board of Directors, as well as other issues considered that are considered important in the management of the Company.</i> 3 <i>Supervising the implementation of the Company Work Plan and Budget and submit the result of research and opinions to the General Meeting of Shareholders.</i> 4 <i>Monitoring KPI in the fields of administration, finance and HR organization and development.</i> 5 <i>Following the developmnet of the company.</i> 6 <i>Performing other tasks determined by the General Meeting of Shareholders.</i>
Marzuqi	Komisaris <i>Commissioner</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Bertanggung jawab utamanya dalam Bidang Pemasaran, Bidang Pengusahaan, Komite Audit dan sasaran serta Issue Strategis lainnya, meliputi kegiatan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> (a) Mengawasi pelaksanaan pemasaran termasuk pemasaran dan pricing policy (b) Mengawasi pelaksanaan pengusahaan (c) Mengawasi penyiapan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahunan (d) Mengawasi penyiapan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan secara berkala melaksanakan review dan mengusulkan updating jika diperlukan. (e) Mengawasi Organisasi perusahaan dan pengembangan SDM (f) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris 2 Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan perseroan, serta perubahan dan tambahannya; laporan berkala; laporan-laporan lainnya dari Direksi, serta persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan 3 Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penelitian dan pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham 4 Melakukan monitoring terhadap KPI Bidang Pemasaran dan Pengusahaan, serta Organisasi dan Pengembangan SDM 5 Mengikuti perkembangan perusahaan

- 6 Melakukan tugas-tugas lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
- 1 *Mainly responsible in the Marketing Sector, Business Sector, Audit Committees and other strategic issues and targets including activities below :*
- (a) *Supervising the implementation of marketing including marketing and pricing policy.*
- (b) *Supervising the implementation of business.*
- (c) *Supervising the preparation of the Annual Company Budget Work Plan.*
- (d) *Supervising the preparation of the Company's Long Term Plan and Periodically conduct reviews and propose updating if necessary.*
- (e) *Supervising the organization of the company and the development of HR.*
- (f) *Identifying matters that require the attention of the Board of Commisioners.*
- 2 *Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the company's development plan; Annual Work Plan and Budget, as well as changes and additions; periodic reports, other reports from the Board of Directors, as well as other issues deemed important for the management of the Company.*
- 3 *Supervising the implementation of the Company Work Plan and Budget and submit the result of research and opinions to the General Meeting of Shareholders.*
- 4 *Monitoring KPI in the field of marketing and business, as well as HR organization and development.*
- 5 *Following the development of the company.*
- 6 *Performing other tasks determined by the General Meeting of Shareholders.*



Periode Pengangkatan 8 Desember 2020 – 31 Desember 2020

Appointment Employee Period 8 December 2020 – 31 December 2020

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Bidang Tugas <i>Task Field</i>
Ahmad Rofik	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	1 Bertanggung jawab mengkoordinasikan pengawasan perusahaan dan tugas Dewan Komisaris 2 Mengundang, memimpin rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, dan menandatangani dokumen Perseroan antara lain Risalah RUPS, Laporan Manajemen Tahunan dan lain-lain.



3 Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), perubahan dan tambahannya; Laporan Berkala, Laporan-Laporan lainnya dari Direksi, serta persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.

4 Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan dan menyampaikan hasil Pengawasannya serta menyampaikan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

5 Mengikuti perkembangan Perseroan

6 Melakukan tugas-tugas lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

7 Melakukan pengawasan secara keseluruhan terhadap KPI Manajemen

8 Meneliti dan menelaah laporan berkala dan tahunan yang disampaikan Direksi serta menandatangani laporan tahunan

1 *Responsible for coordinating company supervision and the duties of the Board of Commissioners.*

2 *Inviting, chairing the Board of Commissioners' meetings with the Board of Directors, and signing the Company's documents including Minutes of the General Meeting of Shareholders, Annual Management Reports, etc.*

3 *Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the company's development plan; Work Plan and Annual Budget, as well as changes and additions; periodic reports, other reports from the Board of Directors, as well as other issues that considered important for the management of the Company.*

4 *Overseeing the implementation of the Company's Work Plan and Budget and submit the result of research and opinions to the General Meeting of Shareholders.*

5 *Following the development of the Company.*

6 *Performing other tasks determined by the General Meeting of Shareholders.*

7 *Carrying out overall supervision of the Management KPI.*

8 *Researching and analyzing periodic and annual reports prepared by the Board of Directors and signing Annual Report.*

Edward Siagian

Komisaris
Commissioner

1 Bertanggung jawab utamanya pada Bidang Keuangan, Bidang Enjiniring, Pengawasan Internal dan Komite Audit, meliputi antara lain :

(a) Mengawasi Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perusahaan

(b) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan internal, dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan eksternal

(c) Mengawasi Keuangan dan Organisasi Perusahaan dan Strategi Pengembangan SDM

(d) Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan Enjiniring, termasuk proses produksi dan Pengendalian Mutu.

(e) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris

2 Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) serta perubahan dan tambahannya; Laporan Berkala; Laporan-Laporan lainnya dari Direksi, serta persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan.

3 Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil pengawasan dan menyampaikan pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham

4 Melakukan monitoring terhadap KPI Bidang Administrasi, Keuangan dan SDM serta Bidang Enjiniring

5 Mengikuti Perkembangan Perusahaan

6 Melakukan tugas-tugas lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

1 *Mainly responsible for the Financial sector, Engineering sector, Internal Control, Marketing and Audit Committee, including the following activities ;*

(a) Supervising the implementation of the Annual Work Plan and Budget including Financial Statements and Company Performance Reports.

(b) Supervising the implementation of internal controls, ensure the effectiveness of internal and external control systems.

(c) Supervising the company organizations and HR development strategy.

(d) Supervising the Implementation of Engineering Activities, including the production process and Quality Control

(e) Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners.

2 *Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the company's development plan; Work Plan and Annual Budget of the Company, as well as changes and additions; periodic reports, other reports from the Board of Directors, as well as other issues deemed important for the management of the Company.*

3 *Overseeing the implementation of the Company Work Plan and Budget and submit the result of research and opinions to the General Meeting of Shareholders.*





		4	<i>Monitoring KPI in administration, finance and HR as well as in Engineering</i>
		5	<i>Following the development of the company.</i>
		6	<i>Perform other tasks determined by the General Meeting of Shareholders.</i>
Djoko Prasetyo	Komisaris <i>Commissioner</i>	1	<p>Bertanggung jawab utamanya dalam Bidang Pengembangan Usaha dan Investasi, Bidang Organisasi dan SDM, Komite Manajemen Risiko dan pelaksanaan GCG dan sasaran nya serta Issue Strategis perusahaan, meliputi kegiatan antara lain:</p> <p>(a) Mengawasi Penyiapan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan secara berkala melaksanakan review dan mengusulkan updating jika diperlukan</p> <p>(b) Mengawasi Penyiapan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan</p> <p>(c) Mengawasi atas perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Usaha, rencana Investasi termasuk Sasaran Strategis dan Issue Issue strategis lainnya</p> <p>(d) Mengawasi Organisasi Perusahaan dan Strategi Pengembangan SDM</p> <p>(e) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris</p>
		2	Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, serta perubahan dan tambahannya; Laporan Berkala; Laporan-Laporan lainnya dari Direksi, serta persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan perusahaan
		3	Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil pengawasannya dan menyampaikan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham
		4	Melakukan monitoring terhadap KPI Bidang Pemasaran dan Pengembangan Usaha, Bidang Organisasi dan Pengembangan SDM serta pelaksanaan GCG.
		5	Mengikuti perkembangan perusahaan
		6	Melakukan tugas-tugas lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
		1	<p><i>Mainly responsible for Engineering Sector, Bussiness Development and Investment, Risk Management Committee and GCG and other strategic targets and issues, including activities including :</i></p> <p><i>(a) Supervising the preparation of the Company's Long-Term Plan and periodically conduct reviews and propose updating if needed.</i></p> <p><i>(b) Supervising the preparation of the Annual Company Budget Work Plan.</i></p>

		<p>(c) Supervising the implementation of business development, investment plans including strategic targets and other strategic issues.</p> <p>(d) Supervising company organizations and HR development strategy.</p> <p>(e) Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners.</p> <p>2 Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the company's development plan; Work Plan and Annual Budget of the Company, as well as changes and additions; periodic reports, other reports from the Board of Directors, as well as other issues considered important for the management of the Company.</p> <p>3 Supervising the implementation of the Company's Work Plan and Budget and submit the result of research and opinions to the General Meeting of Shareholders.</p> <p>4 Monitoring KPI in the fields of Marketing and Bussiness Development, Organization, HR Organization and Development and the implementation of GCG.</p> <p>5 Following the development of the company.</p> <p>6 Performing other tasks determined by the General Meeting of Shareholders.</p>
Marzuqi	Komisaris Commissioner	<p>1 Bertanggung jawab utamanya dalam Bidang Pemasaran, Bidang Pengusahaan, Komite Audit dan sasaran serta Issue Strategis lainnya, meliputi kegiatan antara lain:</p> <p>(a) Mengawasi Pelaksanaan Pemasaran termasuk Kebijakan Pemasaran dan Pricing Policy</p> <p>(b) Mengawasi Pelaksanaan Pengusahaan</p> <p>(c) Mengawasi Penyiapan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan</p> <p>(d) Mengawasi Penyiapan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan secara berkala melaksanakan review dan mengusulkan updating jika diperlukan.</p> <p>(e) Mengawasi Organisasi Perusahaan dan Strategi Pengembangan SDM</p> <p>(f) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris</p> <p>2 Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Kerja Anggaran Perseroan, serta perubahan dan tambahannya; Laporan Berkala; Laporan-Laporan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan</p> <p>3 Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil Pengawasannya dan menyampaikan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham</p>





- 4 Melakukan monitoring terhadap KPI Bidang Pemasaran dan Pengusahaan, Bidang Organisasi dan Pengembangan SDM
- 5 Mengikuti Perkembangan Perusahaan
- 6 Melakukan tugas-tugas lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
- 1 *Mainly responsible for the Marketing Sector, Business Sector, Audit Committee and other strategic issues and targets, including activities below :*
 - (a) *Supervising the implementation of marketing including marketing and pricing policy.*
 - (b) *Supervising the implementation of business.*
 - (c) *Supervising the preparation of the Annual Corporate Budget Work Plan.*
 - (d) *Supervising the preparation of the Company's Long Term Plan and Periodically conduct reviews and propose updating if necessary.*
 - (e) *Supervising the organization of the company and the development of HR.*
 - (f) *Identifying matters that require the attention of the Board of Commisioners.*
- 2 *Providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the company's development plan; Company's Annual Work Plan and Budget, as well as changes and additions; periodic reports, other reports from the Board of Directors, as well as other issues considered important for the management of the Company.*
- 3 *Supervising the implementation of the Company's Work Plan and Budget and submit the result of the research and opinions to the General Meeting of Shareholders.*
- 4 *Monitoring KPI in the fields of marketing and business, as well as HR organization and development.*
- 5 *Following the development of the company.*
- 6 *Performing other tasks determined by the General Meeting of Shareholders.*

KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas terbuka, maka dasar penetapan kriteria Dewan Komisaris PLN Enjiniring sesuai ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Seluruh ketentuan dimaksud telah tercantum di dalam Anggaran dasar dan *board manual* PLN Enjiniring. Adapun kriteria anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut.

1. Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. Dinyatakan Pailit;
 - b. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan di bidang usaha perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;

THE BOARD OF COMMISSIONERS CRITERIA

As a subsidiary of PT PLN (Persero) which is a State Owned Enterprise in the form of Public Limited Liability Company, the basis of determination on the criteria for the Board of Commissioners of PLN Enjiniring is in accordance to the Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. All of the provisions referred in that law have been stated in the Articles of Association and the PLN Enjiniring board manual. The criteria for members of the Board of Commissioners are as follow;

1. *A party who can be appointed as a member of the Board of Commissioners is an individual who is capable of taking legal actions, except within 5 (five) years prior to his appointment:*
 - a. *Declared bankrupt;*
 - b. *Become a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners or a member of the Supervisory Board who have been found guilty of causing a Company to be declared bankrupt; or*
 - c. *Convicted for committing a crime that caused some losses to the state finances and/or State Owned Enterprises finances and/or related to the financial sector.*
2. *The appointment of members of the Board of Commissioners is carried out by considering integrity, dedication, understanding of the company's management issues related to a management function, having knowledge in the company's business, and being able to provide sufficient time to carry out their duties and other requirements based on applicable law and regulations, in addition to meeting the criteria as referred in number 1.*
3. *Other requirements for members of the Board of Commissioners, namely:*
 - a. *They are not involved as administrators of political parties and/or candidates for legislative members and/or legislative members. Candidates for legislative or legislative members consist of candidates/ members of the House of Representatives (DPR), Regional Representative Council (DPD), Provincial People's Representative Council (DPRD Provinsi), Regional People's Representative Council (DPRD Kabupaten/ Kota);*





- b. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
 - c. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
 - d. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter;
 - e. Bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangkutan.
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, batal demi hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
 5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
 6. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 7. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para pemegang saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. *They are not a candidate for a regional leader and/or a regional leader*
 - c. *They do not serve as a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board of the State Owned Enterprises concerned for 2 (two) consecutive terms;*
 - d. *Physically and mentally health (currently not suffering from a disease that can detain the performance of their duties as a member of the Board of Commissioners / Supervisory Board), as evidenced by a health certificate from a Doctor;*
 - e. *For prospective candidates from the technical ministry or other government agencies, it is required to have a letter of recommendation from the ministry/agencies concerned.*
4. *The appointment of members of the Board of Commissioners who do not meet the requirements as referred in number 1 and 2 above, is null and void by the time the other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors find out that these requirements have not been fulfilled.*
 5. *The Appointment of the members of the Board of Commissioners does not coincide with the appointment of the members of the Board of Directors.*
 6. *The members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders.*
 7. *The members of the Board of Commissioners are appointed from among the candidates proposed by the shareholders and the nomination is binding to the General Meeting of Shareholders.*

BOARD MANUAL DEWAN KOMISARIS

BOARD MANUAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Pedoman kerja Dewan Komisaris diatur dalam *Board Manual*. *Board Manual* antara lain berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris, yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan harus dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan. Dengan adanya *Board Manual* diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi, selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Adapun isi dari *Board Manual* sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Direksi;

Bab III : Dewan Komisaris;

Bab IV : Tata Laksana Wewenang Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris;

Bab V : Tata Laksana Wewenang Direksi dengan Persetujuan RUPS Berdasarkan Rekomendasi Dewan Komisaris .

Beberapa pokok pedoman kerja Dewan Komisaris yang diatur dalam *Board Manual* dijabarkan sebagai berikut.

- **Wewenang Dewan komisaris**

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan Verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan perusahaan.
2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh perusahaan.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan /atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan.

The Board of Commissioners work guidelines are regulated in the Board Manual. The Board Manual, among others, contains guidelines for the work procedures of the Board of Commissioners, which explains the stages of activities in a structured, systematic, easy to understand manner and must be carried out consistently, so that it can be a reference for the Board of Commissioners in carrying out their respective duties to achieve the Company Vision and Mission. With the Board Manual it is expected that high work standards will be achieved in line with the principles of GCG.

The contents of the Board Manual are as follows.

Chapter I : Introduction;

Chapter II : Board of Directors;

Chapter III : Board of Commissioners;

Chapter IV : Procedure for Board of Directors Authority with Board of Commissioners Approval;

Chapter V : Procedure for Board of Directors Authority with General Meeting of Shareholders Approval Based on the Recommendations of the Board of Commissioners.

Some of the work guidelines for the Board of Commissioners set out in the Board Manual are as follows.

- **Board of Commissioners Authority**

In carrying out its duties, the Board of Commissioners has the authority to:

1. *Look at books, letters, and other documents, check the cash or treasury for verification and other securities and check the company assets.*
2. *Enter the lands, buildings and offices that are used by the company.*
3. *Request clarification from the Directors and/or other officials regarding all matters relating to the Company management.*





4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan /atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Mengangkat Sekretaris Dewan komisaris jika dianggap perlu.
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan.
8. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban perusahaan, jika dianggap perlu.
10. Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan.
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan / atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

• Kewajiban Dewan komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, maka Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan.
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJP dan RKAP.

4. Know all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors.
5. Request the Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the Board of Commissioners meeting.
6. Appoint the Board of Commissioners Secretary if deemed necessary.
7. Temporarily dismiss members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company Articles of Association.
8. Form other committees besides the Audit Committee, if deemed necessary by taking into account the company capabilities.
9. Use experts for certain things and within a certain period at the Company expense, if deemed necessary.
10. Take care of the company in certain circumstances for a certain period in accordance with the provisions of the Company Articles of Association.
11. Attend the Board of Directors meetings and provide views on matters discussed.
12. Carry out other supervisory authorities as long as they do not conflict with the statutory regulations, the Articles of Association, and/or Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

• Board of Commissioners Obligations

The Board of Commissioners obligations are as follows:

1. Give advice to the Directors in carrying out the Company management.
2. Research and analyze and sign the Company Long-Term Plan and Company Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Company Articles of Association.
3. Provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Company Long-Term Plan and Company Work Plan and Budget regarding the reasons for the Board of Commissioners to sign the RJPP (Company Long-Term Plan) and RKAP (Company Work Plan and Budget).

4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.
5. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala-gejala menurunnya kinerja Perseroan.
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menanda-tangani laporan tahunan.
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai laporan tahunan, apabila diminta.
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
9. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan perseroan lainnya.
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Mengawasi dan menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif.
13. Mengawasi hal-hal terkait keterbukaan dan kerahasiaan informasi.
14. Bertindak sesuai etika jabatan.

• **Penilaian Kemampuan dan Kepatutan**

Seluruh Dewan Komisaris PLN Enjiniring telah memenuhi kriteria dan ketentuan dalam *Fit and Proper Test* berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait, termasuk ketentuan tentang Komisaris Independen.

4. *Follow the development of the Company activities, provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding any issues deemed important to the management of the company.*
5. *Report immediately to the General Meeting of Shareholders if there are symptoms of a decline in company performance.*
6. *Research and analyze periodic report and annual report prepared by the Directors and sign the Annual Report.*
7. *Provide explanations, opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report, if requested.*
8. *Make minutes of the Board of Commissioners meeting and keep the copy.*
9. *Report to the company regarding ownership of its shares and/or its family in the company and other companies.*
10. *Provide report on the supervisory tasks that have been carried out during the recent financial year to the General Meeting of Shareholders.*
11. *Carry out other obligations in the context of supervisory duties and provide advices, as long as it does not conflict with statutory regulations, Articles of Association and/or Resolutions of the General Meeting of Shareholders.*
12. *Oversee and establish effective internal control systems.*
13. *Oversee matters related to information disclosure and confidentiality.*
14. *Act in accordance with the ethics of the position.*

• **Assessment of Competency and Compliance**

All of the Board of Commissioners PLN Enjiniring have fulfilled the criteria and provisions in the Fit and Proper Test based on the Limited Liability Company Law and GCG provisions, as well as other relevant rules and regulations, including the provisions regarding Independent Commissioners.





TABEL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

TABEL OF ABILITY AND COMPLIANCE ASSESSMENT

Periode Pengangkatan 22 Maret 2016 - 8 Desember 2020 <i>Appointment Employee Period March 22, 2016 - December 08, 2020</i>		
Nama <i>Name</i>	Pelaksana <i>Administrator</i>	Hasil <i>Result</i>
Tumpal M. Simarmata	PT PLN (Persero)	Lulus Pass
Julius Bobo	PT PLN (Persero)	Lulus Pass
Djoko Prasetyo	PT PLN (Persero)	Lulus Pass
Marzuqi	PT PLN (Persero)	Lulus Pass
Periode Pengangkatan 8 Desember 2020 – 31 Desember 2020 <i>Appointment Employee Period December 8, 2020 – December 31, 2020</i>		
Nama <i>Name</i>	Pelaksana <i>Administrator</i>	Hasil <i>Result</i>
Ahmad Rofik	PT PLN (Persero)	Lulus Pass
Edward Siagian	PT PLN (Persero)	Lulus Pass
Djoko Prasetyo	PT PLN (Persero)	Lulus Pass
Marzuqi	PT PLN (Persero)	Lulus Pass

• Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan. Pada Tahun 2019, Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang yang seluruhnya merupakan Komisaris Independen, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang memadai.

• Numbers and Composition Of The Board Of Commissioners

Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. Per-01/MBU/2011, the composition of the Board of Commissioners must enable the effective, precise and fast decision maker and can act independently within the meaning of not having a conflict of interest. In 2018, the Board of Commissioners totaled 4 (four) people, all of whom were Independent Commissioners, consisting of 1 (one) President Commissioner, 3 (three) Commissioners. All members of the Board of Commissioners have adequate integrity, competence and reputation.

TABEL KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS
TABLE OF BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

Periode Pengangkatan 22 Maret 2016 - 8 Desember 2020					
<i>Appointment Employee Period March 22, 2016 - December 08, 2020</i>					
No	Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan	Dasar Pengangkatan
	<i>Name</i>	<i>Position</i>	<i>Domicile</i>	<i>Appointment Date</i>	<i>Basis of Appointment</i>
1	Tumpal M. Simarmata	Komisaris Utama	Bandung	- Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris Utama tanggal 22 Juni 2016	- RUPS Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris Utama tanggal 22 Juni 2016 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 28 tanggal 19 Desember 2016
				- <i>Acting President Commissioner dated June 22, 2016</i>	- <i>AGM Appointment of Acting President Commissioner on June 22, 2016 and Notary Deed Lenny Janis Ishak, SH Number 28 dated December 19, 2016.</i>
				- Komisaris Utama tanggal 17 Juli 2017	- RUPS Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 17 Juli 2017 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 1 tanggal 4 September 2017.
				- <i>President Commissioner dated July 17, 2017</i>	- <i>AGM Dismissal and Appointment of Board of Commissioner Members on July 17, 2017 and Notary Deed Lenny Janis Ishak, SH Number 1 dated September 4, 2017</i>
2	Julius Bobo	Komisaris	Bekasi	- Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Komisaris tanggal 22 Juni 2016	- RUPS Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris Utama tanggal 22 Juni dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 28 tanggal 19 Desember 2016
				- <i>Acting Board of Commissioner dated June 22, 2016</i>	- <i>AGM Appointment of Acting President Commissioner on June 22, 2016 and Notary Deed Lenny Janis Ishak, SH Number 28 dated December 19, 2016.</i>



Tata Kelola Perusahaan yang Baik
 Good Corporate Governance





				<ul style="list-style-type: none"> - Anggota Dewan Komisaris tanggal 17 Juli 2017 	<ul style="list-style-type: none"> - RUPS Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 17 Juli 2017 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 1 tanggal 4 September 2017.
				<ul style="list-style-type: none"> - <i>Member of Board of Commissioner dated July 17, 2017</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>AGM Dismissal and Appointment of Board of Commissioner Members on July 17, 2017 and Notary Deed Lenny Janis Ishak, SH Number 1 dated September 4, 2017</i>
3	Djoko Prasetyo	Komisaris	Jakarta Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Komisaris tanggal 22 Juni 2016 - <i>Acting Board of Commissioner dated June 22, 2016</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - RUPS Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris Utama tanggal 22 Juni dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 28 tanggal 19 Desember 2016 - <i>AGM Dismissal and Appointment of Board of Commissioner Members on July 17, 2017 and Notary Deed Lenny Janis Ishak, SH Number 1 dated September 4, 2017</i>
				<ul style="list-style-type: none"> - Anggota Dewan Komisaris tanggal 17 Juli 2017 - <i>Member of Board of Commissioner dated July 17, 2017</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - RUPS Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 17 Juli 2017 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 1 tanggal 4 September 2017. - <i>AGM Dismissal and Appointment of Board of Commissioner Members on July 17, 2017 and Notary Deed Lenny Janis Ishak, SH Number 1 dated September 4, 2017</i>
4	Marzuqi	Komisaris	Jakarta Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota Dewan Komisaris tanggal 17 Juli 2017ww - <i>Member of Board of Commissioner dated July 17, 2017</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - RUPS Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 17 Juli 2017 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 1 tanggal 4 September 2017 - <i>AGM Dismissal and Appointment of Board of Commissioner Members on July 17, 2017 and Notary Deed Lenny Janis Ishak, SH Number 1 dated September 4, 2017</i>

Periode Pengangkatan 8 Desember 2020 – 31 Desember 2020					
Appointment Employee Period December 8, 2020 – December 31, 2020					
No	Nama Name	Jabatan Position	Domisili Domicile	Tanggal Pengangkatan Appointment Date	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
1	Ahmad Rofik	Komisaris Utama	Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama tanggal 8 Desember 2020 - <i>Acting President Commissioner dated December 8, 2020</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - RUPS (Sirkuler) Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris Utama tanggal 8 Desember 2020. - <i>GMS (Circular) Appointment and dismissal of the President Commissioner on December 8, 2020.</i>
2	Djoko Prasetyo	Komisaris	Jakarta Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Pelaksana Tugas Dewan Komisaris tanggal 22 Juni 2016 - <i>Acting Board of Commissioner dated June 22, 2016</i> - Anggota Dewan Komisaris tanggal 17 Juli 2017 - <i>Member of Board of Commissioner dated July 17, 2017</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - RUPS Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Komisaris Utama tanggal 22 Juni dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 28 tanggal 19 Desember 2016 - <i>AGM Dismissal and Appointment of Board of Commissioner Members on July 17, 2017 and Notary Deed Lenny Janis Ishak, SH Number 1 dated September 4, 2017</i> - RUPS Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 17 Juli 2017 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 1 tanggal 4 September 2017. - <i>AGM Dismissal and Appointment of Board of Commissioner Members on July 17, 2017 and Notary Deed Lenny Janis Ishak, SH Number 1 dated September 4, 2017</i>
3	Marzuqi	Komisaris	Jakarta Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota Dewan Komisaris tanggal 17 Juli 2017 - <i>Member of Board of Commissioner dated July 17, 2017</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - RUPS Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tanggal 17 Juli 2017 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 1 tanggal 4 September 2017 - <i>AGM Dismissal and Appointment of Board of Commissioner Members on July 17, 2017 and Notary Deed Lenny Janis Ishak, SH Number 1 dated September 4, 2017</i>
4	Edward Siagian	Komisaris	Jakarta Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama tanggal 8 Desember 2020 	<ul style="list-style-type: none"> - RUPS (Sirkuler) Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris Utama tanggal 8 Desember 2020.





KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

PLN Enjiniring memiliki Pedoman Good Corporate Governance yang antara lain mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris. Berdasarkan pedoman tersebut, komposisi Dewan Komisaris hendaknya sedemikian rupa sehingga memungkinkan diambilnya keputusan secara efektif, tepat, cepat, dan independen.

Komposisi Dewan Komisaris merupakan bauran yang tepat antara pengalaman manajerial dan kepemimpinan, pendidikan yang memadai dan sesuai dengan tanggung jawab yang diemban, serta memiliki karakter yang baik. Perusahaan juga senantiasa berupaya agar komposisi Dewan Komisaris memiliki keberagaman dalam usia, pendidikan, pengalaman kerja dan keahlian.

Pada periode 2020, keberagaman komposisi Dewan Komisaris dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

TABEL KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

TABLE OF DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Periode Pengangkatan tahun 2016 - 2020					
Nama Dewan Komisaris	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
<i>Name of the Board of Commissioners</i>	<i>Age</i>	<i>Sex</i>	<i>Education</i>	<i>Work Experience</i>	<i>Expertise</i>
Tumpal Simarmata	59 tahun	Laki-laki	S1 Institut Teknologi Bandung	Sebelum menjadi PLT. Komisaris Utama PLN Enjiniring, beliau menjadi Kepala Divisi Konstruksi PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan, Kepala Divisi dan Konstruksi PT PLN (Persero), General Manajer PT PLN (Persero) UIP VII, General Manajer PT PLN (Persero) UIP IV	Teknik Mesin

- Member of Board of Commissioner dated December 8, 2020
- GMS (Circular) Appointment and dismissal of the President Commissioner on December 8, 2020.

POLICY ON DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

PLN Enjiniring has Guidelines of Good Corporate Governance which among others regulate the diversity of the composition of the Board of Commissioners. Based on these guidelines, the composition of the Board of Commissioners should be such that it allows decisions to be made effectively, accurately, quickly and independently.

The composition of the Board of Commissioners is an appropriate mix between managerial and leadership experience, adequate education and in accordance with the responsibilities assumed, and has good character. The company also strives to ensure that the composition of the Board of Commissioners has diversity in age, education, work experience and expertise.

In 2020, the diversity of the composition of the Board of Commissioners can be seen as in the table below:

	59 years old	Male	S1 Bandung Institute of Technology	Before becoming a PLT of PLN Enjiniring Chief Commissioner, he was Head of Construction Division of PT PLN (Persero) Kalimantan Region, Head of Division and Construction of PT PLN (Persero) , General Manager of PT PLN (Persero) UIP VII, General Manager of PT PLN (Persero) UIP IV.	Mechanical Engineering
Djoko Prasetyo	61 tahun	Laki-laki	PhD University of New South Wales, Australia	Saat ini beliau adalah Advisor Consulting Firm PT Rekadaya ElektriKA Consult. Sebelumnya beliau pernah menjadi Konsultan Independen World Bank Jakarta dan Konsultan Independen Asia Development Bank	Electrical Engineer
	61 years old	Male		Currently he is the Advisor Consulting Firm of PT Rekadaya ElektriKA Consult. Previously he was an independent Consultant of Jakarta World Bank and Independent Consultant of Asia Development Bank.	Electrical Engineer
Julius Bobo	58 tahun	Laki-laki	Magister Manajemen Jurusan Sumber Daya Manusia dari Universitas Satyagama	Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum KOPERASI BERIKET Bara Nusantara, Ketua Bidang MIGAS YPEI (Yayasan Peduli Energi Indonesia), Ketua Umum POROS DAERAH (2009-sekarang), Sekjen MEHI (Masyarakat Energi Hijau Indonesia) (2005-sekarang) dan anggota IKAL LEMHANAS (2001-sekarang). Dari tahun 2009, beliau juga sebagai Tenaga Ahli DPDRI (Dewan Perwakilan Daerah).	Manajemen SDM
	58 years old	Male	Master of Management Department of Human Resources from the University Satyagama	Currently he serves as a General Chairperson of Bara Nusantara KOPERASI BERIKET , Chairman of the YPEI Oil and Gas Sector (Yayasan Peduli Energi Indonesia), General Chairman of the POROS DAERAH (2009 - Present), Secretary General of MEHI (Masyarakat Energi Hijau Indonesia) (2005-present) and member of IKAL LEMHANAS (2001-present). From 2009, he was also an expert of DPD RI.	HR Management
Marzuqi	48 Tahun	Laki-laki	Magister Manajemen di STIE IPWI Jakarta	Beliau sempat menjadi Tenaga Ahli di DPR-RI kurang lebih selama 12 tahun, dilanjutkan menjadi tenaga ahli di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) hampir 7 tahun. Begitu juga di lembaga Beliau pernah menjadi wakil sekretaris Yayasan Universitas Sunan Giri Surabaya serta Direktur Lembaga Tunas Mandiri, sebuah lembaga yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia. Dan sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang dipercaya menjadi Komisaris PT. PLNE (Prima Layanan Nasional Enjiniring).	


 Tata Kelola Perusahaan yang Baik
 Good Corporate Governance


48 years
old

Male

Master of
Management
at STIE IPWI
Jakarta

He had been an expert in the DPR RI for approximately 12 years, continued to become an expert at the Republic of Indonesia Supreme Audit Agency (BPK RI) for almost 7 years. Likewise at the institution he was the deputy secretary of the Sunan Giri University Foundation Surabaya and Director of the Tunas Mandiri Institute, an institution engaged in the development of human resources. And since August 2017 until now he has been trusted to be a Commissioner of PT PLNE (Prima Layanan Nasional Enjiniring)



Komisaris Independen

Independent Commissioner

Anggota Dewan Komisaris PLN Enjiniring telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011. Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris harus merupakan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan saat ini adalah 4 (empat) orang, yang 3 (tiga) orang diantaranya atau sama dengan 75% anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Dengan demikian, komposisi tersebut juga telah memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN mengenai Komisaris Independen.

Members of the Board of Commissioners of PLN Enjiniring have met the number, composition, criteria and independence in accordance with the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. Per-01/MBU/2011. The members of the Board of Commissioners must be Independent Commissioners at least 20% (twenty percent) of it. The number of members of the Company's Board of Commissioners is currently 4 (four) people, of which 3 (three) people or equal to 75% of the members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners. Thus, this composition has also fulfilled the regulations set by the Ministry of State Owned Enterprises regarding Independent Commissioners.

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

1. RUPS/Pemegang Saham menetapkan Anggota Komisaris Independen paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Anggota Dewan Komisaris secara eksplisit dalam keputusan pengangkatannya. Komisaris Independen memiliki kompetensi dibidang auditing, keuangan dan akuntansi.
2. Anggota Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

APPOINTMENT CRITERIA OF INDEPENDENT COMMISSIONER

1. The General Meeting of Shareholders / Shareholders determines the members of the Independent Commissioners at least 20% (twenty percent) of the members of the Board of Commissioners in their appointment decisions explicitly. Independent Commissioners have competencies in auditing, financing and accounting.
2. Member of Independent Commissioner is a Member of the Board of Commissioners who has no financial, management, share ownership and / or family relationship with other members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors and / or controlling shareholders or a relationship with the Company, which may affect their ability to act independently.
3. The number of Independent Commissioners must be able to ensure that the supervisory mechanism runs effectively and runs in accordance with laws and regulations. One of the Independent Commissioners must have an accounting or finance background.



PERNYATAAN KOMISARIS INDEPENDEN

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, yang meliputi:

- a. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
- b. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- c. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
- d. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
- e. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
- f. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

STATEMENT OF THE INDEPENDENT COMMISSIONER

Affiliations between members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Controlling Shareholders, which includes:

- a. *Affiliations between members of the Board of Directors and other members of the Board of Directors.*
- b. *Affiliations between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.*
- c. *Affiliations between members of the Board of Directors and the Major and / or controlling Shareholders.*
- d. *Affiliations between members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Commissioners; and*
- e. *Affiliations between members of the Board of Commissioners and the Major and / or controlling shareholders.*
- f. *Affiliations between members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Controlling Shareholders, can be seen in the table below:*

TABEL HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS
TABLE OF AFFILIATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Periode Pengangkatan 22 Maret 2016 - 8 Desember 2020																
Appointment Employee Period March 22, 2016 - December 08, 2020																
Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris																
Financial, Family and Management Relations of the Commissioners																
Komisaris Commissioners	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan			
	Financial Relations with						Financial Relations with									
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali					
	<i>Board of Commissioners</i>		<i>Directors</i>		<i>Controlling Shareholders</i>		<i>Board of Commissioners</i>		<i>Directors</i>		<i>Controlling Shareholders</i>				<i>Management Relations</i>	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak			Ya	Tidak
Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No			
Tumpal M. Simarmata	√		√		√		√		√		√		√			
Julius Bobo	√		√		√		√		√		√		√			
Djoko Prasetyo	√		√		√		√		√		√		√			
Marzuqi	√		√		√		√		√		√		√			





Periode Pengangkatan 8 Desember 2020 – 31 Desember 2020

Appointment Employee Period December 08, 2020 - December 31, 2020

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris

Financial, Family and Management Relations of the Commissioners

Komisaris Commissioners	Hubungan Keuangan Dengan <i>Financial Relations with</i>						Hubungan Keluarga Dengan <i>Financial Relations with</i>						Hubungan Kepengurusan Management Relations	
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
	<i>Board of Commissioners</i>		<i>Directors</i>		<i>Controlling Shareholders</i>		<i>Board of Commissioners</i>		<i>Directors</i>		<i>Controlling Shareholders</i>			
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No
Ahmad Rofik		√		√		√		√		√		√		√
Djoko Prasetyo		√		√		√		√		√		√		√
Marzuqi		√		√		√		√		√		√		√
Edward Siagian		√		√		√		√		√		√		√

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Board Manual Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.

CONCURRENT POSITIONS ON THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the Company's Articles of Association and Board Manual, members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as:

1. Members of the Board of Directors of State Owned Enterprises, Regional Owned Enterprises, Private Owned Enterprises.

2. Jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislative, dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan/atau ;
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Untuk perangkapan jabatan Dewan Komisaris yang tidak termasuk dalam ketentuan di atas atau untuk pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud di atas maka diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Bagi anggota Direksi Perusahaan yang tidak lagi menjabat, tidak dapat diangkat menjadi Komisaris Utama Perusahaan yang sama selama 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan tidak menjabat anggota Direksi.

Dewan Komisaris telah mengungkapkan jabatan rangkap yang dimilikinya. Jabatan rangkap Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

2. Other positions in accordance with the laws and regulations, officials or administrators of political parties and/or candidates for legislative members, and/or candidates for Regional Leader/Deputy Regional Leader and/or;
3. Other positions that could create a conflict of interest.

For concurrent positions of the Board of Commissioners that are not included in the above provisions or for exceptions to the provisions referred to above, the approval of the General Meeting of Shareholders is required.

A member of the Board of Directors of the Company who is no longer serving, cannot be appointed as the President Commissioner of the same Company for 2 (two) years since he / she does not anymore serve as a member of the Board of Directors.

The Board of Commissioners have disclosed the multiple positions they hold. The concurrent positions of the Board of Commissioners can be seen in the table below as follows:

TABEL RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS
TABLE CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONER

Periode Pengangkatan 22 Maret 2016 - 8 Desember 2020		Appointment Employee Period March 22, 2016 - December 08, 2020	
Tumpal M Simarmata	Komisaris Utama	-	-
	President Commissioner	-	-
Djoko Prasetyo	Komisaris	-	-
	Commissioner	-	-
Julius Bobo	Komisaris	-	-
	Commissioner	-	-
Marzuqi	Komisaris	-	-
	Commissioner	-	-





Periode Pengangkatan 8 Desember 2020 - 31 Desember 2020

Appointment Employee Period December 08, 2020 - December 31, 2020

Ahmad Rofik	Komisaris Utama		
	President Commissioner	-	-
Djoko Prasetyo	Komisaris		
	Commissioner	-	-
Marzuqi	Komisaris		
	Commissioner	-	-
Edward Siagian	Komisaris		
	Commissioner	-	-

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Share Ownership of The Board Of Commissioners

Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan keluarga di PLN Enjiniring dan perusahaan lain, serta telah menandatangani Pakta Integritas. Hal ini merupakan bentuk komitmen Dewan Komisaris dalam menghindari aktivitas yang berpotensi benturan kepentingan.

The Board of Commissioners has held a Special Register that contains the share ownership of members of the Board of Commissioners and family in PLN Enjiniring and other companies, and has signed an Integrity Pact. This is a form of the Board of Commissioners commitment to avoid activities that have the potential for a conflict of interest.

Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki saham, baik di PLN Enjiniring maupun di perusahaan lainnya. Kepemilikan saham Dewan Komisaris sebagai berikut.

The Board of Commissioners does not have shares, either in PLN Enjiniring or in other companies. The Board of Commissioners share ownership is as follows.

TABEL KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS
TABLE OF SHAREHOLDERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Periode Pengangkatan 22 Maret 2016 - 8 Desember 2020		
<i>Appointment Employee Period March 22, 2016 - December 08, 2020</i>		
Nama	Kepemilikan Saham di PLN Enjiniring	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain
<i>Name</i>	<i>Share Ownership at PLN Enjiniring</i>	<i>Share Ownership in Other Companies</i>
Tumpal M. Simarmata	Nihil Nil	Nihil Nil
Julius Bobo	Nihil Nil	Nihil Nil
Djoko Prasetyo	Nihil Nil	Nihil Nil
Marzuqi	Nihil Nil	Nihil Nil
Periode Pengangkatan 8 Desember 2020 - 31 Desember 2020		
<i>Appointment Employee Period December 08, 2020 - December 31, 2020</i>		
Nama	Kepemilikan Saham di PLN Enjiniring	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain
<i>Name</i>	<i>Share Ownership at PLN Enjiniring</i>	<i>Share Ownership in Other Companies</i>
Ahmad Rofik	Nihil Nil	Nihil Nil
Djoko Prasetyo	Nihil Nil	Nihil Nil
Marzuqi	Nihil Nil	Nihil Nil
Edward Siagian	Nihil Nil	Nihil Nil



Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Conflict of Interest Management

Dewan komisaris/Pengawas memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakan tersebut.

The board of commissioners/supervisors has a conflict of interest policy and consistently implements the policy.

1. Terdapat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai (potensi) benturan kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap dirinya dan menyampaikannya kepada RUPS/Pemilik Modal:
 - a. Adanya surat pernyataan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun:
 - 1) Untuk pernyataan tahunan dapat dilaksanakan dengan menambahkan pernyataan tersebut sebagai lampiran atau bagian dari Kontrak Kinerja atau RKAT Dewan Komisaris.
 - 2) Bila dalam periode pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengalami (potensi) benturan kepentingan terdapat surat pernyataan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai hal tersebut dan disampaikan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.
 - b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas membuat Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan persetujuan RUPS/Pemilik Modal.

1. *There is a policy of the Board of Commissioners/ Board of Supervisors regarding (potential) conflicts of interest that could interfere the implementation of the duties of the Board of Commissioners/Supervisory Board.*
2. *The Board of Commissioners/Supervisory Board signs a statement of having no conflict of interest and states in writing the matters that have the potential to cause a conflict of interest against her/him and submits them to the GMS/Capital Owner:*
 - a. *There is a statement that the Commissioner does not have a conflict of interest at the beginning of the appointment, which is updated at the beginning of the year:*
 - 1) *An annual statement may be implemented by adding the statement as an attachment or as a part of the Performance Contract or RKAT of the Board of Commissioners.*
 - 2) *If during the period of carrying out its duties, the Board of Commissioners/ Supervisory Board experiences (potential) conflict of interest, there is a statement from the Board of Commissioners/ Supervisory Board regarding this matter and submitted to the Shareholders/ Capital Owners.*
 - b. *The Board of Commissioners/Supervisory Board drafts an Integrity Pact which is attached to the Proposed Action of the Board of Directors which must obtain a recommendation from the Board of Commissioners/ Supervisory Board and approval from the GMS/Capital Owner.*

3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan tersebut dan perusahaan lain.

3. *The Board of Commissioners/Supervisory Board must report to the company (Corporate Secretary) to be recorded in a Special Register regarding the ownership of shares and/or their families in the company and other companies.*





Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2020

The Implementation Of The Board Of Commissioners Duties In 2020

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris Perusahaan terus proaktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi dan memberikan masukan kepada Direksi. Bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris tentunya mengacu pada implementasi atas rekomendasi yang telah diberikan Dewan Komisaris terhadap Direksi maupun melalui komite-komite yang dibentuk. Pada periode Januari sampai dengan Desember 2020, Dewan Komisaris melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 12 kali yang diadakan pada setiap bulan.
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 11 kali yang diadakan pada setiap bulan.
3. Dewan Komisaris telah mengikuti RUPS sebanyak 2 kali yaitu RUPS RKAP Tahun 2020 dan RUPS LPT Tahun Buku 2019 PT PLN Enjiniring.
4. Dewan Komisaris telah menerbitkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan 2020.
5. Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan bisnis atau proyek PLN Enjiniring.
6. Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan terhadap hal-hal yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris.
7. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap persoalan strategis, serta efektifitas pelaksanaan internal kontrol dan GCG di perusahaan.

As part of their duties and responsibilities, the Company Board of Commissioners continues to proactively monitor the performance of the Board of Directors and provide input to the Board of Directors. The form of supervision carried out by the Board of Commissioners certainly refers to the implementation of the recommendations given by the Board of Commissioners to the Board of Directors and through established committees. In the period from January to December 2020, the Board of Commissioners did the following.

1. *The Board of Commissioners has held 12 Coordination Meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors each month.*
2. *The Board of Commissioners has held 11 Internal Meetings of the Board of Commissioners each month.*
3. *The Board of Commissioners has attended the General Meeting of Shareholders 2 time.*
4. *The Board of Commissioners has issued the Annual Supervision Report of the Board of Commissioners 2019.*
5. *The Board of Commissioners has conducted a working visit related to the implementation of PLN Enjiniring business or project.*
6. *The Board of Commissioners has reviewed matters that require the Board of Commissioners approval.*
7. *The Board of Commissioners has carried out supervision and monitoring of strategic issues, as well as the effectiveness of the implementation of internal control and GCG in the company.*

Rapat Internal Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Internal Meetings

Dewan Komisaris mengadakan rapat intern Dewan Komisaris dengan ketentuan:

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.
2. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh Anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.
4. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
5. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
6. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.
8. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat memutuskan hasil rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 3.7 angka 2 di atas, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.

The Board of Commissioners holds an internal meeting of the Board of Commissioners with the following conditions:

1. *All decisions of the Board of Commissioners are taken at the Board of Commissioners meeting.*
2. *Decisions can also be made outside the Board of Commissioners meeting as long as all the members of the Board of Commissioners agree on the method and material to be decided.*
3. *Meetings of the Board of Commissioners are valid and have the right to make binding decisions if they are attended or represented by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the members of the Board of Commissioners.*
4. *In the other agenda, the meeting of the Board of Commissioners is not entitled to make decisions unless all members of the Board of Commissioners or their authorized representatives attend and approve the addition of the agenda of the meeting.*
5. *All decisions in the Board of Commissioners meeting are taken by deliberation to reach consensus.*
6. *If no agreements is reached through deliberation, the decisions of the Board of Commissioners meeting shall be adopted by an ordinary majority vote.*
7. *Each member of the Board of Commissioners is entitled to cast 1 (one) vote plus 1 (one) vote for the member of the Board of Commissioners he/she represent.*
8. *If the number of votes agreeing and disagreeing is the same, then the chairman of the meeting will decide the result of the meeting, with due observance of the provisions concerning accountability as referred in point 3.7 number 2 above, except for individuals, meeting decisions shall be made by closed voting.*





9. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
10. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan suatu alternatif dengan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
11. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Sepanjang tahun 2020, Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Internal Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

9. A blank vote (abstention) is deemed to agree with the proposal submitted at the meeting.
10. In the event that more than 2 (two) alternatives are proposed and the voting result has not received an alternative with a vote of more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the number of votes cast, a re-election of the 2 (two) proposals that have received votes the most so that one of the proposals gets more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total votes cast.
11. Votes that are invalid are deemed non-existent and are not counted in determining the number of votes cast in the meeting.

Throughout 2020, the Agenda, Dates and Participants of the Board of Commissioners Internal Meetings are as follow.

TABEL RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING TABLE

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	08 Januari 2020 January 08, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Rapat Dekom Direksi 2. Laporan Komite - Komite Dekom 3. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <ol style="list-style-type: none"> 1. Preparation of the Board of Commissioners Meeting 2. Board of Commissioners Committee Report 3. Other things that need attention 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpal M. Simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi
2	19 Januari 2020 January 29, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan RUPS RKAP 2020 2. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <ol style="list-style-type: none"> 1. Preparation for the GMS RKAP 2020 2. Other things that need attention 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpal M. Simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi
3	20 Februari 2020 February 20, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Rapat Dekom Direksi 2. Laporan Komite - Komite Dekom 3. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <ol style="list-style-type: none"> 1. Preparation of the Board of Commissioners Meeting 2. Board of Commissioners Committee Report 3. Other things that need attention 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpal M. Simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi

4	16 April 2020 <i>April 16, 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan Rapat Dekom - Direksi Laporan Komite - Komite Dekom Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <ol style="list-style-type: none"> <i>Preparation of the Board of Commissioners Meeting</i> <i>Board of Commissioners Committee Report</i> <i>Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Tumpal M. Simarmata Julius Bobo Djoko Prasetyo Marzuqi
5	05 Juni 2020 <i>June 05, 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan Rapat Dekom - Direksi Laporan Komite - Komite Dekom Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <ol style="list-style-type: none"> <i>Preparation of the Board of Commissioners Meeting</i> <i>Board of Commissioners Committee Report</i> <i>Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Tumpal M. Simarmata Julius Bobo Djoko Prasetyo Marzuqi
6	14 Juli 2020 <i>July 14, 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan Rapat Dekom - Direksi Laporan Komite - Komite Dekom Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <ol style="list-style-type: none"> <i>Preparation of the Board of Commissioners Meeting</i> <i>Board of Commissioners Committee Report</i> <i>Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Tumpal M. Simarmata Julius Bobo Djoko Prasetyo Marzuqi
7	18 Agustus 2020 <i>August 18, 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan Rapat Dekom - Direksi Laporan Komite - Komite Dekom Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <ol style="list-style-type: none"> <i>Preparation of the Board of Commissioners Meeting</i> <i>Board of Commissioners Committee Report</i> <i>Other things that need attention</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Tumpal M. Simarmata Julius Bobo Djoko Prasetyo Marzuqi
8	11 September 2020 <i>September 11, 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> Rencana Aksi Korporat PT CPSI <ol style="list-style-type: none"> <i>Corporate Action Plan of PT CPSI</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Tumpal M. Simarmata Julius Bobo Djoko Prasetyo Marzuqi
9	21 September 2020 <i>September 21, 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan Rekomendasi Dewan Komisaris tentang Masalah CPSI <ol style="list-style-type: none"> <i>Preparation of Board of Commissioners Recommendations on CPSI Issues</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Tumpal M. Simarmata Julius Bobo Djoko Prasetyo Marzuqi
10	23 September 2020 <i>September 23, 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> Mempersiapkan Tanggapan Dekom Terhadap Perbaikan Usulan Opsi Penyelesaian Permasalahan CPSI <ol style="list-style-type: none"> <i>Preparing the Board of Commissioner Response to the Improvement of the Proposed CPSI Solving Problem Options</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Tumpal M. Simarmata Julius Bobo Djoko Prasetyo Marzuqi


 Tata Kelola Perusahaan yang Baik
 Good Corporate Governance




11	25 September 2020 <i>September 25, 2020</i>	1. Pembahasan KPI Direksi <i>1. Discussion of Key Performance Indicator Board of Directors</i>	1. Tumpal M. Simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi
12	03 November 2020 <i>November 03, 2020</i>	1. Pembahasan Tanggapan Dekom terhadap Laporan Manajemen TW III 2020 <i>2. Discussion of the Board of Commissioners' Response to the 2020 Quarter III Management Report</i>	1. Tumpal M. Simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi
13	05 November 2020 <i>November 05, 2020</i>	1. Pembahasan Pedoman Pengawasan AP dan Perusahaan Afiliasi <i>1. Discussion of Guidelines for Supervision of Subsidiaries and Affiliated Companies</i>	1. Tumpal M. Simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi
14	10 November 2020 <i>November 10, 2020</i>	1. Persiapan Rapat Dekom - Direksi 2. Laporan Komite-Komite Dekom 3. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>1. Preparation of the Board of Commissioners Meeting 2. Board of Commissioners Committee Report 3. Other things that need attention</i>	1. Tumpal M. Simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi
16	17 Desember 2020 <i>December 17, 2020</i>	1. Pembagian Tugas Dekom dalam Komite Audit dan Komite MR&GCG 2. Penyegaran Sek Dekom dan anggota Komite Dekom 3. Laporan Tugas Pengawasan TW 4 tahun 2020 4. Rencana Kerja Dekom Tahun 2021 <i>1. Division of duties of the board of commissioners into the Audit Committee and the MR & GCG Committee 2. Refreshment of the Secretary of the Board of Commissioners and members of the Board of Commissioners Committee 3. Report of the 4th Quarter of 2020 Supervision Tasks 4. Work Plan of the Board of Commissioners for 2021</i>	1. Ahmad Rofik 2. Djoko Prasetyo 3. Marzuqi 4. Edward Siagian

Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi

The Board of Commissioners and the Board of Directors Joint Meetings

Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat dengan mengundang Direksi dengan ketentuan:

1. Rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri Direksi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
2. Panggilan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau Anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan kepada anggota Komisaris lain maupun Direksi dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

Sepanjang tahun 2020, Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

The Board of Commissioners may hold a meeting and inviting the Board of Directors in following conditions:

1. *The Board of Commissioner Meetings attended by Board of Directors are held as needed.*
2. *The Board of Commissioners meeting initiation as referred in number 1 above shall be made in writing by the President Commissioner or Member of the Commissioners appointed by the President Commissioner and submitted to other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors within a period, at least, 3 (three) days before the meeting is held.*
3. *The meeting invitation must stated the agenda, date, time and place of the meeting.*

Throughout 2020, the Agenda, Dates and Participants of the Board of Commissioners and the Board of Directors join meetings are as follows.

TABEL RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS JOINT MEETING TABLE

No	Tanggal <i>Date</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Peserta Rapat – Dewan Komisaris <i>Meeting Participants - Board of Commissioners</i>	Peserta Rapat -Direksi <i>Meeting Participants - Directors</i>
1	29 Januari 2020 <i>January 29, 2020</i>	1. Pembahasan Persiapan RUPS RKAP 2020 2. Hal - Hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>1. Discussion on Preparation for the 2020 RKAP GMS 2. Other things that need attention</i>	1. Tumpal M. Simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi	1. Hernadi Buhron 2. Alfi Zamzami 3. Yanuar Hakim 4. Ultrisza Mednawarman
2	20 Februari 2020 <i>February 20, 2020</i>	1. Tindak lanjut rapat sebelumnya 2. Tindak Lanjut RUPS RKAP 2020 3. Hal-Hal Lain yang perlu mendapat perhatian <i>1. Follow up on the previous meeting 2. Follow Up for the GMS RKAP 2020 3. Other things that need attention</i>	1. Tumpal M. simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi	1. Hernadi Buhron 2. Alfi Zamzami 3. Yanuar Hakim 4. Ultrisza Mednawarman





3	13 April 2020	1. Permohonan dukungan Dekom sehubungan rencana PLNE untuk pemberian SHL kepada CPSI terkait restrukturisasi hutang CPSI kepada Bank Mandiri	1. Tumpal M. Simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo	1. Hernadi Buhron 2. Alfi Zamzami 3. Yanuar Hakim 4. Ultrisza Mednawarman
	<i>April 13, 2020</i>	<i>1. Request for support from the Board of Commissioners regarding the PLNE plan to grant SHL to CPSI regarding CPSI's debt restructuring to Bank Mandiri</i>		
4	13 Mei 2020	1. Kajian Risiko Pelaksanaan RKAP 2020 dalam kondisi Covid-19 2. Laporan Draft LPT 2019 (Audited) 3. Tindak lanjut rapat sebelumnya 4. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian	1. Tumpal M. simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi	1. Hernadi Buhron 2. Alfi Zamzami 3. Yanuar Hakim 4. Ultrisza Mednawarman
	<i>May 13, 2020</i>	<i>1. Risk Assessment of Implementation of RKAP 2020 in Covid-19 conditions 2. 2019 LPT Draft Report (Audited) 3. Follow up on the previous meeting 4. Other things that need attention</i>		
5	08 Juni 2020	1. Revisi RKAP 2020 2. Persiapan RUPS LPT 2019 3. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 4. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian	1. Tumpal M. simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi	1. Hernadi Buhron 2. Alfi Zamzami 3. Yanuar Hakim 4. Ultrisza Mednawarman
	<i>June 08, 2020</i>	<i>1. Revised RKAP 2020 2. Preparation for GMS LPT 2019 3. Follow up on the previous meeting 4. Other things that need attention</i>		

6	15 Juli 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Perusahaan TW II Tahun 2020 2. Prognosa pelaksanaan RKAP Tahun 2020 s.d. Akhir Tahun 3. Rencana tindak lanjut arahan RUPS LPT 2019 4. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 5. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpal M. simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Alfi Zamzami 3. Yanuar Hakim 4. Ultrisza Mednawarman
	July 15, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Company Performance TW II of 2020</i> 2. <i>Prognosis for the implementation of the 2020 RKAP until the end of the year</i> 3. <i>Plan of follow-up to the direction of the GMS LPT 2019</i> 4. <i>Follow up on the previous meeting</i> 5. <i>Other things that need attention</i> 		
7	09 Agustus 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan RKAP 2021 2. Prognosa pelaksanaan RKAP Tahun 2020 s.d. Akhir Tahun 3. Rencana tindak lanjut arahan RUPS LPT 2019 4. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 5. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpal M. simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Alfi Zamzami 3. Yanuar Hakim 4. Ultrisza Mednawarman
	August 09, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Discussion of RKAP 2021</i> 2. <i>Prognosis for the implementation of the 2020 RKAP until the end of the year</i> 3. <i>Plan of follow-up to the direction of the GMS LPT 2019</i> 4. <i>Follow up on the previous meeting</i> 5. <i>Other things that need attention</i> 		
8	16 Agustus 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Asumsi dan Penyesuaian RKAP 2020 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpal M. simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Alfi Zamzami 3. Yanuar Hakim 4. Ultrisza Mednawarman
	August 16, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Changes in Assumptions and Adjustments to RKAP 2020</i> 		





9	26 Agustus 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan RKAP 2021 2. Prognosa pelaksanaan RKAP Tahun 2020 s.d. Akhir Tahun 3. Rencana tindak lanjut arahan RUPS LPT 2019 4. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 5. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpal M. simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Alfi Zamzami 3. Yanuar Hakim 4. Ultrisza Mednawarman
	August 26, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of RKAP 2021 2. Prognosis for the implementation of the 2020 RKAP until the end of the year 3. Plan of follow-up to the direction of the GMS LPT 2019 4. Follow up on the previous meeting 5. Other things that need attention 		
10	14 September 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Aksi Korporasi PT CPSI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpal M. simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Alfi Zamzami 3. Yanuar Hakim 4. Ultrisza Mednawarman
	September 14, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT CPSI's Corporate Action Plan 		
11	17 September 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan RKAP 2021 2. Program Akselerasi SDM untuk penyesuaian grade dan mapping kompetensi Enjinir 3. Divestasi Saham PLNE di 4 IPP 4. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 5. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpal M. simarmata 2. Julius Bobo 3. Djoko Prasetyo 4. Marzuqi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Yanuar Hakim 3. Alfi Zamzami 4. Ultrisza Mednawarman
	September 17, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on the 2021 RKAP 2. HR Acceleration Program for grade adjustment and competency mapping of Engineers 3. Divestment of PLNE Shares in 4 IPPs 4. Follow up on the previous meeting 5. Other things that need attention 		

12	15 Oktober 2020	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja TW III 2020, KPI dan Kinerja Keuangan Upaya meningkatkan maturity level pengelolaan risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan RKAP 2021 Tindak lanjut rapat sebelumnya Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian 	<ol style="list-style-type: none"> Tumpal M. simarmata Julius Bobo Djoko Prasetyo Marzuqi 	<ol style="list-style-type: none"> Hernadi Buhron Alfi Zamzami Yanuar Hakim Ultrisza Mednawarman
	<i>October 15, 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> <i>Performance Report for TW III 2020, KPI and Financial Performance</i> <i>Efforts to increase the maturity level of risk management in planning and implementing RKAP 2021</i> <i>Follow up on the previous meeting</i> <i>Other things that need attention</i> 		
13	11 November 2020	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut surat DIRREN no. 24980/B0102000/2020 IT Master Plan Tindak lanjut rapat sebelumnya Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian 	<ol style="list-style-type: none"> Tumpal M. simarmata Julius Bobo Djoko Prasetyo Marzuki 	<ol style="list-style-type: none"> Hernadi Buhron Yanuar Hakim Alfi Zamzami Ultrisza Mednawarman
	<i>November 11, 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> <i>Follow-up letter of DIRREN no. 24980/B0102000/ 2020</i> <i>IT Master Plan</i> <i>Follow up on the previous meeting</i> <i>Other things that need attention</i> 		
14	11 Desember 2020	<ol style="list-style-type: none"> Review RKAP 2021 Laporan Kinerja Perusahaan s.d. akhir Desember 2020 Tindak lanjut temuan BPK Semester I 2020 Tindak lanjut rapat sebelumnya Hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian 	<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Rofik Edward Siagian Djoko Prasetyo Marzuqi 	<ol style="list-style-type: none"> Hernadi Buhron Alfi Zamzami Yanuar Hakim Ultrisza Mednawarman
	<i>December 11, 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> <i>Review RKAP 2021</i> <i>Company Performance Report up to the end of December 2020</i> <i>Follow-up to the BPK Semester I 2020 audit</i> <i>Follow up on the previous meeting</i> <i>Other things that need attention</i> 		



Agenda, tanggal dan peserta rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris telah dijabarkan pada bagian agenda, tanggal dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dalam laporan tahunan ini.

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Competency Development

Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan.

1. Terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris.
3. Terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2020, anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop, konferensi, seminar, sebagaimana tabel berikut ini :

The Board of Commissioners carries out ongoing training / learning programs in order to improve Board of Commissioner Members competence as needed.

1. *There is a work plan and budget for the Board of Commissioners training activities.*
2. *The Board of Commissioner Members training is carried out in accordance with Board of Commissioners work plan.*
3. *There is a report on the training results that has been done by members of the Board of Commissioners*

Following are the Company's Board of Commissioner Members who have participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences, seminars, throughout 2020:

TABEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS
COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS TABLE

Komisaris	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara
<i>Commissioner</i>	<i>Competency/Training Development Materials</i>	<i>Time and Place of Implementation</i>	<i>Types of Training and Implementation</i>
Dewan Komisaris	Pembahasan Jasa Konsultan Enjiniring & Manajemen Proyek Serta Penerapan PSAK Terbaru	Februari 2020	
<i>Board Of Commissioner</i>	<i>Discussion on Engineering Consultant & Project Management Services and the Implementation of the Latest PSAK</i>	<i>February 2020</i>	
Dewan Komisaris	Anti-Bribery Management System Based on ISO 37001:2016	Juni 2020	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
<i>Board Of Commissioner</i>	<i>Anti-Bribery Management System Based on ISO 37001:2016</i>	<i>June 2020</i>	<i>Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)</i>

Program Pengenalan Perseroan Bagi Komisaris Baru

Company Introduction Program For New Commissioners

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan. <ol style="list-style-type: none"> a. Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris. b. Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan perusahaan. c. Tingkat kehadiran/keaktifan anggota Dewan Komisaris dalam mengikuti program pengenalan perusahaan. 2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan. 3. Program pengenalan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan; b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya; c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit. d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan. 4. Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan dimana program tersebut dilaksanakan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The newly appointed Board of Commissioners attended an introduction program organized by the company.</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>The Board of Commissioners submits an introduction program for Board of Commissioner Members to the Board of Directors</i> b. <i>Newly appointed members of the Board of Commissioners participate in the company introduction program.</i> c. <i>The the Board of Commissioners members participating in the company introduction program attendance / activity.</i> 2. <i>The Corporate Secretary or whoever carries out the function as company secretary is responsible for organizing the introduction program.</i> 3. <i>The introductory program includes:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>GCG principles implementation by the Company;</i> b. <i>Description regarding Company (Persero) concerning the objectives, nature, and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short and long term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;</i> c. <i>Related Information about delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee.</i> d. <i>The Board of Commissioners and the Board of Director's duties and responsibilities description, as well as matters that are not allowed.</i> 4. <i>The Coorporate introduction program may take in the form of presentations, meetings, coorporte visits and document reviews, or other programs deemed appropriate to the coorporate where the program is being implemented.</i> |
|---|--|





Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

The Board Of Commissioners Performance Evaluation

Dewan Komisaris berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pencapaian kerjanya. Untuk mendukung hal tersebut, telah dilakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris melalui *Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris dan Assessment Good Corporate Governance (GCG)*.

The Board of Commissioners is committed in improving its performance achievement continuously. To support that matters, the Board of Commissioners' performance evaluation has been done through the Board of Commissioners Key Performance Indicator (KPI) and the Assessment of Good Corporate Governance (GCG).

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Adapun kriteria penilaian berdasarkan KPI yang telah ditetapkan dalam RUPS melalui Kontrak Manajemen adalah sebagai berikut:

1. Fokus Pelanggan
2. Efektifitas Produk dan Proses
3. Fokus Tenaga Kerja
4. Keuangan dan Pasar
5. Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Masyarakat

CRITERIA FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE EVALUATION

Following are the criteria for assessment based on KPIs that have been determined in the GMS through a Management Contract:

1. Customer Focus
2. Product and Process effectivity
3. Manpower Focus
4. Finance and Markets
5. Leadership, Governance and Community Responsibility

PROSEDUR PELAKSANAAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris melalui KPI dilakukan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

THE BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE IMPLEMENTATION PROCEDURE

Through Key Performance Indicator (KPI), The Board of Commissioners performance evaluation shall be carried out by the Shareholders through the Shareholders Annual General Meeting mechanism.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS BERDASARKAN KPI

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris melalui Key Performance Indicator (KPI) tahun 2020 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham pada tanggal 30 Januari 2020.

THE BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT BASED ON KPI

Through the 2020 Key Performance Indicator (KPI), which has been approved by the Shareholders on January 30, 2020.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris adalah Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Dewan Komisaris akan mempertanggungjawabkan kinerja mereka pada periode 2020 dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris melekat pada KPI Perusahaan. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan KPI pada tahun 2020, sebagai berikut.

TABEL HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

TABLE OF RESULTS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT

No	Indikator Indicator	Bobot Weight	Nilai Score
1	Fokus Pelanggan <i>Customer Focus</i>	27	25.83
2	Efektifitas Produk dan Proses <i>Effectiveness of Products and Processes</i>	34	29.19
3	Fokus Tenaga Kerja <i>HR</i>	4	3.99
4	Keuangan dan Pasar <i>Finance and Markets</i>	30	28.05
5	Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Masyarakat <i>Leadership, governance and social responsibility</i>	5	4.89
TOTAL		100	91.95

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris digolongkan dalam kondisi "BAIK" kategori "AA" dengan nilai **91.95**.

PARTIES WHO CONDUCTED THE BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT

The Shareholders in the GMS evaluating the Board of Commissioners performance based on the obligations stated in the applicable laws and regulations, and the Articles of Association or Shareholder mandate. The Board of Commissioners will be accountable/take responsibility for their 2020 performance in GMS which will be held in 2021.

THE BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT RESULTS

The Board of Commissioner performances appraisal is attached to the Company's KPI. The appraisal results of the Board of Commissioner performances based on KPI in 2019 are as follows.



The Board of Commissioners performance appraisal results are classified as "GOOD" in "AA" category with a score of 89.64

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS BERDASARKAN ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Dewan Komisaris berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pencapaian kerjanya. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris melalui Assessment GCG. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris melalui Assessment Good Corporate Governance (GCG) yang telah dilakukan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

THE BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT BASED ON GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

The Board of Commissioners is committed to continuously improving its performance achievement. To support this, the Board of Commissioners' Performance Assessment is conducted through GCG Assessment. Following are the Good Corporate Governance (GCG) Assessment for The Board of Commissioners' Performance Assessment.

TABEL ASSESSMENT GCG DEWAN KOMISARIS TAHUN BUKU 2020

No.	Indikator <i>Indicators</i>	Capaian Tahun 2020 <i>Achievements in 2020</i>		Tingkat Pemenuhan (%) <i>Fullfilment Rate(%)</i>
		Bobot <i>Target</i>	Skor <i>Score</i>	
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance</i>	7,00	6,658	95,114
2	Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal <i>Shareholders and GMS/Capital Owners</i>	9,00	7,905	87,833
3	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	35,00	33,241	94,974
4	Direksi <i>Board of Directors</i>	35,00	31,736	90,674
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9,00	7,350	81,667
6	Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5,00	3,125	72,500
Total Skor Total Score		100,00	90,015	90,015

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris tersebut meliputi :

1. Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran Dewan Komisaris.
2. Pembagian tugas dan penetapan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
3. Pemberian persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.
4. Pemberian arahan dan pengawasan kepada Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.
5. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan patungan.
6. Peran dalam pencalonan anggota Direksi, penilaian kinerja Direksi (individu dan kolejal) dan pengusulan tantiem/insentif kinerja Direksi,
7. Pelaksanaan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut Dewan Komisaris.
8. Pemantauan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
9. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadirannya dalam rapat tersebut.
10. Terdapatnya Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite-Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA

The criteria for evaluating the Board of Commissioners performance include:

1. Implementation of training / learning programs for the Board of Commissioners.
2. Determining the needed factors and the duties distribution to support the implementation of the Board of Commissioners duties.
3. Approval of the RJPP draft and RKAP submitted by the Board of Directors
4. Provide direction and supervision to the Board of Directors on the implementation of company plans and policies.
5. Supervision to the implementation of the management policies for subsidiaries / joint ventures.
6. Role in nominating the members for the Board of Directors, evaluating the Board of Directors performance (Individual and collegial) and proposing bonuses / incentives for the Board of Directors performances,
7. Taking actions against potential conflicts of interest involving the Board of Commissioners.
8. Monitoring the implementation of the principles of Good Corporate Governance.
9. Held the Board of Commissioners Meetings and attendance at these meetings.
10. The Board of Commissioners Secretary and Committees are present to support the implementation of the Board of Commissioners duties.



PROSEDUR PELAKSANAAN ASSESSMENT KINERJA DEWAN KOMISARIS

Prosedur Pelaksanaan Assessment GCG terkait Kinerja Dewan Komisaris adalah, sebagai berikut.

1. BPKP menugaskan Tim Assessment dalam pelaksanaan Assessment GCG 2020 PT PLN Enjiniring.
2. Tim Assessment mengkoordinir seluruh unit kerja terkait termasuk berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan Assessment GCG 2020.
3. Tim Assessment memberikan nilai komposit termasuk faktor positif dan negatif untuk disampaikan kepada Direksi dan kemudian dimintakan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Pelaksanaan Assessment GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris adalah Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Dewan Komisaris akan mempertanggungjawabkan kinerja mereka pada periode 2020 dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

PROCEDURE FOR IMPLEMENTING PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

GCG Assessment Implementation Procedures related to the Performance of the Board of Commissioners are as follows.

1. Assigned the Assessment Team to carry out the 2018 PT PLN Enjiniring 2018 GCG Assessment.
2. In order to carry out the 2018 GCG Assessment, the Assessment Team coordinates all related work units including coordinating with the Board of Commissioners.
3. The Assessment Team provides a composite score including positive and negative factors to be submitted to the Board of Directors and then seek approval from the Board of Commissioners.
4. Implementation of GCG Assessment is carried out periodically every year.

PARTIES THAT CONDUCT THE BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT

The Shareholders in the GMS evaluating the Board of Commissioners performance based on the obligations stated in the applicable laws and regulations, and the Articles of Association or Shareholder mandate. The Board of Commissioners will be accountable/take responsibility for their 2018 performance in GMS which will be held in 2019.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris

The Board Of Commissioners Remuneration Policy

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mendapat sejumlah remunerasi dan fasilitas lainnya. Kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris didasarkan pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham.

In carrying out their duties and responsibilities, the Board of Commissioners receives a number of remuneration and other facilities. The policy for providing remuneration and other facilities for the Board of Commissioners is based on article 6 paragraph (1) of Act No. 40 year 2007 concerning about Limited Liability Companies and the Directors Decree of PT PLN (Persero) as the Shareholders authority.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan Fasilitas yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak boleh bertentangan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

REMUNERATION DETERMINATION PROCEDURE

Honorarium and allowances / facilities the Board of Commissioner Members are given including retirement benefits which types and amounts are determined by the Shareholder General Meeting with the provisions of the prevailing laws and regulations as consideration. The facilities can be given to the Board of Commissioner Members can be given adjusted to the Company's financial condition and capability, and shall not conflicted with laws and regulations, and with the Shareholder General Meeting decisions.

FASILITAS ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagai berikut:
 - a) Fasilitas kesehatan; dan
 - b) Fasilitas bantuan hukum
2. Ketentuan mengenai fasilitas kesehatan anggota Direksi, mutatis mutandis berlaku bagi Fasilitas kesehatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Dalam hal seseorang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas pada lebih dari satu BUMN dan/atau

THE FACILITIES GIVEN TO THE BOARD OF COMMISSIONER MEMBERS

1. The Board of Commissioner Members / Supervisory Board can be given the following facilities:
 - a) Medical facility; and
 - b) Legal aid facility)
2. The provisions regarding health facilities for the Board of Directors Members, mutatis mutandis applied to helath facilities for the Board of Commissioner Members / Board of Trustees. In the event that a person serves as both the Board of Commissioner member and Board of Supervisors in more than one State-Owned





- pada anak perusahaan/perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas kesehatan.
3. Fasilitas kesehatan bagi anggota Dewan Komisaris diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Perseroan wajib memberikan fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan kepada Anggota Dewan Komisaris.
 - b) Fasilitas Kesehatan diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris beserta seorang isteri atau suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapat fasilitas kesehatan.
 - c) Fasilitas kesehatan diberikan berupa: (i) Rawat jalan dan obat; (ii) Rawat inap dan obat; dan (iii) *Medical Check-up*.
 - d) Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.
 - e) *Medical Check-up* diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - I. *Medical check-up* diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
 - II. *Medical check-up* dilakukan di dalam negeri.
 - f) Dalam hal Direksi merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu fasilitas Kesehatan yaitu fasilitas kesehatan pada Perseroan.
 4. Ketentuan mengenai fasilitas bantuan hukum anggota Direksi dan mantan anggota Direksi, *mutatis mutandis* berlaku bagi Fasilitas bantuan hukum bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta mantan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Enterprises (BUMN) and / or in its subsidiary / joint venture company, then the person in concerned is only given one health facility.

 3. *Health facilities for the Board of Commissioner Members are provided with the following conditions:*
 - a) *The Corporate is bound to provide a health facilities in the form of health insurance or medical expenses reimbursement The Board of Commissioner Members.*
 - b) *Health facilities are provided to a member of the Board of Commissioners along with their wife or husband and a maximum of 3 (three) childrens under the age of 25 (twenty five) years. Under the condition the child/s under the age of 25 years old has been married or has worked, then the person/s in concerned no longer entitled to health facilities provided by the coorporate.*
 - c) *Health facilities are provided in the form of: (i) outpatient care and medicine; (ii) Hospitalization and medication; and (iii) Medical Check-up*
 - d) *In the event that the doctor provided the medical care give a referral for a treatment abroad, the health facilities can be given in full or in part with consideration into the Company's financial capability.*
 - e) *Medical Check-up is provided with the following conditions:*
 - I. *Medical check-up is provided once a year.*
 - II. *Medical check-up can only be conducted domestically*
 - f) *In the event that the Directors is also the Board of Commissioners member of the company's subsidiary / joint venture, then the person concerned is only given one health facility, namely a health facility at the Company (Perseroan).*
 4. *Regarding the legal aid facilities for the Board of Directors member and former the Board of Commissioner Members, mutatis mutandis applied to legal aid facilities for the Board of Commissioner Members / Supervisory Board as well as former Board of Commissioner Members / Supervisory Board.*

5. Fasilitas bantuan hukum bagi anggota Dewan Komisaris diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
 - Anggota Dewan Komisaris yang akan menggunakan fasilitas bantuan hukum, wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan fasilitas bantuan hukum tersebut kepada perusahaan apabila ternyata kepada perusahaan apabila ternyata terbukti posisi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi.
 - Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka dan terdakwa di lembaga peradilan.
 - Jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perseroan hanya untuk satu kantor pengacara /atau konsultan hukum untuk satu kasus tertentu.
 - Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perseroan.
 - Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum oleh pengadilan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya pengacara/konsultan hukum baik yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayar oleh Perseroan menjadi beban yang bersangkutan.
 - Dalam hal yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya kantor pengacara/konsultan hukum menjadi beban Perseroan.
5. *Legal aid facilities for Board of Commissioner members are provided with the following conditions:*
- Legal aid facilities are provided in the event of an action / actions for and on behalf of his position related to purpose and objectives, and also business activities of the Company (Perseroan).*
 - The Board of Commissioner members who will use the legal aid facility are required to make a statement letter on sufficiently stamped paper explaining their position concerning to a certain cases not as an individual and are willing to return the legal aid facility to the company if it is proven that their position concerned in the case is as personal.*
 - Legal aid facilities are provided in the form of financing for attorney / legal consultant services including the examination process as witnesses, suspects and defendants in the judiciary.*
 - The financing of lawyer / legal consultant services can be charged to the Company but only for one law firm / or legal consultant for one particular case.*
 - The lawyer / legal consultant appointment is carried out by the Company (Perseroan) in accordance with company's (perseroan) applicable goods and services procurement provisions.*
 - In the event that the person in concerned abided by law found guilty and convicted, the lawyers / legal consultants fees that both have been issued and which have not been paid by the Company, will be borne by person in concerned.*
 - In the event that the person in concerned abided by law is acquitted / found not guilty by a court, the cost of the law firm / legal consultant will be borne by the Company.*





- h) Biaya kantor pengacara/konsultan hukum diberikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.
- i) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka santunan purna jabatan bagi anggota Dewan Komisaris tidak dibayarkan dan dimasukkan kedalam rekening khusus yang diadakan oleh Direksi Perseroan sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perseroan. Anggota Dewan Komisaris yang menerima fasilitas bantuan hukum wajib membuat surat pernyataan di atas kerta bermeterai cukup yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- j) Dalam hal anggota Dewan Komisaris menggunakan pengacara/konsultan hukum atas pilihannya sendiri baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perseroan.
- k) Anggota Dewan Komisaris yang dalam penggunaan kantor pengacara/konsultan hukum dibiayai Perseroan maka yang bersangkutan wajib membuat pernyataan akan mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- l) Perseroan tidak menanggung biaya pengacara/konsultan hukum dalam hal anggota Dewan Komisaris menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana yang dilaporkan oleh Perseroan yang bersangkutan, Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah) atau pihak tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- h) The lawyer / legal consultant fees is given by taking into consideration the principles of fairness, transparency and accountability in accordance with applicable regulations, as well as the Company's financial capability.*
- i) As long as the legal issues do not have permanent legal force, the Board of Commissioner Members retirement compensation will not be paid and will be placed into a special account held by the company's Board of Directors as a warranty for the cost of the case incurred by the Company. The Board of Commissioner Members who receive legal aid facilities are required to make a statement letter on sufficiently stamped paper stating that the person in concerned is willing to make his retirement insurance as a warranty for the cost of the case incurred by the Company.*
- j) In the event that the Board of Commissioners member uses a lawyer / legal consultant of his own choice weather its on investigation, court of first instance, appeal, cassation or review, the lawyer / legal consultant cost are not borne / reimbursed by the Company.*
- k) The Board of Commissioner Members whose lawyer / legal consultant office are financed by the Company, then they are required to make a statement that they will replace / refund the costs incurred by the Company if they abided by the law and the court found guilty.*
- l) The Company does not bear the costs of a lawyer / legal consultant in the event that a member of the Board of Commissioners becomes a witness, suspect or defendant due to a criminal action reported by the Company, the State (State as a Legal Entity or State Institution or Government Institution) or certain parties determined by Shareholder General Meeting.*

- m) Anggota Dewan Komisaris yang diperkarakan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum.
- n) Dalam kasus Perdata atau Tata Usaha Negara, biaya perkara ditanggung oleh Perseroan sepanjang:
- I. Pengacara/konsultan hukum yang digunakan hanya satu kantor pengacara/konsultan hukum untuk satu kasus tertentu.
 - II. Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perseroan.
 - III. Biaya pengacara/konsultan hukum adalah biaya-biaya yang resmi dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.
 - IV. Anggota Dewan Komisaris Perseroan digugat karena permasalahan hukum yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - V. Penggugat atau tergugat adalah pihak selain Perseroan yang bersangkutan, Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Hukum atau Lembaga Pemerintah) atau pihak tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- o) Perseroan wajib memberikan fasilitas bantuan hukum kepada mantan anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya tersebut berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, yang dilakukannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- p) Ketentuan mengenai pemberian fasilitas bantuan hukum di atas, mutatis mutandis berlaku bagi pemberian fasilitas bantuan hukum bagi mantan anggota Dewan Komisaris.
- m) *The the Board of Commissioner Members, who are being prosecuted, are prohibited from being involved in the decisions making regarding the appointment of a law firm / legal consultant*
- n) *In Civil or State Administration cases, the cost of the case is borne by the Company as long as:*
- I. *A lawyer / legal consultant is used by only one law firm / legal consultant for one particular case.*
 - II. *The lawyer / legal consultant appointment is carried out by the Company (Perseroan) in accordance with company's (perseroan) applicable goods and services procurement provisions.*
 - III. *The lawyer / legal consultant fees is are legal fees and can be justified by the law.*
 - IV. *Members of the Board of Commissioners of the Company were sued because of legal problems that arose in the context of carrying out the Company's duties in accordance with applicable regulations.*
 - V. *The plaintiff or defendant is a party other than the Company concerned, the State (the State as a Legal Entity or Legal Institution or Government Institution) or certain parties determined by the General Meeting of Shareholders.*
- o) *The Company is required in providing legal aid facilities to the Board of Commissioners former members in the event of a legal problem arising because the person in concerned has taken action / actions for and on behalf of their position intended and on purpose as well as the Company's business which been done in the time the person in concerned still act as a member of the company Board of Commissioner.*
- p) *The clause regarding legal aid facilities given by company, as per above, mutatis mutandis applied to the former member of Board of Commissioners.*



Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Komisaris

The Board Of Commissioners Resignation/Respection And Dismissal Mechanism

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Dewan Komisaris yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Board Manual Perusahaan adalah sebagai berikut.

Following are the mechanism for resignation and dismissal of the Board of Commissioners as regulated in the Company's Articles of Association and Board Manual.

I. PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.
2. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan komisaris:
 - a) Tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik;
 - b) Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau ketentuan Anggaran dasar Perseroan;
 - c) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
 - d) Dinyatakan bersalah sehubungan dengan huruf a, b dan c berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
 - e) Mengundurkan diri.
3. Disamping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
4. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 2, diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh pemegang saham.

I. THE BOARD OF COMMISSIONERS DISMISSAL

1. *The Board of Commissioner Members can be dismissed at any time with along with stating the reasons based on the General Meeting of Shareholders Decision.*
2. *Dismissal the Board of Commissioner member/ members as referred in number 1 above, is carried out, if based on facts, the member of the Board of Commissioners:*
 - a) *Unable to carry their responsibility to the fullest potential.*
 - b) *Not implementing or violating the laws and regulations and / or the provisions of the Company's Articles of Association;*
 - c) *Being involved in actions that are harmful to the Company and/or the State;*
 - d) *Found guilty in connection with letters a, b and c based on a court decision which has permanent legal force; and / or*
 - e) *Resigning*
3. *Beside, the dismissal of the Board of Commissioner member/members as referred in number 2 above, the Board of Commissioner member/members may be dismissed by the General Meeting of Shareholders for the company interests and objectives.*
4. *The plan on the dismissal of the Board of Commissioners as referred to in number 2, shall be notified to the member/members in concerned verbally or in writing by the shareholders.*

5. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, b dan c, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
6. Dalam hal pemberhentian di luar forum Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada angka 4.
7. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 2 masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
8. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dan d merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

II. PENGUNDURAN DIRI

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.
2. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut diatas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

5. *The decision on the dismissal because of the reasons as referred to in number 2 letters a, b and c is taken after the person in concerned has been given the opportunity to defend themself.*
6. *In the event of dismissal outside the General Meeting of Shareholders forum, the self-defense, as referred to in number 5, shall be submitted in writing to the Shareholders within 15 (fifteen) days after the member of the Board of Commissioners in concerned is notified as referred to in number 4.*
7. *As long as the dismissal plan, as referred to in number 2, is still on process, then the member of the Board of Commissioners in concerned must carry out their duties as per usual.*
8. *Dismissal due to reasons as referred in number 3 letters c and d is a dishonorable discharge.*

II. RESIGNATION

1. *A member of the Board of Commissioners has the right to resigning from his position by notifying the company/corporate in a written letter with copies to shareholders, other Board of Commissioners members and the Board of Directors no later than 30 (thirty) days before the his/her resignation date. If the resignation letter states the effective date is less than 30 (thirty) days from the date the letter is received, it is considered that effective date of resignation did not mentioned.*
2. *If it is up to the date requested by the member of the Board of Commissioners the person in concerned or within 30 (thirty) days since the company received the resignation letter, in this matter, which has no effective date, and no decision from the General Meeting of Shareholders, then the member of the Board of Commissioners resigning by itself on the requested date above or by the expiration of 30 (thirty) days from the date when the resignation letter is received without the approval of the General Meeting of Shareholders.*





3. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun pada masa jabatan berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung-jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung-jawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

3. For the Board of Commissioners members who resigning before or when the office term ends, then the responsible person remains responsible for his actions whose accountability has not been received by the Shareholders General Meeting.

DIREKSI

DIRECTORS

Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS dan dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS.

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang Anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Secara khusus, tugas Direksi mencakup beberapa hal sebagai berikut.

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham.

Director is a part of the company/corporate authorized and responsible to the company/corporate managerial for company benefit which is align with the company's goals and objectives as well as representing the company, both inside and outside the court, as Articles of Association required.

The Company is managed and led by a Board of Directors whose numbers are adjusted to the needs of the Company. In the event that the Board of Directors consists of more than 1 (one) Member of the Board of Directors, one of them is appointed as the President Director.

DUTIES, AUTHORITIES AND OBLIGATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is a company organ that is authorized and fully responsible for the management of the company in the interests of the company suitable with the company's goals and objectives, and represents the company, both inside and outside the court as per the Articles of Association provisions.

In particular, the Board of Directors the duties include the following.

1. *The Board of Directors is in charge of carrying out all actions related to the company's management for company benefits and suitable with company's objectives and purpose and represent the Company both inside and outside the Court regarding all matters and events with restrictions as regulated by laws and regulations, the Articles of Association and / or the General Meeting of Shareholders.*



Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance





2. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas dan kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.
 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban serta kewajaran.
 4. Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.
 6. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi diluar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai tindakan tersebut disetujui oleh Rapat Direksi.
 7. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:
 - a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek (sampai dengan 1 (satu) tahun);
 - b. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerja sama dengan badan usaha/pihak lain dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 8. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas diantara Direksi ditetapkan oleh Direksi.
2. *In carrying out their duties, the Board of Directors is obliged to devote their energy, thoughts, attention and full dedication to their duties and obligations and the achievement of the Company's goals.*
 3. *In carrying out their duties, the Board of Director members must comply with the company's Articles of Association, and laws and regulations, and must implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility and fairness.*
 4. *Each Member of the Board of Directors sPagel in good faith and full of responsibility in carrying out their duties for the company's interests and business in regard with the prevailing laws and regulations.*
 5. *Each member of the Board of Directors is fully responsible personally if he / she is guilty or negligent in carrying out his / her duties for the company's interests and business.*
 6. *Actions taken by the Board of Director members other than those decided by the Board of Directors Meeting are the personal responsibility of the person in concerned until the action is approved by the Board of Directors Meeting.*
 7. *The following actions of the Board of Directors must obtain written approval from the Board of Commissioners to:*
 - a. *Placing fixed assets for short-term credit withdrawals (up to 1 (one) year);*
 - b. *Enter into transactions, contracts, agreements, deals and / or colmanpowerations with business entities / other parties with a certain value or period determined by the General Meeting of Shareholders;*
 8. *The duties and powers distribution of each the Board of Directors members is determined by the General Meeting of Shareholders. In the case of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders does not assign the duties and powers distribution , so the duties distribution among the Directors is assigned by the Board of Directors.*

9. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
 10. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
 11. Tindakan yang dilakukan oleh Anggota Direksi diluar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan yang dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.
 12. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas tugas Direktur Utama.
 13. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka Anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melakukan tugas-tugas Direktur Utama.
 14. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam angka 15 di atas yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
 15. Dalam hal salah seorang Anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang Anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas Anggota Direksi yang berhalangan tersebut.
9. *The Board of Directors in managing the Company carries out the instructions given by the General Meeting of Shareholders as long as it does not conflict with the laws and regulations or the Company's Articles of Association.*
 10. *Each Member of the Board of Directors takes full personal responsibility if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties for the interests and business of the Company.*
 11. *Actions taken by members of the Board of Directors outside those decided by the Board of Directors Meeting shall be the personal responsibility of the person concerned until the said action is approved by the Board of Directors Meeting.*
 12. *If the President Director is absent or not present for any reason, which does not need to be proven to a third party, then one of the members of the Board of Directors who is appointed in writing by the President Director has the authority to act for and on behalf of the Board of Directors and carry out the duties of the President Director.*
 13. *In the event that the President Director does not appointed a representative, the Member of the Board of Directors who is holding the longest position has the authority to act for and on behalf of the Board of Directors as well as perform the duties of the President Director.*
 14. *In the event that there is more than 1 (one) member of the Board of Directors who is holding the longest position as the Board of Directors member, then the Board of Directors member as referred to in number 15 below whose the oldest member on age will be authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and carry out the duties of the President Director.*
 15. *In the event that a member of the Board of Directors other than the President Director is absent due to any reason, which does not need to be proven to a third party, then another Member of the Board of Directors shall appoint a member of the Board of Directors to carry out the duties of the member of the Board of Directors who is absent.*





16. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawab sendiri berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
17. Dalam rangka melaksanakan kebijakan pengurusan Perseroan Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

1. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas diantara Direksi ditetapkan oleh Direksi.
2. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau Anggaran Dasar Perseroan.
3. Setiap Anggota Direksi bertanggung-jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan.
4. Tindakan yang dilakukan oleh Anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung-jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan yang dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.

16. The Board of Directors for certain actions on its own responsibility is also entitled to appoint one or more representatives, by giving them the power for certain actions regulated in a power of attorney.

17. In order to implementing the company management policy, the President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company under the condition that all actions of the President Director have been approved by the Board of Directors Meeting.

SCOPE OF WORK AND RESPONSIBILITIES OF EACH BOARD OF DIRECTORS MEMBER AND THE BOARD OF DIRECTORS DUTIES DISTRIBUTION

DIVISION OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. The distribution of duties and powers of each Member of the Board of Directors is assigned by the General Meeting of Shareholders. In the event that the General Meeting of Shareholders does not assigning the duties and powers distribution, then the duties distribution among the Board of Directors shall be determined by the Board of Directors.
2. In managing the company, the Board of Directors performs the instructions given by the General Meeting of Shareholders as long as it does not contradict with the laws and regulations and / or the Company's Articles of Association.
3. Each of Board of Directors member has full responsibility if he / she is negligent towards his / her duties in the company.
4. Actions taken by the Board of Director members, other than, those which has been decided in the Board of Directors Meeting is considered personal and becomes the responsibility of the person concerned, until, the action referred to is approved by the Board of Directors Meeting.

5. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
 6. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka Anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melakukan tugas-tugas Direktur Utama.
 7. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi terlama dalam jabatan, maka Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada butir (6) di atas yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.
 8. Dalam hal salah seorang Anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang Anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas Anggota Direksi yang berhalangan tersebut.
 9. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawab sendiri berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
 10. Dalam rangka melaksanakan kebijakan pengurusan Perseroan Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi.
5. *In the time of the President Director absents, which does not need approval from the third party, a representative from the board of directors which has been appointed by the President Directors, is authorized to act for and on bePagef of the Board of Directors and carry out the President Director duties.*
 6. *If President Director has not appointed a representative yet, the board of director's member which has been in the office with the longest will act and took the duties for and on bePagef of President Directors.*
 7. *If there is more than 1 (one) Board of Directors with the longest time in the office, so as referred on point six (6) above are authorized to act for and on bePagef of the President Directors.*
 8. *Due to any reason the absent, in any reason, of the Board of Directors beside President Director, then the other Board of Directors members will assign on of its member to act for and on behalf of the absents member.*
 9. *Director for a particular act/s responsible, also have the power to appointing a person/s as his/her representative by giving him/her or them the power in a particular act/s, validated in attorney letter.*
 10. *implementation of company's policy, President Director have the right to act/s for and on bePagef of Board of Directors and the company, as long as has been approved by the Board of Directors Meeting.*



TABEL PEMBIDANGAN TUGAS DIREKSI

TABLE OF ASSIGNMENTS FOR DIRECTORS DUTIES

Jabatan <i>Position</i>	Bidang Tugas <i>Task Field</i>
PLT Direktur Utama <i>President Director</i>	Menentukan, memutuskan dan menetapkan strategi perencanaan serta pelaksanaan seluruh kegiatan PLN Enjiniring. <i>Establish, decide and determine the planning strategy and implementation of all PLN Engineering activities.</i>
Direktur Enjiniring <i>Director of Engineering</i>	Menentukan, memutuskan, menetapkan dan mengendalikan kegiatan produksi dan operasi guna mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan secara efektif dan efisien. <i>Establish, decide, determine and control the production and operating activities to achieve the Company's goals and objectives effectively and efficiently.</i>
Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha <i>Director of Marketing and Business Development</i>	Menentukan, memutuskan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan kegiatan pemasaran serta pengembangan usaha dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. <i>Establish, decide, determine and control the policies of marketing and business development activities in order to achieve the targets determined.</i>
Direktur Keuangan dan SDM <i>Director of Finance and HR</i>	Menentukan, memutuskan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan dan strategi keuangan dan SDM guna mencapai tujuan dan sasaran perusahaan secara efektif dan efisien. <i>Establish, decide, determine and control the financial and HR policies and strategies to achieve the company goals and objectives effectively and efficiently.</i>

KRITERIA DIREKSI

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang Anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Adapun Kriteria Persyaratan Anggota Direksi adalah sebagai berikut.

1. Yang dapat diangkat sebagai Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

BOARD OF DIRECTORS REQUIREMENT

The corporate led and manage by Board of Directors, which the number its member/s are depend on the corporate need/s. If Board of Directors only contain of 2 persons then one of them will be appointed as President Director.

The Requirements for Board of Director Members are as follows

1. Those who can be appointed as Board of Directors members are individuals who are capable of taking legal actions, except 5 (five) years prior to their appointment, they have:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Dinyatakan pailit. b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit, atau; c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) di atas, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon Anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan. 3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas pengangkatan Anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan persyaratan peraturan perundangan. 4. Pengangkatan Anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga) tersebut di atas batal demi hukum sejak saat Anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. | <ul style="list-style-type: none"> a. Declared Bankrupt b. Proven guilty by causing a company went bankrupt, wheather as its Board of Directors, Board of Commisioners or Supervisory Board. c. Sentenced from a criminal act that endangers the country finance and/or State-Owned Enterprise (BUMN) and/or other financial sectors. <ol style="list-style-type: none"> 2. The requirement stated in point 1 (one) above, proven with a statement letters signed by the Board of Directors candidate and corporate will kept the letter. 3. In addition to meet the requirements as referred in number 1 (one) above, designated member of the Board of Directors being done in consideration of proficiency, experience and other requirements based on the requirements of laws and regulations. 4. In the event of the Appointment of the Board of Director Members who do not eligible as referred to number 1 and number 3 above, will automatically canceled once others Board of Derictors and/or the Board of Commissioner member knows that the requirement did not fulfilled. |
|--|--|



PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Seluruh Direksi PLN Enjiniring telah memenuhi kriteria dan ketentuan dalam Fit and proper Test berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait.

FIT AND PROPER TEST

All PLN Enjiniring has been fulfilled all Fit and Proper Test requirement based on The Law of Limited Liability Company and GCG's provision and other provision.

TABEL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
FIT AND PROPER TEST TABLE

Nama <i>Name</i>	Pelaksana <i>Administrator</i>	Hasil <i>Result</i>
Hernadi Buhron	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>
Alfi Zamzami	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>
Yanuar Hakim	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>
Ultrisza Mednawarman	PT PLN (Persero)	Lulus <i>Pass</i>



BOARD MANUAL DIREKSI

Pedoman kerja Direksi diatur dalam Board Manual, petunjuk tata laksana kerja Direksi yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan harus dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan. Dengan adanya Board Manual diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Adapun isi dari *Board Manual* sebagai berikut.

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Direksi;
- Bab III : Dewan Komisaris;
- Bab IV : Tata Laksana Wewenang Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris;
- Bab V : Tata Laksana Wewenang Direksi dengan Persetujuan RUPS Berdasarkan Rekomendasi Dewan Komisaris.

WEWENANG DIREKSI

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut.

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan perusahaan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain; Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Rapat Umum Pemegang Saham.

BOARD MANUAL DIRECTORS

The Board of Directors work guidelines are set out in the Board Manual, the guidelines for the work procedures of the Board of Directors which explain the stages of activities in a structured, systematic, easy-to-understand manner and must be carried out consistently, so that they can become a reference for the Board of Directors in carrying out their respective duties to achieve the Company's Vision and Mission. With the existence of the Board Manual, it is hoped that high work standards will be achieved in line with GCG principles.

The contents of the Board Manual are as follows.

- Chapter I : Introductory*
- Chapter II: The Board of Directors*
- Chapter III: The Board of Commissioners*
- Chapter IV: Board of Directors Authority Procedure with the Board of Commissioners' Approval*
- Chapter V: Board of Directors Authority Procedure with GMS Approval Based on the Recommendation of the Board of Commissioners.*

THE BOARD OF DIRECTORS AUTHORITY

The Board of Directors has the following authority.

- 1. Establishing company management policies*
- 2. Arranging the Board of Directors transfer of power to represent the Company inside and outside the court to a person or several members of the Board of Directors who are especially appointed for this purpose or to one or more company's employees, either individually or collectively or to other people; Regulate the provisions concerning company employment includes determining the salary, pension or pension plan and other income for company employees based on the laws and regulations and the General Meeting of Shareholders.*

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 4. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Mengangkat seorang Sekretaris Perseroan. 6. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 7. Direksi dapat memutuskan kegiatan-kegiatan dengan nilai per transaksi sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) dari ekuitas perusahaan didasarkan pada tahun buku terakhir yang telah diaudit. <ol style="list-style-type: none"> a. Mengadakan transaksi, kontrak, perjanjian, kesepakatan dan/atau kerjasama dengan pihak lain; b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dan jaminan lainnya termasuk (standby letter of credit/SLBC, Corporate Guarantee dan sejenisnya); c. Menerima atau memberikan pinjaman yang tidak bersifat operasional; d. Menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau Lembaga keuangan lainnya. | <ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Set the provisions regarding the Company's employment including the determination of the salary, pension or old age security and other income for the Company's employees based on the prevailing laws and regulations and the resolution of the General Meeting of Shareholders.</i> 4. <i>Appointing and dismissing Company employees based on the Company's employment regulations and applicable laws and regulations</i> 5. <i>Appointing a Corporate Secretary</i> 6. <i>Take all actions and deeds regarding the management and ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties and / or other parties with the Company, and represent the Company inside and outside the court regarding all matters and events, with restrictions as regulated in law and regulation, Articles of Association and / or decisions of the General Meeting of Shareholders and all events, with limitations as regulated in statutory laws and regulations, Articles of Association and / or the General Meeting of Shareholders decision.</i> 7. <i>The Board of Directors may decide on all activities with a value per transaction of a maximum of 10% (ten percent) of the company's equity based on the last audited financial year.</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Enter into transactions, contracts, agreements, agreements and / or colmanpowerations with other parties</i> b. <i>Binding the Company as a guardian (borg or avalist) and other guarantees including (standby letter of credit / SLBC, Corporate Guarantee and the like);</i> c. <i>Receive or provide loans that are not operational;</i> d. <i>Receive short-term loans from banks or other financial institutions.</i> |
|---|---|



KEWAJIBAN DIREKSI

Adapun kewajiban Direksi adalah sebagai berikut.

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perusahaan dengan sesuai maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan perubahannya, serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah rapat Umum Pemegang Saham dan risalah rapat Direksi.
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan perusahaan, serta dokumen keuangan perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkannya kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan.
8. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan.
9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
10. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, laporan tahunan dan dokumen keuangan perusahaan, serta dokumen perusahaan lainnya.

THE BOARD OF DIRECTORS RESPONSIBILITY

Following are The Board of Directors responsibility.

1. Seek and ensure the implementation of the company's business and activities which suitable with its purposes and objectives and business activities.
2. Preparing Long Term Company's plan, Company Work Plan and Budget and it changes, as well as submitting it to Shareholders and the Board of Commissioners for approval at Shareholders General Meeting.
3. Expalining the Long Term Company's plan, Company Work Plan and Budget at Shareholders General Meeting.
4. Preparing the Shareholder List, Special list, minutes of General Meeting of Shareholders and minutes of meetings of the Board of Directors.
5. Making corporate financial documents, based on Company's Document Regulations and making annual report as one of its responsibility towards the company.
6. Arranging and submitted Financial Statements, based on Financial Accounting Standards, to and submit them to a Public Accountant to be audited.
7. Submitting the Annual Report including the Financial Report to the General Meeting of Shareholders for approval and ratification
8. Explaining the annual report to shareholders at Shareholder General Meeting.
9. Presenting to the Minister of Law and Human Rights the Companys' Income Statement that has been endorsed by shareholder at General Meeting.
10. Maintaining Shareholders List, Special list, Minutes of Shareholders General Meeting, Minutes of Board of Commissioners Meetings and Minutes of Directors Meetings, annual reports, and corporate finance documents, and other company documents.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 11. Menyimpan ditempat kedudukan perusahaan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perusahaan. 12. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan. 13. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. 14. Menyiapkan susunan organisasi perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya. 15. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham. 16. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan. | <ol style="list-style-type: none"> 11. Keeping Shareholders List, Special list, Minutes of Shareholders General Meeting, Minutes of Board of Commissioners Meetings and Minutes of Directors Meetings, annual reports, and corporate finance documents, and other company documents at the company office. 12. Developing an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and based on internal management principles, data recording, storage and supervision. 13. Provide periodic reports according and other reports as schedule or whenever requested by the Board of Commissioners and / or Shareholders. 14. Prepare company organizational structure with complete details and tasks 15. Provide an explanation of everything that is asked or requested by the Board of Commissioners and the Shareholders members. 16. Performing other obligations that suitable with the provisions regulated in the company's Articles of Association and determined by the General Meeting of Shareholders based on the laws and regulations. |
|--|--|



KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

PLN Enjiniring memiliki Buku Pedoman Good Corporate Governance yang antara lain mengatur keberagaman komposisi Direksi. Berdasarkan pedoman tersebut, komposisi Direksi hendaknya sedemikian rupa sehingga memungkinkan diambilnya keputusan secara efektif, tepat, cepat, dan independen. Komposisi Direksi merupakan bauran yang tepat antara pengalaman manajerial dan kepemimpinan, pendidikan yang memadai dan sesuai dengan tanggung jawab yang diemban, serta memiliki karakter yang baik.

Pada periode 2020, keberagaman komposisi Direksi yang tercermin dalam usia, pendidikan, dan pengalaman kerja, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

THE BOARD OF DIRECTORS DIVERSITY POLICY

PLN Enjiniring owned a Good Corporate Governance Guidebook which among others regulates the diversity the Board of Directors thus enabling decisions to be made effectively, precisely, quickly and independently. The Board of Directors composition is the right mix between managerial and leadership experience, educated in accordance with the responsibilities, and has a good character

In the 2020 period, the diversity of the composition of the Board of Directors, reflected in age, education and work experience, can be seen as in the table below:

TABEL KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI
TABLE OF COMPOSITION DIVERSITY OF BOARD OF DIRECTORS

Nama Direksi	Usia	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Name of Directors	Age	Education	Work Experience
Hernadi Buhron	59 Tahun	Insinyur dari Institute Teknologi Surabaya	Distribution System Planning Expert PT PLN (Persero), Manajer Perencanaan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, Kepala Divisi Pengadaan untuk IPP PT PLN (Persero)
	59 Years Old	Education Engineer of Surabaya Institute of Technology	Distribution System Planning Expert at PT PLN (Persero), Planning Manager of PT PLN (Persero) West Java and Banten Distribution, Head of Procurement Division at IPP PT PLN (Persero)
Alfi Zamzami	54 Tahun	S1 Akuntansi Universitas Andalas , S2 Master Of Business University of Tenaga Nasional, Kuala Lumpur	Deputi Manajer General Affair PT PLN (Persero) Sumatera Selatan, Senior Manajer Keuangan PT PLN Enjiniring, Senior Manajer Expenditure Management PT PLN (Persero)
	54 Years Old	Undergraduate Accounting Major of Andalas University, Master of Business from University of Tenaga Nasional, Kuala Lumpur	Deputy General Affair Manager of PT PLN (Persero) South Sumatera at PT PLN Enjiniring, Senior Manager of Expenditure Management at PT PLN (Persero)
Yanuar Hakim	60 Tahun	Insinyur dari Institute Teknologi Bandung (1986), Master of Electrical Engineering dari University of Wollongong Australia (2004)	Kepala Divisi Transmisi Indonesia Bagian Barat PT PLN (Persero), General Manager Transmisi Jawa - Bali dan Pusat Pengiriman Beban, Ketua Panitia Pengadaan Sumatera - Jawa HVDC Connection, General Manajer PT PLN (Persero) PUSENLIS
	60 Years Old	Engineer of Bandung Institute of Technology (1986), Master of Electrical Engineering from University of Wollongong Australia (2004)	Head of the Transmission Division of Western Indonesia at PT PLN (Persero), General Manager of Java-Bali Transmission and Load Delivery Center, Chairperson of the Sumatra-Java Procurement Committee of HVDC Connection, General Manager at PT PLN (Persero) PUSENLIS.
Ultriszta Mednawarman	59 Tahun	PPM School of Management, Electrical Engineer dari Universitas Indonesia	Manager of Commerce PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya & Tangerang, Senior Manajer Pengadaan IPP Jawa Bali, Senior Manajer Manajemen IPP
	59 Years Old	PPM School of Management, Electrical Engineer from Universitas Indonesia	Manager of Commerce at PT PLN (Persero) Jakarta Raya & Tangerang Distribusi, Senior Procurement Manager of IPP Jawa Bali, Senior Management Manager at IPP

JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Sesuai Anggaran Dasar dan *Board Manual*, Perusahaan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang Anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Direksi PLN Enjiniring terdiri dari 4 orang, yaitu seorang Direktur Utama dan 3 orang Direktur. Seluruh Direksi telah memenuhi kriteria dan ketentuan dalam *fit and proper test* berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait. Setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang memadai.

Komposisi Direksi PLN Enjiniring sebagai berikut.

TABEL KOMPOSISI DIREKSI

TABLE OF BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Hernadi Buhron	PLT Direktur Utama PLT President Director
2	Alfi Zamzami	Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HR
3	Yanuar Hakim	Direktur Enjiniring Director of Engineering
4	Ultrisza Mednawarman	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha Director of Marketing and Business Development

DASAR PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI

Anggota Direksi diangkat berdasarkan akta persetujuan rapat RUPS. Dasar pengangkatan tiap-tiap anggota Direksi adalah sebagai berikut.

THE BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION AND NUMBER

Based on the Articles of Association and Board Manual, the Company is managed and led by a Board of Directors whose numbers are adjusted to the needs of the Company. In the event that the Board of Directors consists 1 (one) or more member, one of them is appointed as the President Director

PLN Enjiniring Board of Directors consist 4 directors, 1 (one) President Director and 3 (three) other directors. All of them already fulfill required Fit ad Proper Test based on the Limited Liability Company Law, GCG and other provisions. Each of Board of Directors member has adequate integrity, competence and good reputation.

Following is PLN Enjiniring Board of Director Compositions:



PRIMARY POINT ON APPOINTING BOARD OF DIRECTOR MEMBER

The Board of Director Members are appointed based on the GMS meeting deed. The basis in appointing each Board of Directors member is as follows.



TABEL DASAR PENGANGKATAN DIREKSI
TABLE OF BASIS OF DIRECTORS APPOINTMENT

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>
Hernadi Buhron	PLT Direktur Utama <i>PLT President Director</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS Pengangkatan Direksi tanggal 2 Desember 2016 2. Akta Notaris Lenny Janis Ishak Nomor 47 tanggal 27 Desember 2016 3. Akta Notaris Lenny Janis Ishak Nomor 76 tanggal 19 November 2019 <ol style="list-style-type: none"> 1. AGM Appointment of Directors on 2 December 2016 2. Notary Deed Lenny Janis Ishak Number 47 on 27 December 2016 3. Notary Deed Lenny Janis Ishak Number 76 on 19 November 2019
Alfi Zamzami	PLT Direktur Keuangan dan SDM <i>PLT Director of Finance and HR</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS Pengangkatan Direksi tanggal 2 Desember 2016 2. Akta Notaris Lenny Janis Ishak Nomor 47 tanggal 27 Desember 2016 3. Akta Notaris Lenny Janis Ishak Nomor 76 tanggal 19 November 2019 <ol style="list-style-type: none"> 1. AGM Appointment of Directors on 2 December 2016 2. Notary Deed Lenny Janis Ishak Number 47 on 27 December 2016 3. Notary Deed Lenny Janis Ishak Number 76 on 19 November 2019
Yanuar Hakim	PLT Direktur Enjiniring <i>PLT Director of Engineering</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS Pengangkatan Direksi tanggal 2 Desember 2016 2. Akta Notaris Lenny Janis Ishak Nomor 47 tanggal 27 Desember 2016 3. Akta Notaris Lenny Janis Ishak Nomor 76 tanggal 19 November 2019 <ol style="list-style-type: none"> 1. AGM Appointment of Directors on 2 December 2016 2. Notary Deed Lenny Janis Ishak Number 47 on 27 December 2016 3. Notary Deed Lenny Janis Ishak Number 76 on 19 November 2019
Ultrisa Mednawarman	PLT Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha <i>PLT Director of Marketing and Business Development</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS Pengangkatan Direksi tanggal 2 Desember 2016 2. Akta Notaris Lenny Janis Ishak Nomor 47 tanggal 27 Desember 2016 3. Akta Notaris Lenny Janis Ishak Nomor 76 tanggal 19 November 2019 <ol style="list-style-type: none"> 1. AGM Appointment of Directors on 2 December 2016 2. Notary Deed Lenny Janis Ishak Number 47 on 27 December 2016 3. Notary Deed Lenny Janis Ishak Number 76 on 19 November 2019

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Direksi senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Direksi tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

THE BOARD OF DIRECTORS AFFILIATE RELATIONSHIP

The Board of Director always acts independently, meaning that their action did not have conflict of interest that can interuted their ability to fulfill their duties independently, weather in the relationships with each other or with The Board of Commisioners.

The Board of Director Members should not have financial relationship, managerial relationship, shareholding and/ or family relationships with each other, The Board of Commisioner Members and/or Controlling Shareholder or corporate relationships, to be able to fulfill their duties independently.

The Board of Directors does not hold concurrent positions as President Director or other Director in State-Owned, Regional and Private Enterprises or other positions related to the management of the Company, as well as structural positions, and other functional positions in central and local government agencies/ institutions, as well as other positions. in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and other applicable laws and regulations.

Affiliate relationship between the member of Board of Directors, Board of Commisioners, and Major Shareholder and/or controllers, are:

1. *Affiliate relationship between each of Board of Directors members.*
2. *Affiliate relationship between Board of Director and Board of Commisioner members.*
3. *Affiliate relationship between Board of Director members and Major Shareholder and/or controllers.*
4. *Affiliate relationship between each of Board of commissioner members .*
5. *Affiliate relationship between Board of Commisioners members and Major Shareholder and/or controllers*



Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance



TABEL HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

TABEL OF BOARD OF DIRECTORS AFFILIATION

Direksi Directors	Hubungan Keuangan dan Keluarga Direksi Financial and Family Relations															
	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relation With						Hubungan Keluarga Dengan Family Relations With						Hubungan Kepengurusan Dengan Management Relation With			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Directors		Pemegang Saham Shareholders		Dewan Komisaris Boards of Commissioners		Direksi Directors		Pemegang Saham Shareholders		Perusahaan lain Other Companies			
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No		
Hernadi Buhron		√		√		√		√		√		√		√		√
Alfi Zamzami		√		√		√		√		√		√		√		√
Yanuar Hakim		√		√		√		√		√		√		√		√
Ultrisa Mednawarman		√		√		√		√		√		√		√		√

Antar anggota Direksi dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda.

Between members of the Board of Directors and between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, there is no family relationship up to the third generation, either in a straight line or a side line or an affinity.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Direksi tidak ada yang memiliki saham, baik di PLN Enjiniring maupun di perusahaan lainnya. Kepemilikan saham Direksi sebagai berikut.

THE BOARD OF DIRECTORS SHARE OWNERSHIP

The Directors do not own shares, either in PLN Enjiniring or in other companies. The share ownership of the Board of Directors is as follows.

TABEL KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI
TABLE OF BOARD OF DIRECTORS' SHARE OWNERSHIP

Direksi <i>Board of Directors</i>	Jabatan <i>Position</i>	Kepemilikan Saham di PLN Enjiniring <i>Share Ownership at PLN Enjiniring</i>	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain <i>Share Ownership in Other Companies</i>
Hernadi Buhron	PLT Direktur Utama <i>PLT President Director</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>
Alfi Zamzami	Direktur Keuangan dan SDM <i>Director of Finance and HR</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>
Yanuar Hakim	Direktur Enjiniring <i>Director of Engineering</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>
Ultrisa Mednawarman	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha <i>Director of Marketing and Business Development</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>


RANGKAP JABATAN DIREKSI
DIRECTORS DOUBLE JOB

Pada Tahun 2020 tidak ada Direksi yang melakukan rangkap Jabatan di Perusahaan lain.

In 2019, no Board of Directors held concurrent positions at other companies.

TABEL RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS
TABLE CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Nama Direksi <i>Name of Directors</i>	Jabatan <i>Position</i>	Rangkap Jabatan <i>Concurrent Positions</i>
Hernadi Buhron	PLT Direktur Utama PLT President Director	-
Alfi Zamzami	Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HR	-
Yanuar Hakim	Direktur Enjiniring Director of Engineering	-
Ultrisa Mednawarman	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha Director of Marketing and Business Development	-

Untuk meminimalisir terjadinya benturan kepentingan yang disebabkan adanya rangkap jabatan, setiap anggota Direksi diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas yang berisikan keterangan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi tidak akan melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Pakta Integritas tersebut disimpan dan diadministrasikan oleh Sekretaris

To minimize conflicts of interest due to concurrent positions, each member of the Board of Directors is required to sign an Integrity Treaty which states that in carrying out their duties, members of the Board of Directors will not do things that could create a conflict of interest. The Integrity Treaty is kept and administered by the Secretary



PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN

Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan.

1. Menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan, meliputi:
 - a. Menyusun mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi Direksi dan pejabat struktural Perusahaan yang disebabkan benturan kepentingan;
 - b. Mensosialisasikan kebijakan tentang mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan pejabat struktural Perusahaan;
 - c. Menandatangani surat pernyataan Direksi tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan Perusahaan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.
2. Menetapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.
 - a. Menyampaikan laporan kepemilikan Saham pada Perusahaan lainnya kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam daftar khusus;
 - b. Menandatangani Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS;
 - c. Tidak terdapat pengambilan keputusan transaksional yang mengandung benturan kepentingan.

CONFLICT OF INTEREST MANAGEMENT

The Board of Directors monitors and manages potential conflicts of interest.

1. *Establishing policies regarding mechanisms for the Board of Directors and structural officers, to prevent personal and other party profit taking due to conflicts of interest, including:*
 - a. *Formulating a mechanism to prevent personal gain from the Directors and structural officers of the Company due to a conflict of interest;*
 - b. *Disseminating policies on mechanisms to prevent the Board of Directors and company's structural officers gaining personal advantage;*
 - c. *Signing a statement that the Board of Directors does not have a conflict of interest between personal / family interests, other positions, or groups with the company's interests at the beginning of the appointment, which is renewed at the beginning of the year.*
2. *Establishing policies to prevent conflicts of interest*
 - a. *Submitting share ownership reports in other companies to the Company (Company Secretary) to be recorded in a special list;*
 - b. *Signing the Integrity Treaty attached to the Action Proposal of the Board of Directors which must obtain approval from the Board of Commissioners and / or a recommendation from the Board of Commissioners and approval from the GMS;*
 - c. *There is no transactional decision making that contains a conflict of interest*

BENTURAN KEPENTINGAN

1. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan berbenturan kepentingan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh dan dari anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
2. Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua Anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau diwakili oleh seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris secara tertulis.
3. Dalam hal tidak ada Dewan Komisaris, maka RUPS dapat mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut pada angka 1 dan 2 di atas.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 2020

Selama 2020, Direksi telah melaksanakan tugas pengurusan PLN Enjiniring sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar, antara lain:

1. Penyusunan perencanaan perusahaan, antara lain RKAP 2020.
2. Pemenuhan target kinerja perusahaan.
3. Pelaksanaan *Cost Revenue Management Program* (CRMP).
4. Penjajakan *Partnership* dengan investor *reputable* dalam pengembangan energi terbarukan.
5. Sistem penilaian kinerja Direksi secara Individu/ Direktorat dan Kolegial.
6. KKG, KKO, Kajian Risiko dan Mitigasinya untuk *project* yang didanai oleh SHL.
7. *Compliance* terhadap *covenant* obligasi
8. Penyelenggaraan rapat Direksi, menghadiri rapat Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham;
9. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal; serta
10. Pelaksanaan tugas lainnya terkait kepengurusan perusahaan

CONFLICT OF INTEREST

1. *If something happens where the interests of the Company conflict with one of The Board of Directors interests, the Company will be represented by another member of the Board of Directors appointed by and from members of the Board of Directors who have no conflict of interest.*
2. *If the conflict of interest concerns all Members of the Board of Directors, the Company will be represented by the Board of Commissioners or represented by one or more members appointed by the Board of Commissioners in written statement.*
3. *In the absence of the Board of Commissioners, the GMS may appoint one or more persons to represent the Company to perform the tasks mentioned in numbers 1 and 2 above.*

THE BOARD OF DIRECTORS DUTIES AND RESPONSIBILITIES IMPLEMENTATION IN 2020

During 2020, the Board of Directors has carried out its duties of managing PLN Enjiniring in accordance with the applicable laws and regulations and the Articles of Association, including:

1. *Drafting of company plans, including the 2020 RKAP.*
2. *Fulfillment of company performance targets.*
3. *Implementing Cost Revenue Management Program (CRMP).*
4. *Individual / directorate and collegial performance appraisal system for Directors*
5. *Board of Directors performance evaluation system by Individuals/Directorate and collegiality.*
6. *KKG, KKO, Risk and its mitigation Assessment for projects funded by SHL.*
7. *Compliance with covenants obligation*
8. *Organizing Board of Directors meetings, attending Board of Commissioners meetings and General Meeting of Shareholders;*
9. *Internal business supervision and improvement processes; and*
10. *Implementing other duties related to company management.*



RAPAT DIREKSI

Pelaksanaan rapat Direksi PLN Enjiniring diselenggarakan minimal sekali dalam seminggu. Rapat Direksi tersebut dapat berupa rapat internal Direksi, maupun rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi.

THE BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

The PLN Enjiniring Board of Directors meeting is held at least once a week. The Board of Directors meeting can at the form of the Board of Directors internal meeting, as well as a the Board of Commissioners and the Board of Directors joint meeting.

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

THE BOARD OF DIRECTORS MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE

TABEL FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

TABLE OF FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

No	Nama Name	Jabatan Position	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris		
			Board of Directors' Meeting			Joint Meeting of Board of Directors and Board of Commissioners		
			Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat	Persentase Tingkat Kehadiran	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat	Persentase Tingkat Kehadiran
			Number of Meetings	Frequency of Meetings	Percentage of Attendance rate	Number of Meetings	Frequency of Meetings	Percentage of Attendance rate
1	Hernadi Buhron	PLT Direktur Utama <i>PLT President Director</i>	32	32	100%	13	13	100%
2	Alfi Zamzami	PLT Direktur Keuangan dan SDM <i>PLT Director of Finance and HR</i>	32	31	100%	13	13	100%
3	Yanuar Hakim	PLT Direktur Enjiniring <i>PLT Director of Engineering</i>	32	29	100%	13	13	100%
4	Ultrisza Mednawarman	PLT Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha <i>PLT Director of Marketing and Business Development</i>	32	32	100%	13	13	100%

AGENDA, TANGGAL DAN PERSIAPAN RAPAT INTERNAL DIREKSI

THE BOARD OF DIRECTORS INTERNAL MEETING PREPARATION AGENDA AND DATE

Sepanjang tahun 2020, agenda, tanggal dan peserta Rapat Internal Direksi adalah sebagai berikut.

Throughout 2020, the agenda, dates and participants of the Board of Directors Internal Meeting are as follows.

TABEL AGENDA, TANGGAL DAN PESERTA RAPAT INTERNAL DIREKSI
THE AGENDA, DATE AND PARTICIPANTS OF INTERNAL DIRECTORS' MEETINGS

No	Tanggal Rapat <i>Date of Meeting</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i>
1	08 Januari 2020 <i>January 08, 2020</i>	1. Laporan Kinerja Perusahaan TW IV 2019 2. Persiapan RUPS RKAP 2020 <i>1. Company Performance Report for Q IV 2019</i> <i>2. Preparation for the 2020 GMS RKAP</i>	1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim
2	16 Januari 2020 <i>January 16, 2020</i>	1. Pengawasan Fraud di PLNE 2. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>1. Fraud Supervision at PLNE</i> <i>2. Other things that need to be discussed</i>	1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
3	27 Januari 2020 <i>January 27, 2020</i>	1. Persiapan RUPS RKAP 2020 <i>1. Preparation for the 2020 GMS RKAP</i>	1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
4	11 Februari 2020 <i>February 11, 2020</i>	1. Konsolidasi Laba Rugi 2. Pembahasan RJPP 2020-2024 <i>1. Consolidated Profit and Loss</i> <i>2. Discussion on RJPP 2020-2024</i>	1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
5	24 Februari 2020 <i>February 24, 2020</i>	1. Strategi Pemasaran dalam Mencapai Target 2020 2. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian <i>1. Marketing Strategy to Achieve the 2020 Target</i> <i>2. Other things that need to be discussed</i>	1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
6	17 Maret 2020	1. Pembahasan Penyesuaian Draft Kepdir PBJ PLNE terhadap Perdir PLN No.022 tentang PBJ 2. Pengadaan Project Manager PLTA Jatigede 3. Pengaturan Sistem Work From Home sebagai antisipasi penyebaran COVID-19	1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Alfi Zamzami





	March 17, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Adjustment of Draft Kepdir PBJ PLNE to Perdir PLN No.022 on BJP 2. Procurement of Jatigede Hydroelectric Power Plant Project Manager 3. Work From Home System Settings in anticipation of the spread of COVID-19 	
7	30 Maret 2020	1. Sosialisasi Tanda Tangan Elektronik sebagai Bagian dari Business Continuity PLNE dalam Kondisi WFH Antisipasi Penyebaran COVID-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
	March 30, 2020	1. Socialization Electronic Signature as part of the Business Continuity PLNE in anticipation WFH Conditions Spread COVID-19	
8	01 April 2020	1. Business Continuity Planning PT PLN Enjiniring menghadapi Wabah COVID-19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
	April 01, 2020	1. PT PLN Enjiniring Business Continuity Planning to face the COVID-19 Outbreak	
9	03 April 2020	1. Pembahasan RKAP 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
	April 03, 2020	1. Discussion of RKAP 2020	
10	12 April 2020	1. Rencana PLNE Melakukan Inject SHL ke PT CPSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
	April 12, 2020	1. PLNE Plan to Inject SHL to PT CPSI	
11	29 April 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut Vicon Performance/Business Review 28 April 2020 2. Rancangan Perubahan RKAP 2020 3. Usulan Perubahan RKAP 2020 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
	April 29, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Follow-up Vicon Performance / Business Review 28 April 2020 2. Draft Amendments RKAP 2020 3. Proposed Amendments to RKAP 2020 	

12	14 Mei 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan Perubahan RKAP 2020 2. Pembahasan Pembuatan Sirkuler Radir CPSI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrizza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
	<i>May 14, 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Proposed Amendments to RKAP 2020</i> 2. <i>Discussion of Making Circular CPSI Board of Directors Meeting</i> 	
13	18 Mei 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Pemberian SHL kepada CPSI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrizza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
	<i>May 18, 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Discussion on Giving SHL to CPSI</i> 	
14	20 Mei 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Pemberian SHL kepada CPSI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrizza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
	<i>May 20, 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Discussion on Giving SHL to CPSI</i> 	
15	05 Juni 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian KPI Korporat Bulan Mei 2020 2. Hambatan, Strategi, dan Solusi Pencapaian Revenue selama Tahun 2020 Akibat Pandemi COVID-19 3. Hambatan, Strategi, dan Solusi Pencapaian Revenue dari sisi Pemasaran 4. Hambatan, Strategi, dan Solusi Pencapaian Revenue selama Tahun 2020 dari sisi Proses & Produksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrizza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
	<i>June 05, 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate KPI Achievement in May 2020</i> 2. <i>Revenue Achievement Barriers, Strategies, and Solutions for 2020 Due to the COVID-19 Pandemic</i> 3. <i>Revenue Achievement Barriers, Strategies, and Solutions from the Marketing side</i> 4. <i>Revenue Achievement Barriers, Strategies, and Solutions during 2020 in terms of Process & Production</i> 	





16	06 Juli 2020 July 06, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Pencapaian target KPI dan Revenue Semester I beserta Strategi Pencapaian KPI 2. Target Pengadaan Investasi 3. Implementasi Sistem Pengamanan ISO 270001 4. Tindak Lanjut Audit Mutu Internal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
17	14 Juli 2020 July 14 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Perusahaan TW II 2020 2. Prognosa Pelaksanaan RKAP 2020 s.d Akhir Tahun 3. Rencana Tindak Lanjut Arahan RUPS LPT Tahun Buku 2019 4. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
18	28 Juli 2020 July 28, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Efisiensi Biaya Melalui Koneksi SAP 2. Evaluasi Program Kerja Semester I dan Upaya-Upaya Pelaksanaan Program Kerja s.d Desember 2020 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
19	06 Agustus 2020 August 06, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan Semester I 2. Pembahasan SK Terkait GRC dan GCG 3. Pembahasan Board Manual 4. Usaha-Usaha untuk Memperbaiki KPI di Bulan Juli 5. Usaha-Usaha untuk meningkatkan revenue PLNE 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami

20	18 Agustus 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Draft RKAP 2021 2. Presentasi Sosialisasi Budaya PLN Terbaik 3. Tindak lanjut rapat sebelumnya 4. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian 5. Laporan Keuangan PLNE s.d Juli 2020 6. Usulan Revisi KPI PLNE 2020 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
	August 18, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of RKAP Draft 2021 2. PLN Terbaik Cultural Socialization Presentation 3. Follow up on the previous meeting 4. Other things that need to be discussed 5. PLNE Financial Report until July 2020 6. Proposed Revision of 2020 PLNE KPI 	
21	31 Agustus 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian SHL kepada PT PPN Tahap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Alfi Zamzami
	August 31, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provision of SHL to PT PPN Phase 2 	
22	09 September 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan Keputusan Rencana Aksi Korporasi PT CPSI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
	September 09, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Request for Decision on PT CPSI Corporate Action Plan 	
23	16 September 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Surat Evaluasi Project Manager Proyek Add-on PLTGU Muara Tawar Blok 2, 3, dan 4 dari Direktur Pengembangan Niaga PT PJB 2. Pembahasan RKAP 2021 3. Program Akselerasi SDM untuk Penyesuaian Grade dan Mapping Kompetensi Enjinir 4. Divestasi Saham PLNE di 4 IPP 5. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 6. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisza Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
	September 16, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion on the Evaluation Letter for the Project Manager for the Muara Tawar PLTGU Block 2, 3, and 4 Add-on Project from the Director of Commercial Development of PT PJB 2. Discussion on the RKAP 2021 3. HR Acceleration Program for Grade Adjustment and Engineer Competency Mapping 4. Divestment of PLNE Shares in 4 IPP 5. Follow up on the previous meeting 6. Other things that need to be discussed 	


 Tata Kelola Perusahaan yang Baik
 Good Corporate Governance




24	24 September 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Revisi RJP PLNE 2020-2024 2. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisa Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
	September 24, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efforts to Increase Maturity Level of Risk Management in RKAP 2021 Planning and Implementation 2. Other things that need to be discussed 	
25	14 Oktober 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja TW III 2020 (KPI dan Kinerja Keuangan) 2. Upaya Meningkatkan Maturity Level Pengelolaan Risiko dalam Perencanaan dan Pelaksanaan RKAP 2021 3. Tindak lanjut rapat sebelumnya 4. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisa Mednawarman 3. Alfi Zamzami
	October 14, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Performance Report for Q III 2020 (KPI and Financial Performance) 2. Efforts to Increase the Maturity Level of Risk Management in Planning and Implementation of the 2021 RKAP 3. Follow up on the previous meeting 4. Other things that need to be discussed 	
26	22 Oktober 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progress Penunjukkan Konsultan Pendamping Penyelesaian CPSI 2. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisa Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
	October 22, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progress of Appointment of CPSI Completion Assistance Consultants 2. Other things that need to be discussed 	
27	09 November 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut Surat DIRREN No. 24980/REN.00.04/B102000/2020 tanggal; 19 Oktober 2020 tentang Pedoman Pengawasan AP dan Perusahaan Afiliasi a.l Revisi Board Manual 2. Master Plan IT 3. Tindak lanjut rapat sebelumnya 4. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisa Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
	November 09, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Follow-up to DIRREN Letter No. 24980 / REN.00.04 / B102000 / 2020 date; 19 October 2020 concerning Guidelines for Supervision of Subsidiaries and Affiliated Companies a.l Revision of the Board Manual 2. IT Master Plan 3. Follow up on the previous meeting 4. Other things that need to be discussed 	
28	09 November 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil pengadaan konsultan CPSI 2. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernadi Buhron 2. Ultrisa Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
	November 09, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. CPSI Consultant Procurement Report 	

2. Other things that need to be discussed			
29	20 November 2020 <i>November 20, 2020</i>	1. Pengadaan Konsultan CPSI terkait Penugasan DIRREN 1. Procurement of CPSI Consultants related to DIRREN Assignment	1. Hernadi Buhron 2. Ultrisa Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
30	08 Desember 2020 <i>December 08, 2020</i>	1. Pembahasan Evaluasi dan Perubahan Dewan Komisaris PLNE di IPP Minoritas 2. Review RKAP 2021 3. Laporan Kinerja Perusahaan s.d Akhir Desember 2020 4. Tindak Lanjut Temuan BPK 1. Discussion on the Evaluation and Changes of the PLN Board of Commissioners to a Minority IPP 2. Review RKAP 2021 3. Company Performance Report until the end of December 2020 4. Follow-up of BPK Findings	1. Hernadi Buhron 2. Ultrisa Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
31	14 Desember 2020 <i>December 14, 2020</i>	1. Pembahasan RJP PLNE 2020-2024 2. Pembahasan Terkait IPP Minoritas 1. Discussion of RJP PLN 2020-2024 2. Discussion Regarding Minority IPP	1. Hernadi Buhron 2. Ultrisa Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami
32	29 Desember 2020 <i>December 29, 2020</i>	1. Prognosa KPI 2020 2. Progress RKAP Revisi 2020 3. Realisasi Pemasaran 2020 dan Upaya-upaya/ Strategi Pemasaran di 2021 1. Prognosis KPI 2020 2. Progress of the 2020 Revised RKAP 3. Marketing Realization 2020 and Marketing Efforts / Strategies in 2021	1. Hernadi Buhron 2. Ultrisa Mednawarman 3. Yanuar Hakim 4. Alfi Zamzami

Agenda, tanggal dan peserta rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris telah dijabarkan pada bagian agenda, tanggal dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dalam laporan tahunan ini.

The agenda, dates and participants of the joint meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners have been described in the agenda, dates and participants of the joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors in this annual report.





PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

1. Kepada Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan yang bersangkutan.
2. Tanggung Jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan.
3. Program Pengenalan meliputi:
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
 - b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya;
 - c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
 - d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.
4. Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan dimana program tersebut dilaksanakan.
5. Anggota Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan:
 - a. Direksi menyampaikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk diadakan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat.
 - b. Tingkat kehadiran/keaktifan Anggota Direksi dalam mengikuti rangkaian program pengenalan perusahaan.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW BOARD OF DIRECTORS

1. *The Board of Directors Member who are appointed for the first time must be given an introduction program regarding the Company in concerned.*
2. *The responsibility for conducting the introduction program rests in the Corporate Secretary or whoever carries out the function as company secretary.*
3. *The Introductory Program includes:*
 - a. *Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;*
 - b. *Implementation of GCG principles by the Company; An overview of the Company in relation to the objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short and long term business plans, competitive position, risks and various other strategic issues;*
 - c. *Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Committee Audit;*
 - d. *Information regarding the Board of Commissioners / Board of Supervisors and Directors duties and responsibilities as well as things that are not allowed.*
4. *Company introduction programs may take formed of presentations, meetings, company visits and document review or other programs deemed appropriate to the Company where the program is implemented.*
5. *Newly appointed members of the Board of Directors participate in the introduction program organized by the company:*
 - a. *The Board of Directors submits to the Corporate Secretary an introduction program for the newly appointed members of the Board of Directors.*
 - b. *The level of attendance / activity of the members of the Board of Directors in participating in a series of company introduction programs.*

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan.

1. Terdapat kebijakan tentang pelatihan bagi anggota Direksi sesuai kebutuhan.
2. Terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Direksi.
3. Pelatihan bagi anggota Direksi direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris.
4. Terdapat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi.

Sepanjang tahun 2020, anggota Direksi Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop, konferensi, seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

TABEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI
TABLE OF DIRECTORS COMPETENCY DEVELOPMENT

Direksi <i>Board of Directors</i>	Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan <i>Competency/Training Development Materials</i>	Waktu Pelaksanaan <i>Execution Time</i>		Jenis Pelatihan dan Penyelenggara <i>Types of Training and Organizers</i>
		Start	Finished	
Hernadi Buhron	Pelatihan Ebitda untuk Penurunan Biaya	25 Februari 2020	26 Februari 2020	PT PLN (Persero)
	Anti-Bribery Management System Based on ISO 37001:2016	25 Juni 2020	26 Juni 2020	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
Hernadi Buhron	<i>Ebitda training for cost reduction</i>	<i>February 25, 2020</i>	<i>February 26, 2020</i>	<i>PT PLN (Persero)</i>
	<i>Anti-Bribery Management System Based on ISO 37001:2016</i>	<i>June 25, 2020</i>	<i>June 26, 2020</i>	<i>Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)</i>

THE BOARD OF DIRECTORS COMPETENCIES DEVELOPMENT

The Board of Directors attending training programs in order to improve the competence of members of the Board of Directors as needed.

1. *The availability of policy regarding training for members of the Board of Directors as needed.*
2. *The availability of work plan and training activities budget for the Board of Directors members*
3. *Training for the Board of Directors members is implemented in accordance with the work plan of the Board of Commissioners.*
4. *The report regarding the training result that the Board of Directors members have undertaken is available.*

Throughout 2020, the Company's Board of Directors members have participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences, seminars, as shown in the following table:





Yanuar Hakim	Anti-Bribery Management System Based on ISO 37001:2016	25 Juni 2020	26 Juni 2020	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
Yanuar Hakim	Anti-Bribery Management System Based on ISO 37001:2016	June 25, 2020	June 26, 2020	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
Ultrisa Mednawarman	Anti-Bribery Management System Based on ISO 37001:2016	25 Juni 2020	26 Juni 2020	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
Ultrisa Mednawarman	Anti-Bribery Management System Based on ISO 37001:2016	June 25, 2020	June 26, 2020	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
Alfi Zamzami	Anti-Bribery Management System Based on ISO 37001:2016	25 Juni 2020	26 Juni 2020	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
Alfi Zamzami	Anti-Bribery Management System Based on ISO 37001:2016	June 25, 2020	June 26, 2020	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Direksi telah berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pencapaian kerjanya. Untuk mendukung hal tersebut, telah dilakukan penilaian kinerja Direksi melalui Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris dan pelaksanaan Assessment GCG.

- **PENILAIAN KINERJA DIREKSI BERDASARKAN KPI**

Penilaian kinerja Direksi melalui Key Performance Indicator (KPI) tahun 2020 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham melalui Kontrak Manajemen tanggal 17 Februari 2021.

- **PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI**

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui mekanisme RUPS Tahunan. Keputusan RUPS Tahunan sudah diuraikan dalam bagian RUPS dalam laporan ini.

THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT

The Board of Directors is committed to continuously improving its performance achievements. To support this, the Board of Directors performance appraisal has been done through the Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI) and the implementation of the GCG Assessment.

- **THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE APPRAISAL PROCEDURE BASED ON KPI**

The Board of Directors performance Assessment done through the 2019 Key Performance Indicator (KPI) which was approved by the Shareholders through a Management Contract dated February 17, 2020

- **THE BOARD OF DIRECTORS APPRAISAL IN IMPLEMENTING PERFORMANCE PROCEDURE**

The performance appraisal procedure for the Board of Directors is carried out through the Annual GMS mechanism. The resolutions of the Annual GMS have been described in the GMS section of this report.

• KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Adapun kriteria penilaian berdasarkan KPI yang telah ditetapkan dalam RUPS melalui kontrak manajemen adalah sebagai berikut.

1. Fokus Pelanggan
2. Efektifitas Produk dan Proses
3. Fokus Tenaga Kerja
4. Keuangan dan Pasar
5. Kepemimpinan, Tata kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan

• PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pihak yang melakukan Penilaian kinerja Direksi adalah Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Direksi akan mempertanggungjawabkan kinerja mereka pada periode 2020 dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

• HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Hasil penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI pada tahun 2020, sebagai berikut ;

• THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE APPRAISAL CRITERIA

The criteria for KPI based appraisal that have been determined through a management contract in the GMS are as follows.

1. Customer Focus
2. Product and Process Effectivity
3. Workforce Focus
4. Market and Finances
5. Leadership, Governance and Community Responsibility)

• PARTIES THAT CONDUCT THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE APPRAISAL

The party that conducts the performance appraisal of the Board of Directors is the Shareholders in the GMS based on the obligations stipulated in the prevailing laws and regulations and the Articles of Association as well as the mandate of the Shareholders. The Board of Directors will be accountable for their performance in the 2020 period in the GMS which will be held in 2021.

• THE BORD OF DIRECTORS APPRAISAL RESULTS

The Board of Directors performance appraisal results based on KPI in 2020 are as follows

TABEL HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

TABLE OF DIRECTIORS' PERFORMANCE ASSESSMENT RESULTS

No	Indikator Indicator	Bobot Weight	Nilai Score
1	Fokus Pelanggan <i>Customer Focus</i>	27	25.83
2	Efektifitas Produk dan Proses <i>Effectiveness of Products and Processes</i>	34	29.19
3	Fokus Tenaga Kerja HR	4	3.99
4	Keuangan dan Pasar <i>Finance and Markets</i>	30	28.05
5	Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan <i>Leadership, governance and social responsibility</i>	5	4.89
TOTAL		100	91.95





Hasil penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI digolongkan dalam kondisi "BAIK" kategori "AA" dengan nilai 91.95

• PENILAIAN KINERJA DIREKSI BERDASARKAN ASSESSMENT GCG

Direksi berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pencapaian kerjanya. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan penilaian kinerja Direksi melalui pelaksanaan Assessment GCG.

• PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Prosedur pelaksanaan Pelaksanaan Assessment GCG terkait Kinerja Direksi adalah, sebagai berikut.

1. BPKP menugaskan tim assessment Perseroan dalam melaksanakan Assessment GCG.
2. Tim Assessment GCG mengkoordinir seluruh unit kerja terkait, termasuk berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan Assessment GCG
3. Tim Assessment memberikan nilai komposit termasuk faktor positif dan negatif untuk disampaikan kepada Direksi dan kemudian dimintakan persetujuan Dewan Komisaris
4. Pelaksanaan Assessment GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap tahun

• KINERJA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Direksi tersebut meliputi:

1. Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran Direksi;
2. Pembaian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab Direksi yang jelas;
3. Penyusunan perencanaan perusahaan;
4. Pemenuhan target kinerja perusahaan;
5. Pelaksanaan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan;

The Board of Directors performance appraisal results based on KPI are classified as "GOOD" in the "AA" category with a score of 91.95

• THE DIRECTORS PERFORMANCE APPRAISAL BASED ON SELF ASSESSMENT

The Board of Directors is committed to continuously improving its performance achievement. To support this, a performance appraisal of the Board of Directors is carried out through the implementation of the GCG Assessment.

• PROCEDURE ON IMPLEMENTING PERFORMANCE APPARISAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

The procedures for implementing GCG Assessment regarding the Performance of the Board of Directors are as follows.

1. *BPKP assigned the Company's assessment team to carry out the GCG Assessment.*
2. *Self Assessment GCG The GCG Self Assessment Team coordinates all related work units, including coordinating with the Board of Commissioners in order to carry out the GCG Self Assessment*
3. *Self Assessment Team provides a composite score including positive and negative factors to be submitted to the Board of Directors and then seek the Board of Commissioners approval.*
4. *Implementation of the GCG Assessment is done periodically every year.*

• THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE APPRAISAL

The criteria being used in the Board of Directors performance appraisal includes:

1. *The Board of Directors training / learning programs implementation;*
2. *A clear duties / functions distribution, authorities and responsibilities for the Board of Directors;*
3. *Company plan drafting;*
4. *Company performance target fulfillments;*
5. *Operational and financial controls Implementation on the company plans and policies implementation;*

6. Pelaksanaan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar;
7. Pelaksanaan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan pemangku kepentingan;
8. Memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi;
9. Pelaksanaan keterbukaan informasi dan komunikasi, serta penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham secara tepat waktu;
10. Penyelenggaraan rapat Direksi dan kehadiran pada rapat Dewan Komisaris;
11. Penyelenggaraan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif;
12. Penyelenggaraan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif;
13. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

- **PIHAK YANG MELAKSANAKAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI**

Pihak yang melakukan Penilaian Kinerja Direksi terdiri dari Tim Assessment PLN Enjiniring yang diketuai oleh Sekretaris Perusahaan.

- **HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI**

Pada tahun 2020, hasil penilaian kinerja Direksi mencapai skor 31.736 dengan capaian 90.674 dan predikat Sangat Baik.

KEBIJAKAN REMUNERASI DIREKSI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mendapat sejumlah remunerasi dan fasilitas lainnya. Kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas

6. *Implementation of company management in accordance with the applicable laws and regulations and the Articles of Association;*
7. *The implementation of value-added relationships for the company and stakeholders;*
8. *Monitor and manage potential conflicts of interest for members of the Board of Directors and management under the Board of Directors;*
9. *Implementation of information and communication disclosure, as well as timely manner information delivery to the Board of Commissioners and Shareholders;*
10. *Organizing Board of Directors meetings and attendance at Board of Commissioners meetings;*
11. *Implementation of quality and effective internal control;*
12. *To carry out the functions of the Corporate Secretary that are quality and effective;*
13. *Organizing the Annual GMS and other GMS in accordance with laws and regulations.*

- **PARTIES THAT IMPLEMENT THE PERFORMANCE APPRAISAL OF THE BOARD OF DIRECTORS**

The party conducting the Board of Directors Performance Appraisal consists of the PLN Engineering Assessment Team, chaired by the Corporate Secretary.

- **THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE APPRAISAL RESULTS**

In 2020, the results of the Board of Directors performance appraisal reached a score of 31.736 with an achievement of 90.674 and the predicate Very Good.

BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION POLICY

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors receives a number of remuneration and other facilities. The policy for providing remuneration and other facilities for the Board of Directors is based





lainnya bagi Direksi didasarkan pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham.

• PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota Direksi juga dapat diberikan fasilitas yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak boleh bertentangan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI DIREKSI

MASA JABATAN

- Masa jabatan Anggota Direksi ditetapkan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:
 - Meninggal dunia;
 - Masa jabatan berakhir;
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.

on article 6 decree (1) Laws of Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and PT PLN (Persero) the Board of Directors decision as the Shareholders authority.

• PROCEDURES FOR DETERMINING THE REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Members of the Board of Directors are given salaries and allowances / facilities including retirement benefits, the types and amounts of which are determined by the General Meeting of Shareholders with consideration of applicable laws and regulations. Members of the Board of Directors may also be provided with facilities that are adjusted to the company financial conditions and capabilities and may not conflict with laws and regulations and may not conflict with the General Meeting of Shareholders' decisions.

THE BOARD OF DIRECTORS TERM OF OFFICE, DISMISSION AND RESIGNATION)

TERM OF OFFICE

- The Board of Directors members term of office is set for 4 (four) years and can be reappointed for 1 (one) term of office.
- The Board of Directors term of office ends when:
 - Passed Away
 - End of term
 - Dismissed based on the General Meeting of Shareholders decisions;
 - No longer meets the requirements as the Board of Directors member based on the decision of the Articles of Association and applicable laws and regulations.
- The decision as referred in item 2 letter d above include but are not limited to prohibited concurrent positions and resignations.

4. Dalam hal masa jabatan Anggota Direksi berakhir dan Rapat Umum Pemegang Saham belum dapat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas Anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan Anggota Direksi yang lowong.
5. Bagi Anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun pada masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4. *In the event that the term of office of a Member of the Board of Directors ends and the General Meeting of Shareholders has not been able to determine a replacement, then the duties of the vacant Member of the Board of Directors shall be carried out in accordance with the provisions for filling the position of the vacant Member of the Board of Directors*
5. *For a member of the Board of Directors who resigning before or during his term of office, unless he resigns due to death, he / she is obliged to convey accountability for actions that have not been accepted by the General Meeting of Shareholders.*

PEMBERHENTIAN SEWAKTU-WAKTU ANGGOTA DIREKSI

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para Anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, Anggota Direksi:
 - a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. Tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - d. Terlibat dalam tindakan merugikan Perseroan dan/atau Negara;
 - e. Dinyatakan bersalah sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - f. Mengundurkan diri.
3. Di samping alasan pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a sampai dengan f tersebut di atas, Direksi dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya

TERMINATION OF THE MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. *The General Meeting of Shareholders may dismiss the Members of the Board of Directors at any time by stating the reasons.*
2. *The reasons for the dismissal of a Member of the Board of Directors as referred to in number 1 above are made if based on facts, the Member of the Board of Directors:*
 - a. *Failure to fulfill their obligations as agreed in the management contract;*
 - b. *Cannot properly carry out their duties;*
 - c. *Not implementing or violating the applicable laws and regulations and / or provisions of the Articles of Association;*
 - d. *Being involved in an act that contributes loss to the Company and / or the State;*
 - e. *Found guilty in connection with letters a, b and c above based on a court decision which has permanent legal force.*
 - f. *Resigning*
3. *In addition to the reasons the the Board of Director member dismissal as referred in number 2 letter a to f above, the Board of Directors may be dismissed by the General Meeting of Shareholders based on other reasons deemed appropriate by the General Meeting of*





- yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
4. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, b, c dan d dan angka 3 di atas, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 5. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, diberitahukan kepada Anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.
 6. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut di atas, disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas.
 7. Dalam hal Anggota Direksi yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri dan menyatakan tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 diatas dianggap telah terpenuhi.
 8. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengabaikan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas.
 9. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, masih dalam proses, maka Anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
 10. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d dan e tersebut di atas, adalah merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
- Shareholders for the interests and objectives of the Company.*
4. *The decision to dismiss as referred to in number 2 letters a, b, c and d and number 3 above, is taken after the person concerned has been given the opportunity to defend himself.*
 5. *The plan to dismiss any member of the Board of Directors at any time as referred to in number 1 above, sPagel be notified to the Member of the Board of Directors in writing orally or in writing by the Shareholders.*
 6. *In the event that the dismissal is carried out outside the General Meeting of Shareholders, the defense as referred in number 4 above, sPagel be submitted in writing to the Shareholders within 14 (fourteen) days after the notification given to the Member of the Board of Directors as referred to in number 5 above.*
 7. *In the event that the dismissed member of the Board of Directors has defended himself and expressed no objection to his/her dismissal planned at the time of notification, then the time requirement as referred to in number 6 above is deemed fulfilled.*
 8. *In the event that the dismissal is carried out at the General Meeting of Shareholders, the defense as referred in number 4 above, sPagel be carried out in the General Meeting of Shareholders by disregarding the time limit provisions as referred in number 6 above.*
 9. *As long as the plan for dismissal as referred to in number 5 above is still in process, the Member of the Board of Directors in concerned sPagel carry out his duties accordingly.*
 10. *Dismissal due to reasons as referred in number 2 letters d and e above, is deemed a dishonorable discharge.*

PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA DIREKSI

Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara Anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisaris.
2. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Pemegang Saham dan Direksi.
3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.
4. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
6. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
7. Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham yang hadir.

TEMPORARY DISCONTINUATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors Members can be temporarily suspended by the Board of Commissioners if they act contrary to the Company's Articles of Association or there is an indication that has made losses to the Company or neglect their obligations or there is an urgent reason for the Company, by taking into account the following conditions:

1. *The Board of Commissioners decision regarding temporary suspension of the Board of Directors member conducted in accordance with the Board of Commissioners decisions making procedures.*
2. *The written temporary suspension must be notified to the person in concerned along with the reason that let to the action taken and a copy to Shareholders and Directors.*
3. *The Notification referred in number 2 above is submitted within 2 (two) days at the latest after the temporary dismissal has been set up.*
4. *The Board of Directors who is temporarily dismiss/suspended no longer authorized to carry out the Company management and represent the Company both inside and outside the court.*
5. *Within a period of no later than 30 (thirty) days after the temporary dismissal, a General Meeting of Shareholders must be held by the Board of Commissioners who will decide whether to withdraw or enforce the temporary dismissal decision.*
6. *In the General Meeting of Shareholders as referred in number 5 above, the Board of Directors member in concerned is given the opportunity to defend himself.*
7. *The meeting as referred in number 5 above is chaired by a shareholder who is assigned by and from the attending Shareholders attendee.*





8. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat, Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas tidak diselenggarakan atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
 9. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara menjadi batal sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas.
 10. Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara Anggota Direksi, dapat pula dilakukan oleh Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menanda-tangani keputusan yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas.
 11. Dalam hal keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara Anggota Direksi di luar Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas, maka Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara lisan atau tertulis, dengan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan.
 12. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham atau Pemegang Saham membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas, maka Anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
8. *In the event that the 30 (thirty) day period has passed, the General Meeting of Shareholders as referred in number 5 above is not being held or the General Meeting of Shareholders is unable to make a decision, the temporary dismissal will be canceled.*
 9. *The temporary dismissal cannot be extended or reset for the same reasons, if the temporary dismissal becomes canceled as referred to in number 8 above.*
 10. *Decision to withdraw or strengthen the decision to temporarily dismiss a Member of the Board of Directors, can also be carried out by the Shareholders outside the General Meeting of Shareholders under the condition that all Shareholders with voting rights agree in writing by signing the decree of the member in concerned.*
 11. *In the case of a decision to withdraw or forcing the temporarily dismiss decision a Member of the Board of Directors outside the General Meeting of Shareholders as referred to in number 10 above, then the member in concerned of the Board of Directors is notified verbally or in writing, given the opportunity to submit a written defense within 14 (fourteen) days after receiving the notification.*
 12. *If the General Meeting of Shareholders or Shareholders cancels the temporary dismissal or the situation as referred in number 8 above occurs, the Member in concerned of the Board of Directors sPagel carry out his duties again accordingly.*

PENGUNDURAN DIRI

1. Seorang Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran dirinya disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.
2. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh Anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif tanggal pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka Anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang diminta tersebut diatas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham

RESIGNATION

1. *The Board of Directors Member has the right to resign from his/her position by notifying in writing of his intentions to the Company with a copy to the Shareholders, Board of Commissioners and other members of the Board of Directors of the Company no later than 30 (thirty) days before the date of his resignation. If the resignation letter states the effective date is less than 30 (thirty) days from the date of receiving letter, it is deemed not to mention the effective date of resignation.*
2. *If up to requested date by the Member of the Board of Directors in concerned or within 30 (thirty) days from the date of the resignation application lette has been recieved, in the event that the effective date of resignation is not stated, there is no decision from the General Meeting of Shareholders, then the Member of the Board of Directors stop on the date requested above or by the expiration of 30 (thirty) days from the date the resignation application is received without requiring the approval of the General Meeting of Shareholders.*



Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance





Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Organisation and Committees under the Board of Commissioners

1. Organ pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, terdiri dari:
 - a. Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, jika diperlukan
 - b. Komite Audit;
 - c. Komite Lainnya, jika diperlukan.
2. Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c di atas, terdiri dari namun tidak terbatas pada Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan komite Pengembangan Usaha.
3. Seorang atau lebih anggota Komite berasal dari anggota Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain lebih dari satu dan/atau menetapkan jumlah anggota komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang apabila:
 - a. Diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Disetujui oleh Menteri berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas di BUMN yang bersangkutan.
3. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

1. Supporting organization for the Board of Commissioners / Supervisory Board, consisting of:
 - a. The Board of Commissioners /Supervisory Board Secretariat, if needed
 - b. Audit Committees
 - c. Other Committees if needed.
2. Other Committees as referred to in number 1 letter c above, consist of but are not limited to the Risk Management Monitoring Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Business Development Committee.
3. One or more committee member from The Board of Commissioners.
4. The Board of Commissioners may form more than one other committee and / or determine the number of committee members who are not members of the Board of Commissioners more than 2 (two) if:
 - a. Required based on applicable laws and regulations; or
 - b. Approved by the States-Owned Enterprises Ministry based on the complexity and load faced by the Board of Commissioners in carrying out their duties at the States-Owned Enterprises (BUMN) concerned.
3. Comitees that responsible to the Board of Commissioners.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Sekretaris Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Dewan Komisaris dibantu staf Sekretariat Dewan Komisaris.
2. Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

THE BOARD OF COMMISSIONERS SECRETARY

Appointment and Dismissal of Members of the the Board of Commissioners Secretary

1. The Board of Commissioners may form a Secretariat for the Board of Commissioners which led by a Board of Commissioners assisted by Secretariat staff of the Board of Commissioners.
2. The Board of Commissioners Secretary and its staff are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.

3. Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar Perseroan.

3. The Board of Commissioners Secretary comes from outside the Company.

TUGAS SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris. Sekretariat Dewan Komisaris memiliki uraian tugas yang jelas, dengan ketentuan:


1. Adanya uraian tugas bagi Sekretariat Komisaris yang ditetapkan oleh Komisaris Utama.
2. Tugas pokok dan fungsi adalah membantu Dewan Komisaris dalam bidang kegiatan kesekretariatan paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris;
 - b. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya;
 - c. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan (a) monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris; (b) Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola perusahaan; (c) Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
 - d. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.
3. Sekretaris Dewan Komisaris melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen berupa:
 - a. Mempunyai fasilitas penyimpanan dokumen Komisaris yang disediakan oleh perusahaan.
 - b. Mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk ke Dewan Komisaris dan dokumen lainnya dengan tertib.

THE DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS SECRETARIAT

The duties of the Board of Commissioners Secretary are to support of the board of commissioners the duties. The Secretariat of the Board of Commissioners has a clear job description, in following condition

1. Job description for the Secretariat of Commissioners appointed by the President Commissioner.
2. Its functions main duties are to assist the Board of Commissioners in secretarial activities, covering at least the following:
 - a. Carrying out secretarial administrative activities within the Board of Commissioners;
 - b. Organizing Board of Commissioners meetings and meetings / gathering between the Board of Commissioners and Shareholders / Share Owners, Directors and other related parties;
 - c. Provide data / information required by the Board of Commissioners and committees within the Board of Commissioners related to (a) monitoring follow-up of the decisions, recommendations and direction from the Board of Commissioners; (b) Administrative materials regarding reports / activities of the Board of Directors in managing the company; (c) Administrative support as well as monitoring on the matters of require approval or recommendation from the Board of Commissioners in connection with company management activities performed by the Board of Directors;
 - d. Collecting technical data from Committees within the Board of Commissioners for the Board of Commissioners purposes.
3. The Board of Commissioners Secretary administers and keeps documents in the form of:
 - a. Provided commissioners document storage facility from the company.
 - b. Administer incoming and outgoing letters to and from the Board of Commissioners and other documents in an orderly manner.



- 
4. Berdasarkan penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Sekretariat Dewan Komisaris dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

MASA JABATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan Sekretaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

EVALUASI KINERJA SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

Evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan metoda yang ditetapkan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

■ Bowo Setiadji

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak 2011. Pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Enjiniring dan Teknologi PT PLN (Persero) (2009-2011), Deputy Direktur PLN Transmisi Luar Jawa-Bali (2008-2009), General Manager PLN Jasa Enjiniring (2002-2008), Direktur Transmisi dan Distribusi PT Delta Rekadaya Mandiri (2002), Asisten Kepala Divisi Transmisi dan Gardu Induk PLN Jasa Enjiniring (1996-2002), Senior Enjinir dan Ketua Tim berbagai Proyek Transmisi dan Gardu Induk 150kV dan 500kV PLN Jasa Enjiniring (1988-2002), serta Kepala Seksi Teknik Listrik, pada Sub Direktorat Teknik Jaringan dan Gardu (SUBDITRING),

4. Based on a written assignment from the Board of Commissioners, the Board of Commissioners Secretariat have access on notes or information about employees, funds, assets, and other resources belonging to the Company relating to the implementation of their duties.

THE BOARD OF COMMISSIONERS SECRETARY AND ITS STAFF TERM OF OFFICE

The Board of Commissioners Secretary and its staff term of office is determined by the Board of Commissioners for a maximum of 3 (three) years and can be reappointed for a maximum of 2 (two) years without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

THE BOARD OF COMMISSIONERS SECRETARIAT PERFORMANCE EVALUATION

The performance of the Board of Commissioners / Supervisory Board Secretariat Evaluation is carried out every 1 (one) year using the method determined by the Board of Commissioners / Board of Supervisors.

BOARD OF COMMISSIONERS' SECRETARY PROFILE

■ Bowo Setiadji

Indonesian citizen. Served as Secretary of the Board of Commissioners since 2011. Previously served as PT PLN (Persero) Head of the Engineering and Technology Division (2009-2011), Deputy Director of PLN Transmission Outside Java-Bali (2008-2009), General Manager of PLN Engineering Services (2002-2008), Director of Transmission and Distribution of PT Delta Rekadaya Mandiri (2002), Assistant Head of the PLN Transmission and Substation Division of Engineering Services (1996-2002), Senior Engineer and Team Leader of various PLN 150kV and 500kV Transmission and Substation Projects for Engineering Services (1988-

PT PLN (Persero) (1984-1988). Menamatkan pendidikan Sarjana Teknik Listrik dari Universitas Indonesia dan Master of Science dari The University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Inggris.

2002), and Head of the Electrical Engineering Section , at the Sub Directorate of Network and Substation Engineering (SUBDITRING), PT PLN (Persero) (1984-1988). He graduated with a Bachelor of Electrical Engineering degree from the University of Indonesia and a Master of Science from The University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), England.

KOMITE DEWAN KOMISARIS

COMMITTEE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE

Komite Audit dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No : 07/SK/KOM.PLNE/2017 tanggal 2 Oktober 2017 , yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Dewan Komisaris No : 05/SK/KOM.PLN-E/2020 tanggal 22 Desember 2020 , dengan keanggotaan sebagai berikut :

The Audit Committee was formed based on the Decree of the Board of Commissioners No. 01 / SK / KOM.PLNE / 2017 dated October 2, 2017, which was then updated to No. 05 / SK / KOM.PLN-E / 2020 dated December 22, 2020, with the following membership:

TABEL JUMLAH DAN KOMPOSISI KOMITE AUDIT
TABLE OF THE NUMBER AND COMPOSITION OF THE AUDIT COMMITTEE
PERIODE 02 OKTOBER 2017 - 22 DESEMBER 2020
APPOINTMENT EMPLOYEE PERIOD OCTOBER 02, 2017 - DECEMBER 22, 2020

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Julius Bobo	Ketua Komite Audit, merangkap anggota <i>Chairman of the Audit Committee, concurrently member</i>
2	Raslan	Sekretaris, merangkap anggota <i>Secretary, concurrently member</i>
3	Marzuqi	Anggota <i>Member</i>
4	Anita Mardalina	Anggota <i>Member</i>
5	Djoko Juwanto	Anggota <i>Member</i>



PERIODE 22 DESEMBER 2020 - 31 DESEMBER 2020

APPOINTMENT EMPLOYEE PERIOD DECEMBER 22, 2020 - DECEMBER 31, 2020

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Edward Siagian	Ketua Komite Audit, merangkap anggota <i>Chairman of the Audit Committee, concurrently member</i>
2	Bowo Setiadji	Sekretaris, merangkap anggota <i>Secretary, concurrently member</i>
3	Marzuqi	Anggota <i>Member</i>
4	Fajar Seno Utomo	Anggota <i>Member</i>
5	Risma Royani	Anggota <i>Member</i>
6	Julita Safitri Evawani	Anggota <i>Member</i>

PROFIL KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE PROFILE

PERIODE 02 OKTOBER 2017 - 22 DESEMBER 2020

APPOINTMENT EMPLOYEE PERIOD OCTOBER 02, 2017 - DECEMBER 22, 2020

No	Nama Name	Jabatan Position	Profil Profile
1	Julius Bobo	Ketua Komite Audit, merangkap anggota <i>Chairman of the Audit Committee, concurrently member</i>	<p>Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak periode 2017. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum Koperasi Pengembang Briket Bara Nusantara, Ketua Bidang MIGAS YPEI (Yayasan Peduli Energi Indonesia), PLT Komisaris Utama pada Juni - Desember tahun 2016. Ketua Umum POROS DAERAH (2009 - Sekarang), Sekjen MEHI (Masyarakat Energi Hijau Indonesia) pada tahun 2009 hingga saat ini, anggota IKAL LEMHANAS pada tahun 2001 hingga saat ini, dan Tenaga Ahli SPS-RI (Dewan Perwakilan Daerah) sejak tahun 2009 hingga saat ini. Menyelesaikan Sarjana Muda Akuntansi (AAI Jakarta) pada tahun 1983, yang kemudian dilanjutkan dengan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di STIE YAI pada tahun 1992 sebelum akhirnya mendapatkan gelar Magister Manajemen Jurusan Sumber Daya Manusia dari Universitas Satyagama, Jakarta pada tahun 2002.</p> <p><i>Indonesian citizen. Served as a member of the Audit Commite since 2017. Currently he serves as General Chairman of the Pengembang Briket Batu Bara Nusantara Cooperative, Chair of the YPEI Oil and Gas Sector (Yayasan Peduli Energi Indonesia), PLT President Commissioner in June - December 2016, General Chairman of POROS DAERAH (2009-Present), Secretary General of MEHI (Masyarakat Energi Hijau Indonesia) in 2009 to present, member of the IKAL LEMHANAS in 2001 to the present. He graduated with a Bachelor of Accounting (AAI Jakarta) in 1983, which then continued with obtaining an Undergraduate of Economics degree in Accounting from STIE YAI in 1992 before finally obtaining a master in Management in the Department of Human Resources from Satyagama University, Jakarta in 2002.</i></p>

2	Raslan	Sekretaris, merangkap anggota <i>Secretary, concurrently member</i>	<p>Warga Negara Indonesia, Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak periode 2017. Memiliki pengalaman sebagai Direktur Keuangan PT Lingga Jati Almanshurin (2008-2009), Corporate Finance PT Cogindo Daya Bersama (CDB) (2004-2008), Finance Manager PT PLN Enjiniring (2003-2004), Finance Manager PT Indosatcom Adimarga (2000-2002), MIS Manager PT Gunanusa Utama Fabricators (1998-2000). Menamatkan pendidikan Sarjana Akuntansi dari Universitas Mercu Buana dan Magister Manajemen Internasional dari Prasetya Mulya.</p> <p><i>Indonesian citizen. Served as a member of the Audit Commite since 2017. He has experience as Finance Director of PT Lingga Jati Almanshurin (2008-2009), Corporate Finance of PT Cogindo Daya Bersama (CDB) (2004-2008), Finance Manager of PT PLN Enjiniring (2003-2004), Finance Manager of PT Indosatcom Adimarga (2000-2002), MIS Manager of PT Gunanusa Utama Fabricators (1998-2000). He graduated with Undergraduate of Accounting from the University of Mercu Buana dan Master in International Management from Prasetya Mulya.</i></p>
3	Marzuqi	Anggota <i>Member</i>	<p>Warga Negara Indonesia, Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak periode 2017. Beliau sempat menjadi Tenaga Ahli di DPR-RI kurang lebih selama 12 tahun, dilanjutkan menjadi tenaga ahli di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) hampir 7 tahun. Begitu juga di lembaga Beliau pernah menjadi wakil sekretaris Yayasan Universitas Sunan Giri Surabaya serta Direktur Lembaga Tunas Mandiri, sebuah lembaga yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia. Dan sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang dipercaya menjadi Komisaris PT. PLNE (Prima Layanan Nasional Enjiniring).</p> <p><i>Indonesian citizen. Served as a member of the Audit Commite since 2017. He had been an expert in the DPR RI for approximately 12 years, continued to become an expert at the Republic of Indonesia Supreme Audit Agency (BPK RI) for almost 7 years. Likewise at the institution he was the deputy secretary of the Sunan Giri University Foundation Surabaya and Director of the Tunas Mandiri Institute, an institution engaged in the development of human resources. And since August 2017 until now he has been trusted to be a Commissioner of PT PLNE (Prima Layanan Nasional Enjiniring)</i></p>





4	Anita Mardalina	Anggota Member	<p>Warga Negara Indonesia, Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak periode 2017. Memiliki pengalaman sebagai Manajer Akuntansi Segmen pada Subdit Akuntansi, Pajak dan Asuransi Bidang Keuangan PT PLN (Persero) (2010), Manajer Akuntansi Korporat pada Subdit Akuntansi, Pajak dan Asuransi Bidang Keuangan PT PLN (Persero) (2008-2010), Asisten Manajer Akuntansi Kantor Pusat pada Subdit Akuntansi, Pajak dan Asuransi Bidang Keuangan PT PLN (Persero) (2007-2008), Koordinator Dinas Akuntansi Kantor Pusat pada Dinas Akuntansi Konstruksi - Bidang Akuntansi PT PLN (Persero) (2003-2007) serta Kepala Bagian Akuntansi Konstruksi pada Dinas Akuntansi Konstruksi - Bidang Akuntansi PT PLN (Persero) (1996-2000). Menamatkan pendidikan Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran.</p> <p><i>Indonesian citizen. Served as a member of the Audit Commite since 2017. She has experience as a Segment Accounting Manager in the Finance, Tax and Insurance Sub-Department of Finance of PT PLN (Persero) (2010), Corporate Accounting Manager in the Accounting, Tax, and Financial Insurance Division of PT PLN (Persero) (2008-2010), Assistant Manager of Headquarters Accounting at the Accounting Tax and Insurance Sub-Department fo Finance of PT PLN (Persero) (2007-2008), Accounting Office Coordinator at the Office of Construction Accounting for PT PLN (Persero) (2003-2007) and Head of the Construction Accounting Division at the Office of Construction Accounting for PT PLN (Persero) (1996-2000). She graduated with Undergraduate of Accounting from the Faculty of Economics, Padjajaran University.</i></p>
---	-----------------	-------------------	--

5	Djoko Juwanto	Anggota Member	<p>Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak tahun 2017. Saat ini juga menjabat sebagai Dosen Luar Biasa Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara , Direktur Utama PT Bima Feroindo. Komisaris Utama PT. Adhi Perkasa Mining, dan Komisaris Utama PT Jambi Prima Cool. Memiliki pengalaman sebagai Marketing Consultant PT Samapta Nusantara (2003-2005), Ahli Utama Bidang Keuangan PLN (2002-2003), Kepala Dinas Keuangan LMK PLN (1997-2002), Kepala Staf Administrasi dan Keuangan PLN di PI Jaringan Jabar dan Jaya (1992-1997, 1997-2002). Kepala Staf Administrasi dan Keuangan PLN di PI Jaringan Sumbar Riau (1987-2002), Kepala Bagian Pengadaan Ditbang PLN Pusat (1982-1987), Staf Direktorat Pembangunan PLN Pusat (1975-1982), Staf Biro Penelitian dan Pengembangan Departemen Perhubungan Pusat (1974-1975), Kepala Bagian Administrasi CV Daya Surya (1973-1974). Asisten Biro Penelitian dan Pengembangan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (1969-1972) dan Asisten Dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Diponegoro (1969-1972). Menamatkan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro, Semarang, Master Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dan Master of Business Administration dari JIMS.</p> <p><i>Indonesian citizen. Served as a member of the Audit Commite since 2017. He served as Head of Engineering and Technology Division of PT PLN (Persero) (2009-2011), Deputy Director of PLN Transmission Outside Java-Bali (2008-2009), General Manager of PLN Enjiniring Services (2002-2008), Director of Transmission and Distribution of PT Delta Rekadaya Mandiri (2002), Assistant Head of the Transmission Division and PLN Enjiniring Service Sub-Station (1996-2002), Senior Engineering and Team Leader of PLN 150kV and 500kV transmission and substation projects(1988-2002), and head of Electricity Section, Network Construction Divisio PT PLN (Persero) (1984-1988). He graduated with Bachelor of Electrical Engineering from the Universitas Indonesia and Master of Science in Electrical Engineering from The University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), England.</i></p>
---	------------------	-------------------	---



Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance



PERIODE 22 DESEMBER 2020 - 31 DESEMBER 2020

APPOINTMENT EMPLOYEE PERIOD DECEMBER 22, 2020 - DECEMBER 31, 2020

No	Nama Name	Jabatan Office	Profil Profile
1	Edward Siagian	Ketua Komite Audit, merangkap anggota <i>Chairman of the Audit Committee, concurrently member</i>	<p>Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak periode 22 Desember 2020. Sebelumnya beliau memiliki pengalaman sebagai Expert Pengendalian Proyek (TK) pada (Tugas Karya ke PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2014 – 2016, Senior Specialist I Pengendalian Proyek (TK) pada (Tugas Karya PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Kantor Pusat pada tahun 2010 – 2014. Menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Tehnik Tenaga Listrik di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1982, kemudian melanjutkan Pendidikan S2 Bidang Manajemen di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1997.</p> <p><i>Indonesian citizen. Served as a Chairman of the Audit Commite since December 22, 2020. Previously he had experience as an Project Control Expert (TK) at (work assignment at PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Head Office in 2014 – 2016, Senior Specialist I Project Control (TK) at (work assignment at PT PLN Enjiniring) PT PLN (Persero) Head Office in 2010 – 2014. Graduated from the Faculty of Electrical Engineering at the Bandung Institute of Technology (IRB) in 1982, then continued his Masters in Management at the Bandung Institute of Technology (ITB) in 1997.</i></p>
2	Bowo Setiadji	Sekretaris, merangkap anggota <i>Secretary, concurrently member</i>	<p>Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Sekretaris Komite Audit sejak periode 22 Desember 2020. Pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Enjiniring dan Teknologi PT PLN (Persero) (2009-2011), Deputi Direktur PLN Transmisi Luar Jawa- Bali (2008-2009), General Manager PLN Jasa Enjiniring (2002-2008), Direktur Transmisi dan Distribusi PT Delta Rekadaya Mandiri (2002), Asisten Kepala Divisi Transmisi dan Gardu Induk PLN Jasa Enjiniring (1996-2002), Senior Enjinir dan Ketua Tim berbagai Proyek Transmisi dan Gardu Induk 150kV dan 500kV PLN Jasa Enjiniring (1988-2002), serta Kepala Seksi Teknik Listrik, pada Sub Direktorat Teknik Jaringan dan Gardu (SUBDITRING), PT PLN (Persero) (1984-1988). Menamatkan pendidikan Sarjana Teknik Listrik dari Universitas Indonesia dan Master of Science dari The University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Inggris.</p> <p><i>Indonesian citizen. Served as Secretary of the Audit Commite since December 22, 2020. He served as Head of Engineering and Technology Division of PT PLN (Persero) (2009-2011), Deputy Director of PLN Transmission Outside Java-Bali (2008-2009), General Manager of PLN Enjiniring Services (2002-2008), Director of Transmission and Distribution of PT Delta Rekadaya Mandiri (2002), Assistant Head of the Transmission Division and PLN Enjiniring Service Sub-Station (1996-2002), Senior Engineering and Team Leader of PLN 150kV and 500kV transmission and substation projects(1988-2002), and head of Electricity Section, Network Construction Divisio PT PLN (Persero) (1984-1988). He graduated with Bachelor of Electrical Engineering from the Universitas Indonesia and Master of Science in Electrical Engineering from The University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), England.</i></p>



3	Marzuqi	Anggota Member	<p>Warga Negara Indonesia, Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak periode 22 Desember 2020. Beliau sempat menjadi Tenaga Ahli di DPR-RI kurang lebih selama 12 tahun, dilanjutkan menjadi tenaga ahli di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) hampir 7 tahun. Begitu juga di lembaga Beliau pernah menjadi wakil sekretaris Yayasan Universitas Sunan Giri Surabaya serta Direktur Lembaga Tunas Mandiri, sebuah lembaga yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia. Dan sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang dipercaya menjadi Komisaris PT. PLNE (Prima Layanan Nasional Enjiniring).</p> <p><i>Indonesian citizen. Served as a member of the Audit Commite since December 22, 2020. He had been an expert in the DPR RI for approximately 12 years, continued to become an expert at the Republic of Indonesia Supreme Audit Agency (BPK RI) for almost 7 years. Likewise at the institution he was the deputy secretary of the Sunan Giri University Foundation Surabaya and Director of the Tunas Mandiri Institute, an institution engaged in the development of human resources. And since August 2017 until now he has been trusted to be a Commissioner of PT PLNE (Prima Layanan Nasional Enjiniring)</i></p>
---	---------	-------------------	--



PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE AUDIT

Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit.
- Ketua dan Anggota Komite Audi diangkar dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris yang merupakan Anggota Dewan Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen.
- Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar perusahaan.

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE AUDIT COMMITTEE

The appointment and dismissal of the Audit Committee is carried out with the following conditions:

- The Board of Commissioners must form an Audit Committee.
- The Chairman and Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.
- The Chairman of the Audit Committee is the Board of Commissioners member that is Independent can act independently.
- Audit Committee members can come from the Board of Commissioners members or from outside the company.



- e. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Audit dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. Anggota Komite Audit merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
- g. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

TUGAS KOMITE AUDIT

Tugas Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit bertugas untuk:
 - i. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
 - ii. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal.
 - iii. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
 - iv. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
 - v. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris.
 - vi. Selain tugas di atas Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam piagam komite audit.

- e. *The appointment and dismissal of Audit Committee Members are reported to the General Meeting of Shareholders.*
- f. *Members of the Audit Committee are members of the Board of Commissioners, terminate automatically when their term of office as members of the Board of Commissioners ends.*
- g. *In the event that a member of the Board of Commissioners who serves as Chairman of the Audit Committee ceases as a member of the Board of Commissioners, then the Chairman of the Audit Committee shall be replaced by another member of the Board of Commissioners within no later than 30 (thirty) days.*

AUDIT COMMITTEE DUTIES

The duties of the Audit Committee are as follows:

- a. *The Audit Committee works collectively in performing its duties to assist the Board of Commissioners.*
- b. *The Audit Committee is independent both in performing and reporting its duties, and is directly responsible to the Board of Commissioners.*
- c. *The Audit Committee is tasked with:*
 - i. *Assisting the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system and the external and internal auditors' duties implementation.*
 - ii. *Assessing the activities implementation as well as the results of audits performed by the Internal and Auditors.*
 - iii. *Providing recommendations in regard to the improvement of the management control system and its implementation.*
 - iv. *Ensuring that there is a satisfactory evaluation procedure for all information released by the Company.*
 - v. *Identifying all matter requiring the attention of the Board of Commissioners and its duties.*
 - vi. *In addition to the above duties, the Board of Commissioners can assign other assignments to the Audit Committee as determined in the audit committee charter.*

MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu

PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

- a. Persyaratan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:
 1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
 2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
 3. Mampu berkomunikasi secara efektif;
 4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
 5. Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika diperlukan.
- b. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri/bisnis perusahaan.

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko menjalankan peran secara profesional dan independen, serta tidak menerima/melakukan intervensi dari/kepada pihak lainnya. Anggota Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko tidak terkait dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, maupun Direksi. Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko yang berasal dari luar perusahaan tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang

AUDIT COMMITTEE MEMBERS TERM OF OFFICE

The term of office for Audit Committee members who are not members of the Company's Board of Commissioners is no longer than 3 (three) years and can be extended once for 2 (two) years of office, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss at any time.

REQUIREMENTS FOR AUDIT COMMITTEE MEMBERSHIP

- a. *The requirements for members of the Audit Committee are as follows:*
 1. *Have good integrity, sufficient knowledge and work experience in the field of supervision / inspection;*
 2. *Has no personal interest / relationship that may cause negative impacts and conflict of interest on the Company;*
 3. *Good command of communication*
 4. *Can provide sufficient time to complete the task; and*
 5. *Other requirements set out in the audit committee charter, if required.*
- b. *One of the members of the Audit Committee must have an educational background or have expertise in accounting or finance, and one of them must understand the company's industry / business.*

INDEPENDENCE OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee and Risk Management Committee play their roles professionally and independently, and do not accept / intervene from / to other parties. Members of the Audit Committee and Risk Management Committee are not related to the Shareholders, the Board of Commissioners, or the Board of Directors. Audit Committee and Risk Management Committee from outside the company do not have personal interests



dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan (conflict of interest) dengan perusahaan. Independensi Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko sebagai berikut :

/ associations that can cause negative impacts and conflicts of interest with the company. The independence of the Audit Committee and Risk Management

TABEL INDEPENDENSI KOMITE AUDIT
TABLE OF THE INDEPENDENCE OF AUDIT COMMITTEE

PERIODE 02 OKTOBER 2017 - 22 DESEMBER 2020

APPOINTMENT EMPLOYEE PERIOD OCTOBER 02, 2017 - DECEMBER 22, 2020

Aspek Independensi <i>Independence Aspect</i>	Julius Bobo	Djoko Juwanto	Anita Mardalina	Raslan	Bowo Setiadji
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi <i>Having no financial relations with the Board of Commissioners and Directors</i>	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. <i>Having no share ownership relationship at the company</i>	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit <i>Having no family relationship with the Board of Commissioners, Directors and/or fellow Audit Committee members</i>	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah <i>Not serving as administrator of political parties, officials and government</i>	√	√	√	√	√

PERIODE 22 DESEMBER 2020 - 31 DESEMBER 2020

APPOINTMENT EMPLOYEE PERIOD DECEMBER 22, 2020 - DECEMBER 31, 2020

Aspek Independensi <i>Independence Aspect</i>	Edward Siagian	Bowo Setiadji	Marzuqi	Fajar Seno Utomo	Risma Royani
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi <i>Having no financial relations with the Board of Commissioners and Directors</i>	√	√	√	√	√

Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. <i>Having no share ownership relationship at the company</i>	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit <i>Having no family relationship with the Board of Commissioners, Directors and/or fellow Audit Committee members</i>	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah <i>Not serving as administrator of political parties, officials and government</i>	√	√	√	√	√

• Komite Manajemen Risiko & GCG

Komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris adalah Komite Manajemen Risiko dan *Good Corporate Governance* (GCG). Komite Manajemen Risiko dan *Good Corporate Governance* (GCG) dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris No. 02/SK/KOM.PLNE/2017 tanggal 9 Januari 2017 dengan perubahan No. 03/SK/KOM.PLN-E/2018 tanggal 9 Januari 2018 dan perubahan No. 04/SK/KOM.PLNE/2020 tanggal 22 Desember 2020 dengan keanggotaan sebagai berikut :

• Risk Management & GCG Committee

Risk Management and Good Corporate Governance (GCG) Committee is another committee formed by the Board of Commissioners. The Risk Management and Good Corporate Governance (GCG) Committee was formed based on the decision of the Board of Commissioners No. 02 / SK / KOM.PLNE / 2017 dated 9 January 2017 with amendment No. 04 / SK / KOM.PLNE / 2020 dated December 22, 2020 with the following memberships:

TABEL JUMLAH DAN KOMPOSISI KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG
TABLE OF NUMBERS AND COMPOSITION OF THE RISK MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE

PERIODE 02 OKTOBER 2017 - 22 DESEMBER 2020

APPOINTMENT EMPLOYEE PERIOD OCTOBER 02, 2017 - DECEMBER 22, 2020

No	Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>
1	Djoko Prasetyo	Ketua Komite Committee Chairman
2	Handani Rismasini	Sekretaris, merangkap anggota Secretary, concurrently member
3	Sulistijono	Anggota Member
4	Alland Asqolani	Anggota Member



PERIODE 22 DESEMBER 2020 - 31 DESEMBER 2020

APPOINTMENT EMPLOYEE PERIOD DECEMBER 22, 2020 - DECEMBER 31, 2020

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Djoko Prasetyo	Ketua Komite Committee Chairman
2	Budi Wicaksono	Sekretaris, merangkap anggota Secretary, concurrently member
3	Alland Asqolani	Anggota Member
4	Riza Novianto Gustam	Anggota Member
5	Erwin Siagian	Anggota Member

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KOMITE MANAJEMEN RISIKO & GCG

Komite Manajemen Risiko dan GCG bertugas membantu Dewan Komisaris untuk :

1. Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang penerapan Manajemen Risiko dan Mitigasi Risiko.
2. Membantu pengkajian dan penilaian efektivitas penerapan Good Corporate Governance di Perseroan.
3. Memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan praktek Good Corporate Governance di Perseroan.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
5. Melakukan penelaahan Risiko Sasaran Strategis Perusahaan maupun issue Strategis Internal dan Eksternal Perusahaan.
6. Melaksanakan monitoring atas efektifitas pengelolaan risiko perusahaan.
7. Memastikan pencapaian maturity level ERM (Enterprise Risk Management) Perusahaan.
8. Membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan tugas Komite MR dan GCG kepada Dewan Komisaris.
9. Melaksanakan monitoring atas efektifitas pelaksanaan GCG di Perusahaan
10. Membantu melakukan penilaian atas efektifitas pelaksanaan GCG di Perusahaan

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF
THE RISK MANAGEMENT & GCG
COMMITTEE

The Risk Management and GCG Committee is assisting the Board of Commissioners to:

1. Conducting assessments periodically and providing recommendations on the implementation of Risk Management and Risk Mitigation.
2. Assisting in the study and assessment of the effectivity Good Corporate Governance in the Company implementation.
3. Ensuring the effectiveness Risk Management implementation and Good Corporate Governance practices in the Company.
4. Identifying matters requiring the attention of the Board of Commissioners.
5. Conducting a review of the Company's Strategic Target Risks as well as the Company's Internal and External Strategic Issues.
6. Monitoring the effectiveness of company risk management.
7. Ensuring the achievement of the Company's ERM (Enterprise Risk Management) maturity level.
8. Preparing a written report on the implementation of the duties of the MR and GCG Committee to the Board of Commissioners.
9. Carry out monitoring of the effectiveness of GCG implementation in the Company.
10. Assist in assessing the effectiveness of GCG implementation in the Company

TATA KERJA KOMITE

PIAGAM KOMITE

Piagam Komite disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dewan Komisaris menetapkan Piagam Komite berdasarkan usulan Komite.
- Asli Piagam Komite disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan.

RENCANA KERJA DAN PENGANGGARAN

Rencana kerja dan penganggaran disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sebelum tahun buku berjalan, Komite wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
- Salinan rencana kerja dan anggaran Komite disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
- Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

RAPAT KOMITE

Rapat Komite dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Komite mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Setiap rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir.
- Risalah rapat disampaikan secara tertulis oleh Komite kepada Dewan Komisaris.

COMMITTEE WORK PROCEDURES

COMMITTEE CHARTER

The Committee Charter is prepared with the following conditions:

- The Board of Commissioners assign the Committee Charter based on the Committee's recommendation.
- The original Committee Charter is submitted to the Board of Directors for documentation.

WORK PLANS AND BUDGETING

Work plans and budgeting are prepared with the following conditions:

- Prior to the current financial year, the Committee must prepare and submit an annual work plan and budget to the Board of Commissioners for approval.
- A copy of the Committee's work plan and budget is submitted by the Board of Commissioners to the Board of Directors to be informed.
- The implementation of the Committee's annual work plan and budget is reported to the Board of Commissioners.

COMMITTEE MEETINGS

Committee meetings are held in the following conditions:

- The Committee shall hold meetings at least equal to the minimum requirements for the Board of Commissioners meeting as regulated in the articles of association.
- Each Committee meeting is noted in the minutes of the meeting signed by all Committee members present.
- Minutes of meetings are submitted in writing by the Committee to the Board of Commissioners.



- d. Kehadiran anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite.

PELAPORAN

Ketentuan pelaporan Komite adalah sebagai berikut:

- Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- Komite membuat laporan triwulan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris.
- Laporan Komite ditandatangani oleh Ketua Komite dan anggota Komite.

AKSES DAN KERAHASIAAN INFORMASI

Ketentuan akses dan kerahasiaan informasi Komite adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan kepada Dewan Komisaris.
- Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

EVALUASI KINERJA KOMITE

Evaluasi terhadap kinerja Komite dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan metoda yang ditetapkan Dewan Komisaris.

- d. Attendance of Committee members at meetings is reported in the quarterly reports and the Committee's annual reports.

REPORTING

Committee reporting requirements are as follows:

- The Committee is responsible to the Board of Commissioners and is responsible submitting the Board of Commissioners report on each implementation of its duties, accompanied by recommendations if necessary.
- The Committee prepares reports every quarter and also annually to the Board of Commissioners.
- The Committee Report is signed by the Committee Chair and Committee members.

ACCESS AND CONFIDENTIALITY OF INFORMATION

The provisions for access and confidentiality of Committee information are as follows:

- Based on a written letter of assignment from the Board of Commissioners, the Committee can access notes or information about the Company's employees, funds, assets and other resources relating to the implementation of its duties.
- The results of the Board of Commissioners assignment must be reported by the Committee in writing.
- The Committee is obliged to maintain the confidentiality of documents, data and information of the Company, both from internal and external parties and only used for the purposes of carrying out its duties.

COMMITTEE PERFORMANCE EVALUATION

The Committee's performance evaluation is conducted every 1 (one) year using the method established by the Board of Commissioners.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

ORGANS AND COMMITTEES BELOW THE BOARD OF DIRECTORS

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibantu oleh Organ Perusahaan. Perusahaan tidak memiliki Komite yang berada di bawah Direksi.

• SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan sebagai organ pendukung dalam struktur organ tata kelola Perusahaan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, Sekretaris Perusahaan berperan dalam memfasilitasi komunikasi antara organ Perusahaan, bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, perencanaan serta memastikan efektivitas dan transparansi komunikasi perusahaan, hubungan kelembagaan, hubungan investor dengan tetap memperhatikan prinsip standar etika Perusahaan, prinsip tata kelola Perusahaan, dan nilai-nilai Perusahaan.

• PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pada tahun 2020, fungsi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Totot Fregattanto berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 11.003.K/S11/DIR/PLNE/V/2018 tentang Mutasi Jabatan tanggal 11 Mei 2018. Profil Sekretaris Perusahaan sebagai berikut.

Warga Negara Indonesia, lahir pada September 1967. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak Mei 2018. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Senior Engineer I Perencanaan Sistem pada Divisi Perencanaan Sistem Direktorat Perencanaan Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2015-2016). Menyelesaikan Pendidikan S1 Listrik dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan S2 Bidang Manajemen dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

In carrying out their duties, the Board of Directors is assisted by Company Organs. The company does not have a Committee that is under the Board of Directors.

• CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary as a supporting organ in the corporate governance organ structure has an important role in ensuring that the company complies with regulations regarding disclosure requirements in line with the principles of good corporate governance. In addition, the Corporate Secretary plays a role in facilitating communication between the Company's organs, is responsible for formulating policies, planning and ensuring the effectiveness and transparency of corporate communications, institutional relations, investor relations while still paying attention to the principles of the Company's ethical standards, principles of corporate governance, and values. Company.

• CORPORATE SECRETARY PROFILE

In 2020, the function of the Corporate Secretary was held by Totot Fregattanto based on Directors Decree number 11.003.K / S11 / DIR / PLNE / V / 2018 concerning Position Transfer on May 11, 2018. Profile of the Corporate Secretary is as follows.

Indonesian citizen, born in September 1967. He has been serving as Corporate Secretary since May 2018. Previously, he served as Senior Engineer I of System Planning in the System Planning Division of the Corporate Planning Directorate of PT PLN (Persero) Head Office (2015-2016). Completed his S1 Electrical Education from the Ten November Institute of Technology and S2 in Management from the Research and Community Service Institute.



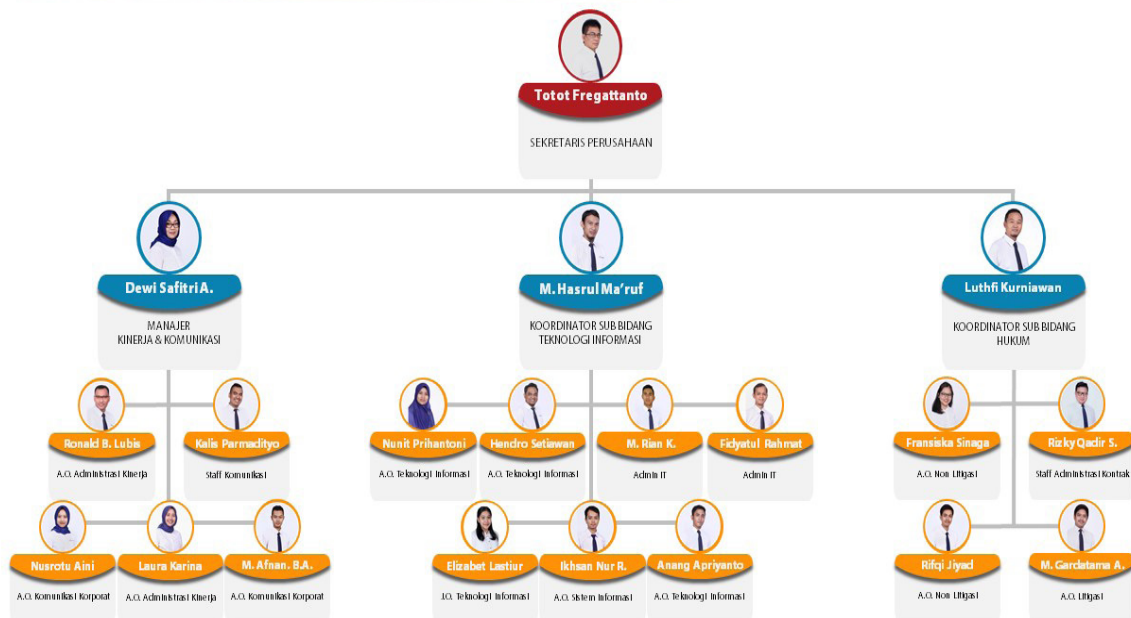
• STRUKTUR SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Perusahaan PLN Enjiniring didukung oleh beberapa unit kerja. Unit kerja pendukung fungsi Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring Nomor: 02.001.K/010/DIR/PLN/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Struktur Organisasi.

• STRUCTURE OF CORPORATE SECRETARY

In carrying out its functions, the Corporate Secretary of PLN Enjiniring is supported by several work units. The work unit supporting the function of the Corporate Secretary based on the Decree of the Directors of PT PLN Enjiniring Number: 02.001.K / 010 / DIR / PLN / VI / 2017 dated June 2, 2017 concerning Organizational Structure.

Struktur Sekretaris Perusahaan PLN Enjiniring



• TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi PLN Enjiniring, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagai berikut.

1. Mengelola dan mengevaluasi data-data perusahaan, prosedur, tata kerja dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Melaksanakan kegiatan hubungan komunikasi Korporat, media dan hubungan kemasyarakatan.
3. Memastikan terlaksananya hubungan yang baik dengan masyarakat dan investor.
4. Melakukan pemantauan dan memastikan terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

• DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF CORPORATE SECRETARY

Based on the Decree of the Board of Directors regarding the PLN Enjiniring Structure, the duties and responsibilities of the Corporate Secretary are as follows.

1. Manage and evaluate company data, procedures, work procedures and applicable laws and regulations.
2. Carry out corporate communication, media and social relations activities.
3. Ensure the establishment of good relations with the public and investors.
4. Monitor and ensure the implementation of good corporate governance (GCG).

5. Memantau pencapaian kinerja korporat secara berkala
6. Menyusun dan memastikan terlaksananya kebijakan program CSR
7. Melaporkan secara periodik kinerja perusahaan kepada Pemegang Saham
8. Memberikan pendampingan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi.
9. Melakukan analisa hukum atas permasalahan hukum perseroan
10. Memberikan opini hukum
11. Melakukan review terhadap seluruh produk hukum perseroan
12. Mengevaluasi, mengelola dan memantau ketaatan perusahaan terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan
13. Menyiapkan Laporan manajemen dan Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
14. Menyiapkan dan updating company profile
15. Mengelola data room Korporat
16. Mengelola sistem informasi teknologi dan manajemen perusahaan
17. Membina keahlian dan kompetensi SDM
18. Mengelola bank data dan dokumen
19. Memastikan terpenuhinya kepuasan pelanggan
20. Membuat laporan aktivitas secara periodik termasuk pencapaian kinerja
21. Memberikan persetujuan atau ketidaksetujuan tentang penilaian kinerja individu bulanan, semesteran dan tahunan kepada karyawan yang berada di lingkup bidang kesekretariatan perusahaan.

• **PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2020**

Sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan program kerja yang ditetapkan, Sekretaris Perusahaan telah menyusun dan menyampaikan laporan dalam bentuk Laporan Sekretaris Perusahaan 2020 sesuai dengan pembagian sub-bidang dalam struktur organisasi meliputi:

5. *Monitor corporate performance achievements regularly*
6. *Develop and ensure the implementation of CSR program policies*
7. *Periodically report the company's performance to the Shareholders*
8. *Provide legal assistance in solving legal issues both litigation and non-litigation.*
9. *Conduct a legal analysis of the company's legal issues*
10. *Providing legal opinion*
11. *Conduct a review of all the company's legal products*
12. *Evaluate, manage and monitor the company's compliance with regulations and laws and regulations*
13. *Prepare management reports and annual reports in accordance with applicable regulations*
14. *Prepare and update company profile*
15. *Manage Corporate data rooms*
16. *Managing enterprise information technology and management systems*
17. *Fostering HR expertise and competence*
18. *Manage data and document banks*
19. *Ensuring the fulfillment of customer satisfaction*
20. *Make periodic activity reports including performance achievements*
21. *Give approval or disagreement about evaluating the performance of individuals monthly, semester and yearly to employees who are in the scope of the company secretariat.*

• **DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF CORPORATE SECRETARY IN 2020**

As a manifestation of accountability for the implementation of the specified functions and work programs, the Corporate Secretary has compiled and submitted a report in the form of the 2020 Corporate Secretary Report based on the task sub-division in the organizational structure including:





1. Sub-bidang Kinerja dan Komunikasi
 - a. Melaksanakan Rapat Direksi, yang selama tahun 2020 telah terselenggara sebanyak 32 kali;
 - b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris - Direksi yang selama tahun 2020 telah terselenggara sebanyak 13 kali;
 - c. Pelaksanaan RUPS Tahunan Perusahaan tahun 2020 yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu RUPS Pengesahan RKAP 2020 pada 30 Januari 2020 dan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 pada tanggal 19 Juni 2020;
 - d. Melakukan Self Assessment GCG Tahun Buku 2020 ;
 - e. Melakukan Monitoring atas tindak lanjut keputusan RUPS Tahun 2019 dan 2020;
 - f. Melaksanakan Rapat Kerja tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2020;
 - g. Menyusun Laporan Manajemen Perusahaan yang diterbitkan dan disampaikan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris;
 - h. Menyusun Laporan Tahunan 2019 (*Annual Report*) yang telah didistribusikan kepada *stakeholder* PLN Enjiniring dan diunggah di *website* PLN Enjiniring;
 - i. Memberikan pelayanan data dan informasi kepada para pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan yaitu Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi serta pihak ketiga lainnya;
 - j. Melaksanakan program komunikasi perusahaan melalui pengelolaan media sosial PLN Enjiniring berupa Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pengelolaan Website dan Majalah Korporat Perusahaan;
 - k. Melaksanakan Kegiatan Protokoler Perusahaan;
 - l. Pelaksanaan Program CSR Perusahaan.
2. Sub-bidang Hukum
 - a. Memberikan pendampingan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi;
 - b. Melakukan analisa hukum atas permasalahan hukum perseroan;
 - c. Membuat kajian hukum;

1. *Performance and Communication Sub-Division*
 - a. *Conducting Board of Director Meeting, which in 2020 have been held 32 times;*
 - b. *Coordinator the Board of Commissioner - Director Meeting, which in 2020 have been held 13 times;*
 - c. *Implementation of the Company's Annual General Meeting of Shareholder which in 2020 was held 2 (two)times, namely GMS 2020 concerning APBD's Approval on January 30,2020 and the Annual General Meeting of Financial Statements Approval and Ratification pf the 2019 Financial Statements on June 19,2020;*
 - d. *Conducting a GCG self-assessment in 2020;*
 - e. *Monitoring the follow-up to the resolutions of GMS 2019 and 2020;*
 - f. *Organizing a Work Meeting in 2020 on January 31, 2020;*
 - g. *Preparing Corporate Management Reports publised and submitted to the Shareholders and the Board of Commisioners.*
 - h. *Preparing the 2020 Annual Report which have been distributed to PLN Enjiniring stakeholders and have been uploaded on PLN Enjiniring website;*
 - i. *Providing data and information services to all parties interested in company namely Shareholders, Board of Commissioners, Directors and other third parties;*
 - j. *Implement corporate communication programs through PLN Enjiniring social media management in the form of Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Website Management and Corporate Magazines;*
 - k. *Acting as a Coordinator of Corporate Protocol Activities;*
 - l. *Implementation as the CSR Company Program*
2. *Legal Sub-division*
 - a. *Provide legal assistance in solving legal issues both litigation and non-litigation;*
 - b. *Conduct a legal analysis of the company's legal issues;*
 - c. *Providing legal opinion;*

- d. Melakukan review terhadap seluruh produk hukum perseroan;
 - e. Mengevaluasi, mengelola dan memantau ketaatan perusahaan terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan;
 - f. Memberikan pendampingan hukum;
 - g. Kepengurusan Perizinan Perusahaan.
3. Sub-bidang Teknologi dan Informasi
- a. Mengelola sistem teknologi dan informasi;
 - b. Membangun sistem kerja berbasis aplikasi;
 - c. Pelaksanaan IT Master Plan;
 - d. Mengelola kesediaan layanan IT untuk kebutuhan perusahaan.
- **PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG SEKRETARIS PERUSAHAAN**

Selama tahun 2020, Bidang Sekretaris Perusahaan PLN Enjiniring mengikuti Pengembangan kompetensi sebagai berikut.

- d. Conduct a review of all the company's legal products;
 - e. Evaluate, manage and monitor the company's compliance with regulations and laws and regulations;
 - f. Provide legal assistance
 - g. Company Licensing Management
3. Technology and Information Sub-division
- a. Manage information and technology system;
 - b. Build an application-based work system;
 - c. Implementation of the IT Master Plan;
 - d. Manage the availability of IT service for company needs

- **PROGRAM FOR ENHANCING COMPETENCE SECRETARY OF THE COMPANY**

During 2020, the Corporate Secretary of PLN Enjiniring participated in the development of competencies as follows.



TABEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

TABLE OF CORPORATE SECRETARY COMPETENCY DEVELOPMENT

Nama <i>Name</i>	Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan <i>Competency/Training Development Materials</i>	Waktu Pelaksanaan <i>Execution Time</i>		Jenis Pelatihan dan Penyelenggara <i>Types of Training and Organizers</i>
		Start	Finished	
Totot Fregattanto	Awareness ISO 27001:2013	03 Juni 2020	05 Juni 2020	ITGID - PROXIS GROUP
	Anti-Bribery Management System Based on	29 Juni 2020	30 Juni 2020	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
	Sosialisasi Pembekalan Masa Purna Bakti	22 Oktober 2020	22 Oktober 2020	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT
Totot Fregattanto	Awareness ISO 27001:2013	June 03, 2020	June 05, 2020	ITGID - PROXIS GROUP
	Anti-Bribery Management System Based on	June 29, 2020	June 29, 2020	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
	Socialization of Provision for Retirement	October 22,2020	October 22,2020	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT
Dewi Safitri	Diklat EE III Batch 4	02 Juni 2020	17 Juni 2020	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT
Dewi Safitri	EE III Training Batch 4	June 02, 2020	June 17, 2020	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT



M Hasrul Ma'ruf	Lead Implementer ISO 27001:2013	03 Juni 2020	05 Juni 2020	ITGID - PROXIS GROUP
M Hasrul Ma'ruf	Lead Implementer ISO 27001:2014	June 03, 2020	June 05, 2020	ITGID - PROXIS GROUP
Luthfi Kurniawan	Qualified Risk Management Analyst (QRMA)	09 Maret 2020	12 Maret 2020	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
	Pengadaan Barang dan Jasa PT PLN (Persero)	07 September 2020	09 September 2020	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT
	Anti-Bribery Management System Based on	29 Juni 2020	30 Juni 2020	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
Luthfi Kurniawan	Qualified Risk Management Analyst (QRMA)	March 09, 2020	March 12, 2020	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
	Procurement of PT PLN (Persero)	September 07, 2020	September 09, 2020	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT
	Anti-Bribery Management System Based on	June 29, 2020	June 30, 2020	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
Ronald Bachner Lubis	Anti-Bribery Management System Based on	29 Juni 2020	30 Juni 2020	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
Ronald Bachner Lubis	Anti-Bribery Management System Based on	June 26, 2020	June 30, 2020	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
Muhammad Afnan Banyu Aji	Social Media Marketing	26 Agustus 2020	31 Agustus 2020	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT
Muhammad Afnan Banyu Aji	Social Media Marketing	August 26, 2020	August 31, 2020	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT
Nusrotu Aini Latifah	Anti-Bribery Management System Based on	29 Juni 2020	30 Juni 2020	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
Nusrotu Aini Latifah	Anti-Bribery Management System Based on	June 29, 2020	June 30, 2020	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
Fransiska Sinaga	Anti-Bribery Management System Based on	29 Juni 2020	30 Juni 2020	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
Fransiska Sinaga	Anti-Bribery Management System Based on	June 29, 2020	June 30, 2020	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
Rifqi Jiyad	Kontrak Berbasis FIDIC	10 Agustus 2020	18 Agustus 2020	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT
	Anti-Bribery Management System Based on ISO 37001:2016	25 Juni 2020	25 Juni 2020	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
Rifqi Jiyad	Contract Based FIDIC	August 10, 2020	August 18, 2020	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT
	Anti-Bribery Management System Based on	June 25, 2020	June 25, 2020	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)

Nunit Prihatoni Siregar	Lead Implementer ISO 27001:2013	03 Juni 2020	05 Juni 2020	ITGID - PROXIS GROUP
	Anti-Bribery Management System Based on	29 Juni 2020	30 Juni 2020	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
	ITIL (Information Technology Infrastructure Library)	28 Juli 2020	05 Agustus 2020	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT
Nunit Prihatoni Siregar	Lead Implementer ISO 27001:2013	June 03, 2020	June 05, 2020	ITGID - PROXIS GROUP
	Anti-Bribery Management System Based on	June 29, 2020	June 30, 2020	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
	ITIL (Information Technology Infrastructure Library)	July 28, 2020	August 05, 2020	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT
Hendro Setiawan	Lead Implementer ISO 27001:2013	03 Juni 2020	05 Juni 2020	ITGID - PROXIS GROUP
	Anti-Bribery Management System Based on ISO 37001:2016	25 Juni 2020	26 Juni 2020	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
Hendro Setiawan	Lead Implementer ISO 27001:2013	June 03, 2020	June 05, 2020	ITGID - PROXIS GROUP
	Anti-Bribery Management System Based on ISO 37001:2016	June 25, 2020	June 26, 2020	Cipta Raya Mekar Sahitya (CRMS)
Ikhsan Nur Rahman	Perhitungan Setting dan Koordinasi Proteksi Sistem Distribusi	06 Juli 2020	08 Juli 2020	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT
Ikhsan Nur Rahman	Setting Calculation and Coordination System Protection Distribution	July 06,2020	July 08,2020	PLN (PERSERO) PUSDIKLAT



ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

ORGANS AND COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

• SATUAN PENGAWASAN INTERN

Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan unit kerja independen yang berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama. SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

SPI memiliki landasan yang kuat dalam menjalankan fungsinya untuk memantau dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian intern di Perusahaan. SPI memiliki komitmen untuk melakukan fungsi pemantauan pengendalian intern secara efektif dan efisien, serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.

• VISI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Visi Satuan Pengawasan Intern PLN Enjiniring yaitu "To be trusted partner yang diandalkan oleh stakeholder internal audit."

• MISI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Misi Satuan Pengawasan Intern PLN Enjiniring dijabarkan sebagai berikut.

1. Membantu Direktur Utama dalam meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan Perusahaan untuk secara terus menerus mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen yang efektif;
2. Menumbuhkan persamaan persepsi dalam proses pengawasan internal antara SPI (auditor dan konsultan internal) dan unit operasional untuk mendorong terwujudnya Good Corporate Government (GCG);
3. Mengembangkan kompetensi auditor dan konsultan internal dalam melaksanakan audit dan layanan konsultasi sesuai dengan The IIA's International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (Standards); dan

• INTERNAL SUPERVISION UNIT

The Internal Audit Unit (SPI) is an independent unit work directly under the President Director. SPI is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

SPI has a strong foundation in carrying out its function to monitor and evaluate internal control adequacy and effectiveness within the Company. SPI has a commitment to perform the internal control monitoring function effectively and efficiently, and to achieve the set targets.

• THE INTERNAL SUPERVISION UNIT VISION

PLN Enjiniring Internal Control Unit vision is "To be a trusted partner that can be relied on by internal audit stakeholders."

• INTERNAL CONTROL UNIT MISSION

PLN Enjiniring Internal Control Unit mission is described as follows.

1. Assist the President Director in improving the understanding and commitment of the Company's leadership to continuously develop and implement an effective management control system;
2. Fostering a common perception in the internal control process between SPI (internal auditors and consultants) and operational units to encourage in manifesting Good Corporate Government (GCG);
3. Developing the internal auditors and consultants competency in conducting convenient audits and consulting services with The IIA's International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (Standards); and

- 4. Meningkatkan efektivitas informasi hasil pengawasan SPI untuk mencegah, mendeteksi, dan mengungkapkan praktek kecurangan (fraud) di Lingkungan Perseroan.

- 4. Improving the effectiveness of SPI supervision information result to prevent, detect, and disclose fraudulent practices within the Company.

• **PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN**

• **THE HEAD OF INTERNAL SUPERVISION PROFILES**

Kepala Satuan Pengawasan Intern mulai dari Juli 2019 dijabat oleh Izhar Syafril berdasarkan SK Direksi No. 0057.K/SDM.03.01/DIR/2019. Profil Kepala SPI sebagai berikut:

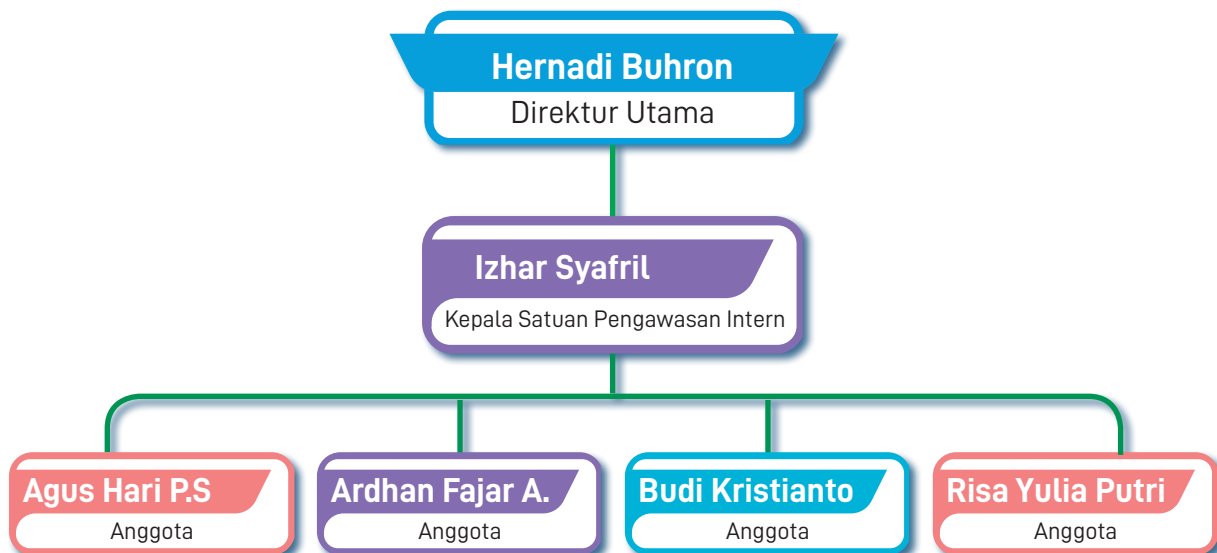
The Head of the Internal Audit Unit is by Izhar Syafril based on the Decree of the Board of Directors No. 0057.K/SDM.03.01/DIR/2019 starting from July 2019. The profile of the Head of SPI is as follows:

Warga Negara Indonesia, umur 52 tahun. Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern sejak 01 Juli 2019 sebelumnya menjabat sebagai Group Head Audit Maluku Papua 20 pada 01 Maret 2018 menamatkan pendidikan D3 Mesin UNSRI 1990, S1 Teknik Mesin UNITAS tahun 2001.

A 52 years old, Indonesian citizen. Served as Head of the Internal Audit Unit since July 1st, 2019 previously served as Group Head Audit Maluku Papua from March 1st, 2018, completing his Diploma in Mechanical Engineering from UNSRI 1990, Bachelor of Mechanical Engineering from UNITAS in 2001.



Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Intern
Internal Audit Unit Organizational Structure



- **Komposisi Kepala Satuan Pengawasan Intern**

Satuan Pengawasan Intern (SPI) dipimpin oleh seorang Kepala SPI dan dibantu oleh 4 (empat) orang auditor internal. 3 (tiga) dari 4 (empat) Auditor anggota SPI memiliki keterampilan/ keahlian yang dipersyaratkan untuk menjadi auditor internal.

Komposisi SPI PLN Enjiniring sebagai berikut.

TABEL KOMPOSISI SATUAN PENGAWASAN INTERN
TABLE OF COMPOSITION OF INTERNAL CONTROL UNIT

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Izhar Syafril	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit
2	Agus Hari P.S	Auditor
3	Ardan Fajar Alam	Auditor
4	Budi Kristianto	Auditor
5	Risa Yulia Putri	Auditor

- **Composition of the Head of the Internal Audit Unit**

The Internal Audit Unit (SPI) is led by a Head of SPI and assisted by 4 (four) internal auditors. 3 (three) out of 4 (four) SPI Auditors member have the skills/expertise required to become internal auditors.

The composition of the PLN Engineering SPI is as follows.

- **Sertifikasi Profesi Audit Internal**

TABEL SERTIFIKASI PROFESI AUDIT INTERNAL
TABLE OF INTERNAL AUDIT PROFESSIONAL CERTIFICATION

No	Nama Name	Jabatan Jabatan	Sertifikasi Certification
1	Izhar Syafril	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit	QIA
2	Agus Hari P.S	Auditor	QIA Basic
3	Ardan Fajar Alam	Auditor	QIA Intermediate
4	Budi Kristianto	Auditor	QIA Basic
5	Risa Yulia Putri	Auditor	Belum sertifikasi

- **Internal Audit Professional Certification**

• **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA LINGKUP PEKERJAAN SATUAN PENGAWASAN INTERN**

Satuan Pengawasan Intern berperan memastikan dan memberikan konsultasi yang independen dan obyektif bagi manajemen sehingga dapat mendorong penciptaan nilai tambah dan memperbaiki operasional bisnis. Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern meliputi:

1. Menyusun dan menyempurnakan strategi SPI sesuai dengan visi dan misi;
2. Menyusun dan menyempurnakan Piagam Pengawasan Intern Terintegrasi/Integrated Audit Charter dan Pedoman RBIA;
3. Menyusun dan menyempurnakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Terintegrasi;
4. Melaksanakan evaluasi kualitas audit dan jasa konsultasi oleh jajaran SPI maupun pihak independen alas seluruh proses audit;
5. Melaksanakan analisis dan penyusunan laporan hasil audit bagi manajemen dan pihak eksternal, pengelolaan anggaran SPI, evaluasi dan pelaporan realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Terintegrasi, Rencana Kerja Anggaran sesuai kewenangan bidang tugasnya;
6. Melaksanakan kajian dan pengembangan organisasi SPI, pengembangan SDM, pengelolaan pendidikan SPI serta administrasi SDM, logistik dan kesekretariatan SPI;
7. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di SPI maupun bidang dan unit lainnya, lembaga atau instansi/lembaga pengawasan lainnya, guna memperlancar pencapaian target yang ditetapkan, peningkatan kinerja SPI dan Perusahaan sesuai kewenangannya;
8. Memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan berjalan efisien dan efektif;
9. Melaksanakan fungsi pengawasan operasional dan audit investigasi;
10. Memberikan konsultasi atau saran perbaikan yang diperlukan manajemen; dan

• **DUTIES AND RESPONSIBILITIES AS WELL AS SCOPE OF WORK OF THE INTERNAL SUPERVISION UNIT**

The Internal Audit Unit plays a role in ensuring and providing independent and objective consulting to management as to encourage added value creation and improve business operations. The duties and responsibilities of the Internal Audit Unit include:

1. *Develop and refine the SPI strategy in accordance with the vision and mission;*
2. *Develop and improve the Integrated Internal Audit Charter and RBIA Guidelines;*
3. *Develop and improve the Integrated Annual Supervision Work Program (PKPT);*
4. *Carrying out audit quality evaluations and consulting services by the SPI staff as well as independent parties for the entire audit process;*
5. *Carry out analysis and audit reports preparation to management and external parties, SPI budget management, reporting the realization of the Integrated Annual Supervision Work Program (PKPT) and evaluation, Work Plans Budgeting according to the authority of their field of duty;*
6. *Carry out studies and development of the SPI organization, human resource development, management of SPI education as well as HR administration, logistics and secretariat of SPI;*
7. *Coordinating and cooperating in SPI as well as other fields as well as other units, institutions or other supervisory agencies/institutions, in order to facilitate the achievement of the targets set, improve the performance of SPI and the Company according to their authority;*
8. *Ensuring that the Company's internal control system runs efficiently and effectively;*
9. *Carry out operational supervision and investigative audit functions;*
10. *Provide consultation or improvement suggestions needed by management;*





11. Menindaklanjuti WBS dengan melakukan audit terhadap laporan pengaduan WBS untuk menciptakan iklim kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial dan citra Perusahaan.

• PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERN

Dalam melaksanakan pengendalian intern, SPI telah dilengkapi Pedoman Kerja yang Piagam Pengawasan Intern Terintegrasi/*Integrated Audit Charter* yang ditetapkan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama pada Tanggal 06 Oktober 2020. Selain sebagai pedoman kerja, Piagam Pengawasan Intern Terintegrasi/*Integrated Audit Charter* juga berperan dalam penguatan peran dan tanggung jawab serta dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan bagi SPI. Oleh karena itu Piagam Pengawasan Intern Terintegrasi/*Integrated Audit Charter* disebarluaskan agar diketahui oleh seluruh karyawan dan pihak lain yang terkait sehingga terjalin saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan PLN Enjiniring.

Isi dari *Internal Audit Charter* adalah

1. Visi; ***To be trusted partner*** yang diandalkan oleh stakeholder internal audit.
2. Misi;
 - a. Membantu Direktur Utama dalam meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan Perusahaan untuk secara terus menerus mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen yang efektif;
 - b. Menumbuhkan persamaan persepsi dalam proses pengawasan internal antara SPI (auditor dan konsultan internal) dan unit operasional untuk mendorong terwujudnya Good Corporate Government (GCG);
 - c. Mengembangkan kompetensi auditor dan konsultan internal dalam melaksanakan audit dan layanan konsultasi sesuai dengan The IIA's International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (Standards); dan

11. *Following up on WBS by conducting an audit on WBS complaint reports to create a conducive climate and encourage reporting on matters that can cause financial and non-financial losses and the image of the Company.*

• INTERNAL SUPERVISION UNIT CHARTER

In implementing internal control, The SPI has been equipped with Integrated Audit Charter Work Guidelines established by the President Commissioner and President Director on October 6th, 2020. Apart from being a work guideline, the Integrated Audit Charter also plays a role in strengthening the roles and responsibilities as well as the basis for the existence and implementation of supervisory duties for SPI. Therefore, the Integrated Audit Charter is disseminated so that it is known by all employees and other related parties so that mutual understanding and good cooperation can be established in realizing the Vision, Mission, and Objectives of PLN Engineering.

The contents of the Internal Audit Charter are :

1. *Visi; To be a trusted partner that can be relied on by internal audit stakeholders.*
2. *Mission;*
 - a. *Assist the President Director in improving the understanding and commitment of the Company's leadership to continuously develop and implement an effective management control system;*
 - b. *Fostering a united perception in the internal control process between SPI (internal auditors and consultants) and operational units to encourage the realization of Good Corporate Government (GCG);*
 - c. *Developing internal auditors and consultants competencies in conducting audits and consulting services in accordance with The IIA's International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (Standards); and*

- | | |
|---|--|
| <p>d. Meningkatkan efektivitas informasi hasil pengawasan SPI untuk mencegah, mendeteksi, dan mengungkapkan praktek kecurangan (fraud) di Lingkungan Perseroan.</p> <p>3. Tugas dan Tanggung Jawab serta Lingkup Pekerjaan ;</p> <p>a. Menyusun dan menyempurnakan strategi SPI sesuai dengan visi dan misi;</p> <p>b. Menyusun dan menyempurnakan Piagam Pengawasan Intern Terintegrasi/Integrated Audit Charter dan Pedoman RBIA;</p> <p>c. Menyusun dan menyempurnakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Terintegrasi;</p> <p>d. Melaksanakan evaluasi kualitas audit dan jasa konsultasi oleh jajaran SPI maupun pihak independen alas seluruh proses audit;</p> <p>e. Melaksanakan analisis dan penyusunan laporan hasil audit bagi manajemen dan pihak eksternal, pengelolaan anggaran SPI, evaluasi dan pelaporan realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Terintegrasi, Rencana Kerja Anggaran sesuai kewenangan bidang tugasnya;</p> <p>f. Melaksanakan kajian dan pengembangan organisasi SPI, pengembangan SDM, pengelolaan pendidikan SPI serta administrasi SDM, logistik dan kesekretariatan SPI;</p> <p>g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di SPI maupun bidang dan unit lainnya, lembaga atau instansi/lembaga pengawasan lainnya, guna memperlancar pencapaian target yang ditetapkan, peningkatan kinerja SPI dan Perusahaan sesuai kewenangannya;</p> <p>h. Memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan berjalan efisien dan efektif;</p> <p>i. Melaksanakan fungsi pengawasan operasional dan audit investigasi;</p> <p>j. Memberikan konsultasi atau saran perbaikan yang diperlukan manajemen; dan</p> <p>k. Menindaklanjuti WBS dengan melakukan audit terhadap laporan pengaduan WBS untuk menciptakan iklim kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial dan citra Perusahaan.</p> | <p>d. <i>Improving information resulting from SPI supervision effectivity to prevent, detect, and disclose fraudulent practices within the Company.</i></p> <p>3. <i>Duties and Responsibilities as well as Scope of Work;</i></p> <p>a. <i>Develop and refine the SPI strategy in suitable with the vision and mission;</i></p> <p>b. <i>Develop and improve the Integrated Internal Audit Charter and RBIA Guidelines;</i></p> <p>c. <i>Develop and improve the Integrated Annual Supervision Work Program (PKPT);</i></p> <p>d. <i>Carrying out audit quality evaluations and consulting services by the SPI staff and independent parties for the entire audit process;</i></p> <p>e. <i>Carry out audit reports analysis and preparation for management and external parties, SPI budgeting management, evaluate the realization of the Integrated Annual Supervision Work Program (PKPT) as well as reporting it, Budget Work Plans according to the authority of their field of duty;</i></p> <p>f. <i>Carry out SPI organization studies and development, human resource development, SPI management education as well as HR administration, logistics and secretariat of the SPI;</i></p> <p>g. <i>Coordinating and cooperte in SPI as well as other fields and units, institutions or other supervisory agencies/institutions, in order to facilitate the achievement of the targets set, improve the performance of SPI and the Company according to their authority;</i></p> <p>h. <i>Ensuring that the Company's internal control system runs efficiently and effectively;</i></p> <p>i. <i>Carry out operational supervision and investigative audit functions;</i></p> <p>j. <i>Providing consultation or improvement suggestions needed by management; and</i></p> <p>k. <i>Following up on WBS by conducting an audit of WBS complaint reports to create a conducive climate and encourage reporting on matters that can cause financial and non-financial losses and the image of the Company.</i></p> |
|---|--|





4. Kewenangan;

- a. Dapat mengakses dan melakukan forensik seluruh data dan informasi yang relevan dengan tupoksi unit kerja dan pegawai yang tersimpan dalam peralatan kerja, antara lain yang tidak terbatas pada handphone, personel computer (PC) dan laptopnya, juga melakukan pengeledahan (searching), analisis rekening koran bank dan pelaksanaan polygraph sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Memiliki continuous access terhadap data di database perusahaan untuk keperluan continuous auditing;
- c. Dapat melakukan komunikasi, rapat secara berkala dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan atau Komite Audit;
- d. Dapat melakukan koordinasi dengan auditor eksternal (BPK, BPKP, KAP, SPI PT PLN (Persero) dll);
- e. Memberikan rekomendasi yang terkait penegakan disiplin pegawai sebagai dasar yang cukup bagi tindaklanjut proses disiplin pegawai oleh pihak – pihak terkait; dan
- f. KSPI dapat menentukan rencana, metodologi, organisasi dan SDM SPI, serta melakukan pengawasan terhadap Audit Internal Perusahaan Anak

5. Sasaran;

Melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan semua pengendalian internal telah dilaksanakan dengan efektif dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengendalian internal di setiap aktivitas agar lebih ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif).

6. Hubungan Kemitraan dengan Komite Audit;

- a. Komunikasi Periodik, yaitu SPI melakukan komunikasi kepada Komite Audit untuk mendapatkan masukan mengenai Perencanaan Audit Tahunan; dan
- b. Komunikasi Non Periodik, yaitu komunikasi yang dilakukan atas inisiasi dari SPI maupun atas permintaan Komite Audit.

4. Authority;

- a. Able to access and perform on all data and information forensics relevant to the main tasks of work units and employees stored in work equipment, including but not limited to cellphones, computer personnel (PCs) and laptops, as well as conducting searches, analyzing bank statements and implementation of polygraphs in accordance with applicable regulations;
- b. Have continuous access to data in the company database for continuous auditing purposes;
- c. Able to communicate, meet regularly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and or the Audit Committee;
- d. Can coordinate with external auditors (BPK, BPKP, KAP, SPI PT PLN (Persero) etc.);
- e. Provide recommendations related to the employee discipline enforcement as a sufficient basis for the employee discipline process follow-up by related parties; and
- f. KSPI can determine the plan, methodology, organization and HR of SPI, as well as supervise the Internal Audit of Subsidiaries.

5. Target;

Carry out inspections to ensure that all internal controls have been implemented effectively and provide recommendations for internal control improvements in each activity to make it more economical, efficient and effective in accordance with applicable regulations with Good Corporate Governance (GCG) and 3E (Economic, Efficient and Effective) as the principles .

6. Partnership with the Audit Committee;

- a. Periodic Communication, including SPI communicates to the Audit Committee to get Annual Audit Planning input; and
- b. Non-Periodic Communication, which is communication initiated by SPI or at the request of the Audit Committee.

7. Hubungan dengan Auditor Eksternal;
- a. Komunikasi Periodik yaitu komunikasi dengan Auditor BPK, BPKP, KAP, SPI PT PLN (Persero) dan lainnya; dan
 - b. Komunikasi Non Periodik atas persetujuan Direktur Utama dapat melakukan komunikasi bersifat insidental dengan pihak eksternal terkait hasil pengawasan yang menjadi lingkup tugas SPI.
8. Kode Etik
- a. Auditor Internal.
Auditor Internal harus memiliki kode etik dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku yaitu:
 - 1) Integritas
 - a) Melakukan pekerjaan audit internal dengan jujur, produktif, profesional dan tanggung jawab;
 - b) Mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan internal PLNE yang berlaku; Tidak ikut serta dalam kegiatan yang tidak legal atau melakukan kegiatan yang dilarang oleh profesi Auditor;
 - c) Menghormati dan berkontribusi pada tujuan hukum dan etika yang ditetapkan PLNE.
 - 2) Objektivitas
 - a) Tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat mempengaruhi penilaian Auditor;
 - b) Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya; dan
 - c) Mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya dalam melaksanakan tugasnya dan jika tidak dilaporkan dapat merugikan PLNE.
 - 3) Kerahasiaan
 - a) Bijaksana dalam menggunakan dan melindungi informasi yang didapat dalam melakukan pekerjaan; dan Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya; dan

7. Relationship with External Auditor;
- a. Periodic Communication, including communication with BPK, BPKP, KAP, SPI PT PLN (Persero) Auditor and others; and
 - b. Non-Periodic Communication with the President Director approval can be carry out incidental communication with external parties related to the results of supervision within the scope of SPI's duties.
8. Code of Conducts
- a. Internal Auditor.
Internal Auditors must have a code of conduct in carrying out their duties that suitable with their profession and applicable standards, namely:
 - 1) Integrity
 - a) Perform internal audit honestly, productively, professionally and responsibly;
 - b) Complied with applicable laws and regulations as well as PLNE internal regulations; Not participating in illegal activities or carrying out activities prohibited by the Auditor profession;
 - c) Respect and contribute to the legal and ethical objectives set by PLNE.
 - 2) Objectives
 - a) Do not participate in activities that may affect the Auditor's assessment;
 - b) Not accept anything in any form that can affect his professional judgment; and
 - c) Disclosing all important facts that he/ she knows in carrying out his duties and if not reported it can be harmful to PLNE.
 - 3) Confidentiality
 - a) Using and protecting information obtained in carrying out their duties wisely; and not accept anything in any form that can affect his professional judgment; and





- b) Tidak menggunakan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan sendiri dengan cara yang tidak legal atau tidak berjalan dengan tujuan hukum dan etika di PLNE.
- 3) Kompetensi
- a) Melakukan audit pada objek yang sesuai keterampilan, pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam melaksanakan audit;
- b) Melaksanakan audit sesuai dengan Piagam dan Pedoman Audit Internal PLNE yang sejalan dengan Standar Profesi Auditor Internal; dan
- c) Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan untuk tujuan peningkatan kualitas dan efisiensi kerja.
- b. Kode Etik Investigator
- Selain memiliki kode etik integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi, Investigator harus memiliki etika kerja dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku yaitu:
- 1) Investigator selalu menunjukkan komitmen profesionalisme dan kehati-hatian dalam melaksanakan investigasi;
 - 2) Investigator tidak terlibat dalam tindakan ilegal atau melanggar kode etik atau segala aktivitas yang menimbulkan *conflict of interest*;
 - 3) Investigator selalu menunjukkan integritas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan investigasi dan hanya akan menerima penugasan investigasi apabila terdapat keyakinan yang memadai bahwa penugasan tersebut dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional;
 - 4) Investigator patuh pada perintah pengadilan/pihak yang berwajib dan memberikan kesaksian yang jujur tanpa bias atau prasangka (*prejudice*);
- b) *Not using the information obtained in carrying out their duties for their own interests in a way that is illegal or does not align with legal and ethical purposes at PLNE.*
- 3) *Competency*
- a) *Conduct audits on objects that match the skills, knowledge, expertise and experience possessed in carrying out audits;*
- b) *Carry out audits in accordance with the PLNE Internal Audit Charter and Guidelines which are in line with the Internal Auditor Professional Standards; and*
- c) *Improving competencies through sustainable professional education for the purpose of improving work quality and efficiency.*
- b. *Investigator Code of Conduct*
- In addition to hold code of conduct integrity, objectivity, confidentiality and competency, Investigators must have work ethics in carrying out their duties in accordance with their profession and applicable standards, namely:*
- 1) *Investigators always demonstrate a commitment to professionalism and circumspection in carrying out the investigations;*
 - 2) *The investigator is not involved in illegal acts or violates the code of conducts or any activity that creates a conflict of interest;*
 - 3) *Investigators always show high integrity in every investigation and will only accept investigative assignments if there is sufficient assurance that the assignment can be completed with professional competence;*
 - 4) *Investigators comply with court orders/ authorized parties and provide honest testimony without bias or prejudice;*

- 5) Investigator mendapatkan bukti atau dokumentasi lain selama pelaksanaan investigasi sebagai dasar memadai untuk pemberian pendapat, namun tidak menyatakan pendapat apakah orang/badan tertentu bersalah atau tidak bersalah;
- 6) Investigator tidak membuka informasi yang didapatkan selama penugasan investigasi tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berwenang;
- 7) Investigator melaporkan hal-hal relevan yang ditemukan selama penugasan, yang apabila dihilangkan dapat menyebabkan distorsi fakta; dan
- 8) Investigator selalu meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan dan efektivitas aktivitas investigasi yang dilakukan/dipimpinnya.

• KEBIJAKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN

Dalam melaksanakan pengawasan intern, Perusahaan memiliki berbagai kebijakan yang mendasari dan mengatur penerapan sistem pengendalian intern di perusahaan. Perusahaan memiliki Pedoman Pengawasan Intern berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring Nomor: 13.001.K/DIR/II/2018 tanggal 13 Februari 2018. Perusahaan juga telah memiliki Standar Prosedur Audit yang diperbaharui dan dimutakhirkan secara berkala.

Adapun Standar Prosedur Audit (SPA) yang sudah berlaku adalah:

1. SPA – 01 tentang Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
2. SPA – 02 tentang Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan Audit
3. SPA – 03 tentang Penentuan Sampel
4. SPA – 04 tentang Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Audit
5. SPA – 06 tentang Pelaksanaan Audit Khusus

- 5) *The investigator obtains evidence or other documentation during the course of the investigation as a sufficient basis in giving an opinion, but does not express an opinion whether a particular person/entity is guilty or innocent;*
- 6) *The investigator does not disclose the information obtained during the investigation assignment without the approval of the authorized party;*
- 7) *Investigators report relevant matters found during the assignment, which if omitted can cause distortion of facts; and*
- 8) *Investigators always improve their competencies on an ongoing basis and the effectiveness of the investigation activities they carry out/lead.*

• INTERNAL CONTROL UNIT POLICY

In carrying out internal control, the Company has various policies that underlie and regulate the implementation of the internal control system within the company. The Company has Internal Control Guidelines based on PT PLN Enjiniring the Board of Directors Decree Number: 13.001.K/DIR/II/2018 dated February 13, 2018. The Company also has a Standard Audit Procedure which is updated and updated regularly.

The Standard Audit Procedures (SPA) that have been applied are:

1. *SPA – 01 concerning in the Preparation of the Annual Supervision Work Program (PKPT)*
2. *SPA – 02 tentang Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan Audit*
3. *SPA – 03 on Sampling*
4. *Audit Results*
5. *SPA – 06 on the Implementation of Special Audits*





• PELAKSANAAN TUGAS SATUAN PENGAWASAN INTERN

Untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Manajemen dan keyakinan tentang pencapaian tujuan Perusahaan untuk meminimalkan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan PLN Enjiniring, maka Satuan Pengawasan pada tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut.

1. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
2. Audit Operasional
3. Asesmen *Maturity Level* Manajemen Risiko
4. Asesmen GCG
5. Pemutakhiran Piagam Pengawasan Intern Terintegrasi/*Integrated Audit Charter*
6. Penyusunan dan Pemutakhiran Standar Prosedur Audit (SPA)
7. Dan lainnya

• PELAKSANAAN AUDIT OPERASIONAL 2020

Selama tahun 2020, evaluasi system pengendalian intern dilakukan melalui pelaksanaan audit operasional. Audit dilaksanakan di 10 Bidang dengan detail sebagai berikut :

• IMPLEMENTATION OF THE INTERNAL SUPERVISION UNIT TASKS

In order to improve the Management Control System and assurance on achieving Company's goals to minimize risks that may hinder the objectives achievement towards activities within PLN Engineering, therefor the 2020 Supervisory Unit has carried out the following activities.

1. *Preparation of the Annual Supervision Work Program (PKPT)*
2. *Operational Audit*
3. *Risk Management Maturity Level Assessment*
4. *GCG Assessment*
5. *Integrated Audit Charter Update*
6. *Standard Audit Procedures (SPA) Preparation and Update*
7. *And more*

• 2020 OPERATIONAL AUDIT IMPLEMENTATION

During 2020, the internal control system evaluation was carried out through the operational audit. The audit was carried out in 10 fields with the following details:

TABEL PELAKSANAAN AUDIT OPERASIONAL 2020
OPERATIONAL AUDIT IMPLEMENTATION TABLE

No	Jenis Audit Auditee	Periode Pelaksanaan Period	Ruang Lingkup Audit Audited
1	PT Prima Power Nusantara (PT PPN)	Jan-20	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan
2	Sekretaris Perusahaan	Feb-20	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan
3	Satuan Pengadaan, Mutu dan Risiko	Jun-20	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan
4	Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usahaan,		
	- Bidang Perencanaan Korporat	Jul-20	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan
	- Bidang Pemasaran	Mar-20	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan
	- Bidang Pengusahaan	Dec-20	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan

Direktorat Enjiniring				
5	- Bidang Pembangkit	Sep-20	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan	
	- Bidang Transmisi dan Distribusi	Oct-20	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan	
	- Bidang Konstruksi	Oct-20	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan	
Direktorat Keuangan dan SDM				
6	- Bidang AKT dan KEU	Nov-20	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan	
	- SDM dan Umum	Nov-20	Audit Risk Base dan Audit Kepatuhan	

Pelaksanaan audit tersebut telah disampaikan oleh SPI kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan masukan dan saran.

The audit has been submitted by SPI to the President Director and the Board of Commissioners for input and suggestions.

• TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Berdasarkan audit yang telah dilaksanakan, diperoleh sejumlah temuan dan tindak lanjut sebagai berikut.

• FINDINGS AND FOLLOW-UP ON AUDIT RESULTS

Based on the audits that have been carried out, a number of findings and follow-ups were obtained as follows.

TABEL TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT
FINDINGS AND FOLLOW UP ON AUDIT RESULTS TABLE

No.	Audit <i>Auditee</i>	Jumlah Temuan <i>Number of Findings</i>	Temuan Selesai <i>Finding Completed</i>	Keterangan <i>Description</i>
1	PT PPN	3	3	Selesai
2	Sekper	4	4	Selesai
3	Satuan Pengadaan, Mutu dan Risiko	4	4	Selesai
4	Direktorat Pemasaran dan Pengembangan Usaha,			
	- Bidang Perencanaan Korporat	3	3	Selesai
	- Bidang Pemasaran	3	3	Selesai
	- Bidang Pengusahaan	3	2	Belum selesai
5	Direktorat Enjiniring			
	- Bidang Pembangkit	4	4	Selesai
	- Bidang Transmisi dan Distribusi	2	2	Selesai
	- Bidang Konstruksi	2	2	Selesai
6	Direktorat Keuangan dan SDM			
	- Bidang Anggaran dan Keuangan	1	1	Selesai
	- Bidang SDM dan Umum	3	2	Belum selesai



- **PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWASAN INTERN**

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, SPI telah mengikuti program pengembangan kompetensi, berupa pendidikan dan pelatihan. Pengembangan kompetensi yang diikuti SPI selama 2020 sebagai berikut.

- **INTERNAL SUPERVISION UNIT COMPETENCY DEVELOPMENT**

To support the implementation of its duties, SPI has participated in competency development programs, in education and training form. The competency development that SPI participated during 2020 is as follows.

TABEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWASAN INTERN
INTERNAL BOARD OF SUPERVISION COMPETITION DEVELOPMENT TABLE

No.	Nama Name	Pengembangan Kompetensi Competition Development	
1	Izhar Syafril	Tidak ada	Tidak ada
2	Agus Hari P.S	Tidak ada	Tidak ada
3	Ardhan Fajar Alam	Tidak ada	Tidak ada
4	Budi Kristianto	Tidak ada	Tidak ada
5	Risa Yulia Putri	Tidak ada	Tidak ada

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

ORGANS AND COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibantu oleh Organ Perusahaan. Perusahaan tidak memiliki Komite yang berada di bawah Direksi.

In carrying out their duties, the Board of Directors is assisted by Company Organs. The Company does not have a Committee under the Board of Directors.

SATUAN PENGADAAN, MANAJEMEN MUTU DAN RISIKO

Kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko mengacu kepada SNI 8651:2018 Manajemen Risiko-Pedoman yang diadopsi dari standard ISO 31000:2018 *Risk Management* sebagai upaya untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan. Perseroan menetapkan Pedoman Manajemen Risiko dalam kerangka pengelolaan risiko yang menyeluruh dalam Enterprise Risk Management (ERM), guna meminimalkan potensi kerugian yang mengakibatkan kerugian dan mengoptimalkan profitabilitas, mendorong praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan menciptakan nilai tambah bagi Perseroan serta budaya risiko yang terinternalisasi sebagai bagian dari Budaya Perusahaan.

Fungsi pengelolaan Manajemen Risiko bertugas untuk memastikan terlaksananya Manajemen Risiko berdasarkan kaidah sehingga dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan. Pengelolaan Manajemen Risiko berada di bawah koordinasi Kepala Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko (KSPMR) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kepala Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

PROCUREMENT UNIT, QUALITY AND RISK MANAGEMENT

Strategies and Policies for implementing Risk Management refer to SNI 8651:2018 Risk Management - a guidelines which adopted from the ISO 31000:2018 standard in Risk Management as an effort ensuring the sustainability of the implementation of risk management in the Company. The Company stipulates Risk Management Guidelines in a risk management framework in thoroughly in Enterprise Risk Management (ERM), in order to minimize potential losses and optimizing profitability, promoting Good Corporate Governance practices, increasing stakeholder trust, creating added value for the Company and and internalized risk culture as part of the Corporate Culture.

The function of Risk Management is ensuring its implementation is on rules so that it can be used as a reference in decision making. Risk Management is manage under the coordination of the Head of Procurement Unit, Quality and Risk Management (KSPMR) which reports directly to the President Director. The Head of the Procurement, Quality and Risk Management Unit is appointed and dismissed by the President Director.



Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance



- **PROFIL KEPALA SATUAN PENGADAAN, MANAJEMEN MUTU DAN RISIKO**

- **Runggun Fredo Amarta**

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko sejak April 2020, sebelumnya menjabat sebagai Manajer Unit Pelaksana Produksi & Workshop III pada PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan (2016 – 2020). Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Mesin dari Universitas Indonesia dan S2 Administrasi Bisnis dari Universitas Tenaga Nasional, Malaysia.

- **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN PENGADAAN, MANAJEMEN MUTU DAN RISIKO**

Kepala Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko (KSPMR) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring No. 14.001.K/DIR/PLNE/XI/2017 berperan untuk memastikan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, pengelolaan Sistem Manajemen Terintegrasi dan pengendalian Manajemen Risiko dapat memberikan nilai tambah untuk menjaga keberlangsungan bisnis Perseroan. Tugas dan tanggung jawab KSPMR meliputi:

1. Menyusun dan memastikan *assessment and corporate risk monitoring* atas seluruh kegiatan strategis perusahaan;
2. Menyusun dan memfasilitasi implementasi kebijakan manajemen risiko pada berbagai kegiatan strategis unit bisnis dan anak perusahaan;
3. Memonitor dan melaksanakan *compliance and reporting* semua kegiatan terkait dengan pengelolaan risiko perusahaan;
4. Memastikan tersedianya *enterprise risk infrastructure*;
5. Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu, Sasaran dan tolok ukur mutu;
6. Pengendalian proses pemeriksaan mutu produk enjiniring;
7. Perencanaan dan pelaksanaan audit mutu internal maupun eksternal;
8. Pengelolaan sistem manajemen mutu ISO 9001, SMK3, OHSAS dan sistem lainnya;

- **THE HEAD OF PROCUREMENT UNIT, QUALITY AND RISK MANAGEMENT PROFILES**

- **Runggun Fredo Amarta**

Indonesian citizens. Served as Head of Procurement Unit, Quality and Risk Management since April 2020, Previously served as Production & Workshop III Implementation Unit Manager at PT PLN (Persero) Electricity Maintenance Center (2016 – 2020). Obtained his Bachelor degree in Mechanical Engineering from University of Indonesia and Master of Business Administration from Universiti Tenaga Nasional, Malaysia.

- **THE PROCUREMENT UNIT, QUALITY AND RISK MANAGEMENT DUTIES AND RESPONSIBILITIES**

Head of Procurement, Quality and Risk Management Unit (KSPMR) based on the Decree of the Board of Directors PT PLN Enjiniring No. 14.001.K/DIR/PLNE/XI/2017 plays a role in ensuring that the Procurement of Goods and Services is carried out in accordance with the principles of GCG, Integrated Management System management and Risk Management control provide added value in maintaining Company's business continuity. KSPMR duties and responsibilities includes:

1. Set and ensuring the *assessment and corporate risk monitoring* of all strategic activities of the company;
2. Develop and facilitate the implementation of risk management policies in various business units and subsidiaries strategic activities;
3. Implementing and monitoring all activities related to the company's risk management are compliance and being reported;
4. Ensuring the availability of *enterprise risk infrastructure*;
5. Managing Quality Management System, Quality Goals and benchmarks;
6. Controlling the engineering product quality inspection process;
7. Planning and implementing the internal and external quality audits;
8. Managing ISO 9001: quality management system, Occupational health and safety management system (SMK3), OHSAS and other systems;



9. Memperluas ruang lingkup ISO 9001;
10. Pengelolaan pengembangan kompetensi manajemen mutu;
11. Pengelolaan dokumen dan data bidang manajemen mutu;
12. Memastikan terpenuhinya kepuasan pelanggan;
13. Membuat laporan aktivitas secara periodik termasuk pencapaian kinerja;
14. Memantau dan mengevaluasi proses dan prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta memberi masukan dalam rangka pengendalian mutu dan risiko pengadaan.
15. Berfungsi sebagai Pejabat yang diberi Kuasa untuk proses Pengadaan Barang/Jasa yang tugasnya sesuai Keputusan Direksi PT PLN Enjiniring tentang Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku di Perusahaan;
16. Memberikan persetujuan atau ketidaksetujuan tentang penilaian kinerja individu bulanan, semesteran dan tahunan kepada karyawan yang berada di lingkup Bidang Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko.
17. Mengevaluasi pelaksanaan peremajaan data dan informasi serta supervisi kegiatan berbasis aplikasi di Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko, antara lain *Virtual Cubicle*, *Document Management (DM)*, *Aplikasi Manajemen Surat (AMS)*, *Risk Control (RICO)*, *Human Resources Information System (HRIS) Sunfish*, dan aplikasi enjiniring lainnya yang terkait dengan Satuan Pengadaan, Manajemen Mutu dan Risiko.
18. Mengajukan permohonan Pengadaan/rekrutmen sumber daya manusia dengan menginformasikan kebutuhan jumlah, uraian pekerjaan dan kualifikasi kompetensi kepada sub-Bidang SDM.

- **PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN PENGADAAN MANAJEMEN MUTU DAN RISIKO**

Dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Tim SPMR dalam melaksanakan tugasnya, setiap awal tahun 2020 diusulkan untuk mengikuti program pengembangan kompetensi, berupa Pendidikan dan pelatihan, antara lain sebagai berikut:

9. *Expanding ISO 9001 scope;*
10. *Managing the development competency of quality management;*
11. *Documents and data management in quality management field;*
12. *Ensuring customer satisfaction is met;*
13. *Making periodic activity reports including performance achievements;*
14. *Evaluate and monitoring the processes and procedures on procurement of goods and services as well as provide input in the context of quality control and procurement risk.*
15. *Serves as an Official who is authorized to process the Procurement of Goods/Services whose duties are in accordance with PT PLN Enjiniring Decree of the Board of Directors concerning the Procurement of Goods/Services applicable in the Company;*
16. *Give approval or disapproval of monthly, semi-annual and annual individual performance appraisals to employees within the scope of the Procurement, Quality and Risk Management Unit.*
17. *Evaluating information and data update as well as supervising application-based activities in the Procurement Unit, Risk and Quality Management, including Virtual Cubicle, Document Management (DM), Mail Management Application (AMS), Risk Control (RICO), Human Resources Information System (HRIS) Sunfish, and other engineering application which related to the Unit of Procurement, Quality and Risk Management.*
18. *Submit a request for human resources procurement/recruitment by informing the need for number, job description and competency qualifications to the HR sub-sector.*

- **QUALITY AND RISK MANAGEMENT PROCUREMENT UNITS COMPETENCY DEVELOPMENT**

In improving and developing the competence of the SPMR Team in carrying out their duties, every early 2020 it is proposed to take part in the competency development program, in Education and training, among others form as follows:



TABEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN MANAJEMEN MUTU DAN RISIKO
TABLE OF COMPETENCY DEVELOPMENT FOR QUALITY AND RISK MANAGEMENT UNITS

Nama <i>Name</i>	Pengembangan Kompetensi <i>Competency Development</i>
Runggun Fredo Amarta	Sertifikasi Qualified Risk Management Professional (QRMP) Executive Education II Batch 5 Awareness ISO 27001:2013 Anti-Bribery Management System Based on ISO 37001:2016
Katherine Amaranila	Sertifikasi Qualified Risk Management Professional (QRMP) Executive Education III Batch 4 Anti-Bribery Management System Based on ISO 37001:2016 Internal Auditor ISO 27001:2013 (SMKI) Internal Auditor ISO 37001:2016 (SMAP)
Indratno Hariyanto	Executive Education III Batch 4 Penyusunan Kontrak Berbasis FIDIC
Achiarli Khalilul Rahman	Anti-Bribery Management System Based on ISO 37001:2016 Negotiation Skills Communication
Wizasko Ardiansyah	Pengadaan Barang/Jasa APLN Analisa Harga Perkiraan Enjinir (HPE) Proyek Pembangkit dan Transmisi
Ahmad Ihsani	Pengadaan Barang/Jasa APLN Negotiation Skills Communication
M. Agung Saputra	Anti-Bribery Management System Based on ISO 37001:2016 Penyusunan Kontrak Berbasis FIDIC Pengadaan Barang/Jasa APLN
Citra Resmi	Anti-Bribery Management System Based on ISO 37001:2016 Internal Auditor ISO 37001:2016 (SMAP)
Yushan	Awareness ISO 27001:2013 (SMKI) Sertifikasi Qualified Risk Management Professional (QRMP)
Nurroh Habibah	Sertifikasi Qualified Risk Management Analyst (QRMA) Internal Auditor ISO 37001:2016 (SMAP) Awareness ISO 37001:2016 SMAP Awareness ISO 9001:2015 dan Audit Internal ISO 19011:2018
Muhammad Fadel Litanto	Sertifikasi Qualified Risk Management Analyst (QRMA) Awareness ISO 9001:2015 dan Audit Internal ISO 19011:2018 Sertifikasi Lead Implementer ISO 27001:2013 Pelatihan Bedah Polis Comprehensive Machinery Insurance (CMI) & Polis Liability: Pengelolaan Risiko dan Ikhtisar Polis

- **ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

Dalam rangka penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Perseroan melaksanakan pengelolaan dan pengendalian risiko untuk memastikan tercapainya sasaran perusahaan dengan mengendalikan risiko tertentu yang secara spesifik dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha Perseroan. Agar penerapan Manajemen Risiko berjalan dengan efektif, Perseroan membentuk unit kerja Satuan Mutu dan Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan proses pengelolaan dan pengendalian risiko yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Manajemen (*Risk Owner*) di Perseroan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Penerapan Manajemen Risiko, melibatkan seluruh organ perusahaan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Jajaran Manajemen Perusahaan, Pemilik Risiko, Audit Internal, fungsi Manajemen Risiko dan sub-Bidang Manajemen Risiko.

Adapun wewenang dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris
 - a. Meminta pertanggungjawaban dari Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala baik secara langsung ataupun melalui Komite Manajemen Risiko Dewan Komisaris;
 - b. Melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi atas penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi serta menilai kriteria risiko yang dapat diambil oleh perusahaan;
 - c. Menyetujui kebijakan manajemen risiko yang diusulkan oleh Direksi;
 - d. Memastikan penerapan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi.

- **RISK MANAGEMENT ORGANIZATION, AUTHORITY AND RESPONSIBILITY**

In order of implementing Good Corporate Governance practices, The Company carries out risk management and control to achieving company goals by controlling certain risks that can specifically affect the sustainability of the Company's business. In order for the Risk Management implementation to run effectively, The Company established a Quality and Risk Management Unit which is responsible to coordinate the risk management and control process carried out by all levels of Management (Risk Owner) in the Company.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Risk Management Implementation, involving all the company organs starting from the Board of Commissioners, Directors, Company Management, Risk Owner, Internal Audit, Risk Management function and Risk Management sub-Sector.

The respective authorities and responsibilities are as follows:

1. *The Board of Commissioners*
 - a. *Requesting accountability from the Board of Directors for the risk management policies implementation on a regular basis either directly or through the Risk Management Committee of the Board of Commissioners;*
 - b. *Assessing and providing recommendations on risk management implementation carried out by the Board of Directors and assessing the risk criteria that can be taken by the company;*
 - c. *Approved the risk management policy proposed by the Board of Directors;*
 - d. *Ensuring risk management policies implemented by the Board of Directors.*





2. Direksi

- a. Menetapkan kebijakan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Perusahaan, termasuk di dalamnya adalah penetapan matriks risiko di lingkungan Perusahaan beserta *risk appetite*-nya;
- b. Menetapkan, mengelola dan memantau risiko-risiko utama (*key risks*) yang dihadapi Perusahaan dalam pencapaian sasaran strategis Perusahaan;
- c. Menciptakan lingkungan internal Perusahaan yang kondusif untuk penerapan dan peningkatan risk maturity secara berkelanjutan, dan untuk menanamkan budaya manajemen risiko Perusahaan;
- d. Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan manajemen risiko.

3. Satuan Manajemen Mutu dan Risiko

- a. Menyusun dan mereview kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko (termasuk didalamnya *maturity framework*), serta memastikan penerapannya di Perusahaan;
- b. Memastikan tersedianya enterprise *risk infrastucture* dan data Manajemen Risiko pada aktivitas strategis Perusahaan;
- c. Memberikan *early warning* kepada Direksi melalui asesmen Profil Risiko Korporat maupun mekanisme lainnya;
- d. Memastikan keselarasan penerapan Manajemen Risiko secara keseluruhan dengan kebijakan, strategi perusahaan maupun peraturan yang berlaku;
- e. Memantau risiko-risiko utama (*key risks*) Perusahaan dan efektifitas pengelolaannya oleh pemilik risiko;
- f. Memantau risk maturity Perusahaan dan memfasilitasi perbaikan-perbaikannya menuju tujuan sesuai road map manajemen risiko;
- g. Berperan sebagai risk management advisor bagi pemilik risiko dalam impelentasi Manajemen Risiko Perusahaan;
- h. Memfasilitasi pembangunan kompetensi (*capacity building*) Manajemen Risiko di Perusahaan.

2. Directors

- a. *Determined the policies for Risk Management implementation within the Company, including the determination of risk matrix within the Company and its risk appetite;*
- b. *Determine, manage and monitor the key risks faced by the Company in achieving the Company's strategic objectives;*
- c. *To create a conducive company internal environment for the implementation and improvement of sustainable risk maturity manner, and to instil a corporate risk management culture;*
- d. *Provide the necessary resources in the implementation of risk management.*

3. Quality and Risk Management Unit

- a. *Develop and review Risk Management policies and guidelines (including the maturity framework), and ensure their implementation in the Company;*
- b. *Ensure the availability of enterprise risk infrastucture and Risk Management data on the Company's strategic activities;*
- c. *Provide an early warning to the Board of Directors through the assessment of the Corporate Risk Profile or other mechanisms;*
- d. *Ensuring the overall alignment of Risk Management implementation with the company's policies, strategies and applicable regulations;*
- e. *Monitor the Company's key risks and the effectiveness of their management by risk owners;*
- f. *Monitor the Company's risk maturity and facilitate its improvements towards the objectives according to the risk management road map;*
- g. *Act as a risk management advisor for risk owners in the implementation of the Company's Risk Management;*
- h. *Facilitating the development of Risk Management (capacity building) in the Company.*

- | | |
|--|---|
| <p>4. Satuan Pengawas Intern (SPI) Perusahaan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berperan sebagai fungsi assurance provider yang independen terkait pelaksanaan manajemen risiko oleh pemilik risiko; b. Merencanakan dan melaksanakan audit berbasis risiko (RBA) untuk memastikan fokus pada risiko utama Perusahaan; c. Memberikan penilaian terhadap efektifitas penanganan risiko utama Perusahaan oleh pemilik risiko dan memberikan rekomendasi perbaikannya; d. Melakukan evaluasi penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Perusahaan secara berkala; e. Melakukan <i>assessment risk maturity</i> Bidang/ Anak Perusahaan bila diperlukan. <p>5. Sekretaris Perusahaan/Kepala Satuan/Manajer Senior/Pejabat satu tingkat di bawah Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab terhadap penerapan Manajemen Risiko di Bidang atau Satuannya dengan cara menunjukkan komitmen dan memastikan terlaksananya proses pengelolaan risiko di Bidang/Satuannya. <p>6. Direksi Anak Perusahaan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan Kebijakan dan Pedoman penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Anak Perusahaan, diselaraskan dengan kebijakan dan Pedoman penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di Perusahaan, termasuk di dalamnya adalah penetapan matriks risiko yang digunakan di Anak Perusahaan yang menggambarkan risk appetite Anak Perusahaan dengan kategori mengacu kepada ketentuan yang berlaku di PT PLN Enjiniring sebagai perusahaan holding; b. Membentuk satuan kerja di bawah Direksi Anak Perusahaan yang bertugas sebagai framework owner dalam implementasi Manajemen Risiko di lingkungan Anak Perusahaan, dengan fungsi utama mengacu pada ketentuan yang berlaku di perusahaan holding; c. Menetapkan, mengelola dan memantau risiko-risiko utama (<i>key risks</i>) yang dihadapi Anak Perusahaan dalam pencapaian sasaran strategis Anak Perusahaan; | <p>4. <i>Company Internal Control Unit (SPI)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Act as an independent assurance provider related to the implementation of risk management by risk owners;</i> b. <i>Plan and carry out a risk-based audit (RBA) to ensure focus on the Company's key risks;</i> c. <i>Provide an assessment of the effectiveness of the Company's main risk by risk owner and provide recommendations for improvement;</i> d. <i>Evaluating the implementation of Risk Management within the Company on a regular basis;</i> e. <i>Conduct risk maturity assessments of the Sector/Subsidiary if necessary.</i> <p>5. <i>Corporate Secretary/Head of Unit/Senior Manager/ Officer one level below the Board of Directors</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Responsible for the implementation of Risk Management in the Field or Unit by showing commitment and ensuring the implementation of the risk management process in the Field/Unit.</i> <p>6. <i>Subsidiary Directors</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Establish Policies and Guidelines for the implementation of Risk Management within the Subsidiaries, in accordance with the policies and guidelines for implementing Risk Management applicable in the Company, including the determination of the risk matrix used in the Subsidiary which describes the Subsidiary's risk appetite with categories referring to the applicable provisions of PT PLN Enjiniring as a holding company;</i> b. <i>Establish a work unit under the Subsidiary Board of Directors which serves as the framework owner in the implementation of Risk Management within the Subsidiary, with the main function referring to the provisions applicable in the holding company;</i> c. <i>To determine, manage and monitor the key risks faced by the Subsidiaries in achieving the Subsidiaries' strategic objectives;</i> |
|--|---|





- d. Menciptakan lingkungan internal perusahaan (Anak Perusahaan) yang kondusif untuk penerapan dan peningkatan risk maturity secara berkelanjutan dan untuk menanamkan budaya manajemen risiko di Anak Perusahaan.
 - e. Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan manajemen risiko di Anak Perusahaan.
7. Pemilik Risiko (*risk owner*)
- a. Melakukan pengelolaan risiko pada bidang/ cakupan kerjanya secara berkelanjutan, termasuk di dalamnya merencanakan dan menindaklanjuti mitigasinya;
 - b. Menandatangani dokumen Kajian Risiko dalam posisinya sebagai inisiator atau penanggung jawab atas suatu inisiatif kegiatan;
 - c. Memantau KRI beserta pelaksanaan dan efektifitas mitigasi risiko, serta membuat Laporan sesuai ketentuan/pedoman yang ada;
 - d. Mendokumentasikan proses bisnis yang ada di bidang/lingkup kewenangannya, permasalahan yang telah terjadi dan risiko yang berpotensi terjadi beserta pengendaliannya, serta melakukan *control self assessment* (CSA) secara periodik sesuai ketentuan;
 - e. Mempersiapkan sumber daya yang diperlukan dalam pengelolaan risiko di bidang kerjanya;
 - f. Memastikan manajemen risiko dipahami dan diimplementasikan oleh satuan/bidang kerjanya.

• PROFIL RISIKO KORPORAT

Profil Risiko korporat disusun untuk memastikan pencapaian sasaran strategis PT PLN Enjiniring yang tertuang dalam RKAP 2020. Profil Risiko Korporat PT PLN Enjiniring digunakan sebagai acuan utama bagi manajemen perusahaan untuk memonitor *Key Risk Indicator* risiko perusahaan sebagai bahan manajemen untuk mengambil keputusan. Adapun risiko-risiko utama yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- d. *Creating an internal environment for the Company (Subsidiaries) that is conducive to the implementation and improvement of risk maturity on an ongoing basis and to instil a risk management culture in the Subsidiaries.*
- e. *Provide the necessary resources in the implementation of risk management in Subsidiaries.*

7. Risk Owner

- a. *Carry out risk management in work field/ scope of on an ongoing basis, including planning and following up on mitigation;*
- b. *Signing the Risk Assessment document in his position as the initiator or person in charge of an activity initiative;*
- c. *Monitoring KRI and its effectiveness and implementation of risk mitigation, as well as make reports in accordance with existing regulations/guidelines;*
- d. *Documenting existing business processes in the field/scope of authority, occurring problems and risks that have the potential to occur and their controls, as well as conducting periodic self-assessment (CSA) controls in accordance with the provisions;*
- e. *Prepare the necessary resources in risk management in work field;*
- f. *Ensuring that risk management is understood and implemented by the unit/field of work.*

• CORPORATE RISK PROFILE

The corporate risk profile is prepared to ensure the achievement of PT PLN Enjiniring's strategic objectives as stated in the 2020 RKAPPT PLN Enjiniring Corporate Risk Profile is used as the main reference for company management to monitor company Key Risk Indicators as material for management in decisions making. The main risks determined in 2020 are as follows:

PROFIL RISIKO KORPORAT
CORPORATE RISK PROFILE

No	Sasaran Target	Deskripsi Risiko Risk Description	Controlled Risk	Target Risk	Residual Risk (Actual per Des)
1	Indeks Kepuasan Pelanggan mencapai 83% <i>Customer Satisfaction Index reaches 83%</i>	<p>Kualitas Layanan tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan</p> <p>Karena kurangnya tingkat responsivitas terhadap ekspektasi dan keluhan pelanggan Sehingga indeks kepuasan pelanggan tidak tercapai</p> <p><i>Service quality does not meet customer expectations</i></p> <p><i>Due to the lack of responsiveness to customer expectations and customers complaints</i></p> <p><i>So that the customer satisfaction index is not achieved</i></p>	D.5 / Ekstrem	B.3 / Moderat	B.4 / Tinggi
2	Pertumbuhan Nilai Proyek Internal (PLN) sebesar Rp. 622.37 Miliar <i>Internal Project Value Growth (PLN) of Rp. 622.37 Billion</i>	<p>Target Perolehan Kontrak Tidak Tercapai</p> <p>Karena kurangnya strategi pemasaran Sehingga pertumbuhan Nilai Proyek Internal (PLN) dan target perolehan kontrak tidak tercapai</p> <p><i>Contract Acquisition Target Not Achieved</i></p> <p><i>Due to lack of marketing strategy</i></p> <p><i>So that the growth of the Internal Project Value (PLN) and the contract acquisition target is not achieved</i></p>	D.4 / Ekstrem	B.3 / Moderat	A.4 / Tinggi
3	Pertumbuhan Nilai Proyek Internal (PLN) sebesar Rp. 622.37 Miliar <i>Internal Project Value Growth (PLN) of Rp. 622.37 Billion</i>	<p>Penyelesaian pekerjaan Enjiniring (KIT & TND) terhambat</p> <p>Karena sebagian besar Enjinir PLNE diisi oleh SDM yang belum berpengalaman Shingga pertumbuhan Nilai Proyek Internal (PLN) dan Peningkatan Pendapatan PLNE tidak terpenuhi</p> <p><i>Engineering work Completion (KIT & TND) is hampered</i></p> <p><i>Because most PLNE Engineers are inexperienced Human Resouces</i></p> <p><i>So that the growth of the Internal Project Value (PLN) and the increase in PLNE Revenues are not achieved</i></p>	C.4 / Tinggi	B.3 / Moderat	B.4 / Tinggi


 Tata Kelola Perusahaan yang Baik
 Good Corporate Governance




4	<p>Komposisi Enjinir subletting untuk Produk Enjiniring (FS, Biddoc dan <i>Engineering Design</i>) memiliki rasio maksimal 33%</p> <p><i>Maximum ratio of 33% for Subletting Engineer Composition for Engineering Products (FS, Biddoc and Engineering Design)</i></p>	<p>Jumlah pekerjaan yang dilakukan secara swakelola oleh PLNE masih rendah</p> <p>Karena PLNE belum memiliki sumber daya / kapabilitas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu Sehingga <i>value-added productivity</i> pegawai masih rendah</p> <p>The amount of self-managed work carried out by PLNE is still low</p> <p><i>Because PLNE does not have the resources/capability to do certain jobs yet</i></p> <p><i>So that the employees value-added productivity is still low</i></p>	C.4 / Tinggi	B.3 / Moderat	B.3 / Moderat
5	<p>Organization Capital Readiness (OCR) memiliki nilai sebesar 4,40</p> <p><i>Organization Capital Readiness (OCR) has a value of 4.40</i></p>	<p>Kehilangan critical knowledge</p> <p>Karena belum adanya sistem <i>transfer knowledge</i> yang terimplementasi secara efektif Sehingga terjadi kehilangan penguasaan pengetahuan</p> <p>Loss of critical knowledge</p> <p><i>Because there is no knowledge transfer system that is implemented effectively</i></p> <p><i>So there is a mastery of knowledge loss</i></p>	C.4 / Tinggi	B.3 / Moderat	B.3 / Moderat
6	<p>Peningkatan Pendapatan PLN Enjiniring bagian perusahaan sebesar Rp 92 Miliar</p> <p><i>The increase in PLN Engineering's revenue from the concession section of Rp. 92 billion</i></p>	<p>Availability Factor CNG Plant Bangkanai turun</p> <p>Karena durasi/jadwal pemeliharaan lebih lama dari pada yang telah disepakati dalam kontrak di tahun 2020 Sehingga Peningkatan Pendapatan PLN Enjiniring terganggu</p> <p>Availability Factor of CNG Plant Bangkanai is down</p> <p><i>Because the maintenance duration/ schedule is longer than what was agreed in the 2020 contract</i></p> <p><i>So it is disrupted the increase in PLN Engineering's revenue</i></p>	C.4 / Tinggi	B.3 / Moderat	B.3 / Moderat
7	<p>Peningkatan Pendapatan PLN Enjiniring untuk PT PPN sebesar Rp 641,3 M</p> <p><i>Increase in PLN Engineering Revenue for PT PPN by Rp 641.3 Billion</i></p>	<p>PT PPN tidak dapat menyelesaikan pekerjaan</p> <p>Karena tidak memiliki modal kerja yang cukup Sehingga peningkatan pendapatan PPN tidak dapat mendukung pencapaian target PLNE</p> <p>PT PPN can't finish the job</p> <p><i>Because lacking of working capital</i></p> <p><i>So that the increase in PT PPN's revenue cannot support the achievement of the PLNE target</i></p>	D.5 / Ekstrem	B.3 / Moderat	A.3 / Moderat

<p>8 Peningkatan Pendapatan PLN Enjiniring untuk bidang DDE sebesar Rp 50 Miliar</p> <p><i>Increase in PLN Engineering Revenue for the DDE sector by IDR 50 billion</i></p>	<p>PLN Enjiniring tidak mendapatkan pekerjaan mengenai DDE (Detailed Design Engineering)</p> <p>Karena pola pengadaan pembangkit di PLN (persero) menggunakan kontrak turnkey</p> <p>Sehingga peningkatan pendapatan tidak tercapai</p> <p>PLN Engineering did not find a job regarding DDE (Detailed Design Engineering)</p> <p><i>Because the use of turnkey pattern contract in PLN (Persero) power plant procurement.</i></p> <p><i>So that the increase in target income is not achieved</i></p>	D.4 / Ekstrem	C.2 / Moderat	A.2 / Rendah
<p>9 Pencapaian target pendapatan dengan penurunan biaya operasi sebesar 10%</p> <p><i>Achievement of revenue target by reducing operating costs by 10%</i></p>	<p>Perusahaan mengalami kesulitan likuiditas</p> <p>Karena Rasio Biaya operasi pekerjaan tinggi</p> <p>Sehingga kesehatan keuangan Perusahaan terganggu</p> <p>The company is experiencing liquidity difficulties</p> <p><i>Due to high job operating expense ratio</i></p> <p><i>So it is disrupting the company's financial health</i></p>	C.5 / Ekstrem	B.3 / Moderat	D.5 / Ekstrem
<p>10 Rasio Operasi sebesar 88.11%</p> <p><i>Operating Ratio of 88.11%</i></p>	<p>Tingginya Beban Operasi PLNE</p> <p>Karena kurangnya pengendalian biaya</p> <p>Sehingga target rasio operasi tidak tercapai</p> <p>PLNE's High Operating Expenses</p> <p><i>Due to lack of cost control</i></p> <p><i>So that the target operating ratio is not achieved</i></p>	C.3 / Tinggi	C.2 / Moderat	C.4 / Tinggi
<p>11 Skor Good Corporate Governance (GCG) sebesar 92</p> <p><i>Good Corporate Governance (GCG) score of 92</i></p>	<p>Proses Pengambilan Keputusan Direksi belum selaras dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik</p> <p>Karena belum adanya komitmen dan kebijakan terkait GRC</p> <p>Sehingga penerapan GCG Perusahaan tidak sesuai dengan target</p> <p>The Decision Making Process of the Board of Directors is not yet in line with the principles of Good Corporate Governance</p> <p><i>Because there are no commitments and policies related to GRC</i></p> <p><i>So that the implementation of the Company's GCG is not in accordance with the target</i></p>	C.3 / Tinggi	B.2 / Rendah	B.3 / Moderat



• KAJIAN RISIKO BIDANG

Pada tahun 2020 tidak hanya untuk proyek-proyek strategis, penerapan manajemen risiko sudah mencapai ke level bidang dan Sekper sebanyak 70 dokumen kajian risiko, sebagaimana berikut:

KAJIAN RISIKO BIDANG FIELD RISK ASSESSMENT

• RISK ASSESSMENT AREA

In 2020, not only for strategic projects, the implementation of risk management has reached the sector level and company secretary (Sekper) as many as 70 risk assessment documents, as follows:

No	Bidang Area	Judul Kajian Risiko Risk Study Title
1	Transmisi dan Distribusi <i>Transmission and Distribution</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat keluhan dari pelanggan 2. Produk Enjiniring tidak diterima pemberi kerja 3. Penyampaian Produk Enjiniring tepat waktu tidak diakui 4. Penggunaan MM subletting meningkat 5. Terdapat perubahan TOR pekerjaan 6. Biaya produksi melebihi RBP 7. Terhambatnya penyelesaian pekerjaan 8. Penyelesaian Temuan Auditor tidak tepat waktu 9. Biaya Enjiniring oleh subkonsultan dan outsourcing melebihi 30% dari total biaya enjiniring <p> <i>1. There are complaints from customers</i> <i>2. Engineering products are not accepted by the employer</i> <i>3. On Time delivery of the Engineering Product is not recognized</i> <i>4. The increase of the use of MM subletting</i> <i>5. There is a change in job TOR</i> <i>6. Production cost exceeds RBP</i> <i>7. Work Completion Delayed</i> <i>8. Completion of Auditor Findings is not on time</i> <i>9. Engineering costs by subconsultants and outsourcing exceed 30% of the total engineering costs</i> </p>
2	Pembangkit <i>Plant</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya produksi melebihi RBP 2. Terhambatnya penyelesaian pekerjaan 3. Terdapat perubahan TOR pekerjaan karena 4. Penggunaan MM subletting meningkat 5. Penyampaian Produk Enjiniring tepat waktu tidak diakui 6. Produk Enjiniring tidak diterima pemberi kerja 7. Memastikan Jumlah Temuan yang sudah selesai ditindaklanjuti 8. Terdapat keluhan dari pelanggan <p> <i>1. Production cost exceeds RBP</i> <i>2. Work Completion Delayed</i> <i>3. There is a change in job TOR</i> <i>4. The increase of the use of MM subletting</i> <i>5. On Time delivery of the Engineering Product is not recognized</i> <i>6. Engineering products are not accepted by the employer</i> <i>7. Ensuring the Number of Findings that have done been followed up</i> <i>8. There are complaints from customers</i> </p>

3 Konstruksi <i>Construction</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Audit tidak ditindaklanjuti 2. Biaya produksi melebihi RBP 3. Mobilisasi personil supervisi terlambat karena pekerjaan tidak sesuai rencana 4. Mobilisasi personil supervisi terlambat karena hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak 5. Terdapat keluhan dari pelanggan <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Audit recommendations are not followed up</i> 2. <i>Production cost exceeds RBP</i> 3. <i>The mobilization of supervisory personnel is late because the work does not go according to plan</i> 4. <i>The mobilization of supervision personnel is delayed because the results of the construction work are not in accordance with the contract specifications</i> 5. <i>There are complaints from customers</i>
4 SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan talent belum berjalan 2. Program pengembangan talent belum berjalan 3. Program budaya unggul belum berjalan 4. Program cascading kontrak manajemen (KPI Korporat) tidak sesuai 5. Program pengembangan pegawai belum berjalan <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The talent development program is not running yet</i> 2. <i>The superior culture program is not yet running</i> 3. <i>Management contract cascading program (Corporate KPI) is not suitable</i> 4. <i>The employee development program is not running yet</i>
5 Anggaran & Keuangan <i>Budget & Finance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya piutang 2. Penyerapan Anggaran Investasi tidak terserap 3. Meningkatnya utang yang harus dibayar 4. PLNE terlambat menerbitkan invoice <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Increase in accounts receivable</i> 2. <i>Investment Budget is not absorbed</i> 3. <i>Increased debt to be paid</i> 4. <i>PLNE is late in issuing invoices</i>
6 Akuntansi <i>Accounting</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Denda atas faktur pajak yang dibatalkan 2. Aset CNG Bangkanai 3. Nilai Sinergi AP sebesar 100% tidak tercapai 4. Perolehan Nilai Subletting Cost Ratio sebesar 30% Tidak Tercapai <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Fines for canceled tax invoices</i> 2. <i>Bangkanai CNG Assets</i> 3. <i>AP Synergy value is not 100% achieved</i> 4. <i>Subletting Cost Ratio Value of 30% was not obtained</i>
7 Pengusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian administrasi BAPP dan BAST terlambat 2. Availability Factor CNG Plant Bangkanai turun 3. Tidak lengkapnya data 4. Kurangnya kesadaran dalam pelaksanaan K3LH <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Late completion of BAPP and BAST administration</i> 2. <i>CNG Plant Bangkanai Availability Factor is down</i> 3. <i>Incomplete data</i> 4. <i>Lack of awareness in the implementation of Occupational Health and Safety (K3LH)</i>





8 Perencanaan Korporat dan Pengembangan Usaha
Corporate Plan and Business Development

1. Realisasi pendapatan rendah
 2. Proses inisiasi proyek Design and Build memerlukan waktu yang lama
 3. Pelaksanaan survey tidak berjalan optimal
 4. Keluhan yang masuk tidak tercatat
 5. Keterlambatan kepemilikan saham PLNE atas PT CPSI menjadi mayoritas dari roadmap yang ditentukan
 6. RUPS RKAP CPSI 2020 terlambat dilaksanakan
 7. Target pada roadmap Detail Design di tahun 2020 tidak terpenuhi
 8. Adanya keraguan calon pelanggan luar negeri untuk memberikan pekerjaan
 9. Terdapat kendala dalam mengimplementasikan strategi korporat dan arahan Pemegang Saham
 10. Proyek EBT yang dikerjakan PLNE masih terbatas
 11. Pasar produk enjiniring eksisting mengalami saturasi
 12. Ketidakmampuan PT PPN dalam melakukan repayment SHL/bridging loan
 13. Penyelesaian temuan auditor terlambat
 14. Penyusunan Kajian Akuisisi PT REC terkendala
1. *Low income realization*
 2. *Initiation process of Design and Build project takes a long time*
 3. *Survey was not optimally running*
 4. *Incoming complaints are not recorded*
 5. *The delay in PLNE's share ownership of PT CPSI became the majority of the determined roadmap*
 6. *The 2020 CPSI RKAP GMS is late to be held*
 7. *The 2020 Detail Design roadmap target was not fulfilled*
 8. *There are doubts on prospective overseas customers to provide jobs*
 9. *There are obstacles in implementing the corporate strategy and the direction of the Shareholders*
 10. *PLNE's NRE projects are still limited*
 11. *Saturated existing engineering product market*
 12. *PT PPN's inability to repay SHL/bridging loan*
 13. *Late completion of auditor findings*
 14. *PT REC Acquisition preparation study is constrained*

9 Pemasaran
Marketing

1. Target sinergi PLNE terhadap AP PLN Group lainnya tidak tercapai
 2. Target perolehan kontrak detail design tidak tercapai
 3. Target perolehan kontrak tidak tercapai
1. *PLNE's synergy target with other PLN Group APs was not achieved*
 2. *The target of obtaining a detailed design contract was not achieved*
 3. *Contract acquisition target not achieved*

10 Sekper

1. Waktu yang tersedia untuk menyusun kajian hukum tidak memadai serta masalah hukum terkait pendapatan jasa tidak dapat terselesaikan secara komprehensif
 2. Hak-hak PLNE di dalam perjanjian tidak terlindungi oleh hukum
 3. Proses review perjanjian tidak tepat waktu.
 4. Peraturan Internal PLNE obsolete
 5. Kurangnya pemahaman dan komitmen insan PLNE terkait pemenuhan Compliance
 6. Pekerjaan yang didapatkan oleh PLNE terkendala
 7. Penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu
 8. Ketidakselarasan antara kebijakan TI dan ITMP dengan kebutuhan organisasi dan era industri
 9. Keengganan user dalam menggunakan aplikasi VC
 10. Keamanan data yang tersimpan pada sistem TI belum terjamin keamanannya
 11. Ketersediaan layanan dan pengelolaan layanan TI rendah
 12. Kebutuhan kelancaran probis terganggu
 13. Pelaporan tindaklanjut temuan auditor terlambat
 14. Penerapan GCG di PLNE belum berjalan sesuai dengan Pedoman GCG
-
1. *Insufficient amount of time in composing legal studies and legal issues related to service fees cannot be resolved comprehensively*
 2. *PLNE's rights in the agreement are not protected by law*
 3. *The agreement review process was not on time.*
 4. *PLNE Obsolete Internal Regulations*
 5. *The Lack of understanding and commitment of PLNE personnel regarding Compliance*
 6. *The work obtained by PLNE is constrained*
 7. *Late work completion*
 8. *Inconsistency between IT and ITMP policies with the organization needs and the industrial era*
 9. *User Reluctancy to use VC applications*
 10. *The security in IT data storage systems not guaranteed yet*
 11. *Low availability and management in IT service*
 12. *The need for smooth business processes is disrupted*
 13. *Late in reporting the follow up on auditor's findings*
 14. *The PLNE GCG implementation has not run in accordance with the GCG Guidelines*



• IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2020

Berikut kegiatan-kegiatan Manajemen Risiko yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 :

1. Melakukan review terhadap Pedoman Manajemen Risiko PT PLN Enjiniring disesuaikan dengan RKAP 2020;
2. Mereview Profil Risiko Korporat tahun 2020 yang telah disusun pada akhir tahun 2019;
3. Melakukan Sosialisasi Pedoman Manajemen Risiko dan Profil Risiko Korporat tahun 2020;
4. Membentuk Tim Enterprise Risk Management Tahun 2020;

• THE 2020 RISK MANAGEMENT WORK PROGRAM IMPLEMENTATION

Berikut kegiatan-kegiatan Manajemen Risiko yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 :

1. *Conducted a review of the PT PLN Enjiniring Risk Management Guidelines in accordance with the 2020 RKAP;*
2. *2020 Corporate Risk Profile review which was prepared at the end of 2019;*
3. *Disseminating the 2020 Risk Management Guidelines and Corporate Risk Profile;*
4. *Establishing an Enterprise Risk Management Team in 2020;*



5. Mengadakan Pelatihan Manajemen Risiko untuk Manajer Senior, Manajer, anggota Tim Enterprise Risk Management dan beberapa PTL;
6. Penyusunan Kajian Risiko untuk setiap Bidang dan Sekper;
7. Pemantauan mitigasi Profil Risiko Korporat dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada PT PLN (Persero) DIVMRK setiap akhir Triwulan;
8. Pemantauan mitigasi Kajian Risiko Bidang pada aplikasi RICO setiap bulan.

Penyampaian Pemenuhan *Risk Maturity Level* PT PLN Enjiniring Tahun 2020 kepada PT PLN (Persero) DIVMRK dengan skor 2.69.

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI

Perusahaan mengaplikasikan sistem manajemen yang terdiri atas Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara terintegrasi.

SISTEM MANAJEMEN MUTU

Perseroan mempunyai komitmen untuk menerapkan manajemen mutu guna meningkatkan kualitas produk secara berkesinambungan. Dalam rangka penerapan manajemen mutu tersebut, Perseroan secara terus menerus memperbaiki dan mendokumentasikan prosedur-prosedur yang ada sehingga dapat memenuhi kriteria sertifikasi manajemen mutu. Perseroan secara berkala melakukan audit internal pelaksanaan manajemen mutu di tiap unit kerja. Perseroan juga senantiasa meningkatkan sertifikasi manajemen mutu yang telah dimiliki, di samping berupaya memperoleh sertifikasi-sertifikasi lain yang dipersyaratkan dalam aktivitas usaha.

Perusahaan telah memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2015 PLN Enjiniring dengan Lingkup Sistem Manajemen Mutu yang berlaku untuk Desain Enjiniring (*Feasibility Study, Design Review, Bidding Document*) dan Supervisi Konstruksi Instalasi Ketenagalistrikan; di samping itu

5. *Conducted Risk Management Training for Senior Managers, Managers, Enterprise Risk Management Team members and several PTL;*
6. *Constructed Risk Studies for each Field and Company Secretariat;*
7. *Monitoring Corporate Risk Profile mitigation and reporting the results of its implementation to PT PLN (Persero) DIVMRK at the end of every Quarter;*
8. *Monthly field Risk Assessment mitigation monitoring on the RICO application.*

Submission of PT PLN Enjiniring's 2020 Risk Maturity Level Fulfillment to PT PLN (Persero) DIVMRK with a score of 2.69.

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI

The company applies a management system consisting of an integrated Quality Management System and Occupational Health and Safety Management System.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

The Company is committed to implementing quality management to continuously improving product quality. Dalam rangka penerapan manajemen mutu tersebut, The Company continuously improves and documented existing procedures to meet the quality management certification criteria. The Company conducted internal audits on the implementation of quality management in each work unit periodically. The Company also continuously improves the quality management certification that it already obtained, in addition to obtain other certifications required in business activities.

*The company has obtained PLN Engineering ISO 9001:2015 Certification with a Quality Management System Scope that applies to Engineering Designs (*Feasibility Study, Design Review, Bidding Document*) and Electricity Installation Construction Supervision; in*

perlu untuk memperluas secara keseluruhan Lingkup Enjiniring, yaitu Desain Rinci, Pembuatan Dokumen Lelang dan *Design Review* Proyek sesuai lingkup kerja yang sudah ada. Sebagai pertimbangan utama, bahwa Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, sebagai tool dalam rangka menjaga dan mendukung proses bisnis serta produk yang dihasilkan PLN Enjiniring.

Sistem Manajemen Mutu ini telah banyak membantu dalam rangka pengelolaan proses bisnis di Perusahaan untuk menyelesaikan setiap penugasan agar supaya tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan mutu, baik dari sisi kontrak penugasan maupun standar lingkup enjiniring yang berlaku. Sertifikasi yang diperoleh berlaku dalam periode 3 (tiga) tahun, dengan periode *surveillance* tiap semester, dan pada tahun 2020 Sertifikat tersebut telah diperbaharui yang berlaku sampai dengan tahun 2023.

Pada tahun 2020, PT PLN Enjiniring telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 dengan lingkup Desain Enjiniring (*Feasibility Study, Design Review, Bidding Document*) dan Supervisi Konstruksi Instalasi Ketenagalistrikan.

1. Pelaksanaan Manajemen Mutu

Selama tahun 2020, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka implementasi manajemen mutu perusahaan sebagai berikut :

1. Mengadakan Diklat pemahaman ISO 9001:2015
2. Melakukan *review* terhadap beberapa Prosedur Enjiniring
3. Mengadakan Pelatihan dan workshop Audit Mutu Internal untuk ISO 9001:2015
4. Pelaksanaan Audit Mutu Internal sesuai dengan lingkup dan organisasi
5. Setup Sistem Manajemen Terintegrasi diantaranya penyusunan Pedoman, Kebijakan, Sasaran & Tujuan
6. Sosialisasi Sistem Manajemen Terintegrasi
7. Pelaksanaan Audit Eksternal dan sertifikasi ISO 9001:2015
8. Melaksanakan tinjauan manajemen atas pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu

in addition it is necessary to broaden the overall Scope of Engineering, i.e. Detailed Design, Making Tender Documents and Design Review Projects according to the existing scope of work. Using ISO 9001:2015 Quality Management System as main consideration and tool in order to maintain and support business processes and PLN Engineering products.

This Quality Management System has helped a lot in managing business processes in the Company to complete each assignment in order to be on time and according to quality requirements, both in terms of the assignment contract and the applicable engineering scope standards. The certification obtained is valid for a period of 3 (three) years, with surveillance period in each semester, and in 2020 the certificate has been renewed which will be valid until 2023.

In 2020, PT PLN Engineering has received ISO 9001:2015 certification with the scope of Engineering Design (Feasibility Study, Design Review, Bidding Document) and Electrical Installation Construction Supervision.

1. The Implementation of Quality Management

During 2020, the activities that have been carried out in the context of implementing the company's quality management are as follows :

1. *Conducting ISO 9001:2015 understanding training*
2. *Reviewing several Engineering Procedures*
3. *Conducting ISO 9001:2015 Internal Quality Audit Training and workshops*
4. *Internal Quality Audit implementation in accordance with the scope and organization*
5. *Integrated Management System Setup including the preparation of Guidelines, Policies, Goals & Objectives*
6. *Integrated Management System Socialization*
7. *Implementation of External Audit and ISO 9001:2015 certification*
8. *Carry out a management review for the implementation of the Quality Management System*



2. Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu

Satuan Manajemen Mutu & Risiko secara berkala membuat Jadwal Program Audit Mutu Internal, pemeriksaan pemastian mutu (*quality assurance*) dengan rujukan standard, pedoman mutu, prosedur enjiniring dan acuan lainnya termasuk regulasi atau peraturan pemerintah. Pemeriksaan mutu lainnya adalah pemeriksaan mutu produk (*quality control*) yang berkaitan dengan Pemeriksaan Teknis Manajemen yang di atur dalam Prosedur Enjiniring yang berlaku. Pada prinsipnya hirarkhi sistem manajemen mutu terdiri:

Level 1 (satu) merupakan Kebijakan-Kebijakan dan Pedoman Mutu;

Level 2 (dua) merupakan Prosedur Enjiniring PLN Enjiniring (PE PLNE) terdiri atas:

PE PLNE Seri 0 <i>PE PLNE Series 0</i>	Prosedur Wajib sesuai ISO 9001: 2015 <i>Mandatory Procedures according to ISO 9001:2015</i>
PE PLNE Seri 1 <i>PE PLNE Series 1</i>	Prosedur Kerja Kelompok Umum <i>General Group Working Procedure</i>
PE PLNE Seri 2 <i>PE PLNE Series 2</i>	Prosedur Kerja Kelompok Pengadaan <i>Procurement Group Working Procedure</i>
PE PLNE Seri 3 <i>PE PLNE Series 3</i>	Prosedur Kerja Kelompok Desain <i>Design Group Working Procedure</i>
PE PLNE Seri 4 <i>PE PLNE Series 4</i>	Prosedur Kerja Kelompok Pelaporan <i>Reporting Group Working Procedure</i>
PE PLNE Seri 5 <i>PE PLNE Series 5</i>	Prosedur Kerja Kelompok Manajemen & dokumentasi Proyek <i>Project Management Group Documentation & Working Procedures</i>
PE PLNE Seri 6 <i>PE PLNE Series 6</i>	Prosedur Kerja Kelompok Penunjang <i>Support Group Working Procedure</i>
PE PLNE Seri 7 <i>PE PLNE Series 7</i>	Prosedur Kerja Kelompok Konstruksi <i>Construction Group Working Procedure</i>
PE PLNE Seri 8 <i>PE PLNE Series 8</i>	Prosedur Kerja Kelompok Teknologi Informasi <i>Information Technology Group Working Procedure</i>

Level 3 (tiga) merupakan Petunjuk Teknis Enjiniring PLN Enjiniring (PTE);

Level 4 (empat) merupakan Formulir dan Logsheet di atur di dalam masing-masing Bidang sesuai dengan keperluannya.

2. Quality Management System Management

The Quality & Risk Management Unit periodically makes an Internal Quality Audit Program Schedule, quality assurance conformation with reference to its standards, quality guidance, engineering procedures and other references including regulations or government regulations. Another quality inspection is product quality inspection (*quality control*) related to Technical Management Inspection which regulated in the applicable Engineering Procedure. In principle, the quality management system hierarchy consists of:

1st Level (one) are Quality Policies and Guidelines;

2nd Level 2 (two) is a PLN Engineering Procedure (PE PLNE) consisting of:

3rd Level (three) is PLN Engineering Technical Guidelines (PTE);

4th Level (four) are Forms and Log sheets arranged in each Field according to their needs.

Pada tahun 2020 telah dilakukan review dan melakukan revisi terhadap beberapa Prosedur Enjiniring untuk perbaikan proses serta melakukan penyusunan prosedur baru dalam rangka implementasi Sistem Manajemen Terintegrasi. Total keseluruhan Prosedur Enjiniring (PE) sebanyak 84 dokumen dan Petunjuk Teknis Enjiniring (PTE) sebanyak 31 dokumen. Adapun Prosedur Enjiniring yang telah ditetapkan sebagai panduan, antara lain:

1. PE.PLNE.P.01.01 Prosedur Siklus Proyek Enjiniring
2. PE.PLNE.P.01.02 Prosedur Pengelolaan Risiko dan Monitoring KRI
3. PE.PLNE.P.01.03 Prosedur Penyusunan Dokumen Lelang/RKS Pengadaan Barang/Jasa
4. PE.PLNE.P.01.04 Prosedur Penyusunan Harga Perkiraan Enjinir (HPE) Pengadaan Barang/Jasa
5. PE.PLNE.P.01.05 Prosedur Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa
6. PE.PLNE.P.01.06 Prosedur Tinjauan Dokumen Lelang/RKS dan HPE Pengadaan Barang/Jasa
7. PE.PLNE.D.01.01 Prosedur Penyusunan, Pengendalian & Penggunaan Dokumen SMT
8. PE.PLNE.D.01.02 Prosedur Pengendalian Dokumen Non Proyek
9. PE.PLNE.D.01.03 Prosedur Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Jasa
10. PE.PLNE.D.01.04 Prosedur Klarifikasi dan Negosiasi Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Jasa
11. PE.PLNE.D.01.05 Prosedur Laporan Pengadaan dan Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa
12. PE.PLNE.C.01.01 Prosedur Audit Internal SMT
13. PE.PLNE.C.01.02 Prosedur Pemastian Mutu (QA) Produk Enjiniring
14. PE.PLNE.C.01.03 Prosedur Evaluasi Unjuk Kerja Sub Konsultan
15. PE.PLNE.A.01.01 Prosedur Rapat Direksi Pengambilan Keputusan

In 2020, several engineering procedures have been reviewed and revised for improvement process and carry out new procedures preparation for the implementation of the Integrated Management System. A total of 84 Engineering Procedures (PE) documents and 31 Engineering Technical Instructions (PTE) documents. The Engineering Procedures that have been established as a guide include::

1. PE.PLNE.P.01.01 Engineering Project Cycle Procedure
2. PE.PLNE.P.01.02 KRI Risk Management and Monitoring Procedures
3. PE.PLNE.P.01.03 Auction Preparation Documents/RKS for Procurement of Goods/ Servicesj Procedure
4. PE.PLNE.P.01.04 Procurement of Goods/ Services in Preparation Engineer's Estimated Price Preparation (HPE) Procedure
5. PE.PLNE.P.01.05 Preparation of Self-Estimated Prices (HPS) for Procurement of Goods/Services Procedure
6. PE.PLNE.P.01.06 Tender Documents/RKS and HPE Review for the Procurement of Goods/ Services Procedure
7. PE.PLNE.D.01.01 Preparation, Control & Use of SMT Documents Procedure
8. PE.PLNE.D.01.02 Non-Project Document Control Procedure
9. PE.PLNE.D.01.03 Evaluation of Goods/Services Procurement Offer Documents Procedure
10. PE.PLNE.D.01.04 Clarification and Negotiation of Goods/Services Procurement Offer Documents Procedure
11. PE.PLNE.D.01.05 Procurement Reports and Announcement of Winners of Procurement of Goods/Services Procedure
12. PE.PLNE.C.01.01 SMT Internal Audit Procedure
13. PE.PLNE.C.01.02 Engineering Product Quality Assurance (QA) Procedure
14. PE.PLNE.C.01.03 Sub-Consultant Performance Evaluation Procedure
15. PE.PLNE.A.01.01 Board of Directors Meeting in Decision Making Procedure





16. PE.PLNE.P.02.01	Prosedur Penyusunan IT Master Plan	16. PE.PLNE.P.02.01	IT Master Plan Preparation Procedure
17. PE.PLNE.P.02.02	Prosedur Penyusunan Anggaran TI	17. PE.PLNE.P.02.02	IT Budgeting Procedure
18. PE.PLNE.P.02.03	Prosedur Pengelolaan Website dan Portal	18. PE.PLNE.P.02.03	Website and Portal Management Procedure
19. PE.PLNE.D.02.01	Prosedur Asistensi Hukum	19. PE.PLNE.D.02.01	Legal Assistance Procedure
20. PE.PLNE.D.02.02	Prosedur Kajian Hukum	20. PE.PLNE.D.02.02	Legal Study Procedure
21. PE.PLNE.D.02.03	Prosedur Penyelesaian Sengketa Litigasi	21. PE.PLNE.D.02.03	Litigation Dispute Resolution Procedure
22. PE.PLNE.D.02.04	Prosedur Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi	22. PE.PLNE.D.02.04	Non-Litigation Dispute Resolution Procedure
23. PE.PLNE.D.02.05	Prosedur Penggunaan Aplikasi Perangkat Enjiniring	23. PE.PLNE.D.02.05	Device Engineering Applications Usage Procedure
24. PE.PLNE.D.02.06	Prosedur Pengelolaan Akun Pengguna	24. PE.PLNE.D.02.06	User Account Management Procedure
25. PE.PLNE.D.02.07	Prosedur Penyusunan Analisa Dampak Perubahan Perundang-Undangan Terbaru Yang Terkait Dengan Proses Bisnis PLN Enjiniring	25. PE.PLNE.D.02.07	Compiling the Recent Changes Impact Analysis in Legislation Related to PLN Engineering Business Process Procedure
26. PE.PLNE.D.02.08	Prosedur Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi	26. PE.PLNE.D.02.08	Information System Application Usage Training Procedure
27. PE.PLNE.D.02.09	Prosedur Penyusunan Laporan Manajemen	27. PE.PLNE.D.02.09	Management Report Preparation Procedure
28. PE.PLNE.D.02.11	Prosedur Bantuan Penggunaan Teknologi Informasi	28. PE.PLNE.D.02.11	Information Technology Usage Assistance Procedure
29. PE.PLNE.D.02.12	Prosedur Pelaksanaan Program CSR	29. PE.PLNE.D.02.12	CSR Program Implementation Procedure
30. PE.PLNE.C.02.01	Prosedur Review Perjanjian	30. PE.PLNE.C.02.01	Agreement Review Procedure
31. PE.PLNE.A.02.01	Prosedur Pengelolaan Penanganan Insiden TI	31. PE.PLNE.A.02.01	IT Incident Management Procedure
32. PE.PLNE.A.02.02	Prosedur Pengembangan dan Pengujian Aplikasi Sistem Informasi	32. PE.PLNE.A.02.02	Information System Application Development and Testing Procedure
33. PE.PLNE.D.03.01	Prosedur Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan	33. PE.PLNE.D.03.01	Customer Satisfaction Survey Implementation Procedure
34. PE.PLNE.A.03.01	Prosedur Penanganan Keluhan dan Aspirasi Pelanggan	34. PE.PLNE.A.03.01	Customer complaints Handling and Aspirations Procedure
35. PE.PLNE.P.04.01	Prosedur Ketentuan Penomoran dan Penyusunan Register Proyek	35. PE.PLNE.P.04.01	Project Registers Numbering Provisions and Compilation Procedure
36. PE.PLNE.P.04.02	Prosedur Penyusunan Rencana Kegiatan Proyek	36. PE.PLNE.P.04.02	Project Activity Plan Preparation Procedure

37. PE.PLNE.P.04.03	Prosedur Tinjauan Peluang dan Risiko Penugasan Proyek	37. PE.PLNE.P.04.03	Project Assignment Opportunity and Risk Review Procedure
38. PE.PLNE.D.04.01	Prosedur Penyusunan Dokumen Penawaran Administrasi Teknis dan Harga	38. PE.PLNE.D.04.01	Preparation of Technical Administration and Price Bid Documents Procedure
39. PE.PLNE.A.04.01	Prosedur Pembatalan Surat Penugasan	39. PE.PLNE.A.04.01	Assignment Cancellation Procedure
40. PE.PLNE.P.05.01	Prosedur Pembentukan, Perubahan dan Pembubaran Tim Proyek	40. PE.PLNE.P.05.01	Project Team Formation, Change and Disbandment Procedure
41. PE.PLNE.P.05.02	Prosedur Penyusunan DPD/DPDR/DPSK	41. PE.PLNE.P.05.02	Preparation of DPD/DPDR/DPSK Procedure
42. PE.PLNE.P.05.03	Prosedur Penyusunan Rencana Mutu Proyek (RMP)	42. PE.PLNE.P.05.03	Project Quality Plan (RMP) Preparation Procedure
43. PE.PLNE.P.05.04	Prosedur Penomoran Dokumen/Gambar Proyek	43. PE.PLNE.P.05.04	Project Document/Drawing Numbering Procedure
44. PE.PLNE.P.05.05	Prosedur Penyusunan, Perubahan, dan Penutupan Rencana Biaya Produksi	44. PE.PLNE.P.05.05	Preparation, Amendment, and Closing of Production Cost Plans Procedure
45. PE.PLNE.D.05.01	Prosedur Monitoring Kemajuan Proyek	45. PE.PLNE.D.05.01	Prosedur Monitoring Kemajuan Proyek
46. PE.PLNE.D.05.02	Prosedur Penyusunan Dokumen Feasibility Study	46. PE.PLNE.D.05.02	Prosedur Penyusunan Dokumen Feasibility Study
47. PE.PLNE.D.05.05	Prosedur Penyusunan Dokumen Lelang (Bidding Document)/ Rencana Kerja dan Syarat	47. PE.PLNE.D.05.05	Prosedur Penyusunan Dokumen Lelang (Bidding Document)/ Rencana Kerja dan Syarat
48. PE.PLNE.D.05.06	Prosedur Penyusunan Harga Perkiraan Enjinir	48. PE.PLNE.D.05.06	Preparation of Engineer's Estimated Price Procedure
49. PE.PLNE.D.05.07	Prosedur Pendampingan Pengadaan	49. PE.PLNE.D.05.07	Procurement Assistance Procedure
50. PE.PLNE.D.05.08	Prosedur Design Review	50. PE.PLNE.D.05.08	Design Review Procedure
51. PE.PLNE.D.05.09	Prosedur Pembuatan Detailed Design	51. PE.PLNE.D.05.09	Detailed Design Making Procedure
52. PE.PLNE.D.05.10	Prosedur Pelaksanaan Supervisi Konstruksi	52. PE.PLNE.D.05.10	Construction Supervision Implementation Procedure
53. PE.PLNE.D.05.11	Prosedur Pelaksanaan Supervisi Konstruksi (Consultant Leading)	53. PE.PLNE.D.05.11	Construction Supervision Implementation j(Consultant Leading) Procedure
54. PE.PLNE.D.05.12	Prosedur Pelaksanaan Supervisi Masa Pemeliharaan	54. PE.PLNE.D.05.12	Implementation of Maintenance Period Supervision Procedure
55. PE.PLNE.D.05.13	Prosedur Pengendalian Dokumen Proyek	55. PE.PLNE.D.05.13	Project Document Control Procedure
56. PE.PLNE.D.05.14	Prosedur Penyelesaian Dokumen dan BAPP	56. PE.PLNE.D.05.14	Completion of Documents and BAPP Procedure





57. PE.PLNE.D.05.15	Prosedur Penutupan Proyek	57. PE.PLNE.D.05.15	Project Closing Procedure
58. PE.PLNE.D.05.16	Prosedur Pengendalian Dokumen Perangkat Enjiniring	58. PE.PLNE.D.05.16	Engineering Equipment Document Control Procedure
59. PE.PLNE.D.05.17	Prosedur Rekrutmen Karyawan PKWT Konstruksi	59. PE.PLNE.D.05.17	Construction PKWT Employee Recruitment Procedure
60. PE.PLNE.D.05.18	Prosedur Layanan Jasa Enjiniring dari Internal PLNE	60. PE.PLNE.D.05.18	Engineering Services from Internal PLNE Procedure
61. PE.PLNE.D.05.19	Prosedur Penerimaan Gambar Supervisi Konstruksi	61. PE.PLNE.D.05.19	Construction Supervision Drawing Acceptance Procedure
62. PE.PLNE.D.05.20	Prosedur Pelaksanaan Mobilisasi dan Demobilisasi Personil	62. PE.PLNE.D.05.20	Implementation of Personnel Mobilization and Demobilization Procedure
63. PE.PLNE.D.05.22	Prosedur Pembayaran Subkonsultan di Direktorat Enjiniring	63. PE.PLNE.D.05.22	Subconsultant Payment Procedures at the Engineering Directorate
64. PE.PLNE.C.05.01	Prosedur Pengawasan Waktu Kerja	64. PE.PLNE.C.05.01	Working Time Monitoring Procedure
65. PE.PLNE.C.05.02	Prosedur Pemeriksaan Teknis	65. PE.PLNE.C.05.02	Technical Inspection Procedure
66. PE.PLNE.C.05.03	Prosedur Pengendalian Mutu Produk Enjiniring	66. PE.PLNE.C.05.03	Engineering Product Quality Control Procedure
67. PE.PLNE.C.05.04	Prosedur Persetujuan Progres Pekerjaan Kontraktor	67. PE.PLNE.C.05.04	Contractor Work Progress Approval Procedure
68. PE.PLNE.A.05.01	Prosedur Permohonan Pelayanan Enjiniring	68. PE.PLNE.A.05.01	Engineering Service Application Procedure
69. PE.PLNE.A.05.02	Prosedur Perubahan Desain Proyek di Lapangan	69. PE.PLNE.A.05.02	Field Project Design Change Procedures
70. PE.PLNE.A.05.03	Prosedur Penyusunan Dokumen Amandemen Kontrak dengan Pemberi Kerja	70. PE.PLNE.A.05.03	Compiling Contract Amendment Documents with Employers Procedure
71. PE.PLNE.A.05.04	Prosedur Laporan Umpan Balik Pengalaman Pelaksanaan Kontrak	71. PE.PLNE.A.05.04	Contract Execution Experience Feedback Report Procedure
72. PE.PLNE.A.05.05	Prosedur Pengendalian Ketidaksesuaian Produk dan Tindakan Korektif	72. PE.PLNE.A.05.05	Product Non-conformance Control Procedures and Corrective Action
73. PE.PLNE.C.07.01	Prosedur Rekonsiliasi Proyek	73. PE.PLNE.C.07.01	Project Reconciliation Procedure
74. PE.PLNE.C.07.02	Prosedur Inventarisasi Aset Tetap	74. PE.PLNE.C.07.02	Fixed Assets Inventory Procedure
75. PE.PLNE.D.06.01	Prosedur Penagihan Jasa Pre-Treatment dan CNG Bangkanai	75. PE.PLNE.D.06.01	Bangkanai Pre-Treatment and CNG Service Billing Procedure
76. PE.PLNE.C.06.01	Prosedur Sistem Informasi Terintegrasi (SIT) untuk Monitoring Pendapatan PLN Enjiniring	76. PE.PLNE.C.06.01	Integrated Information System (SIT) Procedure for Monitoring PLN Engineering Revenue
77. PE.PLNE.P.08.01	Prosedur Pelaksanaan dan Evaluasi Pelatihan	77. PE.PLNE.P.08.01	Training Implementation and Evaluation Procedure

78. PE.PLNE.D.08.01	Prosedur	Rekrutmen Karyawan PKWT	78. PE.PLNE.D.08.01	PKWT Employee Recruitment Procedure
79. PE.PLNE.D.08.02	Prosedur	Pengajuan ATK, Peralatan Kantor, Komputer, dan Peripheral	79. PE.PLNE.D.08.02	Submission of ATK, Office Equipment, Computers, and Peripherals Procedure
80. PE.PLNE.D.08.03	Prosedur	Penggunaan kendaraan Operasional	80. PE.PLNE.D.08.03	Operational Vehicle Usage Procedure
81. PE.PLNE.D.08.04	Prosedur	Pemusnahan Arsip Dokumen	81. PE.PLNE.D.08.04	Document Archive Destruction Procedure
82. PE.PLNE.D.08.06	Prosedur	Pelaksanaan Fit and Proper Test Jabatan Struktural	82. PE.PLNE.D.08.06	Implementation of Structural Position Fit and Proper Test Procedure
83. PE.PLNE.D.10.01	Prosedur	Operasi CNG Plant Bangkanai	83. PE.PLNE.D.10.01	Bangkanai CNG Plant Operation Procedure
84. PE.PLNE.D.10.02	Prosedur	Pemeliharaan CNG Plant Bangkanai	84. PE.PLNE.D.10.02	Bangkanai CNG Plant Maintenance Procedure

PENINGKATAN KUALITAS PRODUK ENJINIRING

Dalam Rangka peningkatan kualitas produk Enjiniring maka pada tahun 2020 PLNE mengupayakan penyempurnaan Perangkat Enjiniring meliputi:

1. Pembuatan dan penyempurnaan template *Feasibility Study*, *Bid Document* dan *Engineering Design* untuk produk enjiniring bidang Pembangkitan dan Transmisi & Distribusi;
2. Inventarisasi dan rencana pengadaan *Code & Standard* yang dibutuhkan sebagai rujukan dalam penyusunan Produk Enjiniring bidang Pembangkitan dan Transmisi & Distribusi;
3. Inventarisasi *software* yang dibutuhkan sebagai *tools* untuk memproduksi Produk Enjiniring sudah selesai dilaksanakan;
4. Penyempurnaan *Design Guide*;
5. Penyiapan *generic Standard Specification*;
6. *Review* dan penyempurnaan SMM ISO 9001, Prosedur Enjiniring dan Petunjuk Teknis Enjiniring, termasuk Prosedur dan Petunjuk Teknis di Bidang Supervisi Konstruksi.

ENGINEERING PRODUCT QUALITY IMPROVEMENT

In order to improve the Engineering products quality, in 2020 PLNE will seek to improve the Engineering Equipment including:

1. *Creation and refinement of Feasibility Study, Bid Document and Engineering Design templates for engineering products in the Power Plant and Transmission & Distribution fields;*
2. *Code & Standards of Inventory and procurement plans needed as a reference in Engineering Products preparation in the Generation and Transmission & Distribution fields;*
3. *The software inventory needed as tools in producing Engineering Products has been completed;*
4. *Design Guide Improvements;*
5. *Generic Standard Specification setup;*
6. *Review and refinement of QMS ISO 9001, Engineering Procedures and Engineering Technical Instructions, including Construction Supervision Field Procedures and Technical Instructions.*





1. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Sesuai Standar ISO 9001:2015, Audit Mutu Internal dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas sistem mutu dan dituangkan dalam PE.PLNE.C.01.01 Prosedur Audit Mutu Internal sebelum dilakukan Audit pihak Eksternal. Pada triwulan I tahun 2020 telah dibentuk Tim Audit Mutu Internal tahun 2020 dan Audit Mutu Internal dilaksanakan pada tanggal 30 April 2020 sampai dengan 16 Juni 2020 dan telah dilakukan penutupan pada tanggal 16 Juni 2020 Serta dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen tertanggal 19 November 2020.

2. Pelaksanaan Sertifikasi ISO 9001:2015 (Audit Eksternal)

Telah dilaksanakan Audit Eksternal SMM ISO 9001:2015 pada tanggal 07 s.d. 09 Oktober 2020 oleh Lembaga Sertifikasi LMK (PLN PUSERTIF) dan telah memperoleh Sertifikat tertanggal 12 Desember 2020 dengan lingkup Desain Enjiniring (Feasibility Study, Design Review, Bidding Document) dan Supervisi Konstruksi Instalasi Ketenagalistrikan dengan Nomor Sertifikat 0407-M berlaku mulai tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023.

1. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Sesuai Standar ISO 9001:2015, Audit Mutu Internal dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas sistem mutu dan dituangkan dalam PE.PLNE.C.01.01 Prosedur Audit Mutu Internal sebelum dilakukan Audit pihak Eksternal. Pada triwulan I tahun 2020 telah dibentuk Tim Audit Mutu Internal tahun 2020 dan Audit Mutu Internal dilaksanakan pada tanggal 30 April 2020 sampai dengan 16 Juni 2020 dan telah dilakukan penutupan pada tanggal 16 Juni 2020 Serta dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen tertanggal 19 November 2020.

2. Implementation of ISO 9001:2015 Certification (External Audit)

ISO 9001:2015 QMS External Audit has been carried out on October 7th to 9th, 2020 by LMK Certification Agency (PLN PUSERTIF) and has obtained a Certificate dated December 12, 2020 with the scope of Engineering Design (Feasibility Study, Design Review, Bidding Document) and Supervision of Electricity Installation Construction with Certificate Number 0407-M valid from December 12, 2020 to December 11, 2023.

Akuntan Publik

Public Accountance

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perusahaan dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan PLN Enjiniring tahun buku 2020 ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Dalam penggunaan Auditor Eksternal, PLN Enjiniring mengacu pada ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

PLN Enjiniring selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Kantor Akuntan Publik, Komite Audit dan Manajemen untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung. Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pertemuan pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Data Auditor Eksternal yang melakukan audit laporan keuangan PLN Enjiniring sebagai berikut.

The independent oversight to the Company's financial aspects is carried out with external audit conducted by a Public Accountance Firm (KAP). External Auditors who examine PLN Enjiniring's financial statements for the 2020 financial year are assign by the Annual GMS based on the Board of Commissioners and the Audit Committee recommendation.

In using External Auditor, PLN Enjiniring refers to the Minister of Finance Regulation No. 17 / PMK.01 / 2008 dated February 5th, year 2008 article 3 sesction 1 which states that the given of general audit services on the financial statements of an entity is carried out by KAP for a maximum of 6 (six) consecutive financial years and by a Public Accountant for no longer than for 3 (three) consecutive financial years.

PLN Enjiniring always strives to improve the communication between Public Accounting Firm, Audit Committee and the Management in order to minimize the obstacles that occur during the audit process. In order for the audit process to be in accordance with the Accountants Professional Standards as well as the work agreement and scope of audit that have been determined and completed on targeted time, meetings are held reguarly to discuss several important and significant issues.

PUBLIC ACCOUNTING FIRM

Following are data submitted by external auditors who audited PLN Enjiniring's financial statements.



TABEL DATA AUDITOR EKSTERNAL YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN PLN ENJINIRING
TABLE OF EXTERNAL AUDITOR DATA THAT CONDUCTS AUDIT ON THE FINANCIAL STATEMENT OF PLN ENJINIRING

Tahun	Nama Kantor Akuntan Publik	Periode	Partner Pelaksana	Biaya Audit
Year	Name of Public Accountant Office	Period	Executor Partner	Cost of Audit
2020	Pricewaterhouse Cooper (PWC)	3 Tahun 3 Years	Daniel Kohar S.E.,Ak.,CPA	Biaya ditanggung oleh PT PLN (Persero) Cost is borne by PT PLN (Persero)
2019	RSM Indonesia	3 Tahun 3 Years	Amir Abadi Jusuf, Asryanto, Mawar & Rekan	Biaya ditanggung oleh PT PLN (Persero) Cost is borne by PT PLN (Persero)
2018	RSM Indonesia	3 Tahun 3 Years	Amir Abadi Jusuf, Asryanto, Mawar & Rekan	Biaya ditanggung oleh PT PLN (Persero) Cost is borne by PT PLN (Persero)
2017	RSM Indonesia	3 Tahun 3 Years	Rusli Munir	Biaya ditanggung oleh PT PLN (Persero) Cost is borne by PT PLN (Persero)
2016	RSM Indonesia	3 Tahun 3 Years	Rusli Munir	Biaya ditanggung oleh PT PLN (Persero) Cost is borne by PT PLN (Persero)

JASA LAIN YANG DIBERIKAN AKUNTAN

Pada Periode 2020, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik PLN Enjiniring memberikan jasa lain selain jasa Audit Laporan Keuangan, yaitu Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Pengendalian Internal.

ANOTHER SERVICES GIVEN BY ACCOUNTANT

During 2020 period, PLN Enjiniring's Public Accountants and Public Accountant Firm provided other services besides Financial Statement Audit services, namely Performance Evaluation Reports and with Laws and Regulations Compliance Report and Internal Control.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sistem pengendalian intern merupakan aspek penting dalam manajemen perusahaan yang sehat dan aman. Sistem pengendalian intern dibangun untuk memenuhi beberapa tujuan, antara lain menjamin semua kegiatan usaha Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut terdiri atas undang-undang, peraturan pemerintah, otoritas pengawas dan ketentuan intern Perusahaan. Selain itu, system pengendalian intern yang efektif dapat membantu Perusahaan menjaga asset yang dimiliki, menjamin tersedianya pelaporan keuangan yang akurat, meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Penerapan sistem pengendalian intern pada tingkat Dewan Komisaris adalah dengan melakukan pengawasan dan pemberian nasehat terkait kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan serta pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sedangkan, penerapan sistem pengendalian intern pada tingkat Direksi adalah dengan menerapkan kebijakan dan prosedur Perusahaan secara konsisten dan memenuhi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penerapan tersebut antara lain terkait dengan kegiatan operasional, manajemen risiko, rencana strategis, pembagian tugas, pendelegasian wewenang, serta kebijakan akuntansi yang memadai.

Perusahaan terus mendorong upaya peningkatan system pengendalian intern yang efektif. Pengendalian intern menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur dalam setiap kegiatan di unit kerja sehingga apabila terjadi penyimpangan, maka dapat diketahui secara dini dan dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Perusahaan memiliki Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang berperan dalam mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian intern yang dilakukan oleh manajemen Perusahaan. SPI senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip GCG dapat berjalan sesuai koridornya.

The internal control system is an important aspect in a healthy and safe company management. The internal control system is built to fulfill several objectives, including ensuring that all of the Company's business activities comply with applicable regulations such as laws, government regulations, supervisory authorities and the Company's internal provisions. Beside that, an effective internal control system can help the Company in keeping its assets safe, ensure the availability of accurate financial reporting, improves company's compliance with applicable regulations, reduce the risk of loss, deviation and violations of precautionary aspects.

The implementation of an internal control system at the Board of Commissioners are supervising and providing advice for adequacy and fairness in preparing financial reports as well as managing risk by observing the precautionary principle. Meanwhile, the implementation of the internal control system at the Board of Directors is to consistently implement Company policies and procedures and comply with applicable regulations. These applications are related to operational activities, risk management, strategic plans, tasks distributions, delegation of authority, and adequate accounting policies.

The company continues to encourage the efforts to improve an effective internal control system. Internal control is an integrated part of the systems and procedures in every work unit activities so that if there is a deviation it will be recognize earlier and corrective action can be taken by concerned the work unit. The Company has an Internal Control System (SPI) which plays a role in evaluating the adequacy and effectiveness of the internal control carried out by the Company's management. SPI always conducts internal supervision by taking a systematic approach so that the implementation of GCG principles can run according to its corridor.





Dalam melaksanakan audit, SPI menggunakan pendekatan berbasis risiko (Risk Based Audit). SPI memiliki Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang antara lain mengatur tentang sasaran pemeriksaan yang akan dilakukan pada tahun bersangkutan. Sasaran pemeriksaan dalam PKPT mencakup pemeriksaan pengendalian keuangan dan pengendalian operasional dan kepatuhan. Pemeriksaan operasional keuangan meliputi pemeriksaan penyusunan RKAP dan Laporan Keuangan, pemenuhan kebutuhan pendanaan, pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan Perusahaan, pemantauan persekot dinas, mitigasi risiko finansial, pelaksanaan evaluasi realisasi RAB, penagihan dan pengelolaan piutang pelanggan, laporan kinerja Perusahaan, pemantauan utang Perusahaan, pencatatan dan penghapusan aset, pengembangan sistem dan prosedur akuntansi, serta pelaksanaan pengakuan, pencatatan dan pelaporan secara menyeluruh/ sampling. Sedangkan, pemeriksaan operasional meliputi pemeriksaan bidang pemasaran, pengembangan usaha, keuangan, akuntansi, SDM, umum, transmisi dan distribusi, pembangkitan, Sekretaris Perusahaan, serta Satuan Manajemen Mutu dan Risiko.

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Perusahaan senantiasa melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian intern di Perusahaan dan memberikan usulan perbaikan dalam mencapai peningkatan yang berkelanjutan dari proses lini yang ada. Segala sesuatu terkait dengan permasalahan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan kepada Direksi. Langkah-langkah tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalkan risiko. Laporan juga disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite-Komite yang telah dibentuk.

In conducting audits, Internal Control System (SPI) uses a risk-based approach (Risk Based Audit) Internal Control System (SPI) has Annual Supervision Working Program (PKPT), which among other thing, regulates inspection targets to be carried out in the relevant year. The objectives of the examination in PKPT include auditing financial controls, operational control and compliance. The financial operational examination includes examining the RKAP drafting and financial statement, funding needs fulfillment, Company's financing budgets and revenue management, official sector monitoring, mitigating financial risks, evaluating the RAB usage, collecting and managing customer account receivables, reporting on the Company's performance, monitoring the Company's debts, recording and writing off assets, developing accounting systems and procedures, as well as the implementation of recognition, recording and reporting as a whole / sampling. Meanwhile operational examination covers marketing examination, bussiness development, finance, human resources, general, transmission, and generators distribution, company secretariate, quality and risk management unit.

INTERNAL CONTROL SYSTEM EVALUATION

The Company continuously evaluates the implementation of the internal control system and provides improvement recommendations in achieving continuous improvement of the existing line processes. Everything related to the adequacy of internal control has been reported to the Board of Directors. Follow-up have been taken to minimize the risk. Reports are also submitted to the Board of Commissioners through established Committees

KESESUAIAN PENGENDALIAN INTERN DENGAN KERANGKA COSO

Sistem pengendalian intern Perusahaan telah sesuai dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO) di tahun 2013. Tujuan pengendalian intern menurut COSO meliputi tujuan operasional, tujuan pelaporan dan tujuan kepatuhan. Hal ini sesuai dengan tujuan sistem pengendalian intern Perusahaan yang telah diuraikan di atas.

Tujuan operasional berkaitan dengan efektivitas efisiensi operasi. Tujuan pelaporan berkaitan dengan kepentingan pelaporan keuangan yang memenuhi kriteria andal, tepat waktu, transparan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh regulator maupun Perseroan. Sedangkan tujuan kepatuhan berkaitan dengan kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Menurut COSO, unsur-unsur pengendalian intern meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi;
5. Kegiatan pemantauan.

COMPATIBILITY OF INTERNAL CONTROL WITH THE COSO FRAMEWORK

The company internal control system has been align with COSO's (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) Internal Control Integrated Framework in 2013. Internal control objectives according to COSO include operational objectives, reporting objectives and compliance objectives. This is in accordance with the objectives of the Company's internal control system as described above.

Operational objectives are concerned with the effectiveness of operating efficiency. The purpose of reporting is related to the interest of financial reporting that meets the criteria of being reliable, timely, transparent and other requirements set by regulators and the Company. According to COSO, the elements of internal control include the following components:

1. *Control environment;*
2. *Risk assessment;*
3. *Control Activities*
4. *Information and Communication;*
5. *Monitoring Activities*



Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance





Sistem Manajemen K3

HEALTH AND SAFETY SYSTEM MANAGEMENT

SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) adalah bagian dari system manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Penerapan SMK3 bertujuan untuk:

- Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi;
- Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen dan pekerja/karyawan;
- Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas.

SMK3 menjadi salah satu fokus utama korporat dalam implementasi SMK3 di PT PLN Enjiniring. PT PLN Enjiniring menerapkan SMK3 agar tidak terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja baik di PT PLN Enjiniring Kantor Pusat maupun di CNG Plant Bangkanai. Program kerja SMK3 disusun melalui lima elemen yaitu:

- *Man*, menyiapkan personal dan Tim pendukung penerapan SMK3 termasuk sertifikasi dan pelatihan;
- *Machine*, menyiapkan dan memasang instalasi pendukung K3 seperti penangkal petir, hydrant, alarm, dll;
- *Method*, menyiapkan dan menyusun dokumen K3 seperti pedoman, prosedur, intruksi kerja, formulir dll;
- *Management*; menerapkan K3 ke dalam manajemen perusahaan dengan melakukan pemeliharaan dokumen K3, melakukan HIRARC, pemeriksaan kesehatan serta membuat system system pendukung implementasi K3;

SMK3 (Occupational Safety and Health Management System) is part of the company's overall management system in order to control risks related to work activities in order to create a safe, efficient and productive workplace.

The implementaion of Health and Safety System to aims:

- *Increasing the effectiveness of planned, measured, structured and integrated health and safety system;*
- *Prevent and reduce accidents and diseases in the working place by involving management and workers / employees as the elements;*
- *Creating a safe, comfortable and efficient workplace to boost productivity.*

Health and safety system management is one of the company main focus. PT. PLN Enjiniring implemented their health and safety system management to prevent accident and dieses arrising because of the work weather in PT PLN enjiniring head quarter or in CNG Plant Bangkanai. The Health and safety system management work program is structured through five elements, namely:

- *Man, preparing the personnel and support team to implementing the health ad safety system management including certification and training;*
- *Machine, prepare and install supporting installations of occupational health and safety management systems such as lightning rods, hydrant, alarm, etc;*
- *Method, drafting and repairing health and safety managemnet system documents such as guidelines, procedures, working instructions, forms, etc;*
- *Management; implementing the health and safety management system in company's management by maintaining the health and safety management system documents, conducting HIRARC, health checks and creating support system in impementaion of the health and safety management system;*

- Money, menyiapkan anggaran untuk mendukung pemenuhan penerapan SMK3.

Berikut pelaksanaan Sistem Manajemen K3 Tahun 2020:

- Pelaksanaan simulasi Tanggap Darurat kebakaran
- Pelaksanaan Audit Internal K3 untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SMK3 dengan Nilai 92,17%
- Pelaksanaan sertifikasi disnaker AK3U
- Pelaksanaan sosialisasi SMK3
- Pelaksanaan MCU (Medical Check Up) pada pegawai dengan kategori umur 45 tahun ke atas

Sasaran kegiatan K3 pada tahun 2020 telah tercapai dengan hasil kecelakaan kerja nihil

- Money, prepare a budget to support the fulfill the implementaion of health and safety management system.

Following is the implementation of 2020 Health and safety management system :

- Emergencies respons training.
- Internal audit of the Health and Safety Management System to measure the compliance of Health and Safety Management System with 92,17% on score.
- Implementation of AK3U Manpower certification
- Socialization of Health and Safety Management System
- Medical Check Up for the employee above 45 years old.

The target of Health and Safety activities in 2020 has been achieved with zero work accidents.



Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance





Sistem Teknologi Informasi

Information Technology System

Sejalan dengan visinya untuk menjadi perusahaan enjiniring terkemuka di Asia, PLN Enjiniring terus berbenah untuk tumbuh dan berkembang dalam memenuhi harapan stakeholders. Di tengah perkembangan dunia yang semakin kompleks, PLN Enjiniring senantiasa mengikuti perkembangan zaman salah satunya dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI) sebagai alat penyebaran informasi sekaligus sistem kontrol di dalam aktivitas perusahaan.

Di PLN Enjiniring, penerapan Teknologi Informasi dilakukan oleh Sub-bidang Teknologi Informasi (TIF) yang dikelola di bawah Sekretariat Perusahaan. Berikut ini adalah beberapa kegiatan utama bidang TIF PLNE :

In line with its vision to become a leading engineering company in Asia, PLN Enjiniring continues to improve to grow and develop in meeting stakeholder expectations. In the midst of an increasingly complex world development, PLN Enjiniring continues to keep abreast of the times one of which is by using Information Technology (IT) as a means of disseminating information as well as a control system in company activities.

At PLN Enjiniring, the application of Information Technology is carried out by the Information Technology Sub-sector (TIF) which is managed under the Corporate Secretariat. Following are some of the main activities in the field of TIF PLNE:

KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

Berdasarkan Keputusan Direksi No.14.001.K/DIR/PLNE/XI/2017 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Jabatan PT PLN Enjiniring menyebutkan bahwa, tugas pokok Bidang Teknologi Informasi (TIF) pada Sekretariat Perusahaan antara lain:

- Menyusun kebijakan (*governance*), *roadmap* dan pengamanan operasi teknologi informasi;
- Merancang dan mengembangkan aplikasi secara periodik.
- Mendukung operasi dan mengendalikan aplikasi secara periodik.
- Mengoperasikan dan mengelola jaringan internet dan intranet di PT PLN Enjiniring.
- Menyiapkan fasilitas kerja berbasis teknologi informasi
- Menjamin kehandalan dan ketersediaan operasi dan infrastruktur di Sub Bidang Teknologi Informasi
- Mengevaluasi pelaksanaan peremajaan data dan informasi, serta supervise kegiatan berbasis aplikasi di Sekretariat Perusahaan

INFORMATION TECHNOLOGY POLICY

Based on the Directors Decree No. 14.001.K / DIR / PLNE / XI / 2017 regarding the Organizational Structure and Main Tasks of PT PLN Enjiniring stated that, Information Technology (TIF) sector main duties at the Secretariat include:

- *Formulating policies (governance), roadmaps, and securing information technology operations;*
- *Periodically Designing and developing an application.*
- *Operation support and controlling an application periodically.*
- *Operate and managing PT PLN Enjiniring internet and intranet.*
- *Sets up working facilities based on information technology.*
- *Ensuring the reliability and availability of operations and infrastructure in the Information Technology department/Sub-Sector.*
- *Evaluate the implementation of data and information update, as well as supervise application-based activities at the Company Secretariat*

Selain terkait tugas pokok, teknologi informasi juga memiliki kebijakan dan pedoman umum tata kelola teknologi informasi yang tertuang pada Keputusan Direksi No. 12.001.K/DIR/PLNE/XI/2018 dan kebijakan dan pedoman umum keamanan informasi elektronik dan teknologi informasi yang tertuang pada Keputusan Direksi No. 13.001.K/DIR/PLNE/XI/2018.

Sebagai pedoman pengembangan dan aktivitas operasional TI, berikut adalah prosedur-prosedur di bidang TI yang berlaku.

- a) PE.PLNE.P.02.01 Prosedur Penyusunan IT Master Plan
- b) PE.PLNE.P.02.02 Prosedur Penyusunan Anggaran TI
- c) PE.PLNE.D.02.05 Prosedur Penggunaan Aplikasi Perangkat Enjiniring
- d) PE.PLNE.D.02.06 Prosedur Pengelolaan Akun Pengguna
- e) PE.PLNE.D.02.08 Prosedur Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi
- f) PE.PLNE.D.02.11 Prosedur Bantuan Penggunaan Teknologi Informasi
- g) PE.PLNE.A.02.01 Prosedur Pengelolaan Penanganan Insiden TI
- h) PE.PLNE.A.02.02 Prosedur Pengembangan Dan Pengujian Aplikasi Sistem Informasi

Apart from its main duties, information technology (IT) also has its own policies and general guidelines as stipulated in the Board of Directors Decree No. 12.001.K / DIR / PLNE / XI / 2018, and guideline and general policies for electronic information security and information technology as stated in Board of Directors Decree No. 13.001.K / DIR / PLNE / XI / 2018.

As a guideline for IT development and operational activities, the following are applicable IT procedures.

- a. *PE.PLNE.P.02.01 IT Master Plan Preparation Procedure*
- b. *PE.PLNE.P.02.02 IT Budgeting Procedure*
- c. *PE.PLNE.D.02.05 Engineering Device Applications Usage Procedure*
- d. *PE.PLNE.D.02.06 User Account Management Procedure*
- e. *PE.PLNE.D.02.08 Information System Application Usage Training Procedure*
- f. *PE.PLNE.D.02.11 Information Technology Usage Assisting Procedure*
- g. *PE.PLNE.A.02.01 IT Incident Management Procedure*
- h. *PE.PLNE.A.02.02 Information System Application Development and Testing Procedure*

ROADMAP TEKNOLOGI INFORMASI

Sejalan dengan telah disahkannya Keputusan Direksi no. 13.002.K/DIR/PLNE/XII/2018 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi (IT Master Plan) PT PLN Enjiniring tahun 2019-2023, sepanjang tahun 2020, subbidang Teknologi Informasi melaksanakan inisiatif – inisiatif pekerjaan yang ada pada tahun 2020 diantaranya:

1. Optimalisasi SAP
2. Optimalisasi Sunfish
3. Optimalisasi Primavera
4. Implementasi E-Procurement

INFORMATION AND TECHNOLOGY ROADMAP

Along with the ratification of the Decree of the Board of Directors no. 13.002.K/DIR/PLNE/XII/2018 regarding PT PLN Enjinirings' IT Master Plan (Rencana Induk Teknologi Informasi) 2019-2023, through out 2020, Information Technology sub-Sector carry out existing work initiatives in 2020 including:

1. *SAP optimization*
2. *Sunfish Optimization*
3. *Primavera Optimization*
4. *Implementation of E-Procurement*



Selain melaksanakan inisiatif pekerjaan ITMP, pada tahun 2020 juga dilakukan review terhadap pencapaian IT Master Plan Tahun 2019 dan diputuskan pembaruan ITMP melalui Keputusan Direksi Nomor 30.001.K/DIR/PLNE/XI/2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi (IT Master Plan) PT PLN Enjiniring Tahun 2020 – 2023.

In addition to initiates ITMP work, In 2020, a review of 2019 IT Master Plan achievements was held and it was decided to renew the ITMP through the Decree of the Board of Directors Number 30.001.K/DIR/PLNE/XI/2020 concerning in Information Technology Master Plan (IT Master Plan) of PT PLN Enjiniring Year 2020 – 2023.

PELAKSANAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Kegiatan subbidang Teknologi Informasi PLN Enjiniring selama tahun 2020 mencakup:

1. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi
2. Pelaksanaan Milestone Investasi
3. Pelaksaaan IT Master Plan
4. Layanan Operasional TI
5. Penyelesaian Rekomendasi dalam LHA SPI
6. Sinergi Anak Perusahaan PLN dengan PT ICON+
7. Manajemen Risiko, KPKU dan GCG

1. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi

Adapun pengembangan system teknologi informasi selama tahun 2020 sebagai berikut.

IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGY

The activities of the PLN Enjiniring Information sub-sector in 2020 includes:

1. Information Technology System Development
2. Implementation of the Milestone Investment
3. IT Master Plan Implementation
4. IT Operational Services
5. Recommendation Settlement in LHA SPI
6. The Synergy between PLN Subsidiary and PT ICON+
7. Risk Management, KPKU and GCG

1. Information Technology System Development

The development of information technology systems during 2020 is as follows :

No.	Nama	Fungsi	Status terakhir 2020
	Name	Function	Last Status in 2020
1	Digital Signature	Aplikasi yang digunakan untuk menggantikan tanda tangan secara manual pada dokumen cetak yang merupakan salah satu respon atas kebijakan Work from Home (WFH) COVID19	Berfungsi dengan baik
	Digital Signature	An application that is used to replace the manual signature on a printed document which is one of the responses to the COVID19 Work from Home (WFH) policy	Works good
2	Aplikasi e-Procurement	Aplikasi yang berguna sebagai sarana pengadaan barang/jasa, informasi pengadaan, sesuai dengan Pedoman pengadaan barang/jasa yang berlaku di PT PLN (Persero) yang dilakukan secara online/elektronik dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi	Diimplementasikan dengan join organisasi di Aplikasi e-Procurement milik PT PLN (Persero). PT PLN Enjiniring diberikan akses sebagai perencana dan pelaksana pengadaan dibawah hirarki baru di aplikasi tersebut

	<i>e-Procurement Application</i>	<i>Applications that are useful as a means of procuring goods / services, procurement information, in accordance with the Guidelines for the procurement of goods / services that apply at PT PLN (Persero) which is carried out online / electronically by using information technology facilities</i>	<i>Implemented with a joint organization in the e-Procurement Application owned by PT PLN (Persero). PT PLN Enjiniring is given access to plan and implement procurement under the new hierarchy in the application</i>
3	Homer Pro	Software yang memiliki fitur utama untuk melakukan simulasi system PLTS Hybrid dan Baterai dan akan digunakan khususnya pada Proyek PLT Hybrid Medang - Sumbawa	Berfungsi dengan baik
	<i>Homer Pro</i>	<i>Software that has the main features for simulating the PLTS Hybrid and Battery systems and will be used especially in the PLT Hybrid Medang - Sumbawa Project</i>	<i>Works good</i>
4	Aplikasi RICO	Aplikasi untuk mengelola risiko di PT PLN Enjiniring	Rilis fitur baru yaitu threshold KRI dan ditayangkan dalam bentuk grafik
	<i>RICO Application</i>	<i>Application for managing risk at PT PLN Enjiniring</i>	<i>Release of a new feature a new feature, namely the threshold of KRI and displayed in graphical form</i>
5	Data Loss Prevention	Aplikasi yang berfungsi untuk menambah lapisan keamanan pada data perusahaan yang berisi informasi sensitif agar tidak terekspos pada pihak yang tidak berwenang	Berfungsi dengan baik
	<i>Data Loss Prevention</i>	<i>An application that serves to add a layer of security to company data that contains sensitive information so that it is not exposed to unauthorized parties</i>	<i>Works good</i>
6	Data Recovery Center	Server yang digunakan untuk data center cadangan	Berfungsi dengan baik, namun terdapat kekurangan jumlah memory jika dibandingkan dengan Data Center Utama
	<i>Data Recovery Center</i>	<i>Server yang digunakan untuk data center cadangan</i>	<i>Works good, but there is a lack of memory when compared to the Main Data Center</i>
7	IT Service Manajemen (Playanan)	Aplikasi yang berfungsi untuk pengelolaan sistem teknologi informasi (TI) yang secara filosofis terpusat pada perspektif konsumen layanan TI terhadap bisnis perusahaan	Berfungsi dengan baik, menunggu jadwal launching
	<i>IT Service Manajemen (Playanan)</i>	<i>Applications that function for the management of information technology (IT) systems that are philosophically centered on the perspective of IT service consumers on the company's business</i>	<i>Works good, waiting for launch schedule</i>





8	Aplikasi Knowledge Management System	Aplikasi berbasis Web yang mengacu pada sebuah sistem untuk mengelola pengetahuan dalam organisasi agar dapat mendukung penciptaan, akuisisi, penyimpanan, penyebaran, dan penggunaan/pemanfaatan pengetahuan	Berfungsi dengan baik, menunggu jadwal launching
	<i>Knowledge Management System Application</i>	<i>Web-based application which refers to a system for managing knowledge in an organization in order to support the creation, acquisition, storage, dissemination, and use / utilization of knowledge.</i>	<i>Works good, waiting for launch schedule</i>

2. Pelaksanaan Milestone Investasi

Subbidang Teknologi Informasi berhasil menyelesaikan 100% milestone atas pekerjaan – pekerjaan investasi sebagai berikut:

- a. Pengadaan Aplikasi integrator selesai sampai dengan permohonan pengadaan namun selanjutnya dilakukan pembatalan
- b. Perangkat & Tata Kelola Keamanan Informasi
 - I. Pengadaan & Implementasi DLP proses pengadaan selesai sampai dengan proses pembayaran dan implementasi
 - II. Pengadaan DC / DRC proses pengadaan selesai sampai dengan proses pembayaran
 - III. Pra audit ISO27001
 - IV. Pengadaan Aplikasi IT Service Management proses pengembangan selesai sampai dengan proses pembayaran
- c. Pengembangan Aplikasi Knowledge Management proses pengembangan selesai sampai dengan proses pembayaran

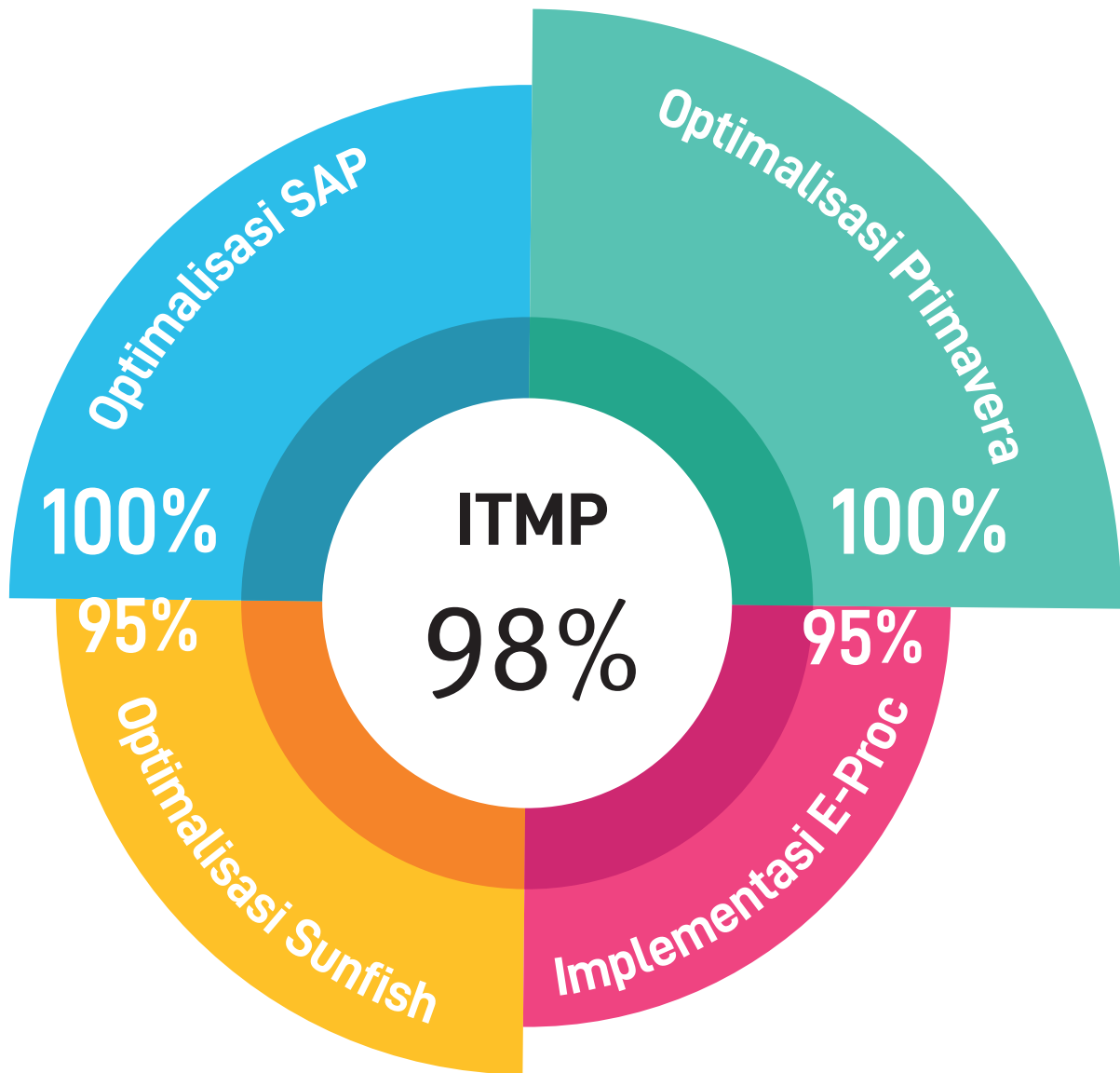
2. Implementation of the Milestone Investment

The Information Technology sub-sector has successfully 100% completed the milestones for investment works as follows:

- a. Completed the integrator application procurement until the application submitted, but then it got canceled
- b. Governance & Information Security Devices
 - I. Procurement & Implementation of DLP the procurement process is completed until payment and implementation process
 - II. Procurement DC / DRC, the procurement process is completed until its payment process
 - III. ISO27001 pre audit
 - IV. IT Service Management Applications procurement, the development process is completed until its payment process
- c. Knowledge Management Application Development, the development process is completed until its payment process

3. Pelaksanaan IT Master Plan

3. Implementation of IT Master Plan



4. Layanan Operasional TI

Subbidang TI melaksanakan dukungan operasi TI kepada pengguna melalui layanan Helpdesk & penanganan insiden Sistem TI. Subbidang TI juga melaksanakan kegiatan pemeliharaan yang meliputi kegiatan backup, pengecekan kondisi Perangkat Enjiniring, pengecekan masa berlaku lisensi layanan TI dan pemeliharaan/ optimalisasi penggunaan lisensi. Subbidang TI juga melaporkan tingkat penggunaan aplikasi Perangkat Enjiniring setiap bulan kepada bidang-bidang terkait.

4. IT Operational Services

IT sub-sector carries out IT support to users through Helpdesk services & IT System Incident Handling. IT sub-sector also maintenance activities including, backup activities, checking the condition of Engineering Equipment, checking the validity period of IT service licenses and maintaining / optimizing the uses of license. The IT subdivision also reports the monthly usage level of Engineering Equipment application to the related departments/division.



5. Penyelesaian Rekomendasi dalam LHA SPI

Dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance dan Tata Kelola TI yang baik, Subbidang TI diaudit oleh SPI PT PLN (Persero) grup khusus TI dan audit internal AMI. Sampai dengan bulan Desember, telah selesai dengan tepat waktu sebanyak 12 rekomendasi dari 12 rekomendasi atau 100%.

6. Sinergi Anak Perusahaan PLN dengan PT ICON+

Sinergi antar anak perusahaan PT PLN (Persero) dari sub-bidang teknologi informasi adalah bersinergi dengan PT Indonesia Comnet+ dalam pengembangan aplikasi Virtual Cubicle dan penyediaan infrastruktur khususnya cloud dan layanan internet.

7. Manajemen Risiko, KPKU dan GCG

Dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance, subbidang TI secara rutin bulanan melaporkan mitigasi risiko ke aplikasi RICO. Selain itu, TI juga turut berkontribusi di dalam penyusunan dokumen aplikasi KPKU dan penyediaan eviden untuk penilaian GCG.

5. Completion of Recommendations in LHA SPI

In implementing Good Corporate Governance and good IT governance, IT sub-sector audited by SPI PT PLN (Persero) group specialized in IT and AMI internal audit. As of December, 12 of the 12 recommendations have been completed on time or 100%.

6. Synergy between PLN's subsidiaries and PT ICON+

The synergy between information technology sub-sector from PT PLN (Persero)'s subsidiaries is to synergize PT Indonesia Comnet+ in developing the Virtual Cubicle application and providing infrastructure, especially cloud and internet services.

7. Risk Management, KPKU and GCG

In implementing Good Corporate Governance, IT sub-sector reporting risk mitigation to the RICO application monthly. Beside that, IT also contributed in drafting the document for KPKU application and provided evidence for GCG assessment.

Perkara Hukum Yang Dihadapi PLN Enjiniring

Legal Cases Faced by PLN Enjiniring

Berikut ini adalah informasi tentang perkara hukum yang sedang dihadapi Perusahaan dan Anak Perusahaan:

a. Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

Selama tahun 2020, tidak terdapat perkara hukum yang dihadapi oleh Perusahaan.

b. Perkara Hukum yang Dihadapi Entitas Anak

Selama tahun 2020, tidak terdapat perkara hukum yang dihadapi oleh Entitas Anak Perusahaan.

c. Perkara Hukum yang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2020, tidak terdapat perkara hukum yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

The following information is about some legal cases currently faced by the Company and its subsidiaries:

a. Legal Cases Faced By The Company

There were no legal cases faced by the Company during 2020.

b. Legal Cases Faced by The Subsidiaries

There were no legal cases faced by the Subsidiaries during 2020.

c. Legal Cases Faced by the Board of Commissioners and Directors

There were no legal cases involving members of the Company's Board of Commissioners and Directors during 2020.





Pedoman Perilaku

Code of Conduct

PLN Enjiniring menyadari sepenuhnya bahwa hubungan baik dengan pemangku kepentingan dan peningkatan nilai Pemegang Saham dalam jangka Panjang hanya dapat dicapai melalui integritas bisnis dalam setiap aktivitas perusahaan sebagaimana dituangkan dalam Pedoman Perilaku.

Pedoman perilaku merupakan pedoman bagi setiap individu di perusahaan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Pedoman Perilaku tersebut berisi penjabaran nilai-nilai utama perseroan, pedoman kerja organisasi, hubungan industrial, hubungan stakeholder dan pemerintah. Komitmen terhadap Pedoman Perilaku telah ditandatangani oleh seluruh Pegawai, Dekom dan Direksi PT PLN Enjiniring. Pedoman Perilaku ini telah diperbaharui melalui SK Nomor 23.002.K/DIR/PLNE/XI/2016 tanggal 23 November 2016 tentang Buku Saku Pedoman Perilaku yang sebelumnya dimutakhirkan secara berkala pada tahun 2013 dan 2015.

• Isi Code of Conduct

Code of Conduct mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh Insan PLN Enjiniring.

Code of Conduct berisi hal-hal sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Kewajiban
- III. Visi dan Misi
- IV. Pedoman Perilaku
- V. Sanksi
- VI. Komitmen

• Kepatuhan Terhadap Code Of Conduct

Pada tahun 2020, upaya implementasi Code of Conduct dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya :

PLN Enjiniring is fully aware that good relations with stakeholders and increasing shareholder value in the long term can only be achieved through business integrity in every company activity as outlined in the Code of Conduct.

The code of conduct is a guide for all PLN Enjiniring personel in order to fulfil their duty and functions. The Code of Conduct contains the description of company's core values, organizational work guidelines, industrial relations, stakeholder relations and government. Commitments to the Code of Conduct had been signed by all Employees, Commissioners, and Directors of PT PLN Enjiniring. This code of conduct was updated in November the 23rd 2016 through SK Nomor 23.002.K/DIR/PLNE/XI/2016 in regards to code of conduct handbook which has been updated periodically in 2013 and 2015.

• Code of Conducts Content

The Code of Conduct regulates ethical values policies, stated explicitly as a standard of behaviour that must be followed by all PLN Engineering Personnel.

The Code of Conduct contains the following matters:

- I. Introductory*
- II. Responsibility*
- III. Vision and Mission*
- IV. Code of Conduct*
- V. Penalty*
- VI. Commitment*

• Code of Conduct Complied

In 2020, the efforts to implement the Code of Conduct were carried out in several ways, including:

- a) Sosialisasi Code of Conduct kepada seluruh karyawan/pegawai/outsourcing dilingkungan PT PLN Enjiniring.
- b) Melakukan kegiatan *Collective Action* yang bertujuan mengurangi terjadinya praktek suap dan kecurangan dalam proses bisnis PLNE melalui proses internalisasi terhadap karyawan PLNE dan mensosialisasikan terhadap Mitra Kerja.
- c) Melakukan kegiatan *Complaint Handling Management*, PLNE telah melaksanakannya sesuai laporan kepuasan pelanggan dimana kegiatan tersebut dilakukan secara rutin setiap tahun.

• Jenis Sanksi Pelanggaran Code Of Conduct

Pelanggaran terhadap *code of conduct* pada PLN Enjiniring akan dikenakan hukuman disiplin sesuai yang telah diatur dalam Pedoman Perilaku Perusahaan. Sanksi yang diberikan terdiri dari hukuman Disiplin Ringan, Disiplin Sedang dan Disiplin Berat.

- a) *Code of Conducts Socialization to all employees / workers/ outsourcing of PT PLN Enjiniring.*
- b) *Conducting Collective Action activities, aiming to reduce the occurrence of bribery and fraud in PLNE business process through the internalization to PLNE employees and socializing with Business Partners.*
- c) *Carrying out Complaint Management activities, PLNE has implemented it according to customer satisfaction reports where these activities were being carried out regularly every year.*

• Types of Penalty for Code Of Conduct Violation

Violation against PLN Enjiniring code of conduct will be subject to disciplinary penalties as regulated in the Company's Code of Conduct. The penalty given consist of mild, moderate and heavy discipline.

TABEL JENIS PELANGGARAN CODE OF CONDUCT

TABLE OF TYPES OF VIOLATIONS OF CODE OF CONDUCT

Tingkat Sanksi	Jenis Pelanggaran
<i>Sanction Level</i>	<i>Types of Violations</i>
Disiplin Ringan <i>Mild Discipline</i>	<p>Tidak mentaati ketentuan jam kerja di Perseroan, termasuk meninggalkan kantor tanpa ijin atasan langsung, kecuali untuk keperluan pekerjaan ;</p> <p><i>Not complying with the provisions of working hours in the Company, including leaving the office without direct supervisor's permission, except for work purposes;</i></p> <p>Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (mangkir) selama 1 hari kerja;</p> <p><i>Not coming to work without a valid reason for 1 working day;</i></p>
Disiplin Sedang <i>Moderate Discipline</i>	<p>Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin ringan melakukan perbuatan disiplin ringan kembali ;</p> <p><i>If in the light of a disciplinary sentence to lightly commit a mild disciplinary act again;</i></p> <p>Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (mangkir) selama 2 hari atau lebih secara berturut-turut atau berpencar sampai dengan 4 hari kerja dalam kurun waktu 1 bulan</p> <p><i>Not going to work without valid reasons for 2 days or more in a row or split up to 4 working days in 1 month</i></p> <p>Menyalahgunakan asset milik perseroan untuk kepentingan pribadi maupun orang lain, baik dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan maupun tidak, kecuali dengan seijin Perseroan ;</p> <p><i>Misusing the assets of the company for personal and other interests, either with the intention of obtaining profits or not, except with the permission of the Company;</i></p> <p>Menolak melaksanakan tugas pekerjaan atau perintah yang diberikan Perseroan;</p>





Refusing to carry out work duties or orders given by the Company;

Menolak melaksanakan mutasi jabatan;

Refusing to carry out transfer positions;

Tidak melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab jabatannya;

Not carrying out duties which are the responsibility of his position

Melakukan pelanggaran atas undang-undang dalam lingkup hukum pidana dan atas perbuatan tersebut pegawai divonis hukuman penjara urang 2 (dua) (putusan final);

Violating the law within the scope of criminal law and for the deed the employee is sentenced to sentence 2 (two) (final decision);

Melakukan hal-hal yang dapat mencoreng atau menurunkan nama baik Perseroan atau harkat dan martabat pegawai;

Doing things that can tarnish or ruin the reputation of the Company or the dignity of employees;

Membuat keonaran atau kegaduhan dalam lingkungan kerja;

Make disturbance or noise in the work environment;

Memiliki Perusahaan atau memiliki saham suatu Perusahaan atau bekerja pada suatu Perusahaan lain yang kegiatan usahanya sama dengan Perseroan;

Owning a company or owning shares of a company or working for another company whose business activities are the same as the Company;

Meminta, menerima atau menggunakan, fasilitas atau jasa lainnya dari pihak manapun, yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;

Requesting, receiving or using, other facilities or services from any party, which is known or reasonably suspected to be related to their position or job;

Memberikan atau menjanjikan kepada pihak lain berupa barang, fasilitas atau jasa apapun;

Providing or promising to other parties in the form of goods, facilities or any services;

Melakukan serangan secara fisik (kecuali tindakan pembelaan diri) atau mengancam, mengintimidasi kepada sesama pegawai dan atau Direksi;

Carrying out physical attacks (except self-defense actions) or threaten, intimidate fellow employees and or Directors;

Ceroboh atau lalai dalam melakukan pekerjaan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Perseroran

Careless or negligent in doing work, resulting in a loss for the Company

Disiplin Berat
Heavy Discipline

Pegawai apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin sedang, melakukan perbuatan pelanggaran disiplin sedang kembali;

Employees when undergoing a moderate disciplinary sentence, committing moderate disciplinary offenses once more;

Mengambil dan memberikan atau membocorkan informasi penting atau dokumen penting Perseroan kepada pihak lain;

Taking and providing or leaking important information or important documents of the Company to other parties;

Dengan sengaja merancang atau membuat atau mengarahkan dalam penentuan spesifikasi peralatan sehingga merugikan atau berpotensi merugikan Perseroan atau Vendor baik materil maupun immateril;

Deliberately designing or making or directing in determining the specifications of the equipment so that it is detrimental or potentially detrimental to the Company or the Vendor, both material and immaterial;

Mengerjakan pekerjaan selain untuk kepentingan Perseroan namun menggunakan fasilitas atau inventaris milik Perseroan;

Doing work other than for the interests of the Company but using facilities or inventory belonging to the Company;

Mengerjakan atau turut serta atau membantu mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada Perusahaan atau pihak lain;

Doing or participating or helping to do the work that has been given by the Company to the Company or other parties;

Melakukan perbuatan atau bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan perbuatan yang merugikan atau berpotensi merugikan Perseroan;

Acting or cooperating with other parties to commit actions that are detrimental to or potentially detrimental to the Company;

• **Jumlah Pelanggaran Kode Etik**

Selama tahun 2020, tidak terjadi pelanggaran Kode Etik.

• **Number of Code of Conducts Violations**

There were no code of conduct violations happen in 2020



Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Gratuity Control Policy

Dalam kegiatan bisnis PLN Enjiniring, pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan pihak internal maupun eksternal yang saling menjalin kerja sama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Terkait dengan hubungan bisnis sering terjadi praktek yang muncul dan tidak dapat dihindari yaitu adanya penerimaan, pemberian atau permintaan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Oleh karena itu PLN Enjiniring perlu untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan penerimaan, pemberian atau permintaan hadiah/cinderamata dan hiburan (*entertainment*) dari satu pihak kepada pihak yang lainnya dan tata acara/mekanisme pelaporannya di lingkungan PLN Enjiniring. Hal ini penting untuk dibudayakan di lingkungan PLN Enjiniring sebagai suatu proses pembelajaran bagi Insan PLN Enjiniring dalam mewujudkan visi dan misi PLN Enjiniring dengan perilaku yang bermartabat dan citra yang tinggi dalam hubungan bisnis dengan para pelanggan atau *stakeholdernya*.

• Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Apabila Insan PLN Enjiniring secara langsung mengalami peristiwa gratifikasi baik berupa penerimaan atau penolakan gratifikasi, maka dapat membuat laporan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) PLN Enjiniring melalui aplikasi *Compliance Online System* (COS) dengan mengakses link <http://cos.plne.co.id> atau dengan cara melakukan konfirmasi kejadian gratifikasi melalui email yang dikirim secara otomatis dari aplikasi COS kepada alamat email masing-masing Insan PLN Enjiniring. Selain itu apabila Insan PLN Enjiniring atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada Pedoman

In PLN Enjiniring business activities, in general it cannot be separated from the relationships and interactions with internal and external parties who mutually establish harmonious, harmonious and sustainable cooperation without forgetting the ethics and principles of good corporate governance.

In relation to business relationships, work activities often occur and cannot be avoided, namely the acceptance of gifts / souvenirs and entertainment (entertainment) from one party to another. Therefore it is necessary for PLN Enjiniring to regulate matters related to acceptance, giving and request for gifts / souvenirs and entertainment (entertainment) from one party to another and the procedure / reporting mechanism within the PLN Enjiniring environment. It is important to be cultured within the Company as a learning process for company members in realizing the Company's vision and mission with dignified behavior and a high image in business relationships with its customers and its stakeholders.

• Gratuity Control Management

If PLN Engineering Personnel directly experience a gratification event in the form of gratification acceptance or rejection, then they can make a report to the PLN Engineering Gratification Control Unit (UPG) through the Compliance Online System (COS) application by accessing the link <http://cos.PLN Enjiniring.co.id> or by confirming the event of gratification via email sent automatically from the COS application to the email address of each PLN Enjiniring Personnel. Moreover, if any PLN Enjiniring member or third parties who are aware of violations of the provisions contained in the Gratification Guidelines, must immediately report the intended customer according to the applicable

Pengendalian Gratifikasi, agar segera melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku di PLN Enjiniring sebagaimana diatur dalam sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yaitu melalui telepon, *Short Message Service* (SMS), dan/atau *Whatsapp* ke nomor 08111995177, email ke wbs@plne.co.id, dan/atau surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PLN Enjiniring dengan disertai bukti/eviden yang jelas, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan. PLN Enjiniring menjamin bahwa proses pelaporan yang dilakukan oleh Insan PLN Enjiniring maupun pihak ketiga akan dijaga kerahasiannya.

• Sosialisasi Gratifikasi

Dalam rangka menjamin bahwa Peraturan Direksi PT PLN Enjiniring Nomor:02.001.K/010/DIR/PLN ENJINIRING/II/2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di PT PLN Enjiniring ("Pedoman Pengendalian Gratifikasi PLNE") ini dapat diketahui oleh seluruh Insan PLN Enjiniring dan seluruh pihak ketiga yang berhubungan dengan PLN Enjiniring, agar seluruh pihak-pihak yang terkait di lingkungan PLN Enjiniring untuk melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Menginformasikan ketentuan larangan penerimaan gratifikasi beserta jenis-jenis gratifikasi sesuai dengan yang diatur di dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi PLN Enjiniring.
2. Menugaskan kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) dan Fungsi Humas di lingkungan PLN Enjiniring untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh Insan PLN Enjiniring maupun pihak ketiga/ eksternal terkait dengan adanya Pedoman Pengendalian Gratifikasi PLN Enjiniring ini.
3. Menugaskan Fungsi Pengadaan, Fungsi Pemasaran dan fungsi lain di lingkungan PLN Enjiniring yang memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga untuk melakukan Penyampaian Pedoman Pengendalian Gratifikasi PLN Enjiniring ini kepada seluruh pihak terkait dengan mata rantai supply di lingkungan PLN Enjiniring (Penyedia Barang/Jasa, Agen, Distributor, Kontraktor, Sub-Kontraktor, Konsultan, Auditor/Assessor dan Pelanggan serta Stakeholder lainnya).

provisions in the company or report through the Whistle Blowing System (WBS) such as telephone Short Message Service (SMS), and/or Whatsapp to 08111995177, email to wbs@plne.co.id and/or a letter addressed to the President Director of PLN Enjiniring accompanied by clear, detailed and accountable evidence/evidence. The company guarantees that the reporting process carried out by PLN Enjiniring employees and third parties will be kept confidential.

• Gratuity Socialization

In order to ensure that PT PLN Enjiniring Board of Directors Regulation Number: 02.001.K/010/DIR/PLN ENJINIRING/II/2018 concerning Guidelines for Gratification Control at PT PLN Enjiniring ("Guidelines for Controlling PLNE Gratifications") can be known by all PLN Enjiniring employees and all third parties related to PLN Enjiniring, all parties involved in the PLN Enjiniring environment must do the following.

1. *Informing the provisions on the prohibition of receiving gratuities along with the types of gratuities in accordance with those stipulated in the PLN Engineering Gratification Control Guidelines.*
2. *Assigned Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) and Public Relations Functions within PLN Enjiniring to continuously provide information to all employees and third / external parties regarding PLN Engineering Gratification Control Guidelines.*
3. *Assign the Procurement Functions, Marketing Functions and other functions within PLN Enjiniring that have a working relationship with third parties to deliver PLN Engineering Gratification Control Guidelines to all parties related to PLN Enjiniring supply chain (Goods/ Services Supplier, Agents, Distributors, Contractors, Sub-Contractors, Consultants, Auditors/Assessors and Customers and other Stakeholders).*



Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance





4. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun juga terkait dengan ketentuan terkait gratifikasi yang berlaku.
5. UPG PLN Enjiniring memonitor pelaksanaan/ implementasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi PLN Enjiniring dan memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Utama mengenai implementasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi termasuk laporan-laporan yang timbul setelah adanya ketentuan ini.

4. *Providing clear information to any party regarding the applicable regulations.*
5. *UPG PLN Engineering monitors the implementation of the PLN Engineering Gratification Control Guidelines provides periodic reports (once every 6 months) to the President Director regarding its implementation, including reports that arise after this provision*

Whistleblowing System

Whistleblowing System

Whistleblowing System (WBS) adalah system yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonym dan mandiri (independent) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta anggota perusahaan dan mitra kerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan PLN Enjiniring.

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 04.004.K/DIR/PLNE/IV/2019 tanggal 04 April 2019 Tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), Landasan penyusunan system pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) adalah

1. Keinginan PLN Enjiniring untuk terus menegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di seluruh lingkungan PLN Enjiniring, khususnya yang berkaitan dengan integritas dan transparansi;
2. Sebagai komitmen perusahaan untuk menyediakan media bagi penegakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab;
3. Sebagai salah satu alat yang ampuh dalam mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di PLN Enjiniring

- **Maksud, Tujuan dan Manfaat Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)**

Maksud diberlakukannya Pedoman ini adalah untuk menyelenggarakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang memberikan kepastian dan keyakinan bahwa laporan yang disampaikan yang disampaikan akan ditindaklanjuti oleh Direktur Utama sekaligus memberikan keamanan Pelapor pelanggaran dan penerima laporan melalui jaminan kerahasiaan Pelapor, penyediaan perlindungan Pelaporan. Tujuan diberlakukannya pedoman ini adalah:

Whistleblowing System (WBS) is a system that manages complaints / disclosures regarding unlawful act, confidential unethical / improper actions, anonymous and independent manner which used to optimize the participation of company members and partners in exposing violations that occur in the PLN Engineering.

Based on the Decree of the Board of Directors Number: 04.004.K/DIR/PLNE/IV/2019 dated April 4th, 2019 concerning the Whistleblowing System, the basis for the preparation of the whistleblowing system is

1. *PLN Enjiniring's desire to continue to uphold the principles of good corporate governance throughout the PLN Enjiniring environment, especially those related to integrity and transparency;*
2. *As the company's commitment to providing the media for upholding the principles of good corporate governance, thus creating a clean and responsible work situation;*
3. *As one of the powerful tools in preventing and detecting potential violations at PLN Enjiniring*

- **Whistleblowing System**

The purpose of the enactment of this Guideline is to perform a Whistleblowing System which provides certainty and confidence that the submitted reports will be followed up by the President Director as well as providing security for the whistleblower and the report recipient through guaranteeing the confidentiality of the Reporter, providing Reporting protection. The aims of this guideline are:





1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong Pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun *non finansial*, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra perusahaan
2. Mempermudah penanganan yang efektif terhadap laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas Pelapor serta tetap menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya.
3. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi Pelapor dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal.
4. Mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini.
5. Meningkatkan reputasi Perusahaan.

- **Pengelola Proses Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)**

Unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan terhadap implementasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) adalah Kepala Satuan Pengawas Intern (KSPI) selaku Chief Compliance Officer (CCO). Selanjutnya apabila diperlukan secara berkala, CCO dapat mengadakan penyempurnaan dalam rangka perbaikan secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan perkembangan bisnis Perusahaan

1. *Creating a conducive climate and encouraging reporting of violations that can cause financial and non-financial losses, including things that can damage the company's image*
2. *Facilitate the effective of violations reports handling and at the same time protect the confidentiality of Whistleblower identity and keep this information in a distinctive archive that is guaranteed to be safe.*
3. *Develop a policy and infrastructure to protect the Whistleblower from retaliation from internal and external parties.*
4. *Reducing losses due to violations through early detection.*
5. *Improve Company reputation.*

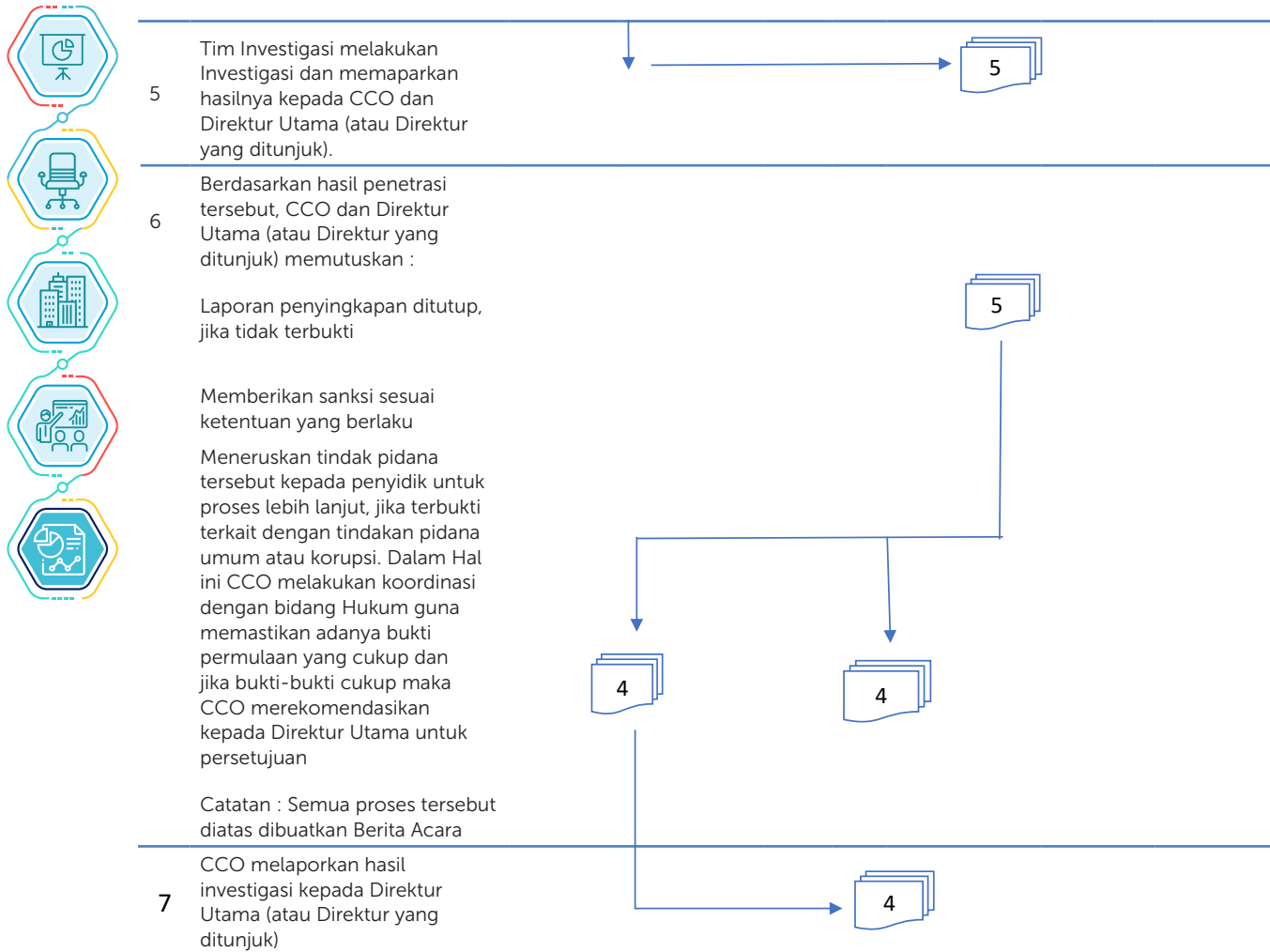
- **Whistleblowing System Process Manager**

The work unit responsible for the implementation and management of the Whistleblowing System implementation is the Head of the Internal Supervisory Unit (KSPI) as the Chief Compliance Officer (CCO). Furthermore, if necessary, the CCO can make periodical improvements in the context of continuous improvement based on Company's business development.

TABEL PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM MANAGEMENT TABLE

No.	Prosedur <i>Procedur</i>	Pelapor <i>Reporter/ Informan</i>	Pengelolaan WBS		Dewan Komisaris <i>Commissioner Board</i>	Direktur Utama <i>President Director</i>	Tim Investigasi <i>Investigation Team</i>
			TC	CCO			
1	Membuat pengaduan/ penyingkapan dan mengirimkan kepada Pengelola WBS melalui sarana/media sebagai berikut : Telephone : 62-811 1995 177 Email : wbs@plne.co.id Surat : Kepada Direktur Utama	1					
2	Menerima pelaporan/ pengaduan/penyingkapan, lalu mencatat dan menuangkan ke dalam format standard yang menghasilkan Laporan penerimaan kontrak sesuai kategori lingkup pengaduan/penyingkapan Laporan Penyingkapan		2				
3	Menyampaikan laporan penyingkapan (disclosure report) melalui email atau media internet yang dapat di akses oleh Tim Compliance/CCO/Dewan Komisaris/Direktur Utama (sesuai dengan kategori terlapor)		3		3		
4	Tim Compliance melakukan penelaahan awal/klarifikasi terhadap pengaduan/ penyingkapan tersebut dan membuat resumennya. Kemudian mempresentasikan kepada CCO dan Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama. Berdasarkan hasil presentasi tersebut CCO dan Direktur Utama (atau Direktur yang ditunjuk) memutuskan tindak lanjut : dihentikan, jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal bekerja sama dengan eksternal investigator jika substansi pengaduan/penyingkapan terkait dengan citra/reputasi PT PLN Enjiniring dan/atau menimbulkan kerugian yang besar dan/atau belum pernah ditindaklanjuti oleh SPI. bekerja sama dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan/ atau Sekuriti sesuai dengan substansi pengaduan/ penyingkapan dilakukan oleh Tim Compliance atas justifikasi dan penunjukkan dari CCO		4				





• Mekanisme Penyampaian Laporan

Mekanisme penyampaian Pelaporan terhadap Tindakan Pelanggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Melalui telepon, *Short Message Service* (SMS), atau *Whatsapp* ke nomor 08111995177, *email* ke wbs@plne.co.id, dan surat yang ditujukan kepada Direktur Utama.
- 2) Direktur Utama menerima Pelaporan terkait dengan Tindakan Pelanggaran dan menetapkan bentuk tindak lanjut penyelesaian atas Pelaporan tersebut.
- 3) Direktur Utama menyampaikan setiap Pelaporan terkait dengan Tindakan Pelanggaran yang telah ditetapkan penyelesaiannya melalui mekanisme audit CCO.

• Report Submission Mechanism

The mechanism in submitting Reports on Violations is as follows:

- 1) *Via telephone, Short Message Service (SMS), or Whatsapp to number 08111995177, email to wbs@plne.co.id, and letters addressed to the President Director.*
- 2) *The President Director receives the Report related to the Violation Act and determines the form of follow-up in report settlement.*
- 3) *The President Director submits each Report related to Violation Acts whose settlement has been determined through the CCO audit mechanism.*

- 4) CCO akan melakukan audit dan mengevaluasi tingkat kompleksitas Pelaporan tersebut berkaitan dengan bentuk tindak lanjut penyelesaian atas Pelaporan tersebut.
- 5) CCO akan meneruskan hasil tindak lanjut penyelesaian Pelaporan disertai dengan kesimpulan apakah Pelaporan tersebut terbukti atau tidak terbukti dan usulan tindak lanjut penyelesaian pelanggarannya kepada Direktur Utama untuk ditetapkan bentuk tindak lanjut penyelesaiannya dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Diberhentikan dan dinyatakan selesai apabila hasil audit atau hasil konfirmasi/keterangan/penjelasan menyatakan bahwa pengaduan tersebut tidak benar atau tidak terbukti.
 - b) Meneruskan kepada Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia untuk proses tindak lanjut penerapan hukuman disiplin Perusahaan apabila terbukti terjadi pelanggaran disiplin.
 - c) Dengan pertimbangan Direksi, kasus pelanggaran yang merugikan perusahaan dapat diserahkan kepada yang berwenang untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan internal dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini akan dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim dari Sub-bidang Hukum untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang telah dikumpulkan dinyatakan cukup untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang.

Dalam mengelola whistleblowing system, perusahaan menjaga kerahasiaan pelapor pelanggaran sebagai bentuk perlindungan terhadap pelapor.

- **Perlindungan Bagi Whistleblower**

Perusahaan memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan terhadap setiap Pelapor yang meliputi:

- 1) Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan.
- 2) Jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya.
- 3) Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang berpotensi merugikan Pelapor

- 4) CCO will conduct an audit and evaluate the level of complexity of the Report in relation to the form of follow-up to the completion of the Report.
- 5) The CCO will forward the followed-up results completion Report accompanied with a conclusion on whether the Report is proven or not and the proposed follow-up action to resolve the violation to the President Director to determine the follow-up settlement form with the following details:
 - a) Dismissed and declared completed if the results of the audit or the results of the confirmation/ description/ explanation stated that the complaint is untrue or unproven.
 - b) Forward to the Director of Finance and Human Resources for the follow-up process for imposing Company disciplinary penalties if it is proven that there has been a disciplinary violation.
 - c) With the consideration of the Board of Directors, cases of violations that are inflicted to the company can be submitted to the authorities for further processing in suitable with internal regulations and applicable laws. In this case, communication and coordination will be carried out with Legal Sub-Sector team to ensure that the evidence that has been collected is declared sufficient to be submitted to the competent authorities.

In managing the whistleblowing system, the company maintains the whistleblower confidentiality as a form of protection for the whistleblower.

- **Whistleblower Protection**

The Company provides protection and confidentiality guarantees for each Whistleblower which includes:

- 1) The reporter's identity and content of the reports confidentiality is a guaranteed.
- 2) Security guarantees for reporters and their families.
- 3) Guarantee of protection against treatment that has the potential to harm the Whistleblower





4) Jaminan terhadap tekanan, penundaan kenaikan pangkat/jabatan, pemecatan, gugatan hukum, hingga Tindakan fisik yang dilakukan oleh pihak melakukan Tindakan Pelanggaran/terlapor.

- **Media Whistleblowing System**

Penyampaian pelaporan pelanggaran dapat dilakukan melalui berbagai media sebagai berikut

- 1) Melalui telepon, *Short Message Service* (SMS), atau *WhatsApp* ke nomor +62 811-1995-177,
- 2) *email* ke: wbs@plne.co.id,
- 3) surat yang ditujukan kepada Direktur Utama.

- **Pengelola Whistleblowing System**

Whistleblowing system merupakan suatu mekanisme pelaporan terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan secara rahasia yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan PLN Enjiniring. Pelaporan ditujukan melalui suatu mekanisme baku dan dikelola secara profesional oleh pengelola whistleblowing system. Pengelola WBS menyampaikan laporan penyingkapan (*disclosure report*) kepada Tim Compliance/CCO/Dewan Komisaris/Direktur Utama (sesuai dengan kategori Terlapor).

- **Sosialisasi Whistleblowing System**

Sosialisasi WBS dilakukan kepada setiap bidang pada setiap pelaksanaan *Entry Meeting* Audit Operasional oleh KSPI.

- **Laporan Whistleblowing System**

Pada tahun 2020, Tidak ada Laporan WBS yang diterima oleh Tim *Whistleblowing System*

4) *Guarantees against oppression, postponement of promotion/position, dismissal, lawsuits, to physical actions taken by the party committing the Violation/Reported Action.*

- **Whistleblowing System Media**

Submission of violation reporting can be done through various media as follows

- 1) *Via telephone, Short Message Service (SMS), or through WhatsApp application to +62 811-1995-177,*
- 2) *email ke: wbs@plne.co.id,*
- 3) *Letter addressed to the President Director.*

- **Whistleblowing System Manager**

The whistleblowing system is a mechanism for reporting violations committed secretly by employees or leaders of PLN Enjiniring. Reporting is addressed through a standard mechanism and is professionally managed by the whistleblowing system manager. The WBS Manager submits a disclosure report to the Compliance Team / CCO / Board of Commissioners / President Director (according to the Reported Party category).

- **Whistleblowing System Socialization**

WBS socialization is carried out to every field in each Operational Audit Entry Meeting implementation by KSPI.

- **Whistleblowing System Report**

No WBC Reports were received by the Whistleblowing System Team in 2020

Informasi Pemegang Saham Utama Dan Pengendali

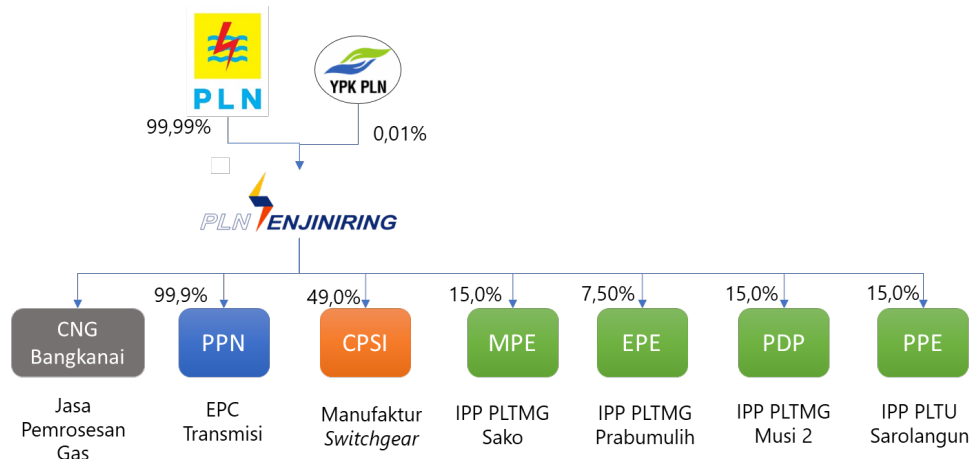
Information on Major and Controlling Shareholders

Saham PLN Enjiniring dimiliki 99.99% oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan 0.01% oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN. Hal ini menjadikan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai pemegang saham utama dan pengendali di PLN Enjiniring.

PLN Enjiniring shares are owned 99.99% by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) and 0.01% by the PLN Education and Welfare Foundation. This makes PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) the main and controlling shareholder in PLN Enjiniring.

Skema kepemilikan saham PLN Enjiniring sebagai berikut.

The PLN Enjiniring share ownership scheme is as follows.



- Unit Usaha
- Anak Perusahaan
- Joint Venture Company
- Afiliasi/Penyertaan Saham

- CNG Bangkanai : Compressed Natural Gas Bangkanai
- PPN : PT Prima Power Nusantara
- CPSI : PT Crompton Power Switchgear Indonesia
- MPE : PT Multidaya Prima Elektrindo
- EPE : PT Energi Prima Elektrika
- PDP : PT Pura Daya Prima
- PPE : PT Permata Prima Elektrindo

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

PLN Enjiniring bertujuan untuk menciptakan persepsi yang baik dan kepuasan public terhadap system informasi perusahaan. Perseroan memiliki kebijakan keterbukaan informasi public berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 17.001.K/010/DIR/PLNE/XI/2010

ACCESS TO COMPANIES INFORMATION AND DATA

PLN Enjiniring aiming to create good perceptions and public satisfaction of the company's information system. The Company has a public information disclosure policy based on the Board of Directors Decree Number: 17.001.K / 010 / DIR / PLNE / XI / 2010 concerning





tentang Pengklasifikasian dan Pengungkapan Informasi. Pelaksanaan keterbukaan informasi public menjadi tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.

Bentuk pelaksanaan kebijakan tersebut adalah dengan memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi perusahaan dengan senantiasa melakukan pembaharuan sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi. Selain itu, perusahaan juga terus berupaya memperkuat platform teknologi informasi untuk menjaga dan meningkatkan kehandalan dalam penyediaan informasi secara terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran melalui berbagai media.

MEDIA INFORMASI PERUSAHAAN

PLN Enjiniring memiliki media yang berfungsi sebagai saluran dalam memastikan ketersediaan akses dan pengungkapan informasi secara update, transparan, fair dan berimbang kepada stakeholders dan shareholders diantaranya adalah Website, Media Elektronik Interaktif, Media Sosial dan Media Internal.

WEBSITE

Shareholders dan stakeholders dapat mengakses informasi mengenai PLNE di situs www.plne.co.id yang memuat informasi mengenai kegiatan operasional dan kinerja Perusahaan. Website PLNE disajikan secara bilingual yaitu dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Website PLNE menyediakan informasi terkait Perusahaan, peristiwa di Lingkungan Perusahaan, Soft Copy Majalah Prima News, Annual Report, Laporan Keuangan, pengumuman pelelangan dan informasi lainnya yang dapat diakses dengan mudah oleh publik.

in Classification and Information Disclosure. The implementation of public information disclosure is the responsibility of the Corporate Secretary.

The form of implementation of this policy is to provide convenience for stakeholders to obtain company information by constantly updating the supporting facilities and infrastructure for the delivery of information. In addition, the company also continues to strengthen its information technology platform to maintain and improve reliability in providing information in an integrated, timely and targeted manner through various media.

INFORMATION MEDIA TO COMPANY

PLN Enjiniring has a media that serves as a channel to encourage information disclosure updates, transparent, fair and balance to stakeholders and shareholders including Website, Printed Media, Interactive Electronic Media, Social Media, and Internal Media.

WEBSITE

Shareholders and stakeholders can access the information about PLNE at www.plne.co.id that containing fairly complete and comprehensive information toward the operational activity and performance of the Company. The PLNE website is presented bilingually in Indonesian and English.

PLNE website provides information of companies, events in the corporate environment, soft copy of Prima News magazine, Annual Report, Finance Report, the auction announcement and some other information that could be easily accessed by public.

MEDIA ELEKTRONIK INTERAKTIF

PLN Enjiniring menggunakan media elektronik dalam menyediakan informasi antara lain menggunakan email, LCD TV, Pagging Call di kantor PLNE. Alamat email PLNE adalah contact@plne.co.id. Tujuan dibuatnya email PLNE berguna untuk memberikan kemudahan bagi publik yang ingin menanyakan berbagai hal yang berhubungan PLNE. Sarana komunikasi lainnya yaitu display LCD TV yang menayangkan informasi terbaru terkait PLNE dalam bentuk foto dan video dan informasi lain yang perlu diketahui oleh karyawan dan tamu PLNE.

MEDIA SOSIAL

PLN Enjiniring juga menyediakan informasi mengenai perusahaan serta untuk berkomunikasi kepada publik dengan memanfaatkan media sosial melalui akun Instagram, Facebook, Youtube dan Twitter.

MEDIA INTERNAL

PLN Enjiniring menyediakan saluran dan media komunikasi internal dalam rangka sarana komunikasi dengan karyawan melalui pelaksanaan acara knowledge sharing, coffee morning, dan email.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai PLN Enjiniring, masyarakat umum dan investor dapat menghubungi:

- **Sekretaris Perusahaan**

Menara Enjiniring, Jl. Ciputat Raya No. 123
Kebayoran Lama – Jakarta 12310, Indonesia
T (62-21) 27510363
F (62-21) 27510362
E contact@plne.co.id

INTERACTIVE ELECTRONIC MEDIA

PLN Enjiniring uses electronic media in providing information including e-mail, LCD TV, Pagging Call at the PLNE office. PLNE email address is contact@plne.co.id. The purpose of PLNE e-mail made is to provide convenience for the public who wish to ask everything related to PLNE. Other communication facilities are LCD TV display that shows the latest information related PLNE in the form of photos and video and other information that needs to be known by employees and guests.

SOCIAL MEDIA

PLN Enjiniring also provides information regarding the company as well as to communicate to the public by utilizing social media through Instagram, Facebook, Youtube and Twitter accounts.

INTERNAL MEDIA

PLN Enjiniring provides information channels and internal communication media in order to communication with employees through knowledge sharing, coffee morning, and email blast.

To get more information about PLN Enjiniring, the general public and investors can contact:

- **Corporate Secretary**

Menara Enjiniring, Jl. Ciputat Raya No. 123
Kebayoran Lama – Jakarta 12310, Indonesia
T (62-21) 27510363
F (62-21) 27510362
E contact@plne.co.id



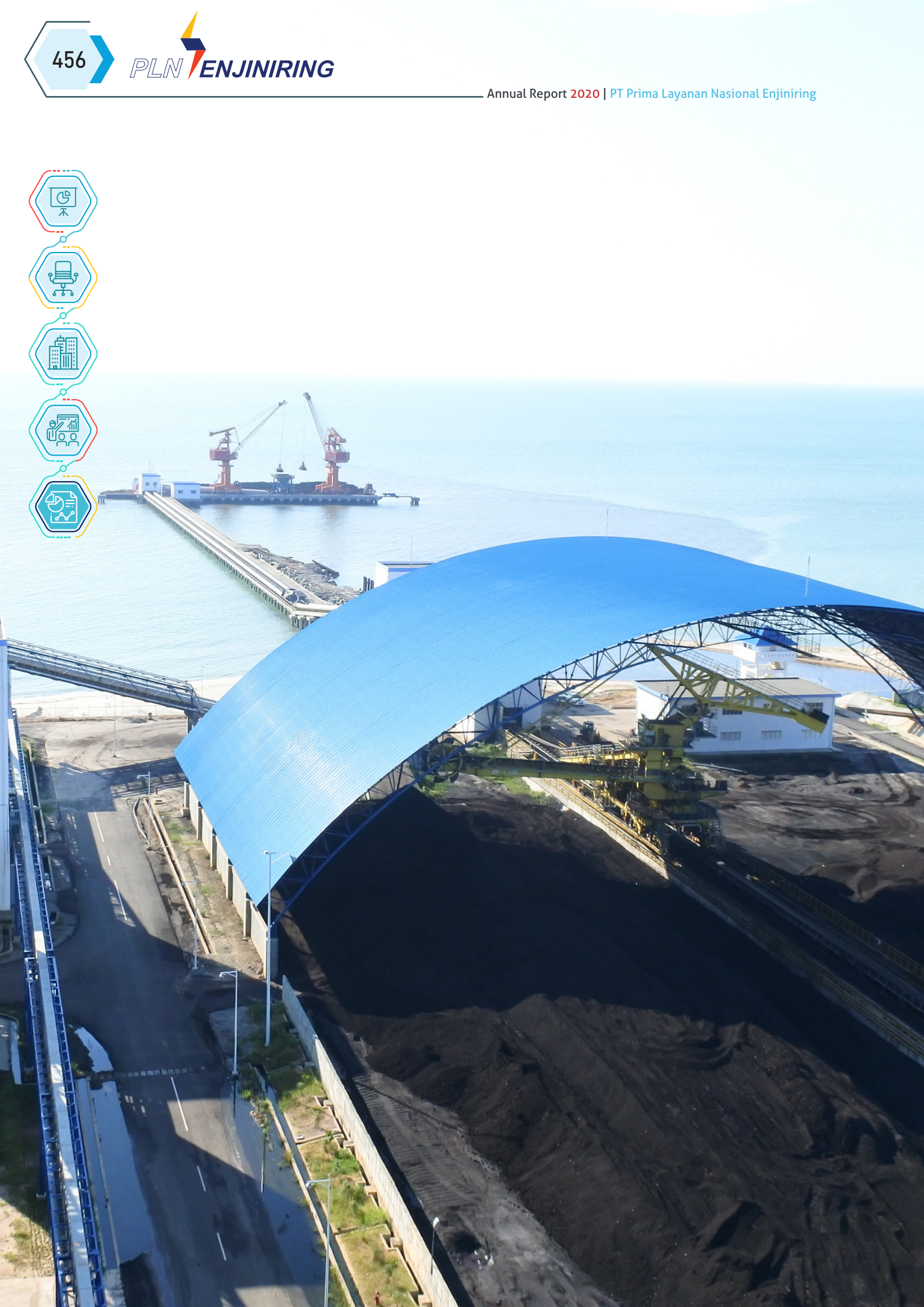
PLNEnjiniring



pln_enjiniring



PLN Enjiniring



Tanggung Jawab Perusahaan Company Responsibilities



Tanggung Jawab Perusahaan
Company Responsibilities





Tanggung Jawab Perusahaan

Corporate Responsibility

TANGGUNG JAWAB SOSIAL & LINGKUNGAN

Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan merupakan tanggung jawab Perusahaan yang berdampak pada keputusan dan kegiatan Perusahaan terhadap masyarakat dan Lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis.

• MAKSUD DAN TUJUAN

Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk menciptakan kesinambungan dalam pembangunan ekonomi dan untuk meningkatkan kualitas hidup yang bermanfaat sehingga mendorong terciptanya keselarasan dan keharmonisan dengan masyarakat terutama disekitar lokasi usaha Perusahaan. Perusahaan menyadari pentingnya Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dalam mendukung keberlanjutan operasional perusahaan dengan visi Perusahaan:

“Menjadi Perusahaan Jasa Enjiniring Terintegrasi di Ketenagalistrikan yang Terkemuka”

Melalui visi tersebut, PT PLN Enjiniring terus menjalankan komitmennya untuk berkontribusi dalam melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa kinerja perusahaan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi saja, akan tetapi juga kinerja sosial maupun lingkungan. Kesadaran ini didasarkan bahwa keberlanjutan perusahaan (*corporate sustainability*) tercermin dalam konsep *triple bottom line* yaitu *people*, *profit*, dan *planet*.

SOCIAL & ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Social & Environmental Responsibility is the company responsibility which impacted to the Company's decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behavior.

• PURPOSE AND OBJECTIVES

The accompany has a high commitment to create sustainability in economic development and to improve the quality of life that is beneficial so as to encourage harmony with the community, especially around the Company's business location. The Company realizes the importance of Environmental Social Responsibility in supporting the company's operations with the Company's vision:

“Becoming a Leading Integrated Engineering Service Company in Electricity”

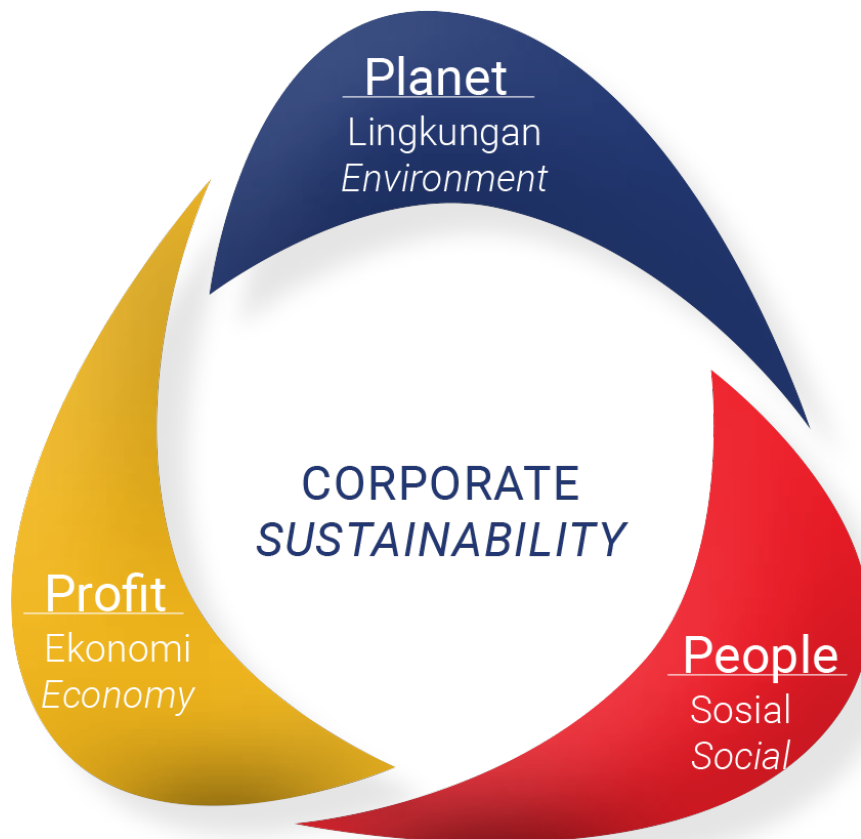
Throught this vision, PT PLN Enjiniring continuous to carry out its commitment to contribute in carrying out corporate social responsibility (CSR). This is an integral part of the company's operational activities. The company realizes that the company's performance is not only measured from the economic aspect, but also social and environmental performance. This awareness is based that corporate sustainability is reflected in the triple bottom line concept of people, profit and planet.

Maksud dari penyelenggarakan CSR Perusahaan adalah sebagai perwujudan visi dan misi Perusahaan untuk menciptakan kesinambungan dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup yang bermanfaat. Adapun tujuan pelaksanaan CSR adalah sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dan perbaikan lingkungan di sekitar tempat usaha khususnya di sektor ketenagalistrikan dengan kelompok sasaran program yaitu komunitas lokal / kelompok / konsumen, karyawan, lingkungan hidup, pemegang saham, kreditor, pemasok/ mitra kerja.
2. Meningkatkan pemahaman publik terhadap perusahaan melalui informasi yang disalurkan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sehingga dapat menunjang peningkatan nilai perusahaan melalui pembentukan reputasi yang baik.

The purpose of organizing the Company CSR is as a manifestation of the Company vision and mission to create sustainability in economic development to improve the quality of the life that is beneficial. The objectives of implementing CSR are as follows:

1. *Encourage the community economic development and improvement around the place of business, especially in the electricity sector with the program target group's namely local communities / groups / Consumers, employees, environment, shareholders, creditors, supplier/ partners.*
2. *Increase public understanding on the company through information channeled in social activities so that it can support the increase in the company value through the establishment of good reputation.*





Bagi PT PLN Enjiniring, tujuan perusahaan tidak hanya semata-mata memenuhi kepentingan pemegang saham, akan tetapi juga memberikan kontribusi nilai bagi para pemangku kepentingan lainnya yang meliputi, karyawan, pelanggan, pemasok, dan pihak lainnya. Tujuan tersebut tertanam dalam setiap aktivitas perusahaan termasuk dalam hal ini adalah komitmen PT PLN Enjiniring dalam melestarikan lingkungan yang tercermin dalam berbagai kebijakan perusahaan.

• **KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL**

Dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, PT PLN Enjiniring menyusun Program CSR yang ditetapkan dalam Rencana dan Anggaran Perusahaan sesuai dengan Pedoman CSR yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 09.001.K/010/PLNE/VI/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Pedoman ini digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan kegiatan agar pelaksanaan kegiatan CSR di lingkungan PT PLN Enjiniring dapat terselenggara secara efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip keberlanjutan yang digunakan dalam mendukung tercapainya tujuan-tujuan tersebut, PT PLN Enjiniring mengacu kepada standar ISO 26000 sebagai panduan prinsip keberlanjutan perusahaan. ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitas terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis sehingga pelaksanaan CSR bersifat holistik dan melibatkan berbagai fungsi di perusahaan. Prinsip-Prinsip keberlanjutan antara lain:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas yang membuktikan bahwa organisasi bersangkutan melakukan segala sesuatu dengan benar. Akuntabilitas yang diminta adalah terhadap seluruh pemangku kepentingan, dalam hal dampak Perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, termasuk dampak yang tidak disengaja atau tidak diperkirakan, Perusahaan seharusnya menerima dan bahkan mendorong penyelidikan mendalam atas dampak operasionalnya.

For PT PLN Enjiniring, the company objectives not only to fulfill the interests of shareholders, but also to contribute a value to other stakeholders, including employees, customers, supplier and other parties. These objectives are embedded in every activity of the company including in this case the PLN Enjiniring commitment in preserving the environment which is reflected in various company policies.

• **POLICY AND IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY**

In the implementation of company social responsibility PT PLN Enjiniring prepares a CSR Program specified in Company Plans and Budgets in accordance with the CSR Guidelines stipulated in the Decision Letter of the Board of Directors Number 09.001.K/010/PLNE/VI/2015 regarding CSR Guideline. This guideline is used as a guideline in the management of activities so that the implementations of CSR activities within the PT PLN Enjiniring can be carried out effectively and on target as well as sustainably.

The sustainability principles used in supporting the achievement of these objectives, PT PLN Enjiniring refers to the ISO 26000 standard as a guiding principles for the company's sustainability. ISO 26000 translate social responsibility as the responsibility of an organization for the impact of decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behavior so that the implementation of CSR is holistic and involves various function in the company. Sustainability principles, among others:

1. Accountability

Accountability that proves that the organization is doing everything right. The accountability requested is for all stakeholders, in terms of the Company's impact on society and environment, including accidental or unanticipated impacts, the Company should accept and even encourage in-depth investigation of its operational impacts.

2. Transparansi

Perusahaan menyatakan secara transparan seluruh keputusan dan aktivitasnya yang mengakibatkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan dituntut untuk melaksanakan keterbukaan yang jelas, akurat dan lengkap atas seluruh kebijakan, keputusan dan aktivitasnya.

3. Perilaku Etis

Perusahaan harus berperilaku etis sepanjang waktu, dengan menegakkan kejujuran, kesetaraan dan integritas. Penerapan perilaku etis dilaksanakan melalui: (a) Pengembangan struktur tata kelola yang mendorong perilaku etis, (b) Membuat dan mengaplikasikan perilaku etis baku, dan (c) Terus menerus meningkatkan perilaku etis baku tersebut.

4. Penghormatan kepada pemangku kepentingan Perusahaan

Menghormati dan menanggapi kepentingan seluruh Pemangku Kepentingan. Hal-hal yang harus dilakukan adalah: (a) Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan, (b) Menanggapi kebutuhannya, (c) Mengenali hak-hak legal dan kepentingan yang sah, serta (d) Mengenali kepentingan yang lebih luas terkait dengan pembangunan berkelanjutan.

5. Kepatuhan terhadap Hukum

Perusahaan menerima bahwa kepatuhan terhadap hukum adalah suatu kewajiban. Hal-hal yang harus dilakukan adalah (a) Patuh terhadap semua peraturan, (b) Memastikan bahwa seluruh aktivitasnya sesuai dengan kerangka hukum yang relevan, (c) Patuh pada seluruh aturan yang dibuatnya sendiri secara adil dan tidak memihak, (d) Mengetahui perubahan-perubahan dalam peraturan-perundangan, dan (e) Secara berkala memeriksa kepatuhannya.

2. Transparency

The company transparently states all its decisions and activities that have an impact on society and environment. Company is required to implement clear, accurate and complete disclosure of all policies, decisions and activities.

3. Ethical Behavior

Companies must behave ethically at all times, upholding honesty, equality and integrity. The practice of ethical behavior is implemented through: (a) development governance structures that encourage ethical behavior, (b) create and apply standard ethical behavior, and (c) continuously improving the standard ethical behavior.

4. Respect for the Company's stakeholders

Respect and respond to the interests of all Stakeholders. The things that must be done are: (a) identifying Stakeholders, (b) responding to their needs, (c) recognizing legal rights and legitimate interests, and (d) identifying broader interests related to sustainable development.

5. Compliance with Laws

The company accepts that compliance with the law is an obligation. Things that must be done are (a) comply with all regulations, (b) ensure that all activities are in suitable with the relevant legal framework, (c) comply with all rules that he/she made themselves fairly and impartially, (d) aware of the changes in laws and regulations, and (e) periodically checking compliance.





6. Penghormatan Terhadap Norma Perilaku International

Di negara-negara di mana hukum nasionalnya atau implementasinya tidak mencukupi untuk melindungi kondisi lingkungan dan sosialnya, Perusahaan harus mengacu kepada norma perilaku internasional.

7. Penghormatan terhadap HAM

Perusahaan menghormati HAM, serta mengakui betapa pentingnya HAM serta sifatnya yang universal. Hal-hal yang harus dilakukan, apabila ditemukan situasi HAM tidak terlindungi, Perusahaan tersebut harus tetap melindungi HAM, dan tidak mengambil kesempatan dari situasi itu, dan apabila tak ada peraturan perundangan HAM di tingkat nasional, maka Perusahaan harus mengacu pada nilai baku HAM internasional.

• UNIT PENGELOLAAN CSR PERUSAHAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan CSR di lingkungan PT PLN Enjiniring, Sekretaris Perusahaan melalui Sub Bidang Kinerja dan Komunikasi berperan sebagai fasilitator dan memberikan perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan dokumentasi kegiatan CSR.

• PENERAPAN CSR SECARA HOLISTIK

Bagi PT PLN Enjiniring, CSR bukan hanya sekedar membagi donasi dan kegiatan sosial. Penerapan CSR di PT PLN Enjiniring dikelola secara holistik dalam rangka memenuhi tanggung jawab perusahaan kepada Semua pemangku kepentingan. Kegiatan CSR diimplementasikan pada setiap hubungan antara Perusahaan dan para pemangku kepentingan.

• KEBIJAKAN

Komitmen PT PLN Enjiniring untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dituangkan dalam Surat Edaran Direksi yang dilaksanakan melalui berbagai program, baik di lingkungan internal maupun di lingkungan masyarakat. Dampak lingkungan yang timbul akibat operasional perusahaan harus ditekan serendah mungkin dan Perseroan bertanggung jawab atas dampak tersebut.

6. Respect for the Norms of International Conduct

In countries where its laws or their implementation are insufficient to protect their environmental and social conditions, Companies must comply with international norms of conduct.

7. Respect for human rights

Human rights is respected by the company, and recognizes on how important it is. Things that must be done, if a human rights is not protected, the company must continue to protect human rights, and not take advantage of it situation, and if there is no human rights regulation at the state law, the company must refer to international human rights standards.

• DEPARTMENT OF CORPORATE CSR MANAGEMENT

In implementing CSR activities within PT PLN Enjiniring, the Corporate Secretary acts as a facilitator and provides planning, implementation and preparation of CSR activities documentation.

• HOLISTIC IMPLEMENTATION OF CSR

For PT PLN Enjiniring, CSR is not just about sharing donations and social activities. The implementation of CSR at PT PLN Enjiniring is managed holistically in order to fulfill the company's responsibilities to all stakeholders. CSR activities are implemented in every relationship between the Company and its stakeholders.

• POLICY

PT PLN Enjiniring commitment to be environmentally responsible is stated in the Directors decree which is implemented through various programs, both internally and in the community. Environmental arising impacts from the company's operational must be kept as low as possible and the Company is responsible for these impacts.

Perusahaan memberikan kontribusi terhadap pembangunan keberlanjutan dengan mempertimbangkan harapan para pemangku kepentingan dan mengintegrasikan program-program sosial demi menciptakan perusahaan yang lebih peduli kepada lingkungan

• SASARAN STRATEGIS

PT PLN Enjiniring berupaya untuk melakukan berbagai program dengan merujuk pada ruang lingkup implementasi dari CSR berbasis pada ISO 26000, yang terdiri dari:

- a) Tata Kelola Organisasi, Kepatuhan pada hukum, akuntabilitas, transparansi, kode etik, pengenalan profil dan minat stakeholder;
- b) Hak Asasi Manusia, hak sipil dan politik, sosial, ekonomi, budaya dan kelompok rentan, serta hak dasar dalam kerja;
- c) Aktivitas Tenaga Kerja, hubungan antar pekerja, kondisi kerja dan perlindungan sosial, kesehatan, keamanan kerja dan sumber daya manusia;
- d) Lingkungan, preventif polusi, konsumsi berkelanjutan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, proteksi dan restorasi lingkungan alam;
- e) Aktivitas operasi yang adil, anti korupsi dan anti suap, kompetisi yang adil, promosi tanggung jawab sosial melalui rantai pasok, perhatian pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- f) Isu Konsumen, marketing yang adil, perlindungan keamanan dan kesehatan konsumen, pengembangan produk dan jasa yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan, layanan konsumen, penyelesaian perselisihan, privasi/perindungan data konsumen, akses pada produk dan servis utama, konsumsi berkelanjutan, pendidikan dan kepedulian; dan
- g) Kontribusi pada komunitas dan masyarakat, melibatkan komunitas, kontribusi pada pengembangan ekonomi dan kontribusi pada pengembangan sosial (TJSL).

The company contribution in sustainable development considering the stakeholders expectation and integrating social programs in order to create a company that cares more for the environment

• STRATEGIC TARGET

PT PLN Enjiniring strives to carry out various programs by referring to the scope of implementation of CSR based on ISO 26000, which consists of:

- a) *Organizational Governance, Compliance with law, accountability, transparency, code of ethics, profile recognition and stakeholder interest;*
- b) *Human rights, civil and political rights, social, economic, cultural and vulnerable groups, as well as basic rights at work;*
- c) *Labor activities, relations between workers, working conditions and social protection, health, job security and human resources;*
- d) *Environment, pollution prevention, sustainable consumption, climate change adaptation and mitigation, protection and restoration of the natural environment;*
- e) *Fair operating activities, anti-corruption and anti-bribery, fair competition, promotion of social responsibility through the supply chain, attention to Intellectual Property Rights (IPR);*
- f) *Consumer Issues, fair marketing, protection of consumer safety and health, development of products and services that provide social and environmental benefits, consumer services, dispute resolution, consumer privacy/data protection, access to key products and services, sustainable consumption, education and care; and*
- g) *Contribution to the community and society, involving the community, contribution to economic development and contribution to social development (TJSL).*





- **PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI**

Sebagaimana bidang usaha utama PT PLN Enjiniring sebagai jasa konsultan enjiniring dalam industri ketenagalistrikan yang tidak memberikan dampak pencemaran terhadap lingkungan, maka tidak terdapat sertifikasi di bidang lingkungan.

- **AWARDS AND CERTIFICATIONS**

PLN Enjiniring main business is as an engineering consultant service in the electricity industry which have no impact on environmental pollution, because of that there is no environmental certification.

Corporate Social Responsibility (CSR) Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, Dan Keselamatan Kerja

Corporate Social Responsibility (CSR) Related to Labor, Health and Safety Work

KETENAGAKERJAAN

• Kebijakan

PT PLN Enjiniring, sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang jasa konsultan enjiniring ketenagalistrikan, memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman arah tujuan perusahaan. Terkait dengan hubungan industrial antara perusahaan dengan tenaga kerja, PT PLN Enjiniring memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang menjadi landasan hukum tertinggi di perusahaan. Dalam PP, diatur tentang Sistem Manajemen SDM, Hubungan Kerja, Penghasilan, Pembinaan Pegawai, Disiplin Pegawai, Tata Tertib, Cuti, Perjalanan Dinas, Jaminan Sosial, Penghargaan Pensiun, Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Koperasi Pegawai, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Ketentuan Peralihan, dan lain-lain. PP PT PLN Enjiniring tunduk dan mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

• Kegiatan

Program kerja terkait ketenagakerjaan yang dilaksanakan selama tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

1. Hubungan Kerja Pada PT PLN Enjiniring, tenaga kerja terbagi menjadi empat macam berdasarkan status hubungan kerjanya, yaitu Pegawai organik, Pegawai tugas karya, karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan karyawan Outsourcing (OS). Dalam pemenuhan tenaga kerja tersebut, jenis rekrutmen yang dilakukan berbeda satu dengan lainnya. Pegawai organik direkrut melalui sistem dan prosedur rekrutmen berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan formasi tenaga kerja (FJFTK) sesuai dengan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (MSDM-BK). Pegawai tugas karya direkrut berdasarkan

EMPLOYMENT

• Policy

PT PLN Enjiniring, as PT PLN (Persero) subsidiary company which is engaged in electricity engineering consulting services, has a vision and mission that guides the direction of the company's goals. Regarding industrial relations between companies and workers, PLN Enjiniring has a Company Regulation (PP) which is the highest legal basis in the company. In Company Regulation (PP), it regulating the HR Management System, Work Relations, Income, Employee Development, Employee Discipline, Rules, Leave, Official Travel, Social Security, Retirement Awards, Religious Holiday Allowances, Employee Cooperatives, Employee Termination and Retirement, Industrial Relations Dispute Resolution, Transitional Provisions, and others. PP PLN Enjiniring is subject and refers to Law no. 13 of 2003 concerning Manpower.

• Activity

Employment-related work programs implemented through 2019 include the following:

1. *Employment Relations at PLN Enjiniring, the labor force is divided into four types based on the work relationship status, namely organic employees, work assignments employees, Fixed Time Work Agreement (PKWT) employees, and outsourcing employees (OS). In fulfilling this labor force, the types of recruitment carried out are different from one to another. Organic employees are recruited through recruitment systems and procedures based on job formation needs and labor force formation (FJFTK) appropriate with Competency-Based HR Management (MSDM-BK). Work assignments employees are recruited*





kebutuhan FJ-FTK melalui seleksi fit and proper test. Sedangkan karyawan PKWT dan OS direkrut berdasarkan kebutuhan jenis pekerjaan administratif dan project based.

Pada 2020, komposisi karyawan kontrak (PKWT) sebesar 49,32%, pegawai organik sebesar 41,35%, karyawan outsourcing sebesar 7,97%, dan pegawai tugas karya sebesar 1,35%. Besarnya dominasi karyawan kontrak di PT PLN Enjiniring disebabkan oleh proses bisnis perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan enjiniring dan supervisi konstruksi, sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja ahli sangat tinggi, yang berbasis pada proyek, tetapi masa kerjanya tertentu. Hal ini dilakukan sebagai strategi perusahaan dalam mengefisienkan biaya kepegawaian dengan tidak memelihara tenaga kerja yang digunakan pada masa tertentu saja.

2. Pembinaan Pegawai PT PLN Enjiniring melakukan pembinaan Pegawai dengan tujuan untuk mendorong profesionalisme Pegawai, memelihara dan mengembangkan motivasi, kemampuan, dan produktivitas, serta memberikan kesempatan pengembangan karir.

Macam-macam kegiatan pembinaan Pegawai adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan pelatihan,
- b. Pembinaan karir,
- c. Penilaian unjuk kerja,
- d. Pemberian penghargaan,
- e. Penegakan peraturan disiplin, dan
- f. Pemberian sanksi disiplin.

Dalam menjaga kualitas SDM, kesinambungan program pengembangan kompetensi pegawai menjadi komitmen Perusahaan agar dapat mendukung kinerja perusahaan dan memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan. PT PLN Enjiniring telah merencanakan dan merumuskan kebutuhan pelatihan dan sertifikasi bagi Pegawai untuk periode tahun 2020 dalam kegiatan Training Need Analysis (TNA) secara mandiri mengikuti Prosedur Enjiniring (PE) 6.13.

based on the needs of the FJ-FTK through a fit and proper test selection. Meanwhile, PKWT and OS employees are recruited based on the needs of administrative and project based jobs.

In 2020, the composition of contract employees (PKWT) was 49.32%, organic employees were 41.35%, outsourcing employees were 7.97%, and work assignments employees were 1.35%. The domination size of contract employees at PLN Enjiniring is due to company's business processes which are engaged in engineering consulting services and construction supervision, so the need for skilled labor is very high, which is project-based, but has a certain working period. This is done as a company strategy in personnel costs effectivity by not maintaining the labor force that is used for a certain period.

2. *PLN Enjiniring Employee Development conducted to encourage employee professionalism, maintaining and developing motivation, abilities, and productivity, as well as providing career development opportunities.*

The types of employee coaching activities are as follows:

- a. *Training and Education Program*
- b. *Career Coaching*
- c. *Performance Assesement*
- d. *Awards*
- e. *Diciplinary Enforment, and*
- f. *Disciplinary Penalty*

In maintaining the quality of human resources, the employee competency development continuity program became the Company's commitment so that it can support the company's performance and make a positive contribution to the sustainability of the company's business. PLN Enjiniring planned and formulated the training and certification needs for employees on the 2020 period regarding Training Need Analysis (TNA) activities independently following Engineering Procedures (PE) 6.13.

Dalam melaksanakan pengembangan SDM, PT PLN Enjiniring bekerja sama dengan PLN Corporate University dan lembaga pelatihan dalam dan luar negeri. Selama tahun 2020, Perusahaan melaksanakan pengembangan kompetensi karyawan yang terdiri dari 81 Program Pelatihan dengan diikuti oleh 453 peserta, serta 25 Program Sertifikasi dengan diikuti oleh 177 orang terdiri dari Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai dan Karyawan Kontrak/Outsourcing. Pengembangan Kompetensi dilakukan dengan menerapkan prinsip persamaan kesempatan bagi semua karyawan.

Pembinaan kompetensi terdiri dari pembinaan level kompetensi dan pembinaan grade. Level kompetensi didasarkan pada bidang keilmuan, pengalaman, dan/atau kemampuan Pegawai dalam mengembangkan kompetensi sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Setiap level kompetensi terdiri dari beberapa grade yang menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi individu pada level kompetensi tertentu. Level kompetensi dan grade melekat pada Pegawai, bukan pada Jabatan.

Pegawai diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk kinerja yang optimal. Sedangkan, Perusahaan wajib memberikan pembinaan dalam hal pengembangan kompetensi dan karir bagi Pegawai, dalam rangka memelihara dan memotivasi Pegawai untuk berkontribusi lebih dalam kinerja individu. Dalam hal ini, PT PLN Enjiniring telah memiliki ketentuan dalam Keputusan Direksi No. 05.001.K/DIR/PLNE/XII/2014 tentang Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir.

Pembinaan karir ditujukan kepada seluruh Pegawai dengan kesempatan yang sama dan dilakukan berdasarkan kompetensi, nilai unjuk kerja, dan dengan memperhatikan apresiasi Pegawai. Pembinaan karir adalah tanggung jawab dari atasan, Pegawai yang bersangkutan, dan pejabat yang menangani SDM. Selain digunakan untuk pembinaan karir, nilai unjuk kerja juga digunakan untuk memberikan penghargaan kepada Pegawai dalam bentuk insentif kerja. Penghargaan juga diberikan kepada Pegawai sebagai apresiasi Perusahaan dalam bentuk penghargaan kesetiaan kerja dan penghargaan pensiun.

In developing its human resource, PT PLN Enjiniring collaborates with PLN Corporate University and also domestic and foreign training institutions. During 2020, the Company implemented employee competency development consisting of 81 Training Programs with 453 participants, and 25 Certification Programs attended by 177 participants consisting of Members of the Board of Commissioners, Directors, Employees, and Contract / Outsourcing Employees. Competency development is carried out by applying the principle of equal opportunity for all employees.

Competency coaching consists of competency level and grade coaching. The competency level is based on the employee's scientific field, experience, and / or ability, in developing competencies that suitable with the job requirements. Each competency level consists of several grades which indicate the level of mastery of individual competencies at a certain competency level. Competency level and grade are attached to employees, not to positions.

Employees are expected to contribute in the form of optimal performance. Meanwhile, the Company is obliged to provide guidance in terms of competency and career development, in order to maintain and motivate employees to contribute more in individual performance. In this case, PT PLN Enjiniring already has provisions in the Decree of the Board of Directors No. 05.001.K / DIR / PLNE / XII / 2014 concerning Competency and Career Development Systems.

Career development is aimed at all employees with equal opportunities and is carried out based on competence, performance value, and with due regard for employee appreciation. Career development is the responsibility of superiors, concerned employees, and officials who handle HR. Apart from being used for career development, performance value is also used to reward employees in the form of work incentives. Awards are also given to employees as company appreciation in the form of work loyalty awards and retirement awards.





3. Penghargaan yang diberikan oleh PT PLN Enjiniring terdiri dari dua jenis, yaitu penghargaan ekstrinsik dan intrinsik. Penghargaan ekstrinsik diberikan kepada Pegawai dalam bentuk kompensasi dan manfaat. Kompensasi terdiri dari
- kompensasi tetap bulanan (Pay for Person – P1),
 - tunjangan posisi (Pay for Position – P2), tunjangan prestasi (Pay for Performance – P3), tunjangan hari raya, cuti tahunan, cuti besar, bantuan ganti rugi, dan jaminan sosial pegawai,
 - imbal jasa dalam bentuk bonus kinerja.

Manfaat terdiri dari

- manfaat umum, antara lain pemeliharaan kesehatan, hak cuti, pakaian dinas, bantuan penggantian fasilitas perumahan, bantuan pinjaman kepemilikan rumah, dan program pensiun, serta
- manfaat khusus, antara lain bantuan kepemilikan kendaraan, alat komunikasi, laptop, dan fasilitas kerja.

Penghargaan intrinsik diberikan kepada Pegawai dalam bentuk

- Program pendidikan formal dan sertifikasi profesi, yang diberikan bagi Pegawai yang memenuhi persyaratan kriteria talenta tertentu,
- Fasilitas kerja khusus, yang diberikan atas dasar kontribusi dan/atau pencapaian inovasi yang memberikan keuntungan bagi Perusahaan dalam bentuk efisiensi biaya dan/atau peningkatan pendapatan,
- Program keseimbangan khusus, yang diberikan atas dasar efisiensi biaya kesehatan pribadi dan keluarga dan/atau pencapaian loyalitas kerja Pegawai,
- Bantuan hukum, yang diberikan dalam bentuk pembelaan atas tuntutan hukum terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan,
- Pengakuan, yang diberikan atas dasar penghargaan Direksi.

3. There are two types of awards given by PT PLN Enjiniring, namely extrinsic and intrinsic awards. Extrinsic awards are given to employees in the form of compensation and benefits. Compensation consists of:

- fixed monthly compensation (Pay for Person - P1),
- position allowances (Pay for Position - P2), achievement allowances (Pay for Performance - P3), holiday allowances, annual leave, large leave, compensation assistance, and employee social security,
- fees in the form of performance bonuses.

The benefits consist of:

- general benefits, including health care, leave rights, official clothing, assistance to replace housing facilities, assistance with housing loans, and pension programs, as well as,
- special benefits, including assistance for ownership of vehicles, communication devices, laptops and work facilities.

Intrinsic rewards are given to employees in form:

- Formal education programs and professional certification, which are given to employees who meet certain criteria for talent,
- Special work facilities, which are given on the basis of contribution and / or innovations achievement that benefit the Company in the form of cost efficiency and / or increased revenue,
- A special balance program, which is given on the basis of efficiency in personal and family health costs and / or achievement of employee job loyalty,
- Legal aid assistance, which is provided in the form of defense of legal claims related to the implementation of duties and responsibilities of the position,
- Recognition, which is given on the basis of an award from the Board of Directors.

Selain penghasilan dalam bentuk remunerasi tersebut di atas, PT PLN Enjiniring juga memberikan bonus sesuai dengan pencapaian kinerja dan kemampuan Perusahaan. Dalam hal PP PT PLN Enjiniring patuh terhadap ketentuan Undang Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, maka Perusahaan juga memberikan tunjangan wajib yaitu Tunjangan Hari Raya (THR) dan imbalan kerja lembur.

4. PT PLN Enjiniring mengatur Program Pensiun Pegawai dalam Keputusan Direksi No. 01.001.K/DIR/PLNE/IX/2017. Usia pensiun untuk seluruh Pegawai PT PLN Enjiniring adalah 56 tahun. Bagi Pegawai yang telah berusia 55 tahun dapat mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP). Untuk mempersiapkan Pegawai yang memasuki masa MPP tersebut, PT PLN Enjiniring memberikan pelatihan purna bakti. Diharapkan dengan bekal pelatihan ini, Pegawai dapat mempersiapkan diri di masa pensiun. Sementara itu, bagi Pegawai yang telah memasuki usia purna bakti diberikan kompensasi. Pegawai diikutsertakan dalam Program Jaminan Hari Tua (JHT), yaitu Kompensasi Jaminan Hari Tua sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku dan PSAK 24.
5. PT PLN Enjiniring senantiasa berkomitmen untuk memelihara hubungan industrial yang baik antara karyawan dengan manajemen serta menghormati hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan organisasi diwujudkan dengan penyaluran aspirasi karyawan yang baik dan sesuai dengan etika. Media komunikasi yang dapat digunakan untuk menyalurkan aspirasi karyawan tersebut berupa forum komunikasi yang diadakan pada dalam peringatan acara-acara Perusahaan, hari besar kenegaraan dan keagamaan.

PLN Enjiniring telah memiliki Serikat Pekerja yang terbentuk pada tanggal 29 Januari 2020, dimana beberapa Pegawai PLN Enjiniring membentuk sebuah Serikat Pekerja dengan nama Persatuan Pekerja Prima Enjiniring (P3E) dan telah dicatat dalam Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja

In addition to income in the form of remuneration mentioned above, PLN Enjiniring also provides bonuses in accordance with the Company's performance, achievements and capabilities. In the event that PP PT PLN Enjiniring complies with the applicable Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2013 concerning Manpower, the Company also provides mandatory allowances, namely Hari Raya Allowances (THR) and overtime benefits.

4. *PLN Enjiniring regulates Employee Pension Program in Directors Decree No. 01.001.K / DIR / PLNE / IX / 2017. The retirement age for all PLN Enjiniring employees is 56 years. Employees who are 55 years old can take the Retirement Preparation Period (MPP). To prepare the employees who enter the MPP period, PLN Enjiniring provides post-service training. It is hoped that with this training provision, employees can prepare themselves for retirement. Meanwhile, employees who have entered retirement age are given compensation. Employees are included in the Old Age Security Program (JHT), namely Old Age Security Compensation in accordance with the applicable Manpower Law and PSAK 24.*
5. *PT PLN Enjiniring is always committed to maintaining good industrial relations between employees and management and respecting the rights and obligations of employees in accordance with applicable laws and regulations. Organizational freedom is realized by channeling the aspirations of good employees and in accordance with ethics. Communication media that can be used to channel employee aspirations are in the form of a communication forum held in commemoration of Company events, state and religious holidays.*

PLN Enjiniring already has a Workers Union which was formed on January 29, 2020, where several PLN Engineering employees formed a Workers Union with the name Persatuan Pekerja Prima Enjiniring (P3E) and has been recorded in the Decree of the Head of the Manpower





dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 3027/-1.838 tanggal 10 November 2020. PLN Enjiniring memiliki komitmen untuk menciptakan kondisi yang sehat dan serasi sekaligus terciptanya ketenangan kerja sesuai dengan azas hubungan industrial. Tidak pernah terjadi pemogokan kerja, demonstrasi atau gangguan lainnya, yang menghentikan kegiatan operasional PLN Enjiniring maupun gugatan terkait peradilan hubungan industrial. Hal ini dikarenakan adanya pemahaman dan saling pengertian yang baik antara manajemen PLN Enjiniring dengan karyawan sebagai mitra yang saling mendukung satu sama lain.

KESEHATAN

• Kebijakan

Fasilitas pemeliharaan kesehatan adalah bagian dari penghargaan ekstrinsik yang masuk dalam kategori manfaat umum. PT PLN Enjiniring memberikan bantuan pemeliharaan kesehatan kepada Pegawai dan keluarganya diatur dalam Keputusan Direksi No. 01.001.K/DIR/PLNE/XI/2020 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pegawai dan Keluarga yang Ditanggung PT PLN Enjiniring. Bentuk pemeliharaan kesehatan yang ditanggung Perusahaan terdiri dari:

- a. Rawat jalan,
- b. Rawat inap,
- c. Pemeriksaan penunjang atas rekomendasi dokter untuk peneguhan diagnosa di laboratorium,
- d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan sampai dengan anak ketiga,
- e. Gugur kandung,
- f. Perawatan di Unit Gawat Darurat (UGD),
- g. Program Keluarga Berencana (KB), imunisasi dan vaksinasi, khitan, pengobatan infertilitasi dan program bayi tabung,
- h. Perawatan gigi,
- i. Alat-alat rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi alat tubuh,
- j. Alat-alat cangkok/transplantasi,

and Transmigration Sub-Department of West Jakarta Administration Number 3027 /-1,838 on November 10, 2020. PLN Enjiniring has a commitment to create healthy and harmonious conditions while at the same time creating work peace in accordance with the principles of industrial relations. There were never any strikes, demonstrations or other disturbances, which stopped the PLN Enjiniring operational activities or lawsuits related to industrial relations justice. This is due to a good understanding and mutual understanding between PLN Enjiniring management and employees as partners who support each other.

HEALTH

• Policy

Health care facilities are part of an extrinsic award that falls into the category of general benefits. PLN Enjiniring provides health care assistance to employees and their families as regulated in the Decree of the Board of Directors No. 01.001.K / DIR / PLNE / XI / 2020 concerning the Implementation of Health Care for Employees and Families covered by PT PLN Enjiniring. The form of health care borne by the Company consists of:

- a. *Outpatient,*
- b. *Inpatient,*
- c. *Supporting examinations on the doctor's recommendation for confirmation of the diagnosis in the laboratory,*
- d. *Pregnancy examinations and assistance with childbirth up to the third child,*
- e. *Biological death,*
- f. *Care in the Emergency Unit (UGD),*
- g. *Family Planning Program (KB), immunization and vaccination, circumcision, infertilization treatment and IVF program,*
- h. *Dental care,*
- i. *Rehabilitation tools to restore the function of organs,*
- j. *Graft / transplant tools,*

- k. Alat-alat kesehatan terkait jantung,
- l. Obat untuk penyembuhan sesuai dengan formularium obat dan Daftar Obat Perusahaan (DOP),
- m. Tindakan bedah plastik khusus akibat kecelakaan kerja,
- n. Terapi kejiwaan,

Pelaksanaan pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan PT PLN Enjiniring adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan dapat melanggan sarana kesehatan milik pemerintah atau swasta, berupa rumah sakit, klinik, poliklinik, puskesmas, dokter umum, dokter spesialis, psikolog, psikiater, apotek, laboratorium, dan tempat pemeriksaan penunjang lainnya,
2. Dalam hal sarana rawat inap, level Manajemen Atas/Fungsional I dan Manajemen Menengah/Fungsional II mendapat fasilitas rawat inap kelas VIP, level Manajemen Dasar/Fungsional III mendapat fasilitas rawat inap kelas I, dan level Supervisor Atas hingga Fungsional IV mendapat fasilitas rawat inap kelas II,
3. Perusahaan melakukan upaya pencegahan gangguan kesehatan dengan cara:
 - a. Penyediaan sarana olahraga dan fasilitas olahraga lainnya;
 - b. Penyampaian informasi kesehatan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, ataupun seminar;
 - c. Pemeriksaan kesehatan tiap satu tahun sekali bagi Pegawai berusia di atas 40 tahun dan Pegawai yang bertugas di tempat berpotensi mengakibatkan penyakit.
 - d. Memfasilitasi kegiatan di bidang kesehatan dan olahraga,
 - e. Penyediaan sarana untuk ibu menyusui dan penitipan anak sampai dengan usia tiga tahun.

- k. Heart related medical devices,
- l. Medicines for healing in accordance with the drug formulary and the Company Drug List (DOP),
- m. Special plastic surgery due to occupational accidents,
- n. Psychiatric therapy,

Implementation of health care carried out by PLN Enjiniring is as follows:

1. Companies can subscribe to government-owned or private health facilities, in the form of hospitals, clinics, polyclinics, health centers, general practitioners, specialists, psychologists, psychiatrists, pharmacies, laboratories, and other supporting examination places,
2. In terms of inpatient facilities, Upper Management / Functional I and Middle / Functional II inpatient facilities receive VIP class inpatient facilities, Basic / Functional III inpatient facilities class I, and Upper Supervisor to Functional IV levels receive class inpatient facilities II,
3. The company makes efforts to prevent health problems by:
 - a. Provision of sports facilities and other sports facilities;
 - b. Delivering health information in the form of counseling, socialization, or seminars;
 - c. Health checks every once a year for employees over 40 years of age and employees who work in places that have the potential to cause illness.
 - d. Facilitating activities in the field of health and sports,
 - e. Provision of facilities for breastfeeding mothers and child care up to the age of three.





KESELAMATAN KERJA

• Kebijakan

PT PLN Enjiniring berkomitmen untuk senantiasa menjaga keselamatan kerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 26.001.K/DIR/PLNE/V/2015 dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta no. 404 tahun 2017. Sejak tahun 2016, sesuai dengan Risalah RUPS tanggal 19 Januari 2016, Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3LH) menjadi salah satu indikator kinerja PT PLN Enjiniring yang tertuang dalam Kontrak Manajemen/ Key Performance Indicator (KPI) tahun 2017 dalam perspektif kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Masyarakat. Oleh karena itu, PT PLN Enjiniring membentuk Tim Setup Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 27.001.K/DIR/PLNE/VI/2016 dan dilanjutkan dengan membentuk Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 06.003.K/DIR/PLNE/VII/2020, Tim Pengawas K3 yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 06.004.K/DIR/PLNE/VII/2020, dan Tim Tanggap Darurat yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 06.002.K/DIR/PLNE/VII/2020.

• Kegiatan

Dalam mendukung komitmen untuk menyelenggarakan program-program terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja, PT PLN Enjiniring memberikan pembekalan bagi tim dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi. Beberapa judul pelatihan dan sertifikasi yang telah terlaksana di tahun 2020 sebagai berikut:

WORK SAFETY

• Policy

PLN Enjiniring is committed to always maintaining work safety as stated in the Company Regulation (PP) which is stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 26.001.K / DIR / PLNE / V / 2015 and legalized by the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province no. 404 of 2017. Since 2016, according to the Minutes of the GMS dated 19 January 2016, Health, Safety and Environment (K3LH) has become one of the performance indicators for PLN Engineering as stated in the 2017 Key Performance Indicator (KPI) Contract. a leadership perspective, Governance, and Community Responsibility. Therefore, PLN Enjiniring formed the Occupational Health and Safety Management System Setup Team as stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 27.001.K / DIR / PLNE / VI / 2016 and continued by forming an Occupational Health and Safety Committee (P2K3) as stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 06.003.K / DIR / PLNE / VII / 2020, K3 Supervisory Team as stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 06.004.K / DIR / PLNE / VII / 2020, and the Emergency Response Team as stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 06.002.K / DIR / PLNE / VII / 2020.

• Activity

In supporting the commitment to carry out programs related to Occupational Health and Safety, PT PLN Enjiniring provides provision for the team in the form of training and certification. Some of the training and certification titles that have been carried out in 2020 are as follows:

TABEL PELAKSANAAN SERTIFIKASI K3 TAHUN 2020
TABLE OF 2020 K3 CERTIFICATION IMPLEMENTATION

No.	Waktu Pelaksanaan <i>Execution Time</i>	Jenis/Judul Sertifikasi <i>Type / Title of Certification</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Jumlah Peserta <i>Number of Participants*</i>
1	Januari	Pembinaan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	PT Phitagoras Global Duta	1
	January	<i>The Supervision Development of Occupational Safety and Health Norms</i>		
2	Januari	Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bidang Listrik	PT Phitagoras Global Duta	16
	January	<i>The Occupational Safety and Health (OSH) Norms of Supervision Training of Electrical</i>		
Total Jumlah Peserta Sertifikasi <i>Total Number of Certification Participants</i>				17

Selain program pelatihan dan sertifikasi, kegiatan terkait Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (K3LH) di PT PLN Enjiniring adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen pedoman K3,
2. Melakukan inspeksi APAR dan kotak P3K,
3. Pengadaan rambu-rambu K3 di dalam maupun di halaman kantor PT PLN Enjiniring,
4. Pemeriksaan lingkungan kantor, yaitu suhu, cahaya, debu, kebisingan,
5. Penerbitan SLO listrik, proteksi kebakaran, dan penyalur petir,
6. Membuat laporan kecelakaan kerja dan monitoring SMK3 untuk PT PLN (Persero) Pusat,
7. Membuat laporan P2K3 untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per Triwulan,

Beside training and certification programs, activities related to Health, Safety, and Environment (K3LH) at PLN Enjiniring are as follows:

1. Prepare the Occupational Health and Safety (K3) guideline document,
2. Fire extinguisher inspection and first aid kit,
3. Procurement of K3 signs inside and on the PT PLN Enjiniring office yard,
4. Inspection of the office environment, namely temperature, light, dust, noise,
5. Issuance of electricity SLO, fire protection, and lightning distributor,
6. Creating work accident reports and monitoring SMK3 for PT PLN (Persero) Pusat,
7. Make a P2K3 report for the Manpower and Transmigration Office per quarter,



Corporate Social Responsibility Terkait Pengembangan Sosial Dan Masyarakat

Corporate Social Responsibility Related to Social and Community Development

• Kebijakan

Sebagai bagian dari warga korporasi yang baik (*Good Corporate Citizenship*), PT PLN Enjiniring menyadari bahwa hubungan dengan masyarakat merupakan bentuk simbiosis mutualisme yang sangat menguntungkan bagi PT PLN Enjiniring. Kebijakan yang dimiliki PT PLN Enjiniring dituangkan dalam bentuk komitmen untuk membangun kesejahteraan bersama melalui berbagai upaya yang dapat dilakukan.

• Kegiatan

Selama tahun 2020 PT PLN Enjiniring telah melaksanakan berbagai program *Corporate Social Responsibility* terkait sosial kemasyarakatan yang meliputi 3 (tiga) kegiatan dengan total dengan rincian sebagai berikut:

• Policy

As part of a Good Corporate Citizenship, PLN Enjiniring realizes that relations with the community in the form of mutualism symbiosis is very beneficial for PLN Enjiniring. The policies that are owned by PLN Enjiniring are outlined in the form of a commitment to build mutual welfare through various efforts that can be made.

• Activity

During 2020, PT PLN Enjiniring has implemented various Corporate Social Responsibility programs related to social communities which include 3 (three) activities in total with the following details:

KEGIATAN CSR TAHUN 2020

THE 2020 CSR EVENTS

No	Kegiatan <i>Activity</i>	Jenis Kegiatan <i>Type of Activity</i>	Lokasi <i>Location</i>	Waktu Pelaksanaan <i>Time of Implementation</i>	Biaya (Rp) <i>Cost (Rp)</i>	Mobilisasi/ Pelaksanaan <i>Mobilization/ Implementation</i>
1	Bantuan Saranan Pendidikan PAUD Tahap II	Community Relations	Desa Karendan Site CNG Plant Bangkanai	September 2019	50,000,000	50,000,000
2	Kegiatan Bantuan Hewan Qurban 1440 H	Community Relations	Lokasi Proyek Muara Tawar	Agustus 2019	25,000,000	25,000,000

Sehingga total biaya CSR tahun 2020 adalah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan program CSR yang mendapat persetujuan untuk direalisasikan adalah seluruh kegiatan.

Untuk pelaksanaan program CSR di Bangkanai, Tim Sub-Bidang Komunikasi dan Kinerja telah melakukan social mapping terhadap 7 isu penting yang timbul di wilayah kerja PT PLN Enjiniring dan bobot tertinggi adalah pembangunan PAUD di Desa Karendan.

So that the total CSR cost in 2020 is Rp. 125,000,000, - (one hundred and twenty-five million rupiah) and CSR programs that have been approved for realization are all activities.

For the implementation of the CSR program in Bangkanai, the Communication and Performance Sub-Division Team has carried out social mapping of 7 important issues arising in the PT PLN Enjiniring work area and the highest weight is the development of PAUD in Karendan Village.



Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Konsumen

Corporate Social Responsibility Related To Consumer Responsibility



• Kebijakan

PT PLN Enjiniring senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan. Perbaikan kualitas layanan dan kinerja PT PLN Enjiniring terus ditingkatkan dan berbagai upaya dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan baik pelanggan internal (PLN Group) maupun eksternal.

• Kegiatan

PT PLN Enjiniring senantiasa menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan serta membangun hubungan dengan pelanggan. Salah satu pemenuhan kepuasan pelanggan ini dilakukan dengan cara mendengarkan suara pelanggan, baik pelanggan saat ini maupun pelanggan potensial. Sedangkan untuk membangun hubungan dengan pelanggan dilakukan dengan pengelolaan hubungan pelanggan dan pengelolaan aspirasi dan keluhan pelanggan.

Untuk memenuhi Kepuasan Pelanggan PT PLN Enjiniring dilakukan dengan cara mendengarkan, berinteraksi dan mengamati perilaku pelanggan guna memperoleh informasi atas produk dan layanan yang diberikan PT PLN Enjiniring kepada pelanggan internal (PLN Group) melalui rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero) dan afiliasinya maupun yang diinisiasikan sendiri oleh PT PLN Enjiniring.

Pendekatan yang dilakukan PT PLN Enjiniring untuk menindaklanjuti suara pelanggan dan memperoleh informasi serta umpan balik pelanggan adalah sebagai berikut:

- Rapat koordinasi mingguan dan bulanan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi/ masukan serta umpan balik pelanggan pada setiap tahapan pekerjaan;

• Policy

PLN Enjiniring is always committed in providing the best service for all customers. Improvements in service quality and performance of PLN Enjiniring continue to be improved and various efforts are made to determine the level of customer satisfaction, both internal (PLN Group) and external customers.

• Activity

PLN Enjiniring always maintains and improves customer satisfaction and builds relationships with customers. One of the fulfillment of customer satisfaction is done by listening to the voice of customers, both current and potential customers. Meanwhile, to build relationships with customers is done by managing customer relationships and managing customer aspirations and complaints.

To fulfill customer satisfaction, PT PLN Enjiniring is done by listening, interacting and observing customer behavior in order to obtain information on products and services provided by PLN Enjiniring to internal customers (PLN Group) through coordination meetings held by PT PLN (Persero) and its affiliates as well as which was initiated by PT PLN Enjiniring.

The approach taken by PT PLN Enjiniring to follow up on customer voices and obtain customer information and feedback is as follows:

- *Weekly and monthly coordination meetings are held to obtain information / input and customer feedback at each stage of work;*

- Media komunikasi (Telepon, SMS, email dan website) untuk menampung aspirasi dan keluhan pelanggan;
- Survey Kepuasan, Loyalitas dan Keterikatan Pelanggan yang dilakukan setiap tahun oleh Bidang Pengembangan Usaha dan Perencanaan Korporat untuk memperoleh informasi mengenai persepsi pelanggan terhadap kinerja, kualitas layanan dan produk PT PLN Enjiniring;
- In-depth interview yang dilakukan kepada pelanggan potensial;
- Pendekatan secara personal; dan
- Customer Day

PT PLN Enjiniring menindaklanjuti aspirasi, keluhan dan umpan balik pelanggan untuk memperbaiki kinerja, mutu produk, dan kualitas layanan yang dilakukan PT PLN Enjiniring dengan cara:

- Mengoptimalkan fungsi kerja tim proyek untuk berkoordinasi dengan pelanggan dan menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan bulanan/sesuai permintaan pelanggan;
- Melakukan kunjungan lapangan untuk mendengarkan suara pelanggan, sehingga tim proyek dapat merespon langsung keluhan pelanggan.

Terkait dengan pelanggan potensial, suara pelanggan diperoleh melalui rapat formal, diskusi informal, survey, pameran, Customer Day dan media elektronik (Telepon, SMS, email dan website).

- *Communication media (telephone, SMS, email and website) to accommodate customer aspirations and complaints;*
- *Survey of Customer Satisfaction, Loyalty and Engagement that is conducted annually by the Business Development and Corporate Planning Sector to obtain information on customer perceptions of PLN Enjiniring performance, service quality and products;*
- *In-depth interviews conducted with potential customers;*
- *Personal approach; and*
- *Customer Day*

PLN Enjiniring follows up on customer aspirations, complaints and feedback to improve performance, product quality, and service quality carried out by PLN Enjiniring by:

- *Optimizing the project team work function to coordinate with customers and submit monthly work progress reports / according to customer requests;*
- *Conduct field visits to listen to customer voices, so that the project team can respond directly to customer complaints.*

Regarding potential customers, customer votes are obtained through formal meetings, informal discussions, surveys, exhibitions, Customer Days and electronic media (telephone, SMS, e-mail and website).



Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Negara

Corporate Social Responsibility Related to Responsibility to the State

• Kebijakan

PT PLN Enjiniring berkomitmen untuk senantiasa mendukung pembangunan negara dengan berkontribusi sesuai dengan bidang kerja dan usaha yang dijalankan. Tanggung jawab terhadap Negara diwujudkan dalam hal mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kepatuhan terhadap kewajiban membayar pajak dan dukungan terhadap program-program yang dicanangkan oleh Pemerintah.

• Kegiatan

Dukung Program 35.000 MW, Penerangi Nusantara. Terkait program 35.000 MW yang ditugaskan Pemerintah kepada PLN dalam menerangi Nusantara, PT PLN Enjiniring memiliki kontribusi penting dalam mewujudkannya. Hal ini tampak jelas dari penugasan PLN kepada PT PLN Enjiniring untuk “mengawal” beberapa tugas strategis berkenaan dengan konsultasi pengerjaan berbagai proyek strategis. PT PLN Enjiniring bekerja sama dengan beberapa perusahaan swasta, yang merupakan mitra kerja PLN, untuk penggunaan jasa injenir dari PT PLN Enjiniring.

PT PLN Enjiniring sebagai Perusahaan senantiasa memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Perusahaan menyadari bahwa kontribusi pajak yang dibayarkan dapat mendukung dan membantu pemerintah dalam berbagai program pembangunan negeri. Selama 5 (lima) tahun terakhir Perusahaan telah memberikan kontribusi pajak sebesar Rp 23.571 Milyar

Adapun rincian kontribusi pajak selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

• Policy

PT PLN Enjiniring is committed to always supporting the country's development by contributing in accordance with the field of work and business being carried out. Responsibility to the State is manifested in terms of following the provisions of the applicable laws, compliance with the obligation to pay taxes and support for programs launched by the Government.

• Activity

Support the 35,000 MW Program, Lighting the Archipelago. Regarding the 35,000 MW program assigned by the Government to PLN in lighting up the archipelago, PLN Enjiniring has an important contribution to make. This is evident from the assignment of PLN to PLN Enjiniring to “guard” several strategic tasks with regard to consulting the work of various strategic projects. PT PLN Enjiniring collaborates with several private companies, which are PLN partners, to use engineering services from PT PLN Enjiniring.

PT PLN Enjiniring as a Company always fulfills its tax payment obligations. The company realizes that the tax contribution paid can support and assist the government in various domestic development programs. During the last 5 (five) years, the Company has contributed tax amounting to Rp 23,571 billion.

The details of tax contributions for the last 5 (five) years are as follows.

RINCIAN KONTRIBUSI PAJAK SELAMA 5 TAHUN
DETAILS OF TAX CONTRIBUTION FOR 5 YEARS

Tahun Year	Jumlah (Rp. Juta) Amount (IDR Million)
2020	4,947
2019	7,392
2018	5,056
2017	10,021
2016	1,102
Total	23,571

Selama 5 (lima) tahun terakhir, PT PLN Enjiniring belum pernah mendapatkan teguran ataupun sanksi terkait dengan pemenuhan pembayaran pajak.

During the last 5 (five) years, PLN Enjiniring has never received a warning or sanction regarding the fulfillment of tax payments.



Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Kreditur

Corporate Social Responsibility With Responsibility To Creditors

• Kebijakan

Dalam Pedoman Perilaku yang telah ditetapkan oleh PT PLN Enjiniring diatur tentang Hubungan dengan Investor termasuk dalam hal ini adalah kreditur perusahaan. Dalam hubungan dengan Investor ditetapkan kebijakan sebagai berikut ;

1. Memilih investor yang terpercaya, kredibel dan bertanggung jawab.
2. Membuat perjanjian kerja yang saling menguntungkan.
3. Menjalin komunikasi secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi.
4. Menyediakan informasi yang aktual, akurat dan prospektif.
5. Menjaga kepercayaan investor.

• Pelaksanaan

PT PLN Enjiniring senantiasa berupaya untuk menerapkan aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Perilaku maupun aturan internal lainnya. Beberapa hal yang menunjukkan bahwa Perusahaan telah memenuhi apa yang telah ditetapkan bisa terlihat dalam hal-hal berikut ini.

1. Perusahaan tidak pernah melakukan restrukturisasi utang selama 5 (lima) tahun terakhir.
2. Perusahaan memiliki kemampuan membayar utang yang baik. Meskipun dilihat dari sisi Rasio likuiditas, tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, baik diukur dengan menggunakan Rasio Lancar. Rasio likuiditas masih menunjukkan kondisi yang bagus yaitu dengan nilai 2,22. Dan dilihat dari sisi Rasio solvabilitas, di Tahun 2020 Perusahaan mengalami penurunan, baik untuk rasio liabilitas terhadap ekuitas maupun rasio liabilitas terhadap aset. Hal ini menunjukkan kemampuan PLN Enjiniring dalam membayar kewajiban-kewajiban meningkat di tahun 2020

• Policy

In the Code of Conduct that has been established by PT PLN Enjiniring is regulated on The Relationship with Investors including in this case the creditors of the company. In relation to investors are set the following policie ;

1. Choose a trusted, credible and responsible investor.
2. Making work agreements that are mutually beneficial.
3. Maintain honest and effective communication while maintaining the confidentiality of data and information.
4. Provide actual, accurate and prospective information.
5. Maintain investor confidence.

• Implementation

PLN Enjiniring always strives to apply the rules set out in the Code of Conduct and other internal rules. Several things that show that the Company has fulfilled what has been determined can be seen in the following matters.

1. *The company has never restructured its debt for the last 5 (five) years.*
2. *The company has a good debt repayment ability. Although viewed in terms of the liquidity ratio, in 2020 has decreased compared to 2019, both measured using Current Ratios. Liquidity ratio still shows good conditions, which is 2.22 poin. And in terms of the solvency ratio, in 2020 the Company experienced a decrease, both for the ratio of liabilities to equity and the ratio of liabilities to assets. This shows that PLN Engineering's ability to pay its obligations will increase in 2020.*

Corporate Social Responsibility Terkait Tanggung Jawab Kepada Pemasok

Corporate Social Responsibility With Responsibilities To Suppliers



• Kebijakan

Dalam Pedoman Perilaku yang telah ditetapkan oleh PT PLN Enjiniring diatur tentang Hubungan dengan Mitra Kerja/Pemasok. Dalam hubungan dengan Mitra Kerja/Pemasok ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Menjaga dan mengutamakan kepentingan Perusahaan.
2. Menilai secara obyektif, transparan dan akuntabel.
3. Membuat perjanjian kerja yang saling menguntungkan.
4. Menjalin komunikasi secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi.
5. Memberikan sanksi apabila tidak memenuhi kontrak kerja.

• Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa telah mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan.

PT PLN Enjiniring akan senantiasa melakukan evaluasi berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan. Untuk hal-hal yang pemenuhannya masih belum optimal akan segera ditindak lanjuti dengan upaya-upaya perbaikan sehingga tanggung jawab Perusahaan kepada Pemasok dapat terpenuhi dengan baik dan selanjutnya akan memberikan dampak positif terhadap kinerja Perusahaan secara berkelanjutan.

• Policy

In the Code of Conduct established by PLN Enjiniring, it regulates Relationships with Work Partners / Suppliers. In relation to Business Partners / Suppliers, the following policies are established:

1. *Maintain and prioritize the interests of the Company.*
2. *Assessing objectively, transparently and accountably.*
3. *Making work agreements that are mutually beneficial.*
4. *Maintain honest and effective communication while maintaining the confidentiality of data and information.*
5. *Provide sanctions if they do not fulfill the work contract.*

• Activity

The implementation of goods and services procurement activities has complied with what has been determined by the Company.

PLN Enjiniring will always conduct evaluations based on the results of the survey that has been conducted. For matters whose fulfillment is still not optimal, it will be immediately followed up with corrective efforts so that the Company's responsibilities to suppliers can be fulfilled properly and will subsequently have a positive impact on the Company's performance in a sustainable manner.



LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL REPORT



Laporan Keuangan
Financial Report



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT REGARDING**

**TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 1 JANUARI 2019**

**THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR
THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2020, 2019 AND 1 JANUARY 2019**

**PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY**

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Didik Sudarmadi
Alamat Kantor : Menara Enjiniring, Jl. Ciputat Raya No.123, RT.1/RW.8, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
Jabatan : Presiden Direktur
2. Nama : Martono
Alamat Kantor : Menara Enjiniring, Jl. Ciputat Raya No.123, RT.1/RW.8, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
Jabatan : Direktur Keuangan dan SDM

On behalf of the Board of Director, we, the undersigned:

1. Name : Didik Sudarmadi
Office address : Menara Enjiniring, Jl. Ciputat Raya No.123, RT.1/RW.8, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
Position : President Director
2. Name : Martono
Office address : Menara Enjiniring, Jl. Ciputat Raya No.123, RT.1/RW.8, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
Position : Finance and HR Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Prima Layanan Nasional Enjiniring dan entitas anak ("Grup");
 2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
 4. Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.
1. *The Board of Director is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring and its subsidiary (the "Group");*
 2. *The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
 3. a. *All information in the Group's consolidated financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;*
b. *The Group's consolidated financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts; and*
 4. *The Board of Director is responsible for the Group's internal control systems.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus, this statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Board of Director

Jakarta, 25 Juni/June 2021



Didik Sudarmadi
Presiden Direktur/President Director

Martono
Direktur Keuangan dan SDM/
Finance and HR Director

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring

Menara Enjiniring, Jalan Ciputat Raya No. 123, Kebayoran Lama - Jakarta 12310 - Indonesia
Tel: (62-21) 27510363, Fax: (62-21) 27510362

Website: <http://www.plne.co.id>, email: contact@plne.co.id



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Prima Layanan Nasional Enjiniring dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring and its subsidiary, which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2020, and the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility


Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.



Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Prima Layanan Nasional Enjiniring dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Prima Layanan Nasional Enjiniring and its subsidiary as at 31 December 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA
25 Juni/June 2021



Daniel Kohar, S.E., CPA

Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.1130

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 1/1 Schedule
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2020**

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019*)	1 Januari/ January 1, 2019*)	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	6	338,591	226,822	319,314	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	7	2,858	6,379	8,277	Restricted cash in banks
Piutang usaha	8				Trade receivables
Pihak berelasi		147,497	203,939	169,480	Related parties
Pihak ketiga		11,563	609	2,031	Third parties
Piutang lain-lain					Other receivables
Pihak berelasi	26	7,657	11,000	19,497	Related parties
Pihak ketiga		4,778	16,632	578	Third parties
Piutang sewa pembiayaan	9	27,665	24,563	21,809	Finance lease receivables
Aset kontrak	10				Contract assets
Pihak berelasi		210,059	216,980	201,642	Related parties
Pihak ketiga		5,115	15,086	6,146	Third parties
Pajak dibayar di muka	24a				Prepaid taxes
Pajak lainnya		74,829	91,354	78,111	Other taxes
Biaya dibayar di muka dan uang muka	11	<u>17,749</u>	<u>43,282</u>	<u>64,422</u>	Prepaid expenses and advances
Jumlah Aset Lancar		<u>848,361</u>	<u>856,646</u>	<u>891,307</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	7	23,128	16,749	16,749	Restricted cash in banks
Piutang sewa pembiayaan	9	213,913	241,578	266,141	Finance lease receivables
Investasi pada ventura bersama	13	9,851	13,726	26,908	Investments in joint venture
Aset tetap	14	31,131	11,806	9,416	Property, plant and equipment
Pajak dibayar di muka	24a				Prepaid taxes
Pajak penghasilan badan		1,336	-	-	Corporate income taxes
Biaya dibayar di muka dan uang muka	11	6,291	8,712	1,191	Prepaid expenses and advances
Aset tidak lancar lainnya	12	<u>29,202</u>	<u>16,740</u>	<u>21,841</u>	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>314,852</u>	<u>309,311</u>	<u>342,246</u>	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		<u>1,163,213</u>	<u>1,165,957</u>	<u>1,233,553</u>	TOTAL ASSETS

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 33)

As restated (refer to Note 33) *)



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 1/2 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2020

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

DECEMBER 31, 2020

(In millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019*)	1 Januari/ January 1, 2019*)	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang usaha	15	103,490	134,096	116,175	Trade payables
Uang muka dari pelanggan	16	21,006	35,393	64,133	Advances from customers
Utang lain-lain		8,977	5,472	41,243	Other payables
Liabilitas kontrak	17				Contract liabilities
Pihak berelasi		136,633	112,157	144,199	Related parties
Pihak ketiga		7,808	1,986	831	Third parties
Utang pajak	24b				Taxes payable
Pajak penghasilan badan		58	2,437	898	Corporate income taxes
Pajak lainnya		7,433	11,805	13,384	Other taxes
Biaya masih harus dibayar	18	53,779	54,645	51,936	Accrued expenses
Liabilitas sewa		7,979	-	-	Lease liabilities
Liabilitas imbalan pascakerja	25	1,999	673	1,161	Post-employment benefit obligation
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	19	<u>32,978</u>	<u>32,978</u>	<u>32,978</u>	Current maturity of long-term loan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>382,140</u>	<u>391,642</u>	<u>466,938</u>	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	19	55,050	87,062	119,074	Long-term loan - net of current maturities
Liabilitas imbalan pascakerja	25	25,554	18,087	13,670	Post-employment benefit obligation
Liabilitas sewa		875	-	-	Lease liabilities
Utang lain-lain		<u>142</u>	<u>156</u>	<u>156</u>	Other payables
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>81,621</u>	<u>105,305</u>	<u>132,900</u>	Total Non-Current Liabilities
EKUITAS					EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp1.000 (nilai penuh) per saham Rp1.000					Capital stock - 25,000,000 authorised, subscribed and paid-up shares at a par value of Rp1,000 (full amount) per share
Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh - 25.000.000 saham	20	25,000	25,000	25,000	Retained earnings
Saldo laba					Appropriated
Ditentukan penggunaannya		5,169	5,169	5,169	Unappropriated
Tidak ditentukan penggunaannya		659,940	644,444	608,472	Other comprehensive income/(loss)
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain		<u>9,329</u>	<u>(5,616)</u>	<u>(4,937)</u>	Equity attributable to owner of the Company
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		699,438	668,997	633,704	Non-controlling interests
Kepentingan non-pengendali		<u>14</u>	<u>13</u>	<u>11</u>	
Jumlah Ekuitas		<u>699,452</u>	<u>669,010</u>	<u>633,715</u>	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>1,163,213</u>	<u>1,165,957</u>	<u>1,233,553</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 33)

As restated (refer to Note 33) *)

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 2 Schedule
**LAPORAN POSISI LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020
(Dalam jutaan Rupiah)**
**CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2020
(In millions of Rupiah)**

	Catatan/ Notes	2020	2019*)	
PENDAPATAN	21	625,344	978,680	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	22	(436,166)	(717,048)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO		189,178	261,632	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	23	(190,713)	(136,740)	OPERATING EXPENSES
(RUGI)/LABA USAHA		(1,535)	124,892	OPERATING (LOSS)/INCOME
Penghasilan bunga		9,637	13,955	Finance income
(Kerugian)/keuntungan kurs mata uang asing - bersih		(166)	394	(Loss)/gain on foreign exchange - net
Rugi investasi pada asosiasi dan ventura bersama	13	(3,684)	(13,482)	Loss on investments in associates and joint ventures
Beban bunga	19	(14,732)	(15,644)	Interest expenses
Lain-lain - bersih		30,924	15,291	Others - net
LABA SEBELUM PAJAK		20,444	125,406	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	24	(4,947)	(7,392)	INCOME TAX EXPENSES
LABA TAHUN BERJALAN		15,497	118,014	PROFIT FOR THE YEAR
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan				Other comprehensive income for the year
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be subsequently reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali imbalan pascakerja karyawan	25	(1,069)	(679)	Remeasurement of post- employment benefit obligation
Pengukuran kembali nilai wajar atas atas investasi saham		2,336	-	Remeasurement of fair value of investments in shares
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		16,764	117,335	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:				Profit for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		15,496	118,012	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		1	2	Non-controlling interest
JUMLAH		15,497	118,014	TOTAL
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada:				Total comprehensive income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		16,763	117,333	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		1	2	Non-controlling interest
JUMLAH		16,764	117,335	TOTAL

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 33)

As restated (refer to Note 33) *)



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 3 Schedule

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020
(Dalam jutaan Rupiah)CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2020
(In millions of Rupiah)

Catatan/ Notes	Modal ditempatkan disetor/ Issued and paid-up capital	Saldo laba/Retained earnings Ditetapkan penggunaannya/ Appropriated	Saldo laba/Retained earnings Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Pengkuran kembali imbalan pascakerja karyawan/ Remeasurement of employment benefit obligation	Komponen ekuitas lain/ Other components of equity	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent entity	Keperentingan nonpengendali/ Non-controlling interest	Jumlah ekuitas/ Total equity	Balance as at January 1, 2019 before restatement	Impact from restatement	Balance as of January 1, 2019*) after restatement	Dividends Profit for the year Total comprehensive income for the year	Balance as at January 1, 2020	Opening balance adjustment for adoption of SFAS No. 71: Financial Instruments	Balance as of January 1, 2020 after adjustment	Profit for the year Total comprehensive income for the year	Balance as at December 31, 2020	As restated (refer to Note 33) *)
33	25,000	5,169	620,413	(4,937)	-	645,645	11	645,656										
	<u>25,000</u>	<u>5,169</u>	<u>608,472</u>	<u>(4,937)</u>	-	<u>633,704</u>	<u>11</u>	<u>633,715</u>										
	-	-	(82,040)	-	-	(82,040)	-	(82,040)										
	-	-	118,012	-	-	118,012	2	118,014										
	-	-	-	(679)	-	(679)	-	(679)										
	<u>25,000</u>	<u>5,169</u>	<u>644,444</u>	<u>(5,616)</u>	-	<u>688,997</u>	<u>13</u>	<u>689,010</u>										
	-	-	-	-	13,678	13,678	-	13,678										
	<u>25,000</u>	<u>5,169</u>	<u>644,444</u>	<u>(5,616)</u>	<u>13,678</u>	<u>682,675</u>	<u>13</u>	<u>682,688</u>										
	-	-	15,496	-	-	15,496	1	15,497										
	-	-	-	(1,069)	2,336	1,267	-	1,267										
	<u>25,000</u>	<u>5,169</u>	<u>659,940</u>	<u>(6,685)</u>	<u>16,014</u>	<u>699,438</u>	<u>14</u>	<u>699,452</u>										

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 33)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements.

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 4 Schedule
**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**
(Dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2020**
(In millions of Rupiah)

	<u>2020</u>	<u>2019*</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Laba sebelum pajak	20,444	125,406	Profit before tax
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba sebelum pajak:			Adjustments to reconcile profit before tax:
Rugi investasi pada ventura bersama	3,684	13,482	Loss on investments in joint ventures
Pendapatan dividen dari investasi saham	(1,785)	-	Dividend income from investment in shares
Beban imbalan pascakerja	7,944	3,435	Post-employment benefit expense
Penyisihan untuk penurunan nilai piutang usaha dan piutang lain-lain	31,987	79	Allowances for impairment of trade and other receivables
Penyusutan aset tetap dan aset hak guna	15,376	1,241	Depreciation of property, plant and equipment and right-of-use assets
Amortisasi perangkat lunak	3,130	2,513	Amortisation of software
Beban bunga	14,732	15,644	Interest expenses
Pendapatan bunga	(9,637)	(13,955)	Finance income
Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja	<u>85,875</u>	<u>147,845</u>	Operating cash flows before changes in working capital
Perubahan modal kerja:			Changes in working capital:
Piutang usaha	29,492	(33,116)	Trade receivables
Piutang lain-lain	(794)	(7,557)	Other receivables
Aset kontrak	16,892	(24,278)	Contract assets
Pajak dibayar di muka	(6,725)	(13,243)	Prepaid taxes
Biaya dibayar di muka dan uang muka	27,505	13,619	Prepaid expenses and advances
Aset tidak lancar lainnya	422	2,288	Other non-current assets
Utang usaha	(30,606)	17,921	Trade payables
Uang muka dari pelanggan	(14,387)	(28,740)	Advances from customers
Utang lain-lain	3,491	(35,771)	Other payables
Liabilitas kontrak	30,298	(30,887)	Contract liabilities
Utang pajak	(4,372)	3,215	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	(866)	2,759	Accrued expenses
(Penempatan)/penarikan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	(2,858)	1,898	(Placement)/withdrawal of restricted cash in banks
Penerimaan dari pelanggan atas piutang sewa pembiayaan	24,563	21,809	Receipts from customers of finance lease receivables
Penerimaan restitusi Pajak Pertambahan Nilai	21,914	-	Cash receipts from Value Added Tax restitution
Pembayaran bunga	(14,732)	(15,644)	Payments for interest expenses
Penerimaan bunga	9,637	13,955	Interest received
Pembayaran imbalan pascakerja	(220)	(185)	Payments of post-employment benefit
Pembayaran pajak penghasilan badan	(7,326)	(10,697)	Payments of corporate income tax
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>167,203</u>	<u>25,191</u>	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	(172)	(3,631)	Addition of property, plant and equipment
Penerimaan dividen	1,976	-	Receipts of dividends
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi	<u>1,804</u>	<u>(3,631)</u>	Net cash provided by/(used in) investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran dividen	-	(82,040)	Payments of dividend
Pembayaran liabilitas sewa	(25,226)	-	Payments of lease liabilities
Pembayaran atas pinjaman jangka panjang	(32,012)	(32,012)	Payments for long-term loan
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(57,238)</u>	<u>(114,052)</u>	Net cash used in financing activities
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	111,769	(92,492)	NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	<u>226,822</u>	<u>319,314</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u>338,591</u>	<u>226,822</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 33)

As restated (refer to Note 33) *)

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/1 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring ("Perusahaan") didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 3 Oktober 2002 dari Haryanto S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No.C-00184.HT.01.01TH.2003 tanggal 6 Januari 2003 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 19, Tambahan No. 1891 tanggal 7 Maret 2003.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan akta No. 55 tanggal 23 Desember 2019 dari Lenny Janis Ishak S.H., notaris di Jakarta mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan. Perubahan ini telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No.AHU-0005329.AH.01.02 tanggal 21 Januari 2020.

Perusahaan berdomisili di Jakarta. Kantor pusat berkedudukan di Jalan Ciputat Raya No.123, Jakarta. Perusahaan merupakan entitas anak Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN"). Kegiatan komersial Perusahaan dimulai pada tanggal 1 Januari 2003.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi usaha enjiniring, pengadaan dan konstruksi, operasi, pemeliharaan pada bidang ketenagalistrikan dan non-ketenagalistrikan sebagai berikut:

- a. Jasa konsultasi enjiniring dan atau manajemen proyek termasuk integrator proyek ketenagalistrikan;
- b. Studi sistem kelistrikan
- c. Studi analisa mengenai dampak lingkungan ("AMDAL");
- d. Informasi teknologi;
- e. Pendidikan dan pelatihan;
- f. Penelitian dan pengembangan;
- g. Penyediaan tenaga listrik;
- h. Perencanaan, pengadaan, pembangunan dan atau pemasangan (jasa konstruksi) bidang pembangkitan, transmisi dan atau distribusi;
- i. Pemeliharaan dan atau pengoperasian bidang pembangkitan, transmisi dan atau distribusi;
- j. Pengolahan, penimbunan, transportasi, niaga, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi minyak dan/atau gas bumi; dan
- k. Penyediaan atau manufaktur berbagai peralatan elektrikal untuk transmisi dan elektrikal untuk transmisi dan distribusi listrik.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anaknya (bersama-sama disebut "Grup") masing-masing sebanyak 833 dan 940 (tidak diaudit).

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Prima Layanan Nasional Enjiniring ("the Company") was established in Jakarta based on Notarial Deed No. 9 dated October 3, 2002 of Haryanto S.H., a notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights in Decision Letter No.C-00184.HT.01.01TH.2003 dated January 6, 2003 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 19, Supplement No. 1891 dated March 7, 2003.

The Articles of Association of the Company have been amended several times, most recently based on deed No. 55 dated December 23, 2019, which was issued by Lenny Janis Ishak S.H., a notary in Jakarta regarding the changes in the purpose, objectives and business activities of the Company. This change was registered in the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Letter No. AHU-0005329.AH.01.02 dated January 21, 2020.

The Company is domiciled in Jakarta. The headquarter is located in Jalan Ciputat Raya No.123, Jakarta. The Company is a subsidiary of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN"). The commercial activity of the Company started on January 1, 2003.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities encompasses engineering, procurement, construction, operation of machinery and maintenance within the electricity and non-electricity sectors. The activities are as follows:

- a. Engineering consultancy services and/or project management including services related to project integrator electricity;
- b. Study of electrical systems;
- c. Study of environmental impact analysis ("EIA");
- d. Information technology;
- e. Education and training;
- f. Research and development;
- g. Electricity supply;
- h. Planning, procurement and construction or installation (construction services) of the generation, transmission and/or distribution of electricity;
- i. Maintenance and/or operation of the generation, transmission and/or distribution;
- j. Processing, stockpiling, transportation, trade, installation operation and maintenance of oil and/or gas; and
- k. Provision or manufacturing of various items of electrical equipment for electrical transmission and also for the transmission and distribution of electricity.

As at December 31, 2020 and 2019, the Company and its subsidiary (collectively referred to as the "Group")'s total number of employees was 833 and 940 (unaudited), respectively.

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/2 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)
b. Susunan pengurus dan informasi lain

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)
b. Management and other information

The composition of the Company's Board of Commissioners was as follows:

2020

 Presiden Komisaris
Komisaris

 Ahmad Rofik
Djoko Prasetyo
Edward Siagian
Marzuqi

 President Commissioner
Commissioners

2019

 Presiden Komisaris
Komisaris

 Tumpal Manaris Simarmata
Djoko Prasetyo
Julius Bobo
Marzuqi

 President Commissioner
Commissioners

Susunan Direksi adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Board of Directors was as follows:

2020 dan/and 2019

 Pelaksana Tugas Direktur Utama
Direktur

 Hernadi Buhron
Alfi Zamzami
Yanuar Hakim
Ultrisza Mednawarman

 Acting President Director
Directors

Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Audit Committee was as follows:

2020 dan/and 2019

 Ketua
Sekretaris
Anggota

 Julius Bobo
Raslan
Anita Mardalina
Djoko Juwanto
Marzuqi

 Chairman
Secretary
Members

2. PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA
a. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020

Penerapan dari standar baru, interpretasi, amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan:

2. IMPLEMENTATION OF INDONESIAN GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES
a. New and Revised Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISFAS") effective for the year beginning on or after January 1, 2020

The adoption of the following new standards, interpretations, amendments and annual improvements to accounting standards, all of which have been effective since January 1, 2020 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements for the current year.



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/3 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU
UMUM DI INDONESIA (lanjutan)2. IMPLEMENTATION OF INDONESIAN GENERALLY
ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES (continued)a. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK")
Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar
Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang berlaku efektif
untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah
tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)a. New and Revised Statements of Financial
Accounting Standards ("SFAS") and
Interpretations of Financial Accounting Standards
("ISFAS") effective for the year beginning on or
after January 1, 2020 (continued)

- Penyesuaian tahunan 2020: "Kerangka Konseptual 2019"
- PSAK No. 101: "Penyajian Laporan Keuangan Syariah"
- PSAK No. 102: "Akuntansi Murabahah"
- ISAK No. 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba"
- ISAK No. 36: "Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK No. 16: Aset Tetap dan PSAK No 73, Sewa"
- ISAK No. 101: "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan"
- ISAK No. 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah"
- Amandemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan"
- Amandemen PSAK No. 15: "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- Amandemen PSAK No. 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- Amandemen PSAK No. 62: "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan - Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"
- Amandemen PSAK No. 73: "Konsesi Sewa terkait COVID-19"
- Amandemen PSAK No. 71, PSAK No. 55, dan PSAK No. 60 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan"
- Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan ("PPSAK") No. 13 mengenai pencabutan PSAK No. 45: "Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba"

- Annual improvement 2020: "Conceptual Framework 2019"
- SFAS No. 11: "Presentation of Financial Statements of Endowment Entities"
- SFAS No. 102: "Murabahah Accounting"
- ISFAS No. 35: "Presentation of Non-profit Oriented Entity Financial Statements"
- ISFAS No. 36: "Interpretation of Interactions between Provisions regarding Land Rights" in SFAS No. 16: "Fixed Assets" and SFAS No. 73: "Leases"
- ISFAS No. 101: "Recognition of Murabahah Deferred Income without Significant Risk related to Inventory Ownership"
- ISFAS No. 102: "Impairment of Murabahah Receivables"
- Amendment to SFAS No. 1: "Presentation of Financial Statements concerning the Title of Financial Statements"
- Amendment to SFAS No. 15: "Investments in Associates and Joint Ventures"
- Amendment to SFAS No. 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"
- Amendment to SFAS No. 62: "Insurance Contracts"
- Amendment to SFAS No. 71: "Financial Instruments - Prepayment Features with Negative Compensation"
- Amendment to SFAS No. 73: "COVID-19 related Rent Concessions"
- Amendment to SFAS No. 71, SFAS No. 55 and SFAS No. 60 regarding Interest Rate Benchmark Reform
- Annual improvement to SFAS No. 1: "Presentation of Financial Statements"
- Statement of Withdrawal of Financial Accounting Standard No. 13 regarding withdrawal of SFAS No. 45: "Financial Reporting of Non-Profit Entities"

Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

The new standards, amendments and annual improvements that have been issued but that were not effective for the financial year beginning January 1, 2020 were as follows:

- PSAK No. 74: "Kontrak Asuransi"
- PSAK No. 112: "Akuntansi Wakaf"
- Amandemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amandemen PSAK No. 22: "Kombinasi Bisnis - Definisi Bisnis"
- Amandemen PSAK No. 22: "Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual"
- Amandemen PSAK No. 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi Kontrak Memeratkan - Biaya Memenuhi Kontrak"

- SFAS No. 74: "Insurance Contracts"
- SFAS No. 112: "Accounting for Endowments"
- Amendment to SFAS No. 1: "Presentation of Financial Statements"
- Amendment to SFAS No. 22: "Business Combinations - Business Definition"
- Amendment to SFAS No. 22: "Business Combinations - Reference to Conceptual Framework"
- Amendment to SFAS No. 57: "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Onerous Contracts - Cost of Fulfilling"

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/4 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU
UMUM DI INDONESIA (lanjutan)**
a. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

- Amandemen PSAK No. 71, PSAK No. 55, PSAK No. 60, PSAK No. 62 dan PSAK No. 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga 2
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 69: “Agrikultur”
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71: “Instrumen Keuangan”
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73: “Sewa”
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 110: “Akuntansi Sukuk”
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 111: “Akuntansi Wa’d”

Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2021, kecuali Amandemen PSAK No. 22: “Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual”, Amandemen PSAK No. 57, Penyesuaian tahunan PSAK No. 69, Penyesuaian tahunan PSAK No. 71 dan Penyesuaian tahunan PSAK No. 73 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, Amandemen PSAK No. 1 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 dan PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

b. Penerapan awal PSAK No. 71: “Instrumen Keuangan”

PSAK No. 71: “Instrumen Keuangan” diterbitkan di bulan Juli 2017 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. Grup menerapkan PSAK No. 71 mulai 1 Januari 2020.

Grup menerapkan PSAK No. 71 secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparasi.

Sesuai ketentuan transisi PSAK No. 71 terkait dengan klasifikasi, pengukuran dan penurunan nilai aset keuangan, Grup telah memilih untuk tidak menyajikan kembali periode komparatif. Dampak kumulatif atas penyesuaian nilai tercatat pada awal penerapan diakui pada saldo laba pada 1 Januari 2020 sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi dalam standar.

Lihat Catatan 31 untuk informasi lebih lanjut mengenai dampak penerapan PSAK No. 71 pada Grup.

**2. IMPLEMENTATION OF INDONESIAN GENERALLY
ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES (continued)**
a. New and Revised Statements of Financial Accounting Standards (“SFAS”) and Interpretations of Financial Accounting Standards (“ISFAS”) effective for the year beginning on or after January 1, 2020 (continued)

- Amendment to SFAS No. 71, SFAS No. 55, SFAS No. 60, SFAS No. 62 and SFAS No. 73 regarding Interest Rate Benchmark Reform 2
- Annual improvement to SFAS No. 69: “Agriculture”
- Annual improvement to SFAS No. 71: “Financial Instruments”
- Annual improvement to SFAS No. 73: “Leases”
- Annual improvement to SFAS No. 110: “Sukuk Accounting”
- Annual improvement to SFAS No. 111: “Wa’d Accounting”

The above new standards, amendments and annual improvements have been effective since January 1, 2021, except for Amendment to SFAS No. 22: “Business Combinations - Reference to Conceptual Framework”, Amendment to SFAS No. 57, Annual improvement to SFAS No. 69, Annual improvement to SFAS No. 71 and Annual improvement to SFAS No. 73, all of which will be effective beginning January 1, 2022, Amendment to SFAS No. 1, which will be effective beginning January 1, 2023 and SFAS No. 74, which will be effective beginning January 1, 2025, but early adoption is permitted.

As at the issuance date of these consolidated financial statements, the Group was evaluating the potential impact of these new standards, amendments and annual improvements on the Group’s consolidated financial statements.

b. First implementation of SFAS No. 71: “Financial Instruments”

SFAS No. 71: “Financial Instruments” was issued in July 2017 and became effective on January 1, 2020, although earlier adoption was permitted. The Group began implementing SFAS No. 71 on January 1, 2020.

The Group implemented SFAS No. 71 retrospectively and recognised the cumulative effect of initial application. The Group has not restated comparative information.

In accordance with the transition provisions of SFAS No. 71 relating to the classification, measurement and impairment requirements for financial assets, the Group has elected not to restate the comparative period. The cumulative effect on any resulting adjustments to carrying amounts on initial application have been recognised in retained earnings as at January 1, 2020 as permitted under the transition provisions in the standard.

See Note 31 for further information regarding the impact of SFAS No. 71 on the Group.



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/5 Schedule


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA (lanjutan)
c. Penerapan awal PSAK No. 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

PSAK No. 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", diterbitkan di bulan Juli 2017 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Grup menerapkan PSAK No. 72 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2020, yang berdampak pada perubahan atas kebijakan akuntansi dan adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap jumlah yang telah diakui pada laporan keuangan.

Standar baru menentukan pengakuan pendapatan yaitu terjadi ketika pengendalian barang atau jasa yang dijanjikan telah dialihkan kepada pelanggan (Catatan 3.m).

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Grup terhadap kontrak pendapatan dengan mengacu 5 (lima) tahapan yang ada di dalam PSAK No. 72, terdapat perbedaan yang signifikan dengan kebijakan akuntansi sebelumnya terhadap laporan keuangan konsolidasian terkait transaksi pendapatan biaya penyambungan. Manajemen memilih metode transisi retrospektif dengan dampak kumulatif atas penerapan awal standar diakui pada penerapan awal (*modified retrospective*). Manajemen juga memilih untuk menerapkan PSAK No. 72 secara retrospektif hanya terhadap kontrak yang bukan merupakan kontrak selesai pada tanggal penerapan awal.

d. Penerapan awal PSAK No. 73: "Sewa"

Grup menerapkan PSAK No. 73: "Sewa" secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparasi sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi dalam standar. Grup mengakui utang sewa dan aset hak-guna pada tanggal penerapan awal. Grup sebagai penyewa akan mengukur utang sewa pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan tingkat bunga implisit sewa (jika tersedia) atau pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Tingkat pinjaman inkremental penyewa yang diterapkan adalah 11,95%. Kemudian Grup mengukur aset hak-guna pada jumlah yang sama dengan utang sewa, yang disesuaikan dengan jumlah sewa dibayar dimuka atau terutang terkait dengan sewa tersebut, yang diakui segera dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal penerapan awal.

Dampak penerapan awal PSAK No. 73: "Sewa" terhadap saldo awal 1 Januari 2020 untuk aset hak-guna sebesar Rp34.080 dan utang sewa sebesar Rp34.080.

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IMPLEMENTATION OF INDONESIAN GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES (continued)
c. First implementation of SFAS No. 72: "Revenue from Contracts with Customers"

SFAS No. 72: "Revenue from Contracts with Customers" was issued in July 2017 and became effective on January 1, 2020. The Group adopted SFAS No. 72 for the financial year beginning January 1, 2020, which resulted in changes in the accounting policies used and adjustments to the amounts recognised in the financial statements.

The new standard determines that the revenue is recognised when control of the promised goods or services has been passed to the customers (Note 3.m).

Based on the Group's assessment of the revenue contracts that refer to the five-step model of revenue recognition in SFAS No. 72, the accounting policies used for such contracts differ significantly from the accounting policies previously used for the consolidated financial statements in regard to connection fee income. Management has chosen a retrospective method with the cumulative effect of initially applying this standard being recognised at the date of initial application (*modified retrospective*). Management has also chosen to implement PSAK No. 72 retrospectively only to contracts that had not been completed at the date of initial application.

d. First implementation of SFAS No. 73: "Leases"

The Group implemented SFAS No. 73: "Leases" retrospectively. It recognised the cumulative effect of initial implementation and did not restate comparative information as permitted under the specific transition provisions in the standard. The Group recognises lease liabilities and right-of-use assets on the initial implementation date. The Group as a lessee, measures lease liabilities as being the present value of the remaining lease payments, discounted by the implicit interest rate of the lease (if available) or the incremental borrowing rate on initial implementation date. The lessee's incremental borrowing rate applied was 11.95%. Then, the Group measures the right-of-use assets using the same borrowing rate that has been used – or that would have been used in the absence of an implicit interest rate – in the measurement of the lease liabilities, adjusted with any prepayments or accruals of the leases that have been recognised immediately in the consolidated statement of financial position on the date of initial application.

The impact of the first implementation of SFAS No. 73: "Leases" on the beginning balance as at January 1, 2020 for right-of-use assets was Rp34,080 and lease liabilities amounting to Rp34,080.

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/6 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM DI INDONESIA (lanjutan)
2. IMPLEMENTATION OF INDONESIAN GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES (continued)
d. Penerapan awal PSAK No. 73: "Sewa" (lanjutan)
d. First implementation of SFAS No. 73: "Leases" (continued)

Dalam menerapkan PSAK No. 73 untuk pertama kalinya, Grup menerapkan cara praktis berikut yang diperkenankan oleh standar:

In applying SFAS No. 73 for the first time, the Group has used the following practical expedients permitted by the standard:

- menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
- akuntansi sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek;
- pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal;
- menggunakan tinjauan ke belakang (*hindsight*) dalam menentukan masa alternatif kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa;
- untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa berdasarkan kelas aset pendasar; dan
- mengandalkan penilaian apakah sewa bersifat memberatkan sesuai PSAK No. 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" segera sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk melakukan tinjauan penurunan nilai.

- *a single discount rate has been applied to portfolios that contain leases with reasonably similar characteristics;*
- *operating leases with a remaining lease term of less than 12 months as at January 1, 2020 have treated as short-term leases for accounting purposes;*
- *initial direct costs for the measurement of the right-of-use assets at the date of initial application have been excluded;*
- *hindsight has been used in determining the lease term in cases where the contract contains options to extend or terminate the lease;*
- *non-lease components have not been separated from lease components on lease according to the class of underlying assets; and*
- *the assessment immediately before the date of initial application of whether leases are onerous based on SFAS No. 57: "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" has been relied on as an alternative to performing an impairment review.*

Grup telah memilih untuk tidak menilai kembali apakah suatu kontrak mengandung sewa atau tidak pada tanggal penerapan awal untuk kontrak yang telah ada sebelum tanggal transisi yang dimana Grup telah menggunakan penilaian yang dibuat sesuai dengan PSAK No. 30: Sewa dan ISAK No. 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa.

The Group has also elected not to reassess whether or not a contract contained a lease at the date of initial application for the contracts entered into before the transition date that the Group has assessed under SFAS No. 30: "Leases" and ISFAS No. 8: "Determining Whether An Arrangement Contains A Lease".

Lihat Catatan 31 untuk informasi lebih lanjut mengenai dampak penerapan PSAK No. 73 pada Grup.

Please see Note 31 for further information regarding the impact of SFAS No. 73 on the Group.



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/7 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang meliputi PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh DSAK-IAI.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah ("Rp"), yang juga merupakan mata uang fungsional Grup. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Prinsip-prinsip konsolidasian
i. Entitas anak
i.1. Konsolidasi

Entitas anak merupakan semua entitas (termasuk entitas bertujuan khusus), di mana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

Saldo, transaksi, penghasilan, dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
a. Compliance with the Financial Accounting Standards ("FAS")

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include SFAS and ISFAS issued by the DSAK-IAI.

b. Basis of the preparation of the consolidated financial statements

With the exception of the consolidated statements of cash flows, the consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis of accounting. The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah ("Rp"), which is also the functional currency of the Group. The measurement basis is the historical cost, except for certain accounts that are measured on the basis described in the related accounting policies.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the indirect method with cash flows being classified into operating, investing and financing activities.

c. Principles of consolidation
i. Subsidiary
i.1. Consolidation

Subsidiaries are all the entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect such returns through its power over the entity.

A subsidiary is consolidated from the date on which control is transferred to the Group and are de-consolidated from the date on which that control ceases.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/8 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)
i. Entitas anak (lanjutan)
i.2. Akuisisi

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat setiap kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk mengakuisisi entitas anak adalah nilai wajar seluruh aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari entitas yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup.

Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar setiap aset dan liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjensi yang diambil alih, yang diperoleh dalam kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, Grup akan mengukur kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pada pihak yang diakuisisi sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Selisih lebih antara imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali dalam pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepemilikan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi, dibandingkan dengan nilai wajar bagian Grup atas aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi, dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah tersebut lebih kecil dari nilai wajar atas aset bersih teridentifikasi entitas anak yang diakuisisi dan pengukuran atas seluruh jumlah tersebut telah ditelaah, dalam hal pembelian dengan diskon, selisih tersebut diakui secara langsung dalam laba rugi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
c. Principles of consolidation (continued)
i. Subsidiaries (continued)
i.2. Acquisition

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group.

The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. The identifiable assets acquired and the liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values as at the acquisition date.

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Non-controlling interests are reported as equity in the consolidated statements of financial position, separate from the owner of the parent entity. Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, the Group will remeasure its previously held equity interest in the acquiree at its fair value at its acquisition date and recognise the resulting gain or loss, if any, in profit or loss. Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at its fair value as at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or a liability are recognised in profit or loss. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured and its subsequent settlement is accounted for within equity.

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the Group's share of the identifiable net assets acquired are recorded as goodwill. If these amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the subsidiary acquired and the measurement of all amounts has been reviewed, in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/9 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)
c. Principles of consolidation (continued)
ii. Perubahan kepemilikan atas entitas anak tanpa kehilangan pengendalian
ii. Changes in ownership interest in subsidiaries without loss of control

Transaksi dengan kepentingan nonpengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagiannya atas jumlah tercatat aset neto yang diperoleh dicatat dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan kepada kepentingan nonpengendali juga dicatat pada ekuitas.

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying amount of the net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

iii. Pelepasan entitas anak
iii. Disposal of subsidiaries

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain.

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognises the assets (including any goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss, or transferred directly to retained earnings if required under other SFAS.

Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

Any investment retained in the former subsidiary is recognised at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained on the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama
iv. Accounting for associates and joint ventures

Entitas asosiasi adalah suatu entitas di mana Grup mempunyai pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan, dan biasanya Grup memiliki 20% atau lebih hak suara, tetapi tidak melebihi 50% hak suara. Investasi pada entitas asosiasi dicatat pada laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

An associate is an entity over which the Group has significant influence, but not control, and is generally accompanied by a shareholding giving rise to voting rights of 20% or greater but not exceeding 50%. Investment in associates are accounted for in the consolidated financial statements using the equity method less impairment losses, if any.

Ventura bersama merupakan pengaturan bersama antara beberapa pihak yang melakukan kesepakatan pengendalian bersama yang memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Ventura bersama ini menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

A joint venture is a joint arrangement in which the parties that share joint control have rights to the net assets of the arrangement. Joint ventures are accounted for using the equity method less impairment losses, if any.

- Akuisisi
- Acquisitions

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, instrumen ekuitas yang diterbitkan atau liabilitas yang timbul atau diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi.

Investment in an associate or a joint venture is initially recognised at cost. The cost of an acquisition is measured at the fair value of the assets transferred, the equity instruments issued or the liabilities incurred or assumed as at the date of exchange, plus costs directly attributable to the acquisition.



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/10 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)
iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)
- Akuisisi (lanjutan)

Goodwill pada akuisisi entitas asosiasi atau ventura bersama merupakan selisih lebih yang terkait dengan biaya perolehan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dengan bagian Grup atas nilai wajar neto aset teridentifikasi dari entitas asosiasi atau ventura bersama dan dimasukkan dalam jumlah tercatat investasi.

- Metode ekuitas

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura Bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Grup atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi atau ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Grup memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi atau ventura bersama dieliminasi sebesar bagian Grup dalam entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi atau ventura bersama akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Grup.

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
c. Principles of consolidation (continued)
iv. Accounting for associates and joint ventures (continued)
- Acquisitions (continued)

Goodwill on the acquisition of an associate or a joint venture represents the excess of the cost of the acquisition of the associate or joint venture over the Group's share of the fair value of the identifiable net assets of the associate or joint venture and is included in the carrying amount of the investment.

- Equity method of accounting

In applying the equity method of accounting, the Group's share of its associate's or joint venture's post-acquisition profit or loss is recognised in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognised in other comprehensive income.

These post-acquisition movements and distributions received from an associate or a joint venture are adjusted against the carrying amounts of the investment.

When the Group's share of the losses of an associate or a joint venture equals or exceeds its interest in the associate or joint venture, including any other unsecured non-current receivables, the Group does not recognise further losses unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the associate or joint venture.

Unrealised gains on transactions between the Group and its associates or joint ventures are eliminated to the extent of the Group's interest in the associate or joint venture. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of the impairment of the asset being transferred. The accounting policies of the associate or joint venture have been changed where necessary to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.

Dividend receivables from an associate or a joint venture are recognised as reductions in the carrying amount of the investment.



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/11 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)****c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)****c. Principles of consolidation (continued)****iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)****iv. Accounting for associates and joint ventures (continued)****- Metode ekuitas (lanjutan)****- Equity method of accounting (continued)**

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika bukti tersebut ada, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

At each reporting date, the Group determines whether there is any objective evidence that the investment in an associate or joint venture is impaired. If any such evidence exists, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate or the joint venture and its carrying amount and recognises the amount in profit or loss.

- Pelepasan**- Disposals**

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dihentikan pengakuannya apabila Grup tidak lagi memiliki pengaruh signifikan. Grup mengukur investasi yang tersisa sebesar nilai wajar. Selisih antara jumlah tercatat investasi yang tersisa pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

An investment in an associate or a joint venture is derecognised when the Group loses significant influence and subsequently any retained equity interest in the entity is remeasured at its fair value. The difference between the carrying amount of the retained interest at the date when significant influence is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan sebagian atau dilusi yang timbul pada investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dimana pengaruh signifikan masih dipertahankan diakui dalam laba rugi dan hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

Gains and losses arising from the partial disposal or dilution of an investment in an associate or a joint venture in which significant influence is retained are recognised in profit or loss. Only a proportionate share of the amount previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.

d. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing**d. Foreign currency transaction and balances**

Pembukuan Grup diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsionalnya). Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali selisih kurs mata uang asing yang dikapitalisasi sebagai biaya pinjaman.

The accounts of the Group are maintained in Indonesian Rupiah, the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). Transactions during the period involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions were made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies were adjusted to reflect the rates of exchange prevailing at such a date. With the exception of the foreign exchange differences that are capitalised as borrowing costs, the resulting gains or losses are credited or charged to profit or loss.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kurs konversi yang digunakan Grup sebagai berikut:

On December 31, 2020 and 2019, the conversion rates used by the Group were as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Mata uang			Currency
US\$	14,105	13,901	US\$
CNY	2,161	1,991	CNY

*) dalam jumlah penuh/in full amount

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/12 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
e. Transaksi pihak-pihak berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga dekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi dari entitas lain (atau entitas asosiasi yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
e. Transactions with related parties

A related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions apply:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to one another).
 - ii. One entity is an associate of the other entity (or an associate of a member of a Company of which the other entity is a member).
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of the employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).
 - viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/13 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
DECEMBER 31, 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
e. Transaksi pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

f. Aset keuangan
Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020
i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Mulai 1 Januari 2020, Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi), dan
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Grup telah melakukan pemilihan takterbatal pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

ii. Penghentian pengukuran

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
e. Transactions with related parties (continued)

A government-related entity can be an entity that is controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance (i.e. the Ministry of Finance will be a shareholder of the entity) or an entity controlled by the Government of the Republic of Indonesia (in such a case the Ministry of State-Owned Enterprises will function as the Government's shareholder representative).

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

f. Financial assets
Accounting policies from January 1, 2020
i. Classification, recognition and measurement

As at January 1, 2020, the Group classified its financial assets in the following measurement categories:

- those to be measured subsequently at fair value (either through other comprehensive income, or through profit or loss), and
- those to be measured at amortised cost.

The classification depended on the entity's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows.

For assets measured at fair value, gains and losses will be recorded either in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, the manner of recording will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, the manner of recording will depend on whether the Group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment being measured at fair value through other comprehensive income.

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing such assets changes.

ii. Derecognition

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and when the Group has transferred substantially all the risks and rewards of ownership.

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/14 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
f. Aset keuangan (lanjutan)
**Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020
(lanjutan)**
iii. Pengukuran

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran yang Grup mengklasifikasikan instrumen utangnya:

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
f. Financial assets (continued)
**Accounting policies from January 1, 2020
(continued)**
iii. Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not measured at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payments of principal and interest.

Debt instruments

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the Group classifies its debt instruments:

- Amortised cost: Assets that are held for the collection of contractual cash flows in cases where such cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortised cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and that is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/15 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Aset keuangan (lanjutan)

f. Financial assets (continued)

Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020
(lanjutan)Accounting policies from January 1, 2020
(continued)

iii. Pengukuran (lanjutan)

iii. Measurement (continued)

Instrumen utang (lanjutan)Debt instruments (continued)

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI): Aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan, di mana arus kas aset tersebut hanya atas pembayaran pokok dan bunga, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam keuntungan/(kerugian) lain-lain. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan dalam keuntungan dan kerugian lain-lain dan beban penurunan nilai pada beban lain-lain.

- Fair value through other comprehensive income (FVOCI): Assets that are held for the collection of contractual cash flows and financial assets that are held for sale, in cases where the assets' cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through Other Comprehensive Income ("OCI"), except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue and foreign exchange gains and losses which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other gains/(losses). Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other gains and losses and impairment expenses in other expenses.

- Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi dan disajikan bersih dalam laporan laba rugi di dalam keuntungan/(kerugian) lainnya dalam periode kemunculannya.

- Fair value through profit or loss: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at fair value through profit or loss. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at fair value through profit or loss and that is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss and presented net in the statement of profit or loss within other gains/(losses) in the period in which it arises.

Instrumen ekuitasEquity instruments

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain, tidak ada reklasifikasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi tersebut. Dividen dari investasi semacam itu tetap diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan.

The Group subsequently measures all equity investments at fair value. In cases where the Group's management has elected to present the fair-value gains and losses on equity investments in other comprehensive income, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Group's right to receive payments is established.

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/16 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
f. Aset keuangan (lanjutan)
**Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020
(lanjutan)**
iii. Pengukuran (lanjutan)
Instrumen ekuitas (lanjutan)

Perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui dalam keuntungan/(kerugian) lain-lain dalam laporan laba rugi sebagaimana berlaku. Kerugian penurunan nilai (dan pemulihan kerugian penurunan nilai) atas investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajar lainnya.

Kebijakan akuntansi sebelum 1 Januari 2020
i. Klasifikasi

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini: diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan piutang, tersedia untuk dijual, serta dimiliki hingga jatuh tempo. Klasifikasi ini tergantung pada tujuan perolehan aset keuangan. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat awal pengakuan.

- (a) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori ini jika perolehannya terutama untuk dijual dalam jangka pendek. Derivatif juga dikategorikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali jika ditetapkan sebagai lindung nilai. Aset pada kategori ini diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan; jika tidak, aset tersebut diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

- (b) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran yang tetap atau dapat ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi harga di pasar aktif. Pinjaman yang diberikan dan piutang dimasukkan sebagai aset tidak lancar, kecuali jika jatuh temponya melebihi 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Pinjaman yang diberikan dan piutang ini dimasukkan sebagai aset tidak lancar. Pinjaman yang diberikan dan piutang Grup terdiri dari "kas dan setara kas", "rekening bank yang dibatasi penggunaannya", "piutang usaha" dan "piutang lainnya" pada laporan posisi keuangan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
f. Financial assets (continued)
**Accounting policies from January 1, 2020
(continued)**
iii. Measurement (continued)
Equity instruments (continued)

Changes in the fair value of financial assets measured at fair value through profit or loss are recognised in other gains/(losses) in the statement of profit or loss as applicable. Impairment losses (and the reversal of impairment losses) on equity investments measured at FVOCI are not reported separately from other changes in fair value.

Accounting policies before January 1, 2020
i. Classification

The Group classifies its financial assets in the following categories: those measured at fair value through profit or loss, loans and receivables, available-for-sale, and held-to-maturity. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

- (a) Financial assets measured at fair value through profit and loss

Financial assets measured at fair value through profit or loss are financial assets held for trading. A financial asset is classified in this category if acquired principally for the purpose of being sold in the short term. Derivatives are also categorised as held for trading unless they are designated as hedges. Assets in this category are classified as current assets if they are expected to be settled within 12 months; otherwise, they are classified as non-current.

- (b) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are included in current assets, except for maturities that extend more than 12 months beyond the end of the reporting period. These are classified as non-current assets. The Group's loans and receivables comprised "cash and cash equivalents", "restricted cash in banks", "trade receivables" and "other receivables" in the statement of financial position.



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/17 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
f. Aset keuangan (lanjutan)
**Kebijakan akuntansi sebelum 1 Januari 2020
(lanjutan)**
i. Klasifikasi (lanjutan)
(c) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah instrumen non-derivatif yang ditentukan pada kategori ini atau tidak diklasifikasikan pada kategori yang lain. Aset keuangan tersedia untuk dijual dimasukkan sebagai aset tidak lancar kecuali investasinya jatuh tempo atau manajemen bermaksud melepaskannya dalam kurun waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

(d) Dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan di mana Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset tersebut hingga jatuh tempo, dan tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau tersedia untuk dijual.

ii. Pengukuran

Investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi untuk seluruh aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada awalnya dicatat sebesar nilai wajar dan biaya transaksinya dibebankan pada laporan laba rugi. Aset keuangan tersedia untuk dijual dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya dicatat sebesar nilai wajar. Pinjaman yang diberikan dan piutang dan aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Selisih neto yang timbul dari perubahan nilai wajar kategori "aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi" disajikan pada laporan laba rugi dalam "penghasilan keuangan" dalam periode terjadinya. Perubahan nilai wajar efek moneter dan non-moneter yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual diakui pada pendapatan komprehensif lain.

Pendapatan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan sekuritas yang tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi sebagai "penghasilan lain-lain" ketika hak Grup untuk menerima pembayaran sudah ditetapkan. Pendapatan bunga aset keuangan tersebut dicatat pada "penghasilan keuangan".

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
f. Financial assets (continued)
**Accounting policies before January 1, 2020
(continued)**
i. Classification (continued)
(c) Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets are non-derivatives that are either designated in this category or not classified in any of the other categories. They are included in non-current assets unless the investment matures or management intends to dispose of it within 12 months of the end of the reporting period.

(d) Held-to-maturity

Held-to-maturity financial assets are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the Group has the positive intent and ability to hold, and which are not designated as having been measured at fair value through profit or loss or as available-for-sale

ii. Measurement

Investments are initially recognised at fair value plus the transaction costs for all financial assets not carried at fair value through profit or loss. Financial assets carried at fair value through profit or loss are initially recognised at fair value and transaction costs are expensed in profit or loss. Available-for-sale financial assets and financial assets measured at fair value through profit or loss are subsequently carried at fair value. Loans and receivables and financial assets held to maturity are carried at amortised cost using the effective interest-rate method.

Net differences arising from changes in the fair value of the "financial assets measured at fair value through profit or loss" category are presented in profit or loss within "finance income" in the period in which they arise. Changes in the fair value of monetary and non-monetary securities classified as available-for-sale are recognised in other comprehensive income.

Dividend income from financial assets measured at fair value through profit or loss and available-for-sale securities are recognised in profit or loss as part of "other income" when the Group's right to receive payments is established. Interest income from financial assets measured at fair value through profit or loss is included in "finance income".

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/18 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
f. Aset keuangan (lanjutan)
**Kebijakan akuntansi sebelum 1 Januari 2020
(lanjutan)**
ii. Pengukuran (lanjutan)

Bunga atas efek yang tersedia untuk dijual dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif yang diakui pada laporan laba rugi sebagai "penghasilan keuangan".

g. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

h. Kas dan bank

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

i. Rekening bank yang dibatasi penggunaannya

Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya, digunakan sebagai jaminan atau yang tidak dapat digunakan secara bebas digolongkan dalam kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

j. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha adalah jumlah piutang pelanggan atas jasa yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha biasa. Piutang lain-lain adalah jumlah piutang pihak ketiga atau pihak berelasi diluar kegiatan usaha biasa. Jika penagihan diperkirakan diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi usaha biasa, jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak demikian, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
f. Financial assets (continued)
**Accounting policies before January 1, 2020
(continued)**
ii. Measurement (continued)

Interest on available-for-sale securities calculated using the effective interest-rate method is recognised in profit or loss as part of "finance income".

g. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amount and when there is an intention to settle on a net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

h. Cash on hand and cash in banks

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement that are not used as collateral or that are unrestricted.

i. Restricted cash in banks

Cash and cash equivalents which have been restricted for certain purposes, used for collateral or which can not be used freely are classified as restricted cash and cash equivalents.

j. Trade and other receivables

Trade receivables are amounts due from customers for services performed in the ordinary course of business. Other receivables are amounts due from third or related parties for transactions outside the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/19 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**j. Piutang usaha dan piutang lain-lain (lanjutan)**

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi. Ketika piutang usaha atau piutang non-usaha, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Keberhasilan penagihan kembali di kemudian hari atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan pada laba rugi.

k. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan aset tetap meliputi: (a) harga pembelian, (b) biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisinya sekarang, dan (c) estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan dan restorasi lokasi aset (jika ada). Setiap bagian dari aset tetap dengan biaya perolehan yang signifikan terhadap total biaya perolehan aset, disusutkan secara terpisah.

Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh Grup dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, ketika aset telah mencapai akhir umur manfaatnya.

Penyusutan diakui dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Tahun/Years

Perlengkapan umum

5

General equipment

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap diakui sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**j. Trade and other receivables (continued)**

The amount of the impairment loss is recognised in profit or loss. When a trade or other receivable for which an impairment allowance had been recognised becomes uncollectible in a subsequent period, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited to profit or loss.

k. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortised over their beneficial periods using the straight-line method.

l. Property, plant and equipment

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost of property, plant and equipment includes: (a) the purchase price, (b) any costs directly attributable to bringing the asset to its present location and condition, and (c) the initial estimate of the cost of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located (if any). Each part of property, plant or item of equipment with a cost that is significant in relation to the total cost of the item is depreciated separately.

The residual value of an asset is the estimated amount that the Group would currently obtain from the disposal of the asset after deducting the estimated costs of disposal, if the asset is already of the age and in the condition expected at the end of its useful life.

Depreciation is recognised using the straight-line method based on the estimated economic useful lives of the assets as follows:

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year-end, and the effect of any changes in estimates is accounted for on a prospective basis.

The costs of maintenance and repairs are charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service a property, plant and equipment are recognised as assets if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/20 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
I. Aset tetap (lanjutan)

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

Biaya hukum awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah dan biaya-biaya tersebut tidak didepresiasi. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah.

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat kejadian atau transaksi ekonomi yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK No. 73: hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK No. 16: Aset Tetap.

m. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Untuk tujuan menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi (unit penghasil kas).

Aset nonkeuangan, selain goodwill, yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
I. Property, plant and equipment (continued)

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognised on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that is determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when the item is derecognised.

Land rights are recognised at cost and not depreciated.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the acquisition cost of the land and these costs are not depreciated. Costs related to the renewal of land rights are recognised as intangible assets and amortised over the contractual life of the land rights.

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land right in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group but give the rights to use the underlying assets, the Group treats these transactions as leases for accounting purposes under SFAS No. 73: Leases. If the land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS No. 16: Fixed Assets.

m. Impairment of non-financial asset

Assets that have an indefinite useful life are not subject to amortisation but are tested annually for impairment or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying value exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and its value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there is separately identifiable cash flows (cash generating unit).

Non-financial assets, other than goodwill, that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/21 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**m. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)**

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain goodwill, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pemulihan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang diukur dengan menggunakan model revaluasi sesuai dengan PSAK yang lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak akan dipulihkan lagi.

Beban dan pemulihan penurunan nilai disajikan secara terpisah dalam laba rugi, setelah penyajian laba usaha.

n. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha biasa. Utang lain-lain adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok diluar kegiatan usaha biasa. Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

o. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, merupakan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat selesainya aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**m. Impairment of non-financial asset (continued)**

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill, would be recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Any reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other SFAS. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

Impairment charges and reversals are disclosed in a separate line item within profit or loss, below the operating profit line.

n. Trade and other payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Other payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired outside of the ordinary course of business. Trade and other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

o. Borrowing costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to become ready for their intended use or sale, are to be added to the cost of such assets until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expensed on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/22 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
o. Biaya pinjaman (lanjutan)

Biaya pinjaman dikapitalisasi yang berasal dari rugi selisih kurs dibatasi sedemikian rupa sehingga jumlah dikapitalisasi tidak melebihi jumlah biaya pinjaman yang mungkin terjadi jika pinjaman tersebut dilakukan dengan menggunakan mata uang fungsional pada periode tersebut.

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

p. Pengakuan pendapatan dan beban
Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020
Pendapatan

Sejak 1 Januari 2020, Grup telah menerapkan PSAK No. 72 yang membutuhkan pendapatan pengakuan untuk memenuhi 5 langkah penilaian:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
3. Tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Grup memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.
4. Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah margin.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi saat:

- a. Pada waktu tertentu (biasanya untuk janji dalam memindahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Sepanjang waktu (biasanya untuk janji dalam memberikan layanan pada pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran kemajuan yang sesuai untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
o. Borrowing costs (continued)

Borrowing costs are capitalised from foreign exchange losses to the extent by which the capitalised amount does not exceed the amount of borrowing costs that may have been incurred had the loan been denominated in the functional currency.

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

All other borrowing costs are recognised in profit or loss in the period in which they are incurred.

p. Revenue and expense recognition
Accounting policy from January 1, 2020
Revenue

Since January 1, 2020, the Group has applied SFAS No. 72, which requires revenue recognition to fulfill five steps of assessment:

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee that will be paid during the contract period.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct good or service promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling prices are estimated based on expected cost plus margin.*
5. *Recognise revenue when the performance obligation has been satisfied via the transferral of a promised good or service to a customer (transferral is considered to have occurred when the customer obtains control of the goods or services).*

A performance obligation may be satisfied at:

- a. *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- b. *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.*



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/23 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
p. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)
**Perlakuan akuntansi mulai 1 Januari 2020
(lanjutan)**
Pendapatan (lanjutan)

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual

Kebijakan akuntansi sebelum 1 Januari 2020
Pendapatan

Bila hasil kontrak proyek dapat diestimasi dengan andal, pendapatan dan biaya diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari kegiatan kontrak pada akhir periode pelaporan, yang diukur berdasarkan proporsi biaya kontrak yang terjadi hingga tanggal pelaporan dibagi dengan estimasi jumlah biaya kontrak.

Pengukuran termasuk pekerjaan tambah (kurang), klaim dan pembayaran insentif yang telah disetujui oleh pelanggan. Bila hasil kontrak proyek tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan kontrak diakui hanya yang berkaitan dengan beban kontrak yang telah terjadi yang dapat diperoleh kembali.

Bila jumlah biaya kontrak memungkinkan melebihi jumlah pendapatan kontrak, estimasi kerugian diakui segera sebagai beban.

Pada tanggal pelaporan, kelebihan biaya kontrak ditambah laba (dikurangi rugi) diakui atas penagihan kontrak proyek disajikan sebagai aset lancar pada "Aset kontrak", sedangkan kelebihan penagihan atas biaya kontrak ditambah laba (dikurangi rugi) diakui disajikan sebagai kewajiban lancar pada "Liabilitas kontrak".

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
p. Revenue and expense recognition (continued)
**Accounting policy from January 1, 2020
(continued)**
Revenue (continued)

The payment of the transaction price is different for each contract. A contract asset is recognised when the consideration paid by the customer is less than the balance of the performance obligation that has been satisfied. A contract liability is recognised when the consideration paid by the customer is more than the balance of the performance obligation that has been satisfied.

Expenses

Expenses are recognised as incurred on an accrued basis.

Accounting policies before January 1, 2020
Revenue

In cases where the outcome of a project contract can be estimated reliably, revenue and costs are recognised with reference to the stage of the completion of the contract activity at the end of the reporting period, which is measured according to the proportion of the estimated total contract cost that the contract cost incurred for the work performed to date comprises.

Variations in contract work, claims and incentive payments are included to the extent that they have been agreed with the customer. In cases where the outcome of a project contract cannot be estimated reliably, contract revenue is recognised to the extent of the incurred contract cost that is likely to be recovered.

When it is probable that the total contract cost will exceed total contract revenue, the expected loss is recognised as an expense immediately.

At the reporting date, contract cost plus earnings (deducted losses) in excess of the billings on project contracts are presented as current assets under "Contract assets" while billings in excess of contract cost plus earnings (deducted losses) are presented as current liabilities under "Liability contracts".



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/24 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
p. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)
**Pelakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020
(lanjutan)**
Pendapatan (lanjutan)

Pendapatan dan beban atas penyaluran gas kompresi berdasarkan jumlah energi yang terpakai pada saat dilakukan proses jasa kompresi gas setiap akhir bulan.

q. Imbalan kerja
Imbalan pascakerja

Grup menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Grup juga memberikan imbalan pascakerja lain tanpa pendanaan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Grup.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi.

Imbalan kerja jangka panjang

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan *Projected Unit Credit*. Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Grup mengakui keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain periode terjadinya.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
p. Revenue and expense recognition (continued)
**Accounting policies before January 1, 2020
(continued)**
Revenue (continued)

Revenues and expenses from the distribution of compressed gas are based on the total amount of energy consumed for gas compression services as determined at the end of each month.

q. Employee benefits
Post-employment benefits

The Group has established a defined benefit pension plan covering all of its eligible permanent employees. The Group also provides other unfunded defined post-employment benefit plans for its qualifying employees based on the Group's policies

The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the *Projected Unit Credit Method*. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of Government Bonds (given that currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.

Long-term benefits

Long-term benefits are determined using the *Projected Unit Credit Method*. Past service costs are recognised immediately in profit or loss. The Group recognised gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gain or loss on a curtailment or settlement of a defined benefit plan is recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged to other comprehensive income in the period in which they occur.

The long-term post-employment benefit obligation recognised in the consolidated statement of financial position represents the present value of the defined benefit liabilities.



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/25 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**r. Provisi**

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

s. Sewa**Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020****Grup sebagai penyewa**

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Grup menyewa aset tetap tertentu. Kontrak sewa biasanya dibuat untuk periode tetap dari dua hingga 20 tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi.

Persyaratan sewa dinegosiasikan secara individual dan berisi berbagai persyaratan dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberlakukan perjanjian apa pun selain jaminan untuk tujuan peminjaman.

Sewa diakui sebagai aset hak pakai dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Grup. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa untuk setiap periode. Aset hak pakai didepresiasi selama periode yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa sewa dengan metode garis lurus.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**r. Provisions**

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, when it is probable that the Group will be required to settle the obligation and when a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognised as a provision is the best estimate of the consideration that is expected to be required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. In cases where a provision is measured using the cash-flows estimate to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of such cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, the receivable is recognised as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and if the amount of the receivable can be measured reliably.

s. Leases**Accounting policies from January 1, 2020****The Group as a lessee**

The determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is made based on the substance of the arrangement and an assessment of whether the fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and an assessment of whether the arrangement conveys a right to use the asset.

The Group leases certain property, plant and items of equipment. Rental contracts are typically made for fixed periods of two to 20 years but may have extension options.

Lease terms are negotiated on individual bases and contain a wide range of different terms and conditions. The lease agreements do not impose any covenants other than security for borrowing purposes.

A lease is recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date on which the leased asset is available for use by the Group. Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period. The right-of-use asset is depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis.



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/26 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
s. Sewa (lanjutan)
**Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020
(lanjutan)**
Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai.
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut, dan
- pembayaran penalti untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Grup, suku bunga pinjaman incremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

Untuk menentukan suku bunga pinjaman tambahan, Grup:

- jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima,
- menggunakan pendekatan *build-up* yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk sewa yang dimiliki oleh Grup, yang tidak memiliki pembiayaan pihak ketiga baru-baru ini, dan
- membuat penyesuaian spesifik untuk sewa, misalnya jangka waktu, mata uang dan jaminan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
s. Leases (continued)
**Accounting policies from January 1, 2020
(continued)**
The Group as a lessee (continued)

Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present-value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:

- fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivable
- variable lease payments that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date
- amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees
- the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain that it will exercise such an option, and
- payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising such an option.

Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included in the measurement of the liability

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If the rate cannot be readily determined, which is generally the case for leases in the Group, the lessee's incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms, security and conditions.

To determine the incremental borrowing rate, the Group:

- where possible, uses recent third-party financing received by the individual lessee as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions that have occurred since the third-party financing was received,
- uses a build-up approach that starts with a risk-free interest rate adjusted for credit risk for leases held by the Group in cases where there is no recent third-party financing, and
- makes adjustments specific to the lease, e.g. adjustments of term, currency and security.



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/27 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**s. Sewa (lanjutan)****Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)****Grup sebagai penyewa (lanjutan)**

Grup dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak guna.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap periode.

Aset hak pakai diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima
- biaya langsung awal, dan
- biaya restorasi.

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Aset hak guna juga mengalami penurunan nilai (Catatan 3.m).

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang. Aset bernilai rendah terdiri dari peralatan umum.

Opsi ekstensi dan terminasi

Opsi ekstensi dan terminasi termasuk dalam sejumlah sewa properti dan peralatan di seluruh Grup. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi ekstensi dan terminasi yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Grup dan bukan oleh pemberi sewa masing-masing.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**s. Leases (continued)****Accounting policies from January 1, 2020 (continued)****The Group as a lessee (continued)**

The Group is exposed to potential future increases in variable lease payments based on an index or rate; such increases are not included in the lease liability until they take effect. When adjustments to lease payments based on an index or rate take effect, the lease liability is reassessed and adjusted against the right-of-use asset.

Lease payments are allocated between principal and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:

- the amount of the initial measurement of the lease liability
- any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received
- any initial direct costs, and
- restoration costs.

Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis. If the Group is reasonably certain that it will exercise a purchase option, the right-of-use asset is depreciated over the underlying asset's useful life.

The right-of-use assets are also subject to impairment (Note 3.m).

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognised on a straight-line basis as an expense in profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less. Low-value assets comprise general equipment.

Extension and termination options

Extension and termination options are included in a number of property and equipment leases across the Group. These terms are used to maximise operational flexibility in terms of managing contracts. The majority of extension and termination options held are exercisable only by the Group and not by the respective lessor.

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/28 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
s. Sewa (lanjutan)
**Kebijakan akuntansi mulai 1 Januari 2020
(lanjutan)**
Grup sebagai penyewa (lanjutan)
Jaminan nilai residu

Untuk mengoptimalkan biaya sewa selama periode kontrak, Grup terkadang memberikan jaminan nilai residu sehubungan dengan sewa peralatan.

Pendapatan sewa guna usaha dari kegiatan operasi sewa dimana Grup bertindak sebagai pemberi sewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa.

Grup sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Grup mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomis aset pendasar.

Dalam sewa pembiayaan, dimana Grup mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, Grup mengakui dan menyajikan aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Grup sebagai pesewa dalam sewa pembiayaan.

Grup mengakui pembayaran sewa yang diterima dari sewa operasi sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
s. Leases (continued)
**Accounting policies from January 1, 2020
(continued)**
The Group as a lessee (continued)
Residual value guarantees

To optimise lease costs during the contract period, the Group sometimes provides residual value guarantees in relation to equipment leases

Lease income from operating leases in cases where the Group is a lessor is recognised in income on a straight-line basis over the lease term.

The Group as a lessor

When the Group acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Group considers certain indicators such as whether the lease term is for the major part of the economic life of the asset.

Under a finance lease, where the Group transfers substantially all the risks and rewards related to the ownership of the leased item, the Group recognised and presented a finance lease receivables in the consolidated statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease. Lease payments received are treated as payments of principal and finance income. The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Group's net investment as lessors in finance leases.

The Group recognises lease payments received under operating leases as income on the straight-line basis over the lease term.



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/29 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**s. Sewa (lanjutan)****Kebijakan akuntansi sebelum 1 Januari 2020****Grup sebagai penyewa**

Grup menyewa aset tetap tertentu. Sewa aset tetap dimana Grup, sebagai lessee, memiliki sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini pembayaran sewa minimum.

Kewajiban sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa pembiayaan". Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan beban keuangan sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Beban keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa pada setiap periode. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa manfaat aset dan masa sewa apabila tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Grup akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

Sewa dimana sebagian besar risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan dipertahankan oleh lessor diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi (dikurangi insentif yang diterima dari lessor) dibebankan pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode sewa

Grup sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup akan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka merupakan sewa operasi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**s. Leases (continued)****Accounting policies before January 1, 2020****The Group as a lessee**

The Group leases certain property, plant and items of equipment. Leases of property, plant and equipment in cases where the Group as lessee has substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lease's commencement at the lower of the fair value of the leased asset and the present value of the minimum lease payments.

The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in "finance lease liabilities". Each lease payment is allocated between the liability and finance cost so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period. The property, plant and equipment acquired under finance leases is depreciated over the shorter of the useful life of the asset and the lease term if there is no reasonable certainty that the Group will obtain ownership at the end of the lease term.

Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged to profit or loss on a straight-line basis over the term of the lease.

The Group as a lessor

When the Group acts as a lessor, it will classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, the lease is classified as a finance lease; if not, it is an operating lease.

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/30 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)
t. Perpajakan
Pajak penghasilan final

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sebagian penghasilan Grup dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.

Untuk tujuan pelaporan keuangan, beban PPh final dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari beban pokok pendapatan.

Beban pajak atas penghasilan yang telah dikenakan pajak final, diakui proporsional dengan jumlah pendapatan pada periode berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban usaha diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak penghasilan di luar pajak final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup ekspektasikan untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya pada akhir periode pelaporan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
t. Taxation
Final income tax

According to the tax regulation, certain Company and subsidiary income is subject to final tax.

For the purpose of financial statement preparation, final income tax expenses are stated in the consolidated statement of profit or loss as part of the cost of revenues.

Tax expenses on income subjected to final tax are recognised proportionally with total income in the current period. The differences between the final income tax paid and the total charged as operating expenses are recognised as prepaid tax or tax payable.

The difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities, and their respective final tax bases are not recognised as deferred tax assets or liabilities.

Non-final income tax

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Deferred tax assets and liabilities are recognised for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognised for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realised, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the consequences that would follow from the manner in which the Group expects to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities at the end of the reporting period.



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/31 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**t. Perpajakan (lanjutan)**Pajak penghasilan di luar pajak final (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Grup yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar bersih.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laporan laba rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laporan laba rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laporan laba rugi.

Pajak tangguhan tidak dihitung karena tidak terdapat perbedaan temporer yang signifikan antara dasar pengenaan pajak dan komersial.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen Grup diwajibkan untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari direviu secara berkelanjutan. Revisi terhadap estimasi akuntansi akan diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi, jika revisi tersebut hanya berpengaruh terhadap periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode berikutnya jika revisi tersebut mempengaruhi periode tersebut.

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 3, Grup telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**t. Taxation (continued)**Non-final income tax (continued)

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities when they relate to the income taxes levied by a single taxation authority and when the Group intends to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis.

Current and deferred tax is recognised as an expense or as income in profit or loss, except when it relates to items that are recognised outside profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognised outside profit or loss.

Deferred tax is not accounted as there is no significant temporary difference identified for commercial and tax base values.

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 3, the Group's management are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical judgements in applying accounting policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, the Group has identified the following matters under which significant judgments are made:



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/32 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**
**Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan
akuntansi (lanjutan)**
Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Kepentingan dalam pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Grup memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Grup menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan Bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan operasi dan pengambilan keputusan dalam pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Grup untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut.

**4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**
**Critical judgements in applying accounting policies
(continued)**
Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the asset throughout the period of use and the right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. In order to determine the incremental borrowing rate, the Group must consider a number of factors and reliably quantify any adjustments; so doing requires careful judgement. Only in this way can the final discount rates be determined.

In determining an incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

In determining the lease term, management considers all the facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or to not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if it is reasonably certain that the lease will be extended (or not terminated).

Interest in joint arrangements

Judgement is required to determine when the Group has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and of when the decisions in relation to such activities require unanimous consent. The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the operating and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement.



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/33 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**
**Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan
akuntansi (lanjutan)**
Kepentingan dalam pengaturan bersama (lanjutan)

Secara khusus, Grup mempertimbangkan:

- Struktur dari pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah.
- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Grup juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
 - Bentuk legal dari kendaraan terpisah;
 - Persyaratan dari perjanjian kontraktual;
 - Fakta dan kondisi lain (ketika relevan).

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan, dan kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah pengaturan tersebut merupakan operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap akuntansi.

Grup memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama, yaitu PT Crompton Prima Switchgear Indonesia dan PT Pura Daya Prima. Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Grup memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut.

Grup menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan kesimpulan final dari penilaian yang dilakukan adalah pengaturan tersebut merupakan ventura bersama (Catatan 13).

Pengakuan pendapatan kontrak

Grup mengakui pendapatan kontrak yang masih dalam proses berdasarkan metode persentase penyelesaian. Tahap penyelesaian diukur berdasarkan proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai tanggal perhitungan dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2. Asumsi yang penting diperlukan adalah dalam menentukan tahap penyelesaian (persentase penyelesaian) dan jumlah estimasi pendapatan. Pendapatan kontrak diungkapkan dalam Catatan 21.

Sumber ketidakpastian estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

**4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**
**Critical judgements in applying accounting policies
(continued)**
Interest in joint arrangements (continued)

Specifically, the Group considers:

- The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle.
- When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Group also considers the rights and obligations arising from:
 - The legal form of the separate vehicle; The terms of the contractual arrangement;
 - Other facts and circumstances (when relevant).

This assessment often requires significant judgement. Conclusions on joint control and also on whether the arrangement is a joint operation or a joint venture may materially impact the accounting.

The Group has joint arrangements that are structured through joint ventures, namely PT Crompton Prima Switchgear Indonesia and PT Pura Daya Prima. These structures and the terms of the contractual arrangements indicate that the Group has rights to the net assets of the arrangements.

The Group also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and the final conclusion was that the arrangement was a joint venture (Note 13).

Contract revenue recognition

The Group recognises contract revenues that are still in progress based on the percentage-of-completion method. The stage of completion is measured based on the proportion of contract costs incurred for the work performed up to the calculation date compared to the estimated total contract costs based on the accounting policies described in Note 2. Important assumptions are required in determining the stage of completion (percentage of completion) and the amount of the estimated income. Contract revenue is disclosed in Note 21.

Sources of estimation uncertainty

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation used at the end of the reporting period that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/34 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**
Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)
Penurunan nilai aset keuangan

Penerapan PSAK No. 71 menyebabkan perubahan terhadap penilaian signifikan estimasi dan asumsi akuntansi terhadap provisi untuk kerugian penurunan nilai atas piutang. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Dalam penentuan kerugian kredit ekspektasian, manajemen diharuskan untuk menggunakan pertimbangan alam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Pertimbangan diaplikasikan dalam menentukan periode seumur hidup dan titik pengakuan awal piutang.

Imbalan pascakerja

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris independen untuk menghitung jumlah kewajiban tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, kenaikan gaji tahunan di masa depan, tingkat perputaran tahunan karyawan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi Grup diakui di penghasilan komprehensif lain dan ketika terjadi. Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam pengalaman aktual Grup atau perubahan signifikan dalam asumsi Grup material dapat mempengaruhi kewajiban diestimasi atas imbalan pascakerja dan penghasilan komprehensif lain.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 25.

Pajak penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Grup memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasi. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

**4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**
Sources of estimation uncertainty (continued)
Impairment of financial assets

The implementation of SFAS No. 71 resulted in a change to the assessment of the significant accounting estimates and judgements related to the provision for the loss impairment of receivables. The Group applies a simplified approach to measure expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables. In determining expected credit losses, management is required to exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Judgement has been applied in determining the lifetime and point of initial recognition of receivables.

Post-employment benefits

The determination of employee benefits obligations is dependent on the selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increases, annual employee turn-over rates, disability rates, retirement ages and mortality rates. Actual results that differ from the Group's assumptions are recognised immediately in other comprehensive income and when they occur. While management is of the opinion that assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for post-employment benefits and other comprehensive income

Assumptions used in the calculation of post-employment benefit obligations are disclosed in Note 25.

Income taxes

The calculations of income tax expense for the Group require judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgements and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. In cases where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/35 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. ENTITAS ANAK

Perusahaan memiliki entitas anak sebagai berikut:

5. SUBSIDIARY

The Company has the following subsidiary:

Entitas anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)		Tahun operasi Year of commercial operation	Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
			2020	2019		2020	2019
PT Prima Power Nusantara ("PPN")	Jakarta	Jasa enjiniring, pengadaan dan konstruksi/ Engineering, procurement and construction	99.99	99.99	2017	273	279

6. KAS DAN SETARA KAS**6. CASH AND CASH EQUIVALENTS**

	2020	2019	
Kas	1,808	559	Cash on hand
Bank			Banks
<u>Pihak berelasi (Catatan 26)</u>			<u>Related parties (Note 26)</u>
Rupiah	68,828	91,790	Rupiah
US\$	12,195	6,726	US\$
Jumlah pihak berelasi	81,023	98,516	Total related parties
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Rupiah	760	2,747	Rupiah
Jumlah pihak ketiga	760	2,747	Total third parties
Jumlah bank	81,783	101,263	Total banks
Setara kas - deposito berjangka			Cash equivalents - time deposits
<u>Pihak berelasi (Catatan 26)</u>			<u>Related parties (Note 26)</u>
Rupiah	255,000	125,000	Rupiah
Jumlah deposito berjangka	255,000	125,000	Total time deposits
Jumlah kas dan setara kas	338,591	226,822	Total cash and cash equivalents

Tingkat bunga deposito berjangka adalah sebagai berikut:

The interest rates of time deposits are as follows:

	2020	2019	
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	3.25%-7.52%	4.20%-7.68%	Interest rate per annum on time deposits
Jangka waktu	1 Bulan/Month	1 Bulan/Month	Period

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/36 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. REKENING BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Akun ini merupakan rekening bank yang digunakan sebagai jaminan bank garansi untuk jaminan pelaksanaan proyek. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo rekening bank yang dibatasi penggunaannya masing-masing sebagai berikut:

7. RESTRICTED CASH IN BANK

This account represents cash in banks that was used as collateral on bank guarantees for projects. As at December 31, 2020 and 2019, the restricted bank account balances were as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pihak berelasi (Catatan 26)	9,047	6,189	Related party (Note 26)
Pihak ketiga	<u>16,939</u>	<u>16,939</u>	Third parties
Jumlah	<u>25,986</u>	<u>23,128</u>	Total
Dikurangi: bagian tidak lancar	(23,128)	(16,749)	Less: Non-current portion
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya, bagian lancar	<u><u>2,858</u></u>	<u><u>6,379</u></u>	Restricted cash in bank, current portion

8. PIUTANG USAHA
8. TRADE RECEIVABLES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Piutang usaha			Trade receivables
Pihak berelasi (Catatan 26)	163,956	204,179	Related parties (Note 26)
Pihak ketiga	<u>15,241</u>	<u>4,510</u>	Third parties
Jumlah	<u>179,197</u>	<u>208,689</u>	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai			Allowances for impairment losses
Pihak berelasi	(16,459)	(240)	Related parties
Pihak ketiga	<u>(3,678)</u>	<u>(3,901)</u>	Third parties
Jumlah	<u>(20,137)</u>	<u>(4,141)</u>	Total
Jumlah piutang usaha - bersih	<u><u>159,060</u></u>	<u><u>204,548</u></u>	Total trade receivables - net

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade receivables is as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Belum jatuh tempo	108,795	123,644	Not yet due
Sudah jatuh tempo			Past due
1 s/d 60 hari	16,734	28,801	1 to 60 days
61 s/d 90 hari	18,456	24,406	61 to 90 days
Lebih dari 90 hari	<u>35,212</u>	<u>31,838</u>	More than 90 days
	179,197	208,689	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(20,137)</u>	<u>(4,141)</u>	Allowances for impairment losses
Jumlah piutang usaha - bersih	<u><u>159,060</u></u>	<u><u>204,548</u></u>	Total trade receivables - net



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/37 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Pergerakan perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Saldo awal	4,141	4,062
Penambahan	<u>15,996</u>	<u>79</u>
Saldo akhir	<u><u>20,137</u></u>	<u><u>4,141</u></u>

Grup menerapkan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai piutang secara individual dilakukan untuk pelanggan yang telah mengalami kesulitan pembayaran sesuai dengan periode yang telah ditentukan dan pelanggan yang umumnya memiliki peringkat kredit.

Manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kemungkinan atas tidak tertagihnya piutang usaha.

8. TRADE RECEIVABLES (continued)

The movement of changes in the allowance for impairment losses is as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Beginning balance	4,062	4,062
Additions	<u>79</u>	<u>79</u>
Ending balance	<u><u>4,141</u></u>	<u><u>4,141</u></u>

The Group applies the lifetime expected loss provision for all trade receivables. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

Allowance for impairment losses for individual receivables are provided for customers that have difficulties in fulfilling their obligations according to the defined period and generally have credit ratings.

The management of the Group is of the opinion that the allowance for impairment is adequate to cover any loss from uncollectible accounts.

9. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN**9. FINANCE LEASE RECEIVABLES**

	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2019*)</u>	<u>1 Januari/ January 1, 2019*)</u>	
Pihak berelasi (Catatan 26)				Related party (Note 26)
PLN	<u>241,578</u>	<u>266,141</u>	<u>287,950</u>	PLN
Jumlah	<u><u>241,578</u></u>	<u><u>266,141</u></u>	<u><u>287,950</u></u>	Total

Rekonsiliasi antara piutang sewa pembiayaan bruto dengan piutang sewa pembiayaan neto sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The reconciliation of gross finance lease receivables with the net finance lease receivables as reported in the statement of financial position is as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2019*)</u>	<u>1 Januari/ January 1, 2019*)</u>	
Bagian lancar:				Current portion:
Piutang sewa pembiayaan bruto	55,050	55,050	55,050	Finance lease receivables - gross
Pendapatan keuangan sewa yang belum terealisasi	<u>(27,385)</u>	<u>(30,487)</u>	<u>(33,241)</u>	Unearned finance lease income
Subjumlah	<u><u>27,665</u></u>	<u><u>24,563</u></u>	<u><u>21,809</u></u>	Subtotal
Bagian tidak lancar:				Non-current portion:
Piutang sewa pembiayaan bruto	289,015	344,066	399,116	Finance lease receivables - gross
Pendapatan keuangan sewa yang belum terealisasi	<u>(75,102)</u>	<u>(102,488)</u>	<u>(132,975)</u>	Unearned finance lease income
Subjumlah	<u><u>213,913</u></u>	<u><u>241,578</u></u>	<u><u>266,141</u></u>	Subtotal
Jumlah piutang sewa pembiayaan	<u><u>241,578</u></u>	<u><u>266,141</u></u>	<u><u>287,950</u></u>	Total finance lease receivables

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 33)

As restated (refer to Note 33) *)

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/38 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Analisa jatuh tempo piutang sewa pembiayaan bruto dan piutang sewa pembiayaan bersih adalah sebagai berikut:

9. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)

The maturity analysis of gross finance lease receivables and net finance lease receivables is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019*)	1 Januari/ January 1, 2019*)	
Piutang sewa pembiayaan bruto:				Gross finance lease receivables:
- Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	55,050	55,050	55,050	<i>Due within one year -</i>
- Jatuh tempo dalam waktu dua sampai lima tahun	213,913	241,578	266,141	<i>Due within two until five years -</i>
Dikurangi:				Less:
Pendapatan keuangan sewa yang belum terealisasi	<u>(27,385)</u>	<u>(30,487)</u>	<u>(33,241)</u>	<i>Unearned finance lease income</i>
Piutang sewa pembiayaan bersih	<u>241,578</u>	<u>266,141</u>	<u>287,950</u>	<i>Net finance lease receivables</i>
Piutang sewa pembiayaan bersih:				Net finance lease receivables:
Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	27,665	24,563	21,809	<i>Due within one year</i>
Jatuh tempo dalam waktu dua sampai lima tahun	<u>213,913</u>	<u>241,578</u>	<u>266,141</u>	<i>Due within two until five years</i>
Jumlah	<u>241,578</u>	<u>266,141</u>	<u>287,950</u>	Total

Piutang sewa pembiayaan dari PLN timbul dari penyediaan jasa *pre-treatment* gas dan jasa kompresi *Compressed Natural Gas* ("CNG") untuk keperluan pembangkit di Bangkanai, Kalimantan Tengah dengan jangka waktu kontrak selama sepuluh tahun.

The finance lease receivables from PT PLN (Persero) arise from the provision of gas and Compressed Natural Gas ("CNG") (gas compression) *pre-treatment* services for power generator in Bangkanai, Central Kalimantan with a contract period of ten years.

10. ASET KONTRAK
a. Berdasarkan kontrak

	2020	2019	
Biaya kontrak yang terjadi hingga tanggal pelaporan	839,550	933,903	<i>Contract costs incurred up to reporting date</i>
Laba diakui dikurangi kerugian diakui	<u>484,264</u>	<u>350,334</u>	<i>Recognised profit less recognised losses</i>
	1,323,814	1,284,237	
Dikurangi: penagihan termin	<u>(1,108,640)</u>	<u>(1,052,171)</u>	<i>Less: progress billings</i>
Jumlah	<u>215,174</u>	<u>232,066</u>	Total

b. Berdasarkan pelanggan

	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 26)	210,059	216,980	<i>Related parties (Note 26)</i>
Pihak ketiga	<u>5,115</u>	<u>15,086</u>	<i>Third parties</i>
Jumlah	<u>215,174</u>	<u>232,066</u>	Total

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 33)

As restated (refer to Note 33) *)



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/39 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA**11. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES**

	2020	2019	
Uang muka proyek	16,954	29,696	Advances for project
Sewa jangka pendek	604	18,709	Short-term rent
Lain-lain	6,482	3,589	Others
Jumlah	24,040	51,994	Total
Bagian lancar	(17,749)	(43,282)	Current portion
Bagian tidak lancar	6,291	8,712	Non-current portion

12. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA**12. OTHER NON-CURRENT ASSETS**

	2020	2019	
Investasi saham	16,081	67	Investment in shares
Perangkat lunak	13,072	16,202	Software
Beban tangguhan	49	432	Deferred costs
Lainnya	-	39	Other
Jumlah	29,202	16,740	Total

13. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA**13. INVESTMENTS IN JOINT VENTURE**

Rincian investasi pada ventura bersama sebagai berikut:

The details of investments in joint venture are as follows:

	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Tahun operasi komersial/ Commercial operations	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	
				2020 %	2019 %
<u>Investasi pada ventura bersama/ Investment in joint venture</u>					
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia ("CPSI")	Jakarta	Peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik/ Electricity control and distribution	2014	49	49
PT Pura Daya Prima ("PDP")	Jakarta	Pembangkit listrik/ Power plant	2006	15	15

Seluruh entitas ventura bersama dicatat oleh Perusahaan dengan menggunakan metode ekuitas. Seluruh entitas perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa dan tidak terdapat harga pasar yang dikutip yang tersedia untuk saham tersebut.

All joint ventures are recorded by the Company using the equity method. All entities are unlisted private companies and there are no quoted market prices available for these shares.

Mutasi investasi pada ventura bersama adalah sebagai berikut:

The changes in investments in joint venture are as follows:

	Saldo awal/ Beginning balance	Cadangan penurunan nilai/ Allowance for impairment	2020 Bagian laba diserap tahun berjalan/ Share of profit for the year	Dividen/ Dividend	Saldo akhir/ Ending balance
Ventura bersama/Joint venture					
CPSI	13,426	(13,426)	-	-	-
PDP	300	-	9,742	(191)	9,851
Jumlah/Total	13,726	(13,426)	9,742	(191)	9,851

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/40 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA (lanjutan)
13. INVESTMENTS IN JOINT VENTURE (continued)

	2019			
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Bagian rugi diserap tahun berjalan/ <i>Share of loss for the year</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>
Ventura bersama/ <i>Joint venture</i>				
CPSI	26,908	-	(13,482)	13,426
PDP	300	-	-	300
Jumlah/ <i>Total</i>	<u>27,208</u>	<u>-</u>	<u>(13,482)</u>	<u>13,726</u>

CPSI

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan CPSI, ventura bersama, pada 31 Desember 2020 dan 2019. Informasi berikut telah dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

CPSI

The following table is the summarised financial information of CPSI, a joint venture, as of December 31, 2020 and 2019. Such information has been accounted for using the equity method.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Aset lancar	37,202	65,572	<i>Current assets</i>
Aset tidak lancar	<u>244,786</u>	<u>284,942</u>	<i>Non-current assets</i>
	<u>281,988</u>	<u>350,514</u>	
Liabilitas jangka pendek	202,049	156,798	<i>Current liabilities</i>
Liabilitas jangka panjang	<u>126,243</u>	<u>166,315</u>	<i>Non-current liabilities</i>
	<u>328,292</u>	<u>323,113</u>	
(Liabilitas)/aset bersih	<u>(46,304)</u>	<u>27,401</u>	<i>Net (liabilities)/assets</i>
Bagian atas (liabilitas)/aset bersih	<u>-</u>	<u>13,426</u>	<i>Share of net (liabilities)/assets</i>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pendapatan	43,162	64,081	<i>Revenue</i>
Beban pokok penjualan	(23,173)	(62,149)	<i>Cost of goods sold</i>
Beban lain-lain - bersih	<u>(46,705)</u>	<u>(29,447)</u>	<i>Other expenses - net</i>
Rugi tahun berjalan	(26,716)	(27,515)	<i>Losses for the year</i>
Bagian Perusahaan atas rugi yang tidak diakui	(13,091)	-	<i>Unrecognised share of loss of the Company</i>
Bagian Perusahaan atas rugi	-	(13,482)	<i>The Company's share of loss</i>
Pendapatan komprehensif lainnya	-	-	<i>Other comprehensive income</i>
Dividen yang diterima dari investasi	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Dividend received from investments</i>



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/41 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA (lanjutan)**13. INVESTMENTS IN JOINT VENTURE (continued)**PDPPDP

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas PDP, ventura bersama pada 31 Desember 2020 dan 2019 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

The following table is the summarised financial information of PDP, a joint venture as of December 31, 2020 and 2019. Such information has been accounted for using the equity method.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Aset lancar	30,290	37,957	Current assets
Aset tidak lancar	52,113	33,168	Non-current assets
	<u>82,403</u>	<u>71,125</u>	
Liabilitas jangka pendek	10,644	17,116	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	6,087	5,985	Non-current liabilities
	<u>16,731</u>	<u>23,101</u>	
Aset bersih	<u>65,672</u>	<u>48,024</u>	Net asset
Bagian atas aset bersih	<u>9,851</u>	<u>7,204</u>	Share of net assets
	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pendapatan	135,845	147,119	Revenue
Beban pokok penjualan	(105,640)	(115,698)	Cost of goods sold
Beban umum dan administrasi	(10,110)	(10,348)	Operating expenses
Beban lain-lain - bersih	(947)	(2,195)	Other expenses - net
Laba tahun berjalan	19,148	18,878	Profit for the year
Bagian Perusahaan atas laba investasi	2,872	2,832	The Company's shares of profit
Bagian Perusahaan atas laba investasi pada tahun-tahun sebelumnya yang diakui di tahun berjalan	6,870	-	The Company's share of profit from prior years which recognised in current year
Pendapatan komprehensif lainnya	-	-	Other comprehensive income
Dividen yang diterima dari investasi	<u>191</u>	<u>143</u>	Dividend received from investments

14. ASET TETAP**14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT**

	<u>1 Januari/ January 1, 2020</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassifications</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	
Biaya perolehan					Acquisition cost
Tanah	5,591	-	-	5,591	Land
Perlengkapan umum	9,057	172	-	9,229	General equipment
Subjumlah	14,648	172	-	14,820	Subtotal
Aset hak guna					Right-of-use assets
Bangunan	30,423	-	-	30,423	Land
Perlengkapan umum	1,157	-	-	1,157	General equipment
Kendaraan	2,500	449	-	2,949	Vehicles
Jumlah	<u>48,728</u>	<u>621</u>	<u>-</u>	<u>49,349</u>	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Perlengkapan umum	(2,842)	(1,750)	-	(4,592)	General equipment
Aset hak guna					Acquisition cost
Bangunan	-	(10,412)	-	(10,412)	Land
Perlengkapan umum	-	(1,157)	-	(1,157)	General equipment
Kendaraan	-	(2,057)	-	(2,057)	Vehicles
Jumlah	<u>(2,842)</u>	<u>(15,376)</u>	<u>-</u>	<u>(18,218)</u>	Total
Jumlah tercatat	<u>45,886</u>			<u>31,131</u>	Net carrying value

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/42 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET TETAP (lanjutan)
14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

	1 Januari/ January 1, 2019*)	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2019*)	
Biaya perolehan					Acquisition cost
Tanah	5,582	9	-	5,591	Land
Perlengkapan umum	5,435	3,622	-	9,057	General equipment
Jumlah	11,017	3,631	-	14,648	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Perlengkapan umum	(1,601)	(1,241)	-	(2,842)	General equipment
Jumlah tercatat	9,416			11,806	Net carrying value

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	2020	2019	
Beban pokok pendapatan (Catatan 22)	7,097	-	Cost of revenues (Note 22)
Beban usaha (Catatan 23)	8,279	1,241	Operating expenses (Note 23)
Jumlah	15,376	1,241	Total

Grup memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Sumatera Selatan, Nias Utara dan Kalimantan Barat dengan hak legal berupa sertifikat Hak Guna Bangunan yang berjangka waktu 20 tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2031. Perolehan tanah tersebut sehubungan pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga gasifikasi batubara dan pembangkit tenaga modular pengganti diesel.

The Group owns several pieces of land located in South Sumatera, North Nias and West Kalimantan with Building Use Rights for a period of 20 years until 2031. The land acquisitions were performed in relation to the construction and operation of a coal gas power plant and substitute diesel power modular.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah harga perolehan aset tetap Grup yang telah disusutkan penuh tetapi masih digunakan dalam kegiatan operasional adalah sebesar Rp958.

As of December 31, 2020, the cost of the Group's fixed assets that had been fully depreciated but that were still being used in operational activities amounted to Rp958.

15. UTANG USAHA

Akun ini merupakan liabilitas kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembelian material dan jasa konstruksi kepada sub kontraktor.

15. TRADE PAYABLES

This account represents payables to third parties arising from purchase of material and construction service to sub contractors.

	2020	2019	
PT Voksel Electric Tbk	11,758	14,274	PT Voksel Electric Tbk
PT Bira Jaya Mandiri Perkasa	9,379	24,367	PT Bira Jaya Mandiri Perkasa
PT Bintang Indah Persada	8,447	-	PT Bintang Indah Persada
PT Iradat Aman Globalindo	7,249	6,062	PT Iradat Aman Globalindo
PT Karya Logam Agung	5,518	-	PT Karya Logam Agung
PT Putranata Mandiri	2,344	8,150	PT Putranata Mandiri
Fichtner GmbH & Co. KG	1,021	5,051	Fichtner GmbH & Co. KG
PT Black & Veatch International Company	-	9,226	PT Black & Veatch International Company
Lain-lain (masing-masing di bawah 5% dari total utang usaha)	57,774	66,966	Others (each below 5% of total trade payables)
Jumlah	103,490	134,096	Total

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 33)

As restated (refer to Note 33) *)



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/43 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. UANG MUKA DARI PELANGGAN

Akun ini merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan sehubungan dengan pendapatan yang berasal dari kegiatan *Engineering Procurement Construction*.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, uang muka dari pelanggan masing-masing sebesar Rp21.006 dan Rp35.393.

16. ADVANCES FROM CUSTOMERS

This account represents advances received from customers in relation to revenue incurred from *Engineering, Procurement Construction* services.

As at December 31, 2020 and 2019, the Company's advances from customers amounted to Rp21,006 and Rp35,393, respectively.

17. LIABILITAS KONTRAK**a. Berdasarkan kontrak**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Biaya kontrak yang terjadi hingga tanggal pelaporan	962,508	717,819
Laba diakui dikurangi kerugian diakui	<u>633,674</u>	<u>618,516</u>
	1,596,182	1,336,335
Dikurangi: penagihan termin	<u>(1,740,623)</u>	<u>(1,450,478)</u>
Jumlah	<u>144,441</u>	<u>114,143</u>

Contract costs incurred up to reporting date
Recognised profit less recognised losses

Less: progress billings

Total

b. Berdasarkan pelanggan

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pihak berelasi (Catatan 26)	136,633	112,157
Pihak ketiga	<u>7,808</u>	<u>1,986</u>
Jumlah	<u>144,441</u>	<u>114,143</u>

Related parties (Note 26)
Third parties

Total

17. CONTRACT LIABILITIES**a. By contract****b. By customers****18. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Biaya pegawai	35,819	33,674
Biaya non-pegawai	<u>17,960</u>	<u>20,971</u>
Jumlah	<u>53,779</u>	<u>54,645</u>

Employee expenses
Non-employee expenses

Total

18. ACCRUED EXPENSES**19. PINJAMAN JANGKA PANJANG**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Jumlah utang pokok	88,028	120,040
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(32,978)</u>	<u>(32,978)</u>
Bagian jangka panjang	<u>55,050</u>	<u>87,062</u>

Principal amount
Current maturities

Long-term portion

19. LONG-TERM LOAN

Pada tanggal 28 Desember 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PLN untuk keperluan pendanaan program investasi dalam rangka kelancaran kegiatan usaha Perusahaan. Jumlah pokok total pinjaman yang diberikan adalah maksimum sebesar Rp250.000. Perusahaan telah melakukan penarikan sebesar Rp220.000 dengan tingkat bunga sebesar 11,95% per tahun dan akan berakhir setelah jangka waktu 7 tahun terhitung sejak selesainya masa *grace period* selama 12 bulan sejak tanggal penarikan pinjaman pertama kali.

On December 28, 2015, the Company entered into a loan agreement with PLN for the funding of the Company's investment programme to support its business operations. The maximum loan to be granted amounted to Rp250,000. The Company has drawdown Rp220,000 with an interest rate of 11.95% per annum. The loan expires after a period of 7 years from the end of the grace period of 12 months from the date of the first loan withdrawal.

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/44 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 saldo pokok pinjaman yang sudah dibayar sebesar Rp32.012 (Catatan 27).

Beban bunga pinjaman tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp13.009 dan Rp15.644.

19. LONG-TERM LOAN (continued)

As at December 31, 2020 and 2019 the principal loan that had been paid amounted to Rp32,012 (Note 27).

Interest expense charges related to the loan in 2020 and 2019 amounted to Rp13,009 and Rp15,644, respectively.

20. MODAL SAHAM
20. SHARE CAPITAL

Pemegang saham/Shareholders	2020 dan/and 2019		
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)	Jumlah/ Amount
PLN	24,975,000	99.90%	24,975
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) (YPK PLN)	25,000	0.10%	25
Jumlah/Total	25,000,000	100.00%	25,000

21. PENDAPATAN
21. REVENUES

	2020	2019*)	
Engineering Procurement Construction Konstruksi	269,533	440,002	Engineering Procurement Construction Constructions
Pembangkitan	127,123	237,516	Generators
Transmisi dan distribusi	72,312	93,444	Transmission and distributions
Kompresi gas	71,847	121,004	Gas compressions
Pendapatan bunga dari sewa pembiayaan	54,042	48,601	Interest income from finance lease receivables
Operasi dan perawatan	30,487	33,241	Operation and maintenance
	-	4,872	
Jumlah	625,344	978,680	Total

Lihat Catatan 26 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26 for details of transactions with related parties.

22. BEBAN POKOK PENDAPATAN
22. COST OF REVENUES

	2020	2019*)	
Subkontraktor	221,575	419,566	Subcontractors
Remunerasi enjiniring	117,627	151,570	Engineering remunerations
Beban pajak final (Catatan 24)	19,259	28,563	Final income tax (Note 24)
Perjalanan dinas dan transportasi	16,728	48,566	Business trip and transportation
Sewa	16,314	29,928	Rental
Penyusutan (Catatan 14)	7,097	-	Depreciation (Note 14)
Lain-lain	37,566	38,855	Others
Jumlah	436,166	717,048	Total

Lihat Catatan 26 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26 for details of transactions with related parties.

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 33)

As restated (refer to Note 33) *)

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/45 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. BEBAN USAHA**23. OPERATING EXPENSES**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	106,689	81,853	Salary and welfare benefits
Provisi penurunan nilai piutang usaha (Catatan 8)	15,996	79	Allowance for impairment of trade receivables (Note 8)
Provisi penurunan nilai piutang lain-lain (Catatan 14)	15,991	-	Allowance for impairment of other receivables
Tunjangan pajak penghasilan karyawan	8,279	1,241	Depreciation (Note 14)
Beban imbalan pascakerja	7,861	8,385	Employee income tax allowances
Jasa tenaga kerja	7,637	3,250	Post-employment benefit expense
Perjalanan dinas dan transportasi	5,864	4,525	Labour services
Telekomunikasi	2,132	5,965	Business trips and transportation
Sewa	2,100	2,036	Telecommunication
Konsultan	2,039	6,895	Rental
Alat tulis kantor	1,664	1,227	Consulting
Alat keperluan kantor	1,302	1,784	Stationery
Konsumsi	814	3,436	Office supplies
Lain-lain	799	2,580	Consumables
	11,546	13,484	Others
Jumlah	<u>190,713</u>	<u>136,740</u>	Total

Lihat Catatan 26 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 26 for details of transactions with related parties.

24. PERPAJAKAN**24. TAXATION****a. Pajak dibayar di muka****a. Prepaid taxes**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<u>Bagian lancar</u>			<u>Current portion</u>
Pajak lainnya			Other taxes
Perusahaan			The Company
Pajak pertambahan nilai	36,123	44,774	Value added tax
Entitas anak			Subsidiary
Pajak pertambahan nilai	38,595	46,469	Value added tax
Pasal 4(2)	111	111	Article 4(2)
	<u>74,829</u>	<u>91,354</u>	
<u>Bagian tidak lancar</u>			<u>Non-current portion</u>
Perusahaan			The Company
Pajak penghasilan badan			Corporate income taxes
Kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 25 tahun 2017	1,336	-	Overpayment of income tax Article 25 for the year 2017
	<u>1,336</u>	<u>-</u>	
Jumlah	<u>76,165</u>	<u>91,354</u>	Total

b. Utang pajak**b. Taxes payable**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pajak penghasilan badan			Corporate income tax
Perusahaan	58	2,437	The Company
Jumlah utang pajak badan	<u>58</u>	<u>2,437</u>	Total taxes payable - corporate income tax

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/46 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. PERPAJAKAN (lanjutan)
b. Utang pajak (lanjutan)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pajak lainnya		
Pajak penghasilan final		
Perusahaan	3,586	5,479
Entitas anak	-	2,061
Pajak lain-lain		
Perusahaan		
Pasal 4(2)	820	281
Pasal 21	-	2,769
Pasal 23	96	230
Pasal 25	151	193
Entitas anak		
Pasal 4(2)	2,397	139
Pasal 21	376	626
Pasal 23	7	27
	<u>7,433</u>	<u>11,805</u>

Jumlah pajak lainnya

c. Pajak penghasilan final

Rekonsiliasi antara pendapatan konstruksi yang dikenakan pajak final dengan beban pajak final adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pendapatan konstruksi yang dikenakan pajak penghasilan final	<u>481,878</u>	<u>840,370</u>
Beban pajak penghasilan final berdasarkan tarif pajak yang berlaku (Catatan 22)	19,259	28,563
Dikurangi pembayaran pajak yang berlaku	(23,213)	(26,723)
Utang atas pajak penghasilan final awal tahun	<u>7,540</u>	<u>5,700</u>
Utang atas pajak penghasilan final akhir tahun	<u>3,586</u>	<u>7,540</u>

d. Beban pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasian dan laba kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

24. TAXATION (continued)
b. Taxes payable (continued)
Other taxes
Final income tax
The Company
Subsidiary

Other taxes
The Company
Article 4(2)
Article 21
Article 23
Article 25
Subsidiary
Article 4(2)
Article 21
Article 23

Total taxes payable - other taxes

c. Final income tax

A reconciliation between revenue from constructions subject to final tax and its final income tax expense is as follows:

 Revenue from construction subject to final income tax

Final income tax expense at prevailing tax rates (Note 22)
Less payment of final income tax
Tax payable on final income tax at beginning of the year

Tax payable on final income tax at end of the year

d. Income tax expense

A reconciliation between income before tax as per the consolidated statements of profit or loss and the taxable income of the Company is as follows:



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/47 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. PERPAJAKAN (lanjutan)**24. TAXATION (continued)****d. Beban pajak penghasilan (lanjutan)****d. Income tax expense (continued)**

	2020	2019*)	
Laba sebelum pajak penghasilan badan	20,444	125,406	<i>Profit before corporate income tax</i>
Dikurangi laba entitas anak	<u>1</u>	<u>3</u>	<i>Less profit of subsidiary</i>
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	20,443	125,403	<i>Profit before corporate income tax of the Company</i>
Beban (penghasilan) yang tidak dapat diperhitungkan secara fiskal:			<i>Non-deductible expenses (non-taxable income):</i>
Penghasilan bunga	(9,109)	(13,561)	<i>Finance income</i>
Piutang sewa pembiayaan	11,693	6,933	<i>Finance lease receivables</i>
Kesejahteraan dan tunjangan pajak	33,276	35,099	<i>Employee welfare and tax allowances</i>
Lain-lain	(2,254)	(20,650)	<i>Others</i>
Penurunan nilai piutang lain-lain	15,991	-	<i>Impairment of other receivables</i>
Bagian rugi bersih entitas anak dan ventura bersama	(30,606)	(11,534)	<i>Share in net loss of subsidiary and joint venture</i>
Pendapatan yang telah dikenakan pajak final dan biaya-biaya berkaitan	<u>(16,949)</u>	<u>(92,123)</u>	<i>Income already subjected to final tax and related expenses</i>
Taksiran laba yang dikenakan pajak	<u>22,485</u>	<u>29,567</u>	<i>Estimated taxable income</i>
Beban pajak penghasilan badan kini	<u>4,947</u>	<u>7,392</u>	<i>Corporate income tax expense - current</i>
Dikurangi pembayaran pajak dibayar dimuka			<i>Less prepaid taxes</i>
Pasal 23	(2,766)	(2,819)	<i>Article 23</i>
Pasal 25	<u>(2,123)</u>	<u>(2,136)</u>	<i>Article 25</i>
Jumlah	<u>(4,889)</u>	<u>(4,955)</u>	<i>Total</i>
Kurang bayar pajak penghasilan	<u>58</u>	<u>2,437</u>	<i>Underpayment of corporate income tax</i>

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the prevailing tax rates to income before tax is as follows:

	2020	2019*)	
Laba sebelum pajak penghasilan	<u>20,444</u>	<u>125,406</u>	<i>Profit before tax</i>
Beban pajak sesuai tarif yang berlaku	<u>4,498</u>	<u>31,352</u>	<i>Tax expenses at prevailing rate</i>
Beban/(penghasilan) yang tidak dapat diperhitungkan menurut pajak	4,178	928	<i>Non-deductible expenses/ (non-taxable income)</i>
Pendapatan yang telah dikenakan pajak final konstruksi dan biaya-biaya yang berkaitan	<u>(3,729)</u>	<u>(23,032)</u>	<i>Income already subjected to final tax and related expense</i>
Beban pajak kini	<u>4,947</u>	<u>7,392</u>	<i>Current tax expense</i>

*) Disajikan kembali (lihat Catatan 33)

As restated (refer to Note 33) *)

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/48 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. PERPAJAKAN (lanjutan)
e. Tarif pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintahan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020, yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") untuk menjadi UU No. 2 tahun 2020, terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi penyakit Coronavirus 2019 ("COVID-19") yang di antara lain, merubah tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020-2021 dan 20% untuk tahun fiskal 2022 dan seterusnya.

f. Surat ketetapan pajak

Pada September 2020, Perusahaan menerima surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan untuk keseluruhan jenis pajak tahun buku 2017 (Surat No. PEMB-00156/WPJ.19/KP.0305/RIK.SIS/2020). Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, pemeriksaan tersebut masih dalam proses.

25. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Grup mempunyai karyawan yang diperbantukan dari PLN. PLN menanggung liabilitas imbalan pascakerja meliputi imbalan pensiun lain berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian, tunjangan tambahan penghasilan dan penghargaan purna jabatan dan pemeliharaan kesehatan serta menyediakan program dana pensiun imbalan pasti bagi karyawan yang diperbantukan. Program dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Selama karyawan diperbantukan bekerja pada Grup, Grup wajib membayar iuran program pensiun kepada PLN berdasarkan keputusan Direksi PLN No. 332.K/010/DIR/2003. Iuran yang dibayar Grup diakui sebagai beban pada tahun berjalan, karena Grup tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut.

Iuran pensiun yang dibayarkan Grup pada tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp156 dan Rp181.

Imbalan pascakerja

Grup menyelenggarakan imbalan pascakerja tanpa pendanaan kepada karyawan tetap berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 yang dituangkan dalam peraturan Perusahaan No. 21.002.L/DIR/PLNE/II/2020. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pascakerja tersebut adalah 347 karyawan pada tahun 2020 dan 318 karyawan pada tahun 2019.

Grup juga memberikan imbalan pascakerja jangka panjang tanpa pendanaan berupa tunjangan uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, dan bantuan kematian dan pemakaman bagi karyawan yang memenuhi persyaratan.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 antara lain adalah sebagai berikut:

24. TAXATION (continued)
e. Tax rates

On 31 March 2020, the Government issued Government Regulation No. 1/2020 - which has been approved by the Indonesian Parliament ("DPR") as Law No. 2 year 2020, relating to state financial policies and financial system stability in response to the Coronavirus Disease 2019 ("COVID-19") pandemic - which, among other things, changes the corporate income tax rate from 25% to 22% for fiscal years 2020-2021 and to 20% for fiscal year 2022 onwards.

f. Tax assessment letters

In September 2020, the Company received a tax audit notification letter for all taxes for the year 2017 (Letter No. PEMB-00156/WPJ.19/KP.0305/RIK.SIS/2020). As at the date of the completion of these consolidated financial statements, the tax audit is still in process.

25. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION

The Group has employees who are seconded from PLN. PLN bears post-employment benefit liabilities that include other retirement benefits in the form of severance pay, gratuity, compensation benefits and fringe benefits and awards after-office earnings and health maintenance as well as providing the defined benefit pension plans for the seconded employees. The programme is administered by Dana Pensiun PLN and Bank Rakyat Indonesia (BRI). During the secondment period, the Group shall pay the pension plan to PLN based on the decision of the Directors of PLN No. 332.K/010/DIR/2003. Contributions paid by the Group were recognised as expenses in the current year since the Group has no legal or constructive obligation to pay further contributions.

The defined benefit pension plan expense paid by the Group in 2020 and 2019 amounted to Rp156 and Rp181, respectively.

Post-employment benefits

The Group provides unfunded defined post-employment benefits to permanent employees which are determined based on Labour Law No. 13/2003 that is expressed on the Company's regulation No. 21.002.K/DIR/PLNE/II/2020. The number of employees eligible for the benefits totalled 347 in 2020 and 318 in 2019.

The Group also provides unfunded long-term benefits such as long-service leave, work-accident allowance, death allowance, funeral allowances and service awards for its qualifying employees.

The key assumptions used in determining the post-employment benefit obligation as of December 31, 2020 and 2019 included the following:



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/49 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

25. POST-EMPLOYMENT
BENEFIT OBLIGATION
(continued)

	2020	2019	
Tingkat diskonto per tahun	7.70%	7.81%	Discount rate per annum:
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.02%	7.20%	Rate of salary increase per annum
Tingkat kematian	CSO-1958	CSO-1958	Mortality rate
Umur pensiun normal	56 tahun/years	56 tahun/years	Normal retirement age

Pada tahun 2020, Grup melakukan studi untuk melihat tabel mortalitas mana yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Grup. Dalam melakukan studi, Grup telah mempertimbangkan CSO-58, GAM-71, ANN-49, GAM-83, TMI-2011, TMI-2019. Dari studi tersebut, Grup menemukan bahwa tabel mortalitas yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Grup adalah CSO-58.

In 2020, the Group conducted a study to determine which mortality tables best suited most of the Group's employees' and pensioners' mortality profile. In the study, the Group has considered CSO-58, GAM-71, ANN-49, GAM-83, TMI-2011, TMI-2019. Based on the study, the Group found that the mortality table that best suited the mortality profile of the Group's employees and pensioners is CSO-58.

Beban imbalan pascakerja Grup dibebankan ke beban kepegawaian adalah sebagai berikut:

The Group's post-employment benefit expenses charged to personnel expenses are as follows:

	2020	2019	
Biaya jasa kini	6,506	2,165	Current service cost
Beban bunga	1,438	1,270	Interest cost
Jumlah	7,944	3,435	Total

Liabilitas imbalan pascakerja Grup dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The Group's benefit obligations included in the statement of financial position are as follows:

	2020	2019	
Nilai kini liabilitas - jangka pendek	1,999	673	Present value of obligation - current
Nilai kini liabilitas - jangka panjang	25,554	18,087	Present value of obligation - non-current
Jumlah	27,553	18,760	Total

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pascakerja Grup adalah sebagai berikut:

The movements in the present value of the Group's post-employment benefit obligation are as follows:

	2020	2019	
Saldo awal	18,760	14,831	Beginning balance
Biaya jasa kini	6,506	2,165	Current service cost
Biaya bunga	1,438	1,270	Interest expenses
Pembayaran manfaat	(220)	(185)	Payment of benefits
Pengukuran kembali:			Remeasurements:
Perubahan asumsi demografi	(62)	-	Change in demographic assumption
Perubahan asumsi keuangan	(10)	1,380	Change in financial assumption
Kombinasi perubahan asumsi	(19)	-	Combination of assumption changes
Penyesuaian atas pengalaman	1,160	(701)	Experience adjustment
Saldo akhir	27,553	18,760	Ending balance

Durasi rata-rata program imbalan pascakerja pasti di akhir tahun laporan adalah 7,70 tahun

The average duration of the other post-employment benefits at the end of the reporting year is 7.70 years.

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ Decrease by Rp4,094	Kenaikan sebesar/ Increase by Rp5,194	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1%	Kenaikan sebesar/ Increase by Rp5,211	Penurunan sebesar/ Decrease by Rp4,070	Salary growth rate

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/50 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja yang tidak terdiskonto dan imbalan pascakerja jangka Panjang lainnya adalah sebagai berikut:

	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than a year</i>	Antara 1-2 tahun/ <i>Between 1-2 years</i>	Antara 2-5 tahun/ <i>Between 2-5 years</i>	Lebih dari 5 tahun/ <i>More than 5 years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Imbalan pascakerja						
Program pensiun	661	335	2,221	745,278	748,495	Post-employment benefit Pension plan
Imbalan jangka panjang lainnya	1,338	809	3,624	10,086	15,857	Other post-employment benefit
Jumlah	1,999	1,144	5,845	755,364	764,352	Total

25. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION (continued)

The expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefit and other long-term post-employment benefit liabilities is as follows:

26. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
Sifat hubungan dengan pihak berelasi

- Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PLN dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- PLN dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham Perusahaan.
- PT Indonesia Power (IP), PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam), PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), PT PLN Gas dan Geothermal (PLN Gas dan Geothermal), PT Haleyora Power (HP), dan PT Indonesia Comnets Plus (ICON) merupakan perusahaan yang pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham utama Perusahaan dan atau sebagian pengurusnya sama dengan Perusahaan.
- Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan.

Transaksi dengan pihak berelasi

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Grup:

Pihak berelasi/Related parties	Sifat hubungan/Nature of relationship	Sifat transaksi/Nature of transaction
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia	Pengendalian bersama CG International Holdings Singapore Pte. Ltd dan Perusahaan/ Joint venture between CG International Holdings Singapore PTE.LTD and the Company	Piutang usaha pihak berelasi, piutang lain-lain/ Trade receivable related parties, other receivables
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas/ Placement of cash and cash equivalents
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Rakyat Indonesia")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas/ Placement of cash and cash equivalents
PT Bank BNI Syariah ("BNI Syariah")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas/ Placement of cash and cash equivalents
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Negara Indonesia")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	Rekening bank dibatasi penggunaannya dan Penempatan kas dan setara kas/ Restricted cash in banks and placement of cash and cash equivalents
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) ("PT Pelabuhan Indonesia II")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	Pendapatan jasa supervisi enjiniring dan konstruksi/ Revenue from engineering supervision and construction
PT Angkasa Pura II (Persero) ("PT Angkasa Pura II")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	Pendapatan jasa supervisi enjiniring dan konstruksi/ Revenue from engineering supervision and construction
PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("PT Waskita Karya")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	Pendapatan jasa supervisi enjiniring dan konstruksi/ Revenue from engineering supervision and construction
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("PT Wijaya Karya")	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	Pendapatan jasa supervisi enjiniring dan konstruksi/ Revenue from engineering supervision and construction

26. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
Nature of relationships with related parties

- The Government of the Republic of Indonesia is the stockholder of PLN and the State-Owned Enterprises (BUMN).
- PLN and Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) are the stockholders of the Company.
- PT Indonesia Power (IP), PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam), PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), PT PLN Gas and Geothermal (PLN Gas and Geothermal), PT Haleyora Power (HP) and PT Indonesia Comnets Plus (ICON) Plus are companies that have the same principal stockholder and/or management as the Company.
- The members of the Board of Commissioners and Directors are the key management personnel of the Company.

Transaction with related parties

Below is the list of related parties with which the Group has transactions:



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/51 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

26. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transaction with related parties (continued)

	Catatan/ Notes	2020		2019		
		Rp	%*)	Rp	%*)	
Kas dan setara kas	6					Cash and cash equivalents
Bank Mandiri		175,982	15.13%	87,622	7.51%	Bank Mandiri
Bank Negara Indonesia		108,902	9.36%	111,959	9.60%	Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia		31,139	2.68%	13,935	1.19%	Bank Rakyat Indonesia
BNI Syariah		10,000	0.86%	10,000	0.86%	Bank Syariah Indonesia
Subjumlah		<u>326,023</u>	<u>28.03%</u>	<u>223,516</u>	<u>19.16%</u>	Subtotal
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	7					Restricted cash in bank
Bank Negara Indonesia		9,047	0.77%	6,189	0.53%	Bank Negara Indonesia
Subjumlah		<u>9,047</u>	<u>0.77%</u>	<u>6,189</u>	<u>0.53%</u>	Subtotal
Piutang lain-lain						Other receivables
PLN		7,657	0.64%	-	-	PLN
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia		-	-	11,000	0.93%	PT Crompton Prima Switchgear Indonesia
Subjumlah		<u>7,657</u>	<u>0.64%</u>	<u>11,000</u>	<u>0.93%</u>	Subtotal
Aset kontrak	10					Contract assets
PLN		199,198	17.12%	216,478	18.56%	PLN
IP		10,340	0.88%	338	0.02%	IP
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)		347	0.03%	-	-	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT Angkasa Pura II		174	0.01%	-	-	PT Angkasa Pura II
PT Wijaya Karya		-	-	48	-	PT Wijaya Karya
PLN Batam		-	-	111	0.01%	PLN Batam
PT Waskita Karya		-	-	5	-	PT Waskita Karya
Subjumlah		<u>210,059</u>	<u>18.04%</u>	<u>216,980</u>	<u>18.59%</u>	Subtotal
Uang muka dari pelanggan	16					Advances from customer
PLN		21,006	4.52%	35,393	7.12%	PLN
Utang lain-lain						Other payables
PLN		-	-	2,370	0.48%	PLN
ICON		-	-	390	0.08%	ICON
HP		-	-	2,630	0.53%	HP
Subjumlah		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,390</u>	<u>1.09%</u>	Subtotal
Liabilitas kontrak	16					Contract liabilities
PLN		133,211	28.72%	100,180	20.16%	PLN
IP		3,302	0.71%	8,555	1.72%	IP
PLN Gas dan Geothermal		120	0.03%	1,415	0.28%	PLN Gas and Geothermal
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia		-	-	1,356	0.27%	PT Crompton Prima Switchgear Indonesia
PT Pelabuhan Indonesia II		-	-	347	0.07%	PT Pelabuhan Indonesia II
PT Angkasa Pura II		-	-	174	0.04%	PT Angkasa Pura II
PLN Batam		-	-	130	0.03%	PLN Batam
Subjumlah		<u>136,633</u>	<u>29.46%</u>	<u>112,157</u>	<u>22.57%</u>	Subtotal
Pinjaman jangka panjang	19					Long-term loan
PLN		88,028	18.98%	120,040	24.16%	PLN
Piutang usaha	8					Trade receivables
PLN		143,602	12.35%	189,762	16.02%	PLN
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia		16,219	1.39%	9,168	0.70%	PT Crompton Prima Switchgear Indonesia
PLN Gas dan Geothermal		2,699	0.23%	2,884	0.24%	PLN Gas and Geothermal
PLN Batam		958	0.08%	1,118	0.09%	PLN Batam
PT Waskita Karya		240	0.02%	240	0.02%	PT Waskita Karya
IP		238	0.02%	1,007	0.08%	IP
Subjumlah		<u>163,956</u>	<u>14.09%</u>	<u>204,179</u>	<u>17.23%</u>	Subtotal

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan

Percentage of related total assets/liabilities/revenues *)

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/52 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)
**26. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**
Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)
Transaction with related parties (continued)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2020		31 Desember/ December 31, 2019**)		1 Januari/ January 1, 2019**)		
		Rp	%*)	Rp	%*)	Rp	%*)	
Piutang sewa pembiayaan PLN	9	241,578	20.77%	266,141	22.83%	287,980	23.34%	Finance lease receivables PLN
Pendapatan PLN	21	587,827	94.00%	943,900	96.44%	1,079,512	96.62%	Revenues PLN
PJB		12,780	2.04%	2,167	0.22%	-	-	PJB
IP		7,521	1.20%	11,750	1.20%	14,915	1.33%	IP
PT Crompton Prima Switchgear Indonesia		7,051	1.12%	10,093	1.03%	-	-	PT Crompton Prima Switchgear Indonesia
PLN Batam		4,656	0.74%	2,086	0.21%	1,799	0.16%	PLN Batam
PLN Gas dan Geothermal		3,555	0.55%	4,057	0.41%	2,887	0.26%	PLN Gas and Geothermal
PLN Batubara		-	-	-	-	431	0.04%	PLN Batubara
Jumlah		623,390	99.65%	974,053	99.51%	1,099,544	98.41%	Total

Pada 31 Desember 2020 dan 2019, Grup memberikan kompensasi kepada Komisaris dan Direksi Grup berupa gaji, fasilitas, tunjangan dan tantiem masing-masing sebesar Rp18.563 dan Rp18.024.

On December 31, 2020 and 2019, the Group provided compensation to its Commissioners and Directors, which included salaries, facilities, allowances and bonuses amounting to Rp18,563 and Rp18,024, respectively.

**27. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI
AKTIVITAS PENDANAAN**
**27. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM
FINANCING ACTIVITIES**

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

The table below details the changes in the Group's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. The liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or those for which future cash flows will be, classified in the Group's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

	2020			
	Saldo awal/ Beginning balance	Arus kas/ Cash flow	Saldo akhir/ Ending balance	
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Pinjaman jangka panjang	120,040	(32,012)	88,028	Long-term loan
Liabilitas sewa	34,080	(25,226)	8,854	Lease liabilities
	2019			
	Saldo awal/ Beginning balance	Arus kas/ Cash flow	Saldo akhir/ Ending balance	
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Pinjaman jangka panjang	152,052	(32,012)	120,040	Long-term loan

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan

**) Disajikan kembali (lihat Catatan 33)

Percentage of related total assets/liabilities/revenues *)

As restated (refer to Note 33) **)



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/53 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. IKATAN DAN KONTIJENSI

Pada tanggal 6 Maret 2017, Grup dan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah 1 ("UIP JBT 1") melakukan kerjasama untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Desain dan Konstruksi dan *Quality Assurance & Quality Control* ("QA/QC") Pembangunan Muara Tawar Combined Cycle Power Plant Block 2,3&4 Add-on Project dengan nilai kontrak sebesar Rp120.239. Jangka waktu kontrak selama 24 bulan dari tanggal mulai kerjasama kontrak.

Pada tanggal 19 Februari 2019 terdapat addendum atas kontrak yang menerangkan bahwa pemilik pekerjaan berubah dari UIP JBT I menjadi PT Pembangunan Jawa Bali, dibentuk konsorsium antara Grup dengan PT Rekadaya ElektriKA Consult ("REC"), dimana Grup melaksanakan lingkup pekerjaan Supervisi Konstruksi dengan nilai kontrak Rp69.621 dan REC melaksanakan lingkup pekerjaan Supervisi Desain dan QA/QC dengan nilai kontrak Rp50.618.

Pada tanggal 16 November 2018, Grup dan PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I ("UIP JBT I") melakukan kerjasama untuk 2 (dua) kontrak pekerjaan proyek PLTA Upper Cisokan. Pekerjaan pertama adalah Jasa Konsultansi *Management Team* PLTA Upper Cisokan dengan nilai kontrak sebesar Rp112.298. Jangka waktu kontrak selama 72 bulan dari tanggal mulai kerjasama kontrak. Pekerjaan kedua adalah Jasa Konsultansi *Update* Desain, Supervisi Desain, dan Supervisi Konstruksi PLTA Upper Cisokan *Pumped Storage*, kapasitas (4x260 MW) dengan nilai kontrak sebesar Rp301.504. Jangka waktu kontrak selama 73 bulan dari tanggal mulai kerjasama kontrak.

29. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

28. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

On March 6, 2017, the Group and Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah 1 ("UIP JBT 1") entered into a partnership for Design Supervision Consultancy Services, Construction and Quality Assurance & Quality Control ("QA/QC") for the Construction of Muara Tawar Combined Cycle Power Plant Block 2.3 & 4 Add-ons Project with a contract value of Rp120,239. The contract period lasted 24 months from the start date of the contract collaboration.

On February 19, 2019, there was an addendum to the contract explaining that the owner of the work had changed from UIP JBT I to PT Pembangunan Jawa Bali, and a consortium was formed between the Group and PT Rekadaya ElektriKA Consult ("REC") whereby the Group carried out the full scope of the construction supervision work with a contract value of Rp69,621 and REC carried out the full scope of the Design Supervision and QA/QC with a contract value of Rp50,618.

On November 16, 2018, the Group and PLN Central Java I Generation Main Unit ("UIP JBT I") collaborated for 2 (two) contracts for the Upper Cisokan Hydroelectric Power Plant Project. The first job was the Upper Cisokan Hydroelectric Power Management Consultation Services Team with a contract value of Rp112,298. The contract period was 72 months from the start date of the contract. The second job comprised the Consultant Service Update Design, Design Supervision and Construction Supervision of the Upper Cisokan Pumped Storage with a capacity of 4x260 MW and PLTA a contract value of Rp301,504. The contract period was 73 months from the start date of the contract.

29. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY

As of December 31, 2020 and 2019 the Group has assets and liabilities denominated in foreign currency as follows:

2020					
	US\$ dalam jumlah penuh/ (in full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	CNY	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
Aset moneter					Monetary assets
Kas dan setara kas	864,611	12,195	-	-	Cash and cash equivalents
Liabilitas moneter					Monetary liabilities
Utang usaha	(36,356)	(513)	(2,490,000)	(5,382)	Trade payables
Jumlah bersih	828,255	11,682	(2,490,000)	(5,832)	Total net
2019					
	US\$ dalam jumlah penuh/ (in full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	CNY	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
Aset moneter					Monetary assets
Kas dan setara kas	483,846	6,726	-	-	Cash and cash equivalents
Liabilitas moneter					Monetary liabilities
Utang usaha	(638,395)	(8,874)	(2,490,000)	(4,958)	Trade payables
Jumlah bersih	(154,549)	(2,148)	(2,490,000)	(4,958)	Total net

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/54 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan
30. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT
a. Categories and classes of financial instrument

2020					
<u>Klasifikasi instrumen keuangan/Financial instrument classification</u>					
<u>Aset keuangan/ Financial assets</u>					
<u>Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets measured at amortised costs</u>	<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya Financial assets measured at fair value through other comprehensive income</u>	<u>Liabilitas keuangan/ Financial liabilities</u>	<u>Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities measured at amortised cost</u>	<u>Jumlah instrumen keuangan/ Total financial instruments</u>	
Aset Keuangan					
<u>Aset keuangan lancar</u>					
Kas dan setara kas	338,591	-	-	338,591	<u>Cash and cash equivalents</u>
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya - lancar	2,858	-	-	2,858	<u>Restricted cash in bank - current</u>
Piutang usaha	159,060	-	-	159,060	<u>Trade receivables</u>
Piutang lain - lain	12,435	-	-	12,435	<u>Other receivables</u>
Jumlah aset keuangan lancar	512,944	-	-	512,944	Total current financial assets
<u>Aset keuangan tidak lancar</u>					
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya - tidak lancar	23,128	-	-	23,128	<u>Restricted cash in bank - non-current</u>
Aset tidak lancar lainnya	-	16,081	-	16,081	<u>Other non-current assets</u>
Jumlah aset keuangan tidak lancar	23,128	16,081	-	39,209	Total non-current financial assets
Jumlah Aset Keuangan	536,072	16,081	-	552,153	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan					
<u>Liabilitas keuangan jangka pendek</u>					
Utang usaha	-	-	103,490	103,490	<u>Trade payables</u>
Utang lain-lain	-	-	8,977	8,977	<u>Other payables</u>
Biaya masih harus dibayar	-	-	17,960	17,960	<u>Accrued expenses</u>
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	32,978	32,978	<u>Current maturity of long-term loan</u>
Jumlah liabilitas keuangan jangka pendek	-	-	163,405	163,405	Total current financial liabilities
<u>Liabilitas keuangan jangka panjang</u>					
Utang lain-lain	-	-	142	142	<u>Other payables</u>
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	55,050	55,050	<u>Long-term loan - net of current maturity</u>
Jumlah liabilitas keuangan jangka panjang	-	-	55,192	55,192	Total non-current financial liabilities
Jumlah Liabilitas Keuangan	-	-	218,597	218,597	Total Financial Liabilities



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/55 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)30. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
MANAGEMENT (continued)a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan
(lanjutan)a. Categories and classes of financial instrument
(continued)

	2019				
	Klasifikasi instrumen keuangan/Financial instrument classification				
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan/ Financial assets		Liabilitas keuangan/ Financial liabilities		Jumlah instrumen keuangan/ Total financial instruments
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Tersedia untuk dijual/ Available for sale	Liabilitas keuangan/ Financial liabilities diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities measured at amortised cost		
Aset Keuangan					Financial Assets
<u>Aset keuangan lancar</u>					<u>Current financial assets</u>
Kas dan setara kas	226,822	-	-	226,822	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya - lancar	6,379	-	-	6,379	Restricted cash in bank - current
Piutang usaha	204,548	-	-	204,548	Trade receivables
Piutang lain - lain	27,632	-	-	27,632	Other receivables
Jumlah aset keuangan lancar	465,381	-	-	465,381	Total current financial assets
<u>Aset keuangan tidak lancar</u>					<u>Non-current financial assets</u>
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya - tidak lancar	16,749	-	-	16,749	Restricted cash in bank - non-current
Aset tidak lancar lainnya	-	67	-	67	Other non-current assets
Jumlah aset keuangan tidak lancar	16,749	67	-	16,816	Total non-current financial assets
Jumlah Aset Keuangan	482,130	67	-	482,197	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
<u>Liabilitas keuangan jangka pendek</u>					<u>Current financial liabilities</u>
Utang usaha	-	-	134,096	134,096	Trade payables
Utang lain-lain	-	-	5,472	5,472	Other payables
Biaya masih harus dibayar	-	-	20,971	20,971	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	32,978	32,978	Current maturity of long-term loan
Jumlah liabilitas keuangan jangka pendek	-	-	193,517	193,517	Total current financial liabilities
<u>Liabilitas keuangan jangka panjang</u>					<u>Non-current financial liabilities</u>
Utang lain-lain	-	-	156	156	Other payables
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	87,062	87,062	Long-term loan - net of current maturity
Jumlah liabilitas keuangan jangka panjang	-	-	87,218	87,218	Total non-current financial liabilities
Jumlah Liabilitas Keuangan	-	-	280,735	280,735	Total Financial Liabilities

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko keuangan, antara lain risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Grup beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Direksi.

b. Financial risk management objectives and policies

The objective and policies of the Group's financial risk management is to ensure that adequate financial resources are available for the operation and development of its business while managing the Group's exposure to financial risks, which comprise market risk (including foreign currency risk and interest-rate risk), credit risk and liquidity risk. The Group operates within a defined policy approved by the Directors.

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/56 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**30. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**
**b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan
(lanjutan)**
i. Manajemen risiko mata uang asing

Grup melakukan sejumlah transaksi dalam mata uang asing. Akibatnya, timbul eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Kebijakan Grup adalah untuk menjaga risiko mata uang asing dalam batas yang dapat diterima.

Jumlah eksposur mata uang asing bersih Grup pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 29.

Grup tidak melakukan lindung nilai atas eksposur nilai tukar mata uang asing. Untuk mengelola eksposur atas nilai tukar mata uang asing tersebut, kebijakan Grup untuk memastikan bahwa total eksposur tetap pada batas yang dapat diterima adalah dengan menjual atau membeli valuta asing dengan kurs spot saat diperlukan untuk mengatasi ketidak seimbangan jangka pendek.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika Rupiah menguat/(melemah) sebesar 10% terhadap USD dengan seluruh variabel lain konstan, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan lebih rendah/(tinggi) sebesar Rp41 (2019: Rp533), terutama diakibatkan keuntungan/(kerugian) dari penjabaran kas dan setara kas, piutang usaha dan utang usaha. Dampak terhadap ekuitas sama dengan dampak terhadap laba sebelum pajak tahun berjalan.

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga Grup timbul dari pinjaman jangka panjang. Risiko tingkat suku bunga dari kas tidak signifikan.

Pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Grup terhadap risiko nilai wajar suku bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2020, pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap berkaitan dengan pinjaman jangka panjang (Catatan 19). Grup tidak mempunyai pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap yang diukur dengan nilai wajar melalui laporan laba rugi. Oleh karena itu, perubahan tingkat suku bunga pada tanggal pelaporan tidak akan mempengaruhi laporan laba rugi.

**30. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
MANAGEMENT (continued)**
**b. Financial risk management objectives and policies
(continued)**
i. Foreign currency risk management

The Group undertakes many transactions denominated in foreign currencies. Consequently, there are exposures to exchange rate fluctuations. The Group's policy is to maintain foreign currency exposure within acceptable limits.

The Group's net foreign currency exposure as of the reporting date is disclosed in Note 29.

The Group does not hedge its foreign currency exposure. To manage their foreign currency exposure, the Company's and subsidiary's policy is to ensure that their net exposure is kept to an acceptable level by buying or selling foreign currencies at spot rates when necessary to address short-term imbalances.

As at December 31, 2020, if Rupiah had appreciated/(depreciated) by 10% against USD with all other variables held constant, total comprehensive income for the year would have been Rp41 lower/(higher) (2019: Rp533) mainly as a result of foreign exchange gains/(losses) on the translation of cash and cash equivalents, trade receivables and trade payables. The impact on equity would have been the same as the impact on post-tax profit for the year.

ii. Interest rate risk management

The Group interest rate risk arises from long-term loans. The interest rate risk from cash is not significant.

Fixed rate loans expose the Group to fair value interest rate risk.

As at December 31, 2020, the Group had a fixed rate long-term loan (Note 19). The Group does not account for any fixed rate loan at fair value through profit or loss. Therefore, a change in interest rates at the reporting date would not affect profit or loss.



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/57 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan
(lanjutan)

iii. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kontraktual yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan kepada Grup. Risiko ini lebih disebabkan oleh pembayaran pelanggan yang tidak tepat waktu dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Upaya-upaya pengelolaan risiko dilaksanakan dengan penjadwalan ulang atas pembayaran pelanggan. Sebagai entitas yang dapat digolongkan dalam infrastruktur, dalam meminimalkan risiko tidak tertagihnya piutang.

Grup melakukan pendekatan persuasif kepada pelanggan, jika pelanggan tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan, Grup akan mengirimkan surat pemberitahuan kembali ke pelanggan untuk melakukan pembayaran.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit.

Pelanggan Grup terdiri dari pihak berelasi. Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, PLN memiliki kontribusi 99,68% dan 99,52 % masing-masing dari jumlah penjualan bersih. Manajemen berkeyakinan bahwa risiko kredit terbatas karena tidak pernah ada kegagalan kredit dari PLN.

Kualitas kredit aset keuangan

Tabel di bawah ini menunjukkan kualitas aset keuangan Grup:

	2020		Jumlah/ Total	
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired		
Kas dan setara kas	338,591	-	338,591	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	25,986	-	25,986	Restricted cash in banks
Piutang usaha - bersih	138,923	20,137	159,060	Trade receivables - net
Piutang lain-lain	12,435	-	12,435	Other receivables
Jumlah	515,935	20,137	536,072	Total
	2019		Jumlah/ Total	
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired		
Kas dan setara kas	226,822	-	226,822	Cash and cash equivalents
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	23,128	-	23,128	Restricted cash in banks
Piutang usaha - bersih	200,407	4,141	204,548	Trade receivables - net
Piutang lain-lain	27,632	-	27,632	Other receivables
Jumlah	477,989	4,141	482,130	Total

30. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
MANAGEMENT (continued)b. Financial risk management objectives and policies
(continued)

iii. Credit risk management

Credit risk arises from the risk that counterparties will default on their contractual obligations resulting in financial loss to the Group. This risk is caused mostly by customers who do not pay on time and delays in the completion of the Group's work. The risk-management efforts undertaken comprise the rescheduling of customer payments. As an entity that can be classified as undertaking work in public infrastructure, the Group minimises its risk of uncollectible receivables.

The Group takes a persuasive approach in regard to the payments of its customers; if the customer does not pay at the time that has been determined, the Group will send a notice back to the customer to make a payment.

The carrying value of financial assets on the financial statements net of an allowance for losses reflects the Company's and subsidiary's exposure to credit risk.

The Group's customers consist of related parties. For the years ended December 31, 2020 and 2019, PLN accounted for 99.68% and 99.52% of the total net sales, respectively. Management believes that the credit risk is limited because there has been no credit default from PLN.

Credit quality of financial assets

The table below shows the quality of the Company's and subsidiary's financial assets:

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/58 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**30. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**
**b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan
(lanjutan)**
iii. Manajemen risiko kredit (lanjutan)

Aset keuangan tertentu dinilai secara individu untuk penurunan nilai dan jika ditemukan terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diterapkan secara individu.

Tabel di atas termasuk aset keuangan yang mana penurunan nilainya dilakukan secara kolektif. Tidak praktis untuk mengidentifikasi penurunan nilai aset keuangan tersebut secara individu dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik risiko yang sama dimana penurunan nilainya dilakukan secara kolektif.

iv. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Grup akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Dewan Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka Panjang Grup. Grup mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan kas dan simpanan dengan terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas dan mencocokkan profil jatuh tempo liabilitas keuangan.

Selanjutnya Grup juga memelihara kecukupan dana dengan cara mempertahankan kecukupan jumlah kas dan setara kas dan investasi jangka pendek yang mudah dikonversi menjadi uang tunai ketika mengalami gangguan yang tak terduga dari penagihan kas.

Tabel berikut ini memberikan rincian jatuh tempo kontraktual Grup untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati pada periode 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020				Jumlah/ Total
	Dalam satu tahun/ Within one year	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ Over one year but not longer than three years	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ Over three years but not longer than five years	Lebih dari lima tahun/ More than five years	
Liabilitas Keuangan					
Utang usaha	103,490	-	-	-	103,490
Utang lain-lain	8,977	142	-	-	9,119
Biaya yang masih harus dibayar	53,779	-	-	-	53,779
Pinjaman jangka panjang	41,036	61,828	-	-	102,864
Liabilitas sewa	8,932	1,084	-	-	8,854
Jumlah	216,214	63,054	-	-	278,106

Financial Liabilities
Trade payables
Other payables

 Accrued expenses
Long-term loan
Lease liabilities

Total

**30. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
MANAGEMENT (continued)**
**b. Financial risk management objectives and policies
(continued)**
iii. Credit risk management (continued)

Certain financial assets are individually assessed for impairment and if found to be impaired, have impairment loss assigned to them on an individual basis.

The table above includes financial assets that have been assessed for collective impairment. It is not practicable to individually identify impaired financial assets within portfolios of financial assets with similar risk characteristics which are collectively assessed for impairment.

iv. Liquidity risk management

Liquidity risk is defined as the risk that the Group will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the Board of Directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short-, medium- and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate cash and reserves by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial liabilities.

Furthermore, the Group maintains an adequate amount of cash, cash equivalents and short-term investments, which may be readily converted to cash upon any unforeseen interruption of its cash collections.

The following table details the Group remaining contractual maturities for its financial liabilities with an agreed repayment period as of December 31, 2020 and 2019:



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/59 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan
(lanjutan)

iv. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

30. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
MANAGEMENT (continued)b. Financial risk management objectives and policies
(continued)

iv. Liquidity risk management (continued)

	2019				Jumlah/ Total	
	Dalam satu tahun/ Within one year	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ Over one year but not longer than three years	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ Over three years but not longer than five years	Lebih dari lima tahun/ More than five years		
Liabilitas Keuangan						Financial Liabilities
Utang usaha	134,096	-	-	-	134,096	Trade payables
Utang lain-lain	5,472	156	-	-	5,628	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	54,645	-	-	-	54,645	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang	46,102	78,559	24,488	-	149,149	Long-term loan
Jumlah	240,315	78,715	24,488	-	343,518	Total

Tabel tersebut telah disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan tanggal jatuh tempo kontraktual, yaitu paling awal dimana Grup diwajibkan untuk membayar. Untuk liabilitas keuangan yang didenominasi dengan mata uang asing, jumlah yang tidak didiskontokan ditranslasi dengan kurva nilai tukar *forward* yang relevan pada akhir periode pelaporan.

Nilai wajar instrumen keuangan

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat mendekati nilai wajarnya baik karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau mempunyai tingkat suku bunga pasar.

v. Manajemen risiko modal

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Grup terdiri dari ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal saham (Catatan 20) dan saldo laba.

Direksi Grup secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Grup berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Grup. Oleh karena itu, kebijakan Grup dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

The table has been drawn up based on the undiscounted cash flow of financial liabilities based on the date of contractual maturity, which is the earliest date on which the Group can be required to pay. For financial liabilities denominated in a foreign currency, the undiscounted amortisation is translated using the relevant forward exchange curve at the end of the reporting period.

Fair value of financial instruments

Management considers that the carrying amounts of the recorded financial assets and financial liabilities approximate their fair values either because of their short-term maturities or because they carry a market interest rate.

v. Capital risk management

The Group manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with the covenants of the capital adequacy ratio. The Group's capital structure consists of equity shareholders, capital stock (Note 20), and retained earnings.

The Directors of the Group periodically review the Company's capital structure. As part of this review, the Directors consider the cost of capital and related risks.

The Group seeks to minimise the cost of capital in order to maximise its value. Therefore, the Group has a policy of seeking funding in which it always takes into account the financial risk that may arise in the future.

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/60 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**30. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**
**b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan
(lanjutan)**
v. Manajemen risiko modal (lanjutan)

Rasio utang terhadap ekuitas dan rasio pengembalian utang pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Jumlah liabilitas	463,761	496,947
Jumlah ekuitas	<u>699,452</u>	<u>669,010</u>
Rasio utang terhadap ekuitas	<u>0.66</u>	<u>0.74</u>

31. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Catatan ini menjelaskan dampak penerapan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan", PSAK No. 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" dan PSAK No. 73 "Sewa" pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

Penerapan PSAK No. 71 mengubah pendekatan perhitungan penurunan nilai untuk aset keuangan dari metode kerugian yang telah terjadi di PSAK No. 55 menjadi pendekatan kerugian kredit ekspektasian (KKE) di PSAK No. 71. Berdasarkan standar baru ini, Grup harus membentuk cadangan kerugian penurunan nilai untuk aset keuangan perusahaan berdasarkan informasi yang wajar dan didukung mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan kondisi ekonomi masa depan. Perubahan pendekatan dalam perhitungan penurunan nilai ini berdampak pada nilai tercatat aset keuangan Grup.

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan

Berdasarkan hasil kajian Grup dengan menggunakan kedua kriteria tersebut, tidak terdapat dampak perubahan signifikan terhadap klasifikasi dan pengukuran aset keuangan Grup. Seluruh aset keuangan Grup yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang yang diberikan menurut PSAK No. 55: Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran berubah menjadi kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi sesuai PSAK No. 71. Karena sebelumnya aset keuangan tersebut telah diukur pada biaya perolehan diamortisasi, maka pengukuran aset keuangan tersebut tidak perlu disesuaikan.

**30. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL RISK
MANAGEMENT (continued)**
**b. Financial risk management objectives and policies
(continued)**
v. Capital risk management (continued)

The debt to equity ratios and debt service coverage ratios as at December 31, 2020 and 2019 were as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total liabilities	463,761	496,947
Total equity	<u>699,452</u>	<u>669,010</u>
Debt to equity ratio	<u>0.66</u>	<u>0.74</u>

31. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

This note explains the impact of the adoption of SFAS No. 71 "Financial Instruments", SFAS No. 72 "Revenue from Contracts with Customers" and SFAS No. 73 "Leases" on the Group's consolidated financial statements.

SFAS No. 71 "Financial Instrument"

The implementation of SFAS No. 71 changes the approach of financial asset impairment modelling from the incurred loss approach of SFAS No. 55 to expected credit loss (ECL). Based on the new standard, the Group is required to calculate an allowance for credit losses by considering any information related to past events, current events, and future economic conditions. This change in the method used for the calculation of financial asset impairment has a reasonable impact on the carrying amount of the Group's financial assets.

Financial asset classification and measurement

Based on the Group's review, which used the criteria of both SFAS No. 55 and SFAS No. 71, there is a significant impact on the classification and measurement of the Group's financial assets. The Group's financial assets, which were previously classified as available-for-sale under SFAS No. 55, are now classified as financial assets measured subsequently at fair value through other comprehensive income under SFAS No. 71.



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/61 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan" (lanjutan)**Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan (lanjutan)

Penerapan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan" sejak 1 Januari 2020 mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangan

Total dampak pada laba ditahan Grup pada 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

	Rp
Saldo laba awal pembukaan - PSAK No. 55, setelah penyajian kembali	669,010
Penyesuaian laba ditahan dari penerapan PSAK No. 71	<u>13,678</u>
Saldo awal laba ditahan - PSAK No. 71	<u>682,688</u>

Pada tanggal 1 Januari 2020, manajemen Grup telah menilai model bisnis mana yang berlaku untuk aset keuangan yang dimiliki Grup dan telah mengklasifikasikan instrumen keuangannya ke dalam kategori PSAK No. 71 yang sesuai. Efek utama yang dihasilkan dari reklasifikasi ini adalah sebagai berikut:

	Catatan/ Notes	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya/ FVOCI
Saldo awal - PSAK No. 55		67
Klasifikasi ulang ekuitas non-perdagangan dari tersedia untuk dijual ke nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(a)	<u>13,678</u>
Saldo awal - PSAK No. 71		<u>13,745</u>

(a) Investasi ekuitas sebelumnya diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Grup memilih untuk menyajikan perubahan nilai wajar semua investasi ekuitasnya yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dalam penghasilan komprehensif lain, karena investasi ini dimiliki sebagai investasi strategis jangka panjang yang tidak diperkirakan untuk dijual dalam jangka pendek hingga menengah.

Pada tanggal penerapan awal, 1 Januari 2020, instrumen keuangan Grup adalah sebagai berikut, dengan setiap reklasifikasi mencatat:

31. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES (continued)**SFAS No. 71 "Financial Instruments" (continued)**Financial asset classification and measurement (continued)

The adoption of SFAS No. 71 from January 1, 2020 resulted in changes in the accounting policies used and adjustments to the amounts recognised in the financial statements.

The total impact on the Group's retained earnings as at January 1, 2020 was as follows:

Opening retained earnings - SFAS No. 55 after restatement	669,010
Adjustment to retained earnings from adoption of SFAS No. 71	<u>13,678</u>
Opening retained earnings - SFAS No. 71	<u>682,688</u>

On January 1, 2020, the Group's management assessed which business models applied to the financial assets held by the Group and classified its financial instruments into the appropriate SFAS No. 71 categories. The main effects resulting from this reclassification were as follows:

	Catatan/ Notes	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya/ FVOCI
Opening balance - SFAS No. 55		67
Reclassified non-trading equities from AFS to FVOCI	(a)	<u>13,678</u>
Opening balance - SFAS No. 71		<u>13,745</u>

(a) Equity investments were previously classified as available-for-sale. The Group elected to present in OCI changes in the fair value of all its equity investments previously classified as available-for-sale because these investments are held as long term strategic investments that are not expected to be sold in the short to medium term.

On the date of initial application, January 1, 2020, the financial instruments of the Group were as follows, with any reclassifications noted:

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/62 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
PSAK No. 71 “Instrumen Keuangan” (lanjutan)
Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan (lanjutan)

	<u>Kategori pengukuran/Measurement category</u>		<u>Jumlah yang dicatat/Carrying amount</u>			
	<u>Asli (PSAK No. 55)/ Original (SFAS No. 55)</u>	<u>Baru (PSAK No. 71)/ New (SFAS No. 71)</u>	<u>Asli/ Original</u>	<u>Baru/ New</u>	<u>Selisih/ Difference</u>	
Kas dan setara kas	Biaya perolehan diamortisasi/Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortised cost</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortised cost</i>	338,591	338,591	-	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	Biaya perolehan diamortisasi/Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortised cost</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortised cost</i>	159,060	159,060	-	Trade receivables
Rekening bank dibatasi penggunaannya	Biaya perolehan diamortisasi/Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortised cost</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortised cost</i>	25,986	25,986	-	Restricted cash in banks
Piutang lain-lain	Biaya perolehan diamortisasi/Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortised cost</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortised cost</i>	12,435	12,435	-	Other receivables
Aset tidak lancar lainnya	Tersedia untuk dijual/ <i>Available for sale</i>	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ <i>Fair value through other comprehensive income</i>	67	13,745	13,678	Other non-current assets

Penurunan nilai aset keuangan

Grup memiliki empat jenis aset keuangan yang merujuk pada model kerugian kredit diharapkan yang baru dari PSAK No. 71:

- Kas dan setara kas
- Piutang usaha
- Rekening bank dibatasi penggunaannya
- Piutang lain-lain

Grup diwajibkan untuk merevisi metodologi penurunan nilai berdasarkan PSAK No. 71 untuk masing-masing kelompok aset tersebut.

PSAK No. 72 “Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan”

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Grup terhadap kontrak pendapatan dengan mengacu 5 (lima) tahapan yang ada di dalam PSAK No. 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap pendapatan Grup sehingga tidak memerlukan penyesuaian di saldo awal 1 Januari 2020.

PSAK No. 73 “Sewa”

Berikut ini informasi lebih lanjut mengenai dampak penerapan PSAK No. 73: Sewa pada Grup.

(i) Pengukuran kembali sewa

	2020
Komitmen sewa operasi diungkapkan pada tanggal 31 Desember 2019	68,687
Didiskontokan menggunakan suku bunga pinjaman tambahan lessee pada tanggal penerapan awal	39,203
Dikurangi: sewa jangka pendek tidak diakui sebagai liabilitas	(4,992)
Dikurangi: sewa bernilai rendah tidak diakui sebagai liabilitas	(131)
Liabilitas sewa diakui pada tanggal 1 Januari 2020	<u>34,080</u>

31. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES (continued)
SFAS No. 71 “Financial Instruments” (continued)
Financial asset classification and measurement (continued)
Impairment of financial assets

The Group has four types of financial assets that are subject to SFAS No. 71’s new expected credit loss model:

- Cash and cash equivalents
- Trade receivables
- Restricted cash in banks
- Other receivables

The Group was required to revise its impairment methodology under SFAS No. 71 for each of these classes of asset.

SFAS No. 72 “Revenue from Contracts with Customers”

Based on the Group’s review on the revenue contracts that referred to the 5 (five)-step model of revenue recognition in SFAS No. 72: Revenue from Contracts with Customers, there was no significant impact on the Group’s revenue recognition so there was no impact to the beginning balance retained earnings as at January 1, 2020.

SFAS No. 73 “Leases”

The following table details the impact of SFAS No. 73: Leases on the Group.

(i) Measurement of lease liabilities

Operating lease commitments disclosed at December 31, 2019	68,687
Discounted using the lessee’s incremental borrowing rate at the date of initial application	39,203
Less: short-term leases not recognised as a liability	(4,992)
Less: low-value leases not recognised as a liability	(131)
Lease liabilities recognised as at January 1, 2020	<u>34,080</u>



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY

Lampiran 5/63 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**PSAK No. 73 "Sewa" (lanjutan)**

(ii) Pengukuran aset hak guna usaha

Aset hak guna diukur sebesar jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran sewa yang dibayar di muka atau yang masih harus dibayar terkait sewa tersebut yang diakui di neraca pada tanggal 31 Desember 2019.

Penyesuaian diakui di neraca pada 1 Januari 2020.

(iii) Akuntansi pemberi sewa

Grup tidak perlu melakukan penyesuaian apapun terhadap akuntansi untuk aset yang dimiliki sebagai pemberi sewa dalam sewa operasi sebagai akibat dari penerapan PSAK No. 73.

31. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES (continued)**SFAS No. 73 "Leases" (continued)**

(ii) Measurement of right-of-use assets

Right-of-use assets were measured at the amount equal to the lease liability, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments relating to leases recognised in the balance sheet as at December 31, 2019.

Adjustments were recognised in the balance sheet on January 1, 2020.

(iii) Lessor accounting

The Group did not need to make any adjustments to the accounting for the assets it held as lessor under operating leases as a result of the adoption of SFAS No. 73.

32. REKLASIFIKASI

Laporan keuangan konsolidasian 2019 telah direklasifikasi agar konsisten dengan presentasi laporan keuangan 2020. Rincian akun-akun yang direklasifikasi adalah sebagai berikut:

32. RECLASSIFICATION

The 2019 consolidated financial statements have been reclassified to be consistent with the presentation of the 2020 financial statements. The details of the accounts being reclassified are as follows:

	Sebelum reklasifikasi/ Before <u>reclassification</u>	Reklasifikasi/ <u>Reclassifications</u>	Setelah reklasifikasi/ After <u>reclassification</u>	
Laporan posisi keuangan				Statement of financial position
Aset lancar				Current assets
Biaya dibayar di muka dan uang muka	51,994	(8,712)	43,282	Prepaid advances and advances
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	23,128	(16,749)	6,379	Restricted cash in bank
Aset tidak lancar				Non-current assets
Biaya dibayar di muka dan uang muka	-	8,712	8,712	Prepaid advances and advances
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	-	16,749	16,749	Restricted cash in bank
Investasi pada ventura bersama	13,426	300	13,726	Investment in joint ventures
Aset tidak lancar lainnya	17,040	(300)	16,740	Other non-current assets
Liabilitas lancar				Current liabilities
Liabilitas imbalan pascakerja	-	673	673	Post-employment benefit obligation
Liabilitas tidak lancar				Non-current liabilities
Liabilitas imbalan pascakerja	18,760	(673)	18,087	Post-employment benefit obligation
Laporan arus kas				Statement of cash flows
Arus kas dari aktivitas operasi	40,985	(15,794)	25,191	Cash flows from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi	(3,781)	150	(3,631)	Cash flows from investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan	(129,696)	15,644	(114,052)	Cash flows from financing activities

Reklasifikasi di atas tidak memiliki pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian tahun sebelumnya atau laporan posisi keuangan konsolidasian awal tahun sebelumnya sehingga manajemen berkeyakinan bahwa penyajian laporan posisi keuangan konsolidasian ketiga tidak diperlukan.

The reclassifications above do not have a material effect on the prior year consolidated financial statements or the consolidated statement of financial position as at the beginning of the preceding year and therefore management believes that the presentation of a third consolidated statement of financial position is not required.

PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/64 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**33. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, manajemen mempertimbangkan ulang interpretasi atas fakta, keadaan, dan perlakuan akuntansi yang relevan dan memutuskan bahwa penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan pada tanggal 1 Januari 2019 diperlukan dikarenakan hal-hal berikut ini:

Penerapan PSAK 30: Sewa atas Perjanjian Penyediaan Jasa Pre-treatment Gas dan CNG (Kompresi Gas) untuk Keperluan Pembangkit Peaker di Bangkanai, Kalimantan Tengah

Pada tahun 2017, Perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan PT PLN (Persero) untuk penyediaan jasa kompresi gas (CNG) di Bangkanai. Aset yang dibangun untuk penyediaan jasa kompresi gas tersebut dicatat sebagai aset tetap Grup. Dengan mempertimbangkan kembali fakta dan perjanjian, Grup seharusnya menerapkan PSAK 30: Sewa atas perjanjian tersebut dan mengakui piutang sewa pembiayaan atas perjanjian tersebut. Oleh karena itu, manajemen memutuskan untuk menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019 dan awal periode sajian komparasi 1 Januari 2019 untuk mencatat dampak tersebut. Penyesuaian ini menyebabkan penambahan saldo piutang sewa pembiayaan sebesar Rp287.950 juta, penurunan saldo laba sebesar Rp11.941 juta, dan penurunan saldo aset tetap sebesar Rp299.891 juta pada 1 Januari 2019. Penyesuaian ini juga menyebabkan penurunan saldo beban penyusutan aset tetap sebesar Rp14.876 juta dan penurunan saldo pendapatan sebesar Rp21.809 juta pada 31 Desember 2019.

Dampak penyajian kembali laporan keuangan terhadap laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan jumlah ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 dan 1 Januari 2019 diuraikan pada tabel di bawah ini.

33. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

In preparing the Group's consolidated financial statements as at and for the year ended December 31, 2020, management reconsidered the interpretation of facts, circumstances and the applicable accounting treatment and determined that the restatement of the Group's consolidated financial statement as at and for the years ended December 31, 2019 and as at January 1, 2019 was necessary due to the following:

Implementation of SFAS 30: Leases for contract Pre-treatment Gas and CNG (Gas Compression) Service Agreement for Peaker Plant in Bangkanai, Central Borneo

In 2017, the Company signed an agreement with PT PLN (Persero) for the provision of gas compression services (CNG) in Bangkanai. Assets built for the gas compression services are recorded in the Group's property, plant and equipment. With due respect to the facts and agreement, the Group should apply SFAS 30: Leases for the agreement and recognised finance lease receivables for the agreement. Therefore, management decided to restate the consolidated financial statements as at 31 December 2019 and the beginning of the comparative period, 1 January 2019 to record the impact. These adjustments has had increase of finance lease receivables of Rp287,950 million, decrease in retained earnings of Rp11,941 million, and decrease in the balance of property and equipment of Rp299,891 million on January 1, 2019. These adjustments also caused a decrease in depreciation expenses on fixed assets of Rp14,876 million and decrease of revenue of Rp21,809 million on December 31, 2019.

The effect of the restatements on net profit for the year ended December 31, 2019 and total equity as at December 31, 2019 and January 1, 2019 are set forth in the table below.

	31 Desember/ December 31, 2019	
Laba tahun berjalan, dilaporkan sebelumnya	124,947	Profit for the year, as previously stated
Penyesuaian		Adjustments
Pendapatan dari jasa kompresi gas	(21,809)	Revenue from gas compression
Beban penyusutan aset tetap	14,876	Depreciation expenses of fixed assets
Laba tahun berjalan, disajikan kembali	118,014	Profit for the year, as restated



PT PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY
Lampiran 5/66 Schedule
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

34. TRANSAKSI NON KAS
34. NON-CASH TRANSACTIONS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Penambahan aset hak guna melalui penerapan PSAK No. 73	449	-	Additions of right-of-use assets through SFAS No. 73 implementation

35. WABAH COVID-19
35. COVID-19 OUTBREAK

Sejak awal 2020, terdapat penurunan kondisi ekonomi sebagai akibat wabah COVID-19, yang sangat mempengaruhi diantaranya permintaan global atas barang dan jasa serta rantai pasokan. Manajemen telah menilai dampak dari kejadian ini terhadap kegiatan operasional Grup dan meyakini bahwa tidak ada dampak negatif yang signifikan yang perlu diperhitungkan walaupun dampak jangka panjang sulit untuk diprediksi saat ini. Manajemen akan terus memonitor hal ini dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko terkait dan ketidakpastian terkait hal tersebut di masa depan.

Since early 2020, there has been a continuing economic downturn as a result of the COVID-19 outbreak, severely affecting among others global demand for products and services and supply chains. Management has assessed the effect of the event on the Group's operations and believes that no significant adverse impact should be considered although long-term impacts are difficult to predict at this moment. Management will continue to monitor this and take the necessary actions to address related risks and uncertainties going forward.

36. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
36. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

- a. Berdasarkan keputusan Akta Notaris No. 19 tanggal 26 Februari 2021 dari Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., susunan Dewan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Based on Notarial Deed No. 19 dated February 26, 2021 from Notary Lenny Janis Ishak, S.H., the composition of the Company's Board of Directors is as follows:

<u>2021</u>		
Pelaksana Tugas Direktur Utama Direktur	Didik Sudarmadi Martono Bernadus Sudarmanta	Acting President Director Directors

Berdasarkan keputusan Akta Notaris No. 5 tanggal 9 Maret 2021 dan No. 2 tanggal 5 April 2021 dari Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., susunan Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Based on Notarial Deed No. 5 dated March 9, 2021 and No. 2 dated April 5, 2021 from Notary Lenny Janis Ishak, S.H., the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

<u>2021</u>		
Komisaris	Muhammad Rizali Karliansyah Hardiv Harris Situmeang	Commissioners

- b. Undang-Undang Cipta Kerja

- b. Job Creation Law

Pada bulan November 2020, Undang-Undang ("UU") Cipta Kerja No. 11/2020 mulai berlaku. Pada bulan Februari 2021, Pemerintah Indonesia mengesahkan sejumlah peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, khususnya terkait imbalan pascakerja.

In November 2020, Law No. 11/2020 ("Job Creation Law") became effective. In February 2021, the Government of Indonesia officially enacted several implementing regulations of the Job Creation Law, some of which were particularly related to post-employment benefits.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mengevaluasi dampak keseluruhan dari penerapan peraturan pelaksanaan tersebut terhadap aktivitas dan operasinya.

As at the completion date of these consolidated financial statements, the Group was still evaluating the overall impact of the implementing regulations on its activities and operations.

37. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN
37. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2021.

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were the responsibilities of the management. The statements were approved by the Directors and authorised for issuance on June 25, 2021.

